PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk TAHUN 2023



JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	:	27 - 31 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	31 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	1 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	2 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bioskop dan Restoran

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 31901188
Faksimili: (021) 31901144
Website: www.cinema21.co.id
Email: investor.relations@nsr.co.id

Jejaring bioskop:
Per 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 1.216 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (**"UUPT"**) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**").

Informasi selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham."

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas	**PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia**	**PT Mandiri Sekuritas**	**PT UBS Sekuritas Indonesia**

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI CINEMA XXI ADALAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ("COVID-19") YANG TELAH MENGGANGGU BISNIS CINEMA XXI DAN DAPAT TERUS MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA BIOSKOP, HASIL OPERASI, DAN LIKUIDITAS CINEMA XXI. FAKTOR RISIKO USAHA CINEMA XXI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 001/OJK/NSR/23 tanggal 10 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini rencananya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**" atau "**BEI**") sesuai dengan Surat BEI No. S-04171/ BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penjaminan Emisi Efek" dan Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal."

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN xi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xiii
RINGKASAN xiv
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 7
III. PERNYATAAN UTANG 10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 26
1. Umum 26
2. Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI 28
3. Analisis pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 36
4. Operasi per segmen 39
5. Hasil operasi 41
6. Aset, liabilitas dan ekuitas 51
7. Analisis arus kas 55
8. Likuiditas dan sumber pendanaan 56
9. Belanja modal 57
10. Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir 59
11. Perjanjian *off balance* sheet dan kontinjensi 59
12. Kebijakan akuntansi penting 60
13. Perubahaan kebijakan akuntansi penting 62
14. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tentang risiko pasar 63
15. Perkembangan terkini 65
VI. FAKTOR RISIKO 73
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 115
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 116
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 116
1. Riwayat singkat Perseroan 116
2. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan 117
3. Dokumen perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak 119
4. Perjanjian-perjanjian penting 121
5. Aset tetap yang penting 153
6. Asuransi 153
7. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI 157
8. Keterangan tentang pemegang saham pengendali 158
9. Pengurusan dan pengawasan 159
10. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) 164
11. Sumber daya manusia 171
12. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak 176

XXI

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK 177
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 180
1. Umum 180
2. Keunggulan bersaing 182
3. Strategi usaha 188
4. Visi dan misi Cinema XXI 193
5. Sejarah dan kejadian penting Cinema XXI 193
6. Segmen bisnis Cinema XXI 195
7. Penjualan, promosi dan pemasaran 214
8. Utilitas dan pengadaan bahan baku dan peralatan 219
9. Faktor musiman 220
10. Riset dan pengembangan 221
11. Persaingan 221
12. Teknologi informasi 221
13. Penghargaan 223
14. Lingkungan dan sosial 224
15. Hak atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") 228
IX. TINJAUAN INDUSTRI 232
X. PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRI 259
XI. EKUITAS 265
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN 267
XIII. PERPAJAKAN 269
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 271
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG MASAR MODAL 272
XVI. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 274
XVII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 279
1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan 279
2. Pemesan yang Berhak 280
3. Jumlah pesanan 280
4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif 280
5. Masa Penawaran Umum 281
6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham 281
7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan 282
8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham 284
9. Pengembalian uang pemesanan 285
10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan 286
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 287
XIX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 289
XX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN 307
Lampiran 387
XXI. LAPORAN TINJAUAN INDUSTRI 457

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yaitu:

(i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   (i) suami atau istri;
   (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

(ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   (i) orang tua dan anak;
   (ii) kakek dan nenek serta cucu; atau
   (iii) saudara dari orang yang bersangkutan.

(iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

(iv) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;

(v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

(vi) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

(vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Akuntan Publik"	:	berarti Kantor Akuntan Publik KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"BAE"	:	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
"CAGR"	:	berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate* atau tingkat pertumbuhan majemuk.
"*Call Option Agreement*"	:	berarti *call option agreement* tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat oleh dan antara HJB dan APN sebagai pemberi hak opsi dan Salween Investment Pte. Ltd. sebagai penerima hak opsi.
"Cinema XXI"		berarti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk dan Perusahaan Anak.
"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
"Emisi"	:	berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
"Harga Penawaran"	:	berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah).
"Hari Bursa"	:	berarti hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
"IAPI"	:	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Kemenkumham"	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Konsultan Hukum"	:	berarti Hadiputranto, Hadinoto & Partners, konsultan hukum, yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Lembaga Kliring dan Penjaminan"	:	berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/ atau penjaminan penyelesaian transaksi saham yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT Mandiri Sekuritas, salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
"Masa Penawaran Umum"	:	berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem *e-IPO*.
"Masyarakat"	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU OJK.
"Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem *e-IPO* berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
"Partisipan Sistem"	:	berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini termasuk Penjamin Emisi Efek.
"Pasar Perdana"	:	berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

"Pasar Sekunder"	:	berarti pasar di mana saham Perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	:	berarti suatu ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	:	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Partisipan Admin dan memiliki kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia.
"Penyedia Sistem *e-IPO*" atau "Penyedia Sistem"	:	berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem *e-IPO*, dalam hal ini BEI.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 7 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 15/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 3/2021"	:	berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	:	berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-019/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 April 2023 yang bermaterai cukup dan telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI**.**

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 46 tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 9 tanggal 4 April 2023 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 48 tanggal 24 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 45 tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 8 tanggal 4 April 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 89 tanggal 24 Mei 2023, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 105 tanggal 29 Mei 2023, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 32 tanggal 9 Juni 2023, dan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 43 tanggal 18 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas"	:	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip berdasarkan Surat BEI No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk.
"Perseroan"	:	berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku di Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat.
"Perusahaan Anak"	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.
"Pihak Berelasi"	:	berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan.
"PPN"	:	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

"PP No. 5/2021"	:	berarti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
"Prospektus"	:	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dalam isi dan bentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
"Prospektus Awal"	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
"Rekening Dana Nasabah" atau "RDN"	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rupiah" atau "Rp"	:	berarti mata uang Republik Indonesia.
"Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"	:	berarti rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
"Saham Baru"	:	berarti sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan, ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
"SEOJK No. 15/2020"	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
"Sistem *e-IPO*" atau "Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
"Sub Rekening Efek" atau "SRE"	:	berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan bersih Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Tanggal Distribusi.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem *e-IPO* dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
"UU Cipta Kerja"	:	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
"US$"	:	berarti Dolar Amerika Serikat.
"UU Film"	:	berarti Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
"UU Ketenagakerjaan"	:	berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
"UU OJK"	:	berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"UUP2SK"	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

"ATP"	:	berarti singkatan dari *Average Selling Price* atau harga jual rata-rata.
"*blockbuster*"	:	berarti film dengan anggaran tinggi yang dibintangi oleh aktor dan aktris populer, sehingga film ini diminati oleh banyak orang meski belum resmi tayang di bioskop.
"*Croffl*e"	:	berarti gabungan dari nama croissant dan waffle, yang dibuat dari adonan croissant yang dimasak dengan menggunakan alat mencetak waffle.
"F&B"	:	berarti makanan dan minuman.
"*gross box office*"	:	berarti pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket nonton.
"Inggris"	:	berarti Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.
"PDB"	:	berarti singkatan dari Produk Domestik Bruto, yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
"PPP"	:	berarti singkatan dari *Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli, yaitu pengukuran harga barang tertentu di berbagai negara dan digunakan untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara tersebut.
"*impression*"	:	berarti ketika pengguna melihat sebuah iklan dalam satu situs web.
"kota Tier 1"	:	berarti kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.
"kota Tier 2"	:	berarti kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Monokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
"kota Tier 3"	:	berarti kota-kota yang tidak termasuk dalam rentang PDB dan PPP per kapita kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.
"m.tix"	:	berarti sistem reservasi tiket eksklusif untuk Cinema XXI.

"m.food"	:	berarti salah satu fitur dari m.tix yang menawarkan opsi pembelian F&B secara daring.
"multipleks"	:	berarti sebuah kompleks bioskop dengan beberapa layar dalam satu komplek.
"*over-the top*"	:	berarti layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
"PPKM"	:	berarti singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yaitu salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi COVID-19.
"SKU"	:	berarti singkatan dari s*tock keeping unit*, yaitu kode unik yang diberikan kepada setiap *item* barang baik yang dibeli maupun dijual oleh suatu perusahaan.
"streaming"	:	berarti proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan.
"Survei Euromonitor*"*	:	berarti survei pasar yang dilakukan oleh Euromonitor pada bulan Januari 2023.
"Tiongkok"	:	berarti Republik Rakyat Tiongkok.
"TIX.ID"	:	berarti sistem penjualan tiket untuk berbagai jejaring bioskop, termasuk tiket bioskop Cinema XXI.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"APN"	:	berarti singkatan dari PT Adi Pratama Nusantara.
"Bank Mandiri"	:	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"BRI"	:	berarti singkatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"DBS"	:	berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
"Delta Sejahtera"	:	berarti singkatan dari PT Delta Raya Sejahtera.
"Delta Sentosa"	:	berarti singkatan dari PT Delta Raya Sentosa.
"Euromonitor"	:	berarti singkatan dari Euromonitor International Limited.
"GAP"	:	berarti singkatan dari PT Gading Adipermai.
"HJB"	:	berarti singkatan dari PT Harkatjaya Bumipersada.
"IMD"	:	berarti singkatan dari PT Intra Mandiri.
"KIR"	:	berarti singkatan dari PT Kartika Insani Raya.
"KMA"	:	berarti singkatan dari PT Kharisma Maju Abadi.
"KSR"	:	berarti singkatan dair PT Kuliner Sejahtera Raya.
"LMS"	:	berarti singkatan dari PT Lestari Mitra Sembada.
"LAS"	:	berarti singkatan dari PT Lia Anugrah Semesta.
"Megatech"	:	berarti singkatan dari PT Megatech Engineering.
"MIT"	:	berarti singkatan dari PT Multi Interbuana Teknindo.
"NES"	:	berarti singkatan dari PT Nusantara Elang Sejahtera.
"PMD"	:	berarti singkatan dari PT Prima Mandala.
"PMS"	:	berarti singkatan dari PT Pan Mitra Sembada.
"SUM"	:	berarti singkatan dari PT Sanggar Usaha Mandiri.
"SSD"	:	berarti singkatan dari PT Sekar Saridana.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th'88 tanggal 16 September 1988, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 80 tanggal 16 September 1988, dan Tambahan No. 4956/1992 ("**Akta Pendirian**").

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120**	**120.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Subentra	90	90.000.000	75,00
Harris Lasmana	30	30.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**120**	**120.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Pada tahun 1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya berdasarkan Akta No. 35 tanggal 14 Desember 1998, yang dibuat hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dalam Surat Keputusan No. C-12985.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Juli 1999 yang telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 199 tanggal 3 November 1999.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Nusantara Sejahtera Raya No. 16 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 ("**Akta Perseroan No. 16/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; (v) real estat.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 11 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan secara langsung (%)	Kepemilikan secara tidak langsung (%)
1.	PT Gading Adipermai ("**GAP**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1989	1989	70,00%	-
2.	PT Intra Mandiri ("**IMD**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1992	1992	99,99%	-
3.	PT Kartika Insani Raya ("**KIR**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	99,17%	0,83% melalui SSD
4.	PT Kharisma Maju Abadi ("**KMA**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1990	1990	70,00%	-
5.	PT Lestari Mitra Sembada ("**LMS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2000	2006	75,00%	-
6.	PT Lia Anugrah Semesta ("**LAS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1990	70,00%	-
7.	PT Nusantara Elang Sejahtera ("**NES**")	Penyedia *platform* tiket online	Jakarta Selatan	2017	2017	60,00%	-
8.	PT Prima Mandala ("**PMD**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Malang	1992	1989	-	50,00% melalui IMD
9.	PT Pan Mitra Sembada ("**PMS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	-
10.	PT Sanggar Usaha Mandiri ("**SUM**")	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	33,33% melalui SSD
11.	PT Sekar Saridana (**"SSD"**)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2016	2002	99,83%	0,17% melalui IMD

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10,0% (sepuluh koma nol persen) atau lebih dari total pendapatan Cinema XXI adalah LMS yang memberikan kontribusi sebesar 14,3% dari total pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022.

Kegiatan usaha

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan makanan dan minuman ("**F&B**") untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022.

Bioskop Cinema XXI mayoritas terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi tiga tingkatan berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan atas Pendapatan Domestik Bruto ("**PDB**") pada paritas daya beli ("**PPP**") masing-masing kota. Kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks adalah yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks adalah menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya membuka teater bioskop dengan konsep premium pertama di Indonesia dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek "The Premiere" pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID. TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan "*Brand of the Year*" dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan "*Millennial's Top Brand Award*" dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan "*Better Brand Award*" dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank, "*Industry Champions of the Year Award*" dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan "*Jakarta Tourism Award*" dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan oleh Euromonitor pada bulan Januari 2023 ("**Survei Euromonitor**"), Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatatkan sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatat sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatat sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih[1] sebesar 11,5% dan marjin EBITDA[2] sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**") yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM terkait COVID-19 yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI untuk tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan *gross box office* Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki kinerja keuangan yang kuat dan tangguh karena didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

Prospek usaha

Industri bioskop telah berkembang dengan bantuan teknologi digital dalam rangka meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas jangkauan operator bioskop. Semakin banyak bioskop menawarkan pengalaman menonton film yang lebih berkualitas, seperti kursi yang lebih nyaman dan teknologi audio/visual mutakhir. Bioskop juga berhasil meningkatkan sumber pendapatan tambahan dari F&B, serta penggunaan alternatif bioskop seperti acara dan pertemuan.

Pada tahun 2019, industri bioskop secara keseluruhan mencapai omset bruto sebesar Rp10,6 triliun, sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan terkait, pasar industri bioskop turun menjadi Rp2,0 triliun pada tahun 2021 dan Rp6,7 triliun pada tahun 2022E. Industri bioskop diperkirakan akan pulih dengan cepat setelah pandemi COVID-19 dengan ukuran pasar mencapai Rp8,8 triliun pada tahun 2023E (82,8% dari 2019) dan Rp12,3 triliun pada tahun 2024E (115,8% dari 2019). Industri bioskop diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 25,1% dari 2022E hingga 2027E.

1 Dihitung dari laba (rugi) Cinema XXI dibagi dengan total pendapatan.
2 Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting" sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

Pertumbuhan industri bioskop terutama akan didorong oleh (i) pasar bioskop Indonesia yang masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar; (ii) pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota-kota Tier 2 dan 3; (iii) industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop; (iv) deretan film domestik dan internasional yang kuat; (v) budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya; (vi) peningkatan jumlah saluran pemesanan digital; dan (vii) lingkungan regulasi industri yang mendukung.

2. Keterangan mengenai Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Baru	:	sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Nilai Nominal	:	Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah).
Nilai Emisi	:	sebanyak Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, termasuk Saham Yang Ditawarkan, akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perseroan No. 13/2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.010.000.000**	**600.080.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.990.000.000**	**79.920.000.000**	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.010.000.000**	**600.080.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.990.000.000**	**79.920.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yakni sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023 dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA			Setelah pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Peserta Program ESA	-	-	-	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.655.000.000**	**13.240.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Call Option Agreement

Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham Perseroan, HJB dan APN, telah menandatangani *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 dengan Salween Investment Private Limited. Berdasarkan *Call Option Agreement*: (i) HJB memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 15.000.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik HJB; dan (ii) APN memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 3.750.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik APN tersebut. Pelaksanaan *call option* akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran. Pelaksanaan *call option* tidak akan mengakibatkan perubahan pengendalian.

Dengan asumsi *call option* dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan *call option* secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan *call option*			Setelah pelaksanaan *call option*		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	45.000.000.000	360.000.000.000	53,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	11.250.000.000	90.000.000.000	13,50
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	18.760.000.000	150.080.000.000	22,51
Peserta Program ESA	11.112.000	88.896.000	0,01	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.655.000.000**	**13.240.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Pencatatan saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 75.010.000.000 (tujuh puluh lima miliar sepuluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak sebesar 83.345.000.000 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,0% (seratus koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Namun demikian, HJB dan APN telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan segala saham atau efek Perseroan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut (termasuk, namun tidak terbatas pada, efek apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan atau dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili hak untuk menerima, atau waran atau hak lain untuk membeli, segala saham atau efek lain dari Perseroan) ("**Efek Lock-Up Pemegang Saham**"): (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Pemegang Saham tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan

kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Pemegang Saham, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas. Untuk menghindari keraguan, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap segala saham yang akan dialihkan kepada Salween Investment Private Limited berdasarkan ketentuan dalam *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HJB, APN dan Salween Investment Private Limited.

Salween Investment Private Limited juga telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan dan memastikan bahwa setiap Penerima Pengalihannya, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan segala saham atau efek Perseroan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut (termasuk, namun tidak terbatas pada, efek apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan atau dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili hak untuk menerima, atau waran atau hak lain untuk membeli, segala saham atau efek lain dari Perseroan) ("**Efek Lock-Up Salween**"): (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Salween tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Salween, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham."

3. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia. Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut;

- sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta ("**Pinjaman BRI**"). Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi Rp962.969 juta;

- sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham."

4. Ikhtisar data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen."

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jumlah Aset	6.759.546	6.417.741	6.014.057	5.726.343
Jumlah Liabilitas	4.106.897	2.461.178	1.896.939	1.023.568
Jumlah Ekuitas	2.652.649	3.956.563	4.117.118	4.702.775

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Total pendapatan	4.401.050	1.280.186	1.218.993	6.890.034
Total beban dan biaya operasi	(3.676.912)	(1.637.014)	(1.873.941)	(5.200.838)
Total pendapatan (biaya) lainnya	(7.130)	815	65.198	(35.565)
LABA (RUGI) USAHA	717.008	(356.013)	(589.750)	1.653.631
LABA (RUGI)	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	505.853	(354.267)	(584.982)	1.270.702
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14	(4,68)	(7,28)	16,02

Rasio keuangan

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total Pendapatan	243,8%	5,0%	(82,3)%	na
Beban dan biaya operasi	124,6%	(12,6)%	(64,0)%	na
Laba (rugi) usaha	(301,4)%	(39,6)%	(135,7)%	na
Laba (rugi)	(237,9)%	(36,8)%	(145,4)%	na
Total aset	5,3%	6,7%	5,0%	na
Total liabilitas	66,9%	29,7%	85,3%	na
Total ekuitas	(33,0)%	(3,9)%	(12,5)%	na
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan	16,3%	(27,8)%	(48,4)%	24,0%
Laba (rugi) / Total pendapatan	11,5%	(28,6)%	(47,5)%	18,5%
Laba (rugi) / Total ekuitas	19,0%	(9,2)%	(14,1)%	27,1%
Laba (rugi) / Total aset	7,5%	(5,7)%	(9,6)%	22,3%
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,5x	0,6x	0,5x	0,2x
Total liabilitas / Total aset	0,6x	0,4x	0,3x	0,2x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,9x	1,6x	1,5x	1,9x
Interest Coverage Ratio ("**ICR**")[1]	na	na	na	na
Debt Service Coverage Ratio ("**DSCR**")[2]	na	na	na	na

Catatan:
(1) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank. ICR pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.
(2) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek setelah dikurangi saldo kas dan setara kas. DSCR pada tanggal 31 Desember 2022 tidak tersedia karena saldo kas dan setara kas lebih besar dari saldo pinjaman, sedangkan DSCR pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.
na: tidak tersedia.

Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023

Informasi laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23-1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2023[1]	31 Desember 2022
Jumlah Aset	6.673.155	6.759.546
Jumlah Liabilitas	4.646.095	4.106.897
Jumlah Ekuitas	2.027.060	2.652.649

Catatan:
(1) Tidak diaudit.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (tidak diaudit)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	%[1]	2022	%[1]
Total pendapatan	883.255	100,0	635.651	100,0
Total beban dan biaya operasi	(866.638)	(98,1)	(662.825)	(104,3)
Total pendapatan lainnya	664	0,1	99	0,0
LABA (RUGI) USAHA	17.281	2,0	(27.075)	(4,3)
RUGI	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
Rugi per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	(0,33)		0,64	

Catatan:
(1) Dinyatakan sebagai persentase dari total pendapatan untuk tahun terkait.

Rasio keuangan

	31 Maret 2023
Rasio Pertumbuhan (%)	
Total Pendapatan	39,0%(1)
Beban dan biaya operasi	30,7%(1)
Laba (rugi) usaha	(163,8)%(1)
Rugi	(46,3)%(1)
Total aset	(1,3)%(2)
Total liabilitas	13,1%(2)
Total ekuitas	(23,6)%(2)
Rasio Usaha (%)	
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan	2,0%
Rugi / Total pendapatan	(2,9)%
Rugi / Total ekuitas	(1,3)%
Rugi / Total aset	(0,4)%
Rasio Keuangan (x)	
Total liabilitas / Total ekuitas	2,3x
Total liabilitas / Total aset	0,7x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,7x
ICR(3)	27,0x
DSCR(4)	2,7x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
(3) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank.
(4) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA yang disetahunkan terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga yang disetahunkan setelah dikurangi saldo kas dan setara kas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

5. Faktor risiko

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak langsung yang material bagi Cinema XXI dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Cinema XXI, dimulai dari risiko utama:

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Cinema XXI

- Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan dapat terus memengaruhi kegiatan usaha bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XXI.

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI

- Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan hiburan lain dapat menurunkan kunjungan bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak negatif pada pendapatan Cinema XXI.

- Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau kegagalan Cinema XXI untuk memperbarui sewa tersebut dengan persyaratan komersial yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI atau bahkan mengakibatkan gangguan bisnis.

- Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan perekonomian global yang negatif.

- Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Cinema XXI.

- Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

- Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau mengelola pertumbuhan dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

- Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI di antaranya bergantung terhadap kemampuan dalam menemukan dan memilih lokasi strategis untuk bioskop Cinema XXI serta mengembangkan dan memperluas operasi dan penawaran F&B secara tepat waktu dan inovatif.

- Kondisi pasar real estat komersial yang menurun atau perubahan pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.

- Pendapatan dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai pasokan dengan harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor film dan rumah produksi, dan memburuknya hubungan dengan distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

- Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood dapat memengaruhi Cinema XXI.

- Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam industri bioskop.

- Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.

- Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevalusi dan berpotensi menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut dapat secara signifikan membutuhkan perhatian manajemen, menganggu bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

- Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman dan tidak dapat diprediksi.

- Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan peluang akuisisi yang akan meningkatkan jumlah bioskop Cinema XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar.

- Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganan yang tidak tepat atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan operasi dan potensi kerugian.

- Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut terkait langsung dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, di mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek tertentu, seperti IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat menganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema XXI dan menyebabkan kerugian.

- Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.

- Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor.

- Penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat memengaruhi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat menganggu kegiatan usaha Cinema XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi.

- Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan aset tetap di masa datang.

- Insiden keamanan siber dapat menganggu kegiatan usaha Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan dan dapat menganggu kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual yang material bagi bisnis Cinema XXI.

- Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada posisi yang tidak menguntungkan.

- Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan dalam peraturan, termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Kondisi cuaca yang ekstrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

- Litigasi, proses hukum, pemeriksanaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada akhirnya berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

- Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Cinema XXI.

- Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan pemasang iklan utama, serta faktor ekternal lainnya yang berada di luar kendali Cinema XXI.

- Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi mitra serta pihak lainnya.

- Jika Perseroan gagal memenuhi pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

Risiko umum

- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak memberikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

- Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, gejolak sosial, dan kerugian ekonomi.

- Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti Cinema XXI.

- Otonomi daerah dan ketidakpastian dalam perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan daerah.

- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.

- Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap hasil operasi Cinema XXI.

- Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

- Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

- Investor tidak mungkin dapat melakukan "*service of process*" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, komisaris, direktur dan pejabat Perseroan.

- Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa.

Risiko bagi investor

- Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.

- Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia berbeda dari peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.

- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi signifikan.

- Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.

- Perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya di masa depan akan memengaruhi nilai saham dan dividen dalam ekuivalen valuta asing.

- Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham Perseroan.

- Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan untuk perusahaan tercatat dapat merugikan hasil operasi Cinema XXI dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

- Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.

- Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.

- Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen.

- Informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia mungkin tersedia lebih sedikit dibandingkan pasar modal di yurisdiksi lain.

- Nilai aset bersih per saham atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor dapat langsung mengalami dilusi yang substansial.

- Cinema XXI beroperasi dalam sistem hukum yang pelaksanaan atas undang-undang dan peraturannya mungkin tidak pasti dan dengan membeli Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham menjadi terekspos kepada sistem hukum tersebut dan mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan.

- Cinema XXI mungkin merupakan "Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasif" - "*Passive Foreign Investment Company*" atau PFIC berdasarkan peraturan pajak penghasilan Amerika Serikat yang berlaku.

- Investor mungkin diharuskan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya force majeure atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI.

- Perseroan telah memuat pernyataan-pernyataan prospektif dalam Prospektus ini yang rentan terhadap risiko dan ketidakpastian.

- Penjamin Emisi Efek tidak melakukan penjatahan lebih atau stabilisasi harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko."

6. Kebijakan dividen

Sesuai dengan hukum di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, keputusan pembagian dividen dibuat berdasarkan persetujuan pemegang saham pada RUPS atas rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Rekomendasi terkait penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan pertimbangan mereka dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, rencana investasi dan peluang pertumbuhan Cinema XXI. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35% dari laba bersih Perseroan. Kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, dan Direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap saat untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh.

Kebijakan dividen Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul "Kebijakan Dividen."

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bioskop dan Restoran

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 31901188
Faksimili: (021) 31901144
Website : www.cinema21.co.id
Email : investor.relations@nsr.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PANDEMI COVID-19 YANG TELAH MENGGANGGU BISNIS CINEMA XXI DAN DAPAT TERUS MEMENGARUHI BISNIS BIOSKOP, HASIL OPERASI, DAN LIKUIDITAS CINEMA XXI. FAKTOR RISIKO USAHA CINEMA XXI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM *E-IPO* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020, YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN SAHAM, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.010.000.000**	**600.080.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.990.000.000**	**79.920.000.000**	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.010.000.000**	**600.080.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.990.000.000**	**79.920.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yakni sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023 dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023.

Tujuan utama dari Program ESA adalah:

(i) memberikan penghargaan kepada karyawan atas loyalitas, pencapaian, dan kontribusinya kepada Perseroan;
(ii) meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
(iii) menghargai loyalitas para karyawan Perseroan yang memiliki kontribusi penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah Tim Pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 359 orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan Perseroan yang masih berstatus karyawan aktif sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan telah bekerja di Perseroan sekurang-kurangnya selama lima tahun tanpa terputus dan kriteria lain yang akan ditentukan oleh Perseroan; dan

- Karyawan sebagaimana dimaksud di atas, tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA;

(selanjutnya disebut "**Peserta Program ESA**").

Syarat, ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- Saham Program ESA diberikan kepada Peserta Program ESA yang memenuhi kriteria dan atas nama dari masing-masing peserta.

- Peserta Program ESA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang diterimanya melalui Program ESA selama periode 12 bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI ("**Periode Lock Up Program ESA**").

- Seluruh biaya dan pajak final atas transaksi saham di bursa yang timbul sehubungan dengan Program ESA akan ditanggung oleh Perseroan sehingga peserta tidak akan dikenakan biaya atas kepemilikan saham melalui Program ESA.

- Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perseroan atau tidak lagi memenuhi kriteria sebelum tanggal distribusi saham, maka kepesertaanya dalam Program ESA menjadi batal dan saham yang sudah dialokasikan untuk karyawan tersebut akan dialokasikan kepada Peserta Program ESA lainnya sesuai dengan diskresi Perseroan.

- Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perseroan selama Periode Lock-Up Program ESA, Perseroan akan memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek dimana Peserta Program ESA terdaftar sebagai nasabah untuk (i) melepaskan blokir saham; (ii) menjual saham Program ESA pada harga pasar yang berlaku; dan (iii) menerima serta mengalihkan hasil atas penjualan saham Program ESA tersebut (setelah dipotong pajak dan biaya lainnya) kepada Perseroan, tanpa hak atas klaim apapun oleh Peserta Program ESA terhadap Perseroan.

- Dalam hal Peserta Program ESA berhenti menjadi karyawan Perseroan karena pensiun sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku selama Periode Lock-Up Program ESA, kepesertaan karyawan yang bersangkutan tidak menjadi gugur dan saham yang diperolehnya melalui Program ESA tetap dapat dimiliki oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Program ESA (termasuk ketentuan sehubungan Periode Lock-Up Program ESA).

- Dalam hal Peserta Program ESA berhenti menjadi karyawan Perseroan karena meninggal dunia selama Periode Lock-Up Program ESA, kepesertaan karyawan yang bersangkutan tidak menjadi gugur dan saham yang diperolehnya melalui Program ESA tetap dapat dimiliki oleh ahli waris dari karyawan yang bersangkutan dengan memperhatikan dengan ketentuan Program ESA (termasuk ketentuan sehubungan Periode Lock-Up Progam ESA).

Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham yang diberikan dalam Program ESA setelah Periode Lock-Up Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,10% (nol koma satu nol persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak atas perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dari keuntungan modal yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA			Setelah pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Peserta Program ESA	-	-	-	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.655.000.000**	**13.240.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Call Option Agreement

Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham Perseroan, HJB dan APN, telah menandatangani *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 dengan Salween Investment Private Limited. Berdasarkan *Call Option Agreement*: (i) HJB memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 15.000.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik HJB; dan (ii) APN memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 3.750.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik APN tersebut. Pelaksanaan *call option* akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran. Pelaksanaan *call option* tidak akan mengakibatkan perubahan pengendalian.

Dengan asumsi *call option* dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebelum dan setelah *call option* secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan *call option* Nilai Nominal Rp8 per Saham			Setelah pelaksanaan *call option* Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**		**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	45.000.000.000	360.000.000.000	53,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	11.250.000.000	90.000.000.000	13,50
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	18.760.000.000	150.080.000.000	22,51
Peserta Program ESA	11.112.000	88.896.000	0,01	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**	**83.345.000.000**	**666.760.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.655.000.000**	**13.240.000.000**		**1.655.000.000**	**13.240.000.000**	

Pencatatan saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 75.010.000.000 (tujuh puluh lima miliar sepuluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 83.345.000.000 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,0% (seratus koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana pencatatan saham Perseroan di BEI telah mendapatkan persetujuan dari BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Namun demikian, HJB dan APN telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan Efek Lock-Up Pemegang Saham: (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Pemegang Saham tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi

yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Pemegang Saham, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas. Untuk menghindari keraguan, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap segala saham yang akan dialihkan kepada Salween Investment Private Limited berdasarkan ketentuan dalam *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HJB, APN dan Salween Investment Private Limited.

Salween Investment Private Limited juga telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan dan memastikan bahwa setiap Penerima Pengalihannya, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan Efek Lock-Up Salween: (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Salween tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Salween, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia ("**Belanja Modal**"). Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

  Cinema XXI saat ini berencana untuk menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga lima tahun ke depan yang tersebar di kota Tier 1, kota Tier 2 dan kota Tier 3. Pada tahun 2023 dan 2024, penambahan layar akan dilakukan di 37 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, serta Kepulauan Riau, sementara lokasi untuk tahun-tahun selanjutnya masih dalam pengkajian Cinema XXI.

  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki komitmen untuk menambah layar baru di 50 lokasi dengan nilai Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp1.900.000 juta, di mana sebagian dari nilai tersebut akan didanai dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan rencana penambahan jumlah layar, Perseroan terutama akan menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Delta Raya Sejahtera ("**Delta Sejahtera**") dan PT Megatech Engineering ("**Megatech**"), keduanya merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, serta IMAX Corporation dan IMAX Theatres International Limted ("**IMAX Limited**") untuk peralatan bioskop dan prasarana lainnya, dan PT Prakarsa Gunawan & Son ("**PGS**") untuk pembangunan bioskop dan/atau teater baru. Perjanjian antara Perseroan dengan para pihak tersebut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Perjanjian-perjanjian penting."

- sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta ("**Pinjaman BRI**"). Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi Rp962.969 juta.

  Per tanggal 12 Mei 2023, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari BRI berdasarkan:
  (i) Surat Pengakuan Hutang Kredit Modal Kerja Cash Collateral ("**SPH KMK *Cash Collateral***") No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022;
  (ii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022;
  (iii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
  (iv) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;
  (v) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022;
  (vi) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022;
  (vii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022;
  (viii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022;
  (ix) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;
  (x) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022; dan
  (xi) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023;

  masing-masing dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta untuk fasilitas butir (i) sampai dengan (x) dan Rp399.400 juta untuk fasilitas butir (xi), yang seluruhnya memiliki tingkat bunga 1,70% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling dekat pada tanggal 20 Desember 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Maret 2024. Seluruh fasilitas digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja.

Atas pembayaran lebih awal tersebut, Perseroan tidak akan dikenakan denda/penalti. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BRI sebagai kreditur. Penjelasan mengenai fasilitas ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Perjanjian Kredit."

- sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk Belanja Modal, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Delta Sejahtera dan Megatech yang keduanya merupakan Afiliasi Perseroan, sehingga transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Afiliasi Perseroan, sehingga transaksi dengan IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana terkait pembayaran utang bank bukanlah merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 maupun Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi dari penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK. Perseroan juga bertanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah digunakan. Laporan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan kepada OJK harus dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan periode Juni dan Desember, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK. Setiap perubahan rencana penggunaan dana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,524% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan sebesar 0,150%;
- Biaya jasa penyelenggaraan sebesar 1,200%;
- Biaya jasa penjualan sebesar 0,150%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,324%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,020%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,298%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,006%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan

- Biaya lain-lain sebesar 0,694%, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan pada BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya uji tuntas (*due diligence*), biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya *roadshow*, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas, dan biaya-biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp4.106.897 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.466.284 juta dan Rp1.640.613 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha dan utang lainnya	
- Pihak ketiga	394.798
- Pihak berelasi	47.656
Utang pajak penghasilan	7.681
Utang pajak lainnya	75.649
Pinjaman bank	1.697.415
Pendapatan diterima dimuka	171.966
Liabilitas sewa	71.119
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**2.466.284**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liablitas sewa	1.551.849
Kewajiban imbalan kerja	88.764
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.640.613**
Jumlah Liabilitas	**4.106.897**

Berikut rincian masing-masing liabilitas:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha dan utang lainnya

Saldo utang usaha dan utang lainnya Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp442.454 juta, yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp317.200 juta dan utang lainnya sebesar Rp125.254 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Utang usaha kepada pihak ketiga	
PT Omega Film	49.895
PT Cinemaxx Global Pasifik	9.675
PT Graha Layar Prima Tbk	8.692
PT Kharisma Starvision Plus	7.684
PT Triniti Jaya Abadi	5.497
PT Visinema Pictures	5.394

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Lainnya	36.484
Liabilitas sewa yang belum dibayarkan	126.580
Liabilitas ke pemilik gedung selain sewa	19.643
Utang usaha kepada pihak berelasi	
PT Megatech Engineering	17.598
PT Delta Raya Sejahtera	12.373
PT Multi Interbuana Teknindo	12.342
PT Delta Raya Sentosa	5.343
	317.200
Utang lainnya dan beban yang masih harus dibayar:	
Beban akrual pembelian makanan dan minuman	57.403
Beban akrual sewa, utilitas, dan jasa pengelola	22.988
Lain-lain	44.863
	125.254
	442.454

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat utang usaha dan utang lainnya berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha dan utang lainnya diperkirakan mendekati nilai tercatatnya.

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Belum jatuh tempo	90.814
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	87.736
31 - 180 hari	513
180 - 360 hari	4.131
Lebih dari 360 hari	134.637
	317.201

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp126.580 juta yang merupakan liabilitas sewa untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringangan yang akan diberikan kepada Cinema XXI sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19.

Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas utang tersebut.

Utang pajak penghasilan

Saldo utang pajak penghasilan Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.681 juta, yang seluruhnya merupakan utang pajak penghasilan Perusahaan Anak.

Utang pajak lainnya

Saldo utang pajak lainnya Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp75.649 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Perseroan	
Pajak pertambahan nilai	17.070
Pajak hiburan	20.292
Pajak pembangunan (PB1)	11.974

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Pajak penghasilan pasal 21	3.957
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2.028
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4.046
	59.367
Perusahaan Anak	
Pajak pertambahan nilai	(228)
Pajak hiburan	7.317
Pajak pembangunan (PB1)	3.787
Pajak penghasilan pasal 21	201
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	904
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4.301
	16.282
Konsolidasian	
Pajak pertambahan nilai	16.842
Pajak hiburan	27.609
Pajak pembangunan (PB1)	15.761
Pajak penghasilan pasal 21	4.158
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2.932
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	8.347
	75.649

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.697.415 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.497.265
PT Bank DBS Indonesia	200.150
	1.697.415

BRI

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.743/SPH/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.745/SPH/12/2022 tanggal 17 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 17 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.747/SPH/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 18 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.751/SPH/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 19 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 20 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 21 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 22 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 23 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 24 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 25 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 26 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 27 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.784/SPH/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 28 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 29 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 30 Desember 2023.

  Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

Perjanjian pinjaman bank ini tidak memiliki persyaratan khusus.

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFPDBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari DBS dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp200.000 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 3% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito atas nama HJB dan APN sebesar Rp200.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang fasilitas ini adalah sebesar Rp200.000 juta.

Perjanjian pinjaman bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, di mana Perseroan tidak boleh tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada bank, diantaranya:

a. Mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham, dengan ketentuan keluarga Suherman dan Lasmana secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung tetap menjaga dan mempertahankan kepemilikan minimum 51% atas jumlah saham pada Perseroan;

b. Dalam keadaan pailit atau permintaan penundaan pembayaran;

c. Membuat atau memberikan izin untuk mengalihkan hak fidusia, SPH, hak tanggungan atau penanggung lainnya;

d. Membuat atau memberikan izin untuk melakukan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan kerugian, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau jaminan dan/atau perjanjian lain dan/atau pengaturan lain yang pada hakikatnya mempunyai akibat yang sama terhadap kekayaan atau hak yang timbul dari tagihan Perseroan, selain dari jaminan yang diberikan kepada bank (bila ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian utang.

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp171.966 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
m.tix	137.388
Movie card dan *voucher*	34.570
Lainnya	8
	171.966

m.tix adalah platform tiket *online* milik Cinema XXI yang dapat digunakan pelanggan untuk menyetorkan uang untuk pembelian tiket bioskop. m.tix diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan membeli tiket bioskop.

Movie card dan *voucher* diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan menukarkannya dengan tiket bioskop atau makanan dan minuman.

2. Liabilitas jangka panjang

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.551.849 juta, yang timbul dari penyewaan ruangan untuk bioskop oleh Cinema XXI dengan jangka waktu sekitar 10-20 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Dalam satu tahun	199.652
Dalam satu dan lima tahun	1.114.989
Lebih dari lima tahun	1.345.919
Total minimum pembayaran sewa di masa depan	2.660.560
Porsi bunga atas pembayaran sewa	(1.037.592)
Nilai kini pembayaran sewa saat ini	1.622.968
Liabilitas jangka pendek	(71.119)
Liabilitas jangka panjang	1.551.849

Pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI memiliki perjanjian sewa dengan beberapa pihak ketiga yang metode pembayarannya ditentukan berdasarkan tarif sewa tetap ataupun dengan basis bagi hasil pendapatan. Jumlah pendapatan minimum sewa yang akan dibayar di masa datang yang berasal dari sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2019
Sampai dengan satu tahun	159.056
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun	622.831
Lebih dari lima tahun	1.636.058
	2.417.945

Berikut ini ringkasan perubahan komponen pada liabilitas terkait aktivitas sewa selama tahun 2022:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Saldo pada 1 Januari 2022	1.677.270
Arus kas:	
Pembayaran liabilitas sewa	(172.518)
Perubahan non-kas:	
Penambahan pada tahun berjalan	21.997
Bunga atas liabilitas sewa	131.156
Konsesi sewa yang diterima	(27.016)
Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya	(15.744)
Kerugian keuntungan dari mata uang asing	7.823
Saldo pada 31 Desember 2022	1.622.968

Liabilitas imbalan kerja

Cinema XXI mengakui liabilitas pascakerja atas karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Saldo kewajiban imbalan kerja Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp88.764 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja:	
Saldo awal	95.421
Termasuk dalam laba rugi	
- Beban jasa kini	11.434
- Keuntungan jasa masa lalu	(16.241)
- Beban bunga	5.793
	986
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain	
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:	
- Penyesuaian tingkat bunga	1.755
- Asumsi demografis	-
- Penyesuaian pengalaman	(3.445)
	(1.690)
Lainnya	
- Pembayaran manfaat	(5.953)
Saldo akhir	88.764

Tabel berikut ini menyajikan mutasi akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain selama tahun 2022:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Saldo awal	(541)
Diakui di tahun berjalan	1.690
Saldo akhir	1.149

Asumsi aktuaria

Asumsi dasar aktuarial yang digunakan dalam menghitung nilai kewajiban pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan upah	8,00%
Tingkat mortalitas	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat perputaran pekerja	5% setiap tahun sampai usia 35 kemudian berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55
Usia pensiun normal	55

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan pasca kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban pascakerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 16,94 tahun.

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar aktif pada tanggal pelaporan.

Informasi historis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	88.764
Penyesuaian pengalaman	(1.690)

Analisa sensitivitas

Kemungkinan adanya perubahan pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial terkait, di mana asumsi lainnya konstan, akan memengaruhi liabilitas imbalan pascakerja sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah ini:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Tingkat bunga diskonto (kenaikan 1%)	(6.694)
Tingkat bunga diskonto (penurunan 1%)	7.632
Tingkat kenaikan gaji (kenaikan 1%)	8.366
Tingkat kenaikan gaji (penurunan 1%)	(7.408)

Meskipun analisis ini tidak memperhitungkan seluruh distribusi arus kas yang diharapkan dari program tersebut, analisis tersebut memberikan perkiraan sensitivitas dari asumsi yang ditampilkan.

3. Komitmen dan kontinjensi

Kontinjensi

Cinema XXI tidak memiliki kontijensi pada tanggal 31 Desember 2022.

Komitmen

Cinema XXI memiliki perjanjian eksploitasi teatrikal dengan pemilik dan importir film yang memasok film ke bioskop yang dimiliki dan dioperasikan oleh Cinema XXI. Perjanjian ini bersifat non-eksklusif dan dibuat untuk setiap judul film dengan mekanisme pembagian pendapatan sebesar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan sesuai ketentuan pajak daerah. Perusahaan pemilik dan importir film tersebut, diantaranya adalah PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film dan PT Omega Film.

Cinema XXI memiliki perjanjian-perjanjian penting lainnya, yaitu:

- Megatech, Pihak Berelasi untuk pasokan peralatan bioskop dan sewa tempat *video game arcade*.
- PT Multi Interbuana Teknindo ("**MIT**"), Pihak Berelasi untuk pemeliharaan peralatan bioskop.
- Delta Sejahtera, Pihak Berelasi untuk manajemen dan pasokan persediaan makanan dan minuman.
- PT Delta Raya Sentosa ("**Delta Sentosa**"), Pihak Berelasi untuk pasokan persediaan makanan dan minuman.
- PGS, untuk jasa konstruksi dan jasa interior gedung.

Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki liabilitas sewa terutang untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringangan yang akan diberikan kepada Cinema XXI sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19.

4. Perubahan liabilitas yang signifikan setelah tanggal laporan keuangan

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dan Bank BRI. Penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Perjanjian Kredit."

SELURUH LIABILITAS CINEMA XXI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS CINEMA XXI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA CINEMA XXI, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA CINEMA XXI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen."

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.048.962	1.089.780	573.854	1.494.838
Piutang usaha dan piutang lainnya				
- Pihak ketiga	69.231	35.304	23.982	143.971
- Pihak berelasi	115	136	136	1.413
Persediaan	96.395	58.497	67.742	80.799
Uang muka dan beban dibayar dimuka	21.411	32.123	29.076	62.064
JUMLAH ASET LANCAR	**2.236.114**	**1.215.840**	**694.790**	**1.783.085**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	3.942.447	4.417.703	4.492.729	3.392.753
Uang muka untuk pembelian aset tetap				
- Pihak ketiga	83.805	104.280	206.802	133.828
- Pihak berelasi	50.750	69.000	117.000	152.750
Klaim pengembalian pajak	129.456	140.540	137.832	8.273
Aset pajak tangguhan	218.815	382.815	274.305	165.579
Aset tidak lancar lainnya	98.159	87.563	90.599	90.075
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**4.523.432**	**5.201.901**	**5.319.267**	**3.943.258**
JUMLAH ASET	**6.759.546**	**6.417.741**	**6.014.057**	**5.726.343**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha dan utang lainnya				
- Pihak ketiga	394.798	379.856	189.441	514.279
- Pihak berelasi	47.656	75.590	26.725	73.475
Utang pajak penghasilan	7.681	-	-	31.949
Utang pajak lainnya	75.649	62.461	22.025	142.776
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	171.966	170.580	162.191	154.932
Liabilitas sewa	71.119	73.011	63.101	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**2.466.284**	**761.498**	**463.483**	**917.411**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Kewajiban imbalan kerja	88.764	95.421	123.745	106.157
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.640.613**	**1.699.680**	**1.433.456**	**106.157**
JUMLAH LIABILITAS	**4.106.897**	**2.461.178**	**1.896.939**	**1.023.568**
EKUITAS				
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950
Kepentingan nonpengendali	169.889	194.843	198.858	232.825
JUMLAH EKUITAS	**2.652.649**	**3.956.563**	**4.117.118**	**4.702.775**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.759.546**	**6.417.741**	**6.014.057**	**5.726.343**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Pendapatan				
Bioskop	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Makanan dan minuman	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Iklan	130.730	10.777	96.583	494.898
Digital platform	116.848	30.954	17.459	114.732
Acara dan pendapatan lainnya	21.800	3.536	7.418	30.950
Total pendapatan	4.401.050	1.280.186	1.218.993	6.890.034
Beban dan biaya operasi:				
Beban penayangan film	(1.350.414)	(414.974)	(387.205)	(2.224.953)
Beban makanan dan minuman	(394.622)	(117.481)	(112.809)	(519.856)
Beban penyediaan *digital platform*	(27.752)	(9.087)	(4.400)	(30.778)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.233.901)	(425.784)	(720.112)	(1.997.380)
Beban penyusutan aset tetap	(668.713)	(669.459)	(648.702)	(425.365)
Lainnya	(1.510)	(229)	(713)	(2.506)
Total beban dan biaya operasi	(3.676.912)	(1.637.014)	(1.873.941)	(5.200.838)

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Pendapatan (beban) lainnya				
Penghasilan lainnya	8.182	3.347	70.928	30.481
Beban lainnya	(15.312)	(2.532)	(5.730)	(66.046)
Total pendapatan (biaya) lainnya	(7.130)	815	65.198	(35.565)
LABA (RUGI) USAHA	**717.008**	**(356.013)**	**(589.750)**	**1.653.631**
Penghasilan keuangan	50.338	15.188	37.718	44.333
Beban keuangan	(131.871)	(136.742)	(134.044)	-
BEBAN KEUANGAN NETO	**(81.533)**	**(121.554)**	**(96.326)**	**44.333**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**635.475**	**(477.567)**	**(686.076)**	**1.697.964**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(130.940)	111.764	107.200	(423.530)
LABA (RUGI)	**504.535**	**(365.803)**	**(578.876)**	**1.274.434**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.690	14.790	(7.632)	(4.976)
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	(372)	(3.254)	1.526	1.244
Penghasilan komprehensif lain, neto	1.318	11.536	(6.106)	(3.732)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	**505.853**	**(354.267)**	**(584.982)**	**1.270.702**
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	460.384	(351.315)	(545.744)	1.201.312
Kepentingan nonpengendali	44.151	(14.488)	(33.132)	73.122
	504.535	**(365.803)**	**(578.876)**	**1.274.434**
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	461.456	(340.252)	(551.690)	1.197.676
Kepentingan nonpengendali	44.397	(14.015)	(33.292)	73.026
	505.853	**(354.267)**	**(584.982)**	**1.270.702**
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14	(4,68)	(7,28)	16,02

Rasio keuangan

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total pendapatan	243,8%	5,0%	(82,3)%	na
Beban dan biaya operasi	124,6%	(12,6)%	(64,0)%	na
Laba (rugi) usaha	(301,4)%	(39,6)%	(135,7)%	na
Laba (rugi)	(237,9)%	(36,8)%	(145,4)%	na
Total aset	5,3%	6,7%	5,0%	na
Total liabilitas	66,9%	29,7%	85,3%	na
Total ekuitas	(33,0)%	(3,9)%	(12,5)%	na
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) usaha / Total Pendapatan	16,3%	(27,8)%	(48,4)%	24,0%
Laba (rugi) / total pendapatan	11,5%	(28,6)%	(47,5)%	18,5%
Laba (rugi) / Total ekuitas	19,0%	(9,2)%	(14,1)%	27,1%
Laba (rugi) / Total aset	7,5%	(5,7)%	(9,6)%	22,3%
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,5x	0,6x	0,5x	0,2x
Total liabilitas / Total aset	0,6x	0,4x	0,3x	0,2x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,9x	1,6x	1,5x	1,9x
Interest Coverage Ratio ("**ICR**")[1]	na	na	na	na
Debt Service Coverage Ratio ("**DSCR**")[2]	na	na	na	na

Catatan:

(1) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank. ICR pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

(2) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga setelah dikurangi saldo kas dan setara kas. DSCR pada tanggal 31 Desember 2022 tidak tersedia karena saldo kas dan setara kas lebih besar dari saldo pinjaman, sedangkan DSCR pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

na: tidak tersedia.

Rekonsiliasi EBITDA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Laba (rugi)	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
Ditambah:				
Beban (manfaat) pajak penghasilan	130.940	(111.764)	(107.200)	423.530
Laba (rugi) sebelum pajak	635.475	(477.567)	(686.076)	1.697.964
Penyesuaian:				
Beban penyusutan aset tetap	668.713	669.459	648.702	425.365
Beban keuangan	131.871	136.742	134.044	-
EBITDA[1]	**1.436.059**	**328.634**	**96.670**	**2.123.329**
Marjin EBITDA[2] (%)	**32,6**	**25,7**	**7,9**	**30,8**

Catatan:
(1) EBITDA mengacu pada laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap dan beban keuangan.
(2) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

Data keuangan dan data operasional lainnya

	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jumlah bioskop	225	222	219	213
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168
Jumlah penonton	67.056.977[6]	22.342.673[6]	20.340.198[6]	111.746.094
Harga tiket rata-rata (*average ticket price* atau "**ATP**")[1] (Rp)	44.704	41.212	42.271	44.174
Pendapatan bioskop (dalam jutaan Rupiah)	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Pendapatan F&B (dalam jutaan Rupiah)	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Pendapatan F&B (% terhadap pendapatan bioskop)	53,0	48,9	41,7	40,4
Marjin laba[2]	11,5	(28,6)	(47,5)	18,5
EBITDA[3]	1.436.059	328.634	96.670	2.213.329
Marjin EBITDA[4] (%)	32,6	25,7	7,9	30,8
Marjin F&B[5]	72,4	71,0	65,1	71,1

Catatan:
(1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton.
(2) Dihitung dari laba (rugi) dibagi dengan total pendapatan.
(3) Perhitungan EBITDA dapat dilihat pada Rekonsiliasi EBITDA.
(4) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.
(5) Dihitung dari total pendapatan makanan dan minuman setelah dikurangi beban makanan dan minuman dibagi dengan total pendapatan makanan dan minuman. Beban makanan minuman terdiri dari biaya bahan baku seperti kernel popcorn, garam, mentega, dan minyak untuk produksi produk makanan dan minuman utama Cinema XXI dan biaya kemasan makanan dan minuman.
(6) Jumlah penonton dipengaruhi dampak negatif dari COVID-19.

Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023

Informasi laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat

Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23- 1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2023[1]	31 Desember 2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	2.044.303	2.048.962
Piutang usaha dan piutang lainnya		
- Pihak ketiga	45.728	69.231
- Pihak berelasi	57	115
Persediaan	93.293	96.395
Uang muka dan beban dibayar di muka	34.545	21.411
Klaim pengembalian pajak	28.146	-
Pajak dibayar dimuka	13.297	-
JUMLAH ASET LANCAR	**2.259.369**	**2.236.114**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	3.929.595	3.942.447
Uang muka untuk pembelian aset tetap		
- Pihak ketiga	138.743	83.805
- Pihak berelasi	28.400	50.750
Klaim pengembalian pajak	-	129.456
Aset pajak tangguhan	215.292	218.815
Aset tidak lancar lainnya	101.756	98.159
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**4.413.786**	**4.523.432**
JUMLAH ASET	**6.673.155**	**6.759.546**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha dan utang lainnya		
- Pihak ketiga	338.780	394.798
- Pihak berelasi	41.323	47.656
Utang pajak penghasilan	8.409	7.681
Utang pajak lainnya	60.518	75.649
Pinjaman bank	2.299.223	1.697.415
Pendapatan diterima di muka	178.617	171.966
Liabilitas sewa	86.465	71.119
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**3.013.335**	**2.466.284**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2023[1]	31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa	1.539.824	1.551.849
Kewajiban imbalan kerja	92.936	88.764
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.632.760**	**1.640.613**
JUMLAH LIABILITAS	**4.646.095**	**4.106.897**
EKUITAS		
Modal saham	600.080	600.080
Tambahan modal disetor	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	143.296
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	120.016	120.016
Tidak ditentukan penggunaannya	993.088	1.617.538
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.858.310	2.482.760
Kepentingan nonpengendali	168.750	169.889
JUMLAH EKUITAS	**2.027.060**	**2.652.649**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.673.155**	**6.759.546**

Catatan:
(1) Tidak diaudit.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (tidak diaudit)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	%[1]	2022	%[1]
Pendapatan				
Bioskop	530.275	60,0	406.948	64,0
Makanan dan minuman	310.728	35,0	200.364	31,5
Iklan	18.223	2,1	14.647	2,3
Digital platform	17.364	2,0	11.742	1,9
Acara dan pendapatan lainnya	6.665	0,8	1.950	0,3
Total pendapatan	**883.255**	**100,0**	**635.651**	**100,0**
Beban dan biaya operasi:				
Beban penayangan film	(265.138)	(30,0)	(203.474)	(32,0)
Beban makanan dan minuman	(91.687)	(10,4)	(57.152)	(9,0)
Beban penyediaan *digital platform*	(3.997)	(0,5)	(3.249)	(0,5)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(337.824)	(38,2)	(231.951)	(36,5)
Beban penyusutan aset tetap	(167.290)	(18,9)	(166.895)	(26,3)
Lainnya	(702)	(0,1)	(104)	(0,0)[nm]
Total beban dan biaya operasi	**(866.638)**	**(98,1)**	**(662.825)**	**(104,3)**
Pendapatan (beban) lainnya				
Penghasilan lainnya	898	0,1	181	0,0[nm]
Beban lainnya	(234)	0,0[nm]	(82)	(0,0)[nm]
Total pendapatan lainnya	664	0,1	99	0,0[nm]
LABA (RUGI) USAHA	**17.281**	**2,0**	**(27.075)**	**(4,3)**
Penghasilan keuangan	8.310	0,9	6.711	1,1
Beban keuangan	(41.233)	(4,7)	(33.327)	(5,2)
BEBAN KEUANGAN NETO	**(32.923)**	**(3,7)**	**(26.616)**	**(4,2)**
RUGI SEBELUM PAJAK	**(15.642)**	**(1,8)**	**(53.691)**	**(8,4)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(9.947)	(1,1)	6.076	1,0
RUGI	**(25.589)**	**(2,9)**	**(47.615)**	**(7,5)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	**(25.589)**	**(2,9)**	**(47.615)**	**(7,5)**
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(24.450)	(2,8)	(47.891)	(7,5)
Kepentingan nonpengendali	(1.139)	(0,1)	276	(0,0)[nm]
	(25.589)	**(2,9)**	**(47.615)**	**(7,5)**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	**%[1]**	**2022**	**%[1]**
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(24.450)	(2,8)	(47.891)	(7,5)
Kepentingan nonpengendali	(1.139)	(0,1)	276	(0,0)[nm]
	(25.589)	**(2,9)**	**(47.615)**	**(7,5)**
Rugi per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	(0,33)		0,64	

Catatan:
(1) Dinyatakan sebagai persentase terhadap total pendapatan untuk periode terkait.

Rasio keuangan

	31 Maret 2023
Rasio Pertumbuhan (%)	
Pendapatan	39,0%[1]
Beban dan biaya operasi	30,7%[1]
Laba (rugi) usaha	(163,8)%[1]
Rugi	(46,3)%[1]
Total aset	(1,3)%[2]
Total liabilitas	13,1%[2]
Total ekuitas	(23,6)%[2]
Rasio Usaha (%)	
Laba (rugi) usaha / Total Pendapatan	2,0%
Rugi / total pendapatan	(2,9)%
Rugi / Total ekuitas	(1,3)%
Rugi / Total aset	(0,4)%
Rasio Keuangan (x)	
Total liabilitas / Total ekuitas	2,3x
Total liabilitas / Total aset	0,7x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,7x
ICR[3]	27,0x
DSCR[4]	2,7x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
(3) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank.
(4) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA yang disetahunkan terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga yang disetahunkan setelah dikurangi saldo kas dan setara kas.

Rekonsiliasi EBITDA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	**2022**
Laba (rugi)	(25.589)	(47.615)
Ditambah:		
Beban (manfaat) pajak penghasilan	9.947	(6.076)
Laba (rugi) sebelum pajak	(15.642)	(53.691)
Penyesuaian:		
Beban penyusutan aset tetap	167.290	166.895
Beban keuangan	41.233	33.327
EBITDA[1]	**192.881**	**146.531**
Marjin EBITDA[2] (%)	**21,8**	**23.1**

Catatan:
(1) EBITDA mengacu pada laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap dan beban keuangan.
(2) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Cinema XXI dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan-catatan di dalamnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dalam bab/subbab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Cinema XXI dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen." Pada saat membaca forward looking statement, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Cinema XXI di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh forward looking statement tersebut akan tercapai.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra.Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar

dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan atas PDB pada PPP masing-masing kota, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penonton yang merupakan penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya pertama kali membuka teater bioskop dengan konsep premium di Indonesia dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek “The Premiere” pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket, dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID, di mana TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi

kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan "*Brand of the Year*" dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan "*Millennial's Top Brand Award*" dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan "*Better Brand Award*" dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank pada tahun 2019, "*Industry Champions of the Year Award*" dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan "*Jakarta Tourism Award*" dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatat sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatatkan sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih[3] sebesar 11,5% dan marjin EBITDA[4] sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan bioskop Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki keuangan yang kuat dan tangguh didukung didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

2. Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang di antaranya berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor utama yang memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI dibahas di bawah ini. Calon Investor harus memperhatikan bahwa faktor-faktor lain selain yang teridentifikasi di bawah ini dapat secara material memengaruhi hasil operasi Cinema XXI di masa depan. Untuk pembahasan mengenai beberapa faktor risiko yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI, dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko."

3 Dihitung dari laba dibagi dengan total pendapatan.
4 Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting" sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

Dampak pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi signifikan terhadap perekonomian global dan regional termasuk perekonomian Indonesia. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha Cinema XXI selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini:

- Pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan PPKM serta upaya pencegahan penyebaran pandemi telah berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi bioskop, tingkat keterisian, jam operasional dan kunjungan penonton Cinema XXI, termasuk penutupan semua bioskop Cinema XXI dari akhir bulan Maret sampai dengan September 2020 dan pengoperasian bioskop di bawah kapasitas penuh dari bulan Oktober 2020 sampai April 2022. Hal tersebut memberikan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan Cinema XXI, terutama untuk tahun 2020 dan 2021, di mana Cinema XXI mencatatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan sebelum pandemi;

- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan preferensi penonton untuk lebih memilih saluran distribusi konten dan film alternatif karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi COVID-19;

- Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan jumlah penonton bioskop karena menurunnya arus pengunjung di pusat perbelanjaan di mana terdapat sebagian besar bioskop Cinema XXI terkait kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan yang terus berlanjut; dan

- Industri hiburan secara global telah mengalami gangguan dan penundaan dalam produksi film serta pengurangan aktivitas pemasaran oleh studio film besar selama pandemi COVID-19.

Sebagai contoh, jumlah penonton Cinema XXI menurun sebesar 81,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai dampak dari pembatasan terkait COVID-19, dan total pendapatan Cinema XXI juga mengalami penurunan sebesar 82,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk menjaga efisiensi operasional dan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha, Cinema XXI meninjau dan menyesuaikan prosedur operasional untuk mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, Cinema XXI menerapkan berbagai tindakan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan serta meninjau kembali proses perekrutan dan perpanjangan tenaga kerja, menunda pengeluaran modal untuk proyek baru, serta mengurangi kegiatan pemasaran, biaya umum dan administrasi. Cinema XXI menegosiasikan keringanan pembayaran sewa dan pengurangan biaya layanan untuk bioskop Cinema XXI dengan pemilik pusat perbelanjaan. Cinema XXI juga merancang ulang dan mengembangkan portofolio produk F&B dengan menyediakan produk F&B di sistem pengiriman makanan berbasis daring selama pembatasan terkait pandemi COVID-19 untuk memperoleh pendapatan tambahan. Cinema XXI juga memantau dan menghentikan *Stock Keeping Unit* ("**SKU**") tertentu untuk beberapa produk F&B guna meningkatkan efisiensi operasional. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan terus berdampak terhadap kegiatan usaha dan permintaan pelanggan Cinema XXI, hal tersebut kemungkinan besar tidak dapat dipastikan dan diprediksi.

Performa film box office

Pendapatan kegiatan usaha Cinema XXI terutama bergantung pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dari penjualan tiket bioskop atau *box office,* yang didorong oleh kesuksesan film *box office* dalam menarik penonton dan industri perfilman secara umum di Indonesia. Kesuksesan *box office* sangat ditentukan oleh ketersediaan, keragaman dan daya tarik sebuah film untuk penonton secara luas, yang dapat bergantung pada alur cerita, partisipasi sutradara dan aktor terkenal dalam film tersebut, penerimaan film oleh masyarakat, upaya pemasaran dari rumah produksi dan distributor serta faktor lainnya, termasuk jadwal rilis film, durasi waktu pemutaran film di bioskop, jadwal rilis dari film yang berpotensi saling bersaing. Selain itu, dengan mempertimbangkan sebaran bioskop Cinema XXI secara geografis, konten film yang ditawarkan oleh rumah produksi dan distributor juga harus dapat melayani penonton Cinema XXI sesuai dengan profil demografi mereka.

Performa buruk atau gangguan dalam produksi film atau pengurangan aktivitas pemasaran dari rumah produksi dan distributor, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI. Jika sebuah film tidak menghasilkan pendapatan bioskop yang memadai, pendapatan dari kegiatan usaha bioskop mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya yang ditanggung Cinema XXI, dan akibatnya, Cinema XXI mungkin mengalami kerugian untuk film tersebut. Sebagai contoh, hanya 79 film yang tersedia untuk diputar di bioskop Cinema XXI pada tahun 2020 dibandingkan dengan 254 film pada tahun 2019 karena kewajiban menutup bioskop dan membatasi kapasitas pengunjung terkait dengan pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan total pendapatan Cinema XXI turun 82,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hasil operasi Cinema XXI sangat tergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mengidentifikasi dan memperoleh lisensi pemutaran film dengan potensi komersial yang tinggi. Potensi daya tarik *box office*, genre, waktu dan durasi rilis dari suatu film, di antara faktor-faktor lainnya, juga dapat memengaruhi pendapatan Cinema XXI yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tambahan seperti penjualan F&B serta layanan iklan.

Ekspansi jejaring layar dan belanja modal.

Hasil operasi Cinema XXI tergantung pada, antara lain, jumlah, ukuran dan lokasi, serta pendapatan yang dihasilkan dari jejaring layar Cinema XXI. Ekspansi jejaring layar Cinema XXI telah menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan volume penjualan tiket secara keseluruhan, yang kemudian telah berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor, Cinema XXI memiliki pangsa pasar 57,7% di Indonesia berdasarkan jumlah layar. Cinema XXI terus meningkatkan jangkauan jejaring layar dan meningkatkan kualitas bioskop dengan menambahkan layar baru melalui pembangunan bioskop baru, mengganti tempat duduk dan meningkatkan kenyamanan tempat duduk untuk bioskop-bioskop tertentu, serta mengurangi layar lama melalui penutupan bioskop. Cinema XXI juga berupaya meningkatkan dan menyajikan pengalaman menonton yang mengesankan melalui penggunaan teknologi seperti penambahan format layar IMAX, penggunaan sistem pembelian tiket berbasis daring m.tix dan TIX.ID, penggunaan m.tix untuk pembelian produk F&B, dan penerapan teknologi digital dan suara untuk menyajikan pengalaman menonton film yang lebih imersif. Cinema XXI telah menambah 196 layar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, di mana sebanyak 138, 27, 21 dan 10 layar ditambahkan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022. Secara umum, setiap bioskop Cinema XXI memiliki setidaknya dua teater dan menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan pengalaman menonton film, seperti pengaturan kursi secara bertingkat, sofa yang nyaman, layar yang lebih lebar dan sistem suara menawan. Sebagai contoh, teater premium Cinema XXI, The Premiere, juga menawarkan kursi yang dapat direbahkan, pilihan menu F&B yang beragam dan ruang tunggu eksklusif yang seluruhnya ditawarkan untuk memberikan pengalaman menonton film berkualitas tinggi.

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 1.114, 93, dan 9 layar masing-masing untuk tipe teater Reguler/Deluxe, The Premiere dan IMAX, yang masing-masing mewakili 91,6%, 7,7%, dan 0,7% dari total layar Cinema XXI. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 9 teater IMAX dari total 10 teater IMAX yang ada di Indonesia.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai jejaring layar dan bioskop Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

	31 Desember			
Tipe	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Layar (berdasarkan tipe teater)				
Regular / Deluxe	1.114	1.105	1.098	1.072
The Premiere	93	93	90	89
IMAX	9	8	7	7
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168
Bioskop				
Jumlah bioskop	225	222	219	213

Keberhasilan rencana ekspansi jejaring layar Cinema XXI juga tergantung pada berbagai faktor, termasuk keberhasilan dalam mengidentifikasi lokasi yang sesuai dan memperoleh kontrak sewa baru atau memperbarui kontrak sewa lama dengan syarat dan ketentuan yang sesuai. Faktor penting lainnya termasuk keberhasilan dalam mengelola biaya pembukaan bioskop baru termasuk biaya pemasangan dan pengembangan, dan pengelolaan risiko terkait dengan kegiatan operasi di wilayah baru, termasuk risiko persaingan lokal. Kegagalan dalam mengembangkan, mendanai, atau mengoperasikan layar baru secara tepat waktu di lokasi bioskop yang sudah ada ataupun lokasi baru kemungkinan besar akan berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Pengembangan jejaring layar Cinema XXI memerlukan investasi yang besar pada tahap awal. Sebagai contoh, belanja modal rata-rata per layar adalah sekitar US$500.000 pada tahun 2019, dan berdasarkan laba tunai tahunan per layar sekitar US$100.000[5] pada tahun 2019, Cinema XXI memperkirakan akan mencapai pengembalian modal yang diinvestasikan untuk satu layar dalam waktu lima tahun. Cinema XXI menambah jumlah layar dengan cara memasang layar di bioskop yang sudah ada atau melalui pembukaan bioskop baru sesuai dengan rencana pengembangan. Perluasan jejaring bioskop memerlukan perencanaan dan perhitungan yang teliti akan berbagai komponen biaya, termasuk biaya perolehan sewa baru atau perpanjangan sewa lama, dan biaya pengadaan, pemasangan, dan pembukaan. Jika Cinema XXI tidak dapat menemukan lokasi yang cocok atau tidak dapat membuka layar baru sesuai biaya yang telah dianggarkan, atau terjadi peningkatan biaya selama proses identifikasi lokasi baru, akuisisi atau perpanjangan sewa atau pengadaan, pembukaan dan penambahan layar, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan dan hasil operasi Cinema XXI. Investasi dalam layar baru juga dapat menyebabkan peningkatan beban penyusutan tahunan sejalan dengan kenaikan basis aset yang dapat disusutkan dan juga dapat mendorong kebutuhan akan persediaan, tenaga kerja, sewa, biaya fasilitas umum, dan biaya langsung lainnya yang dapat meningkatkan beban Cinema XXI. Layar Cinema XXI yang terpasang di lokasi baru atau lokasi yang sudah ada mungkin tidak dapat mencapai target kunjungan penonton yang diharapkan pada tahap evaluasi proyek, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Tren perilaku konsumen di dalam target pasar Cinema XXI

Kegiatan usaha Cinema XXI juga dipengaruhi oleh tren pasar, profil demografi dan pola pengeluaran konsumen di dalam industri pemutaran film di Indonesia. Menurut Euromonitor, sebagai akibat dari perkembangan ekonomi di Indonesia, masyarakat di wilayah perkotaan memiliki daya beli diskresioner yang mapan dengan pendapatan siap dibelanjakan pada kota-kota di Indonesia meningkat dari US$382.274 juta pada tahun 2017 menjadi US$471.877 juta pada tahun 2021. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan, masyarakat Indonesia dapat mengalokasikan pendapatannya lebih besar untuk kegiatan budaya dan hiburan, termasuk menonton film. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kemampuan belanja yang meningkat dari basis konsumen pasar yang lebih besar dan ketersediaan pilihan film yang beragam di Indonesia, terutama karena perkembangan film domestik, telah mendukung tingkat kunjungan dan frekuensi menonton yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Euromonitor, masyarakat Indonesia cenderung bersedia untuk berbelanja demi mendapatkan pengalaman, di mana menonton film menjadi salah satu kegiatan rekreasi yang paling populer di antara masyarakat Indonesia. Cinema XXI berkeyakinan bahwa hasil operasi Cinema XXI akan terus didorong oleh peningkatan jumlah film dan penggemar film, serta frekuensi menonton yang semakin tinggi.

Bioskop Cinema XXI terletak di beberapa pusat perbelanjaan terbesar dan terkenal di Indonesia. Cinema XXI memperoleh manfaat dari arus pengunjung yang tinggi dari penyewa ritel lainnya di pusat perbelanjaan tersebut, dan profil kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi kota Tier 1, kota Tier 2, dan kota Tier 3 dan memiliki bioskop yang tersebar di 55 kota. Sebagian besar bioskop Cinema XXI terletak di kota Tier 1, yang memiliki kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga memiliki jumlah bioskop yang semakin meningkat di kota Tier 2 dan kota Tier 3. Euromonitor memperkirakan tingkat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di kota Tier 2 dan kota Tier 3 akan menjadi yang tertinggi antara tahun 2022 dan 2027. Kecenderungan yang terus berlangsung ini memengaruhi profitabilitas dan hasil operasi Cinema XXI.

5 Dihitung dari jumlah penonton tahunan per layar sebesar 100.901 dikalikan dengan laba tunai per tiket sebesar US$1.

Selain itu, ketersediaan film yang semakin banyak melalui saluran distribusi selain bioskop, misalnya melalui saluran distribusi berbasis digital, dapat mengakibatkan pergeseran permintaan pelanggan untuk menonton film di bioskop yang merupakan sumber pendapatan utama bagi film. Jika Cinema XXI tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup atau mengurangi beban sebagai respons terhadap setiap pergeseran permintaan pelanggan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Jumlah penonton, harga tiket, belanja F&B rata-rata per penonton dan iklan serta pendapatan lain-lain

Pendapatan Cinema XXI dipengaruhi terutama oleh jumlah penonton di bioskop, harga tiket, belanja F&B rata-rata per penonton untuk penjualan produk F&B, iklan dan pendapatan lain-lain, termasuk pendapatan Cinema XXI dari platform digital, layanan, acara, *movie card* dan *voucher*.

Jumlah penonton dan harga tiket: Pendapatan *gross box office* Cinema XXI dipengaruhi oleh jumlah penonton yang mengunjungi bioskop dan harga tiket yang ditetapkan oleh Cinema XXI di setiap bioskop. Kedua faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan profitabilitas bioskop dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Cinema XXI. Jumlah penonton sebagian besar ditentukan oleh lokasi pusat perbelanjaan dan karakteristik penduduk di sekitar lokasi bioskop serta faktor-faktor lain seperti jangkauan jejaring bioskop Cinema XXI dan film yang ditayangkan di bioskop. Cinema XXI secara strategis memilih lokasi bioskop di pusat perbelanjaan dengan arus pengunjung yang ramai di berbagai kota. Cinema XXI berusaha untuk terus mengejar peluang ekspansi bioskop dan layar bioskop secara organik dan terus bekerja bersama pengembang real estat komersial untuk memperluas jejaring bioskop Cinema XXI. Keberhasilan rencana ekspansi Cinema XXI juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan pusat perbelanjaan ritel yang baru, menemukan lokasi yang sesuai untuk bioskop, memperoleh kontrak sewa baru dengan syarat dan ketentuan yang sesuai, serta risiko lain sehubungan dengan dimulainya kegiatan operasi di pasar baru, termasuk persaingan lokal dan praktik dan kebiasaan bisnis yang baru ditemui.

Cinema XXI menggunakan strategi penetapan harga yang bervariasi dalam menentukan harga tiket bioskop, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk harga tiket historis pada lokasi bioskop tertentu, tingkat keterisian, tipe teater, harga tiket pesaing di daerah tersebut, jenis lokasi pusat perbelanjaan dan hari pemutaran film. Cinema XXI menganalisis faktor-faktor tersebut, memperkirakan permintaan pasar untuk film dan menetapkan harga tiket yang mencerminkan kondisi tersebut.

Belanja F&B rata-rata per penonton: Kegiatan usaha F&B telah menjadi penyumbang pendapatan yang penting serta pendukung marjin utama bagi Cinema XXI, mewakili sekitar 26,1% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 71,1% pada tahun 2019, dan sekitar 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 72,4% pada tahun 2022. Pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B ditentukan oleh jumlah penonton dan belanja F&B rata-rata per penonton. Untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan produk F&B, Cinema XXI fokus untuk meningkatkan jumlah transaksi F&B selama durasi waktu singkat yang dimiliki penonton sebelum pemutaran film atau di antara jeda waktu pemutaran film. Cinema XXI meningkatkan jumlah transaksi dengan menempatkan beberapa titik penjualan di bioskop Cinema XXI, dan memisahkan jalur antrian pemesanan dan pengambilan F&B, serta menawarkan opsi pemesanan F&B secara daring melalui m.food (fitur dari m.tix, yaitu sistem pembelian tiket berbasis seluler Cinema XXI). Untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata, proses pengembangan produk Cinema XXI dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa Cinema XXI menawarkan produk dan promosi yang menarik pada waktu yang optimal. Penawaran tersebut disesuaikan untuk masing-masing tipe teater dan target penonton. Cinema XXI juga melakukan kampanye penjualan dan pemasaran yang efektif yang didukung lebih lanjut oleh papan menu digital dan platform digital. Sebagai contoh, Cinema XXI telah menawarkan menu kombo bertema film *blockbuster*, membuat paket produk selama periode Ramadhan dan mengkomunikasikan informasi produk F&B melalui platform digital Cinema XXI dengan memanfaatkan data pelanggan yang berdampak terhadap peningkatan nilai transaksi F&B rata-rata.

Sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usaha F&B, belanja F&B rata-rata per penonton juga meningkat dari waktu ke waktu dari Rp17.615 pada tahun 2019 menjadi Rp23.447 pada tahun 2022.

Tabel di bawah menunjukan belanja F&B rata-rata per penonton untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Belanja F&B rata-rata per penonton[(1)] (Rp)	23.447	19.951	17.379	17.615
Jumlah transaksi F&B (‘000)	15.380	5.011	3.996	21.978
Tingkat penetrasi[(2)] (%)	22,9	22,4	19,7	19,7

Catatan:
(1) Merupakan pendapatan F&B sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop, dimana pendapatan F&B sebelum pajak merupakan pendapatan F&B sebelum pengurangan pajak yang berlaku.
(2) Mengacu pada persentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.

Selain itu, Cinema XXI telah meningkatkan penjualan F&B melalui saluran daring dan memperluas penawaran F&B di luar lokasi bioskop Cinema XXI untuk melayani segmen konsumen baru dari basis konsumen yang bukan penggemar film dalam rangka memperkuat arus pendapatan F&B. Cinema XXI menyediakan penawaran F&B di sistem pengiriman berbasis daring serta meluncurkan gerai XXI Café Box, gerai yang menjual produk F&B Cinema XXI di luar lokasi bioskop dan biasanya berlokasi di lantai dasar pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan arus pengunjung yang lebih tinggi. Sejak peluncuran penawaran F&B di platform pihak ketiga pada bulan November 2021, pendapatan F&B sebelum pajak Cinema XXI melalui platform pihak ketiga tersebut secara umum meningkat menjadi Rp22.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penjualan melalui pengiriman secara daring menyumbang rata-rata 2,0% dari total pendapatan F&B bulanan sebelum pajak antara bulan Oktober dan Desember 2022. Cinema XXI juga melihat pertumbuhan bulanan yang kuat dalam total pendapatan yang dihasilkan dari gerai XXI Café Box, di mana menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,8 miliar untuk bulan Desember 2022, meningkat 73,2% dibandingkan dengan bulan November 2022.

Terlepas dari upaya Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan F&B, jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana peluncuran produk F&B baru dan permintaan pelanggan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan F&B Cinema XXI atau mengakibatkan hilangnya pelanggan atau arus pengunjung yang lebih rendah. Sebagai contoh, Cinema XXI pernah menghadapi kendala yang menghambat pertumbuhan dan efisiensi operasional F&B termasuk terdapat sejumlah SKU yang tidak diperlukan, pengembangan produk tanpa kemampuan riset dan pengembangan yang kuat, data dan kinerja penjualan, kurangnya komunikasi pemasaran, waktu layanan yang tidak efisien selama jam sibuk di bioskop. Untuk mengatasi hal tersebut, Cinema XXI telah melakukan proses rasionalisasi SKU berdasarkan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja segmen F&B secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan profitabilitas dan proses ini telah berdampak terhadap hasil operasi Cinema XXI selama beberapa tahun terakhir.

***Iklan dan pendapatan lainnya*:** Cinema XXI menghasilkan pendapatan dari iklan melalui layanan iklan berbasis layar, *offline* dan *online* dengan memanfaatkan infrastruktur bioskop dan platform berbasis daring yang dimiliki Cinema XXI saat ini untuk menampilkan iklan, termasuk iklan film dan *slide* yang ditayangkan sebelum pemutaran film, penempatan iklan di dalam dan di luar bioskop, kios promosi, situs web dan platform media sosial Cinema XXI. Segmen usaha iklan memberikan kontribusi sebesar 7,2% dari total pendapatan Cinema XXI untuk tahun yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2019. Meskipun segmen usaha iklan belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan kontribusinya terhadap pendapatan hanya sebesar 3,0% dari total pendapatan Cinema XXI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendapatan iklan akan terus tumbuh menjadi sumber pendapatan penting bagi Cinema XXI di masa depan karena marjin keuntungan iklan yang tinggi sementara biaya untuk memasang iklan tidak signifikan. Namun demikian, Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendapatan iklan akan tetap relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan keseluruhan. Pendapatan iklan Cinema XXI ditentukan oleh tarif berbeda yang dikenakan kepada klien iklan yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori harga. Kategori tarif iklan Cinema XXI untuk iklan berbasis layar ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah penonton, lokasi bioskop, segmen target pasar, serta data utilisasi layar historis dan estimasi. Untuk iklan berbasis *offline*, Cinema XXI fokus pada masa tayang iklan, jenis bioskop dan penonton. Untuk iklan berbasis *online*, Cinema XXI mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah kunjungan ke situs web, jumlah *impression* (ketika pengguna melihat iklan), rasio klik-tayang dan penempatan materi iklan di situs web.

Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha platform digital, acara, *movie card* dan *voucher*. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha platform digital terutama dipengaruhi oleh jumlah transaksi penjualan tiket bioskop di platform m.tix dan TIX.ID dan pembayaran atas transaksi yang diproses pada platform tersebut. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha lain-lain seperti *voucher* dan *movie card* dipengaruhi oleh tingkat kunjungan penonton ke bioskop dan/atau *online traffic* atau jumlah pengguna terdaftar dalam platform digital Cinema XXI.

Beban dan biaya operasi

Laba Cinema XXI dipengaruhi oleh beban dan biaya operasi, yang terutama mencakup beban penayangan film dalam rangka penyediaan layanan pemutaran film di bioskop, beban bahan baku dan kemasan untuk produk makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform*, serta beban operasional lainnya.

Cinema XXI membayar biaya penayangan film kepada distributor dan/atau rumah produksi berdasarkan kesepakatan bagi hasil untuk film yang diperoleh dari masing-masing distributor dan/atau rumah produksi. Cinema XXI membayar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan yang diwajibkan sesuai peraturan pajak daerah. Perjanjian bagi hasil biasanya bersifat non-eksklusif dan memiliki syarat dan ketentuan standar industri. Skema bagi hasil dengan distributor dan rumah produksi adalah skema yang telah diterima dengan baik oleh distributor dan rumah produksi di Indonesia selama beberapa dekade dan telah terbukti mendorong diskusi antara distributor dan pemilik bioskop tentang jadwal rilis film untuk memaksimalkan sinergi antara kedua belah pihak. Setiap perubahan pada syarat dan ketentuan standar industri, atau rasio bagi hasil yang lebih rendah, atau pengenalan model baru, dapat secara material berdampak merugikan terhadap profitabilitas dan akhirnya terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha F&B memiliki marjin yang lebih tinggi daripada penjualan tiket dan lebih menguntungkan. Marjin F&B pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah 71,1%, 65,1%, 71,0% dan 72,4%. Biaya F&B meliputi biaya bahan baku seperti popcorn kernel, garam, mentega, dan minyak untuk produksi produk F&B utama dan biaya kemasan makanan dan minuman. Harga yang dibayarkan untuk barang-barang tersebut dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan pasokan, termasuk batasan kapasitas pemasok, kondisi perekonomian umum secara global dan fluktuasi harga komoditas, permintaan industri lain untuk bahan baku yang sama, serta ketersediaan bahan baku pengganti. Cinema XXI mendapatkan bahan baku tersebut dari pemasok berdasarkan kontrak pemasokan. Penentuan harga berdasarkan kontrak pemasokan ditentukan melalui formula yang mengikuti harga pasar, sementara kontrak pemasokan bahan baku lainnya menggunakan harga yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar dan nilai tukar mata uang asing. Dikarenakan biasanya terdapat jeda waktu sebelum Cinema XXI dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada pelanggan, perubahan beban bahan baku biasanya memiliki dampak jangka pendek terhadap marjin kotor dan laba kotor kegiatan usaha makanan dan minuman Cinema XXI.

Beban penyediaan *digital platform* terdiri dari beban bank, beban administrasi, dan biaya yang timbul dari pemrosesan transaksi di platform digital, yaitu m.tix dan TIX.ID. Beban-beban ini telah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi, namun setiap perubahan pada beban tersebut akan memengaruhi profitabilitas platform digital. Cinema XXI tidak menanggung beban dan biaya operasi untuk kegiatan usaha iklan.

Selain itu, beban operasional utama Cinema XXI mencakup kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, serta sewa. Cinema XXI juga menanggung beban dalam nilai yang lebih kecil untuk perpajakan, beban komunikasi, beban asuransi, jasa manajemen, beban perjalanan dan akomodasi, perlengkapan kantor, jasa profesional, beban promosi, rugi penurunan nilai aset tetap, beban penyusutan, dan beban dan biaya lain-lain. Fluktuasi beban tersebut akan memengaruhi hasil operasi Cinema XXI. Sebagai contoh, beban utilitas Cinema XXI menurun secara signifikan selama pandemi COVID-19 karena bioskop Cinema XXI ditutup sesuai dengan penutupan dan pembatasan kapasitas yang ditetapkan Pemerintah, namun pembukaan kembali operasi Cinema XXI dengan kapasitas penuh telah mengakibatkan kenaikan biaya utilitas. Seiring dengan ekspansi kegiatan usaha, biaya-biaya tersebut akan semakin meningkat, dan jika Cinema XXI tidak dapat meningkatkan pendapatan sejalan dengan ekspansi, hal tersebut dapat memengaruhi hasil operasi Cinema XXI.

Biaya kompensasi karyawan: Biaya kompensasi karyawan merupakan bagian besar dari jumlah beban operasional, mewakili 33,0%, 50,0%, 42,3%, dan 34,5% dari jumlah beban operasional masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kompensasi karyawan mencakup gaji dan paket tunjangan untuk karyawan. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki lebih dari 5.000 karyawan. Pada tahun 2020 dan 2021, kompensasi karyawan Cinema XXI turun masing-masing sebesar 45,4% dan 50,0%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh pemotongan upah karyawan yang dilakukan sampai dengan bulan November 2021, penurunan aktivitas rekrutmen/perekrutan, dan penundaan perpanjangan kontrak karyawan. Kompensasi karyawan Cinema XXI pada tahun 2022 meningkat sebesar 136,4% dibandingkan dengan tahun 2021, sebagai akibat dari pembukaan kembali operasi Cinema XXI dengan kapasitas penuh.

Beban perbaikan dan pemeliharaan: Cinema XXI juga menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan sehubungan dengan pemeliharaan, renovasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas fasilitas bioskop. Cinema XXI mengembangkan bioskop dengan menggunakan bahan bangunan berkualitas tinggi dan tahan lama untuk membuat bioskop yang kokoh dari sejak awal, dan hal tersebut akan mengurangi kebutuhan renovasi yang sering. Cinema XXI juga secara aktif memantau dan mengelola bioskop untuk memelihara fasilitas secara efisien dan melakukan perbaikan atas infrastruktur yang ada maupun pengembangan format layar, tempat duduk, dan infrastruktur yang baru. Besarnya beban pemeliharaan tersebut tidak dapat diprediksi dan akan memengaruhi hasil operasi Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal memelihara bioskop, maka hal tersebut dapat memengaruhi daya saing, yang kemudian berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Beban utilitas: Beban utilitas meliputi biaya listrik, gas dan air untuk operasi bioskop, mewakili 11,9%, 13,8%, 24,1%, dan 16,5% dari jumlah beban operasional masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Biaya untuk komoditas penting ini dipengaruhi oleh faktor pasar global dan domestik, dan setiap perubahan dalam harga yang dibayarkan untuk utilitas tersebut akan memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Biaya sewa: Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di properti sewa berdasarkan kontrak sewa berjangka waktu hingga 20 tahun. Cinema XXI membayar sewa dan biaya layanan secara bulanan kepada pengelola properti. Pada tahun 2020 dan 2021, beban sewa dan beban layanan lebih rendah karena Cinema XXI berhasil melakukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan sewa dan beban layanan untuk semua properti sewa selama pandemi COVID-19. Namun demikian, Cinema XXI berkeyakinan bahwa beban sewa akan meningkat karena biaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar properti di Indonesia, permintaan untuk properti komersial dengan lokasi premium, dan perubahan keseluruhan dalam harga properti di Indonesia. Setiap perkembangan buruk yang memengaruhi faktor-faktor ini dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI.

Faktor musiman

Pendapatan dan arus kas Cinema XXI bergantung pada jadwal penayangan film dari para distributor film internasional utama. Film-film yang paling banyak menarik penonton biasanya dirilis selama periode bulan Mei hingga Juli dan November hingga Desember, yang merupakan musim libur sekolah, libur lebaran dan libur akhir tahun, ketika jumlah penonton bioskop cenderung lebih tinggi, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan total pendapatan untuk periode-periode tersebut. Sebaliknya, Cinema XXI secara historis mengalami tingkat kunjungan yang lebih rendah pada kuartal pertama dalam tahun berjalan dibandingkan dengan kuartal lainnya, dan hasil operasional Cinema XXI kemungkinan akan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari satu kuartal ke kuartal lainnya.

Lebih lanjut, performa yang buruk dari film yang dirilis ke pasar, atau gangguan rilis film dalam periode-periode tersebut untuk alasan apapun, dapat berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI untuk seluruh tahun fiskal. Film *blockbuster* yang tidak terduga dalam periode lain dapat mengubah tren musiman tradisional. Oleh karena itu, waktu rilis film memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasional Cinema XXI, dan hasil operasional pada satu kuartal bukan merupakan indikasi atas hasil operasional pada kuartal lainnya, dan sebaiknya tidak digunakan sebagai indikator kinerja Cinema XXI untuk periode fiskal di masa mendatang.

Persaingan

Cinema XXI menghadapi persaingan dari operator jejaring bioskop lain berskala nasional atau daerah, pemilik bioskop independen kecil atau pemain lain dalam industri hiburan, termasuk sejumlah saluran distribusi film alternatif, seperti layanan *streaming* dan unduhan berbasis daring, video *home theater*, *pay-per-view*, saluran televisi kabel, *video-on-demand* dan saluran televisi satelit. Tindakan yang diambil oleh pesaing, serta tindakan yang Cinema XXI ambil untuk mempertahankan daya saing dan reputasi Cinema XXI, memengaruhi strategi, penetapan harga, dan marjin Cinema XXI. Selain itu, saluran distribusi film alternatif dapat menawarkan jadwal penayangan yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bioskop tradisional, atau bekerja sama dengan rumah produksi untuk mengembangkan konten tertentu yang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan hanya tersedia di platform OTT tersebut, di mana hal tersebut dapat membatasi kemampuan Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan, laba, arus pengunjung, dan/atau harga tiket rata-rata.

Kebijakan, peraturan dan pajak Pemerintah

Kegiatan usaha Cinema XXI dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi Pemerintah yang mengatur mengenai, antara lain kegiatan operasi bioskop, sensor film, pemutaran iklan sebelum film, kebersihan dan keamanan serta jenis pangan, jumlah dan sumber film. Sebagai contoh, Cinema XXI diwajibkan memprioritaskan film-film Indonesia untuk ditayangkan di bioskop, dilarang untuk memutar film dari hanya satu produser/distributor/importir yang mewakili lebih dari 50% pemutaran film selama enam bulan berturut-turut dan tunduk pada persyaratan sensor untuk film yang ditayangkan di bioskop. Selain itu, Cinema XXI diharuskan untuk mematuhi hukum dan regulasi terkait perlindungan konsumen umum, keselamatan produk dan persaingan usaha, lisensi, perizinan dan persetujuan untuk mempertunjukkan film dan untuk menjual makanan dan minuman. Cinema XXI juga mungkin diharuskan untuk memperoleh persetujuan atas penilaian dampak kesehatan dan lingkungan di Indonesia. Cinema XXI memandang bahwa kemampuannya untuk mematuhi regulasi atau memperoleh, memperbarui, atau memperbaiki ketidakpatuhan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan serta kemampuannya dalam membina hubungan baik dengan pihak regulator terkait akan terus memengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Lebih lanjut, pemerintah daerah memberlakukan pajak hiburan atas pemutaran film di bioskop termasuk multipleks di bawah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak hiburan di Indonesia secara historis cukup tinggi. Menurut Euromonitor, tarif pajak hiburan maksimum di Indonesia adalah 35%, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("**UU No. 1/2022**"), tarif pajak hiburan yang dikenakan pada bioskop diperkirakan akan dibatasi maksimum 10% setelah pemerintah daerah melaksanakan undang-undang ini pada bulan Januari 2024. Menurut Euromonitor, mengingat pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif pajak mereka sendiri, tingkat tarif pajak dapat berbeda untuk setiap daerah. Hal ini dapat membuat operator bioskop sulit memperkirakan anggaran pajak mereka. Ketidakpastian dalam peraturan perpajakan daerah, penundaan dalam pelaksanaan UU No. 1/2022, atau setiap kenaikan pajak hiburan atau pemberlakuan pajak tambahan pada industri pemutaran film di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

3. Analisis pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Berikut adalah ringkasan deskripsi dari pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terdapat dalam laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI:

Pendapatan

Cinema XXI saat ini memperoleh pendapatan dari penjualan tiket bioskop, produk makanan dan minuman, dan slot iklan. Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID, penyewaan peralatan, biaya layanan untuk acara yang diselenggarakan di XXI

Ballroom, pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang untuk *arcade game*, serta penjualan *voucher* dan *movie card*. Pendapatan tersebut seluruhnya dihasilkan di Indonesia. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha bioskop disajikan setelah dikurangi pajak hiburan.

Cinema XXI memperoleh sebagian besar pendapatan dari kegiatan usaha bioskop dan makanan dan minuman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari kegiatan usaha bioskop dan makanan dan minuman masing-masing mewakili sebesar 61,4% dan 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai rincian total pendapatan berdasarkan segmen usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
Bioskop	2.700.828	61,4	829.548	64,8	774.411	63,6	4.449.955	64,6
Makanan dan minuman	1.430.844	32,5	405.371	31,7	323.122	26,5	1.799.499	26,1
Iklan	130.730	3,0	10.777	0,8	96.583	7,9	494.898	7,2
Digital platform	116.848	2,6	30.954	2,4	17.459	1,4	114.732	1,7
Acara dan pendapatan lainnya[2]	21.800	0,5	3.536	0,3	7.418	0,6	30.950	0,4
Total pendapatan	**4.401.050**	**100,0**	**1.280.186**	**100,0**	**1.218.993**	**100,0**	**6.890.034**	**100,0**

Catatan:
(1) Dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan.
(2) Termasuk pendapatan dari XXI Ballroom, *arcade game*, *voucher* dan *movie card*.

Cakupan geografis Cinema XXI meliputi berbagai kota di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota Tier 2, dan kota Tier 3.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Cinema XXI berdasarkan tingkatan kota untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
Kota Tier 1[2]	1.827.802	67,7	564.443	68,0	531.452	68,6	3.157.356	71,0
Kota Tier 2[3]	572.121	21,2	177.092	21,4	158.243	20,5	816.619	18,3
Kota Tier 3[4]	300.905	11,1	88.013	10,6	84.716	10,9	475.980	10,7
Pendapatan bioskop	**2.700.828**	**100,0**	**829.548**	**100,0**	**774.411**	**100,0**	**4.449.955**	**100,0**

Catatan:
(1) Dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan.
(2) Kota Tier 1 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.
(3) Kota Tier 2 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Manokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
(4) Kota Kota Tier 3 merupakan kota-kota yang tidak termasuk dalam rentang PDB pada PPP per kapita kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi Cinema XXI terutama terdiri dari (i) beban penayangan film yang dikeluarkan sehubungan dengan penyediaan film untuk diputar di bioskop yang dibayarkan kepada distributor dan/atau rumah produksi berdasarkan pengaturan bagi hasil yang telah disepakati (pengaturan bagi hasil Cinema XXI bersifat non-eksklusif dan dibuat dengan distributor dan/atau rumah produksi untuk setiap film yang Cinema XXI dapatkan, di mana Cinema XXI membayar 50% dari total penjualan tiket (setelah dikurangi pajak hiburan yang diwajibkan berdasarkan peraturan pajak daerah yang berlaku)); (ii) beban makanan dan minuman, yang terdiri dari biaya bahan baku seperti kernel popcorn, garam,

mentega, dan minyak untuk produksi produk makanan dan minuman utama Cinema XXI dan biaya kemasan makanan dan minuman; (iii) beban penyediaan *digital platform* termasuk beban bank, beban administrasi, dan beban yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pemrosesan transaksi di platform digital, yaitu m.tix dan TIX.ID; (iv) beban operasional di luar penyusutan aset tetap, termasuk kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, sewa, perpajakan, beban komunikasi, beban asuransi, jasa manajemen, beban sehubungan dengan perjalanan dinas dan akomodasi, keperluan kantor, jasa profesional, beban sehubungan dengan promosi, rugi penurunan nilai aset tetap, dan beban lainnya; (v) beban penyusutan; dan (vi) beban dan biaya lainnya. Cinema XXI tidak mengeluarkan beban dan biaya operasi untuk kegiatan usaha iklan.

Tabel di bawah ini menyajikan komponen utama dari beban dan biaya operasi Cinema XXI untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
Beban penayangan film	1.350.414	36,7	414.974	25,3	387.205	20,7	2.224.953	42,8
Beban makanan dan minuman	394.622	10,7	117.481	7,2	112.809	6,0	519.856	10,0
Beban penyediaan *digital platform*	27.752	0,8	9.087	0,6	4.400	0,2	30.778	0,6
Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap	1.233.901	33,6	425.784	26,0	720.112	38,4	1.997.380	38,4
Beban penyusutan aset tetap	668.713	18,2	669.459	40,9	648.702	34,6	425.365	8,2
Lainnya[2]	1.510	0,0[nm]	229	0,0[nm]	713	0,1	2.506	0,0[nm]
Jumlah beban dan biaya operasi	**3.676.912**	**100,0**	**1.637.014**	**100,0**	**1.873.941**	**100,0**	**5.200.838**	**100,0**

Catatan:
(1) Dihitung berdasarkan persentase dari jumlah beban dan biaya operasi.
(2) Termasuk beban yang dikeluarkan terkait dengan XXI Ballroom dan beban lainnya yang dikeluarkan terkait dengan pendapatan lain-lain.
Nm: menjadi nol karena pembulatan.

Tabel di bawah ini menyajikan komponen utama dari beban operasional, di luar penyusutan aset tetap, untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
Kompensasi karyawan	425.755	34,5	180.114	42,3	360.168	50,0	659.287	33,0
Perbaikan dan pemeliharaan	240.143	19,5	138.445	32,5	131.330	18,2	382.645	19,2
Utilitas	203.709	16,5	102.447	24,1	99.113	13,8	237.671	11,9
Sewa[2]	115.059	9,3	39.436	9,3	45.105	6,3	299.710	15,0
Perpajakan[3]	90.361	7,3	31.022	7,3	39.436	5,5	133.387	6,7
Komunikasi	21.368	1,7	15.597	3,7	13.988	1,9	19.607	1,0
Asuransi	14.505	1,2	13.796	3,2	12.876	1,8	11.245	0,5
Jasa manajemen[4]	46.989	3.8	11.666	2,7	6.814	1,0	52.041	2,6
Perjalanan dinas dan akomodasi	41.127	3,3	10.709	2,5	16.289	2,3	44.905	2,2
Keperluaan kantor	27.742	2,3	9.915	2,3	19.774	2,7	53.440	2,7
Jasa profesional[5]	5.891	0,5	2.419	0,6	5.219	0,7	22.429	1,1
Promosi[6]	6.758	0,6	1.967	0,5	7.511	1,0	39.548	2,0
Rugi penurunan nilai aset tetap	-	-	1.241	0,3	-	-	-	-
Konsesi sewa	(27.016)	(2,2)	(141.988)	(33,4)	(51.257)	(7,1)	-	-
Lain-lain[7]	21.510	1,7	8.998	2,1	13.746	1,9	41.465	2,1
Jumlah beban operasional di luar penyusutan aset tetap	**1.233.901**	**100,0**	**425.784**	**100,0**	**720.112**	**100,0**	**1.997.380**	**100,0**

Catatan:
(1) Dihitung berdasarkan persentase dari jumlah beban operasional di luar penyusutan aset tetap.
(2) Sewa merupakan beban sewa dengan skema bagi hasil dan sewa peralatan.
(3) Perpajakan yang menjadi bagian dari beban operasional, termasuk pajak bangunan, pajak final atas sewa, PPN yang tidak dapat dikreditkan, pajak iklan dan biaya perpajakan lainnya seperti tagihan pajak, penalti, dan lain-lain.
(4) Jasa menajemen merupakan beban dari layanan manajemen untuk F&B dan dihitung sebesar 5% dari pendapatan sebelum pajak dari segmen F&B. Mulai bulan Januari 2023, tidak ada lagi jasa manajemen.
(5) Jasa profesional sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh akuntan publik, konsultan manajemen dan konsultan hukum.
(6) Promosi termasuk promosi bersama dengan pihak ketiga, media dan materi cetak.
(7) Lain-lain termasuk biaya yang dikeluarkan terkait hiburan, izin, lisensi, dan biaya bank.

Perubahan beban sewa Cinema XXI selama pandemi COVID-19 terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Sebelum 1 Januari 2020, beban sewa merupakan pembayaran yang dikeluarkan atas semua sewa. Sedangkan setelah 1 Januari 2020, beban sewa terutama terkait dengan sewa yang dibayarkan kepada para pemilik gedung sesuai dengan perjanjian sewa di mana Cinema XXI setuju untuk melakukan bagi hasil.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya terutama terdiri dari pendapatan ruang yang disewakan dan *secure parking* oleh Cinema XXI, dan keuntungan atas penghapusan aset tetap.

Beban lainnya

Beban lainnya terutama terdiri dari biaya untuk bahan pembersih dan penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi untuk tahun keuangan yang relevan, dan kerugian atas penghapusan aset tetap.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan terutama terdiri dari penghasilan bunga dan keuntungan kurs valuta asing dari dana yang ditempatkan di bank.

Beban keuangan

Beban keuangan terutama terdiri dari beban bunga untuk liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 73 (Sewa) yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020 dan beban bunga yang ditanggung dari pinjaman bank.

Pajak penghasilan

Pajak pengasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti terkait dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti berdasarkan progam imbalan kerja Cinema XXI.

4. Operasi per segmen

Cinema XXI mengkategorikan kegiatan usahanya berdasarkan produk utama, yaitu film, makanan dan minuman, iklan, *digital platform* dan lainnya. Tidak terdapat penjualan antar segmen selama tahun berjalan.

Informasi mengenai segmen usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
	Film	**Makanan dan minuman**	**Iklan**	***Digital platform***	**Acara dan lainnya**
Pendapatan					
Pihak eksternal	2.700.828	1.430.844	130.730	116.848	21.800
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(1.350.414)	(394.622)	-	(27.752)	(1.510)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(760.236)	(240.622)	(35.866)	(28.518)	(168.659)
Beban penyusutan aset tetap	(625.985)	(29.705)	-	(664)	(12.359)

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
	Film	**Makanan dan minuman**	**Iklan**	***Digital platform***	**Acara dan lainnya**
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-
Beban lainnya	-	-	-	-	(7.130)
Pendapatan keuangan	50.338	-	-	-	-
Beban keuangan	(131.871)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(117.340)	765.895	94.864	59.914	(167.858)
Beban pajak penghasilan	24.178	(157.813)	(19.547)	(12.345)	34.587
Laba (rugi)	(93.162)	608.082	75.317	47.569	(133.271)
Kontribusi terhadap pendapatan	61,4%	32,5%	3,0%	2,7%	0,5%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	(18,5)%	120,5%	14,9%	9,4%	(26,4)%
Marjin laba (rugi)	(3,4)%	42,5%	57,6%	40,7%	(611,3)%

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021				
	Film	**Makanan dan minuman**	**Iklan**	***Digital platform***	**Acara dan lainnya**
Pendapatan					
Pihak eksternal	829.548	405.371	10.777	30.954	3.536
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(414.974)	(117.481)	-	(9.087)	(229)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(234.543)	(72.400)	(29.928)	(16.614)	(72.289)
Beban penyusutan aset tetap	(625.102)	(34.835)	-	(550)	(8.972)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	3.347
Beban lainnya	-	-	-	-	(2.532)
Pendapatan keuangan	15.188	-	-	-	-
Beban keuangan	(136.742)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(566.625)	180.655	(19.161)	4.703	(77.139)
Beban pajak penghasilan	132.606	(42.278)	4.484	(1.101)	18.053
Laba (rugi)	(434.019)	138.377	(14.677)	3.602	(59.086)
Kontribusi terhadap pendapatan	64,8%	31,7%	0,8%	2,4%	0,3%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	118,7%	(37,8)%	4,0%	(1,0)%	16,2%
Marjin laba (rugi)	(52,3)%	34,1%	(136,1)%	11,6%	(1.671,0)%

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
	Film	**Makanan dan minuman**	**Iklan**	***Digital platform***	**Acara dan lainnya**
Pendapatan					
Pihak eksternal	774.411	323.122	96.583	17.459	7.418
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(387.205)	(112.809)	-	(4.400)	(713)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(457.677)	(139.039)	(35.866)	(21.686)	(65.844)
Beban penyusutan aset tetap	(601.643)	(35.184)	-	(546)	(11.329)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	70.928
Beban lainnya	-	-	-	-	(5.730)
Pendapatan keuangan	37.718	-	-	-	-
Beban keuangan	(134.044)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(768.440)	36.090	60.717	(9.173)	(5.270)
Beban pajak penghasilan	120.069	(5.639)	(9.486)	1.433	823
Laba (rugi)	(648.371)	30.451	51.231	(7.740)	(4.447)
Kontribusi terhadap pendapatan	63,5%	26,5%	7,9%	1,4%	0,6%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	112,0%	(5,3)%	(8,9)%	1,3%	0,8%
Marjin laba (rugi)	(83,7)%	9,4%	53,0%	(44,3)%	(59,9)%

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019				
	Film	**Makanan dan minuman**	**Iklan**	***Digital platform***	**Acara dan lainnya**
Pendapatan					
Pihak eksternal	4.449.955	1.799.499	494.898	114.732	30.950
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(2.224.953)	(519.856)	-	(30.778)	(2.506)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.304.116)	(56.889)	(5.978)	(9.377)	(621.020)
Beban penyusutan aset tetap	(392.330)	(30.700)	-	(326)	(2.009)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	30.481
Beban lainnya	-	-	-	-	(66.046)
Pendapatan keuangan	44.333	-	-	-	-
Beban keuangan	-	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	572.889	1.192.054	488.920	74.251	(630.150)
Beban pajak penghasilan	(142.898)	(297.339)	(121.953)	(18.521)	157.181
Laba (rugi)	429.991	894.715	366.967	55.730	(472.969)
Kontribusi terhadap pendapatan	64,6%	26,1%	7,2%	1,7%	0,4%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	33,7%	70,2%	28,8%	4,4%	(37,1)%
Marjin laba (rugi)	9,7%	49,7%	74,2%	48,6%	(1.528,2)%

Pembahasan mengenai perkembangan masing-masing segmen operasi dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Hasil operasi."

5. Hasil operasi

Tabel di bawah ini menyajikan data dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang dikonsolidasikan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
Pendapatan								
Bioskop	2.700.828	61,4	829.548	64,8	774.411	63,5	4.449.955	64,6
Makanan dan minuman	1.430.844	32,5	405.371	31,7	323.122	26,6	1.799.499	26,1
Iklan	130.730	3,0	10.777	0,8	96.583	7,9	494.898	7,2
Digital platform	116.848	2,6	30.954	2,4	17.459	1,4	114.732	1,7
Acara dan pendapatan lainnya	21.800	0,5	3.536	0,3	7.418	0,6	30.950	0,4
Total pendapatan	**4.401.050**	**100,0**	**1.280.186**	**100,0**	**1.218.993**	**100,0**	**6.890.034**	**100,0**
Beban dan biaya operasi:								
Beban penayangan film	(1.350.414)	(30,7)	(414.974)	(32,4)	(387.205)	(31,8)	(2.224.953)	(32,3)
Beban makanan dan minuman	(394.622)	(9,0)	(117.481)	(9,2)	(112.809)	(9,3)	(519.856)	(7,5)
Beban penyediaan *digital platform*	(27.752)	(0,6)	(9.087)	(0,7)	(4.400)	(0,4)	(30.778)	(0,4)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.233.901)	(28,0)	(425.784)	(33,3)	(720.112)	(59,1)	(1.997.380)	(29,0)
Beban penyusutan aset tetap	(668.713)	(15,2)	(669.459)	(52,3)	(648.702)	(53,2)	(425.365)	(6,2)
Lainnya	(1.510)	0,0[nm]	(229)	0,0[nm]	(713)	(0,1)	(2.506)	0,0[nm]
Total beban dan biaya operasi	**(3.676.912)**	**(83,5)**	**(1.637.014)**	**127,9**	**(1.873.941)**	**(153,7)**	**(5.200.838)**	**(75,4)**
Pendapatan (beban) lainnya								
Penghasilan lainnya	8.182	0,2	3.347	0,3	70.928	5,8	30.481	0,4
Beban lainnya	(15.312)	(0,4)	(2.532)	(0,2)	(5.730)	(0,5)	(66.046)	(1,0)
Total pendapatan (biaya) lainnya	**(7.130)**	**(0,2)**	**815**	**0,1**	**65.198**	**5,3**	**(35.565)**	**(0,6)**
LABA (RUGI) USAHA	**717.008**	**16,3**	**(356.013)**	**(27,8)**	**(589.750)**	**(48,4)**	**1.653.631**	**24,0**
Penghasilan keuangan	50.338	1,1	15.188	1,2	37.718	3,1	44.333	0,6
Beban keuangan	(131.871)	(3,0)	(136.742)	(10,7)	(134.044)	(11,0)	-	-
BEBAN KEUANGAN NETO	**(81.533)**	**(1,9)**	**(121.554)**	**(9,5)**	**(96.326)**	**(7,9)**	**44.333**	**0,6**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	**(%)[1]**	**2021**	**(%)[1]**	**2020**	**(%)[1]**	**2019**	**(%)[1]**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**635.475**	**14,4**	**(477.567)**	**(37,3)**	**(686.076)**	**(56,3)**	**1.697.964**	**24,6**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(130.940)	(3,0)	111.764	8,7	107.200	8,8	(423.530)	(6,1)
LABA (RUGI)	**504.535**	**11,5**	**(365.803)**	**(28,5)**	**(578.876)**	**(47,5)**	**1.274.434**	**18,5**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.690	0,0[nm]	14.790	1,2	(7.632)	(0,6)	(4.976)	(0,1)
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	(372)	0,0[nm]	(3.254)	(0,3)	1.526	0,1	1.244	(0,0)[nm]
Penghasilan komprehensif lain, neto	1.318	0,0[nm]	11.536	0,9	(6.106)	(0,5)	(3.732)	(0,1)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	**505.853**	**11.5**	**(354.267)**	**(27,7)**	**(584.982)**	**(48,0)**	**1.270.702**	**18,4**
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:								
Pemilik entitas induk	460.384	10,5	(351.315)	(27,4)	(545.744)	(44,8)	1.201.312	17,4
Kepentingan nonpengendali	44.151	1,0	(14.488)	(1,1)	(33.132)	(2,7)	73.122	1,1
	504.535	**11,5**	**(365.803)**	**(28,5)**	**(578.876)**	**(47,5)**	**1.274.434**	**18,5**
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:								
Pemilik entitas induk	461.456	10,5	(340.252)	(26,6)	(551.690)	(45,3)	1.197.676	17,4
Kepentingan nonpengendali	44.397	1,0	(14.015)	(1,1)	(33.292)	(2,7)	73.026	1,1
	505.853	**11,5**	**(354.267)**	**(27,7)**	**(584.982)**	**(48,0)**	**1.270.702**	**18,5**
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14		(4,68)		(7,28)		16,02	

Catatan:
(1) Dinyatakan sebagai persentase terhadap total pendapatan untuk periode terkait.
Nm: menjadi nol karena pembulatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp3.120.864 juta atau 243,8% menjadi Rp4.401.050 juta pada tahun 2022 dari Rp1.280.186 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya. Peningkatan total pendapatan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebagian besar mencerminkan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp1.871.280 juta atau 225,6% menjadi Rp2.700.828 juta pada tahun 2022 dari Rp829.548 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI sebesar lebih dari 44 juta tiket atau 200,1% dibandingkan dengan tahun 2021, sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan Mei 2022, dilanjutkannya rilis film yang tertunda oleh rumah produksi pada tahun 2022, dan kenaikan harga tiket rata-rata sebesar 8,5% menjadi Rp44.704 pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp41.212 pada tahun 2021.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp1.025.473 juta atau 253,0% menjadi Rp1.430.844 juta pada tahun 2022 dari Rp405.371 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI, sehingga mendorong kenaikan penjualan produk makanan dan minuman serta produk dalam kemasan, yang merupakan hasil dari upaya pengembangan produk yang dilakukan oleh Cinema XXI secara metodologis dengan mempertimbangkan beragam tipe bioskop, komunikasi produk yang tepat sasaran dan strategi penjualan dan kemitraan. Upaya-upaya tersebut secara kolektif menyebabkan meningkatnya nilai transaksi rata-rata per penonton sebesar 17,5% menjadi Rp23.447 pada tahun 2022 dibandingkan dengan Rp19.951 pada tahun 2021.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan meningkat sebesar Rp119.953 juta atau 1.113,0% menjadi Rp130.730 juta pada tahun 2022 dari Rp10.777 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan iklan berbasis layar sejalan dengan meningkatnya jumlah penonton di bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan Mei 2022.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp85.894 juta atau 277,5% menjadi Rp116.848 juta pada tahun 2022 dari Rp30.954 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan *convenience fee* dari m.tix dan TIX.ID sejalan dengan meningkatnya jumlah penjualan tiket secara daring, yang mungkin dipengaruhi perubahan perilaku pelanggan terhadap transaksi secara daring selama pandemi COVID-19, terutama di kalangan generasi muda.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya meningkat sebesar Rp18.264 juta atau 516,5% menjadi Rp21.800 juta pada tahun 2022 dari Rp3.536 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari XXI Ballroom dan *arcade game*, sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi meningkat sebesar Rp2.039.898 juta atau 124,6% menjadi Rp3.676.912 juta pada tahun 2022 dari Rp1.637.014 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp935.440 juta atau 225,4% menjadi Rp1.350.414 juta pada tahun 2022 dari Rp414.974 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI, mengingat bahwa beban penayangan film bersifat tetap terhadap pendapatan bioskop yaitu sebesar 50% setelah pajak hiburan yang berlaku.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp277.141 juta atau 235,9% menjadi Rp394.622 juta pada tahun 2022 dari Rp117.481 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman dan kenaikan penjualan produk dalam kemasan yang merupakan hasil dari upaya pengembangan produk secara *in-house*, komunikasi pemasaran dan kemitraan yang dilakukan oleh Cinema XXI.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp18.665 juta atau 205,4% menjadi Rp27.752 juta pada tahun 2022 dari Rp9.087 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bank seperti biaya *gateway* pembayaran dan biaya administrasi seiring dengan kenaikan transaksi pembelian tiket secara digital pada platform digital Cinema XXI sebanyak 19 juta tiket atau 205,4% dibandingkan pada tahun 2021.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp808.117 juta atau 189,8% menjadi Rp1.233.901 juta pada tahun 2022 dari Rp425.784 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kompensasi karyawan sejalan dengan penambahan jumlah karyawan dan kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas dan sewa karena dibukanya kembali bioskop Cinema XXI dan kenaikan aktivitas operasional sebagai hasil dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak Mei 2022, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan konsesi sewa.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp746 juta atau 0,1% menjadi Rp668.713 juta pada tahun 2022 dari Rp669.459 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penyusutan aset hak-guna, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penyusutan terkait pemugaran prasarana dan sistem suara proyektor untuk bioskop baru.

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya meningkat sebesar Rp1.281 juta atau 559,4% menjadi Rp1.510 juta pada tahun 2022 dari Rp229 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya untuk layanan dan acara sejalan dengan peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha lain sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp4.835 juta atau 144,5% menjadi Rp8.182 juta pada tahun 2022 dari Rp3.347 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari sewa ruang dan *secure parking* serta keuntungan dari penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Beban lainnya

Beban lainnya meningkat sebesar Rp12.780 juta atau 504,7% menjadi Rp15.312 juta pada tahun 2022 dari Rp2.532 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian dari penghapusan aset tetap dan pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan meningkat sebesar Rp35.150 juta atau 231,4% menjadi Rp50.338 juta pada tahun 2022 dari Rp15.188 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan serta kenaikan saldo kas dan setara kas dan keuntungan selisih asing atas kas dan setara kas dalam Dolar AS pada akhir periode yang mengalami apresiasi terhadap Rupiah pada tahun 2022 sebesar 10,2% dibandingkan dengan tahun 2021 (berdasarkan kurs Bank Indonesia sebesar Rp15.731 per US$1 pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Rp14.269 per US$1 pada tanggal 31 Desember 2021).

Beban keuangan

Beban keuangan menurun sebesar Rp4.871 juta atau 3,6% menjadi Rp131.871 juta pada tahun 2022 dari Rp136.742 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga sehubungan dengan liabilitas sewa sesuai PSAK 73 (Sewa).

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp1.113.042 juta atau 233,1% menjadi Rp635.475 juta pada tahun 2022 dari rugi sebelum pajak sebesar Rp477.567 juta pada tahun 2021. Laba sebelum pajak Cinema XXI pada tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 karena Cinema XXI membuka kembali seluruh bioskop Cinema XXI sejak bulan Mei 2022 sebagai hasil dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19. Tingkat keterisian di bioskop Cinema XXI adalah 25,6% pada tahun 2022 dibandingkan dengan 19,0% pada tahun 2021.

Beban (manfaat) pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan menurun sebesar Rp242.704 juta atau 217,2% menjadi beban pajak penghasilan sebesar Rp130.940 juta pada tahun 2022 dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp111.764 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal pada tahun 2022 dan 2021.

Laba (rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba meningkat sebesar Rp870.338 juta atau 237,9% menjadi Rp504.535 juta pada tahun 2022 dari rugi sebesar Rp365.803 juta pada tahun 2021.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti menurun sebesar Rp13.100 juta atau 88,6% menjadi Rp1.690 juta pada tahun 2022 dari Rp14.790 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas penyesuaian pengalaman dan penyesuaian tingkat bunga.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain menurun sebesar Rp2.882 juta atau 88,6% menjadi Rp372 juta pada tahun 2022 dari Rp3.254 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Penghasilan komprehensif lain, neto menurun sebesar Rp10.218 juta atau 88,6% menjadi Rp1.318 juta pada tahun 2022 dari Rp11.536 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti dan pajak atas penghasilan komprehensif lain.

Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan komprehensif meningkat sebesar Rp860.120 juta atau 242,8% menjadi Rp505.853 juta pada tahun 2022 dari jumlah rugi komprehensif sebesar Rp354.267 juta pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp61.193 juta atau sebesar 5,0% menjadi Rp1.280.186 juta pada tahun 2021 dari Rp1.218.993 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, dan kegiatan usaha lainnya, sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 pada sebagian tahun 2021, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha iklan.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp55.137 juta atau 7,1% menjadi Rp829.548 juta pada tahun 2021 dari Rp774.411 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan jumlah penonton sebesar dua juta atau 9,8% pada tahun 2021 sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan September 2021 dan adanya sedikit penurunan harga tiket rata-rata sebesar 1,0% menjadi Rp41.212 pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp42.271 pada tahun 2020, yang diterapkan sebagai strategi untuk menarik lebih banyak penonton untuk datang ke bioskop Cinema XXI.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp82.249 juta atau 25,5% menjadi Rp405.371 juta pada tahun 2021 dari Rp323.122 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan penjualan makanan dan minuman yang berasal dari penonton yang mulai datang kembali ke bioskop sebagai akibat sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan menurun sebesar Rp85.806 juta atau 88,8% menjadi Rp10.777 juta pada tahun 2021 dari Rp96.583 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya kegiatan pemasangan iklan berbasis layar di bioskop dibandingkan tahun 2020.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp13.495 juta atau 77,3% menjadi Rp30.954 juta pada tahun 2021 dari Rp17.459 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah tiket terjual melalui sistem reservasi tiket berbasis

daring sebanyak 3,4 juta tiket atau 58,6% dibandingkan dengan tahun 2020, yang mencerminkan pembukaan kembali bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait pandemi COVID-19.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya menurun sebesar Rp3.882 juta atau 52,3% menjadi Rp3.536 juta pada tahun 2021 dari Rp7.418 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dari acara yang diadakan di XXI Ballroom, dan aktivitas pemasaran pada tahun 2021.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp236.927 juta atau 12,6% menjadi Rp1.637.014 juta pada tahun 2021 dari Rp1.873.941 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional di luar penyusutan aset tetap, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman dan beban penyediaan *digital platform*.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp27.769 juta atau 7,2% menjadi Rp414.974 juta pada tahun 2021 dari Rp387.205 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan kegiatan usaha bioskop Cinema XXI.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp4.672 juta atau 4,1% menjadi Rp117.481 juta pada tahun 2021 dari Rp112.809 juta pada tahun 2020. Meskipun penjualan makanan dan minuman mengalami peningkatan, persentase beban makanan dan minuman terhadap total pendapatan kegiatan usaha makanan dan minuman justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual dan kenaikan penjualan produk makanan dan minuman yang memiliki marjin keuntungan lebih tinggi.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp4.687 juta atau 106,5% menjadi Rp9.087 juta pada tahun 2021 dari Rp4.400 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kegiatan usaha *digital platform*, serta tidak terjadi fluktuasi marjin kegiatan usaha *digital platform* yang signifikan.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp294.328 juta atau 40,9% menjadi Rp425.784 juta pada tahun 2021 dari sebesar Rp720.112 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kompensasi karyawan akibat pemotongan gaji yang dilakukan hingga bulan November 2021, pengurangan aktivitas perekrutan, dan penundaan perpanjangan kontrak karyawan, beban sewa akibat pembebasan biaya sewa untuk sejumlah bioskop, perpajakan akibat penurunan pajak sewa, pajak reklame dan PPN yang dapat dipulihkan, sertakeperluan kantor. Penurunan ini sebagian dikompensasi oleh beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, jasa manajemen untuk kegiatan usaha makanan dan minuman dan beban komunikasi, yang seluruhnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 pada sebagian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya menurun sebesar Rp484 juta atau 67,9% menjadi Rp229 juta pada tahun 2021 dari Rp713 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut sejalan dengan pendapatan dari kegiatan usaha acara dan lainnya, serta tidak terjadi fluktuasi marjin kegiatan usaha acara dan lainnya yang signifikan.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya menurun sebesar Rp67.581 juta atau 95,3% menjadi Rp3.347 juta pada tahun 2021 dari Rp70.928 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan lebih saji utang usaha yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017.

Beban lainnya

Beban lainnya menurun sebesar Rp3.198 juta atau 55,8% menjadi Rp2.532 juta pada tahun 2021 dari sebesar Rp5.730 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian beban sewa sebesar Rp2.133 juta dan penyesuaian lainnya termasuk penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp22.530 juta atau 59,7% menjadi Rp15.188 juta pada tahun 2021 dari Rp37.718 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan sewa dibayar di muka dan akrual atas beban untuk sewa gedung dan penyesuaian lainnya termasuk penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp2.698 juta atau 2,0% menjadi Rp136.742 juta pada tahun 2021 dari Rp134.044 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa pada tahun 2021 sehubungan dengan penambahan sewa akibat pembukaan bioskop baru dan perpanjangan sewa eksisting.

Laba/(rugi) sebelum pajak

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp208.509 juta atau 30,4% menjadi Rp477.567 juta pada tahun 2021 dari Rp686.076 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan pendapatan dan sebagai hasil dari inisiatif penghematan biaya dan peningkatan efisiensi dalam mengelola biaya operasi Cinema XXI.

Manfaat pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp4.564 juta atau 4,3% menjadi Rp111.764 juta pada tahun 2021 dari Rp107.200 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Cinema XXI masih mengalami kerugian fiskal pada tahun 2021.

Laba (rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, rugi menurun sebesar Rp213.073 juta atau 36,8% menjadi Rp365.803 juta pada tahun 2021 dari Rp578.876 juta pada tahun 2020.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti meningkat sebesar Rp22.422 juta atau 293,8% menjadi Rp14.790 juta pada tahun 2021 dari Rp(7.632) juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan aktuarial dibandingkan kerugian aktuarial pada tahun 2020 sehubungan dengan penyesuaian tingkat bunga dan penyesuaian pengalaman.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain menurun sebesar Rp4.780 juta atau 313,2% menjadi Rp(3.254) juta pada tahun 2021 dari Rp1.526 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti sebesar Rp14.790 juta pada tahun 2021 yang telah dikurangi pajak penghasilan dibandingkan dengan pengakuan kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain dari pengukuruan kembali kewajiban imbalan pasti sebesar Rp7.632 juta pada tahun 2020. Keuntungan (kerugian) aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain timbul dari penyesuaian tingkat bunga, asumsi demografis dan penyesuaiaan pengalaman.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Pendapatan komprehensif lain, neto, meningkat sebesar Rp17.642 juta, atau 288,9% menjadi Rp11.536 juta pada tahun 2021 dari Rp(6.106) juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan keuntungan dari pengukuran akturial pada tahun 2021.

Jumlah rugi komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah rugi komprehensif menurun sebesar Rp230.715 juta atau 39,4% menjadi Rp354.267 juta pada tahun 2021 dari Rp584.982 juta pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI menurun sebesar Rp5.671.041 juta atau sebesar 82,3% menjadi Rp1.218.993 juta pada tahun 2020 dari Rp6.890.034 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah pada industri hiburan di Indonesia untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI menurun sebesar Rp3.675.544 juta atau 82,6% menjadi Rp774.411 juta pada tahun 2020 dari Rp4.449.955 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penonton di bioskop terkait dengan penutupan bioskop Cinema XXI dari akhir bulan Maret 2020 hingga September 2020 sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Bioskop Cinema XXI mulai dibuka secara bertahap pada bulan Oktober 2020 tetapi dioperasikan di bawah kapasitas penuh karena pembatasan kapasitas yang diamanatkan oleh Pemerintah. Harga tiket rata-rata juga mengalami penurunan sebesar 4,3% menjadi Rp42.271 pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp44.174 pada tahun 2019.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman menurun sebesar Rp1.476.377 juta atau 82,0% menjadi Rp323.122 juta pada tahun 2020 dari Rp1.799.499 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penonton sehubungan dengan penutupan bioskop sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 yang ketat oleh Pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan menurun sebesar Rp398.315 juta atau 80,5% menjadi Rp96.583 juta pada tahun 2020 dari Rp494.898 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan iklan sehubungan dengan penutupan bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* menurun sebesar Rp97.273 juta atau 84,8% menjadi Rp17.459 juta pada tahun 2020 dari Rp114.732 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah tiket yang terjual secara daring melalui sistem reservasi tiket berbasing daring Cinema XXI sebanyak 35 juta tiket dari tahun 2019 karena dampak pandemi COVID-19 dari akhir bulan Maret 2020.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya menurun sebesar Rp23.532 juta atau 76,0% menjadi Rp7.418 juta pada tahun 2020 dari Rp30.950 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari acara, sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp3.326.897 juta atau 63,97% menjadi Rp1.873.941 juta pada tahun 2020 dari Rp5.200.838 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film menurun sebesar Rp1.837.748 juta atau 82,6% menjadi Rp387.205 juta pada tahun 2020 dari Rp2.224.953 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghentian sementara operasi dan penutupan bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman menurun sebesar Rp407.047 juta atau 78,3% menjadi Rp112.809 juta pada tahun 2020 dari Rp519.856 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan makanan dan minuman di bioskop Cinema XXI selama pandemi COVID-19 sehubungan dengan penghentian sementara operasi dan penutupan bioskop Cinema XXI.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* menurun sebesar Rp26.378 juta atau 85,7%, menjadi Rp4.400 juta pada tahun 2020 dari Rp30.778 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut konsisten dengan penurunan pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* karena lebih sedikit tiket yang terjual melalui sistem reservasi tiket berbasis daring sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp1.277.268 juta atau 63,9% menjadi Rp720.112 juta pada tahun 2020 dari Rp1.997.380 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas dan perpajakan sebagai hasil dari inisiatif penghematan biaya dan peningkatan efisiensi yang dilakukan Cinema XXI untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Beban sewa menurun terutama sebagai akibat dari penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tanggal 1 Januari 2020.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp223.337 juta atau 52,5% menjadi Rp648.702 juta pada tahun 2020 dari Rp425.365 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan aset hak-guna sebesar Rp140.747 juta sebagai hasil dari penerapan PSAK 73 (Sewa).

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya menurun sebesar Rp1.793 juta atau 71.5% menjadi Rp713 juta pada tahun 2020 dari Rp2.056 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kegiatan operasi untuk kegiatan usaha lainnya selama pandemi COVID-19.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp40.447 juta atau 132,7% menjadi Rp70.928 juta pada tahun 2020 dari Rp30.481 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan utang usaha yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017.

Beban lainnya

Beban lainnya menurun sebesar Rp60.316 juta atau 91,3% menjadi Rp5.730 juta pada tahun 2020 dari Rp66.046 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan lebih saji utang usaha sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017, penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban aktivitas purna operasi dan penurunan beban *tools subscription*.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp6.615 juta atau 14,9% menjadi Rp37.718 juta pada tahun 2020 dari Rp44.333 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga karena suku bunga yang lebih rendah.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp134.044 juta menjadi Rp134.044 juta untuk tahun 2020 dari nihil pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tahun 2020.

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba sebelum pajak menurun sebesar Rp2.384.040 juta atau 140,4% menjadi rugi sebelum pajak sebesar Rp686.076 juta pada tahun 2020 dari laba sebelum pajak sebesar Rp1.697.964 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan di seluruh segmen kegiatan usaha utama Cinema XXI, termasuk kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, dan iklan Cinema XXI sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp530.730 juta atau 125,3% menjadi Rp107.200 juta pada tahun 2020 dari beban pajak penghasilan sebesar Rp423.530 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya pajak penghasilan pada tahun 2020 sehubungan dengan posisi kerugian Cinema XXI sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dibandingkan dengan pajak penghasilan sebesar Rp360.517 juta pada tahun 2019 dan konversi beban pajak tangguhan sebesar Rp63.013 juta pada tahun 2019 menjadi aset pajak tangguhan sebesar Rp107.200 juta pada tahun 2020. Aset pajak tangguhan Cinema XXI terutama terdiri dari kompensasi kerugian fiskal (*carry forward*) sebesar Rp151.236 juta pada tahun 2020.

Laba/(rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba menurun sebesar Rp1.853.310 juta atau 145,4% menjadi rugi sebesar Rp578.876 juta pada tahun 2020 dari laba sebesar Rp1.274.434 juta pada tahun 2019.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti meningkat sebesar Rp(2.656) juta atau 53,4% menjadi Rp(7.632) juta pada tahun 2020 dari Rp(4.976) juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penyesuaian tingkat bunga yang digunakan oleh aktuaria dalam pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar Rp282 juta atau 22,7% menjadi Rp1.526 juta pada tahun 2020 dari Rp1.244 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Penghasilan komprehensif lain, neto meningkat sebesar Rp(2.374) juta atau 63,6% menjadi Rp(6.106) juta pada tahun 2020 dari Rp(3.732) juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan pajak atas penghasilan komprehensif lain.

Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan komprehensif menurun sebesar Rp1.855.684 juta atau 146,0% menjadi jumlah rugi komprehensif sebesar Rp584.982 juta pada tahun 2020 dari jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp1.270.702 juta pada tahun 2019.

6. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.048.962	1.089.780	573.854	1.494.838
Piutang usaha dan piutang lainnya				
- Pihak ketiga	69.231	35.304	23.982	143.971
- Pihak berelasi	115	136	136	1.413
Persediaan	96.395	58.497	67.742	80.799
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	21.411	32.123	29.076	62.064
JUMLAH ASET LANCAR	**2.236.114**	**1.215.840**	**694.790**	**1.783.085**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	3.942.447	4.417.703	4.492.729	3.392.753
Uang muka untuk pembelian aset tetap				
- Pihak ketiga	83.805	104.280	206.802	133.828
- Pihak berelasi	50.750	69.000	117.000	152.750
Klaim pengembalian pajak	129.456	140.540	137.832	8.273
Aset pajak tangguhan	218.815	382.815	274.305	165.579
Aset tidak lancar lainnya	98.159	87.563	90.599	90.075
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**4.523.432**	**5.201.901**	**5.319.267**	**3.943.258**
JUMLAH ASET	**6.759.546**	**6.417.741**	**6.014.057**	**5.726.343**

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset meningkat sebesar Rp341.805 juta atau 5,3% menjadi Rp6.759.546 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan dan penurunan aset pajak tangguhan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp1.020.274 juta atau 83,9% menjadi Rp2.236.114 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp959.182 juta 88,0% menjadi Rp2.048.962 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang berasal dari aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS.

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp678.469 juta atau 13,0% menjadi Rp4.523.432 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp5.201.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp475.256 juta atau 10,8% menjadi Rp3.942.447 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari beban penyusutan sebesar Rp668.713 juta. Aset pajak tangguhan juga menurun sebesar Rp164.000 juta 42,8% menjadi Rp218.815 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp382.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal yang diperoleh tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset meningkat sebesar Rp403.684 juta atau 6,7% menjadi Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas penjualan saham Perusahaan Anak, NES. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp521.050 juta atau 75,0% menjadi Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp694.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp515.926 juta atau 89,9% menjadi Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas penjualan saham NES sebesar Rp193.712 juta yang mengurangi kepemilikan Perseroan menjadi 60%.

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp117.366 juta atau 2,2% menjadi Rp5.201.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp75.026 juta atau 1,7% menjadi Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari beban penyusutan sebesar Rp669.459 juta. Penurunan tersebut sebagian dikompensasi oleh kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp108.510 juta atau 39,6% menjadi Rp382.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp274.305 juta pada 31 Desember 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset meningkat sebesar Rp287.714 juta atau 5,0% menjadi Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp5.726.343 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Klaim pengembalian pajak dan aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya

Aset lancar menurun sebesar Rp1.088.295 juta atau 61,0% menjadi Rp694.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.783.085 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp920.984 juta atau 61,6% menjadi Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.494.838 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.376.009 juta atau 34,9% menjadi Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.943.258 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp1.099.976 juta atau 32,4% menjadi Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.392.753 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna sebesar Rp1.452.936 juta. Klaim pengembalian pajak juga mengalami kenaikan sebesar Rp129.559 juta atau 1.566,1% menjadi Rp137.832 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp8.273 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan sebesar Rp108.726 juta atau 65,7% menjadi Rp274.305 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp165.579 juta karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha dan utang lainnya				
- Pihak ketiga	394.798	379.856	189.441	514.279
- Pihak berelasi	47.656	75.590	26.725	73.475
Utang pajak penghasilan	7.681	-	-	31.949
Utang pajak lainnya	75.649	62.461	22.025	142.776
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	171.966	170.580	162.191	154.932
Liabilitas sewa	71.119	73.011	63.101	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**2.466.284**	**761.498**	**463.483**	**917.411**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Kewajiban imbalan kerja	88.764	95.421	123.745	106.157
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.640.613**	**1.699.680**	**1.433.456**	**106.157**
JUMLAH LIABILITAS	**4.106.897**	**2.461.178**	**1.896.939**	**1.023.568**

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp1.645.719 juta atau 66,9% menjadi Rp4.106.897 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank yang berasal aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha sejalan dengan pembayaran kepada pemasok, dan penurunan liabilitas sewa karena pembayaran sewa tahunan kepada pemilik pusat perbelanjaan.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp1.704.786 juta atau 223,9% menjadi Rp2.466.284 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank menjadi Rp1.697.415 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS masing-masing sebesar Rp1.496.700 juta dan Rp200.000 juta.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp59.067 juta atau 3,5% menjadi Rp1.640.613 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa sebesar Rp52.410 juta atau 3,4% menjadi Rp1.551.849 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 karena adanya pembayaran liabilitas sewa Rp172.518 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp564.239 juta atau 29,7% menjadi Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dan utang usaha dan utang lainnya.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp298.015 juta atau 64,3% menjadi Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga sebesar Rp190.415 juta atau 100,5% menjadi Rp379.856 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp189.441 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga, beban akrual sewa, utilitas dan jasa pengelola serta beban akrual pembelian makanan dan minuman sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp266.224 juta atau 18,6% menjadi Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp294.548 juta atau 22,5% menjadi Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.309.711 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sejalan dengan penambahan sewa pusat perbelanjaan selama tahun berjalan untuk mendukung ekspansi Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp873.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual dari sewa pusat perbelanjaan sebagai liabilitas sewa. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemeirntah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp453.928 juta atau 49,5% menjadi Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp917.411 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga sebesar Rp324.838 juta atau 63,2% menjadi Rp189.441 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp514.279 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan penurunan utang pajak lainnya sebesar Rp120.751 juta atau 84,6% menjadi Rp22.025 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp142.776 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemeirntah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp1.327.299 juta atau 1.250,3% menjadi Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp106.157 juta pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa jangka panjang menjadi Rp1.309.711 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual dari sewa pusat perbelanjaan sebagai liabilitas sewa sebesar Rp1.431.065 juta.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950
Kepentingan nonpengendali	169.889	194.843	198.858	232.825
JUMLAH EKUITAS	**2.652.649**	**3.956.563**	**4.117.118**	**4.702.775**

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp1.303.914 juta atau 33,0% menjadi Rp2.652.649 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.956.563 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp1.763.614 juta atau 50,4% menjadi Rp1.737.554 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.501.168 juta pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari pembagian dividen tunai sebesar Rp1.700.000 juta. Cinema XXI juga melakukan pembagian dividen saham sebesar Rp525.070 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp160.555 juta atau 3,9% menjadi Rp3.956.563 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.117.118 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp340.252 juta atau 8,9% menjadi Rp3.501.168 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp3.841.420 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari rugi tahun berjalan yang dialami Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp585.657 juta atau 12,5% menjadi Rp4.117.118 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.702.775 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp551.690 juta atau 12,6% menjadi Rp3.841.420 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.393.110 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari rugi tahun berjalan yang dialami Cinema XXI.

7. Analisis arus kas

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar arus kas Cinema XXI untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.303.720	418.937	(459.477)	1.666.539
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(100.084)	113.550	(404.198)	(1.376.257)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(244.454)	(16.561)	(57.309)	(98.325)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	**959.182**	**515.926**	**(920.984)**	**191.957**
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.089.780	573.854	1.494.838	1.302.881
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**2.048.962**	**1.089.780**	**573.854**	**1.494.838**

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Pada tahun 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasi sebesar Rp1.303.720 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp4.392.624 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp2.657.150 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp431.708 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp46 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp418.937 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.295.788 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp689.627 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp184.517 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.707 juta.

Pada tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan penutupan bioskop, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp459.477 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.370.759 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp360.168 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp178.412 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.449.862 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.666.539 juta, terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp7.039.089 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp4.199.649 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp659.287 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp513.614 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp100.084 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan untuk perbaikan prasarana termasuk interior, instalasi listrik dan perbaikan lain yang dilakukan pada bioskop Cinema XXI dan pembelian peralatan studio dan kantor sebesar Rp100.084 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp113.550 juta, terutama disebabkan oleh arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp193.712 juta, yang sebagian dikompensasi oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp80.162 juta. Perseroan menjual 100.000 saham di NES kepada PT Elang Andalan Nusantara dengan total nilai US$13.500.000 (setara dengan Rp193.712 juta). Sebagai hasil dari penjualan tersebut, kepemilikan saham Perseroan di NES berkurang dari 70% menjadi 60% dan 40% lainnya dimiliki oleh PT Elang Andalan Nusantara.

Pada tahun 2020, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp404.198 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp404.198 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.376.257 juta, terutama disebabkan oleh ekspansi bioskop sebesar Rp1.376.265 juta, yang sebagian dikompensasi oleh arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp8 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp244.454 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp172.518 juta dan pembayaran dividen oleh Perseroan sebesar Rp1.769.351 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.697.415 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp16.561 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp57.309 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp56.634 juta dan pembayaran dividen oleh salah satu Perusahaan Anak sebesar Rp675 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp98.325 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran dividen oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan kas Cinema XXI terutama digunakan untuk:

- mendanai aktivitas operasi;
- mendanai belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas peralatan dan pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembaharuan fasilitas bioskop Cinema XXI;
- membayar dividen;
- membayar utang Perseroan;
- membayar pajak termasuk pajak penghasilan, pemotongan pajak penghasilan, pajak hiburan dan pajak restoran.

Sumber likuiditas internal Cinema XXI secara historis terutama berasal dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Cinema XXI juga menggunakan pinjaman dari bank sebagai sumber likuiditas eksternal pada tahun 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp2.048.962 juta. Ke depannya, Perseroan memperkirakan sumber likuiditas utama akan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi.

Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan kas dari operasi tergantung pada kinerja operasi di masa depan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi antara lain kondisi ekonomi, keuangan, pasar, regulasi, dan lainnya, yang dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko," di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor utama yang dapat memengaruhi likuiditas Cinema XXI telah diungkapkan pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI." Selain faktor tersebut, tidak terdapat kecenderungan lain yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen lain, kejadian dan/atau ketidakpastian lain yang diketahui Perseroan yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Cinema XXI.

Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas perbankan yang tersedia, dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan setelah dikurangi biaya emisi, Perseroan berkeyakinan Cinema XXI memiliki modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas saat ini dan untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Selain itu, Cinema XXI senantiasa menjaga piutang usaha dan persediaan dari kegiatan penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman pada tingkat yang rendah, sehingga Cinema XXI memiliki tingkat perputaran kas yang sehat. Dalam hal Cinema XXI memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan berkeyakinan akan dapat memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank ataupun mengakses pendanaan utang dari pasar, di mana hal ini didukung oleh kinerja operasional yang kuat dan tingkat utang yang masih rendah.

9. Belanja modal

Belanja modal historis

Cinema XXI secara rutin melakukan belanja modal untuk memperluas jejaring bioskop, memelihara, merenovasi, dan memperbarui bioskop dan fasilitas, meningkatkan kualitas peralatan, dan meningkatkan efisiensi operasional Cinema XXI. Sebagian besar belanja modal Cinema XXI selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini telah dilakukan dalam bentuk pemasangan layar baru dan pembaruan layar di bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis Cinema XXI yang dikeluarkan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Bioskop baru	79.611	182.111	199.721	1.055.995
Renovasi	-	4.446	26.409	40.749
Beban kapitalisasi	66.357	42.061	66.049	180.361
Jumlah belanja modal[(1)]	**145.968**	**228.618**	**292.179**	**1.277.105**

Catatan:

(1) Belanja modal terdiri dari pengeluaran sehubungan dengan penambahan aset tetap hanya untuk kegiatan usaha bioskop dan F&B. Belanja modal tidak termasuk biaya sehubungan dengan aset hak-guna, biaya penghapusan aset atau penambahan aset tetap di kantor pusat Cinema XXI atau biaya berhubungan dengan NES.

Cinema XXI mengurangi pengeluaran untuk belanja modal untuk keperluan ekspansi dan fokus pada pemeliharaan dan perawatan bioskop pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, Cinema XXI meningkatkan belanja modal karena pemulihan permintaan yang kuat dengan memanfaatkan besarnya total pasar yang tersedia dalam industri bioskop di Indonesia, dan memfokuskan ekspansi secara selektif pada kota Tier 2 dan kota Tier 3 yang kurang terlayani.

Secara khusus, Cinema XXI telah menandatangani kontrak pengadaan dengan pemasok pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana studio baru. Total nilai kontrak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp871,0 miliar, di mana sebesar Rp118,6 miliar telah dibayarkan dimuka dalam Rupiah. Cinema XXI memperkirakan untuk terus mendanai pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana dengan menggunakan kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan/atau sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Waktu yang diperlukan untuk membangun bioskop berkisar tiga sampai dengan enam bulan. Setelah pengembangan studio baru diselesaikan sesuai dengan kontrak tersebut di atas, jumlah layar bioskop Cinema XXI diperkirakan untuk akan bertambah sebanyak 113 layar baru yang tersebar di 17 kota di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana studio baru dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Prospektus ini dengan judul "Perjanjian-perjanjian penting."

Rencana belanja modal

Per tanggal 31 Desember 2022, rencana belanja modal Cinema XXI berkaitan dengan (i) ekspansi jaringan bioskop; dan (ii) belanja modal lainnya termasuk pemeliharaan, renovasi dan pembaruan bioskop.

Ke depannya, Cinema XXI memperkirakan belanja modal per layar untuk ekspansi akan berada pada tingkat yang sama, dan meningkat sejalan dengan inflasi dan disesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Cinema XXI memperkirakan belanja modal untuk pemeliharaan relatif stabil dan berkisar antara 3-4% dari total pendapatan. Cinema XXI berencana untuk menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga lima tahun ke depan dan membuka sebanyak sekitar 80 layar baru pada akhir tahun 2023 dan sekitar 140 layar baru pada akhir tahun 2024.

Tabel di bawah menyajikan perkiraan jumlah layar berdasarkan tier kota untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	**2023**
Kota Tier 1	916	859
Kota Tier 2	326	276
Kota Tier 3	205	163
Total	**1.447**	**1.298**

Cinema XXI berharap dapat memenuhi kebutuhan belanja modal melalui kas dan setara kas, arus kas dari aktivitas operasi di masa depan dan/atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pendanaan dan pembayaran kembali utang tepat waktu tergantung pada berbagai ketidakpastian, termasuk hasil operasi di masa depan, kondisi keuangan dan arus kas Cinema XXI, serta kondisi ekonomi di Indonesia.

Belanja modal aktual mungkin menjadi jauh lebih besar atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk antara lain, kemampuan untuk melaksanakan rencana ekspansi, kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang memadai dari aktivitas operasi, dan kemampuan untuk memperoleh pendanaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan. Selain itu, Cinema XXI tidak dapat menjamin apakah, atau dengan biaya berapa, proyek-proyek belanja modal yang direncanakan atau lainnya akan dapat diselesaikan atau bahwa proyek-proyek ini akan berhasil jika selesai.

10. Jumlah kewajiban terutang

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pinjaman dan liabilitas sewa Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jangka pendek				
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	71.119	73.011	63.101	-
Jumlah liabilitas berbunga jangka pendek	**1.768.534**	**73.011**	**63.101**	-
Jangka panjang				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Jumlah liabilitas berbunga jangka panjang	**1.551.849**	**1.604.259**	**1.309.711**	-
Jumlah liabilitas berbunga	**3.320.383**	**1.677.270**	**1.372.812**	-

Pinjaman bank

Pinjaman bank Cinema XXI tercatat sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp1.697.415 juta masing-masing per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022. Peningkatan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 disebabkan oleh pinjaman dari bank untuk keperluan modal kerja.

Liabilitas sewa

Cinema XXI menandatangani perjanjian sewa dengan pengembang berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk membuka bioskop. Perjanjian sewa ini memiliki jangka waktu hingga maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang. Cinema XXI telah mengakui liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 73 (Sewa) sejak tanggal 1 Januari 2020.

Liabilitas sewa Cinema XXI tercatat sebesar nihil, Rp1.372.812 juta, Rp1.677.270 juta dan Rp1.622.968 juta masing-masing per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022. Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2022 relatif stabil dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas sewa Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh tambahan perjanjian sewa baru. Peningkatan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) yang menjadi efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Oleh karena itu, tidak terdapat liabilitas sewa yang dicatatkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Cinema XXI berencana untuk tidak memiliki utang berbunga (di luar liabilitas sewa) dalam waktu dekat di masa mendatang. Cinema XXI berencana untuk melunasi pinjaman bank yang dimiliki saat ini setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak berencana untuk mengambil pinjaman bank lagi.

11. Kewajiban kontraktual dan komitmen

Selain kewajiban kontraktual terkait pembayaran atas kewajiban terutang, termasuk liabilitas sewa, Cinema XXI memiliki komitmen berkelanjutan sesuai dengan perjanjian pembelian terkait pembelian dan pemasangan mesin dan peralatan, kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa dan layanan, perjanjian pembelian lahan, dan pembelian bahan baku.

Kewajiban kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022, Cinema XXI tidak memiliki kewajiban kontinjensi. Cinema XXI juga tunduk pada litigasi dan klaim yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Komitmen off-balance sheet

Cinema XXI tidak mencatatkan pengaturan, transaksi, kewajiban, atau hubungan lain dengan perusahaan yang tidak dikonsolidasikan di luar laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI yang dapat memiliki dampak material saat ini atau di masa depan terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi Cinema XXI.

12. Kebijakan akuntansi penting

Cinema XXI telah mengidentifikasi beberapa kebijakan akuntansi penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI yang tecantum di bagian lain dalam Prospektus ini. Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI mencakup ringkasan kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI. Penentuan kebijakan akuntansi ini sangat mendasar bagi kondisi keuangan dan hasil operasi, dan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan subjektif mengenai hal-hal berdasarkan informasi dan data yang mungkin berubah pada periode mendatang. Sebagai akibatnya, penentuan mengenai pos-pos penting ini melibatkan penggunaan asumsi dan pertimbangan subjektif terhadap peristiwa masa depan dan dapat berubah, serta penggunaan asumsi atau data yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda secara material. Selain itu, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Pemilihan kebijakan akuntansi yang signifikan, penilaian dan ketidakpastian lain yang memengaruhi penerapan kebijakan lain, serta sensitivitas hasil pelaporan terhadap perubahan kondisi dan asumsi adalah faktor yang harus dipertimbangkan pada saat mereviu informasi keuangan konsolidasian Cinema XXI. Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI mencakup deskripsi tentang pertimbangan dan estimasi akuntansi signifikan yang digunakan oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kebijakan akuntansi signifikan berikut ini melibatkan pertimbangan dan estimasi paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian Cinema XXI.

Imbalan kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain.

Ketika manfaat program berubah atau ketika suatu kurtailmen atas program terjadi, dampak perubahan manfaat tersebut yang terkait dengan jasa masa lalu atau keuntungan/kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Aset tetap

Aset tetap (termasuk aset hak-guna), diukur dengan model biaya (yaitu pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya diukur pada nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai). Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Pengembangan prasarana	10-20 tahun
Aset hak-guna	10-20 tahun
Peralatan studio dan kantor	5-10 tahun
Perabot dan perlengkapan	8 tahun
Kendaraan	5 tahun

Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir tahun pelaporan keuangan, dan jika diperlukan akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi. Jika nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai aset dibebankan pada laba rugi tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan.

Sewa

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Cinema XXI menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

- kontrak melibatkan penggunaan secara substantial semua kapasitas dari aset identifikasikan yang secara fisik dapat dibedakan (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit di dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;

- Cinema XXI memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

- Cinema XXI memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset; yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan untuk tujuan penggunaan aset.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Cinema XXI mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Cinema XXI mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Estimasi umur manfaat aset hak-guna ditentukan dengan menggunakan basis yang sama untuk aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Cinema XXI.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Cinema XXI cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Cinema XXI cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali jika Cinema XXI cukup yakin untuk tidak mengakhirinya lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Cinema XXI atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Cinema XXI mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol. Aset hak-guna Cinema XXI disajikan sebagai "Aset tetap" dan liabilitas sewa disajikan sebagai "Liabilitas sewa" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Cinema XXI memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah seperti peralatan kantor. Cinema XXI mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sewa di mana Cinema XXI mengambil alih secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset yang diperoleh diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, aset sewa diukur pada jumlah yang sama dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, aset sewa dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk aset tersebut. Jika tidak terdapat cukup kepastian bahwa Cinema XXI akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan dari masa manfaatnya. Pengaturan sewa di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dialihkan kepada Cinema XXI diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, di mana pembayaran sewa diakui sebagai beban selama masa sewa, dan aset pendasar tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI.

13. Perubahaan kebijakan akuntansi penting

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("**PSAK**") yang berlaku pada tahun 2020:

PSAK No.71, "Instrumen Keuangan"

Penerapan PSAK 71, mengharuskan kepatuhan dengan PSAK 1 yang baru diubah, "Penyajian Laporan Keuangan," yang mewajibkan penurunan nilai aset keuangan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, bukan diklasifikasikan sebagai beban administrasi. Selain itu, pengungkapan tambahan tertentu telah ditambahkan untuk menyesuaikan dengan informasi tahun 2020 dengan amandemen terkait PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan."

Klasifikasi aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam satu dari tiga kategori berdasarkan model bisnis yang mendasari pengelolaan aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktualnya; diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (PVOCI), atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTFL).

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengganti model penurunan nilai "kerugian yang timbul" dari PSAK 55 dengan model penurunan nilai "kerugian kredit ekspektasian" (KKE). Model penurunan nilai baru tersebut berlaku untuk semua aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI, sehingga tidak terdapat dampak kuantitatif pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI.

PSAK No.72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 72 didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan sebesar jumlah yang diharapkan menjadi hak entitas. Bergantung pada apakah kriteria tertentu terpenuhi, pendapatan diakui sepanjang waktu, dengan cara yang menggambarkan kinerja entitas, atau pada waktu tertentu ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan.

Cinema XXI telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk pengakuan pendapatan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3b pada laporan keuangan konsolidasian. Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI, sehingga tidak terdapat dampak kuantitatif pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI.

PSAK No. 73, "Sewa"

Definisi sewa

PSAK 73 mendefinisikan sewa sebagai kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset untuk suatu periode waktu. Menurut standar baru, model akuntansi ganda sebelumnya untuk penyewa, yang membedakan antara sewa pembiayaan di neraca dan sewa operasi di luar neraca, telah dihapuskan.

Klasifikasi – penyewa

Sebagai penyewa, Cinema XXI sebelumnya mengkategorikan sewa sebagai sewa "pembiayaan" atau "operasi" berdasarkan penilaian apakah sewa tersebut mengalihkan secara signifikan semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar kepada Cinema XXI. Berdasarkan PSAK 73, aset hak-guna dan liabilitas sewa diakui untuk sebagian besar sewa – yaitu tidak ada sewa di luar neraca. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang telah dibayar dimuka atau masih harus dibayar.

Penerapan PSAK 73 telah mengakibatkan Cinema XXI mengakui aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.452.936 juta setelah reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp21.871 juta (yang sebelumnya disajikan sebagai bagian dari uang muka dan biaya dibayar dimuka), dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.431.065 juta.

14. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tentang risiko pasar

Cinema XXI terpapar risiko yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari mulai dari perubahan suku bunga pasar dan nilai tukar mata uang asing, laju inflasi, dan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Cinema XXI tidak memegang atau menerbitkan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi atau perdagangan. Manajemen risiko menjadi bagian penting dari

kegiatan usaha. Cinema XXI memiliki sistem pengendalian untuk menciptakan keseimbangan yang dapat diterima antara biaya risiko yang terjadi dan biaya pengelolaan risiko. Manajemen Cinema XXI terus memantau proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengendalian tercapai.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Cinema XXI tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Cinema XXI mengevaluasi dan memonitor arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas untuk menjaga saldo kas dan setara kas pada tingkat yang dianggap cukup oleh manajemen untuk membiayai kegiatan operasi, menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk mengurangi efek fluktuasi arus kas.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian keuangan yang dihasilkan dari kegagalan pelanggan atau pihak pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada Cinema XXI sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak pada saat jatuh tempo. Risiko kredit muncul timbul dari piutang dagang dari penjualan barang.

Paparan Cinema XXI terhadap risiko kredit yang timbul dari kas dan setara kas terbatas karena pihak ketiga adalah bank dan lembaga keuangan dengan kredibilitas tinggi yang dianggap memiliki risiko kredit yang rendah. Paparan Cinema XXI terhadap risiko kredit yang timbul dari intrumen utang juga terbatas karena Cinema XXI hanya berinvestasi pada instrumen utang dengan peringkat kredit dan likuiditas yang baik. Cinema XXI juga telah menetapkan kebijakan kredit terkait pelanggan yang mengharuskan setiap pelanggan baru dianalisis secara individual untuk kelayakannya sebelum ditawarkan batas kredit, syarat, dan/atau kondisi pembayaran.

Manajemen Cinema XXI memiliki kebijakan kredit untuk memantau risiko kredit secara berkelanjutan dengan melakukan analisis keuangan dan penilaian terhadap kredit pelanggan, meminta jaminan bank dan/atau jaminan pribadi untuk kredit di atas jumlah tertentu, menegakkan syarat kredit, mengontrol penggunaan kredit, dan meninjau penagihan utang. Nilai wajar piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Cinema XXI adalah saldo piutang bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa perubahan suku bunga pasar di masa depan akan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Cinema XXI. Risiko suku bunga adalah risiko bahwa arus kas masa depan dari instrumen keuangan akan fluktuatif karena perubahan suku bunga pasar. Cinema XXI memantau fluktuasi suku bunga pasar dan mengelola kewajiban dengan meminjam pada suku bunga tetap.

Cinema XXI memiliki pinjaman bank dengan suku bunga tetap, dan oleh karena itu Cinema XXI terekspos risiko atas perubahan nilai wajar pinjaman bank. Meski demikian, pinjaman bank diukur pada biaya perolehan diamortisasidan jangka waktu pinjaman bank kurang dari satu tahun sehingga dampak perubahan nilai wajar tidak signifikan.

Risiko nilai tukar valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing adalah risiko yang muncul dari perubahan kurs Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Cinema XXI, terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS, di mana hal tersebut mengakibatkan risiko bahwa nilai wajar arus kas masa depan terkait pembelian dan penjualan dalam denominasi mata uang asing akan fluktuatif. Beberapa aset dan transaksi operasional Cinema XXI dalam denominasi mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing akan memengaruhi kinerja keuangan Cinema XXI.

Sebagian besar eksposur Cinema XXI terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing timbul dari pembelian dan pembayaran bahan baku untuk produk makanan dan minuman, serta peralatan untuk bioskop dan pembayaran lainnya yang dinyatakan dalam denominasi mata uang asing, seperti Dolar AS.

Net eksposur Cinema XXI terhadap risiko nilai tukar mata uang asing adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Aset	13.550.408	13.508.457	9.757	7.071

Cinema XXI menilai penguatan/pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 tidak akan berdampak signifikan terhadap ekuitas dan laba setelah pajak penghasilan.

15. Perkembangan terkini

Hasil operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp247.604 juta atau 39,0% menjadi Rp883.255 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebesar Rp635.651 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya. Peningkatan total pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis di bioskop Cinema XXI sehubungan dengan banyaknya rilis film *box office* baru dan beroperasinya bioskop secara penuh selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp123.327 juta atau 30,3% menjadi Rp530.275 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp406.948 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebagai akibat dari banyaknya rilis film *box office* dan beroperasinya bioskop Cinema XXI secara penuh terkait dengan pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19, dan kenaikan harga tiket rata-rata sekitar 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp110.364 juta atau 55,1% menjadi Rp310.728 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp200.364 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI dan berkurangnya kekhawatiran pengunjung terkait risiko kesehatan dan keselamatan terkait COVID-19 untuk pembelian produk makanan dan minuman dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan nilai transaksi rata-rata per penonton meningkat sebesar 20,9% menjadi Rp25.349 untuk periode tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan Rp20.962 untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan meningkat sebesar Rp3.576 juta atau 24,4% menjadi Rp18.223 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp14.647 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan iklan berbasis layar di bioskop Cinema XXI selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp5.622 juta atau 47,9% menjadi Rp17.364 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp11.742 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan transaksi penjualan tiket secara daring dan kenaikan *convenience fee* rata-rata selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan lainnya meningkat sebesar Rp4.715 juta atau 241,8% menjadi Rp6.665 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp1.950 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari XXI Ballroom sebesar Rp3.856 juta, sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 selama tiga bulan pertama tahun 2023.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi meningkat sebesar Rp203.813 juta atau 30,7% menjadi Rp866.638 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp662.825 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp61.664 juta atau 30,3% menjadi Rp265.138 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp203.474 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI, mengingat bahwa beban penayangan film bersifat tetap terhadap pendapatan bioskop yaitu sebesar 50% setelah pajak hiburan yang berlaku.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp34.535 juta atau 60,4% menjadi Rp91.687 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya Rp57.152 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan produk makanan dan minuman sebagai hasil dari jumlah penonton di bioskop Cinema XXI yang meningkat dan kenaikan biaya bahan baku untuk produk makanan dan minuman.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp748 juta atau 23,0% menjadi Rp3.997 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp3.249 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bank seiring dengan kenaikan transaksi pembelian tiket pada platform digital Cinema XXI.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp105.873 juta atau 45,6% menjadi Rp337.824 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp231.951 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kompensasi karyawan sejalan dengan penambahan jumlah karyawan dan tingkat gaji yang lebih tinggi, kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, perpajakan, sewa, dan keperluan kantor karena dimulainya kembali kegiatan usaha bioskop Cinema XXI dan kegiatan usaha lainnya, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan konsesi sewa sejalan dengan berakhirnya pembebasan biaya sewa akibat pandemi COVID-19, penurunan biaya perjalanan dinas, transportasi dan akomodasi, dan penurunan biaya komunikasi sebagai hasil efisiensi operasional selama tiga bulan pertama tahun 2023.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap stabil sebesar Rp167.290 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan Rp166.895 juta untuk periode yang sama tahun 2022.

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya meningkat sebesar Rp598 juta atau 575,0% menjadi Rp702 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp104 juta pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban dan biaya yang timbul dari kegiatan operasi XXI Ballroom, sejalan dengan kenaikan beban bahan baku berkaitan dengan XXI Ballroom.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp717 juta atau 396,1% menjadi Rp898 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp181 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian atas utang usaha yang belum diselesaikan sebagai akibat dari penghapusan *invoices* yang telah dicatatkan.

Beban lainnya

Beban lainnya meningkat sebesar Rp152 juta atau 185,4% menjadi Rp234 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp82 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang timbul dari rekonsiliasi ketidakcocokan transaksi antara NES dan pihak ketiga lainnya, terkait dengan transaksi daring yang gagal di TIX.ID.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan meningkat sebesar Rp1.599 juta atau 23,8% menjadi Rp8.310 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp6.711 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan, melalui kenaikan pokok dan suku bunga.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp7.906 juta atau 23,7% menjadi Rp41.233 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp33.327 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga untuk pinjaman bank yang baru diperoleh di bulan Desember 2022 dan aset hak-guna tambahan untuk lokasi bioskop baru. Beban keuangan untuk periode tiga bulan pertama tahun 2022 hanya timbul dari penerapan PSAK 73 (Sewa).

Rugi sebelum pajak

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp38.049 juta atau 70,9% menjadi Rp15.642 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp53.691 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Cinema XXI, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban operasional, di luar penyusutan aset tetap, serta beban keuangan sebagai akibat dari pinjaman bank yang baru diperoleh di bulan Desember 2022. Rugi sebelum pajak untuk periode tiga bulan pertama tahun 2022 mencerminkan pengurangan kapasitas dan jam operasional di bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah selama periode tersebut.

Beban (manfaat) pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp16.023 juta atau 263,7% menjadi Rp9.947 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp6.067 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kerugian sebelum pajak yang mengakibatkan kenaikan beban pajak tangguhan dan penyesuaian beban pajak untuk periode tiga bulan pertama tahun 2023.

Jumlah rugi komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah rugi komprehensif menurun sebesar Rp22.026 juta atau 46,3% menjadi Rp25.589 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp47.615 juta untuk periode yang sama tahun 2022.

Analisis arus kas

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasi sebesar Rp187.819 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp914.410 juta dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp3.789 juta, serta pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp80.266 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp679.799 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp123.702 juta, dan pembayaran beban bunga sebesar Rp7.145 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasi sebesar Rp41.918 juta, terutama terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp638.010 juta, dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp6.711 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp510.834 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp91.507 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp462 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp148.458 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan pembayaran dimuka untuk penambahan layar baru.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp16.000 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan pembayaran dimuka untuk penambahan layar baru.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp44.020 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp600.000 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp498.900 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp44.267 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.099.147 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp39.372 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan kas Cinema XXI terutama digunakan untuk:

- mendanai aktivitas operasi;
- mendanai belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas peralatan dan pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembaharuan fasilitas bioskop Cinema XXI;
- membayar dividen;
- membayar utang Perseroan;
- membayar pajak termasuk pajak penghasilan, pemotongan pajak penghasilan, pajak hiburan dan pajak restoran.

Sumber likuiditas Cinema XXI secara historis terutama berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Cinema XXI juga memperoleh pinjaman dari bank sebagai sumber likuiditas eksternal pada tahun 2023.

Per tanggal 31 Maret 2023, Cinema XXI memiliki modal kerja negatif sebesar Rp753.966 juta, namun demikian ekuitas Cinema XXI tetap positif. Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat membayar utang pada saat jatuh tempo, mengingat seluruh pinjaman bank dijamin secara penuh dengan gadai rekening bank oleh pemegang saham. Selain itu, Cinema XXI mencatatkan kas dan setara kas senilai Rp2.044.303 juta per tanggal 31 Maret 2023, dan Cinema XXI menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp187.819 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Cinema XXI memonitor kebutuhan likuiditas dengan memantau arus kas masuk dan keluar untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari serta mengantisipasi dini kebutuhan arus kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan.

Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan kas dari operasi tergantung pada kinerja operasi di masa depan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi antara lain kondisi ekonomi, keuangan, pasar, regulasi, dan lainnya, yang dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko," di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, dan fasilitas perbankan yang tersedia, Perseroan berkeyakinan Cinema XXI memiliki modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas saat ini dan untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Selain itu, Cinema XXI senantiasa menjaga piutang usaha dan persediaan dari kegiatan penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman pada tingkat yang rendah, sehingga Cinema XXI memiliki tingkat perputaran kas yang sehat. Dalam hal Cinema XXI memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan berkeyakinan akan dapat memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank ataupun mengakses pendanaan utang dari pasar, di mana hal ini didukung oleh kinerja operasional yang kuat dan tingkat utang yang masih rendah.

Analisis arus kas

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasional sebesar Rp187.819 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp914.410 juta dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp3.789 juta dan pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp80.266 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp679.799 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp123.702 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp7.145 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasional sebesar Rp41.918 juta yang terutama terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp638.010 juta, dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp6.711 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp510.834 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp91.507 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp462 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp148.458 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan penambahan pembayaran dimuka untuk ekspansi layar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp16.000 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan penambahan pembayaran dimuka untuk ekspansi layar.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp44.020 juta terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp600.000 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp498.900 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp44.267 juta, sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.099.147 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp39.372 juta terutama disebabkan oleh pembayaran atas sewa.

Belanja modal

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis Cinema XXI yang dikeluarkan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	**2022**
Bioskop baru	99.278	-
Renovasi	8.556	-
Beban kapitalisasi	25.628	4.867
Jumlah belanja modal[(1)]	**133.462**	**4.867**

Catatan:
(1) Belanja modal terdiri dari pengeluaran sehubungan dengan penambahan aset tetap hanya untuk kegiatan usaha bioskop dan F&B. Belanja modal tidak termasuk biaya sehubungan dengan aset hak-guna, biaya penghapusan aset atau penambahan aset tetap di kantor pusat Cinema XXI atau biaya berhubungan dengan NES.

Jumlah kewajiban terutang

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pinjaman dan liabilitas sewa Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2023	**31 Desember 2022**
Jangka pendek		
Pinjaman bank	2.299.223	1.697.415
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	86.465	71.119
Jumlah liabilitas berbunga jangka pendek	**2.385.688**	**1.768.534**
Jangka panjang		
Liabilitas sewa	1.539.824	1.551.849
Jumlah liabilitas berbunga jangka panjang	**1.539.824**	**1.551.849**
Jumlah liabilitas berbunga	**3.925.512**	**3.320.383**

Pinjaman bank

Pinjaman bank Cinema XXI tercatat sebesar Rp2.299.223 juta dan Rp1.697.415 juta masing-masing per tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Peningkatan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 disebabkan oleh pinjaman bank untuk keperluan modal kerja. Pinjaman bank Perseroan memiliki bunga tetap.

Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Cinema XXI tercatat sebesar Rp1.626.289 juta dan Rp1.622.968 juta masing-masing per tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Liabilitas sewa pada tanggal 31 Maret 2023 relatif stabil dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022.

Perkembangan data operasional terkini

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan data operasional terkini Cinema XXI pada dan untuk masing-masing periode:

	Pada tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	2023	2022
Jumlah bioskop	231	228	221
Jumlah layar	1.243	1.230	1.206
Jumlah penonton	6.563.580	13.464.905	10.513.362[5]
Harga tiket rata-rata (ATP)[1] (Rp)	-	43.718	42.994
Tingkat keterisian bioskop[2] (%)	28,3	19,6	18,1
Belanja F&B rata-rata per penonton[3] (Rp)	-	25.349	20.962
Transaksi F&B ('000)	-	3.148	2.450
Pendapatan F&B (% terhadap pendapatan bioskop)	-	58,2	49,2
Tingkat penetrasi[4] (%)	-	23,4	23,3
Kontribusi m.tix terhadap jumlah volume penjualan tiket (%)[6]	-	20,1	15,8
Kontribusi TIX.ID terhadap jumlah volume penjualan tiket (%)[7]	-	14,5	16,1
Kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap jumlah volume penjualan tiket (%)[8]	-	34,5	31,9
Kontribusi m.tix terhadap jumlah volume penjualan F&B (%)	-	2,78	2,84

Catatan:
(1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
(2) Dihitung dari jumlah penonton dibagi dengan jumlah kapasitas.
(3) Dihitung dari jumlah transaksi F&B dibagi dengan jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
(4) Merupakan persentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
(5) Jumlah penonton terpengaruh secara negatif oleh COVID-19.
(6) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
(7) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
(8) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dan TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI terjual.

Jumlah penonton Cinema XXI per tanggal 31 Mei 2023 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar 9.531.876 dan 7.291.947.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah bioskop Cinema XXI termasuk pembukaan dan penutupan pada dan untuk masing-masing periode:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
Jumlah bioskop	228	225
Jumlah layar	1.230	1.216

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	2022
Jumlah pembukaan		
Bioskop	3	-
Layar	14	-
Jumlah penutupan		
Bioskop	-	-
Layar	-	-

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan *gross box office* dan jumlah penonton berdasarkan jenis film untuk masing-masing periode:

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023		2022	
	Pendapatan *gross box office*[1]	Jumlah penonton	Pendapatan *gross box office*[1]	Jumlah penonton
	(Rp juta)	('000)	(Rp juta)	('000)
Film internasional[2]	354.385	7.538	256.864	5.433
% terhadap total	60,2	56,0	56,8	51,7
Film domestik	234.278	5.927	195.146	5.081
% terhadap total	39,8	44,0	43,2	48,3
Total	588.662	13.465	452.009	10.513

Catatan:
(1) Merupakan pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak yang berlaku.
(2) Merupakan film yang diimpor.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Sebelum calon investor memutuskan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan, calon investor harus dengan secara hati-hati mempertimbangkan seluruh informasi yang tercantum dalam Prospektus ini, termasuk risiko bisnis di bawah ini. Segala risiko yang pada saat ini tidak diketahui oleh Perseroan atau yang saat ini dianggap tidak material dapat memiliki dampak material terhadap bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI. Harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan dapat menurun akibat risiko-risiko tersebut dan investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari investasi. Penjelasan pada bagian ini yang terkait Pemerintah, data terkait perekonomian Indonesia atau industri di mana Cinema XXI beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Pembahasan dalam bab/subbab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Cinema XXI dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko." Pada saat membaca forward looking statement, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Cinema XXI di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh forward looking statement tersebut akan tercapai.

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak langsung yang material bagi Cinema XXI dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Cinema XXI dimulai dari risiko utama.

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Cinema XXI

Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan dapat terus memengaruhi kegiatan usaha, bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XXI

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dan merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI. Sebagai akibat dari pandemi, semua bioskop Cinema XXI sementara waktu berhenti beroperasi mulai dari akhir bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020, dan beroperasi di bawah kapasitas penuh mulai dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Juni 2021, di mana selama periode tersebut Cinema XXI menghasilkan pendapatan yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendapatan sebelum pandemi. Dikarenakan munculnya varian Delta dari COVID-19, sebagian besar bioskop Cinema XXI sementara ditutup kembali mulai dari bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, total pendapatan Cinema XXI sebesar Rp6.890.034 juta, dibandingkan dengan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.218.993 juta, Rp1.280.186 juta dan Rp4.401.050 juta.

Meskipun Cinema XXI telah membuka kembali semua bioskop, jumlah penonton dan tingkat pendapatan dari penjualan tiket dan F&B pada tahun 2022 hanya mencapai sebagian dari tingkat pendapatan historis, dikarenakan penutupan bioskop sampai dengan Pemerintah melonggarkan aturan PPKM terkait COVID-19 pada bulan Mei 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan Cinema XXI dari penjualan tiket bioskop adalah sebesar Rp4.449.955 juta, dibandingkan dengan pendapatan yang sama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.700.828 juta, dan pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B adalah sebesar Rp1.799.499 juta, dibandingkan dengan pendapatan yang sama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.430.844 jutaa. Kegiatan usaha Cinema XXI terutama bergantung pada kunjungan, yang mendorong

penjualan tiket, F&B, serta pendapatan lainnya. Lamanya durasi pandemi yang sesungguhnya masih belum dapat dipastikan, dan Cinema XXI mungkin perlu menghentikan operasional bioskop jika terjadi kembali lonjakan kasus atau munculnya varian baru COVID-19 terjadi kembali dan penetapan kembali perintah tetap di rumah. Cinema XXI tidak dapat memprediksi dengan pasti kapan atau apakah bisnis Cinema XXI akan kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, pejabat pemerintahan dapat memberlakukan pembatasan perjalanan atau memperkenalkan langkah pembatasan jarak sosial tambahan seperti membatasi jumlah orang yang diperbolehkan di dalam bioskop pada satu waktu.

Cinema XXI mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan dengan pemilik gedung, vendor, distributor film, pelanggan, dan karyawan jika terjadi lonjakan kasus COVID-19.

Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, Cinmea XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan pulih secepat seperti industri lain atau secepat pesaing dalam industri yang sama. Sebagai contoh, meskipun pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah telah dicabut atau dilonggarkan, terdapat ketidakjelasan seberapa cepat penonton akan kembali mengunjungi bioskop karena masih terdapat kekhawatiran tentang keselamatan dan penerapan jarak sosial dan/atau sentimen konsumen yang terpengaruh kondisi ekonomi yang buruk, termasuk diantaranya kehilangan pekerjaan. Berlanjutnya wabah kasus COVID-19 di kota-kota lain dapat terus menekan tingkat kunjungan secara signifikan jika terjadi lonjakan kembali kasus COVID-19 akibat varian baru atau pelonggaran pembatasan atau kebijakan terkait COVID-19. Dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 termasuk, dan apabila terjadi lonjakan kembali kasus pandemi, meliputi, antara lain:

- keterbatasan film dalam jangka pendek atau panjang, termasuk akibat dari (i) penundaan rilis film yang terus berlanjut; (ii) rilis film yang dijadwalkan di saluran alternatif; atau (iii) gangguan produksi film;

- penurunan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI, termasuk karena (i) kekhawatiran keselamatan dan kesehatan yang berlanjut; atau (ii) perubahan perilaku konsumen yang beralih ke bentuk hiburan alternatif.

- kenaikan biaya operasional karena adanya persyaratan regulasi tambahan yang diterapkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.

- peningkatan risiko terkait karyawan, termasuk meningkatnya tuntutan hukum terkait pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sementara yang disebabkan oleh penghentian operasi bioskop karena COVID-19;

- pengurangan dan penundaan dalam pengeluaran operasional dan belanja modal yang telah direncanakan;

- ketidakmampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas yang signifikan dari hasil operasi jika bioskop tetap beroperasi di bawah level historis, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Cinema XXI.

Selain itu, pandemi COVID-19 telah secara signifikan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan permintaan. Penyebaran COVID-19 yang terus berlanjut dan faktor makroekonomi lainnya dapat menyebabkan resesi global, yang berpotensi memberikan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Cinema XXI. Proyeksi ekonomi saat ini yang memperkirakan peningkatan signifikan pada tingkat pengangguran secara global kemungkinan besar akan berdampak merugikan terhadap permintaan pemesanan untuk bioskop Cinema XXI, dan dampak ini dapat berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Sejauh mana pandemi COVID-19 berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil keuangan Cinema XXI, hal tersebut juga dapat meningkatkan dampak dari risiko lain yang dijelaskan dalam bagian “Faktor Risiko” ini.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI

Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan bentuk hiburan lain dapat menurunkan kunjungan ke bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak merugikan terhadap pendapatan Cinema XXI

Cinema XXI bersaing dengan berbagai saluran distribusi film alternatif seperti *online streaming* dan layanan pengunduhan, *home theater*, layanan *pay-per-view*, televisi kabel, *video-on-demand*, dan saluran televisi satelit untuk memperebutkan penonton. Secara khusus, persaingan yang semakin ketat dari saluran *over-the-top* ("**OTT**") yang menawarkan film langsung kepada penonton melalui internet, penayangan konten orisinal, pembajakan film yang terus berlanjut, ketersediaan internet berkecepatan tinggi untuk mengunduh konten, serta adopsi multipleks di kota Tier 2 dan kota Tier 3 dapat membatasi kenaikan atau menyebabkan penurunan tingkat keterisian bioskop. Saluran distribusi alternatif ini dapat menawarkan jadwal penayangan yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan bioskop tradisional. Hal ini dapat membuat penonton lebih mungkin memilih saluran alternatif daripada bioskop tradisional, dan sebagai akibatnya dapat membatasi kemampuan para pelaku multipleks untuk meningkatkan pendapatan, laba, arus pengunjung, dan/atau harga tiket rata-rata. Platform ini juga bekerja sama dengan rumah produksi untuk mengembangkan konten tertentu yang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif, di mana konten tersebut tidak tersedia untuk ditayangkan di bioskop Cinema XXI. Bahkan, beberapa konten populer dan premium sekarang hanya tersedia secara eksklusif di platform OTT tersebut yang dapat mengurangi jumlah kunjungan ke bioskop Cinema XXI dan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan, arus kas, dan hasil usaha Cinema XXI. Penggunaan konten dan saluran distribusi film alternatif juga semakin meningkat akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, dikarenakan pembatasan pergerakan terkait pandemi COVID-19, masyarakat menjadi tergantung pada layanan-layanan tersebut untuk hiburan. Sebagai akibatnya, jumlah penonton Cinema XXI mungkin lebih rendah bila dibandingkan secara historis dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa produsen film tidak akan mengurangi jangka waktu pemutaran film Cinema XXI karena adanya penurunan tersebut dan merilis film pada platform OTT dan platform digital lainnya lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Selain itu, saluran distribusi alternatif tersebut juga menawarkan jenis konten lain selain film, dan beragam konten (seperti drama televisi dan acara hiburan lainnya), dari berbagai wilayah geografis dengan harga yang lebih terjangkau. Konten tersebut mungkin terlihat lebih menarik bagi di mata penonton Cinema XXI.

Lebih lanjut, Cinema XXI juga bersaing dengan bentuk hiburan lainnya untuk memperebutkan waktu dan pendapatan yang siap dibelanjakan pelanggan, seperti konser, acara olahraga, taman hiburan, dan media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam rangka meningkatkan minat penonton untuk pergi ke bioskop, inovasi teknis dalam industri bioskop dapat dilihat dalam pembuatan konten maupun tampilan layar, terutama produksi film 3D dan film yang cocok untuk ditonton pada layar besar seperti layar IMAX. Akan tetapi, tidak terdapat jaminan bahwa masyarakat akan terus menonton film di bioskop mengingat perkembangan saluran distribusi film alternatif dan hiburan lain yang kompetitif. Dikarenakan porsi terbesar pendapatan Cinema XXI berasal dari penjualan tiket bioskop, kenaikan popularitas yang signifikan dalam saluran distribusi film alternatif dan bentuk hiburan lain dan setiap penurunan permintaan tiket bioskop dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau kegagalan Cinema XXI untuk memperbarui sewa tersebut dengan persyaratan komersial yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI atau bahkan mengakibatkan gangguan bisnis

Cinema XXI membuka bioskop di atas properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Masa berlaku perjanjian sewa Cinema XXI beragam dengan hingga paling lama 20 tahun. Perjanjian sewa pada umumnya memberikan hak pembaruan, dengan syarat Cinema XXI tetap mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa. Terlepas dari aspek kepatuhan dan meskipun Cinema XXI biasanya akan melakukan negosiasi pembaruan perjanjian pada saat periode sewa masih berlangsung, tidak terdapat

jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu dapat memperbarui perjanjian sewa sebelum atau pada saat berakhirnya perjanjian tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali. Dalam hal biaya sewa mengalami kenaikan yang substansial, Cinema XXI mungkin akan mengalami masalah arus kas dan memerlukan pembiayaan atau menyesuaikan modal kerja. Lebih lanjut, hubungan dengan penyewa pihak ketiga dapat mengakibatkan Cinema XXI terpapar risiko yang terkait dengan bisnis mereka dan faktor-faktor lain di luar kendali Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjanjian sewa, seperti penjualan properti komersial dan proses hukum atau proses lainnya (termasuk likuidasi) yang melibatkan penyewa pihak ketiga. Apabila perjanjian sewa tidak dapat diperbarui, atau perjanjian sewa terdampak, Cinema XXI berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Terlebih lagi, kegagalan Cinema XXI untuk mematuhi ketentuan perjanjian sewa dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pemutusan sewa secara sepihak dari pemilik tempat yang dapat mengakibatkan, dalam keadaan tertentu, pemutusan perjanjian sewa lain yang relevan. Setiap pengakhiran sewa dapat mengganggu keberlangsungan usaha, rencana ekspansi bisnis dan mengurangi kas yang tersedia untuk keperluan lain.

Cinema XXI membayar biaya sewa dengan pembayaran minimum tetap setiap bulan. Meskipun biaya sewa dan layanan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19, Cinema XXI berkeyakinan bahwa biaya sewa cenderung terus meningkat sebagai akibat dari kelangkaan properti komersial dengan lokasi premium dan kenaikan harga properti secara keseluruhan di Indonesia, yang dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI. Dari waktu ke waktu, Cinema XXI dapat melakukan dan mematuhi kewajiban khusus atas permintaan pemilik tempat, termasuk diantaranya (i) pembatasan pengembangan bioskop tambahan dalam jarak tertentu dari properti yang relevan; (ii) memberikan promosi atau diskon kepada pelanggan terpilih atas permintaan dari pemilik tempat; dan (iii) mendapatkan persetujuan dari pemilik tempat sebelum mengatur kegiatan pemasaran skala besar di bioskop. Tidak terdapat jaminan bahwa kewajiban tambahan tersebut tidak akan menimbulkan biaya tambahan atau berdampak merugikan terhadap rencana bisnis dan reputasi, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Cinema XXI.

Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu dapat mempertahankan hubungannya yang baik dengan pemilik tempat dan pengembang properti. Dalam hal Cinema XXI tidak dapat melakukan hal tersebut, atau harus merelokasi bioskopnya, hal tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan atau berdampak merugikan terhadap rencana bisnis, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan perekonomian global yang negatif

Kegiatan kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum dan rentan terhadap penurunan perekonomian regional dan dunia, terutama jika dampak ekonomi tersebut menyebar ke Indonesia. Dalam periode kegiatan ekonomi yang melambat, konsumen akan cenderung mengurangi belanja tiket nonton atau F&B, dan pergi ke bioskop akan menjadi kurang populer, di mana hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap hasil usaha Cinema XXI. Jika situasi perekonomian di Indonesia melemah, kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap pelanggan Cinema XXI dalam jumlah signifikan, termasuk klien iklan, dan sebagai akibatnya, permintaan atas layanan Cinema XXI. Secara khusus, kegiatan usaha Cinema XXI termasuk dalam kategori hiburan yang umumnya dianggap sebagai kebutuhan tersier, sehingga pertumbuhan Cinema XXI akan bergantung pada tingkat pendapatan siap dibelanjakan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi bioskop dan Indonesia secara umum. Sebagai contoh, meskipun tingkat pertumbuhan kegiatan usaha Cinema XXI di awal kegiatan operasi lebih lambat karena PDB per kapita di Indonesia yang rendah, PDB per kapita di Indonesia, menurut Bank Dunia, telah meningkat dari US$480 pada tahun 1988 menjadi US$3.603 pada tahun 2013 dan menjadi US$4.333 pada tahun 2021, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan untuk rumah tangga kelas menengah yang, berdasarkan Euromonitor, berkisar antara 75,0% sampai dengan 125% dari median pendapatan siap dibelanjakan penduduk di Indonesia. Namun, tidak ada jaminan bahwa PDB Indonesia akan terus meningkat atau Cinema XXI akan mampu bertahan menghadapi penurunan kondisi perekonomian ketika pendapatan siap dibelanjakan penduduk Indonesia menurun dan pelanggan cenderung untuk tidak menghabiskan pengeluaran untuk hiburan.

Penurunan perekonomian di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada resesi global atau regional akibat dari faktor-faktor termasuk ketegangan geopolitik, konflik, krisis kredit, bencana alam atau penurunan produksi atau pertumbuhan baik secara umum maupun secara khusus dalam industri) dapat memiliki dampak yang signifikan pada penurunan permintaan untuk layanan Cinema XXI dan dapat berdampak merugikan terhadap pelanggan (termasuk klien iklan), pemasok dan lembaga keuangan di mana Cinema XXI memiliki akun atau hubungan bisnis lainnya. Satu atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Cinema XXI

Kinerja keuangan Cinema XXI terutama bergantung pada ketersediaan, keberagaman, dan daya tarik film untuk ditayangkan di bioskop dan penjualan tiket untuk film tersebut. Penjualan tiket untuk film yang ditayangkan di bioskop merupakan mayoritas dari pendapatan Cinema XXI dengan pendapatan bioskop mewakili masing-masing sekitar 60,0% dan 64,0% dari total pendapatan Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 serta masing-masing sekitar 61,0%, 65,0%, 64,0%, dan 65,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019. Performa penjualan tiket film di pasar bergantung pada berbagai faktor yang berada di luar kendali Cinema XXI, termasuk kondisi politik, sosial dan ekonomi secara umum, waktu rilis film, selera pasar dan preferensi konsumen. Faktor-faktor tersebut mempersulit Cinema XXI untuk memprediksi minat penonton terhadap film yang akan ditayangkan di bioskop Cinema XXI. Selain itu, keberhasilan film yang dilisensikan kepada Cinema XXI semakin bergantung pada upaya pemasaran dari studio film ternama. Kualitas yang buruk dan/atau performa atas, atau gangguan atau penundaan dalam produksi film (termasuk akibat mogok kerja atau kurangnya pendanaan yang memadai atau sebagai akibat pandemi COVID-19), atau penurunan upaya pemasaran dari studio film ternama dapat merugikan performa film *box office*, dan pendapatan Cinema XXI, yang kemudian berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Cinema XXI.

Sebaliknya, performa yang sukses dari film-film tersebut, terutama kesuksesan yang berkesinambungan dari satu film, atau upaya pemasaran yang efektif dari studio film ternama dapat memberikan dampak yang positif bagi kegiatan usaha dan hasil usaha Cinema XXI pada kuartal atau tahun fiskal tertentu, di mana ini hal ini mungkin tidak selalu mencerminkan atau dapat dibandingkan dengan hasil operasi di masa depan. Jika studio film mulai bergantung pada sejumlah kecil film "andalan" yang menghasilkan lebih banyak pendapatan, hal ini dapat memberikan tekanan tambahan untuk meninggalkan model bagi hasil yang digunakan saat ini. Hal ini dapat mencakup perubahan syarat dan ketentuan sesuai dengan standar industri yang memiliki model bagi hasil dengan pembagian hasil yang lebih rendah, atau bahkan dengan model yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa model bagi hasil saat ini akan terus berlanjut, dan setiap perubahan terhadap persentase bagi hasil atau penggunaan model baru dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas, dan pada gilirannya terhadap kegiatan, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selanjutnya, perubahan jenis dan ragam film yang ditawarkan oleh studio film secara signifikan dapat berdampak merugikan terhadap tingkat kunjungan penggemar film dari berbagai demografi. Dalam hal ketertarikan untuk menonton suatu film berkurang, maka hal tersebut dapat mengurangi kunjungan dan sebagai akibatnya menurunkan pendapatan dari penjualan tiket nonton, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kinerja, pendapatan dan profitabilitas Cinema XXI di masa depan.

Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Cinema XXI memperoleh keuntungan dari merek "Cinema XXI" yang telah dikenal secara nasional dan berkeyakinan bahwa Cinema XXI akan memperoleh manfaat yang besar dari merek tersebut melalui kesadaran dan retensi pelanggan, serta kampanye pemasaran, dan promosi. Cinema XXI berkeyakinan bahwa mengembangkan dan mempertahankan kesadaran merek dan kegiatan usaha secara efektif sangat penting untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Keberhasilan

promosi merek dan kemampuan Cinema XXI untuk menarik konsumen berkualitas sangat bergantung pada efektivitas dari upaya pemasaran dan kesuksesan saluran yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan. Upaya pemasaran Cinema XXI sebagian bergantung atas kerja sama dengan pihak ketiga seperti platform pemasaran, *key opinion leader*, *influencer* dan institusi keuangan bank dan non-bank. Upaya pemasaran Cinema XXI ke depan kemungkinan akan mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Upaya pemasaran tersebut mungkin tidak langsung meningkatkan pendapatan Cinema XXI dalam waktu dekat atau bahkan tidak meningkatkan pendapatan Cinema XXI sama sekali, dan meskipun pendapatan meningkat, hal tersebut belum tentu dapat mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Jika Cinema XXI gagal dalam mempromosikan dan mempertahankan merek dengan baik dan menanggung pengeluaran substansial pada saat yang bersamaan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI, yang akan memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau mengelola pertumbuhan bisnisnya dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Keberhasilan kegiatan usaha Cinema XXI di masa depan sebagian besar akan bergantung pada kemampuannya untuk melaksanakan strategi bisnis secara efektif. Namun demikian, keberhasilan dalam melaksanakan strategi bisnis menantang kemampuan Cinema XXI dalam mengalokasikan sumber daya manajemen dan modal, yang tunduk pada berbagai risiko, termasuk potensi kesulitan untuk mempertahankan dan menyatukan tenaga kerja berpengalaman, kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai pasar dalam wilayah yang akan dikembangkan, mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen dari kegiatan bisnis eksisting dan ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya dan pengeluaran. Jika Cinema XXI tidak bisa melaksanakan strategi bisnis dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI dapat melaksanakan strategi yang direncanakan secara tepat waktu dan/atau sesuai dengan estimasi anggaran di masa depan.

Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI bergantung di antaranya pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mendapatkan lokasi strategis untuk bioskop serta mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha dan penawaran F&B secara tepat waktu dan inovatif.

Salah satu kunci utama untuk mencapai strategi bisnis Cinema XXI adalah dengan membuka dan mengoperasikan bioskop di lokasi yang strategis. Oleh karena itu, keberhasilan Cinema XXI bergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi target pasar target yang sesuai, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, demografi, tingkat pendapatan, dan pola lalu lintas. Lokasi yang sesuai dengan harapan Cinema XXI mungkin terbatas karena berbagai alasan, termasuk kurangnya real estate unggul di pasar di mana Cinema XXI berkompetisi atau di kota yang potensial atau di wilayah yang ingin dijangkau dalam ekspansi jejaring bioskop, dan pembatasan lokasi tertentu untuk bioskop. Sebagai akibatnya, lokasi yang diinginkan untuk bioskop baru atau relokasi bioskop eksisting mungkin tidak tersedia pada persyaratan komersial yang dapat diterima atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Jika Cinema XXI tidak bisa mengidentifikasi dan mendapatkan lokasi yang cocok dan strategis untuk bioskop baru, maka jumlah penonton bioskop Cinema XXI kemungkinan akan lebih rendah dari yang diharapkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk mencapai pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang diharapkan.

Selain itu, selama bertahun-tahun, Cinema XXI telah menjalin hubungan baik dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa hubungan tersebut telah membantu dalam memperoleh sewa bioskop dengan persyaratan yang kompetitif, jika Cinema XXI tidak mampu menjaga hubungan tersebut, atau jika pesaing mampu merebut lokasi strategis dari Cinema XXI, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Cara lain yang penting untuk mencapai strategi bisnis Cinema XXI adalah dengan menambah, meningkatkan dan memperluas penawaran F&B untuk menyesuaikan dengan selera dan preferensi pelanggan, serta mengintegrasikan pertumbuhan tersebut dengan digitalisasi jejaring penjualan Cinema

XXI seperti m.food dan m.tix serta platform pengiriman online pihak ketiga seperti Shopeefood, Gofood, dan Grabfood. Strategi bisnis Cinema XXI didasarkan pada pendekatan berbasis data, teknologi dan inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat penetrasi F&B[6] dan transaksi rata-rata per tagihan[7]. Jika Cinema XXI gagal dalam menjalankan strategi bisnis F&B dengan sukses sesuai rencana atau bahkan tidak berhasil sama sekali, apakah karena kurangnya keahlian Cinema XXI dalam bisnis F&B atau kurangnya pengalaman khusus dengan platform pengiriman makanan berbasis online, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan Cinema XXI di masa depan. Lebih lanjut, faktor yang berhubungan dengan platform pengiriman online pihak ketiga, termasuk keterlambatan atau kesalahan layanan (seperti pemenuhan pesanan atau *ride-hailing* yang hilang, tidak tepat atau dibatalkan) dan masalah kebersihan, pengrusakan makanan, atau kesalahan dalam pengiriman yang berada di luar kendali Cinema XXI dan dapat merusak reputasi, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap keuanggulan dan hasil operasi Cinema XXI.

Selain itu, inovasi melalui adopsi gagasan dan teknologi baru telah menjadi aspek kunci dalam prioritas strategi Cinema XXI, dan telah berkontribusi terhadap kesuksesan Cinema XXI. Sebagai contoh, salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan dibukanya Studio 21 pada tahun 1987, dan Cinema XXI membuka bioskop IMAX pertama di pusat perbelanjaan di Indonesia pada tahun 2012 dan meluncurkan m.tix pada tahun 2006 sebagai layanan reservasi tiket berbasis SMS dan kemudian menjadi aplikasi pemesanan tiket berbasis seluler paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2013, serta TIX.ID, aplikasi agregator tiket pada tahun 2018. Jika Cinema XXI tidak dapat menemukan cara untuk mengembangkan penawaran kepada pelanggan secara terus menerus, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Kondisi pasar real estat komersial yang menurun atau perubahan pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.

Cinema XXI menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan semua bioskop Cinema XXI (kecuali Metropole XXI, Empire Jogja XXI, dan Holywood XXI) berada di pusat perbelanjaan dan pusat ritel. Pasar real estat komersial di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi umum politik, sosial dan ekonomi, iklim hukum dan perubahan kebijakan Pemerintah terkait fiskal dan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar properti di Indonesia secara keseluruhan mengalami fluktuasi akibat dari kebijakan pemerintah dan tren perekonomian Indonesia maupun global. Perkembangan negatif dalam pasar real estat komersial di Indonesia yang mengakibatkan penurunan jumlah pusat perbelanjaan besar yang baru dibangun, atau perlambatan ekonomi global atau Indonesia atau ketidakstabilan keuangan di masa depan, dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.

Jumlah dan waktu pembukaan bioskop baru pada periode tertentu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pembangunan dan penurunan aktivitas pembangunan real estate secara keseluruhan, identifikasi dan ketersediaan lokasi yang menarik untuk bioskop baru dan kemampuan untuk bernegosiasi mengenai persyraatan sewa/lisensi yang sesuai, biaya dan ketersediaan modal untuk membiayai biaya konstruksi dan biaya pra-pembukaan, kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh persetujuan pemerintah dan statutori yang diperlukan untuk membuka atau mengoperasikan bioskop secara tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali, persaingan di pasar baru, termasuk persaingan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai, perkembangan komersial, perumahan, dan infrastruktur yang diantisipasi di dekat lokasi Cinema XXI, dan kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dan merekrut dan melatih personil terlatih di pasar lokal. Ketidakpastian dari faktor-faktor ini dapat memengaruhi pembukaan bioskop baru, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI. Selain itu, kegagalan Cinema XXI untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan tren dalam industri bioskop dan ketidakmampuan untuk berkembang dalam format layar yang paling menarik dan menguntungkan, dapat memengaruhi profitabilitas dan kondisi keuangan Cinema XXI.

6 Tingkat penetrasi F&B merupakan hasil pembagian jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop.
7 Dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran F&B per tagihan.

Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mengembangkan kegiatan usaha secara sukses karena Cinema XXI mungkin tidak dapat menganalisis kesesuaian lokasi dengan akurat atau memperhitungkan semua tantangan yang timbul dari ekspansi kegiatan usaha ke lokasi baru. Kinerja bioskop baru, meskipun bioskop tersebut telah beroperasi, akan sulit diprediksi. Hal tersebut mungkin tidak memenuhi harapan Cinema XXI sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar yang telah diasumsikan atau selera dan preferensi pelanggan, di mana semuanya sulit untuk diprediksi. Cinema XXI mungkin gagal memenangkan pelanggan dengan layanan dan pengalaman menonton film karena perubahan tersebut, dan Cinema XXI mungkin tidak dapat memperoleh kembali investasi yang telah ditempatkan untuk membangun bioskop baru tersebut. Sebagai contoh, Cinema XXI bermaksud untuk memperkuat kehadiran Cinema XXI di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 yang memiliki PDB pada PPP per kapita lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota Tier 1. Dikarenakan kota-kota Tier 2 dan Tier 3 umumnya memiliki jumlah penonton yang lebih rendah, Cinema XXI mungkin gagal menghasilkan pendapatan *gross box office* yang memadai atau marjin bruto yang tinggi untuk memulihkan jumlah investasi modal di kota-kota tersebut. Strategi pertumbuhan Cinema XXI dan investasi substansial yang terkait dengan pengembangan di setiap lokasi baru dapat menyebabkan hasil operasi berfluktuatif atau memengaruhi profitabilitas Cinema XXI.

Pendapatan dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai pasokan pada harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

Penjualan F&B dari produk *confectionary* (seperti es krim, permen dan cokelat), makanan (seperti *hot dog, popcorn* dan *croissant waffle)* dan minuman (seperti air minum dalam kemasan, minuman bersoda dan kopi) merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, penjualan F&B masing-masing mewakili sebesar 27,0%, 32,0% dan 33,0% dari total pendapatan konsolidasian Cinema XXI. Penjualan F&B umumnya berfluktuasi sejalan dengan jumlah penonton dan tidak terdapat jaminan bahwa kunjungan dapat dipertahankan pada tingkat saat ini atau ditingkatkan. Cinema XXI merencanakan menu berdasarkan pola konsumsi pelanggan serta tren dan preferensi pelanggan yang diantisipasi di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian antara perkiraan, perencanaan, pengenalan produk ritel baru dan permintaan aktual dari pelanggan dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI, yang menyebabkan kegagalan dalam menarik pelanggan baru, kehilangan pelanggan eksisting atau penurunan arus pengunjung. Sebagai contoh, proses pengembangan produk F&B yang dilakukan oleh Cinema XXI di masa lalu tidak didukung oleh kemampuan penelitian dan pemantauan kinerja yang kuat atau database kinerja penjualan yang terpusat. Oleh karena itu, Cinema XXI tidak dapat melakukan aktivitas pemasaran yang efektif, mempertahankan SKU, atau mencapai waktu pelayanan yang efisien, yang menghasilkan rasio pendapatan F&B terhadap total pendapatan bioskop tidak optimal, yaitu sebesar 31,4% hingga 39,3% antara tahun 2013 dan 2018. Selain itu, perubahan preferensi pelanggan sulit untuk diprediksi dan pengenalan produk baru oleh kompetitor dapat membuat penawaran Cinema XXI menjadi tidak kompetitif. Pertimbangan kesehatan, diet dan pertimbangan lainnya juga dapat mengubah preferensi pelanggan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk Cinema XXI. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mempertahankan penjualan ritel pada tingkat saat ini dalam hal terjadinya salah satu kejadian di atas, atau belanja ritel per kepala tidak akan menurun, di mana salah satu hal tersebut atau kedua hal tersebut dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha F&B Cinema XXI bergantung pada pasokan bahan baku eksternal dan Cinema XXI mungkin tidak dapat menjamin ketersediaan rantai pasokan F&B untuk operasional pada harga yang kompetitif, tepat waktu, dan/atau tidak tersedia sama sekali, yang dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi. Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan dan menjual produk F&B sangat penting untuk profitabilitas. Jika terjadi perselisihan dengan pemasok, termasuk perselisihan mengenai harga atau kinerja, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menyediakan produk F&B bagi pelanggan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap penjualan produk, kondisi keuangan dan hasil operasi. Selain itu, kerusakan atau gangguan dalam

rantai pasokan, termasuk kemampuan produksi dan distribusi dari pihak ketiga, karena tekanan dalam rantai pasokan sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, cuaca, bencana alam, kebakaran atau ledakan, terorisme, pandemi atau epidemik lainnya, mogok kerja, tindakan pemerintah, atau alasan lain di luar kendali Cinema XXI atau kendali pemasok, dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan atau menjual produk F&B.

Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor film dan rumah produksi, dan memburuknya hubungan dengan distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan distributor film dan rumah produksi. Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memperoleh lisensi film terutama dari dua distributor untuk film internasional dan delapan rumah produksi film dalam negeri untuk film nasional. Cinema XXI juga bergantung pada informasi dari distributor dan rumah produksi tersebut mengenai rilis film yang akan datang sebelum Cinema XXI dapat mengkurasi dan menerapkan rencana rilis. Cinema XXI tidak dapat memiliki kepastian atas pasokan film melalui perjanjian jangka panjang dengan distributor dan rumah produksi ternama, melainkan harus bersaing untuk mendapatkan lisensi film secara satu per satu. Tidak terdapat jaminan bahwa distributor dan rumah produksi akan memberikan informasi terkini mengenai film yang akan di-rilis, atau bahwa model distribusi saat ini akan tetap sama ke depannya. Dalam hal distributor dan rumah produksi lebih memihak kompetitor dan memberikan informasi rilis film yang akan datang terlebih dahulu atau bahkan tidak memberikan informasi kepada Cinema XXI sama sekali, atau jika Cinema XXI harus memperoleh lisensi film dari sumber alternatif, Cinema XXI tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan rencana rilis, dan operasional bioskop akan menjadi kurang kompetitif, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan pendapatan penjualan tiket bioskop. Kegiatan usaha Cinema XXI dapat dirugikan jika akses film bagi Cinema XXI menjadi terbatas atau tertunda karena memburuknya hubungan dengan satu atau lebih distributor dan rumah produksi atau karena alasan lainnya. Sejauh Cinema XXI tidak dapat memperoleh lisensi untuk film populer untuk diputarkan di bioskop, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Membina hubungan baik dengan distributor film dan rumah produksi sangat penting bagi kesuksesan Cinema XXI. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat terus mempertahankan posisi ini dan/atau hubungan baiknya dengan distributor atau rumah produksi film, atau bahwa distributor dan rumah produksi tidak akan memperbolehkan rilis film *blockbuster* secara bersamaan pada lebih banyak lokasi bioskop kompetitor.

Jangka waktu untuk sebuah film ditayangkan secara ekslusif di bioskop ditentukan oleh distributor dan rumah produksi. Jika distributor atau rumah produksi menawarkan layanan media OTT sendiri, periode tayang yang diberikan kepada Cinema XXI mungkin dipangkas atau dikurangi berdasarkan preferensi distributor atau rumah produksi yang akan lebih memilih layanan media OTT. Layanan media OTT masih diuji coba dan belum sepenuhnya dapat menggantikan penayangan film di bioskop, sehingga dapat gagal dalam menghasilkan eksploitasi penayangan film secara maksimal. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu menikmati periode jadwal tayang yang menguntungkan. Jika Cinema XXI gagal mendapatkan lisensi untuk periode jadwal tayang yang menguntungkan, Cinema XXI mungkin tidak dapat menayangkan film populer di bioskop dalam periode waktu yang cukup lama, dan sebagai akibatnya, pendapatan Cinema XXI dari tiket bioskop mungkin mengalami penurunan. Hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI juga bergantung terhadap kemampuan distributor film dan rumah produksi untuk terus memasok film-film baik asing maupun domestik. Apabila salah satu distributor film atau rumah produksi tidak dapat melanjutkan untuk memasok film asing dan domestik kepada Cinema XXI, termasuk diantaranya karena gagal mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk mendistribusikan film di Indonesia, perubahan terhadap kondisi keuangan distributor film dan rumah produksi, atau perubahan kepemilikan distributor tersebut, dan jika Cinema XXI tidak dapat menemukan distributor film alternatif

untuk film-film tersebut, maka akan berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan film-film *blockbuster* dan populer di bioskop. Sebagai akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Selain itu, karena Cinema XXI tidak membuat perjanjian jangka panjang dengan distributor utama dan rumah produksi dan kontrak film Cinema XXI diperoleh satu per satu, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan dapat terus mendapatkan kontrak dengan distributor film dengan persyaratan yang serupa. Sebagai contoh, kesepakatan Cinema XXI dengan distributor film saat ini menggunakan skema bagi hasil, di mana Cinema XXI membayar 50% dari jumlah penjualan tiket setelah dikurangi dengan pajak hiburan yang berlaku berdasarkan peraturan pajak daerah, yang menurut Euromonitor telah menjadi praktik yang berlangsung sejak lama di Indonesia. Perubahan yang terjadi terhadap syarat dan ketentuan standar industri, penurunan porsi bagi hasil, atau pengenalan model baru, yang tidak sesuai dengan regulasi dan didasarkan atas kesepakatan komersial dengan distributor film dan rumah produksi, termasuk PT Omega Film, yang merupakan distributor film utama yang ditunjuk oleh rumah produksi asing untuk mendistribusikan film di Indonesia (menurut Euromonitor), dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI dan pada gilirannya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Setiap klaim yang merugikan, spekulasi media dan pernyataan publik lainnya, apakah benar atau tidak, sehubungan dengan strategi pemilihan film, kualitas makanan dan layanan dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi dan citra perusahaan Cinema XXI, atau sebaliknya dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk melakukan kegiatan usaha sehari-hari, termasuk memperoleh dan memperbarui izin berusaha dan persetujuan dari badan pemerintahan, serta membina dan memelihara hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Secara khusus, keamanan pangan, termasuk kemungkinan perusakan atau kontaminasi makanan adalah kekhawatiran yang dimiliki kegiatan usaha yang memiliki komponen bisnis makanan. Apabila terdapat laporan atau publisitas atau berita yang menghubungkan Perseroan atau bioskop Cinema XXI dengan masalah keamanan pangan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Cinema XXI, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan ritel dari bioskop dan F&B. Sejalan dengan pertumbuhan kontribusi pendaptan ritel F&B terhadap pendapatan konsolidasian Cinema XXI, terjadinya masalah keamanan pangan dapat berdampak material dan merugikan terhadap total pendapatan. Meningkatnya penggunaan media sosial oleh pelanggan dan penonton juga dapat menguatkan publisitas negatif tersebut. Selain dampaknya terhadap total pendapatan, sebagai akibat dari masalah keamanan pangan, Cinema XXI dapat menghadapi litigasi, investigasi oleh badan pemerintahan, penarikan kembali atau denda.

Cinema XXI mengandalkan pihak ketiga untuk memasok bahan baku, di mana hal tersebut dapat meningkatkan risiko lokasi Cinema XXI dapat terkena penyakit bawaan dari makanan yang berasal dari pihak ketiga tersebut. Adanya kekhawatiran mengenai keamanan produk yang ditawarkan di bioskop Cinema XXI atau keamanan dan kualitas rantai pasokan dapat membuat pelanggan menghindari membeli produk F&B. Tidak terdapat jaminan bahwa insiden kontaminasi produk atau bahan baku tidak akan terjadi di masa mendatang, di mana hal tersebut dapat menimbulkan klaim ganti rugi, penarikan kembali produk dan publisitas negatif bagi Cinema XXI. Klaim dan tuduhan tersebut juga dapat mengalihkan perhatian manajemen dari tanggung jawab mereka sehari-hari dan oleh karenanya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood dapat memengaruhi Cinema XXI.

Industri bioskop sangat bergantung pada film-film yang diproduksi oleh Hollywood, di mana jumlah penonton bioskop berhubungan erat dengan kualitas dan kuantitas film yang diproduksi oleh Hollywood. Judul film yang dirilis oleh studio-studio ternama Hollywood termasuk anggota Motion Picture Association mewakili 25,0% hingga 28,0% dari total film yang ditayangkan di Cinema XXI. Ketergantungan terhadap film-film Hollywood sebagian di-*offset* dengan pertumbuhan industri film nasional Indonesia dan fakta bahwa film-film independen yang menarik lebih sedikit penonton biasanya

menghasilkan marjin bruto yang lebih tinggi bagi pelaku kegiatan pemutaran film, dikarenakan perjanjian rental film antara distributor dan pelaku kegiatan pemutaran film, yang menawarkan beberapa bentuk perlindungan marjin kepada pelaku kegiatan pemutaran film untuk film-film yang kurang populer. Penurunan kualitas, kuantitas atau popularitas film Hollywood dapat berdampak merugikan secara material terhadap industri bioskop dan kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam industri bioskop.

Bioskop Cinema XXI menghadapi persaingan pada tingkat berbeda yang bergantung dari wilayah geografis. Kompetitor dapat berupa pelaku bioskop dengan jejaring peredaran nasional, regional atau pelaku bioskop independen yang lebih kecil serta platform penjualan tiket film online.

Persaingan antara perusahaan bioskop seringkali sangat ketat karena faktor-faktor sebagai berikut:

- *Menarik penonton*. Persaingan untuk mendapatkan penonton tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan film populer, lokasi, serta jumlah teater dan layar di pasar, kenyamanan dan kualitas teater, penawaran F&B dan harga. Kompetitor telah membangun atau mungkin berencana untuk membangun bioskop di daerah-daerah tertentu di mana Cinema XXI beroperasi, yang dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan penonton.

- *Lisensi film*. Cinema XXI percaya bahwa faktor persaingan utama terkait dengan lisensi film meliputi persyaratan lisensi, jumlah kursi dan layar yang tersedia untuk film tertentu, potensi pendapatan dan lokasi serta kondisi teater pemutar film.

- *Lokasi baru dan akuisisi*. Cinema XXI harus bersaing dengan pelaku bioskop lain dan pihak lain dalam upayanya menemukan dan menyewa lokasi baru dan eksisting yang menarik untuk bioskop. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan mendapatkan atau menyewa lokasi baru atau eksisting dengan harga yang wajar atau dengan persyaratan yang menguntungkan atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, beberapa pesaing mungkin lebih kuat secara finansial daripada Cinema XXI. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Cinema XXI mungkin tidak berhasil memperoleh persyaratan sewa yang menguntungkan atau bahkan tidak sama sekali.

Dalam hal Cinema XXI tidak dapat bersaing secara efektif, Cinema XXI dapat kehilangan sebagian atau seluruh pangsa pasar di pasar jejaring layar atau kehilangan penonton kepada pesaing tersebut dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Lebih lanjut, selain menjual tiket film bioskop Cinema XXI, platform digital TIX.ID bekerja sama dengan berbagai pesaing utama Cinema XXI di industri bioskop serta pesaing lain di industri hiburan. Namun demikian, karena TIX.ID menggabungkan penjualan tiket untuk sebagian besar operator bioskop besar di Indonesia, pengembangan dan pertumbuhan TIX.ID dapat membantu pertumbuhan pesaing Cinema XXI, yang akan meningkatkan persaingan dan mengurangi pangsa pasar Cinema XXI, dan sebagai akibatnya akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, Cinema XXI mencatatkan rugi masing-masing sebesar Rp584.982 juta dan Rp354.267 juta. Cinema XXI mencatatkan arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp459.477 juta dan arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp418.937 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021. Meskipun Cinema XXI percaya bahwa kerugian pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 global, Cinema XXI percaya bahwa Cinema XXI akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal yang diantisipasi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dengan dimulainya pemulihan industri perfilman Indonesia pada tahun 2022, di mana, menurut Euromonitor,

bergerak mengarah tingkat sebelum pandemi dalam hal penjualan tiket nonton. Namun, pemulihan industri perfilman Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan Cinema XXI, termasuk ketersediaan film lokal dan internasional, keberagaman serta performa film-film tersebut yang mempengaruhi jumlah penonton dan pendapatan. Oleh karena itu, bahkan setelah pandemi COVID-19, Cinema XXI tidak dapat menjamin jumlah penonton dan pendapatan akan pulih kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19 dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin tidak sama sekali. Sebagai contoh, Cinema XXI terus mengalami kerugian sebesar Rp25.589 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan rugi sebesar Rp47.615 juta untuk periode yang sama tahun 2022, setelah normalisasi COVID-19. Meskipun sebelum COVID-19 secara historis Cinema XXI umumnya memiliki jumlah penonton yang lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan kuartal lainnya, tidak ada jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan untuk periode atau keuntungan akan membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya.

Meskipun Cinema XXI percaya bahwa saldo kas yang dimiliki saat ini dan arus kas yang diantisipasi dari aktivitas operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal yang diantisipasi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari untuk 12 bulan ke depan, Cinema XXI tidak dapat menjamin hal tersebut. Jika Cinema XXI tidak dapat mengimbangi pengeluaran dengan pendapatan yang memadai dan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Apabila Cinema XXI tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kebutuhan operasional lainnya, Cinema XXI mungkin perlu menggalang dana tambahan untuk operasional Cinema XXI, dan dana tersebut mungkin tidak tersedia dengan syarat yang menguntungkan atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Jika Cinema XXI tidak dapat mendapatkan pendanaan dengan syarat yang menguntungkan, Cinema XXI mungkin tidak dapat melaksanakan rencana bisnis, memanfaatkan peluang di masa depan, atau merespons tekanan persaingan atau kebutuhan yang tidak terduga. Hal ini dapat sangat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Cinema XXI. Jika Cinema XXI tidak dapat mencapai atau mempertahankan tingkat profitabilitas, maka harga pasar saham Perseroan mungkin turun secara signifikan.

Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevalusi dan berpotensi menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut dapat secara signifikan membutuhkan perhatian manajemen, menganggu bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

Cinema XXI dapat melakukan evaluasi dan mempertimbangkan investasi, penggabungan usaha, akuisisi atau aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring bioskop dan melayani penonton dengan lebih baik. Transaksi ini dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI apabila dilaksanakan. Apabila Cinema XXI dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang sesuai, Cinema XXI mungkin tidak dapat menyelesaikan transaksi tersebut, dan, meskipun transaksi tersebut dapat diselesaikan, Cinema XXI mungkin tidak dapat memperoleh manfaat atau menghindar kesulitan dan risiko yang ditimbulkan dari transaksi tersebut.

Investasi atau akuisisi strategis tersebut dapat melibatkan sejumlah risiko yang umumnya dihadapi dalam hubungan bisnis, meliputi:

- kesulitan untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan kegiatan operasi, personel, sistem, data, teknologi dan layanan dari bisnis yang diakuisisi;

- ketidakmampuan dari bisnis yang diakuisisi untuk mencapai pendapatan, profitabilitas, produktivitas atau manfaat lain pada tingkat yang diharapkan;

- kesulitan untuk mempertahankan, melatih, memotivasi dan mengintegrasikan personel kunci;

- beralihnya waktu dan sumber daya manajemen dari kegiatan usaha sehari-hari atau kegagalan manajemen untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan investasi atau akuisisi yang strategis;

- kesulitan untuk secara sukses menggabungkan teknologi yang dilisensikan atau diperlukan serta haknya ke dalam sistem dan kegiatan operasi Cinema XXI;

- kesulitan untuk mempertahankan standar, kontrol, prosedur dan kebijakan yang seragam dalam organisasi yang menerima penggabungan;

- kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan, karyawan dan pemasok dari bisnis yang diakuisisi;

- risko yang timbul dari memasuki pasar di mana Cinema XXI memiliki pengalaman yang terbatas atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali;

- risiko peraturan, termasuk mempertahankan reputasi yang baik dengan badan pemerintahan atau memenuhi atau menerima setiap persetujuan yang diperlukan sebelum atau setelah transaksi diselesaikan, serta tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di bisnis yang baru diakuisisi;

- memiliki kewajiban dalam kontrak yang memiliki syarat dan ketentuan kurang menguntungkan bagi Cinema XXI, mengharuskan Cinema XXI untuk memiliki lisensi atau mengecualikan hak atas kepemilikan intelektual atau meningkatkan risiko pertanggungjawaban;

- kewajiban atas kegiatan bisnis yang diakuisisi sebelum akuisisi, termasuk tuntutan pelanggaran hak atas kepemilikan intelektual, pelanggaran hukum, sengketa komersial, kewajiban pajak dan kewajiban lain yang diketahui maupun tidak diketahui;

- potensi gangguan terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan;

- biaya tak terduga dan risiko dan kewajiban yang tidak diketahui terkait dengan investasi atau akuisisi strategis.

Cinema XXI mungkin tidak melakukan investasi atau akuisisi, atau investasi atau akuisisi yang dilakukan di masa depan mungkin tidak berhasil, tidak memberikan manfaat bagi strategi bisnis, dan tidak mendatangkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya akuisisi yang timbul atau bahkan tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa investasi atau akuisisi bisnis atau teknologi baru di mana depan akan berhasil dikembangkan untuk menghasilkan produk dan layanan yang baru atau berkualitas lebih baik atau apabila produk dan layanan tersebut dikembangkan akan diterima oleh pasar atau mendatangkan keuntungan. Sebagai hasilnya, dalam hal salah satu risiko tersebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman dan tidak dapat diprediksi.

Pendapatan dan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman karena jadwal rilis film oleh para disbrutor film internasional utama. Secara historis, sebelum COVID-19, film yang paling laris dirilis dalam bulan Mei sampai dengan Juli dan November sampai dengan Desember, umumnya dikenal sebagai liburan musim panas, liburan lebaran, liburan akhir tahun, ketika tingkat kehadiran penonton bioskop Cinema XXI biasanya menjadi lebih tinggi yang kemudian menyebabkan peningkatan pendapatan untuk periode terkait. Sebaliknya, tingkat kehadiran penonton lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya.

Kinerja yang buruk dari film yang dirilis ke pasar, atau gangguan yang dialami dalam merilis film selama periode-periode tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil keuangan untuk satu tahun fiskal. Film *blockbuster* tak terduga yang dirilis dalam periode lain dapat merubah tren musiman historis. Waktu rilis film dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasi, dan hasil operasi Cinema XXI pada suatu kuartal tidak dapat menjadi indikasi untuk hasil kuartal lainnya, dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator kinerja Cinema XXI untuk tahun fiskal yang akan datang.

Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan peluang akuisisi yang akan meningkatkan jumlah bioskop Cinema XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar.

Dengan mempertimbangkan ukuran dan pangsa pasar Cinema XXI, peluang akuisisi yang dikejar oleh Cinema XXI yang dapat meningkatkan jumlah bioskop di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar, kemungkinan besar akan mengakibatkan tinjauan secara besar-besaran oleh komisi pengawas persaingan usaha dan lembaga pemerintah lain yang relevan, dan Cinema XXI dapat diwajibkan untuk menjual sejumlah bioskop agar dapat menyelesaikan peluang akuisisi tersebut. Sebagai hasilnya, Cinema XXI mungkin tidak berhasil mengakuisisi perusahaan pertunjukan film lainnya atau bioskop mereka, atau Cinema XXI mungkin harus menjual bioskop dalam jumlah signifikan di pasar utama untuk menyelesaikan akuisisi tersebut.

Dikarenakan posisi pasar yang dominan dalam industri bioskop di Indonesia, Cinema XXI rentan terhadap penyelidikan yang dilakukan sesekali oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**KKPU**"). Sebagai contoh, Perseroan diselidiki oleh KPPU pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan 2009. Sehubungan dengan investigasi pada tahun 2002 sampai dengan 2003, KPPU memutuskan bahwa Perseroan melanggar ketentuan tertentu dalam undang-undang persaingan usaha, dan Perseroan diwajibkan untuk mendivestasi saham pada Perusahaan Anak tertentu agar dapat mematuhi undang-undang persaingan usaha yang berlaku pada saat itu, di mana divestasi tersebut diselesaikan pada bulan April 2023. Sehubungan dengan investigasi pada tahun 2009, KPPU memutuskan bahwa Perseroan tidak melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku pada saat itu dan tidak ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Perseroan. Meskipun Cinema XXI tidak pernah menerima sanksi atau denda apapun untuk pelanggaran undang-undang dan peraturan dalam 10 tahun terakhir, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI tidak akan menghadapi penyelidikan oleh regulator di masa mendatang, dan setiap kejadian di masa mendatang yang berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi pidana, menganggu atau menghentikan kegiatan operasi Cinema XXI, atau membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan penghimpunan dana.

Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganan yang tidak tepat atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI dapat memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu dalam hal program loyalitas diluncurkan, di mana hal tersebut akan mewajibkan Cinema XXI untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi sensitif, termasuk pemerolehan dan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan keamanan informasi pribadi, serta setiap permintaan dari regulator dan badan pemerintahan terkait data tersebut. Regulator di Indonesia telah semakin fokus pada pengaturan keamanan dan perlindungan data, khususnya informasi pribadi dan sensitif. Cinema XXI memandang bahwa area ini akan mendapat perhatian lebih besar dari regulator, serta menarik perhatian dan pengawasan publik ke depannya. Perhatian, pengawasan dan pelaksanaan kepatuhan yang lebih besar, termasuk inspeksi yang lebih sering, dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan mengakibatkan Cinema XXI memiliki risiko dan tantangan yang lebih besar sehubungan dengan keamanan dan perlindungan data. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dapat membatasi kegiatan usaha Cinema XXI, mewajibkan Cinema XXI untuk mengeluarkan biaya dan mencurahkan banyak waktu untuk upaya kepatuhan. Peraturan privasi data yang saat ini berlaku membatasi sejauh mana Cinema XXI dapat menggunakan informasi identitas pribadi dan membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menggunakan perusahaan pihak ketiga sehubungan dengan data penonton. Apabila Cinema XXI tidak dapat mengelola risiko ini, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

Selanjutnya, Cinema XXI menghadapi risiko yang melekat dalam menangani dan melindungi data tersebut, termasuk melindungi data yang ditempatkan dalam sistem Cinema XXI, mendeteksi dan melarang pembagian dan transfer data yang tidak sah, mencegah serangan terhadap sistem Cinema XXI oleh pihak luar atau tindakan penipuan atau penggunaan data yang tidak semestinya oleh karyawan,

dan memelihara serta memperbarui database. Cinema XXI telah mengimplementasi kebijakan sistem manajemen keamanan informasi serta kebijakan internal untuk akses pengguna, otentikasi dan akses jaringan untuk mengelola dan mengendalikan akses data oleh karyawan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa karyawan Cinema XXI akan mematuhi kebijakan tersebut dan Cinema XXI tidak akan mengalami kegagalan sistem, pelanggaran keamanan atau serangan atau upaya dari pihak ketiga untuk memperoleh data secara ilegal yang mengakibatkan data pengguna bocor atau seolah-olah bocor di mana hal ini dapat merusak reputasi dan merek Cinema XXI, membuat penonton dan calon penonton yang potensial meragukan layanan Cinema XXI, merusak bisnis dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Cinema XXI.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai keamanan dan perlindungan data terus berkembang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2022 dan diundangkan sebagai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 pada tanggal 17 Oktober 2022 ("**UU PDP**"). Selama beberapa tahun, Indonesia hanya mengandalkan beragam peraturan yang memuat ketentuan privasi tanpa seperangkat undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang memproses data pribadi di dalam dan di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Dikarenakan UU PDP memiliki periode transisi selama dua tahun (setelah diundangkan), semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data wajib menyesuaikan praktek pemrosesan data pribadi dengan ketentuan dalam UU PDP dalam periode transisi. Meskipun istilah "pemrosesan data pribadi" tidak didefinisikan di dalam UU PDP, UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi penggunaan data pribadi seperti pemrosesan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Oleh karena itu, periode transisi selama dua tahun kemungkinan besar berlaku bagi seluruh ketentuan dalam UU PDP. UU PDP relatif baru dan penafsiran serta pelaksanaannya tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut. UU PDP memberikan batasan dan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data dalam pemrosesan data pribadi, dan selanjutnya memberlakukan sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran terhadap kewajiban yang dipersyaratkan. Sanksi administratif termasuk peringatan tertulis, penghentian semesntara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif. Sanksi pidana dijatuhkan atas pelanggaran terhadap larangan, meliputi antara lain, (i) memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugikan subjek data pribadi; (ii) mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan (iii) penggunaan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksi pidana meliputi pidana denda sebesar Rp4 miliar sampai dengan Rp6 miliar dan/atau pidana penjara selama empat hingga enam tahun, tergantung pada jenis pelanggaran. Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi (di mana pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda). Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 kali maksimal pidana denda yang diancamkan, dan selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harga kekayaan yang diperoleh atas hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pencabutan izin dan/atau pembubaran korporasi. Perubahan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan mengenai privasi data dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Biaya yang timbul dari penerapan langkah-langkah perlindungan data lebih lanjut, serta dampaknya terhadap kegiatan operasi dapat menjadi singifikan, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kinerja keuangan Cinema XXI.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan operasi dan potensi kerugian.

Polis asuransi Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi kerugian yang timbul dari kerusakan atas bioskop atau peralatan. Cinema XXI memiliki asuransi tanggung jawab publik, asuransi *property all-risk*, asuransi ketidakjujuran, asuransi direktur & pejabat, asuransi kendaraan bermotor dan

asuransi terhadap gempa bumi dan terorisme serta sabotase. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa pertanggungan dalam asuransi akan dapat menutup seluruh jenis kerusakan yang dialami oleh perorangan atau properti, atau memadai untuk menutup seluruh kerugian, pencurian atau kerusakan pada properti atau cedera pribadi di mana Cinema XXI dapat dimintai pertanggungjawaban. Masalah atau gangguan listrik, kerusakan, kegagalan atau kinerja peralatan di bawah standar, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya dikarenakan kebakaran atau bencana alam seperti angin topan, banjir, kekeringan atau gempa bumi akan sangat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan operasi dan menyebabkan kerusakan properti dan cedera pribadi yang signifikan. Selain itu, terdapat jenis kerugian tertentu seperti perang, dan radiasi atau kontaminasi akibat radioaktivitas, di mana Cinema XXI tidak dapat memperoleh asuransi dengan biaya yang wajar atau bahkan tidak dapat memperoleh asuransi sama sekali. Setiap peristiwa dan setiap kerugian atau permintaan pertanggungjawaban yang tidak ditutup oleh polis asuransi saat ini dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usah Cinema XXI. Lebih lanjut, meskipun Cinema XXI memiliki asuransi tanggung jawab publik untuk bioskop dan penonton, dalam hal terjadi kecelakaan, Cinema XXI dapat dikenakan tanggung jawab perdata, perbuatan melawan hukum, dan pidana dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan merek Cinema XXI. Selain itu, kegagalan mekanis dan elektrikal yang tidak terduga, di mana hal tersebut dapat menganggu operasional bioskop dalam jangka waktu yang signifikan, dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut terkait langsung dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, di mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek tertentu, seperti IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.

Faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan tipe bioskop IMAX dan tipe bioskop selain IMAX yang menayangkan film dengan efek spesial adalah ketersediaan film untuk tipe bioskop tersebut dan performa *box office* untuk film tersebut. Cinema XXI sepenuhnya bergantung pada film yang diproduksi oleh produsen dan studio pihak ketiga, seperti fitur film Hollywood yang dikonversi menjadi format layar besar dengan menggunakan IMAX dan teknologi lain. Tidak terdapat jaminan bahwa produsen dan studio akan terus merilis film tersebut, atau bahwa film yang diproduksi akan sukses secara komersial. Selain itu, film dapat mengalami keterlambatan produksi atau perubahan tanggal rilis. Meskipun Cinema XXI memutar film non-IMAX di layar format IMAX dalam situasi tertentu, setiap kegagalan untuk memproduksi film dalam format ini secara sukses atau memasarkan film secara efektif dapat berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan Cinema XXI. Kegiatan operasi teater tipe IMAX juga bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mempertahankan hubungan baik-nya dengan pemegang lisensi IMAX dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan dapat terus membeli peralatan yang diperlukan untuk IMAX atau memperoleh lisensi untuk mengoperasikan film berformat IMAX.

Pengakuan dan persepsi yang baik dari penonton di Indonesia atas merek pihak ketiga, seperti IMAX sangat penting bagi kesuksesan Cinema XXI. Apabila Cinema XXI tidak dapat memperluas pengakuan atas merek ini di Indonesia, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kesuksesan Cinema XXI di masa depan. Tidak terdapat jaminan bahwa strategi pemasaran akan menghasilkan tingkat pengenalan merek yang diinginkan. Apabila upaya pemasaran Cinema XXI tidak berhasil, biaya yang timbul dari aktivitas tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan dan Cinema XXI mungkin tidak dapat meningkatkan pendapatannya di masa depan. Selain itu, Cinema XXI tidak memiliki kendali atas cara sistem dan peralatan teater ini dioperasikan di luar Indonesia dan perkembangan pasar yang merugikan terkait nama merek ini atau publisitas negatif yang memengaruhi satu atau lebih bioskop di luar Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap daya tarik IMAX dan teater tipe lainnya. Terjadinya salah satu hal di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat menganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema XXI dan menyebabkan kerugian.

Sistem manajemen bioskop Cinema XXI yang berfungsi dengan semestinya sangat penting untuk mengoperasikan bioskop digital serta sistem pemesanan tiket internal dan eksternal dan pembayaran Cinema XXI yang mendukung kegiatan pemesanan tiket secara online, pembayaran dan pencatatan pendapatan bioskop dengan tujuan mengelola pemutaran film dan pemesanan tiket yang lebih efisien. Cinema XXI sebelumnya pernah mengalami masalah teknologi informasi sehubungan dengan kapasitas server TIX.ID dan volume jumlah pengguna yang tinggi yang tidak diantisipasi, di mana hal tersebut memengaruhi penjualan tiket dan mengakibatkan pengembalian tiket kepada pengguna yang terdampak. Meskipun Cinema XXI telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu tersebut telah diselesaikan dengan meningkatkan server dan *backend*, seperti sistem pemantauan kapasitas server otomatis tidak terdapat jaminan bahwa langkah tersebut akan efektif dalam menyelesaikan masalah teknologi informasi atau mencegah kendala di masa depan dan setiap kegagalan dalam sistem teknologi informasi, termasuk sistem teknologi informasi pihak ketiga, tidak terdapat jaminan bahwa langkah tersebut akan efektif dalam menyelesaikan masalah teknologi informasi atau mencegah kendala di masa depan dan setiap kegagalan dalam sistem teknologi informasi, termasuksistem teknologi informasi pihak ketiga tersebut, dapat sangat menganggu kegiatan operasional Cinema XXI dalam beberapa aspek, termasuk namun tidak terbatas pada membahayakan informasi rahasia yang telah diproses dan disimpan atau ditransmisikan melalui sistem dan jaringan komputer, menyebabkan gangguan dan malfungsi dalam pemutaran film dan kegiatan operasional, atau menganggu penggunaan teknologi internal atau eksternal dari layanan online oleh pelanggan. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap keunggulan kompetitif, kondisi keuangan, hasil operasi, dan reputasi merek Cinema XXI.

Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema XXI.

Pembajakan film banyak dilakukan di berbagai belahan dunia dan dipermudah dengan kemajuan teknologi dan konversi film ke dalam format digital. Secara khusus, penyalinan yang tidak sah dan pembajakan lazim terjadi di Indonesia, yang sistem hukumnya dapat mempersulit Cinema XXI untuk menegakkan hak kekayaan intelektual. Sebagai akibatnya, pembuatan, transmisi dan membagikan salinan film berkualitas tinggi yang tidak sah melalui perekaman video film di bioskop dan pendistribusian melalui platform online atau media lain pada atau sebelum tanggal rilis film telah berkembang baik. Penonton di Indonesia memiliki kesadaran yang rendah terhadap konten yang diakses secara ilegal dan konsekuensi pembajakan, dan peralihan ke format digital telah memfasilitasi pembajakan berkualitas tinggi khususnya melalui internet dan televisi kabel. Terdapat beberapa kejadian di mana film baru dibajak dan tersedia secara online. Perkembangan ini telah dan kemungkinannya akan terus berlangsung sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI, karena produk hasil pembajakan mengurangi jumlah penonton bioskop, dan pendapatan yang diterima dari penjualan tiket.

Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.

Seluruh bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi proyeksi digital. Namun demikian, bioskop digital telah beralih dari teknologi tradisional berbasis film seluloid dan bergantung pada teknologi digital baru, yang pada akhirnya dapat menggantikan penggunaan teknologi proyeksi seluloid di bioskop. Kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan film digital dengan kualitas film seluloid yang sebanding bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mengikuti perubahan teknologi yang pesat dan menggunakan proyektor yang lebih mahal dibandingkan proyektor film seluloid.

Agar dapat tetap kompetitif, Cinema XXI mungkin harus melakukan belanja modal tambahan untuk proyektor digital, atau mencari dan memperoleh teknologi proyeksi baru agar dapat tetap kompetitif. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI. Terdapat risiko bahwa Cinema XXI mungkin tidak dapat melakukan investasi yang memadai untuk mengantisipasi perkembangan dalam teknologi dan industri, atau melakukan investasi yang tepat untuk mengembangkan kegiatan usaha, agar dapat beradaptasi dengan perubahan di dalam

pasar. Oleh karena itu, kegagalan Cinema XXI untuk mengadopsi teknologi baru dengan baik pada biaya yang efektif dalam waktu yang cepat atau bahkan tidak sama sekali, dapat menambah beban dan mengurangi keunggulan kompetitif Cinema XXI (dalam hal kualitas film yang ditayangkan). Setiap pengeluaran tambahan tidak serta merta meningkatkan pendapatan Cinema XXI secara material. Tidak terdapat jaminan bahwa peralihan ke teknologi digital baru tidak akan berdampak material terhadap kebutuhan belanja modal dan/atau biaya operasi Cinema XXI, dan sebagai akibatnya berdampak pada kegiatan usaha, hasil operasi atau posisi keuangan Cinema XXI.

Lebih lanjut, peralatan atau proyektor digital tertentu yang canggih hanya tersedia melalui impor dari pemasok luar negeri. Terdapat faktor-faktor di luar kendali Cinema XXI, meliputi perselisihan politik dan dagang atau implementasi peraturan atau persyaratan lisensi tambahan, yang dapat membatasi akses Cinema XXI ke pasar tertentu atau meningkatkan biaya pembelian peralatan atau proyektor tersebut, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor.

Cinema XXI memiliki kebutuhan untuk memelihara, merenovasi, memugar dan memperbarui fasilitas bioskop yang ada saat ini secara berkelanjutan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing, serta pengakuan dan loyalitas merek. Cinema XXI telah dan akan terus mendedikasikan pengeluaran dalam jumlah besar untuk memelihara, merenovasi, memugar dan memperbarui fasilitas bioskop. Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, belanja modal sehubungan dengan penambahan aset tetap untuk bioskop Cinema XXI masing-masing sebesar Rp40.749 juta, Rp26.409 juta, Rp4.446 juta dan nihil. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan berhasil dalam melaksanakan rencana belanja modal. Sebagai contoh, pengembangan yang dilakukan dalam teater Cinema XXI melalui renovasi teater dan peningkatan fasilitas lainnya termasuk memasang filter HEPA (*high efficiency particulate air*) sebagai tanggapan atas wabah COVID-19, dan pengaturan tempat duduk yang lebih nyaman seperti tempat duduk yang dapat direbahkan, menghadapi sejumlah risiko seperti kesulitan untuk memperoleh izin, persetujuan pemilik tempat, dan jenis izin operasional baru. Kegagalan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kualitas teater yang ada saat ini, atau pembengkakan biaya akibat keterlambatan atau biaya tak terduga lainnya yang timbul dalam perbaikan fasilitas, dapat menganggu operasional dan/atau berdampak merugikan terhadap reputasi merek Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor atas Saham Perseroan. Lebih lanjut, lokasi yang telah bertransformasi mungkin tidak memberikan hasil sesuai harapan atau pesaing mungkin berhasil memberikan kualitas pengalaman menonton yang lebih baik, dan Cinema XXI mungkin tidak dapat menarik atau meningkatkan jumlah penonton ke lokasi bioskop. Secara historis, Cinema XXI telah mendanai belanja modal dengan menggunakan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi. Apabila Cinema XXI gagal menghasilkan arus kas yang memadai dari kegiatan operasi untuk mendanai belanja modal atau tidak dapat mendanai pengeluaran tersebut melalui kontribusi dari pemegang saham atau pinjaman eksternal, Cinema XXI mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk memelihara dan mengembangkan bisnisnya, di mana hal tersebut dapat mengurangi daya saing, dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Selain itu, Cinema XXI mungkin tidak dapat memulihkan investasi yang telah dilakukan untuk merenovasi, memugar atau memperbarui lokasi bioskop pada saat perjanjian sewa berakhir. Kerugian tersebut, khususnya apabila terjadi di sejumlah lokasi yang disewa, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat memengaruhi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Sebagian besar bioskop Cinema XXI saat ini berada di pusat perbelanjaan yang besar di mana sebagian besar dari penonton bioskop merupakan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Secara umum, pusat perbelanjaan memiliki jam operasional dan jam operasional yang lebih singkat akan membatasi jumlah

pemutaran film per hari. Arus pengunjung pusat perbelanjaan biasanya mengalami penurunan menjelang akhir jam operasional pusat perbelanjaan. Sebagai hasilnya, jumlah pemutaran film per hari dibatasi lebih lanjut oleh jam-jam di mana potensi kunjungan di bioskop memberikan alasan untuk pemutaran film. Dikarenakan adanya migrasi konsumen ke pembelanjaan online, suatu tren yang diakselerasi oleh pandemi COVID-19, terdapat kemungkinan hanya sejumlah kecil konsumen yang mengunjungi pusat perbelanjaan. Setiap penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan dikarenakan perubahan preferensi dan/atau pengurangan jam operasional pusat perbelanjaan dapat mengurangi jumlah kunjungan ke bioskop dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat menganggu kegiatan usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kelanjutan pengabdian dari manajemen senior, khususnya Direktur yang disebutkan dalam Prospektus ini. Meskipun Cinema XXI memiliki kemampuan untuk menawarkan insentif yang berbeda bagi maanajemen, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat terus mempertahankan pengabdian mereka. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci Cinema XXI tidak dapat atau tidak ingin melanjutkan posisi mereka saat ini, Cinema XXI mungkin tidak mampu memperoleh pengganti mereka dengan mudah atau bahkan tidak sama sekali, di mana hal tersebut dapat membatasi pertumbuhan Cinema XXI di masa depan, menganggu kegiatan usaha dan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI. Cinema XXI juga dapat mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan personel yang memenuhi syarat. Selain itu, meskipun Cinema XXI telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan manajemen, tidak terdapat jaminan bahwa setiap anggota dalam tim manajemen tidak akan bergabung dengan kompetitor atau mendirikan bisnis saingan. Apabila timbul perselisihan antara anggota manajemen saat ini atau sebelumnya dengan Cinema XXI, hal tersebut dapat menimbulkan biaya dan pengeluaran yang substansial untuk menegakkan perjanjian tersebut dalam bahasa Indonesia atau Cinema XXI mungkin tidak dapat menegakkan perjanjian tersebut sama sekali.

Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa komponen penting dari keberhasilan perusahaan adalah budaya perusahaan, yang menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan selaras dengan tujuan bisnis. Cinema XXI berusaha untuk menarik dan mempertahankan karyawan melalui kebijakan pengelolaan talenta, kompensasi dan skema benefit yang kompetitif, serta program pelatihan dan pengembangan. Pada saat Cinema XXI mengembangkan infrastruktur sebagai perusahaan publik dan melanjutkan pertumbuhan, Cinema XXI dapat mengalami kesulitan untuk mempertahankan aspek penting dari budaya perusahaan. Setiap kegagalan untuk memelihara budaya perusahaan dapat berdampak merugikan terhadap keberhasilan Cinema XXI di masa mendatang, termasuk kemampuan Cinema XXI untuk menarik dan mempertahankan karyawan, mendorong inovasi dan kerja sama dan secara efektif fokus pada dan mengejar objektif korporasi.

Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi.

Cinema XXI dikenakan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya di setiap provinsi dan kota di Indonesia, di mana Cinema XXI beroperasi. Struktur perpajakan Cinema XXI dapat ditinjau oleh berbagai otoritas pajak setempat. Penentuan penyisihan untuk pajak penghasilan dan kewajiban pajak lainnya yang memerlukan pertimbangan signifikan. Dalam kegiatan usaha sehari-hari, terdapat banyak transaksi dan perhitungan di mana penentuan pajak akhir tidak pasti. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI telah melakukan estimasi secara wajar, keputusan akhir oleh otoritas pajak yang relevan dapat berbeda dari nilai yang dicatatkan dalam laporan keuangan dan dapat berdampak material terhadap hasil keuangan dalam suatu periode atau periode lain di mana keputusan tersebut dibuat.

Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan aset tetap di masa datang.

Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan dengan penurunan nilai atas teater dan aset tetap lainnya atau penutupan beberapa teater di masa depan sebagai akibat perlambatan ekonomi secara umum, perubahan preferensi pelanggan, pasar bioskop atau lanskap persaingan, dan/atau penurunan kinerja keuangan. Cinema XXI meninjau nilai tercatat aset non-keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai dan mengakui rugi penurunan nilai apabila nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan penyisihan untuk penurunan pengembangan prasarana sebesar Rp1.241 juta sehubungan dengan pengaturan sewa untuk tempat di pusat perbelanjaan yang kegiatan operasinya diputuskan untuk tidak dilanjutkan setelah berakhirnya waktu kontrak sewa tersebut. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masa sewa untuk pengaturan sewa tersebut telah berakhir. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI tidak akan mengalami rugi penurunan nilai atau melakukan penutupan bioskop tambahan di masa depan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Insiden keamanan siber dapat menganggu kegiatan usaha Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

Ancaman keamanan siber global dapat meliputi upaya individu yang tidak terkoordinasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem TI hingga tindakan yang canggih dan terarah yang dikenal sebagai ancaman persisten tingkat lanjut. Meskipun Cinema XXI telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menangani dan memitigasi ancaman ini (termasuk kontrol akses, enkripsi data, penilaian kerentanan, pelatihan manajemen, pemantauan jaringan dan sistem TI secara terus menerus, dan pemeliharan sistem *back up* dan perlindungan untuk penjualan tiket *online*), insiden keamanan siber, tergantung pada sifat dan ruang lingkupnya, berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan, kerusakan, korupsi atau ketidaktersediaan data atau informasi penting dan rahasia (milik Cinema XXI atau pihak ketiga) dan menganggu kegiatan bisnis. Meskipun serangan siber sampai saat ini belum memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi atau likuiditas Cinema XXI, ancaman tersebut tetap ada dan konsekuensi yang potensial atas insiden keamanan siber yang material termasuk kerusakan reputasi, litigasi oleh pihak ketiga, penurunan nilai investasi dalam teknologi, pengembangan dan pengetahuan, dan peningkatan perlindungan keamanan siber dan biaya perbaikan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap daya saing dan hasil operasi Cinema XXI.

Sistem TI Cinema XXI tunduk pada risiko gangguan, kegagalan, akses tidak sah, terorisme siber, kesalahan manusia, penyalahgunaan, perusakan, pencurian, dan serangan siber lainnya. Peristiwa ini atau peristiwa serupa juga dapat menyebabkan gangguan dalam pengoperasian sistem Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Cinema XXI, termasuk kehilangan bisnis. Faktor-faktor seperti ruang lingkup, kompleksitas, ketergantungan, dan lanskap ancaman siber yang berkembang juga dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk beradaptasi dan mematuhi perubahan peraturan dan kewajiban kontraktual yang berlaku untuk keamanan dan privasi data, yang semakin menuntut. Untuk mengatasi risiko ini, Cinema XXI telah mengadopsi langkah-langkah dan teknologi keamanan, mengoperasikan program keamanan, dan bekerja terus untuk mengevaluasi dan meningkatkan postur keamanan. Sebagai contoh, Cinema XXI melakukan tes penetrasi terhadap potensi serangan, tetapi Cinema XXI belum melakukan tes penetrasi sejak 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan tes penetrasi terbaru mungkin tidak menunjukkan status sistem TI saat ini. Cinema XXI juga sedang dalam proses mendirikan departemen keamanan TI. Namun, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan program ini, dan melatih anggota departemen keamanan membutuhkan biaya yang tinggi dan pemantauan dan pembaruan berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, sejalan dengan upaya individu yang tidak terkoordinasi dan ancaman persisten tingkat lanjut untuk mengatasi langkah-langkah keamanan menjadi lebih canggih.

Selain serangan siber yang khusus mengancam perusahaan, kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa terkait siber lainnya yang memengaruhi rekan dan mitra Cinema XXI dalam industri hiburan, serta perusahaan ritel lainnya. Meskipun Cinema XXI memiliki asuransi yang memberikan pertanggungan atas risiko terkait pencurian identitas, terjadinya peristiwa tersebut

di atas atau di masa depan dapat mengakibatkan biaya dan dampak bisnis yang mungkin tidak ditanggung atau mungkin melebihi nilai pertanggungan dari asuransi yang tersedia. Sebagai akibatnya, peristiwa di masa depan dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan dan dapat menganggu kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual yang material bagi bisnis Cinema XXI.

Cinema XXI tidak dapat memastikan bahwa kegiatan operasi atau aspek apapun dari bisnis Cinema XXI tidak atau tidak akan melanggar merek dagang, paten, hak cipta, pengetahuan, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sebagai contoh, Perseroan tidak dapat mendaftarkan merek dagang "The Ballroom", dan meskipun merek dagang "The Premiere" telah didaftarkan di beberapa kelas, Perseroan tidak dapat mendaftarkan merek dagang "The Premiere" di kelas tertentu lainnya. Terdapat kesulitan dalam mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual, seperti surat permohonan untuk "The Ballroom" dan "The Premiere" ditolak karena merek dagang tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan baik sebagian atau secara keseluruhan dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain untuk kelas yang sama. Namun, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI terus menggunakan istilah "The Premiere" untuk menggambarkan tipe bioskop Cinema XXI. Meskipun Perseroan tidak pernah terlibat dalam proses hukum dan tuntutan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pihak lain, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan terlibat dalam proses hukum dan tuntutan tersebut di masa mendatang. Selain itu, terdapat merek dagang pihak ketiga, paten, hak cipta, pengetahuan atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dapat dilanggar oleh bioskop Cinema XXI atau dalam aspek lain dari bisnis Cinema XXI tanpa sepengetahuan Perseroan. Pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat berusaha menegakkan hak atas kekayaan intelektual tersebut kepada Cinema XXI di Indonesia, atau yurisdiksi lainnya. Jika terdapat tuntutan pelanggaran yang diajukan oleh pihak ketiga, hal tersebut dapat mengalihkan waktu manajemen Perseroan dan sumber daya lainnya untuk memenangkan tuntutan ini, terlepas dari manfaatnya. Jika Perseroan diputuskan telah melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut atau mungkin dilarang untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut, dan dikenakan biaya lisensi atau dipaksa untuk mengembangkan alternatif lain. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Lebih lanjut, keberhasilan dan kemampuan Cinema XXI untuk bersaing sebagian bergantung pada kemampuannya untuk membangun dan melindungi hak atas kekayaan intelektual secara memadai. Meskipun Perseroan telah melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tertentu untuk bisnis utama Cinema XXI yang mencakup teks dan logo "XXI," "21," "Cinema XXI," "Cinema 21," "The Premiere," "The Movie Card," "m.tix," "m.food Extra Speed," "XXI Garden Café," "XXI Espresso Bar," "The Daily Santap," "XXI Café," "21 Café," "gambar karakter Cornell" dan "XXI Lounge" dan hak cipta tertentu, termasuk seni karakter "Cornell," memantau penggunaan kekayaan intelektual yang tidak sah, di mana hal ini mungkin sulit dan mahal, dan Perseron tidak dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang telah diambil akan efektif untuk mencegah penggunaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan yang tidak sah. Jika pihak ketiga menggunakan salah satu merek Perseroan atau merek yang serupa tanpa persetujuan, Perseroan mungkin menghadapi risiko dilusi atas ekuitas merek serta merek dagang tersebut dapat diidentifikasi dengan pihak tersebut, bukan Perseroan. Terlepas dari upaya Perseroan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, pihak ketiga dapat secara sadar atau tidak sadar melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan dan Perseroan mungkin tidak dapat mencegah pelanggaran, penyelewengan, atau pelanggaran tersebut tanpa biaya yang besar, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin tidak cukup untuk melindungi hak-hak Perseroan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada posisi yang tidak menguntungkan.

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman terbatas sebagai pengurus perusahaan publik, yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh OJK dan BEI. Kewajiban tersebut, meliputi

kepatuhan terhadap UUPM dan melakukan pengungkapan yang diperlukan serta menyerahkan laporan secara tepat waktu. Manajemen senior Perseroan mungkin tidak dapat menerapkan program dan kebijakan secara efektif dan tepat waktu atau secara memadai memberikan tanggapan dalam hal terjadi penambahan persyaratan hukum, peraturan, dan pelaporan yang diwajibkan sebagai perusahaan publik. Kegagalan Perseroan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, mengalihkan perhatian manajemen Perseroan dari kegiatan usaha, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan harga saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan dalam peraturan, termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Bisnis Cinema XXI diwajibkan memenuhi suatu kualitas operasi dan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia. Cinema XXI juga diwajibkan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen secara umum, keamanan produk dagang, serta undang-undang dan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Meskipun Cinema XXI belum pernah menerima sanksi atau hukuman apa pun atas pelanggaran undang-undang dan peraturan dalam 10 tahun terakhir, setiap kasus ketidakpatuhan saat ini atau di masa lalu berpotensi mengakibatkan sanksi pidana, menganggu atau menghentikan kegiatan operasi, atau membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu atau kegiatan penghimpunan dana.

Pengoperasian bioskop di Indonesia tunduk pada persyaratan peraturan, termasuk mematuhi peraturan pemutaran film dan periklanan sebelum pemutaran film, serta mendapatkan dan memelihara lisensi, izin, atau persetujuan untuk mempertunjukan film dan melakukan penjualan konsesi. Bioskop yang menjual makanan atau minuman kepada penontonnya juga harus mendapatkan izin restoran dan izin kebersihan tertentu serta mematuhi persyaratan terkait kebersihan dan keamanan pangan. Bioskop Cinema XXI menjual makanan dalam kemasan dan tidak dikemas dan semua bioskop Cinema XXI memiliki izin restoran, izin layanan katering, dan izin kebersihan yang masih berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Film**") memberikan persyaratan tertentu yang berlaku bagi Cinema XXI sebagai pelaku kegiatan pertunjukan film. UU Film mensyaratkan hal-hal tertentu, antara lain (i) persyaratan untuk mengutamakan film Indonesia yang akan dipertunjukkan di bioskop; (ii) larangan untuk mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku pembuatan film/pengedaran film/import film melebihi 50% dari jam pertunjukannya selama enam bulan berturut-turut, yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan ini di bawah UU Film dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Dalam mempertunjukan film, Cinema XXI juga tunduk pada persyaratan sensor. Film yang dipertunjukkan di bioskop Indonesia harus melewati persyaratan sensor berdasarkan peraturan sensor yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan sensor ini dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda hingga maksimal Rp10 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 454 dan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Proses Persetujuan Perizinan Berbasis Risiko ("**PP No. 5/2021**"), apabila Cinema XXI gagal mendapatkan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, Cinema XXI dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain denda administratif, penutupan sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Selanjutnya, Cinema XXI mungkin diminta untuk mendapatkan persetujuan penilaian dampak kesehatan dan lingkungan di Indonesia, baik sehubungan dengan kegiatan usaha dan/atau peningkatan bioskop, dan untuk mematuhi persyaratan lisensi, aturan, undang-undang dan peraturan sehubungan dengan perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan (K3L) yang mungkin mengharuskan Cinema XXI untuk mengeluarkan tambahan biaya untuk belanja modal, atau kepatuhan dan operasi. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI telah mematuhi peraturan tersebut dan tidak memiliki masalah dalam memperbarui lisensi yang signifikan di masa lalu, dalam hal Cinema XXI tidak dapat mematuhi peraturan tersebut atau memperoleh, memperbarui, atau memperbaiki ketidakpatuhan terhadap izin, lisensi, otorisasi,

sertifikat, atau menyediakan bukti, salinan, atau dokumen asli dari izin, lisensi, otorisasi, atau sertifikat tersebut, jika dan ketika diminta oleh otoritas terkait, hal tersebut dapat mengakibatkan sanksi keuangan atau proses administratif atau hukum terhadap Cinema XXI, termasuk penghentian atau penangguhan kegiatan operasi bioskop yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selanjutnya, intervensi pemerintah dan/atau reformasi regulasi di Indonesia dapat mengakibatkan peraturan baru dan/atau perubahan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang ada, di mana hal tersebut dapat menyebabkan biaya kepatuhan tambahan serta mengalihkan waktu dan perhatian manajemen. Pemerintah sebelumnya telah melarang penanaman modal asing secara langsung di dalam perusahaan operator bioskop, yang mewajibkan perusahaan operator bioskop untuk sahamnya dimiliki 100% oleh orang Indonesia atau badan hukum Indonesia. Meskipun Pemerintah telah menghapus larangan kepemilikan asing tersebut secara penuh pada tahun 2016, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa kepemilikan asing dalam industri bioskop tidak akan dilarang di masa mendatang dan hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham asing diwajibkan untuk mendivestasi saham mereka dalam Perseroan, yang dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Cinema XXI telah menetapkan kebijakan internal untuk menindaklanjuti dan melaporkan perubahan kebijakan, standar, undang-undang, dan peraturan di banyak bidang termasuk undang-undang perlindungan konsumen, perdagangan, energi, keamanan produk, serta persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, Cinema XXI telah mengembangkan jejaring kerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta terkait di Indonesia, sehingga Cinema XXI dapat menyesuaikan kegiatan operasinya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan benar dan tepat. Terlepas dari langkah-langkah tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mematuhi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahwa perubahan dalam peraturan perundang-undangan tidak akan memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha. Jika Cinema XXI tidak mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang lingkungan hidup dan peraturan tempat kerja, Cinema XXI dapat dikenakan risiko hukum atau terlibat dalam proses hukum yang dapat mengganggu kegiatan operasi bioskop dan meningkatkan biaya untuk melakukan kegiatan usaha, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kondisi cuaca yang ektrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

Secara historis, jumlah penonton bioskop juga dipengaruhi oleh periode di mana kondisi cuaca tidak normal, parah atau di luar musim atau peristiwa luar biasa lainnya. Sebagai contoh, kejadian banjir atau gempa bumi di masa lalu yang memengaruhi sebagian wilayah Indonesia telah berdampak pada jumlah penonton karena kondisi atau peristiwa cuaca ekstrem tersebut menyulitkan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke bioskop. Cuaca di luar musim yang berkepanjangan dan terjadi bertepatan dengan rilis film besar dapat berdampak merugikan terhadap jumlah penonton, dan akibatnya penjualan tiket bioskop dan ritel Cinema XXI. Selain itu, jumlah penonton bioskop dapat terkadang dipengaruhi oleh ajang besar seperti sepak bola Piala Dunia.

Litigasi, proses hukum, pemeriksanaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada akhirnya berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

Dari waktu ke waktu, Cinema XXI dapat atau mungkin menjadi pihak dalam berbagai tuntutan, litigasi, proses hukum atau arbitrase, menjadi subyek pemeriksaan instansi yang berwenang, investigasi maupun tindakan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual, pemalsuan, praktik usaha yang tidak sehat, pertanggungjawaban akibat kontaminasi makanan, tuntutan terkait ketenagakerjaan, pelanggaran perjanjian dan sanksi bursa. Sebagai tambahan, dugaan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang terkait hak atas kekayaan intelektual, dapat juga menyebabkan litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang.

Pembelaan atas proses hukum ini dapat menyita waktu dan mengakibatkan timbulnya pengeluaran berkelanjutan yang signifikan dan terpecahnya waktu dan konsentrasi manajemen Perseroan dari kegiatan usaha sehari-hari, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional Cinema XXI. Dikarenakan sifat proses litigasi dan arbitrase yang tidak pasti, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan sukses dalam memenangkan tuntutan atau proses tersebut, atau bahwa penilaian manajemen terhadap materialitas masalah ini, termasuk penyisihan akuntansi yang dibuat terkait hal tersebut, akan konsisten dengan hasil akhir dari tuntutan atau proses hukum tersebut. Cinema XXI juga dapat diwajibkan untuk menarik produk atau instansi yang berwenang dapat meminta Cinema XXI untuk menghentikan sementara distribusi dan penjualan beberapa produknya atau menghentikan kegiatan operasinya.

Meskipun Cinema XXI belum pernah terlibat dalam litigasi, arbitrase, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh pemerintah dan regulator yang memiliki dampak merugikan yang material dalam 10 tahun terakhir, Cinema XXI tidak dapat memastikan bahwa Cinema XXI tidak akan terlibat dalam litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang di masa mendatang. Litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang tersebut dan kemungkinan adanya publikasi merugikan dapat berdampak negatif terhadap reputasi, penjualan dan kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha. Kegagalan Cinema XXI untuk memenangkan atau menyelesaikan setiap litigasi, arbitrase, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi pemerintah atau menilai materialitas suatu tuntutan secara akurat dapat mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban yang, apabila tidak atau hanya sebagian ditutup asuransi, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Cinema XXI.

Bioskop Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan dan terhentinya pasokan listrik ke bioskop sebagai akibat dari gangguan pada infrastruktur seperti pemadaman listrik di kota-kota tempat bioskop berada, dapat mengganggu operasi bioskop. Hasil kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI dapat terpengaruh secara negatif oleh setiap gangguan operasi. Beban utilitas Cinema XXI (termasuk listrik dan air) tercatat sebesar Rp237.671 juta, Rp99.113 juta, Rp102.447 juta dan Rp203.709 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 dan Rp44.645 juta dan Rp51.614 juta, masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2023.

Cinema XXI bergantung pada pihak ketiga untuk semua kebutuhan daya dan memiliki opsi terbatas terkait pemeliharaan cadangan daya seperti genset diesel. Berdasarkan ketentuan pengaturan sewa, pemilik tempat diharuskan untuk menyediakan pasokan listrik yang cukup jika terjadi pemadaman listrik. Namun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat memenuhi kewajiban mereka jika terjadi kontinjensi, atau bahwa pasokan tersebut akan cukup untuk kebutuhan Cinema XXI. Selanjutnya, setiap kenaikan harga solar akan meningkatkan beban usaha Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap marjin bisnis. Karena Cinema XXI mengkonsumsi daya yang signifikan, setiap kenaikan tarif yang tidak terduga atau signifikan dapat meningkatkan biaya pengoperasian bioskop. Jumlah penyedia listrik di Indonesia terbatas dan oleh karena itu, dalam hal terjadi kenaikan tarif harga, Cinema XXI mungkin tidak dapat menemukan pengganti pada biaya yang efektif, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Selanjutnya, untuk bioskop-bioskop tertentu, pihak yang menyewakan/pemberi lisensi memiliki tanggung jawab untuk memasok listrik yang bergantung pada distribusi listrik yang relevan atau papan listrik yang berada di luar kendali Cinema XXI. Oleh karena itu, Cinema XXI mungkin mengalami kehilangan pendapatan jika terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan di bioskop. Pemerintah Indonesia juga dapat membatasi atau melarang penggunaan generator diesel di masa depan untuk mengendalikan tingkat polusi.

Selain itu, biaya energi Cinema XXI meningkat pada tahun 2021 dan 2022, terutama karena kenaikan inflasi dan kenaikan terkait biaya gas dan listrik. Jika biaya energi terus meningkat dan Cinema XXI tidak dapat menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi kenaikan biaya yang berkaitan dengan konsumsi energi, hal tersebut dapat berdampak merugikan secara material terhadap profitabilitas Cinema XXI.

Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan pemasang iklan utama, serta faktor ekternal lainnya yang berada di luar kendali Cinema XXI.

Cinema XXI menghasilkan pendapatan iklan melalui iklan berbasis layar berdasarkan jumlah iklan berbasis layar yang ditayangkan pada saat pemutaran film, iklan *offline* yang ditampilkan di bioskop, dan iklan *online* yang dilakukan melalui situs web dan aplikasi digital berbasis seluler Cinema XXI. Oleh karena itu, total pendapatan iklan yang dihasilkan dari iklan berbasis layar berbanding lurus dengan jumlah film yang diputar di bioskop Cinema XXI. Jumlah pemutaran dan penonton di bioskop Cinema XXI bergantung pada berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali, termasuk jumlah film baru yang dirilis dalam seminggu, jumlah kunjungan ke bioskop Cinema XXI, kinerja film di *box office*, kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang memengaruhi jadwal pemutaran film, dan peraturan daerah tertentu yang membatasi jumlah pemutaran per hari. Selanjutnya, meskipun saat ini tidak ada peraturan yang mengatur jumlah iklan di bioskop sebelum atau selama pemutaran film, tidak terdapat jaminan bahwa hal ini tidak akan berubah di masa mendatang. Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat berdampak langsung pada kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan iklan pada pemutaran film, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungannya dengan pemasang iklan, di mana hal tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan pendapatan iklan.

Lebih lanjut, selama bertahun-tahun, Cinema XXI telah mampu membina hubungan dengan biro iklan utama dan berbagai pemasang iklan dari berbagai sektor seperti *fast moving consumer goods*, perbankan, layanan keuangan, properti, *e-commerce*, otomotif, pendidikan, teknologi, dan klinik kecantikan. Setiap kegagalan untuk terus mempertahankan hubungan tersebut atau untuk membangun dan memanfaatkan hubungan baru dengan mereka, dapat membahayakan bisnis atau mencegah pertumbuhan bisnis Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Cinema XXI tidak menandatangani kontrak jangka panjang terkait pendapatan iklan dengan pelanggan utama dan oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa setelah berakhirnya, kontrak ini akan diperbarui atau diganti dengan persyaratan yang sama, atau lebih menguntungkan daripada, yang yang berlaku saat ini. Setiap penurunan pendapatan iklan, baik karena kegagalan untuk memperbarui atau mengganti perjanjian apapun yang terkait pendapatan iklan dengan persyaratan yang menguntungkan atau sebaliknya, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Persaingan untuk belanja iklan sangat signifikan, dan pemasang iklan mungkin tidak melanjutkan bisnis dengan Cinema XXI jika mereka yakin bahwa platform iklan Cinema XXI tidak efektif atau terlalu mahal. Selanjutnya, pemasang iklan umumnya memiliki anggaran yang telah ditentukan sebelumnya, sebagian besar di antaranya didedikasikan untuk platform tradisional, seperti televisi dan jaringan media online dan seluler. Penurunan anggaran tersebut karena pertimbangan ekonomi, seperti perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, atau pergeseran belanja ke platform iklan baru, seperti internet dan aplikasi seluler, penurunan jumlah penonton film, atau faktor lainnya dapat mengakibatkan belanja iklan di bioskop yang lebih rendah. Jika Cinema XXI tidak dapat mempertahankan daya saing dan memberikan nilai tambahan kepada klien iklan, mereka dapat mengurangi pembelian iklan atau berhenti sama sekali menggunakan layanan iklan Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan dan kemampuan Cinema XXI untuk mendapatkan klien iklan baru. Jika Cinema XXI tidak dapat memperoleh hak iklan atau mempertahankan pendapatan iklan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi mitra serta pihak lainnya.

Cinema XXI berkolaborasi dengan merek-merek global terkenal untuk memperoleh bahan baku pada harga yang menguntungkan serta sosial media dan *performance marketing platform*, *key opinion leaders*, dan *influencers* untuk peluncuran produk. Cinema XXI membina kerjasama dan memasarkan kerja samanya dengan merek makanan dan minuman seperti Coca-cola, Aqua dan Danone, Hershey dan Oat Side. Cinema XXI juga bekerja sama dengan pihak ketiga ini untuk membuat *item* promosi, misalnya, *menu combo*, dan diskon atau penawaran khusus tertentu yang diberikan oleh lembaga perbankan melalui penggunaan kartu atau metode pembayaran mereka. Hubungan ini menimbulkan risiko yang terkait dengan kemungkinan pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi lainnya yang

berbeda dengan Cinema XXI, mengambil atau mengabaikan untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan permintaan Cinema XXI, memiliki kebijakan atau objektif yang berbeda, atau tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Cinema XXI sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, Cinema XXI mungkin terlibat dalam perselisihan atau gugatan dengan mitra tersebut, dan Cinema XXI menghadapi kesulitan untuk memenuhi promosi tertentu, membiayai pengembangan produk tertentu, atau membatasi kemampuannya untuk mendapatkan kembali investasi dan membatasi fleksibilitas keuangan. Selanjutnya, perselisihan dan/atau gugatan tersebut, terlepas dari siapa yang benar dan hasilnya, juga dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen dari operasi bisnis Cinema XXI, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan reputasi Cinema XXI. Jika kerjasama tersebut tidak berhasil, nilai investasi Cinema XXI dalam usaha ini dapat mengalami penurunan nilai atau hilang seluruhnya. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa kerjasama ini akan menguntungkan atau bahwa Cinema XXI akan dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan para mitra, baik karena risiko yang dijelaskan di atas, kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan, kenaikan biaya konstruksi, fluktuasi mata uang, risiko politik, atau faktor lainnya. Terjadinya salah satu dari peristiwa tersebut atau perselisihan dengan mitra, termasuk penggantian mitra atau tambahan waktu dan usaha untuk menemukan mitra baru dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Jika Perseroan gagal memenuhi pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

Perjanjian pembiayaan Perseroan saat ini memuat ketentuan keuangan tertentu yang wajib dipertahankan dan ketentuan pembatasan lainnya, di mana Perseroan dapat diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemberi pinjaman untuk, antara lain mengubah struktur permodalan Perseroan (dengan ketentuan bahwa perubahan struktur permodalan tersebut tidak mengakibatkan kepemilikan bersama keluarga Suherman dan Lasmana (tidak terdapat definisinya dalam perjanjian kredit terkait), baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi di bawah 51%), membuat atau menanggung hak gadai atau klaim atas aset Perseroan, dan terlibat dalam penggabungan atau akuisisi. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh persetujuan tersebut pada waktu yang tepat atau bahkan tidak sama sekali. Dalam hal persetujuan tersebut diberikan, pihak pemberi pinjaman dapat memberlakukan beberapa kondisi tambahan yang dapat membatasi fleksibilitas operasional atau mengakibatkan Perseroan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat dari pemberi pinjaman yang relevan. Ketentuan dalam perjanjian pinjaman Perseroan dapat membatasi kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan, atau persyaratan pembiayaan yang lebih baik di masa depan untuk membiayai modal kerja, belanja modal, akuisisi, membayar kewajiban utang atau tujuan lainnya, membatasi kemampuan Cinema XXI untuk berinvestasi dalam bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis di masa depan, menjadikan Cinema XXI kurang kompetitif dibandingkan sejumlah pesaing yang memiliki tingkat utang lebih rendah dan membatasi kemampuan Cinema XXI untuk bereaksi terhadap perubahan pasar atau kondisi bisnis.

Kemampuan Perseroan untuk membayar utang akan bergantung pada kinerja Cinema XXI di masa depan, yang pada akhirnya akan bergantung pada keberhasilan Cinema XXI dalam melaksanakan strategi dan pada faktor-faktor keuangan, persaingan, peraturan, teknis, dan faktor lain, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas tiket bioskop dan produk F&B serta faktor-faktor lain yang spesifik untuk industri bioskop, di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Pelanggaran atau wanprestasi atas kewajiban Perseroan untuk memenuhi persyaratan dalam perjanjian pembiayaan dapat menyebabkan perjanjian pembiayaan yang relevan menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar, dan memicu ketentuan *cross-default* di bawah perjanjian pembiayaan yang lain. Selain itu, jika Perseoran tidak dapat membayar utang, pemberi pinjaman yang dijamin dapat menyita jaminan yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan kendali atas aset Perseroan.

Perseroan juga mungkin diminta untuk membiayai kembali utangnya di masa depan. Kemampuan Peseroan untuk membiayai kembali utang akan bergantung pada kondisi keuangan Cinema XXI pada saat itu, pembatasan dalam perjanjian yang mengatur utang Perseroan dan faktor-faktor lain, termasuk kondisi pasar dan ekonomi secara umum.

3. Risiko umum

Cinema XXI didirikan di Indonesia dan semua aset dan operasi Cinema XXI berlokasi di Indonesia. Terdapat berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak memberikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Indonesia dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik serta gejolak sosial dan sipil pada beberapa kejadian. Sejak tahun 2000, dari waktu ke waktu, ribuan orang Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, baik untuk mendukung maupun menentang mantan presiden dan Presiden Joko Widodo saat ini, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, tindakan anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi serta kampanye militer pimpinan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Kampanye politik di Indonesia dapat berujung pada gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Protes terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden tahun 2019, dan menegaskan bahwa Presiden petahana Joko Widodo memenangkan perhitungan suara pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasil pemilihan tersebut memicu tuduhan kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat penantang, Prabowo Subianto, kemudian mengadakan unjuk rasa di depan kantor pusat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menuntut diskualifikasi Joko Widodo dari pemilihan presiden. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Selanjutnya, partai oposisi menggugat hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan kecurangan, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak banding atas hasil pemilihan presiden pada tanggal 27 Juni 2019. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa perselisihan atau hasil pemilu di masa depan (termasuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada tahun 2024) tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Kemunculan kembali ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak merugikan secara material pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Setelah itu, pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memberlakukan rancangan undang-undang kitab hukum pidana dan rancangan undang-undang anti-korupsi, yang disambut dengan serangkaian aksi unjuk rasa dan demonstrasi menolak rancangan undang-undang tersebut. Para pengunjuk rasa berargumen bahwa rancangan undang-undang kitab hukum pidana mengandung beberapa ketentuan yang dapat mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang anti-korupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan pertimbangan rancangan undang-undang tersebut memiliki ketentuan yang memberatkan, yang akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Setelah sejumlah kasi unjuk rasa pada tanggal 30 September 2019, kerusuhan terjadi yang mengakibatkan beberapa kantor polisi serta properti publik di Jakarta mengalami kerusakan. Akibat kontroversi yang ditimbulkan dari rancangan undang-undang dan sejumlah aksi unjuk rasa, Pemerintah Indonesia menunda pengesahan undang-undang tersebut dan merevisi rancangan undang-undang tersebut lebih lanjut. Terakhir kali, pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak protes di seluruh negeri untuk menentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"), yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memotong rantai birokrasi dan meningkatkan investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU No. 11/2020 secara umum akan melemahkan UU Ketenagakerjaan yang ada dan perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11/2020 tidak konstitusional secara bersyarat karena dikeluarkan melawan prinsip-prinsip legislasi yang baik dan oleh karena itu mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki kekurangan prosedural tersebut dalam waktu dua tahun

setelah tanggal keputusannya. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") sebagai tanggapan atas keputusan tersebut. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dalam skala yang lebih luas, atau gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Cinema XXI.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diperkirakan di masa lalu. Indonesia juga memiliki banyak partai politik dan koalisi pemerintahan, di mana tidak ada partai politik yang unggul dengan *electoral* majority yang jelas hingga saat ini. Meskipun UU No. 11/2020 telah dicabut dengan UU Cipta Kerja, tidak terdapat jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan di masa depan tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Gangguan sosial dan sipil dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, gejolak sosial, dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan kegiatan vulkanis paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang pasang yang merusak. Sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami dan aktivitas vulkanik. Selain peristiwa geologis tersebut, Indonesia juga pernah terkena bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir bandang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian sejumlah besar orang, dan kerusakan properti yang luas. Baru-baru ini, sepanjang minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan yang tinggi dan terus menerus menyebabkan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan sedikitnya 66 orang dan membuat hampir 400.000 orang terpaksa mengungsi. Pada bulan Januari 2021, terjadi gempa bumi di wilayah Majene di Sulawesi Barat, yang menewaskan 105 orang. Terjadi juga insiden banjir, puting beliung, dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia antara bulan Januari dan April 2021. Terakhir kali, pada November 2022, terjadi gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan jumlah kematian lebih dari 300 orang. Meskipun peristiwa ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Meskipun demikian, bantuan semacam itu mungkin tidak akan terus diberikan, dan bantuan tersebut mungkin tidak disalurkan kepada penerima bantuan tepat pada waktunya. Jika Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan asing kepada masyarakat terdampak secara tepat waktu, maka kerusuhan sosial dan politik dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan besar akan membebani keuangan Pemerintah dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang negaranya. Kegagalan apapun di pihak Pemerintah atau pengumuman moratorium oleh Pemerintah atas utang negara dapat memicu peristiwa wanprestasi di sejumlah pinjaman sektor swasta, yang akan berdampak pada kegiatan operasi Cinema XXI, klien iklan, dan pemasok Cinema XXI, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Peristiwa geologis di masa depan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di salah satu kota-kota terpadat di Indonesia dapat menimbulkan gangguan serius terhadap perekonomian Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti Cinema XXI.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerusuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa serangan teroris di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah asing dan gedung publik dan komersial yang sering dikunjungi warga negara asing, yang telah menewaskan dan melukai sejumlah orang. Sebagai contoh, pada tanggal 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, serangkaian pengeboman terjadi di beberapa gereja dan sebuah kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai sedikitnya 57 orang. Baru-baru ini, pada tanggal 28 Maret 2021, sebuah bom meledak di Katedral Makassar yang melukai lebih dari 20 orang.

Tidak dapat dijamin bahwa tindakan akan terjadi tindakan teroris di masa depan dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa properti Cinema XXI tidak akan menjadi sasaran tindakan terorisme. Aksi teroris tersebut dapat menimbulkan destabilisasi di Indonesia dan mempertajam perpecahan internal dalam Pemerintah sewaktu Pemerintah mempertimbangkan respons terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Aksi kekerasan yang disebabkan dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lalu telah menimbulkan, dan mungkin akan tetap menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap investasi dan keyakinan terhadap perekonomian serta kinerja perekonomian Indonesia, dan pada gilirannya kegiatan usaha Cinema XXI. Terjadinya salah satu kejadian di atas yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Cinema XXI atau pemasok dan klien iklan Cinema XXI, dapat berdampak merugikan dan material terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu sebagian kegiatan usaha Cinema XXI, serta menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Otonomi daerah dan ketidakpastian dalam perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan daerah.

Indonesia adalah sebuah negara besar dan beragam dengan berbagai etnis, bahasa, tradisi dan adat. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat menguasai dan menjalankan kewenangan pengambilan keputusan di hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya nasional di berbagai wilayah. Hal tersebut memicu tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar, khususnya sehubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Sebagai respons terhadap tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar, pada tahun 1999, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004 dan digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja), dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan "aset nasional" dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah iklim hukum bagi perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi wewenang regulasi, pajak dan wewenang tertentu lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah dilarang oleh hukum untuk menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada hierarki yang lebih tinggi,

penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut meliputi kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di tingkat pemerintah daerah tertentu. Terlebih lagi, panduan atau preseden yang tersedia mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan otonomi daerah hanya tersedia dalam jumlah terbatas.

Pembatasan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau saling bertentangan yang mungkin ditetapkan oleh otoritas daerah yang berwenang dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI yang berada di seluruh Indonesia.

Selain itu, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, meskipun Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan melalui implementasi UU Cipta Kerja, masih terdapat ketidakpastian mengenai perimbangan wewenang antara pemerintah daerah dan pusat dan prosedur untuk memperbarui izin dan persetujuan serta memantau kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, beberapa otoritas lokal telah mencoba untuk memberlakukan pajak tambahan atau memperoleh kontribusi lainnya. Tidak terdapat jaminan bahwa perimbangan antara pemerintah daerah dan pusat akan secara efektif tercapai atau bahwa kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI di Indonesia tidak akan terpengaruh secara negatif oleh kewajiban kepatuhan ganda atau ketidakpastian lebih lanjut mengenai kewenangan hukum untuk memungut pajak atau menetapkan peraturan lain yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Biaya keuangan bersih Cinema XXI dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, khususnya depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat serta fluktuasi antara Rupiah dan mata uang lain, seperti Euro atau Dolar Singapura. Meskipun Rupiah mengalami apresiasi yang signifikan dari titik terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, Rupiah masih terus mengalami volatilitas yang signifikan. Secara khusus, Rupiah melemah secara signifikan terhadap Dolar Amerika Serikat selama semester pertama tahun 2020, mengalami depresiasi sebesar 19,8% dari nilai tukar (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) sebesar Rp13.662 = US$ 1 pada tanggal 31 Januari 2020 menjadi Rp16.367 = US$ 1 pada tanggal 31 Maret 2020, sebelum menguat menjadi Rp14.105 = US$ 1 pada tanggal 31 Desember 2020, terutama diakibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Rupiah telah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat pasca-pandemi menjadi Rp15.731 = US$ 1 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp15.062 = US$ 1 pada tanggal 31 Maret 2023. Namun, karena implikasi pandemi COVID-19 yang terus berubah dan tidak menentu, sulit untuk menilai sifat dan sejauh mana dampak pandemi COVID-19 terhadap nilai Rupiah.

Rupiah umumnya dapat dikonversi dan ditransfer secara bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia dilarang transfer Rupiah kepada orang di luar Indonesia dan tidak boleh melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun demikian, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing sesuai dengan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan valuta asingnya untuk membeli Rupiah. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, bahwa kebijakan kurs mengambang yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia tidak akan diubah, bahwa depresiasi lanjutan Rupiah terhadap mata uang lain, termasuk Dolar Amerika Serikat, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih untuk melakukan stabilisasi, mempertahankan atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan-tindakan tersebut akan berhasil jika diterapkan. Modifikasi terhadap kebijakan kurs mengambang saat ini dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga domestik yang signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau valuta asing, atau penahanan bantuan keuangan oleh pemberi pinjaman multinasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan aktivitas perkonomian, resesi ekonomi, wanprestasi pinjaman atau menurunnya minat pelanggan Cinema XXI, dan sebagai akibatnya, Cinema XXI juga mungkin menghadapi kesulitan dalam pendanaan belanja modal dan pelaksanaan strategi bisnis Cinema XXI. Terjadinya salah satu hal di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Baa2" (stabil) dari Moody's, "BBB" (stabil) dari Fitch dan "BBB" (negatif) dari S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan Indonesia, termasuk Cinema XXI, untuk menggalang pembiayaan tambahan, serta tingkat suku bunga dan persyaratan komersial lainnya yang berlaku bagi pembiayaan tambahan yang tersedia, dan mungkin menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat kerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi, telah mengakibatkan dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja ("**UU Serikat Pekerja**"). UU Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat buruh tanpa intervensi pemberi kerja, Pemerintah, partai politik atau pihak lainnya. Pada tanggal 25 Maret 2003, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**") diundangkan yang antara lain mengatur kenaikan nilai pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, pembayaran uang penghargaan dan kompensasi yang harus dibayar kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang memiliki pengaruh substansial terhadap hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang memperkerjakan 50 karyawan atau lebih untuk membentuk forum bipartit yang dihadiri oleh pemberi kerja dan karyawan. UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat kerja untuk memiliki kehadiran lebih dari 50% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan membuat prosedur yang permisif untuk karyawan menggelar pemogokan. Setelah diundangkan, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi agar menyatakan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali ketetentuan tertentu, termasuk ketentuan terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam permogokan buruh ilegal. Akibatnya, Cinema XXI mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah/kota. Upah minimum umumnya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk standar hidup yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan besaran kenaikan upah minimum tahunan, dan pelaksanaannya bervariasi dari daerah ke daerah sehingga kepatuhan menjadi rumit. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta menaikkan upah minimum Jakarta untuk tahun 2022 dari Rp4.416.186 (nilai penuh) menjadi Rp4.641.854 per bulan (nilai penuh), meningkat sebesar 5,1% mulai dari 1 Januari 2022. Pada tahun 2023, upah minimum dinaikan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 menjadi Rp4.901.798 (nilai penuh) per bulan, meningkat sebesar 5,6% dari upah minimum sebelumnya. Selain secara langsung meningkatkan gaji untuk karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung memberikan tekanan pada gaji karyawan tingkat atas untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu. Setiap kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap

kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI. Perubahan dalam pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

UU Cipta Kerja merupakan upaya bersama dari Pemerintah untuk mengubah atau mencabut secara komprehensif banyak undang-undang dan peraturan sektor dengan tujuan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Amendemen tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan meliputi antara lain pemutusan hubungan kerja dan besaran pesangon. UU Cipta Kerja memperkenalkan beberapa perubahan pada UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperkenankan memberhentikan karyawan dengan alasan "efisiensi" ekonomi karena perusahaan menderita kerugian, terlepas apakah inisiatif efisiensi tersebut akan diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak. Hal ini berbeda dari rezim sebelumnya yang mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat atas dasar pemberhentian dengan alasan "efisiensi" karena kerugian. Amendemen lainnya adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon untuk beberapa alasan penghentian. Selain itu terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah pesangon yang wajib dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon hanya sebesar maksimum 19 bulan upah (dibandingkan sebelumnya maksimum 32 bulan upah), yang terdiri dari (i) uang pesangon sebesar 10 bulan upah; dan (ii) uang penghargaan masa kerja sebesar sembilan bulan upah, seluruhnya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga akan menerima pembayaran sebesar maksimum enam bulan upah, yang akan dibayarkan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja, dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia, seperti yang terjadi sebagai respons terhadap UU Cipta Kerja, dapat mengganggu operasi usaha Cinema XXI, pemasok atau klien iklan Cinema XXI dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut, bersama dengan tekanan inflasi umum atau perubahan dalam hukum dan peraturan yang berlaku yang dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mempekerjakan 1.361 karyawan tetap dan memiliki 1.026 pekerja alih daya yang dipekerjakan oleh pemasok atau penyedia jasa pihak ketiga lainnya untuk bekerja di bioskop Cinema XXI atau lokasi lain. Meskipun karyawan Cinema XXI tidak terorganisir secara serikat, penyedia jasa pihak ketiga, pemasok dan klien iklan Cinema XXI mungkin memiliki serikat kerja. Cinema XXI belum pernah mengalami pemogokan atau gangguan tenaga kerja yang material dan saat ini Cinema XXI memiliki hubungan yang baik dengan karyawan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa perselisihan tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa sebagian dari tenaga kerja yang terorganisir apapun tidak akan melakukan aksi. Pemogokan atau perlambatan kegiatan kerja yang dialami oleh penyedia jasa pihak ketiga, pemasok atau klien iklan dapat menimbulkan penurunan permintaan untuk produk atau kekurangan pasokan, sehingga menyebabkan perlambatan kegiatan operasional atau penutupan fasilitas operasional Cinema XXI. Jika Cinema XXI, penyedia jasa pihak ketiga, pemasok atau klien iklan Cinema XXI mengalami mogok kerja atau gangguan lainnya yang diakibatkan oleh aksi karyawan, gangguan tersebut dapat berdampak merugikan secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selain itu, terdapat beberapa kejadian kekurangan tenaga kerja terampil di Indonesia. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kesuksesan Cinema XXI bergantung pada upaya dan bakat karyawan Cinema XXI, termasuk personil di bidang penjualan dan pemasaran, teknologi, manajemen risiko dan keuangan. Dalam hal terjadi kekurangan tenaga kerja di Indonesia, Cinema XXI mungkin menghadapi kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan karyawan atau mungkin menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja.

Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("**UU No. 24/2009**") yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal suatu perjanjian juga melibatkan pihak asing, perjanjian tersebut dapat ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, sepanjang perjanjian dalam bahasa asing dan perjanjian dalam bahasa Indonesia memiliki otoritas yang setara. Pada tanggal 30 September 2019, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 ("**PP No. 63/2019**") diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 24/2009, yang antara lain mengatur bahwa dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan penafsiran antara perjanjian atau nota kesepahaman dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka bahasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut yang berlaku. PP No. 63/2019 juga mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain lembaga swasta Indonesia (termasuk perseroan terbatas). Apabila perjanjian melibatkan pihak asing, maka perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian versi bahasa Indonesia wajib ditandatangani bersamaan dengan perjanjian versi bahasa Inggris, atau perjanjian tersebut wajib ditandatangani dalam dua bahasa.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, bahkan dalam hal perjanjian-perjanjian yang terkait dengan penawaran di luar Indonesia disusun dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 24/2009 dan Peraturan No. 63/2019, mengingat satu atau lebih dari pihak dalam perjanjian tersebut didirikan berdasarkan undang-undang di Indonesia, Cinema XXI tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pengadilan Indonesia akan menyatakan versi bahasa Inggris sebagai versi yang berlaku dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari perjanjian-perjanjian tersebut. Beberapa konsep dalam bahasa Inggris mungkin tidak memiliki padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia dan makna yang tepat dari teks berbahasa Inggris mungkin tidak sepenuhnya tertuang dalam versi bahasa Indonesia.

Investor tidak mungkin dapat melakukan "service of process" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, komisaris, direktur dan pejabat Perseroan.

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan seluruh aset Perseroan berada di Indonesia. Lebih lanjut, semua Komisaris dan Direktur Perseroan tinggal di Indonesia.

Putusan pengadilan di luar Indonesia termasuk putusan yang didasarkan seluruhnya atau sebagian pada hukum pasar modal federal negara lain tidak dapat dilaksanakan di pengadilan Indonesia, walaupun putusan tersebut dapat disampaikan sebagai bukti dalam proses persidangan di pengadilan Indonesia. Pemeriksaan kembali atas kasus wajib dilakukan oleh pengadilan Indonesia untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan membuat putusan yang sama yang semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan perdata di yurisdiksi lain selain Indonesia. Oleh karena itu, pemegang Saham Yang Ditawarkan mungkin harus memasukkan tuntutan terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan mungkin sulit bagi investor untuk melakukan "*service of process*" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) dari luar Indonesia kepada Perseroan, Komisaris atau Direktur Perseroan untuk melakukan eksekusi putusan yang diperoleh di luar Indonesia.

Tuntutan dan remedi yang tersedia di Indonesia mungkin tidak seekstensif tuntutan dan remedi yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan dengan cara yang sama atau sampai tingkat yang sama sebagaimana yang akan dilakukan oleh pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental yang didasarkan pada peraturan tertulis dan putusan kasus hukum bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Pengadministrasian hukum dan peraturan oleh pengadilan dan Pemerintah dapat tergantung pada banyak kebijakan. Sebagai tambahan, karena sengketa sehubungan masalah komersial dan transaksi

keuangan modern yang dibawa ke hadapan pengadilan Indonesia relatif sedikit, pengadilan tersebut mungkin tidak memiliki pengalaman pengadilan di negara lain. Terdapat ketidakpastian berapa lama proses persidangan dapat diselesaikan di pengadilan Indonesia dan hasil persidangan di Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses yang serupa di yurisdiksi lain. Selanjutnya, korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah diberitakan secara luas pada sumber-sumber yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, investor tidak mungkin memperoleh hak hukum mereka dengan cepat dan adil.

Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa.

Perseroan tunduk pada tata kelola perusahaan dan kewajiban pelaporan di Indonesia yang dapat berbeda secara signifikan dalam aspek-aspek tertentu dengan yang berlaku atas perusahaan di yurisdiksi lain, termasuk sehubungan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan tata cara pengaturan di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa dan negara lainnya. Terdapat juga perbedaan tingkat pengaturan dan pengawasan bursa efek, aktivitas investor, perantara pedagang efek dan partisipan lain antara pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat serta perekonomian negara maju. OJK, bersama-sama dengan BEI bertangung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan peraturan lainnya untuk pasar modal di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau SAK, yang berbeda dengan U.S. GAAP dalam hal-hal tertentu. Oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan pendapatan yang dilaporkan dapat berbeda secara signifikan dengan laporan keuangan konsolidasian dan pendapatan yang dilaporkan seandainya disusun berdasarkan U.S. GAAP. Calon investor sebaiknya melakukan konsultasi dengan penasihat profesionalnya masing-masing untuk memahami perbedaan antara SAK dan U.S GAAP, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi informasi yang terdapat dalam Prospektus ini.

4. Risiko bagi investor

Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan publik

Setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, HJB akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan. HJB, melalui perusahaan anaknya baik langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam berbagai kegiatan usaha di Indonesia dan negara lain. Secara khusus, HJB dapat melakukan ekspansi di dalam atau di luar Indonesia dan berpotensi bersaing dengan Cinema XXI di masa depan. Dengan memiliki mayoritas saham Perseroan yang telah diterbitkan dan beredar setelah Penawaran Umum Perdana Saham, HJB dapat mengendalikan dan memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI secara signifikan.

Kepentingan HJB dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lainnya, dan tidak ada jaminan bahwa HJB akan menggunakan hak suara sahamnya dengan cara yang akan menguntungkan pemegang saham minoritas. Pertimbangan bisnis HJB atau pertimbangan lainnya dapat menyebabkan Perseroan untuk mengambil tindakan atau menahan diri untuk bertindak demi keuntungan diri sendiri atau afiliasi HJB lainnya daripada kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham Perseroan lainnya, dan mungkin merugikan kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang Saham lainnya. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham minoritas Perseroan, HJB dapat:

- mengendalikan kebijakan, manajemen, dan urusan Cinema XXI;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;

- menyetujui jumlah dan waktu pembagian dividen dan distribusi lainnya;
- memengaruhi hubungan Cinema XXI dengan mitra bisnisnya; dan
- menentukan hasil dari sebagian besar aksi korporasi, termasuk perubahan pengendalian, penerbitan saham baru, dan memperoleh pendanaan utang tambahan.

Selain itu, beberapa anggotaDireksi Perseroan juga menjadi direktur atau pejabat HJB atau entitas terafiliasinya. Akibatnya, individu-individu ini dapat memiliki kewajiban fidusia terhadap perusahaan lainnya dan pemegang sahamnya yang mungkin bertentangan dengan kewajibannya terhadap Cinema XXI dan dapat mengambil tindakan yang merugikan kegiatan usaha Cinema XXI.

Lebih lanjut, pihak ketiga mungkin tidak tertarik untuk membuat penawaran tender atau mengajukan penawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena konsentrasi kepemilikan saham dalam Perseroan.

Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia berbeda dari peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham di BEI. Saat ini tidak terdapat pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang, atau dalam hal pasar tersebut berkembang, bahwa pasar untuk saham Perseroan akan aktif diperdagangkan. Saham Perseroan tidak akan tercatat pada BEI dalam jangka waktu maksimum dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Selama periode tersebut, pembeli akan menghadapi risiko pergerakan nilai saham Perseroan tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang dibeli tersebut melalui BEI.

Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ditetapkan setelah pelaksanaan proses *book-building* berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek dan mungkin bukan merupakan indikasi harga Saham Yang Ditawarkan yang akan diperdagangkan setelah diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Yang Ditawarkan pada harga yang menarik bagi investor.

Nilai perdagangan di BEI relatif kecil dan pasar perdagangan untuk saham yang tercatat di BEI mungkin lebih tidak likuid dan tidak stabil dibandingkan bursa saham di Amerika Serikat dan negara tertentu lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan pasar sejenis lainnya. Oleh karena itu, Cinema XXI tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Cinema XXI tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan saham Perseroan tidak akan menurun hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Walaupun Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari BEI untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Perseroan di BEI, pencatatan dan perdagangan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk saham Perseroan. Meskipun pada saat ini Perseroan berencana untuk tetap mencatatkan saham di BEI, tidak ada jaminan bahwa pencatatan saham Perseroan akan terus berlanjut. Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat 853 perusahaan yang tercatat pada BEI dengan kapitalisasi pasar agregat dari saham perusahaan tercatat adalah sekitar Rp9.488.182 miliar. Hal ini dapat mengakibatkan harga pasar untuk saham yang tercatat di BEI lebih berfluktuasi dari saham yang dicatatkan pada bursa efek global yang lebih besar.

Bursa saham di Indonesia di masa lalu pernah mengalami gangguan yang, jika berlanjut atau terjadi lagi, dapat memengaruhi harga pasar dan likuiditas saham yang tercatat di BEI. Gangguan ini meliputi penutupan bursa, kegagalan dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan serangan teroris. Badan pengatur bursa saham di Indonesia dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan untuk perdagangan saham tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin. Selain itu, BEI saat ini melarang *short selling*. Tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal di Indonesia dan aktivitas investor, broker, dan peserta pasar lainnya tidak sama dengan beberapa negara lain. Kemampuan untuk menjual dan

menyelesaikan transaksi di BEI mungkin akan mengalami penundaan. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan mungkin tidak dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga atau waktu yang mungkin tersedia di pasar yang lebih likuid atau lebih stabil. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa informasi tentang perusahaan Indonesia tersedia lebih sedikit daripada informasi yang biasanya disediakan oleh perusahaan publik yang terdaftar di pasar lain. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi signifikan.

Pergerakan bursa efek internasional dan domestik, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham Perseroan. Saham Perseroan dan dividen, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain nilai dari penjualan saham dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing yang akan diterima pemegang saham. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakukannya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat, tergantung pada berbagai faktor di mana beberapa di antaranya di luar kendali Cinema XXI, termasuk:

- persepsi atas prospek kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI dan industri bioskop secara umum;
- keterlibatan dalam perkara hukum yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI;
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian;
- pengumuman tentang aliansi strategis atau ventura bersama oleh Cinema XXI;
- akuisisi yang dilakukan Cinema XXI atau pesaing Cinema XXI;
- pengumuman yang dibuat oleh Cinema XXI atau pesaing Cinema XXI;
- perubahan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Cinema XXI atau kompetitor;
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Cinema XXI dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para investor dan analis terhadap Cinema XXI atau linkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- kapitalisasi pasar tidak mencerminkan indikasi valuasi bisnis Cinema XXI;
- peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan atas saham tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan ketentuan marjin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi saham Perseroan, termasuk likuiditas saham Perseroan dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran Umum Perdana Saham;

- aktivitas perdagangan "*short squeeze*" baik yang terjadi maupun disangkalkan;
- perubahan harga saham perusahaan di pasar asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang;
- perubahan dalam kondisi perekonomian, politik atau pasar di Indonesia secara umum dan perubahan yang umumnya memengaruhi industri bioskop di Indonesia; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang tinggi.

Kenaikan harga saham baru-baru ini, perbedaan dalam rasio valuasi relatif terhadap yang terlihat di pasar tradisional, minat melakukan *short* atau *short squeeze* yang tinggi, dan minat investor ritel yang kuat dan tidak lazim di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak berkorelasi langsung dengan kinerja operasional Cinema XXI. Pada beberapa kondisi tertentu, harga saham Perseroan mungkin atau diduga terpengaruh aktivitas "*short squeeze.*" "*Short squeeze*" adalah kondisi pasar yang secara teknis terjadi ketika harga saham meningkat secara substansial, yang memaksa pelaku pasar yang telah mengambil posisi bahwa harga saham akan turun (yaitu yang telah menjual saham dengan posisi "*short*") untuk membelinya, di mana hal tersebut pada gilirannya akan menciptakan permintaan saham jangka pendek yang signifikan bukan karena alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham tersebut untuk mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi "*short squeeze*" di pasar untuk suatu saham dapat menyebabkan kondisi jangka pendek yang melibatkan volatilitas dan perdagangan yang sangat tinggi dan mungkin, atau mungkin tidak sesuai, dengan model valuasi fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran.

Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.

Urusan korporasi Perseroan diatur oleh anggaran dasar Perseroan, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal terkait independensi Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari hak dan tanggung jawab yang berlaku atas perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan kewajiban yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya, pemegang saham minoritas di bawah hukum Indonesia mungkin tidak mampu melindungi kepentingannya sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep terkait kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tuntutan derivatif yang diajukan sehubungan dengan kegiatan direktur dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru didefinisikan pada tahun 1995, dan belum terbukti pada praktiknya. Bahkan apabila perilaku tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, ketiadaan preseden hukum dapat membuat penuntutan perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihan pemegang saham minoritas akan setara atau seluas hak-hak hukum atau hak pemulihan yang tersedia dalam yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya di masa depan akan memengaruhi nilai saham dan dividen dalam ekuivalen valuta asing.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lain akan memengaruhi harga saham Perseroan dalam ekuivalen valuta asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah yang akan diterima pemegang saham Perseroan dalam valuta asing ketika mengkonversi dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam mata uang Rupiah oleh Perseroan atas sahamnya, serta jumlah yang diterima dalam Rupiah dari penjualan saham Perseroan di pasar sekunder.

Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah signifikan di pasar publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar Saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menggalang pendanaan melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas atau ekuitas lainnya. Meskipun pemegang saham utama Perseroan tunduk pada moratorium, setiap penerbitan atau penjualan dalam jumlah besar atau persepsi akan dilakukannya penerbitan atau penjualan saham Perseroan yang substantif dalam jangka waktu singkat setelah berakhirnya periode moratorium (jika ada) oleh pemegang saham utama Perseroan dapat menyebabkan jatuhnya harga saham Perseroan. Selain informasi yang diungkapkan dalam Prospektus ini, tidak terdapat larangan atas kemampuan pemegang saham utama untuk menjual saham Perseroan baik di BEI atau sebaliknya.

Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan untuk perusahaan tercatat dapat merugikan hasil operasi Cinema XXI dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

Setelah diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tercatat dan sebagai hasilnya, dapat menanggung secara signifikan biaya legal, akuntansi dan biaya lainnya sebagai perusahaan publik yang tidak ditanggung sebelumnya sebagai perusahaan tertutup. Hal ini dikarenakan Perseroan akan tunduk pada pengawasan dan kewajiban pelaporan regulasi yang signifikan di bawah peraturan BEI dan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta pengawasan secara terus menerus dari analis dan investor saham. Peraturan dan ketentuan BEI dan OJK mewajibkan Perseroan untuk, antara lain memiliki pengendalian dan prosedur pengungkapan yang efektif serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang rutin dan informasi material lainnya kepada OJK, BEI dan investor. Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui sistem IT Perseroan, yang digunakan untuk menyiapkan informasi manajemen tertentu, rasio dan analisis yang mana ada kalanya tidak sepenuhnya (i) dapat direkonsoliasi dengan catatan akuntansi dan sistem Perseroan untuk keperluan pelaporan; (ii) konsisten dan dapat direkonsiliasi dengan informasi dalam catatan akuntansi dan sistem Perseroan untuk keperluan pelaporan. Perseroan juga wajib mematuhi persyaratan pencatatan dan menerapkan manajemen risiko dan praktik terkait, yang akan mengakibatkan Perseroan wajib menanggung biaya jasa profesional dan biaya internal tambahan yang substansial untuk mengembangkan fungsi akuntansi dan keuangan, dan Perseroan juga perlu mengerahkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga akan perlu mempekerjakan karyawan dengan tingkat pengetahuan, pengalaman dan pelatihan akuntansi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan, serta pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi. Kepatuhan dengan peraturan dan regulasi tersebut akan meningkatkan biaya kepatuhan hukum dan keuangan, membuat beberapa aksi korporasi lebih memakan waktu dan mahal, dan menimbulkan biaya tambahan sehubungan dengan kewajiban pelaporan sebagai perusahaan publik. Perseroan juga mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan individu dengan kualifikasi yang sesuai untuk menjabat sebagai Direktur atau pejabat eksekutif Perseroan. Saat ini, Perseroan sedang mengevaluasi dan memantau perkembangan peraturan dan regulasi dan Perseroan tidak dapat memprediksi atau mengestimasi dengan pasti jumlah biaya tambahan yang mungkin ditanggung atau kapan biaya tersebut akan dikeluarkan.

Perseroan sebelumnya tidak wajib memenuhi jenis kewajiban ini, dan hal ini dapat menimbulkan tekanan yang signifikan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan lebih lanjut terkait penerapan pengendalian pengungkapan dan internal yang efektif. Jika Perseroan gagal mematuhi ketentuan hukum tersebut, atau apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, serta sebaliknya gagal menerapkan manajemen risiko yang relevan dan prakik terkait lainnya, Perseroan dapat menanggung biaya tambahan, kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasi Cinema XXI mungkin terkena dampak negatif, dan Perseroan mungkin tidak sanggup memenuhi kewajiban pelaporannya. Pengungkapan dan pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaaan pemegang saham dan investor potensial atas informasi keuangan Cinema XXI yang dilaporkan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang tidak akurat dapat mengambil keputusan investasi yang tidak tepat dan Perseroan mungkin menghadapai sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK atau otoritas berwenang lainnya.

Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.

Sejauh mana Perseroan menawarkan hak kepada pemegang saham untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham, pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut untuk mendapatkan saham atau berpartisipasi dalam penerbitan kecuali persyaratan undang-undang pasar modal di yurisdiksi pemegang saham tersebut dipenuhi.

Dalam hal Perseroan melakukan penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("**PMHMETD**") atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk mematuhinya dengan melakukan pendaftaran atau persyaratan pencatatan di yurisdiksi lain di luar Indonesia, dan apabila tidak tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang saham di yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam PMHMETD atau penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Secara khusus, apabila Perseroan tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran dan pengecualian dari ketentuan pendaftaran berdasarkan U.S. Securities Act tidak tersedia, maka pemegang saham Perseroan dari Amerika Serikat tidak akan dapat berpartisipasi dalam PMHMETD dan penawaran saham serupa dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa pembeli saham Perseroan akan mampu mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Mengingat PMHMETD di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham asing Perseroan menderita kerugian ekonomi yang material.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham apabila Perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas di masa depan di mana dana akan diperoleh dari penerbitan saham baru Perseroan atau efek bersifat ekuitas selain pada basis pro rata kepada pemegang saham eksisting. Selain itu, saham atau efek bersifat ekuitas baru yang diterbitkan Perseroan dapat memiliki hak, preferensi atau hak istimewa yang lebih tinggi dari saham Perseroan milik pemegang saham eksisting. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik tercatat wajib menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam hal terjadi "kesulitan keuangan" sebagaimana didefinisikan dalam peraturan tersebut, penerbitan HMETD kepada pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga mungkin menerbitkan saham baru tanpa menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam RUPS yang wajib diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan pencatatan yang berlaku di BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan terkait dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS, menurut hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada satu Hari Kerja sebelum ("***Recording Date***") pengumuman undangan RUPS, tanpa memperhatikan apakah pemegang saham tersebut telah melepaskan saham mereka setelah *Recording Date*. Selain itu, investor yang mungkin telah memperoleh saham mereka setelah *Recording Date* (dan sebelum hari RUPS) tidak berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS tersebut. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak terkait RUPS Perseroan yang berbeda dari yang biasanya mereka temukan di yurisdiksi lain.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen.

Menurut hukum di Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun harus disetujui oleh pemegang saham pada RUPS Perseroan tahunan atas rekomendasi dari Direksi. Jumlah dividen yang akan dibayarkan di masa depan, jika ada, akan tergantung pada laba ditahan di masa depan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan strategi bisnis Cinema XXI. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan menghasilkan laba di tahun mendatang atau dapat membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan mengumumkan dividen. Perjanjian pembiayaan yang mungkin dibuat oleh Perseroan dapat lebih lanjut membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen. Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghabiskan kas yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak dapat menghasilkan laba yang memadai atau jika Perseroan memutuskan bahwa hal tersebut diperlukan, Perseroan mungkin tidak membayar dividen di masa depan. Sebagai akibatnya, apresiasi investasi, jika ada, dari saham Perseroan mungkin menjadi satu-satunya sumber keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

Informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia mungkin tersedia lebih sedikit dibandingkan pasar modal di yurisdiksi lain.

Tingkat pengaturan dan pemantauan pasar modal dan aktivitas pembeli, pialang, dan pelaku lainnya di Indonesia mungkin berbeda dengan yurisdiksi lain. OJK dan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan regulasi lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang ketentuan pengungkapan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lainnya. Meskipun demikian, informasi yang secara berkala tersedia bagi publik tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan publik di negara yang lebih maju. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses ke pengungkapan pada tingkat dan jenis yang setara dan mungkin disediakan oleh emiten tercatat di negara lain dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lain mungkin tidak dapat dilakukan dalam segala aspek.

Nilai aset bersih per saham atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor dapat langsung mengalami dilusi yang substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersih per saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham lama Perseroan hingga 31 Maret 2023. Oleh karena itu, pembeli Saham Yang Ditawarkan akan langsung mengalami dilusi dalam jumlah yang substansial dan pemegang saham Perseroan yang sekarang akan mengalami kenaikan secara material dalam nilai aset bersih per saham atas saham yang dimilikinya.

Cinema XXI beroperasi dalam sistem hukum yang pelaksanaan atas undang-undang dan peraturannya mungkin tidak pasti dan dengan membeli Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham menjadi terekspos kepada sistem hukum tersebut dan mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan.

Karena Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, rezim hukum dan peraturannya mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan pasar yang sudah maju dan mungkin dapat terjadi perubahan yang tidak terduga. Terdapat kemungkinan bahwa interpretasi dan pelaksanaan hukum dan peraturan tidak jelas dan isi dari hukum dan peraturan yang berlaku tidak segera tersedia bagi publik. Dalam keadaan demikian, konsultasi dengan pihak berwenang yang relevan di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atau klarifikasi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum sipil berdasarkan peraturan tertulis; putusan pengadilan dan administratif tidak dianggap sebagai preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Kitab undang-undang hukum dagang dan hukum perdata Indonesia dalam sejarahnya didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan sebagian dari peraturan-peraturan ini belum direvisi untuk merelefksikan komplesitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Sebagian besar penerapan hukum Indonesia bergantung pada kriteria yang subyektif misalnya niat baik para pihak dalam transaksi dan prinsip kepentingan publik, sehingga, karena tidak adanya sistem preseden yang mengikat, efek praktisnya sulit atau tidak mungkin diprediksi.

Hakim di Indonesia menganut sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kewenangan yang besar dalam hal menemukan fakta hukum dan diskresi yang tinggi dalam menentukan penggunaan kewenangannya tersebut. Sebagai hasilnya, administrasi dan eksekusi hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan institusi pemerintahan Indonesia dapat tergantung pada diskresi, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan. Selanjutnya, korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah secara luas diberitakan pada sumber-sumber yang dapat diakses oleh publik.

Sistem hukum Indonesia sehubungan dengan hak pemegang saham atau implementasi praktisnya oleh pengadilan Indonesia berbeda dengan yang diaplikasikan di yuridiksi lain seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa. Tidak terdapatnya sistem preseden yang mengikat, hak-hak pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sejelas yang terdapat di sebagian besar yusrisdikasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tambahan lagi, berdasarkan hukum Indonesia, perusahaan mempunyai hak dan dapat membela diri terhadap tindakan yang diajukan oleh pemegang saham, yang mana tidak dimiliki oleh perusahaan di yuridikasi lain misalnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Cinema XXI mungkin merupakan "Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasif" - "Passive Foreign Investment Company" atau PFIC berdasarkan peraturan pajak penghasilan Amerika Serikat yang berlaku.

Suatu korporasi yang bukan merupakan korporasi Amerika Serikat secara umum adalah PFIC sehubungan dengan keperluan pajak penghasilan untuk setiap tahun pajak apabila (i) paling sedikit 75% pendapatan kotornya pada tahun tersebut merupakan pendapatan pasif atau (ii) paling sedikit 50% asetnya pada tahun tersebut menghasilkan pendapatan pasif atau dimiliki dengan tujuan menghasilkan pendapatan pasif. Penentuan apakah Cinema XXI merupakan PFIC adalah berdasarkan fakta dan ditentukan setiap tahun dengan menggunakan prinsip dan metode yang dalam keadaan tertentu tidak jelas dan dapat dipengaruhi berbagai interpretasi. Dengan demikian, tidak dapat ditentukan sekarang secara pasti apakah Cinema XXI akan dianggap atau menjadi PFIV sehubungan dengan tahun pajak berjalan atau tahun pajak yang akan datang karena status PFIC adalah penetapan faktual yang ditentukan mendekati ditutupnya setiap tahun pajak. Sebagai contoh, perubahan dalam sifat pendapatan atau aset Cinema XXI atau dalam cara dan tingkat pemanfaatan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengakibatkan Cinema XXI dianggap sebagai PFIC pada tahun pajak berjalan atau tahun pajak pada kemudian hari. Apabila Cinema XXI dianggap sebagai PFIC, investor Amerika Serikat dapat dikenakan kewajiban pajak yang lebih tinggi berdasarkan hukum dan peraturan pajak federal Amerika Serikat dan akan memiliki tambahan kewajiban pelaporan.

Investor mungkin diharuskan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya force majeure atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI.

Peraturan di Indonesia hanya memperbolehkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam kondisi terbatas. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya *force majeure* atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI terjadi sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan saham Perseroan, OJK mungkin dapat mewajibkan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi tersebut, investor yang telah menerima penjatahan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin harus melanjutkan dan menyelesaikan pemesanan Saham Yang Ditawarkan walaupun kejadian-kejadian tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau menyebabkan harga perdagangan saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi jauh lebih rendah daripada Harga Penawaran.

Perseroan telah memuat pernyataan-pernyataan prospektif dalam Prospektus ini yang rentan terhadap risiko dan ketidakpastian.

Terdapat berbagai pernyataan dalam Prospektus ini, termasuk pernyataan yang menyatakan pandangan, harapan, atau niat, serta pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan fakta historis, yang mungkin dianggap sebagai pernyataan tentang masa depan. Pernyataan-pernyataan prospektif ini dapat mencakup proyeksi dan perkiraan mengenai perkembangan bisnis secara umum, performa ekonomi, pendapatan dan arus kas, dan posisi keuangan Cinema XXI di masa depan termasuk kemampuan Cinema XXI untuk membiayai proyek-proyek baru.

Pernyataan-pernyataan prospektif umumnya disertai oleh kata-kata seperti, "perkiraan," "proyeksi," "prediksi," "percaya," "ekspektasi," "antisipasi," "potensial," "rencana," "tujuan," ”akan," atau kata-kata lain yang menyatakan ketidakpastian peristiwa atau hasil kinerja Cinema XXI di masa depan. Perseroan telah membuat pernyataan-pernyataan prospektif ini berdasarkan asumsi dan perkiraan yang beragam mengenai strategi bisnis Cinema XXI sekarang dan di masa depan termasuk rencana ekspansi dan peristiwa di masa depan. Meskipun manajemen Perseroan menganggap ekspektasi dan asumsi ini sebagai wajar, namun pernyataan-pernyataan ini secara tidak terlepas dari ketidakpastian bisnis, ekonomi, operasional, regulasi dan faktor penting lainnya yang banyak di antaranya sulit untuk diprediksi dan berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor-faktor tersebut dan faktor penting lainnya dapat menyebabkan kinerja, performa, atau pencapaian Cinema XXI yang sebenarnya berbeda secara material dari hasil operasi masa depan, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan-pernyataan prospektif ini.

Semua pernyataan-pernyataan prospektif hanya merupakan perkiraan kinerja Cinema XXI di masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa kinerja Cinema XXI yang sebenarnya tidak akan berbeda secara material dari ekspektasi Cinema XXI. Oleh karena itu, investor diperingatkan untuk tidak bergantung terhadap pernyataan-pernyataan tersebut.

Penjamin Emisi Efek tidak melakukan penjatahan lebih atau stabilisasi harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan

Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan penjatahan lebih atau mengambil tindakan apapun untuk melakukan stabilisasi atau menjaga harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan. Hal ini biasanya dilakukan di bursa efek lain dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya perdagangan saham di bursa yang relevan. Oleh karena itu, harga pasar atas Saham Yang Dtiawarkan akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan apabila Penjamin Emisi Efek diperbolehkan mengambil tindakan tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI CINEMA XXI.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Cinema XXI menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 4 April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 beserta laporan auditor independen, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Cinema XXI, selain hal di bawah ini:

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, yang telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23-1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023. Pengungkapan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dilakukan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Pembahasan mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Perkembangan terkini."

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th'88 tanggal 16 September 1988, yang telah di daftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 16 September 1988, dan Tambahan No. 4956/1992 ("**Akta Pendirian**").

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120**	**120.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Subentra	90	90.000.000	75,00
Harris Lasmana	30	30.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**120**	**120.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Pada tahun 1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya berdasarkan Akta No. 35 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. C-12985.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Juli 1999 yang telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 199 tanggal 3 November 1999.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sejahtera Raya No. 16 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 ("**Akta Perseroan No. 16/2023**"). Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

(i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO);

(ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;

(iii) Perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk;

(iv) Penyesuaian anggaran dasar Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

(v) Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel, (a) sejumlah sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp8 (delapan Rupiah), yang ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan; (b) termasuk pengalokasian saham baru sejumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada karyawan melalui program ESA dengan syarat dan ketentuan lebih lanjut atas ESA yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023, jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA ditetapkan sebesar-besarnya 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham.

(vi) (a) penjualan saham milik HJB sebanyak-banyaknya 6.676.000.000 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 8,0% (delapan koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (b) penjualan saham milik APN sebanyak-banyaknya 1.669.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta) yang mewakili sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham melalui penawaran terbatas (*private placement*) kepada investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; dan (v) real estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) aktivitas pemutaran film; (ii) aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) restoran; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iii) penyewaan venue, penyelenggaraan aktifitas mice dan event khusus.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran.

Perseroan berkantor pusat di Jl. KH Wahid Hasyim No. 96-A, Jakarta 10340, Indonesia.

2. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama empat tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2019, 2020 dan 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 31 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0012106.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0142536 tanggal 5 Juni 2017 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071639.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 ("**Akta Perseroan No. 39/2017**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 39/2017, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp75.000.000.000 menjadi Rp75.010.000.000 dengan menerbitkan 100.000 saham baru masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per saham untuk diambil bagian seluruhnya oleh Salween Investment Private Limited.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 39/2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	600.000.000	60.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	150.000.000	15.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	100.000	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.100.000**	**75.010.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.249.900.000**	**224.990.000.000**	

Tahun 2022

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0064831.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289525 tanggal 9 September 2022 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179034.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 ("**Akta Perseroan No. 13/2022**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

(i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 menjadi Rp8;

(ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp300.000.000.000 menjadi Rp680.000.000.000 yang terdiri atas 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar) saham; dan

(iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp75.010.000.000 menjadi Rp600.080.000.000 dengan menerbitkan 65.633.750.000 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru atau dengan nilai seluruhnya Rp525.070.000.000 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh puluh juta Rupiah), yang masing-masing diambil bagian oleh (a) HJB sebesar 52.500.000.000 (lima puluh dua miliar lima ratus juta) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp420.000.000.000 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah); (b) APN sebesar 13.125.000.000 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah); dan (c) Salween Investment Private Limited sebesar 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah), seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan tahun buku 2021.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**85.000.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.010.000.000**	**600.080.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.990.000.000**	**79.920.000.000**	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan No. 13/2022 merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir.

3. Dokumen perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dan Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan pokok sebagai berikut:

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha ("**NIB**")	No. 9120308372951 tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 8 Mei 2023, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") melalui Sistem Online Single Submission ("**OSS**").	NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("**TDPSE**")	No. 001217.01/DJAI.PSE/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
3.	Surat Izin Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Izin: 91203083729510226, tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan BKPM melalui Sistem OSS.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
SSD			
4.	NIB	No. 9120407772191 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 12 Maret 2022, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah), dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama SSD menjalankan kegiatan usahanya.
IMD			
5.	NIB	No. 9120407782497 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Maret 2022, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah), dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama IMD menjalankan kegiatan usahanya.
KIR			
6.	NIB	No. 9120408702892 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 19 Oktober 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama KIR menjalankan kegiatan usahanya.
LMS			
7.	NIB	No. 9120408732096 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Februari 2023, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama LMS menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
LAS			
8.	NIB	No. 9120501860283 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 16 Maret 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama LAS menjalankan kegiatan usahanya.
KMA			
9.	NIB	No. 9120112242473 tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 14 Maret 2022, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama KMA menjalankan kegiatan usahanya.
GAP			
10.	NIB	No. 0220104181306 tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana diubah terakhir kali pada 14 Desember 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama GAP menjalankan kegiatan usahanya.
PMS			
11.	NIB	No. 9120100783302 tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 19 Oktober 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama PMS menjalankan kegiatan usahanya.
PMD			
12.	NIB	No. 9120103783803 tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Maret 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama PMD menjalankan kegiatan usahanya.
SUM			
13.	NIB	No. 0220105271849 tanggal 14 Februari 2020, sebagaimana diubah pada 2 Mei 2023, mencakup kode KBLI 68111 (Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama SUM menjalankan kegiatan usahanya.
NES			
14.	NIB	No. 9120215040473 tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 13 Juli 2022, mencakup kode KBLI 73100 (Periklanan - Risiko Rendah), KBLI 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer - Risiko Rendah), KBLI 79990 (Jasa Reservasi Lainnya YBDI-YTDL - Risiko Rendah), KBLI 62029 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya - Risiko Menengah Tinggi), dan KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - Risiko Tinggi), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama NES menjalankan kegiatan usahanya.
15.	TDPSE	No. 91202150404730001 tanggal 13 Juli 2022, yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika	TDPSE berlaku selama NES menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
16.	SIUP MSE	No. 91202150404730001 tanggal 22 Agustus 2022 yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika	SIUP MSE berlaku selama NES menjalankan kegiatan usahanya.

4. Perjanjian-perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

4.1. Perjanjian penting dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi

a. Perjanjian pemasokan

- Perseroan dan Delta Sejahtera menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sejahtera menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sejahtera juga memiliki kewajiban untuk antara lain, (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sejahtera; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Perseroan yang berisi informasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap (*fixed fee*) dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur pesanan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun, kecuali diakhiri lebih dahulu atau tidak diperpanjang oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Perseroan atau Delta Sejahtera sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain tersebut atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Delta Sejahtera karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Perseroan. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perseroan atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera

dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain tersebut atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- GAP dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada GAP. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. GAP atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang melakukan lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh dari pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) GAP karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- PMS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada PMS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada PMS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. PMS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) PMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- KMA dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada KMA. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada KMA. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. KMA atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) KMA karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- PMD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada PMD. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada PMD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. PMD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) PMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- SSD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada SSD. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban

untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugisemua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada SSD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. SSD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) SSD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- IMD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada IMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua atas kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada IMD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. IMD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain, atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) telah melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) IMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- KIR dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada KIR. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada KIR. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan

lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. KIR atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) KIR karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- LMS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada LMS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada LMS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. LMS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- LAS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada LAS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada LAS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh masing-masing pihak. LAS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum

kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LAS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

b. Perjanjian pinjam pakai ruang kantor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Pinjam Pakai (i) antara Perseroan dengan Perusahaan Anak; dan (ii) antara Perusahaan Anak dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m2 pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha KIR. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m2 pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha LMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m2 pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m2 pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha PMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

- LAS dan PT Teladan Indonesia ("**PT TI**") menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PT TI sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 50m2 pada gedung A yang terletak di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha LAS. Perjanjian ini tidak mengatur biaya pinjam pakai yang harus dibayar. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan

untuk kegiatan kantor LAS; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, meliputi air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT TI karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- SUM dan PT TI menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PT TI sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m2 pada gedung A yang terletak di Kelurahan Kebon Sirih , Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha SUM. Perjanjian ini tidak mengatur biaya pinjam pakai yang harus dibayar. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan untuk kegiatan kantor SUM; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, meliputi air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT TI karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

c. Perjanjian sewa menyewa

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Januari 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 28 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop Perseroan untuk *video game/ arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop Perseroan. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game*/*arcade game* di bioskop Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir secara otomatis apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara Perseroan dengan pemilik gedung.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewa gudang yang dimiliki oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa atas gudang yang disewa kepada Megatech setelah menerima tagihan dari Megatech dan membayar biaya *service charge* dan *sinking fund* secara langsung kepada pengelola gedung. Megatech juga diwajibkan untuk, antara lain, memberikan *invoice* pembayaran atas gudang yang disewa oleh Perseroan beserta bukti pembayaran setelah Perseroan memenuhi pembayaran sewa. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp59.345.000 per bulan (belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2027. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan antara lain (i) diakhiri oleh Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Megatech tiga bulan sebelum pengakhiran,apabila Perseroan ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum masa sewa berakhir; atau (ii) diakhiri oleh Megatech dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggarannya dalam waktu 30 hari sejak adanya pelanggaran tersebut.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Megatech sepakat untuk menyewakan ruangan kantor yang beralamat pada Gedung Tamansari Parama, Jl. KH Wahid Hasyim No.84-86-88, Jakarta Pusat

untuk kegiatan usaha Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa ruangan kantor kepada Megatech setelah diterimanya *invoice* dari Megatech dan membayar biaya *service charge* dan *sinking fund* kepada pengelola gedung. Megatech berkewajiban untuk antara lain (i) memberikan tagihan pembayaran ruangan kantor yang disewa oleh Perseroan beserta bukti pembayaran setelah Perseroan memenuhi pembayaran sewa; dan (ii) mengasuransikan ruangan kantor yang disewa. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp3 miliar per tahun (belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan antara lain (i) diakhiri oleh Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Megatech tiga bulan sebelum pengakhiran,apabila Perseroan ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum masa sewa berakhir; atau (ii) diakhiri oleh Megatech dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggarannya dalam waktu 30 hari sejak adanya pelanggaran tersebut.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- IMD dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, IMD sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop IMD untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop IMD (sudah termasuk *service charge*, listrik dan air) setelah diterimanya *invoice* dari IMD. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop IMD. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara IMD dengan pemilik gedung.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) IMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- LAS dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, LAS sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop LAS untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop LAS (sudah termasuk *service charge*, listik dan air) setelah diterimanya invoice dari LAS. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop LAS. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara LAS dengan pemilik gedung.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LAS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- LMS dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, LMS sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop LMS untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop LMS (sudah termasuk *service charge*, listik dan air) setelah diterimanya invoice dari LMS. Pembayaran sewa sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop LMS. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara LMS dengan pemilik gedung.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Harris Lasmana menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis Toyota Vellfire 2.5G AT tahun 2017 dari Harris Lasmana. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. Harris Lasmana memiliki kewajiban, antara lain: (i) memberikan tanda terima kuitansi atas pembayaran sewa yang telah diterima dari Perseroan; dan (ii) mengasuransikan mobil yang disewakan dalam perjanjian setiap tahunnya dengan asuransi berjenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp600 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Harris Lasmana karena merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Perseroan dan PT Bioskop Metropole ("**BMP**") menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2011, sebagaimana diubah terakhir tanggal 29 Januari 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa gedung dari BMP untuk digunakan sebagai bioskop. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain memenuhi pembayaran uang sewa secara tepat waktu dan menanggung semua tagihan rekening air, listrik dan telepon dan segala macam pajak termasuk pajak perusahaan milik Perseroan. BMP berhak untuk, antara lain, memberikan surat tercatat setelah tiga kali peringatan atas kelalaian Perseroan dalam membayar pembayaran sewa gedung bioskop. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Januari 2043. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadinya kondisi-kondisi, antara lain (i) setelah waktu dua tahun sejak perjanjian ini mulai, Perseroan atau BMP dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (ii) Perseroan masih belum membayar uang sewa perjanjian yang telah disepakati kepada BMP dalam waktu lima bulan setelah tanggal pembayaran uang sewa.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BMP karena dikendalikan oleh pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan PT Bumtraco Agung ("**BAU**") menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis X-Trail 2.0 AT tahun 2015 dari BAU. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. BAU memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi atas pembayaran sewa yang telah diterima dari Perseroan; dan (ii) mengasuransikan mobil yang disewakan dalam perjanjian ini setiap tahunnya dengan asuransi berjenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp120 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BAU karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan PT Citrabersama Mututama ("**CMT**") menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Desember 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa ruangan kantor yang beralamat pada Gedung Tamansari Parama, Jl. KH Wahid Hasyim No.84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha dari Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa ruangan kantor kepada CMT setelah diterimanya tagihan dari CMT dan menanggung pajak bumi bangunan sesuai dengan luas ruangan yang disewa. CMT memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi untuk pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perseroan; dan (ii) mengasuransikan ruang kantor yang disewa dalam perjanjian ini. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp250 juta per bulan dan Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan sebesar Rp75.000/m2 per bulan (keduanya tidak termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan CMT karena dikendalikan oleh pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan CMT menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis BMW 740 Li tahun 2015, Toyota Alphard 2.5 G/AT tahun 2015 dan Range Rover 5.0 V8 tahun 2014 dari CMT. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. CMT memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi untuk pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perseroan; dan (ii) mengasuransikan kendaraan mobil yang disewa dalam perjanjian ini setiap tahunnya dengan asuransi jenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp2.470 juta per tahun (termasuk PPh, namun tidak termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan CMT karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan PT Eka Jaya Agung ("**EJA**") menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa ruangan yang beralamat pada Level 21, Denpasar, Bali dari EJA, yang dipergunakan sebagai bioskop. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, (i) melakukan pembayaran sewa kepada EJA; dan (ii) menganggung biaya pelayanan dan biaya-biaya yang dikenakan oleh instansi berwenang berkenaan dengan pemakaian listrik, air dan telepon pada ruangan bioskop yang disewa. EJA juga memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Perseroan; (ii) mengupayakan agar penyewa-penyewa lain di pusat pertokoan Level 21 tidak menjual CD, VCD atau DVD illegal; dan (iii) menyediakan penerangan pada lokasi penempatan merek bioskop dan tempat untuk pendingin di luar ruangan serta menyelenggarakan keamanan seluruh kompleks bangunan selama 24 jam. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 5% dari penjualan kotor tiket bioskop dan 5% dari penjualan kotor makanan dan minuman di bioskop yang disewa oleh Perseroan (setelah dikurangi pajak). Perseroan juga diwajibkan untuk membayar biaya pelayanan sebesar Rp80.000/m2 per bulan (belum termasuk PPN) yang dihitung untuk 20% total area yang disewa. Perjanjian ini berlaku hingga 28 Februari 2034.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan EJA karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan SUM menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana diubah pada tanggal 23 Desember 2015, dimana Perseroan menyewa ruang bioskop dari SUM yang berlokasi di Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diwajibkan untuk, antara lain memberikan pembayaran sewa ruang bioskop yang disewa oleh Perseroan. SUM berhak untuk mengakhiri perjanjian sewa jika terjadi ketidakmampuan atau keterlambatan pembayaran oleh Perseroan selama lebih dari 3 bulan sejak tanggal pembayaran yang ditentukan. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp240 juta per bulan dan Rp75 juta per tahun (keduanya belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 16 Januari 2025.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SUM karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

d. Perjanjian kerja sama jual beli dan pemasangan peralatan bioskop

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain: (i) menjual dan melakukan pemasangan peralatan bioskop berdasarkan pesanan Perseroan; (ii) mengirimkan peralatan bioskop pada tempat dan/atau lokasi yang sudah ditentukan; dan (iii) melakukan pemasangan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan. Harga akan mengacu pada negosiasi antara kedua belah pihak, yang akan dicantumkan dalam *invoice* yang diberikan oleh Megatech. Perjanjian ini terus berlaku dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga bulan

sebelumnya. Perjanjian ini akan berakhir dengan segera apabila salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan atau perintah pengadilan yang dibuat untuk likuidasi wajib atau harus memiliki kurator atau pejabat yang setara yang ditunjuk sehubungan dengan bagian yang material dari asetnya atau akan mengambil atau mengalami tindakan atau kejadian serupa di wilayah hukum manapun; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

e. Perjanjian jasa servis peralatan bioskop

- Perseroan dan PT Multi Interbuana Teknindo ("**MIT**") menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, MIT memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan jasa servis peralatan bioskop pada lokasi yang telah disepakati; dan (ii) melakukan pemeriksaaan setiap peralatan bioskop yang sudah di servis berdasarkan permintaan Perseroan. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh MIT. Perjanjian ini terus berlaku dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini akan segera berakhir apabila Perseroan atau MIT pada setiap saat, antara lain (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIT karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama.

f. Perjanjian lisensi merek dagang

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Lisensi Merek Dagang antara Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan/atau Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan PT Kuliner Sejahtera Raya ("**KSR**") menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 4 September 2018, sebagaimana diubah tanggal 10 Januari 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberikan hak dan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan dan dapat dibatalkan untuk menggunakan merek dagang milik KSR, yaitu Hello Sunday, dalam rangka mempromosikan, mengiklankan dan menyediakan jasa yang dilisensikan sesuai dengan merek dagang dilisensikan untuk setiap tempat sebagaimana diatur pada perjanjian. Biaya lisensi dibayarkan oleh Perseroan setelah menerima *invoice* dari KSR sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak tanggal pembukaan bioskop yang dioperasikan Perseroan. KSR dapat sewaktu-waktu, mengakhiri perjanjian apabila Perseroan (i) melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan Perseroan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak KSR memberikan pemberitahuan pelanggaran kepada Perseroan; atau (ii) menjadi insolven, atau terjadi proses, baik secara sukarela maupun dimohonkan oleh pihak lain, kepailitan, insolvensi, reorganisasi atau pembubaran atau melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur.

  Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan KSR karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, GAP diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. GAP tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti

kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh GAP dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada GAP, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) GAP melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan GAP gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada GAP; atau (v) GAP tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, IMD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. IMD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh IMD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada IMD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) IMD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan IMD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada IMD; atau (v) IMD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, KIR diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. KIR tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh KIR dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada KIR, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) KIR melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan KIR gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada KIR; atau (v) KIR tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, KMA diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. KMA tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh KMA dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada KMA, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) KMA melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan KMA gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada KMA; atau (v) KMA tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, LAS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. LAS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh LAS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada LAS, antara lain, apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) LAS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan LAS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan tentang pelanggaran terkait yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada LAS; atau (v) LAS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, LMS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. LMS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh LMS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada LMS, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) LMS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan LMS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan

baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada LMS; atau (v) LMS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, PMS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. PMS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh PMS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PMS, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) PMS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan PMS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada PMS; atau (v) PMS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, PMD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. PMD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh PMD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PMD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) PMD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan PMD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada PMD; atau (v) PMD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan SUM menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, SUM diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. SUM tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh SUM dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SUM, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) SUM melakukan

suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan SUM gagal memperbaiki pelanggaran material SUM dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan tentang pelanggaran terkait; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada SUM; atau (v) SUM tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, SSD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. SSD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseron untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh SSD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SSD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) SSD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan SSD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada SSD; atau (v) SSD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

g. Perjanjian kerjasama pemasangan iklan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan dengan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan IMD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik IMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop IMD; dan (ii) memenuhi semua kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan KMA sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik KMA. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop KMA; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SSD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik SSD. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop SSD; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan LAS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik LAS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop LAS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan KIR sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik KIR. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop KIR; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan LMS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik LMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop LMS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PMS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik PMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop PMS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PMD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik PMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop PMD; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan.Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan GAP sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop GAP; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

h. Perjanjian layanan manajemen

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen dengan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, PMD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemena, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp6.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PMD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, GAP menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada GAP 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, IMD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IMD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, KIR menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KIR 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, KMA menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KMA 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, LAS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LAS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, LMS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LMS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, PMS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PMS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, SSD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan;

(ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SSD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

i. Perjanjian jual beli dan pemasangan peralatan dapur dan café

- Perseroan dan Delta Sejahtera menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Dapur dan Café tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sejahtera menjual peralatan dapur dan café (seperti, peralatan dapur, peralatan kantin, peralatan outlet/café dan mesin kasir. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sejahtera memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman setiap dan seluruh peralatan dapur dan cafe yang dipesan oleh Perseron berdasarkan permintaan Perseroan pada tempat dan/atau lokasi yang ditentukan Perseroan; dan (ii) melakukan pemasangan atas peralatan dapur dan cafe pada tempat dan/atau lokasi yang ditentukan oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini akan berakhir dengan segera apabila salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan atau perintah pengadilan yang dibuat untuk likuidasi wajib atau harus memiliki kurator atau pejabat yang setara yang ditunjuk sehubungan dengan bagian yang material dari asetnya atau akan mengambil atau mengalami tindakan atau kejadian serupa di wilayah hukum manapun; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

j. Perjanjian kerja sama layanan tiket dan produk digital online

- Perseroan dan NES menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Tiket dan Produk *Digital Online* No. 008/NES/PKS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Desember 2021. Perjanjian ini mengatur mengenai penyediaan layanan oleh Perseroan untuk pembelian produk melalui platform *online* yang dioperasikan oleh NES. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain menjamin dan memastikan server jasa layanan yang dioperasikan oleh Perseroan berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh NES. Perseroan berhak untuk, antara lain menerima pembayaran biaya layananan dari NES sebesar Rp63.466,5 juta, yang dibayar secara bertahap, sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 30 Juni 2023 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/2020.

4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian jual beli, penyewaan dan pemeliharaan sistem teater

- Perseroan dan IMAX Corporation menandatangani Perjanjian Penyewaan dan Pemeliharaan 10 Sistem Teater IMAX® XT Laser dan Lisensi Merek Dagang tanggal 6 Februari 2023. Berdasarkan perjanjian ini, IMAX Corporation memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyewakan 10 sistem teater IMAX® XT Laser kepada Perseroan; (ii) menyediakan layanan pemeliharaan untuk sistem teater tersebut; dan (iii) memberikan hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan kepada Perseroan untuk menggunakan lisensi

merek dagang IMAX Corporation semata-mata sehubungan dengan penamaan, pemasaran, promosi, dan pengoperasian teater bersama dengan lisensi untuk menggunakan sistem teater, perangkat lunak, dan sistem apa pun dari IMAX Corporation manual pengguna semata-mata sehubungan dengan pengoperasian sistem teater. Biaya ditentukan berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak 6 Februari 2023 dan akan berakhir pada tahun ke-10 sejak (i) masing-masing sistem telah selesai dipasangkan dan pengujian sistem serta pelatihan operator telah diselesaikan; atau (ii) tanggal ketika bioskop dengan sistem tersebut dibuka untuk umum, manapun yang lebih awal, dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dalam hal, seluruh atau sebagian teater mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal bencana atau dalam waktu kurang dari 180 hari telah dapat ditentukan bahwa kerusakan yang terjadi tidak dapat diperbaiki.

- Perseroan dan IMAX Limited menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemeliharaan Sistem Teater IMAX® dan Lisensi Merek Dagang tanggal 1 Desember 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amendemen Kedua tanggal 9 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, IMAX Limited (i) menjual 10 sistem teater yang terdiri dari tiga sistem Xenon dan tujuh sistem Commercial Laser*;* (ii) menyediakan layanan pemeliharaan untuk sistem teater tersebut; (iii) memberikan hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan kepada Perseroan untuk menggunakan lisensi merek dagang IMAX Limited semata-mata sehubungan dengan penamaan, pemasaran, promosi, dan pengoperasian teater bersama dengan lisensi untuk menggunakan sistem teater, perangkat lunak, dan sistem apa pun dari manual pengguna IMAX Limited semata-mata sehubungan dengan pengoperasian sistem teater.

  Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019 dan akan berakhir (i) pada tahun ke-12 sejak tanggal penerimaan masing-masing sistem Commercial Laser dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun (ii) pada tahun ke-13 sejak tanggal penerimaan masing-masing sistem Xenon dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dalam hal, seluruh atau sebagian teater mengalami kerusakan akibat bencana yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal bencana atau dalam waktu kurang dari 180 hari telah dapat ditentukan bahwa kerusakan yang terjadi tidak dapat diperbaiki.

b. Perjanjian bagi hasil eksploitasi film

- Perseroan dan PT Screenplay Produksi ("**Screenplay Produksi**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Screenplay Produksi pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Sensor ("**STLS**"); dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari Lembaga Sensor Film ("**LSF**"). Screenplay Produksi juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan wajib menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Screenplay Produksi berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Screenplay Produksi.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Screenplay Produksi memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Visinema Pictures ("**Visinema Pictures**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Visinema Pictures pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persayaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. Visinema Pictures juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar

di lebih dari satu bioskop, dan wajib menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Visinema Pictures berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan dan dapat mengenakan denda sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran bagi hasil. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Visinema Pictures.

Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Visinema Pictures memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Lyto Sukses Bersama ("**LSB**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, LSB pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. LSB juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. LSB berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada LSB.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan LSB memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Omega Film ("**Omega**") menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Eksploitasi Film. Perjanjian ini memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan film yang didistribusikan oleh Omega untuk diputar di bioskop yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Berdasarkan perjanjian ini, Omega memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi *digital cinema package* ("**DCP**") dari film dan *trailer*-nya, poster, foto, *key art*, *standee*, banner dan materi promosi lainnya. Omega juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut. Omega berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Omega.

  Perjanjian Kerjasama Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Omega memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Prima Cinema Multimedia ("**PCM**") menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Eksploitasi Film. Perjanjian ini memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan film yang didistribusikan oleh PCM untuk di bioskop yang dikelola oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PCM memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi DCP dari film dan *trailer*-nya, poster, foto, *key art*, *standee*, banner dan materi promosi lainnya. PCM juga wajib menanggung biaya pengiriman materi film tersebut. PCM berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada PCM.

  Perjanjian Kerjasama Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan PCM memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Soraya Intercine Films ("**SIF**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, SIF pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. SIF juga harus menanggung biaya

pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. SIF berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada SIF.

Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan SIF memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Kharisma Starvision Plus ("**Kharisma**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Kharisma pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. Kharisma juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Kharisma berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Kharisma.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Kharisma memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Rapi Film ("**Rapi**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Rapi pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. Rapi juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Rapi berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Rapi.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Rapi memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Falcon ("**Falcon**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Falcon pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. Falcon juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Falcon berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Falcon.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Falcon memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT MD Pictures Tbk ("**MD**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, MD pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer*

film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. MD juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. MD berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada MD.

Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan MD memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Tripar Multivision Plus ("**TMP**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, TMP pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. TMP juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. TMP berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada TMP.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan TMP memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Dee Sukses Indonesia ("**DSI**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, DSI pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. DSI juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. DSI berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada DSI.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan DSI memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Cakra Film Indonesia ("**CFI**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, CFI pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. CFI juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan koemrsial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. CFI berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada CFI.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan CFI memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Akal Andal Askara ("**AAA**") menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, AAA pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuhi stempel dari LSF. AAA juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. AAA berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksploitasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada AAA.

  Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan AAA memiliki ketentuan standar sebagaimana diungkapkan di atas untuk setiap film.

c. Perjanjian pemasokan

- Perseroan, LAS, KMA, KIR, IMD, LMS, PMD, PMS dan SSD ("**Pelanggan**") menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 25 Januari 2021 dengan PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("**Coca Cola**"). Berdasarkan perjanjian ini, Coca Cola memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memasok produk yang dipesan kepada Pelanggan untuk dijual di lokasi bioskop sebagaimana diatur dalam perjanjian; (ii) memastikan pengiriman produk dalam waktu 2 x 24 jam setelah pesanan pembelian diterima; (iii) memastikan bahwa Pelanggan mempunyai jumlah stok produk yang cukup selama dua minggu; dan (iv) atas kebijakannya sendiri, memberikan dukungan pemasaran kepada Pelanggan. Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 atau sampai tercapai total minimum volume pembelian (mana yang terjadi lebih dahulu). Kedua belah pihak dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. Coca Cola dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal (i) Pelanggan melanggar salah satu kewajibannya dan gagal untuk memperbaiki pelanggarannya dalam waktu tiga hari kalender sejak menerima pemberitahuan dari Coca Cola; (ii) Pelanggan tidak melakukan pembayaran jumlah pembelian secara penuh pada tanggal jatuh tempo; (iii) Pelanggan dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya; (iv) Pelanggan melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain yang telah dibuat dan dapat diadakan oleh dan antara kedua belah pihak; atau (v) Pelanggan atau menurut pendapat Coca Cola melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- Perseroan dan PT Tirta Investama ("**Tirta Investama**") menandantangani Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 12 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Tirta Investama memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan fasilitas promosi kepada Perseroan; (ii) mengirimkan produk sejumlah yang tercantum dalam pesanan pembelian dari Perseroan; (iii) membayar biaya penayangan iklan; dan (iv) menyerahkan materi iklan yang sesuai dengan spesifikasi iklan Cinema XXI yang sudah lulus uji tayang disertai dengan STLS. Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian apabila (i) salah satu pihak gagal memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian; (ii) salah satu pihak melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian dan gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kalender; (iii) salah satu pihak dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan; (iv) salah satu pihak membubarkan usahanya atau dibubarkan; (v) harta kekayaan salah satu pihak disita; atau (vi) salah satu pihak tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

d. Perjanjian kerjasama pembangunan bioskop

- Perseroan dan PT Prakarsa Gunawan & Son ("**PGS**") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PGS setuju untuk membangun bioskop dengan beberapa studio untuk Perseroan di lokasi yang telah

ditentukan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PGS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyerahkan hasil pembangunan sesuai dalam bentuk yang memuaskan Perseroan; (ii) memperbaiki hasil pembangunan apabila hal tersebut dianggap perlu oleh Perseroan; dan (iii) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pembangunan. Nilai perjanjian kerjasama ini sesuai dengan nilai masing-masing *invoice* pembangunan bioskop yang disetujui oleh para pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sampai dengan diakhirinya oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dalam hal salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi, penggabungan atau berdasarkan perintah pengadilan; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; (iii) berhenti melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya; atau (iv) PGS memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

e. Perjanjian pinjam pakai

- NES dan PT Elang Andalan Nusantara ("**EAN**") menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud meminjam pakai ruangan kantor seluas 100 m2 di Gedung Capital Place, lantai 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan sebagai kantor NES. Selama perjanjian ini berlaku, NES memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan merawat ruangan kantor yang dipinjam; (ii) menggunakan ruangan yang dipinjam untuk keperluan kantor; dan (iii) membayar biaya-biaya yang atas penggunaan air, listrik dan telepon. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain, apabila salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya dalam hal salah satu pihak melakukan (i) merger; (ii) akuisisi; (iii) konsolidasi; dan/atau (iv) perubahan kepemilikan saham mayoritas. Perjanjian pinjam pakai tersebut berlaku sampai dengan 31 Juli 2023.

f. Perjanjian sewa menyewa

- Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bioskop, Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga di 221 lokasi dan dari pihak terafiliasi di tiga lokasi. Perjanjian sewa menyewa tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2043.

g. Perjanjian kerjasama jasa kebersihan

- Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Multiclean Jayalestari ("**Multiclean**"). Berdasarkan perjanjian ini, Multiclean menyediakan jasa kebersihan dan kerapihan umum pada lokasi bioskop Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak. Multiclean wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Multiclean untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak dengan Multiclean adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya jasa	Jangka waktu
1.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp1.158,5 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	IMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp161,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp215,5 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
4.	GAP	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp37,3 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
5.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp55,2 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
6.	PMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp21,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- Beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Glori Sukses Makmur ("**Glori**"). Berdasarkan perjanjian ini, Glori menyediakan jasa kebersihan dan kerapihan umum pada lokasi bioskop beberapa Perusahaan Anak. Glori wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Glori untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh beberapa Perusahaan Anak dengan Glori adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
1.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp39,1 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp36,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- Beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Sumber Karya Klin ("**SKK**"). Berdasarkan perjanjian ini, Glori menyediakan jasa kebersihan dan kerapihan umum pada lokasi bioskop beberapa Perusahaan Anak. SKK wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh SKK untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi

pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh beberapa Perusahaan Anak dengan SKK adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya jasa	Jangka waktu
1.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp72,9 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp31,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

h. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan

- Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Cakra Satya Internusa ("**CSI**"). Berdasarkan perjanjian ini, CSI melaksanakan pekerjaan pengamanan pada lokasi bioskop Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak. CSI wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh CSI untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa pengamanan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak dengan CSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
1.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	• Periode 1 Januari 2023 - 13 Februari 2023: Rp468,9 juta (tidak termasuk PPN dan PPh 23) • Periode 14 Februari 2023 - 31 Desember 2023: Rp476,1 juta (tidak termasuk PPN dan PPh 23)	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp8,7 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	• Periode 1 Oktober 2022 - 31 Desember 2022: Rp47,0 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23) • Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023: Rp54,0 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23)	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
4.	IMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp35,8 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
5.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp217,9 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
6.	KMA	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp35,4 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

No.	Nama Perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
7.	GAP	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp14,3 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
8.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp25,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- LMS menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Kartika Purna Yudha ("**KPY**"). Berdasarkan perjanjian ini, CSI melaksanakan jasa pengamanan pada lokasi bioskop LMS. KPY wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan menyediakan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh KPY untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada).

  Perjanjian kerja sama jasa pengamanan ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021 dan terakhir diubah dengan Addendum tanggal 2 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dengan biaya jasa sebesar Rp9,7 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).

- Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Rajawali Security Service ("**Rajawali**"). Berdasarkan perjanjian ini Rajawali melaksanakan pekerjaan pengamanan pada lokasi bioskop Perseroan. Rajawali wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Rajawali untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada).

  Perjanjian kerja sama jasa pengamanan ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2020 dan terakhir diubah dengan Addendum tanggal 2 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dengan biaya jasa Rp23,1 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).

i. Perjanjian lain-lain

- Perseroan dan Google Asia Pacific Pte. Ltd. ("**Google**") menandatangani Perjanjian Lisensi Platform Google Cloud tanggal 31 Mei 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Google memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan layanan kepada Perseroan berupa pengintegrasian ke aplikasi dan *software* Google Cloud untuk penyimpanan seluruh dokumen material Perseroan; (ii) melindungi seluruh data Perseroan yang tersimpan dalam aplikasi Google Cloud sesuai standar yang berlaku; dan (iii) memberikan layanan *technical support services* ("**TSS**") kepada Perseroan yang mematuhi pedoman layanan TSS. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak. Perseroan atau Google dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal (i) salah satu pihak melanggar perjanjian ini dan gagal melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak lain; (ii) kegiatan salah satu pihak diberhentikan atau dalam proses insolvensi dan proses terkait tidak berakhir dalam jangka waktu 90 hari; atau (iii) salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian ini lebih dari dua kali.

- Perseroan dan PT Cipta Solusi Datarindo ("**Ravintola**") menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Pemeliharaan *Software* No.397-XXI-CSD-I-2019 tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Ravintola bersedia untuk memberikan jasa penggunaan dan pemeliharaan

software kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Ravintola memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memastikan *software*-nya dapat digunakan sebelum dilakukan serah terima; (ii) memberikan dukungan teknis melalui *remote access*, internet, dan VPN; (iii) melakukan *update* dan *development* berdasarkan kebutuhan operasional yang disepakati Perseroan dan memasikan bahwa *update* tersebut tidak berpotensi merugikan kegiatan operasional Perseroan; dan (iv) memberikan laporan secara berkala kepada Perseroan terkait pemenuhan ketentuan dalam *service level agreement*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Ravintola selesai menyediakan layanan utilitas dan pemeliharaan *software* kepada Perseroan. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari atau tanpa pemberitahuan tertulis, dalam hal Ravintola (i) telah melanggar perjanjian ini dan gagal melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan dalam waktu 15 hari kalender; atau (ii) melakukan penggabungan, pemisahan, konsolidasi, atau re-organisasi. Selain itu, Ravintola dapat mengakhiri perjanjian ini jika Perseroan terlambat atau tidak melakukan pembayaran untuk layanan Ravintola.

- Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk. ("**BCA**") menandatangani Perjanjian Kerjasama Sakuku *Cobranding* No.23/NSR-BCA/LGL-MKT/2020 tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama tertanggal No.16/BCA-NSR/LGL/MKT/II/2022 tanggal 29 Juli 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BCA bermaksud mengadakan kerja sama pemasaran uang elektronik yang diterbitkan oleh BCA, yaitu Sakuku, dengan Perseroan dalam rangka memperluas penggunaan uang elektronik sebagai sarana transaksi. Selama perjanjian ini masih berlaku, BCA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan sistem pemrosesan transaksi; (ii) memproses seluruh instruksi transaksi yang disampaikan melalui aplikasi Sakuku dan aplikasi/situs Perseroan; dan (iii) menyediakan sarana pengisian ulang saldo Sakuku. BCA juga diwajibkan untuk, antara lain (i) menangani keluhan *user*; (ii) mengedukasi penggunaan Sakuku; dan (iii) menjaga kerahasiaan informasi yang timbul dari perjanjian ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

- Perseroan, EAN dan NES menandatangani Perjanjian Pemegang Saham tanggal 20 September 2017. Perjanjian ini mengatur mengenai kepemilikan, tata kelola perusahaan dan beberapa hal lainnya terkait dengan NES. Berdasarkan perjanjian ini, NES memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyampaikan laporan keuangan dan informasi lain sehubungan dengan operasional NES kepada Preseroan dan EAN; (ii) menjaga sistem akuntansi dan pengendalian internal; (iii) berbagi dengan EAN semua data transaksi domestik yang telah dibuat atau dikumpulkan. Perjanjian ini akan berakhir apabila (i) EAN dan Perseroan memberikan persetujuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) EAN atau Perseroan tidak lagi memiliki saham; atau (iii) setelah pembubaran, pemutusan, pemulihan, penyelesaian atau kebangkrutan NES baik secara sukarela atau tidak.

- NES dan PT Graha Layar Prima Tbk ("**GLP**") menandatangani Perjanjian Kerjasama Bisnis No. 002/PKS/TIXID-CGV-B/08/2019 tanggal 27 September 2019. Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama bisnis sehubungan dengan penjualan produk tiket, makanan & minuman bioskop melalui platform elektronik yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES. Berdasarkan perjanjian ini, GLP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menjual produk GLP pada platform yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES; dan (ii) membuat tampilan sistem *User Interface* (UI)/*User Experience* (UX) sesuai dengan kesepakatan para pihak. NES memiliki kewajiban untuk, antara lain memberikan laporan penjualan mingguan kepada GLP untuk rekonsiliasi. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Maret 2020 dan diperpanjang secara otomatis. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.

- NES dan PT Cinemaxx Global Pasifik ("**Cinepolis**") menandatangani Perjanjian Kerjasama Bisnis No. 006/PKS/TIXID-CINEPOLIS/10/2019 tanggal 24 Januari 2020. Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama bisnis untuk penjualan produk (termasuk tiket) Cinepolis melalui platform elektronik yang dimiliki dan dikelola NES. Berdasarkan perjanjian ini, Cinepolis

memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menjual produk Cinepolis pada platform yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES; dan (ii) membuat tampilan sistem *User Interface* (UI)/ *User Experience* (UX) sesuai dengan kesepakatan para pihak. NES memiliki kewajiban untuk, antara lain mengirimkan laporan penjualan mingguan kepada Cinepolis untuk rekonsiliasi. Perjanjian ini berlaku hingga 28 Februari 2021 dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.

- SUM dan Sri Sultan Hamengkubuwono X/Karaton Ngayogyokarto ("**Keraton**") menandatangani Akta No. 02 tanggal 11 Januari 2016, dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Yogyakarta tentang Perjanjian Pemberian Hak Guna Bangunan dan Kerjasama Usaha di Atas Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 20 tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Keraton memberikan, antara lain Hak Guna Bangunan (HGB) di atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Klitren, Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta, untuk digunakan sebagai gedung bioskop, termasuk kedai kopi. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk antara lain (i) membayar uang pemasukan atau uang izin hak guna bangunan kepada Keraton sebagaimana diatur dalam perjanjian; dan (ii) memelihara objek tanah dengan biaya SUM. Berdasarkan perjanjian ini, SUM berhak untuk, antara lain mengembangkan usaha di atas objek tanah dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Keraton mengenai rencana pengembangan tersebut. Perjanjian ini berlaku hingga 1 April 2039. Keraton dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila SUM tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian ini. Pengakhiran secara sepihak tersebut dapat dilakukan setelah Keraton memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perjanjian ini.

j. Perjanjian kredit

- Perseroan dan DBS menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Perbankan DBS 2022**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh *Term Loan Facility* dengan limit Rp200.000 juta untuk kebutuhan bisnis Perseroan dengan tingkat bunga per tahun sebesar 0,50% + *deposit fixed rate* (dengan jangka waktu bunga maksimum satu bulan, tiga bulan atau enam bulan) dan dibayarkan pada akhir batas waktu bunga yang relevan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Setiap kegagalan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo (baik dengan jatuh tempo yang dijadwalkan, pelunasan yang disyaratkan, percepatan atau lainnya) sehubungan dengan utang lainnya akan dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan DBS 2022 ini.

  Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atas utang dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dengan dan syarat-syarat, antara lain (i) Perseroan harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada DBS sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah utang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan; (ii) jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari Rp50.000 juta dan kelipatan dari Rp10.000 juta; dan (iii) jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terhutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada DBS. Atas pembayaran kembali lebih awal dan/atau pelunasan lebih awal fasilitas perbankan maka Perseroan tidak akan dikenakan biaya pelunasan lebih awal/penalti.

  Perseroan harus mempertahankan rasio kecukupan jaminan (*security coverage ratio*) atas perjanjian jaminan terhadap pokok fasilitas sekurang-kurangnya 100%.

  Fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini diberikan dengan jaminan berupa deposito milik HJB dan APN di DBS dengan total keseluruhan sebesar Rp200.000 juta, masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian Gadai No. 049/PG-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara HJB

(selaku Pemberi Gadai) dan DBS (selaku Penerima Gadai); dan (ii) Perjanjian Gadai No. 050/PG-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara APN (selaku Pemberi Gadai) dan DBS (selaku Penerima Gadai).

Pada tanggal 9 Maret 2023, saldo pokok pinjaman atas fasilitas ini tercatat sebesar Rp200.000 juta.

- Perseroan memiliki 11 fasilitas kredit *Cash Collateral Maks CO* Tetap dengan BRI di mana Perseroan sebagai debitur berdasarkan 11 Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Perseroan dan BRI. Fasilitas ini bertujuan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan dengan tingkat bunga sebesar 1,70% per tahun. Perseroan wajib untuk mempertahankan Penerimaan Bunga Efektif (PBE) 100%.

  Berikut ini adalah keterangan yang relevan bagi masing-masing 11 fasilitas kredit *Cash Collateral Maks CO* tetap dengan BRI:

  (i) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 20 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.755/PJ-04/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (ii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.765/PJ-04/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (iii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 22 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.768/PJ-04/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (iv) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2023. SHP ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.770/PJ-04/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (v) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.772/PJ-04/12/2022 tanggal 24 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (vi) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.774/PJ-04/12/2022 tanggal 25 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
  (vii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 26 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.778/PJ-04/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 antara APN dan BRI.
  (viii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 27 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga B.783/PJ-04/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara HJB dan BRI.

(ix) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 29 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.791/PJ-04/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara HJB dan BRI.

(x) SPH KMK Cash Collateral No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama APN berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.794/PJ-04/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 antara APN dan BRI.

(xi) SPH KMK Cash Collateral No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan jumlah kredit sebesar Rp399.400 juta dan tanggal jatuh tempo 31 Maret 2024. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp320.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.180/PJ-04/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan gadai rekening sebesar Rp80.000 juta atas nama APN berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.181/PJ-04/03/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Pada tanggal 12 Mei 2023, jumlah saldo pokok pinjaman dari BRI ini tercatat Rp1.397.200 juta.

- Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga ("**KASB**") No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 28 Maret 2023 untuk fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Agunan Surat Berharga bersifat *non-revolving* dengan limit sebesar Rp700.000 juta. Fasilitas kredit ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis Perseroan dengan tingkat bunga 0,19% per tahun di atas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan yang dibayar per bulan. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 30 Januari 2024 atau pada setiap saat yang ditentukan oleh Bank Mandiri apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kejadian kelalaian sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.

  Pelunasan dipercepat tidak dikenakan denda dan dapat dilakukan sepanjang (i) Perseroan memberitahukan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat; dan (ii) Bank Mandiri telah menyetujui pelunasan dipercepat secara tertulis.

  Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan dari Bank Mandiri untuk melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain, melakukan pembagian dividen, mengadakan perubahan modal dan susun Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengadakan ekspansi usaha atau investasi baru dengan telah ditandatangani nya Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 28 Maret 2023.

  Fasilitas KASB berdasarkan perjanjian ini diberikan dengan jaminan berupa deposito berjangka milik HJB sebesar Rp560.000 juta dan APN sebesar Rp140.000 juta, masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/113/PGD/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Gadai Deposito No. WCO. KP/113/PGD/2023 tanggal 28 Maret 2023 antara HJB dan Bank Mandiri; dan (ii) Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/112/PGD/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Gadai No. WCO.KP/112/PGD/2023 tanggal 28 Maret 2023 antara APN dan Bank Mandiri.

  Pada tanggal 5 April 2023, saldo pokok pinjaman atas fasilitas ini tercatat Rp700.000 juta.

5. Aset tetap yang penting

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, kecuali PMD yang menguasai aset tetap berupa dua bangunan (gedung bioskop) yang terletak di lantai III pada Pertokoan Malang Plaza, Jl. Kyai Haji Agus Salim Malang, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 187 tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang, dengan nilai buku bersih (*net book value*) Rp2.426 juta. Tidak terdapat pembebanan jaminan terhadap aset ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset ini dalam proses pendaftaran pada instansi yang berwenang.

6. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian asuransi untuk menanggung risiko-risiko sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
1.	Asuransi Tanggung Gugat Direktur&Pejabat dan Penggantian ke Perusahaan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Antara lain: • Perseroan dan/atau • seluruh Perusahaan Anak	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain: • biaya dan pengeluaran untuk pembelaan dari proses pembebasan aset; • biaya hubungan masyarakat; dan • biaya dan pengeluaran untuk pembelaan dari pencurian identitas.	US$15 juta.
2.	*Fidelity Guarantee Insurance*	PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindakan pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan uang, surat berharga, dan/atau properti yang dilakukan oleh karyawan.	Rp5.000 juta.
3.	*Public Liability Insurance*	PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak.	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, sejumlah yang dapat menjadi tanggung jawab tertanggung untuk membayar sebagai kompensasi, termasuk semua biaya pertahanan yang terkait dengannya, yang timbul dari cedera tubuh atau kerusakan harta benda yang diderita oleh pihak ketiga.	Rp13.500 juta atas setiap satu peristiwa dan tidak terbatas secara agregat dalam setiap satu periode asuransi di setiap lokasi.

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
4.	• *Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami insurance* • *Property All Risks Insurance*	PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak.	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, bencana gempa bumi di: • Semua bioskop dan semua lokasi milik tertanggung di seluruh Indonesia, termasuk yang sedang dalam renovasi kecil terkait dengan pemasangan peralatan, perlengkapan, yang mencakup semua properti tetap dan pribadi yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin, peralatan dekorasi/ furnishing termasuk namun tidak terbatas pada karya seni, dengan nilai sampai dengan US$50.000/item, sistem proyeksi dan suara (audio/visual), furnitur, perlengkapan, kafetaria, kantin (termasuk stok makanan dan minuman, dll.) papan reklame, papan nama (yang berhubungan dengan listrik atau lainnya), film, trailer, dan sinematografi celluloid lainnya, sistem kontrol/ pengaturan udara, sistem pembangkit listrik dll, semua milik tertanggung, dalam piutang, berdasarkan perjanjian sewa/ disewakan, berdasarkan perjanjian sewa/sewa dan/atau perjanjian pinjaman, dipinjamkan, dalam penitipan dan/ atau komisi dan diperoleh selama periode pertanggungan. • Pada semua mesin arcade termasuk perlengkapan, semua milik tertanggung, dalam piutang, disewakan, dipinjamkan, dalam penitipan dan/ atau komisi dan diperoleh selama masa pertanggungan, berlokasi di bioskop tertanggung di seluruh Indonesia.	Rp5.344.130,4 juta dan US$ 195,3 juta.

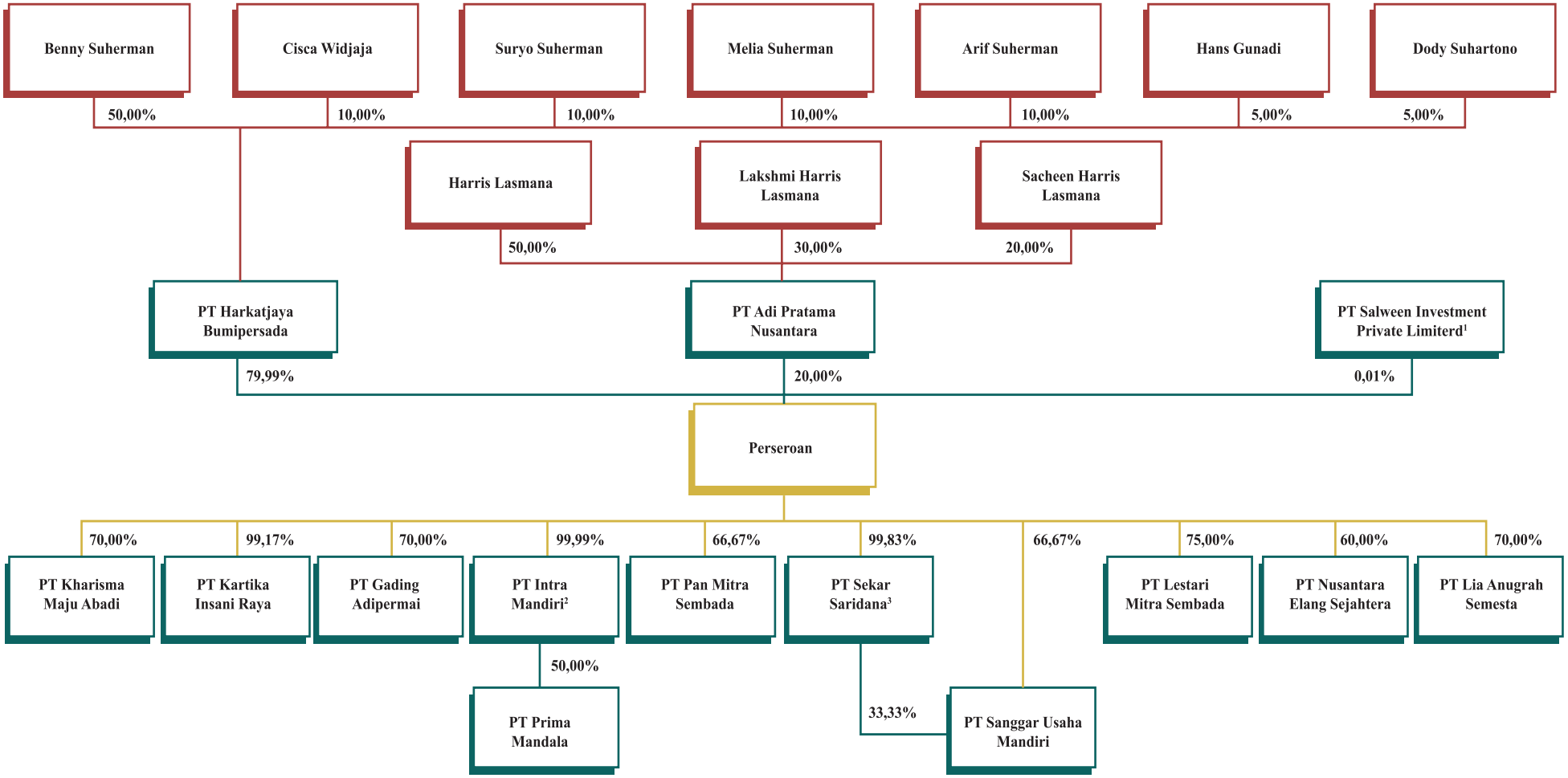
No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
5.	*Terrorism & Sabotage*	PT Asuransi Bintang Tbk	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak.	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Kerugian fisik atau kerusakan terhadap kepentingan yang dipertanggungkan termasuk biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme atau sabotase pada: • Semua bioskop dan semua lokasi milik tertanggung di seluruh Indonesia, termasuk yang sedang dalam renovasi kecil terkait dengan pemasangan peralatan, perlengkapan, yang mencakup semua properti tetap dan pribadi yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin, peralatan dekorasi/ furnishing termasuk namun sistem proyeksi dan suara (audio/visual), furnitur, perlengkapan, kafetaria, kantin (termasuk stok makanan dan minuman, dll.) papan reklame, papan nama (yang berhubungan dengan listrik atau lainnya), film, trailer, dan sinematografi celluloid lainnya, sistem kontrol/pengaturan udara, sistem pembangkit listrik dll, semua milik tertanggung, dalam piutang, berdasarkan perjanjian sewa/ disewakan, berdasarkan perjanjian sewa/sewa dan/atau perjanjian pinjaman, dipinjamkan, dalam penitipan dan/ atau komisi dan diperoleh selama periode pertanggungan. • Pada semua mesin arcade termasuk perlengkapan, semua milik tertanggung, dalam piutang, disewakan, dipinjamkan, dalam penitipan dan/ atau komisi dan diperoleh selama masa pertanggungan, berlokasi di bioskop tertanggung di seluruh Indonesia.	Rp4.006.826,0 juta dan US$146,5 juta

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
6.	*Motor Cycle / Scooter*	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	• Perseroan termasuk Perusahaan Anak; dan/ atau • Pegawai Perseroan untuk hak dan kepentingan-nya masing-masing.	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Kerusakan terhadap kendaraan berupa motor yang dimiliki Perseroan.	Rp812 juta
7.	*Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy*	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	• Perseroan termasuk Perusahaan Anak; dan/ atau • Pegawai Perseroan untuk hak dan kepentingan-nya masing-masing.	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Kerusakan terhadap kendaraan berupa mobil yang dimiliki Perseroan.	Rp17.704 juta
8.	Asuransi Kesehatan Kumpulan PRUWorks Medical	PT Prudential Life Assurance	Perseroan	1 Januari 2023 - 31 Desember 2023	Antara lain: • Manfaat rawat inap • Manfaat Persalinan • Manfaat rawat jalan • Manfaat kacamata	Nilai pertanggungan tunduk pada antara lain, manfaat, deskripsi, dan batasan yang tercantum pada daftar manfaat dan plan asuransi yang relevan

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang dimiliki oleh Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

7. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI adalah sebagai berikut:



Catatan:
(1) Salween Investment Private Limited adalah afiliasi dari GIC Private Limited, *sovereign wealth fund* Singapura.
(2) IMD memiliki 0,17% (nol koma satu tujuh persen) di PT Sekar Saridana.
(3) SSD memiliki 0,83% (nol koma delapan tiga persen) di PT Kartika Insani Raya.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Mei 2023, pemegang saham Perseroan telah menetapkan Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman sebagai pengendali Perseroan, yang merupakan kelompok yang terorganisasi (*acting in concert*) sesuai dengan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 15 Mei 2023, Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman, selaku Pengendali Perseroan melalui HJB, secara bersama-sama menyatakan bahwa, tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Juni 2023, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman yang secara bersama-sama memiliki kewenangan untuk mengendalikan Perseroan.

8. Keterangan tentang pemegang saham pengendali

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah HJB dengan keterangan sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

HJB, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. HJB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 6 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Januari 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-360.HT.01.01.TH.95 tanggal 11 Januari 1995, yang telah di daftarkan dalam Buku Registrasi yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1144/1995 tanggal 27 Juni 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 22 Agustus 1997, dan Tambahan No. 3493 ("**Akta Pendirian HJB**").

Anggaran dasar HJB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham HJB No. 16 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010819.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0027521 tanggal 16 Februari 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033783.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 ("**Akta HJB No. 16/2023**"). Berdasarkan Akta HJB No. 16/2023, para pemegang saham HJB telah menyetujui antara lain, perubahan Pasal 2 (Jangka Waktu), Pasal 4 (Modal) dan Pasal 5 (Saham) dari anggaran dasar HJB.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan HJB adalah berusaha dalam di bidang aktivitas perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta HJB No. 16/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang sahanm HJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	**72.000**	**144.000**	**216.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Benny Suherman	36.000	72.000	108.000.000.000	50,0
Cisca Widjaja	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Suryo Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Melia Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Arif Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Ir. Hans Gunadi, M.Sc.	3.600	7.200	10.800.000.000	5,0
Dody Suhartono	3.600	7.200	10.800.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**72.000**	**144.000**	**216.000.000.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**-**		**-**	

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham HJB No. 23 tanggal 23 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017133 tanggal 26 Januari 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047063 tanggal 30 Januari 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019445.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Benny Suherman
Komisaris	:	Cisca Widjaja
Komisaris	:	Melia Suherman

Direksi

Direktur Utama	:	Suryo Suherman
Direktur	:	Arif Suherman
Direktur	:	Ir. Hans Gunadi, M.Sc.
Direktur	:	Dody Suhartono

9. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0106689 tanggal 4 April 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066474. AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 April 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suryo Suherman
Komisaris	:	Melia Suherman
Komisaris	:	Harris Lasmana
Komisaris	:	Sacheen Harris Lasmana
Komisaris Independen	:	Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Komisaris Independen	:	Ongki Wanadjati Dana

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Hans Gunadi M.Sc.
Direktur	:	Arif Suherman
Direktur	:	Tri Rudy Anitio
Direktur	:	Dody Suhartono

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun setelah pengangkatan tersebut, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Suryo Suherman, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris SSD sejak tahun 2013 dan Direktur Utama HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau juga menjabat sebagai komisaris dan direktur di perusahaan lainnya, termasuk Direktur Utama PT Baskara Binasentosa sejak tahun 1995, Komisaris PT Asahimas Chemical sejak tahun 2002, Komisaris PT Graha Jaya Bali sejak tahun 2014 dan Direktur PT Citrabersama Mututama sejak tahun 2018. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1997-1998 dan 2002-2011), Komisaris Perseroan (2011-2018) dan Komisaris Utama Perseroan (1998-2002).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *finance* dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan saudara kandung dari Arif Suherman, Direktur Perseroan dan Melia Suherman, Komisaris Perseroan. Melalui hubungan kekeluargaan dengan Melia Suherman, beliau merupakan saudara ipar dari Hans Gunadi, Direktur Utama Perseroan.



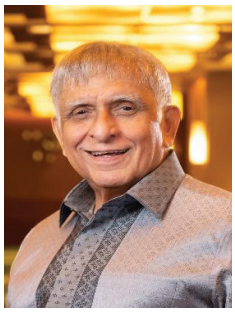
Melia Suherman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan dan bioskop. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Multindo Auto Finance (1999-2000), Komisaris Utama PT Multindo Auto Finance (2003-2010) dan Komisaris Perseroan (1997-2011).

Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang *finance* dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan istri dari Hans Gunadi, Direktur Utama Perseroan. Beliau juga merupakan saudara kandung dari Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan dan Arif Suherman, Direktur Perseroan.



Harris Lasmana, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1949. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 5 Maret tahun 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri bioskop. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan (1988-2011) dan Komisaris Utama Perseroan (2011-2018). Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama SSD dan Direktur Utama APN, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 1997.

Beliau mempelajari bidang *science* dari Bombay University, India pada tahun 1968.

Beliau merupakan pemegang saham dalam APN dengan kepemilikan sebesar 50,0% dan orang tua dari Saachen Harris Lasmana, Komisaris Perseroan.



Sacheen Harris Lasmana, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1976. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur APN, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau bekerja sebagai *Government and Public Affairs Officer* di BP Indonesia (2001-2004).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dan Magister dalam bidang *international relation* dari Regent's Park College, Inggris, masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.

Beliau merupakan anak dari Harris Lasmana, Komisaris Perseroan dan pemegang saham dalam APN dengan kepemilikan 50,0%.



M. Noor Rachman Soejoeti, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman profesional lebih dari 23 tahun di sektor keuangan, khususnya pasar modal. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avia Avian Tbk sejak tahun 2021 dan Komisaris BEI sejak tahun 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (2000-2007), Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK (2013-2017), Komisaris Utama PT Maybank Asset Management (2017-2020), dan Komisaris Utama PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk (2018-2020).

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1982 dan gelar Magister dalam bidang ekonomi dari Colorado State University, Amerika Serikat pada tahun 1991.



Ongki Wanadjati Dana, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di sektor keuangan. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("**BTPN**") dan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk, keduanya sejak tahun 2022. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Universal (2000-2002), Direktur *Wholesale Banking* PT Bank Permata Tbk (2002-2008), Kepala Unit Usaha Syariah BTPN (2008-2014), Wakil Direktur Utama BTPN (2008-2019), serta Direktur Utama BTPN (2019-2022).

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1981.

Direksi



Ir. Hans Gunadi M.Sc., Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 4 Agustus 2011, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman selama 24 tahun di industri keuangan dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama NES dan Direktur Utama SSD sejak tahun 2013, keduanya merupakan Perusahaan Anak Perseroan, dan Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Graha Jaya Bali sejak tahun 2014, Direktur Utama PT Hydrospa International sejak tahun 2015, dan Direktur PT Lixil Trading Indonesia sejak tahun 2018. Beliau sebelumnya berkarir di sektor keuangan hingga meraih jabatan sebagai *Vice President* Salomon Smith Barney Inc., Singapura (1999-2007) dan *Vice President* Citigroup, Singapura (2008-2010). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Eka Jaya Agung (2014-2018).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *civil engineering* dari Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, pada tahun 1994 dan gelar Magister dalam bidang *project management* dari University of Manchester, Inggris pada tahun 1996.

Beliau merupakan suami dari Melia Suherman, Komisaris Perseroan dan menantu dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%. Beliau juga merupakan saudara ipar dari Arif Suherman, Direktur Perseroan dan Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan.



Arif Suherman, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab, antara lain, atas operasional bioskop Cinema XXI.

Beliau memiliki pengalaman selama 21 tahun di industri manufaktur, keuangan dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris SSD dan Komisaris NES dan Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017.

Beliau merupakan anggota aktif Young Presidents Organization sejak tahun 2009, dan terlibat dalam Asia-Pasific Acquisitions Committee (APAC), TATE Foundation, London sejak tahun 2018. Beliau juga aktif dalam kepengurusan KADIN (Kamar Dagang Industri) Republik Indonesia sebagai Ketua Komisi Tetap Bidang Industri Kreatif Berbasis Elektronik (TV, Radio, Video, Film, Fotografi & Animasi) (2017-2020) dan sejak 2021 sebagai Wakil Bidang Dana, Investasi, dan Hubungan Luar Negeri, Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Multindo Auto Finance (2004-2017) dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Asahimas Chemical sejak tahun 2002, Direktur Utama PT Citra Bersama Mututama sejak tahun 2005, Direktur PT Bloomfils International (Miele) sejak tahun 2008, Komisaris PT Hydrospa International sejak tahun 2012, Direktur PT Baskara Bina Sentosa sejak tahun 2014, dan Komisaris Utama PT Multindo Auto Finance sejak tahun 2017.

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *international business* dari Sophia University, Jepang pada tahun 2000.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan saudara kandung dari Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan dan Melia Suherman, Komisaris Perseroan. Melalui hubungan kekeluargaan dengan Melia Suherman, beliau merupakan saudara ipar dari Hans Gunadi, Direktur Utama Cinema XXI.



Tri Rudy Anitio, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 29 September 1997, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab, antara lain, atas keuangan dan akuntansi Perseroan.

Beliau memiliki pengalaman selama 34 tahun di industri akuntansi. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Perusahaan Anak, SSD sejak tahun 2002. Beliau pernah berkarir sebagai Associate KAP Drs. B. Sudharta & Co (1989-1990) dan manajer di departemen pajak Perseroan (1990-1997).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang filsafat sosial dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Indonesia pada tahun 1988.



Dody Suhartono, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab atas, antara lain, operasional kegiatan usaha F&B Cinema XXI.

Beliau memiliki pengalaman selama 32 tahun di industri F&B dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau menjabat sebagai Komisaris Delta Sejahtera sejak tahun 2006, Komisaris Delta Sentosa dan Komisaris PT Bioskop Metropole sejak tahun 2010, serta Komisaris KSR sejak tahun 2016. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Sanguine Spectra, Amerika Serikat (1991-2005), Chief F&B Perseroan (1996-2022), *General Manager* PT Aneka Boga Sukses (1996-2005), dan Direktur (pemasaran) PT Multindo Auto Finance (2004-2008).

Beliau memperoleh gelar Diploma dalam bidang *business administration* dari Rancho Santiago College (St. Ana College), Amerika Serikat, pada tahun 1994, dan gelar Sarjana dalam bidang i*nternational business* & *finance* dari California State University, Fullerton, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Beliau juga merupakan keponakan dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**").

10. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau "GCG")

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur oleh OJK dalam penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan OJK. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perseroan. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan atau majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, Dewan Komisaris Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris dan belum pernah mengadakan Rapat Bersama.

Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12,2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp5,2 miliar dan Rp12,7 miliar. Jumlah tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris didasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan.

Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, Direksi Perseroan belum mengadakan rapat Direksi dan belum pernah mengadakan Rapat Bersama.

Para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15,1 miliar, Rp2,8 miliar, Rp5,8 miliar, dan Rp11,9 miliar. Jumlah tunjangan yang diterima oleh Direksi didasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan.

Direksi berkomitmen akan terus belajar untuk memastikan bahwa pengetahuan profesional, kompetensi dan keterampilan kepemimpinan mereka mengikuti perkembangan terkini di bidangnya masing-masing. Seminar yang diikuti oleh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2022, meliputi antara lain CEO Forum yang diadakan oleh IMAX di Scottsdale Arizona, Amerika Serikat dan GIC Insight Forum.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Tri Rudy Anitio sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 9 Maret 2023. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A, Jakarta Pusat 10340 melalui nomor telepon (021) 31901188 atau e-mail corporate.secretary@nsr.co.id.

Informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Tri Rudy Anitio dapat dilihat pada bagian dalam Bab VIII Prospektus ini dengan judul "Pengurusan dan Pengawasan."

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No. 55/2015**"). Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Mohammad Noor Rachman Soejoeti (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Fitradewata Teramihardja

Anggota : Sammy TS Lalamentik

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Fitradewata Teramihardja. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (*member firm of* Andersen Worldwide) (1991-2005), dan kemudian menjabat sebagai Partner di beberapa kantor akuntan publik (2005-2011). Saat ini menjabat sebagai *Founding* Partner (*Assurance and Transaction & Capital Market Advisory*) KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (*member firm of* Rödl International GmbH) sejak tahun 2011, anggota Komite Audit PT Mulia Boga Raya Tbk sejak tahun 2019, anggota Komite Audit PT Avia Avian Tbk sejak tahun 2021, dan Komisaris Independen PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sejak tahun 2023. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1991.

Sammy TS Lalamentik. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2023. Memulai karirnya sebagai pemeriksa di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (1984-1989) dan selanjutnya menempati berbagai posisi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian di Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (DLPM), Departemen PM2B (2014 - 2020). Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Kredit Rating Indonesia sejak tahun 2020, Komisaris Independen PT Super Energy Tbk sejak tahun 2020, Komisaris PT Internusa Keramik Alamasri sejak tahun 2021, Komisaris Independen PT Perdana Karya Perkasa Tbk sejak tahun 2021, dan anggota Komite Audit PT Avia Avian Tbk. Meraih gelar Diploma III dalam bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1984.

Untuk informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Mohammad Noor Rachman Soejoeti, dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurusan dan Pengawasan."

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat menjabat selama dua periode. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Melakukan penelahaan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Wewenang Komite Audit termasuk:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melakukan fungsinya di atas, Komite Audit dibantu oleh Unit Audit Internal Perseroan.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit belum mengadakan rapat.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34/2014**"). Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ongki Wanadjati Dana (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Suryo Suherman (merangkap sebagai Komisaris Utama)

Anggota : Ruben Mulyadi

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Ruben Mulyadi. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2023. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama SUM sejak tahun 2013, Komisaris Utama KIR sejak tahun 2014, Komisaris Utama LAS sejak tahun 2015, Komisaris Utama KMA sejak tahun 2015, Komisaris Utama IMD sejak tahun 2019, dan Komisaris Utama GAP sejak tahun 2019. Meraih gelar Diploma III dalam bidang ekonomi manajemen dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1984.

Untuk informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Ongki Wanadjati Dana dan Suryo Suherman, dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurusan dan Pengawasan."

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2023. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

Fungsi nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi; dan
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengadakan rapat.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56/2015**"). Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 9 Maret 2023, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2023, Perseroan telah mengangkat Steven William sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Steven William. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1991. Diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal pada tahun 2023. Beliau telah berkarir di Perseroan selama sembilan tahun dengan jabatan awal sebagai *Corporate Secretary Staff, Media and Promotion* (2014-2016) dan saat ini menjabat sebagai *Cost & Fixed Assets Supervisor* sejak tahun 2016. Beliau meriah gelar Sarjana dalam bidang ilmu sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan Magister dalam bidang manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2016.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian berkala atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perseroan dan Komite Audit Perseroan;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh Unit Audit Internal dalam Perseroan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal;
- Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal termasuk:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau "CSR")

Cinema XXI bertujuan untuk mengintegrasikan operasi dan nilai-nilai bisnis yang dapat meningkatkan upayanya dalam menjalankan kewajiban sosial serta praktik-praktik lingkungan dan ekonomi. Cinema XXI percaya bahwa Cinema XXI telah membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi para pemangku kepentingan dan menciptakan dampak positif bagi komunitas di sekitar Cinema XXI. Sebagai bagian dari praktiknya, Cinema XXI dengan rutin mendukung upaya dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan dalam lingkup industri film nasional sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap mereka, serta dengan rutin menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosial, seperti festival film, untuk membantu mempromosikan dan membudayakan menonton film di bioskop di kalangan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan apresiasi terhadap film-film nasional yang ditayangkan di bioskop.

Cinema XXI telah mendukung dan membantu berbagai festival film yang diselenggarakan di Indonesia, dan juga telah mengadakan festival film Cinema XXI sendiri untuk meningkatkan pengakuan bagi para insan perfilman tanah air yang dapat mendorong kemajuan industri film domestik. Beberapa festival film utama yang didukung atau diselenggarakan oleh Cinema XXI:

Festival Film Indonesia (FFI)

FFI merupakan upacara penghargaan tahunan penting bagi industri film Indonesia, di mana berbagai film Indonesia ditayangkan dan dianugerahkan penghargaan berdasarkan beberapa kategori, seperti Penyuntingan Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, dan Aktris Terbaik. Berbagai penghargaan yang diberikan di ajang FFI bertujuan untuk mengakui keunggulan para profesional di industri film Indonesia. FFI pertama kali diselenggarakan oleh Yayasan Film Indonesia pada tanggal 30 Maret 1995 sampai dengan 5 April 1995 di Jakarta dengan nama 'Pekan Penghargaan Film Nasional' atau sering disebut sebagai 'Pre-FFI'. Awalnya, FFI dilahirkan oleh penggagasnya, Umar Ismail dan Djamaluddin Malik, sebagai acara kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi sarana evaluasi film produksi nasional dalam kurun waktu satu tahun. Selain berfungsi sebagai ajang penghargaan dan kompetisi, FFI juga menyediakan pemetaan yang menunjukkan dinamika industri film Indonesia. Cinema XXI sepenuhnya mengakui signifikansi FFI dan perannya di dalam industri film Indonesia, dan Cinema XXI juga dengan rutin mendukung penyelenggaraan FFI dengan menyediakan teater Cinema XXI sebagai tempat untuk melakukan proses penjurian dengan potongan harga khusus, baik sebagai tempat para juri menonton nominasi film maupun sebagai tempat berjalannya evaluasi kritis dan diskusi para juri.

Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF)

JAFF merupakan festival film besar pertama di Indonesia yang fokus pada perkembangan industri perfilman di Asia. JAFF pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 dan mempersembahkan film-film hasil karya para pembuat film dari berbagai negara di Asia. JAFF tidak hanya menjadi ajang untuk

memperkenalkan sinema Asia dan film Asia kepada masyarakat luas di Indonesia, tetapi juga menjadi titik bertemunya berbagai sektor seperti seni, budaya, dan pariwisata. JAFF bekerja sama dengan Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC) untuk mempromosikan film Asia. Sejak 2011, Empire XXI Yogyakarta telah menjadi lokasi penyelenggaraan JAFF. Cinema XXI mendukung JAFF dengan menyewakan area bioskop untuk kegiatan penayangan berbagai film serta menyediakan tempat di mana para pembuat film dan pecinta film dapat berkumpul dan saling berinteraksi. Cinema XXI melakukan hal tersebut dengan memberikan potongan harga khusus untuk penyewaan studio selama proses penjurian. Pada tahun 2021, m.tix dan TIX.ID menjadi mitra resmi penjualan tiket untuk JAFF, sementara TIX.ID menjadi mitra resmi penjualan tiket JAFF pada tahun 2022.

XXI Short Film Festival

Selain mendukung berjalannya festival film lain, Cinema XXI juga menyelenggarakan festival filmnya sendiri, yakni XXI Short Film Festival. XXI Short Film Festival merupakan salah satu festival film berskala nasional yang diselenggarakan XXI dari tahun 2013 hingga tahun 2016 untuk mencari bakat muda Indonesia yang dapat memperkuat dan mengokohkan industri film Indonesia di masa depan. Selain itu, XXI Short Film Festival juga merepresentasikan bentuk komitmen Cinema XXI terhadap perkembangan film domestik yang berbasis komunitas di seluruh penjuru Indonesia.

Cinema XXI juga turut serta dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal:

Donasi persediaan untuk mendukung upaya melawan pandemi COVID-19

Sebagai bagian dari inisiatif Cinema XXI dalam mendukung upaya Pemerintah melawan pandemi COVID-19, Cinema XXI mendonasikan serangkaian persediaan untuk membantu para dokter dan petugas medis yang merupakan garda depan selama masa pandemi. Cinema XXI bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendistribusikan persediaan medis. Cinema XXI mendonasikan 10,010 lembar pakaian pelindung diri dan 14,000 lembar masker medis melalui organisasi lokal yakni Relawan Anak Bangsa, serta mendonasikan 500 lembar pakaian pelindung diri dan 50 galon disinfektan melalui Palang Merah Indonesia.

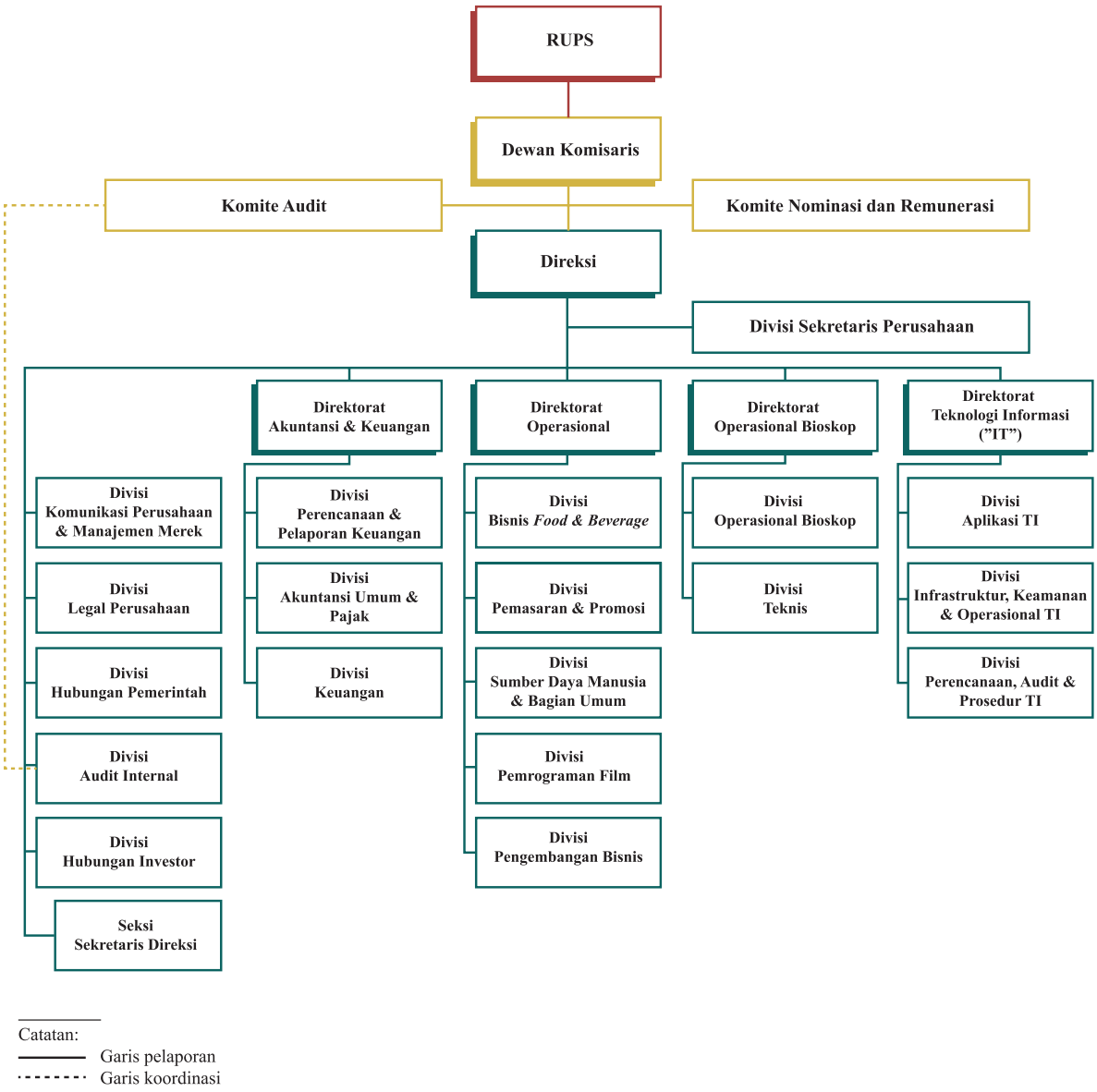
Mengadakan sesi penulisan naskah dan nonton bareng untuk murid-murid SMK Metland

Sejalan dengan komitmen Cinema XXI untuk mendukung dan mendorong momentum perkembangan industri film Indonesia, Cinema XXI mengadakan sesi “Diskusi Asik Penulisan Naskah dan Nonton Bareng” pada bulan Februari 2023. Kegiatan ini diluncurkan oleh Cinema XXI bersama dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan SMK Metland, yang menyasar murid sinematografi di SMK Metland. Cinema XXI menayangkan “Cek Toko Sebelah 2” di bioskop bersama dengan Starvision, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi dengan Ernest Prakasa, sutradara dan penulis naskah “Cek Toko Sebelah 2”.

Sebagai pemain dalam industri film nasional, Cinema XXI mengakui bahwa mendukung pembuat film dan sutradara lokal dalam membuat film yang berkualitas tinggi sangatlah penting untuk pertumbuhan industri film nasional. Bentuk dukungan tersebut meliputi pentingnya mengembangkan bakat penulis naskah di Indonesia. Kegiatan “Diskusi Asik Penulisan Naskah dan Nonton Bareng” ini bertujuan untuk menunjukkan kepada generasi muda Indonesia akan pentingnya peran penulis naskah dalam proses produksi film dan menginspirasi bakat-bakat muda. Cinema XXI berencana untuk terus mengadakan kegiatan serupa dengan Perum PFN dan SMK Metland serta mitra lainnya.

Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



11. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia ("**SDM**") merupakan salah satu aset Cinema XXI dan ujung tombak yang berharga. Investasi yang tepat kepada SDM yang tepat akan melahirkan SDM yang handal sehingga dapat melahirkan ide-ide inovatif yang dapat mendukung Cinema XXI meraih tujuan bisnis. Cinema XXI sangat menyadari arti penting SDM dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta keberlanjutan usaha Cinema XXI. Oleh karena itu, Cinema XXI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM.

Divisi Sumber Daya Manusia yang menjadi penanggung jawab terhadap pengelolaan SDM di Cinema XXI senantiasa merancang kebijakan yang komprehensif, yang mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan karyawan dengan menerapkan kaedah *strategic workforce planning* untuk menanggapi pasar SDM yang sangat kompetitif dan perubahan perilaku pencari kerja, penyusunan struktur organisasi Cinema XXI yang mencerminkan kecepatan dan efektif untuk menghadapi perubahan bisnis seperti

membentuk divisi baru seperti divisi produk digital dengan tujuan memenangkan persaingan bisnis di pasar milenial dan gen Z, penerapan sistem manajemen kinerja meliputi perencanaan, evaluasi, pengarahan dan bimbingan (*coaching & counseling*), dan penilaian kinerja yang digunakan untuk memaksimalkan potensi serta produktifitas seluruh karyawan Cinema XXI, perancangan program pelatihan dan pengembangan untuk menjawab aspirasi/tujuan karir karyawan, peningkatan kompetensi seluruh karyawan sehingga dapat menjawab tantangan bisnis di masa kini serta masa mendatang, perancangan kebijakan remunerasi yang kompetitif dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pengelolaan SDM agar dapat menarik para pencari kerja yang berbakat, hingga proses terminasi karyawan yang dilakukan dengan cara-cara terbaik dan etis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11.1. Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki karyawan sejumlah 2.689 orang, yang terdiri dari 1.361 karyawan tetap dan 1.328 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Desember			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Perseroan				
Tetap	1.267	1.215	1.120	1.107
Kontrak	3.391	1.848	304	1.003
	4.658	**3.063**	**1.424**	**2.110**
Perusahaan Anak				
Tetap	296	269	235	254
Kontrak	1.076	563	82	325
	1.372	**832**	**317**	**579**
Jumlah	**6.030**	**3.895**	**1.741**	**2.689**

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

	31 Desember			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Perseroan				
Manajemen senior	8	6	6	7
Manajer dan supervisor	317	303	289	276
Staf dan non staf	942	906	825	824
	1.267	**1.215**	**1.120**	**1.107**
Perusahaan Anak				
Manajemen senior	2	1	2	5
Manajer dan supervisor	115	99	95	97
Staf dan non staf	179	169	138	152
	296	**269**	**235**	**254**
Jumlah	**1.563**	**1.484**	**1.355**	**1.361**

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan

	31 Desember			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	213	225	217	229
D3	58	55	49	52
Non-akademi	996	935	854	826
	1.267	**1.215**	**1.120**	**1.107**

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Anak				
S1 atau lebih tinggi	49	55	51	76
D3	9	7	6	4
Non-akademi	238	207	178	174
	296	**269**	**235**	**254**
Jumlah	**1.563**	**1.484**	**1.355**	**1.361**

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
>50 tahun	103	87	98	94
41 - 50 tahun	246	243	245	258
31 - 40 tahun	502	512	507	511
<30 tahun	416	373	270	244
	1.267	**1.215**	**1.120**	**1.107**
Perusahaan Anak				
>50 tahun	18	16	14	15
41 - 50 tahun	49	46	49	54
31 - 40 tahun	115	130	112	119
<30 tahun	114	77	60	66
	296	**269**	**235**	**254**
Jumlah	**1.563**	**1.484**	**1.355**	**1.361**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Kantor pusat	361	364	341	351
Bioskop	631	601	566	541
F&B	224	214	181	183
Ballroom	51	36	32	32
	1.267	**1.215**	**1.120**	**1.107**
Perusahaan Anak				
Bioskop	200	185	161	155
F&B	56	51	40	39
Digital platform	40	33	34	60
	296	**269**	**235**	**254**
Jumlah	**1.563**	**1.484**	**1.355**	**1.361**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Jakarta	370	296	269	248
Jawa (di luar Jakarta)	786	809	746	762
Kalimantan	12	12	12	11
Bali dan Nusa Tenggara	19	15	12	10
Maluku	1	1	-	-
Sulawesi	4	5	6	5
Sumatra	75	74	72	69
Papua	-	3	3	2
	1.267	**1.215**	**1.120**	**1.107**

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Anak				
Jakarta	63	55	48	71
Jawa (di luar Jakarta)	97	90	82	87
Kalimantan	38	39	34	29
Bali dan Nusa Tenggara	10	8	7	6
Maluku	3	3	3	2
Sulawesi	37	31	26	25
Sumatra	43	39	31	30
Papua	5	4	4	4
	296	**269**	**235**	**254**
Jumlah	**1.563**	**1.484**	**1.355**	**1.361**

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

11.2. Manajemen senior

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan didukung oleh sejumlah kepala divisi berpengalaman. Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing kepala divisi tersebut:

Sunaryo. Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Pemrograman Film sejak tanggal 1 Juli 2011 dan memiliki pengalaman selama 36 tahun di industri bioskop.

Suprayitno. Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2022 dan memiliki pengalaman selama 33 tahun di industri bioskop. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Senior Government Relation Specialist* Cinema XXI (2017-2021). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang teknik (jurusan teknik perminyakan) dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1986.

David Sadeli. Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis sejak tanggal 1 Januari 2023 dan memiliki pengalaman selama 32 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Bioskop Cinema XXI (2016-2022) dan General Manager (2006-2015).

Maria Sriwahju Asti Pranoto. Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi Umum & Pajak sejak tanggal 22 Agustus 2016 dan memiliki pengalaman selama 29 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Biaya dan Penetapan Harga di Rumah Sakit Omni (2015-2016) dan Kepala Divisi Akuntansi & Pajak (2010-2015). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1994.

Ilham Idharsa. Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Bagian Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 dan memiliki pengalaman selama 26 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Affairs & Analytics Manager (2018-2020) dan General Manager HRD & GA di PT. Multindo Auto Finance (2011-2018). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu geofisika dari Universitas Indonesia pada tahun 1996.

Indah Tri Wahyuni. Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Legal Perusahaan sejak tanggal 13 Februari 2017 dan memiliki pengalaman selama 26 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Legal di Yayasan Putera Sampoerna (2010-2016). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1996.

Khristianto Herwahyudi. Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Aplikasi TI sejak tanggal 17 April 2018 dan memiliki pengalaman selama 22 tahun di industri teknologi informasi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Vice President* (produk) di PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (2015-2017). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu komputer dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2000.

B.E. Bernadetha Dewinta Hutagaol. Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan & Manajemen Merek sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan memiliki pengalaman selama 16 tahun di industri merek dan komunikasi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior General Manager, Kepala Divisi Komunikasi, Merek dan Pengembangan Masyarakat di Combiphar (2018-2019) dan sebagai *Head Country Communication* di Bosch Indonesia (2015-2018). Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2009.

Hilda. Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan sejak tanggal 1 Juli 2020 dan memiliki pengalaman selama 12 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau bertugas di Departemen Audit Internal Cinema XXI (2017-2020) dan berkarir di KPMG Siddharta Widjaja & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai Manager (2010-2017). Beliau memperoleh gelar Magister dalam bidang manajemen dari Universitas Tarumanagara, Indonesia pada tahun 2013.

Yosua Danny Devara. Warga Negara Indonesia, berusia 31 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Produk Digital sejak tanggal 24 Oktober 2022 dan memiliki pengalaman selama 12 tahun di industri perbankan, konsultasi, teknologi, dan gaya hidup. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Senior Product Manager* di Traveloka (2021-2022). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang manajemen dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 2011.

Andrew Pangestu. Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Beliau telah menjabat sebagai *Chief Technology Officer* sejak tahun 2017 dan memiliki pengalaman selama 20 tahun di industri IT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Pengiriman dan Operasi di PT Emerio Indonesia (2011-2017). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Parahyangan, Indonesia pada tahun 1994.

Helen Riyani Tanzil. Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor sejak tanggal 1 Februari 2023 dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Vice President* Hubungan Investor di PT Ace Hardware Indonesia Tbk (2009-2023) dan Kepala Hubungan Investor di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (2007-2009). Beliau memperoleh gelar Magister dalam bidang administrasi bisnis dari National University Singapore pada tahun 1999.

11.3. Peraturan perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.210507018/B/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang masih berlaku sampai dengan 19 Agustus 2023.

11.4. Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk memberikan standar kualitas tertinggi dalam semua aspek bisnis, Cinema XXI berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Cinema XXI mendorong setiap karyawan untuk mengambil peran aktif dalam menemukan dan mengembangkan tujuan karirnya dengan cara yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Cinema XXI saat ini memiliki berbagai program pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, yang meliputi program pengembangan wajib, pelatihan eksternal, pertukaran pengetahuan dan pengembangan manajerial, yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan. Untuk lebih memotivasi karyawan, terdapat berbagai jenis pekerjaan dan pilihan karir dalam organisasi Cinema XXI dengan tantangan yang berbeda pada setiap tingkatannya, yang dapat dipilih oleh karyawan. Hal ini telah berhasil menciptakan lingkungan di mana karyawan terus menantang diri sendiri untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengambil tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan Cinema XXI. Kesempatan ini juga diberikan kepada karyawan berusia muda (di bawah 40 tahun) untuk mengambil posisi yang lebih senior apabila mereka merasa siap.

11.5. Sarana kesejahteraan

Cinema XXI telah menetapkan skema kompensasi dan tunjangan yang menjunjung gagasan bahwa "karyawan terbaik layak mendapatkan penghargaan terbaik." Skema kompensasi dan tunjangan seperti itu telah terbukti, berdasarkan pengalaman Cinema XXI, dapat memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik. Skema kompensasi dan tunjangan Cinema XXI memiliki beberapa aspek termasuk paket promosi, asuransi kesehatan dan kesejahteraan karyawan, insentif yang kompetitif yang diberikan berdasarkan kontribusi karyawan dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan dan terakhir skema bonus tahunan yang memberikan imbalan kepada karyawan berdasarkan indikator kinerja utama yang relevan atau pencapaian dalam penilaian berbasis kinerja dalam departemennya masing-masing. Selain itu, paket kompensasi Cinema XXI mencakup berbagai macam manfaat, termasuk tunjangan makan, transportasi, telekomunikasi, perumahan, relokasi, dukungan pernikahan, kelahiran anak dan belasungkawa (untuk kehilangan anggota keluarga), insentif untuk kontribusi penjualan, promosi dan bekerja selama hari libur dan manfaat non-tunai seperti BPJS (Ketenagakerjaan, Kesehatan, Jaminan Pensiun) untuk menjamin kesejahteraan karyawan dan keluarganya sesuai dengan peraturan Pemerintah, pemberian tiket film gratis, asuransi swasta dan kendaraan operasional untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas, dan efisiensi.

Sejalan dengan visi pertumbuhan berkelanjutan Cinema XXI, Cinema XXI mendorong karyawan untuk terus terlibat dan mendukung perkembangan komunitas.

11.6. Pemenuhan upah minimum regional

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI telah memenuhi kewajiban pemberian upah minimum kepada seluruh karyawannya sesuai dengan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.7. Serikat pekerja

Karyawan Cinema XXI tidak tergabung dalam serikat pekerja dan Cinema XXI tidak pernah mengalami mogok kerja yang berdampak material. Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI memiliki hubungan baik dengan karyawan dan bahwa karyawan berkontribusi penting bagi pertumbuhan dan daya saing Cinema XXI.

12. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Anak, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau rencana Penawaran Umum Perdana Saham secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 11 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan secara langsung (%)	Kepemilikan secara tidak langsung (%)
1.	PT Gading Adipermai ("**GAP**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1989	1989	70,00%	-
2.	PT Intra Mandiri ("**IMD**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1992	1992	99,99%	-
3.	PT Kartika Insani Raya ("**KIR**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	99,17%	0,83% melalui SSD
4.	PT Kharisma Maju Abadi ("**KMA**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1990	1990	70,00%	-
5.	PT Lestari Mitra Sembada ("**LMS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2000	2006	75,00%	-
6.	PT Lia Anugrah Semesta ("**LAS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1990	70,00%	-
7.	PT Nusantara Elang Sejahtera ("**NES**")	Penyedia *platform* tiket online	Jakarta Selatan	2017	2017	60,00%	-
8.	PT Prima Mandala ("**PMD**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Malang	1992	1989	-	50,00% melalui IMD
9.	PT Pan Mitra Sembada ("**PMS**")	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	-
10.	PT Sanggar Usaha Mandiri ("**SUM**")	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	33,33% melalui SSD
11.	PT Sekar Saridana (**"SSD"**)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2016	2002	99,83%	0,17% melalui IMD

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI:

LMS

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

LMS, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. LMS didirikan dengan nama PT Binaprima Lokalestari berdasarkan Akta Pendirian No. 239 tanggal 14 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 7 Maret 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.1284.HT.01.01-Th'90 tanggal 7 Maret 1990, yang telah di daftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1130/1990 tanggal 4 Juni 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 1990, dan Tambahan No. 2601 ("**Akta Pendirian LMS**").

Akta Pendirian LMS telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LMS No. 18 tanggal 14 April 2023, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0110673 tanggal 14 April 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0074821.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 ("**Akta No. 18/2023**"). Berdasarkan Akta No. 18/2023, para pemegang saham LMS telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) dari anggaran dasar LMS.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar LMS, maksud dan tujuan LMS adalah berusaha dalam bidang antara lain aktivitas pemutaran film dan restoran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, LMS menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran sejak tahun 2006.

LMS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Jenis/No. Izin	Keterangan
1.	NIB No. 9120408732096, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah) tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir kali pada 20 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh BKPM.	Masa berlaku tidak disebutkan.
2.	NPWP No. 01.611.122.1-032.000 tanggal 20 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.
3.	SKT No. S-137/KT/KPP.050803/2022 tanggal 14 November 2022, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.
4.	SPPKP No. S-123/PKP/KPP.050803/2022 tanggal 14 November 2022, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB LMS No. 72 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020300.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094777 tanggal 1 November 2016 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129529.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 November 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LMS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**640**	**640.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sejahtera Raya	480	480.000.000	75,00
PT Inti Investama Abadi	160	160.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**640**	**640.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Perseroan mulai melakukan investasi pada LMS sejak tahun 2000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham LMS No. 45 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0034624 tanggal 21 Januari 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0012191.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LMS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jimmy Herjanto Darmasasmita
Komisaris : David Sadeli

Direksi
Direktur Utama : Suprayitno
Direktur : Ali Sastro

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting LMS di bawah ini bersumber dari laporan keuangan LMS pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019.

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jumlah aset	594.715	685.225	736.453	684.369
Jumlah liabilitas	220.150	214.009	230.045	123.407
Jumlah ekuitas	374.565	471.215	506.408	560.962

Total aset LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penyusutan aset tetap dan penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran dividen.

Total liabilitas LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) dan mencatatkan liabilitas sewa.

Total ekuitas LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh pembayaran dividen.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Pendapatan	631.022	218.755	193.695	984.891
Laba (rugi) usaha	199.560	(33.860)	(63.797)	230.501
Laba (rugi)	161.804	(35.848)	(53.953)	178.182

Pendapatan LMS dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami tren penurunan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini juga menyebabkan LMS mencatatkan rugi usaha dan rugi pada tahun 2020 dan 2021.

Pendapatan LMS pada tahun 2022 berangsur-angur meningkat sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19. Sebagai hasilnya, LSM kembali mencatatkan laba usaha dan laba pada tahun 2022.

Pendapatan LMS memberikan kontribusi sebesar 14,3% dari total pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Mayoritas bioskop Cinema XXI terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi tiga tingkatan berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan atas PDB dan PPP masing-masing kota. Kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI memiliki rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penonton yang merupakan penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya pertama kali membuka teater bioskop dengan konsep premium di Indonesia

dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek "The Premiere" pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket, dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID, di mana TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan "*Brand of the Year*" dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan "*Millennial's Top Brand Award*" dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan "*Better Brand Award*" dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank pada tahun 2019, "*Industry Champions of the Year Award*" dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan "*Jakarta Tourism Award*" dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatat sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatatkan sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih[8] sebesar 11,5% dan marjin EBITDA[9] sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan bioskop Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki keuangan yang kuat dan tangguh didukung didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

8 Dihitung dari laba dibagi dengan total pendapatan.
9 Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting" sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

2. Keunggulan bersaing

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kesuksesan Cinema XXI sampai saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa depan dikarenakan Cinema XXI memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Cinema XXI merupakan pemimpin pasar yang terkemuka dengan merek yang telah dikenal luas

Cinema XXI adalah operator bioskop terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2022, menurut Euromonitor, dengan pangsa pasar sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% masing-masing berdasarkan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar bioskop. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Euromonitor, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatat pendapatan *gross box office* hampir lima kali dan pendapatan *gross box office* per layar sekitar 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan pesaing Cinema XXI terdekat.

Kondisi tersebut di atas membuat Cinema XXI berada pada posisi yang baik untuk menerima manfaat dari industri bioskop di Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan beserta prospek pertumbuhannya. Pada tahun 2022, jumlah penonton Cinema XXI telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 telah mencapai 63,9% dari pendapatan pada tahun 2019, meskipun bioskop Cinema XXI baru dibuka kembali dan beroperasi pada kapasitas penuh sejak bulan Mei 2022. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan dan laju tingkat penetrasi layar bioskop di Indonesia, serta posisi Cinema XXI sebagai pemimpin pasar dengan pangsa pasar terbesar, Cinema XXI berada pada posisi yang baik untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar di industri bioskop di Indonesia, yang menurut Euromonitor diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 25,1% dari Rp6,7 triliun pada tahun 2022 untuk mencapai total pasar tersedia sebesar Rp20,6 triliun pada tahun 2027.

Cinema XXI memiliki merek yang telah dikenal luas dan hal ini merupakan salah satu aset terpenting Cinema XXI. Kemampuan Cinema XXI untuk menawarkan layanan berkualitas dengan harga terjangkau selama bertahun-tahun telah menjadikan Cinema XXI sebagai bioskop pilihan. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI merupakan merek bioskop paling dikenal dan operator bioskop yang paling banyak dikunjungi di Indonesia pada tahun 2022. 97,0% dari responden dalam survei mengenali merek Cinema XXI dan mendekati 80,0% dari responden menyatakan bahwa Cinema XXI merupakan merek bioskop pertama yang terlintas dalam pikiran mereka mengenai bioskop. Cinema XXI juga telah menerima berbagai penghargaan, seperti *"Brand of the Year"* dalam Kategori Hiburan (Bioskop) dari World Branding Awards pada tahun 2017, 2018 dan 2019, serta *"Millennial's Top Brand Award*" dari Warta Ekonomi pada tahun 2019.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kekuatan merek Cinema XXI dan skala jejaring bioskop yang luas telah berperan signifikan dalam mendorong tingkat kunjungan organik, menegosiasikan perjanjian sewa yang menguntungkan, dan mendapatkan lokasi pusat perbelanjaan yang strategis untuk bioskop.

Bioskop Cinema XXI berada di lokasi strategis dengan arus pengunjung yang tinggi

Cinema XXI berkeyakinan bahwa pertumbuhan dan kesuksesan bisnis Cinema XXI tidak terlepas dari strategi Cinema XXI untuk membuka bioskop di pusat perbelanjaan, yang didukung dengan profil penyewa yang menarik dan proses pemilihan pusat perbelanjaan yang seksama.

Bioskop Cinema XXI berada di lokasi pusat perbelanjaan dan di kota yang strategis dengan profil demografi yang memiliki pendapatan siap dibelanjakan yang semakin tinggi dan gaya hidup yang semakin modern. Bioskop Cinema XXI umumnya berada di pusat perbelanjaan di kota besar di Indonesia yang memiliki arus pengunjung yang tinggi dan berfungsi sebagai *one-stop shop* untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat kelas menengah, dengan pertokoan ritel, restoran dan toko lainnya yang melengkapi pengalaman menonton film. Dengan memilih lokasi bioskop di pusat perbelanjaan yang besar dan dikenal luas - termasuk Summarecon Mal Kelapa Gading di Jakarta Utara, Tunjungan Plaza di Jawa Timur dan Mal Pakuwon di Surabaya - bioskop Cinema XXI dapat diakses dengan mudah

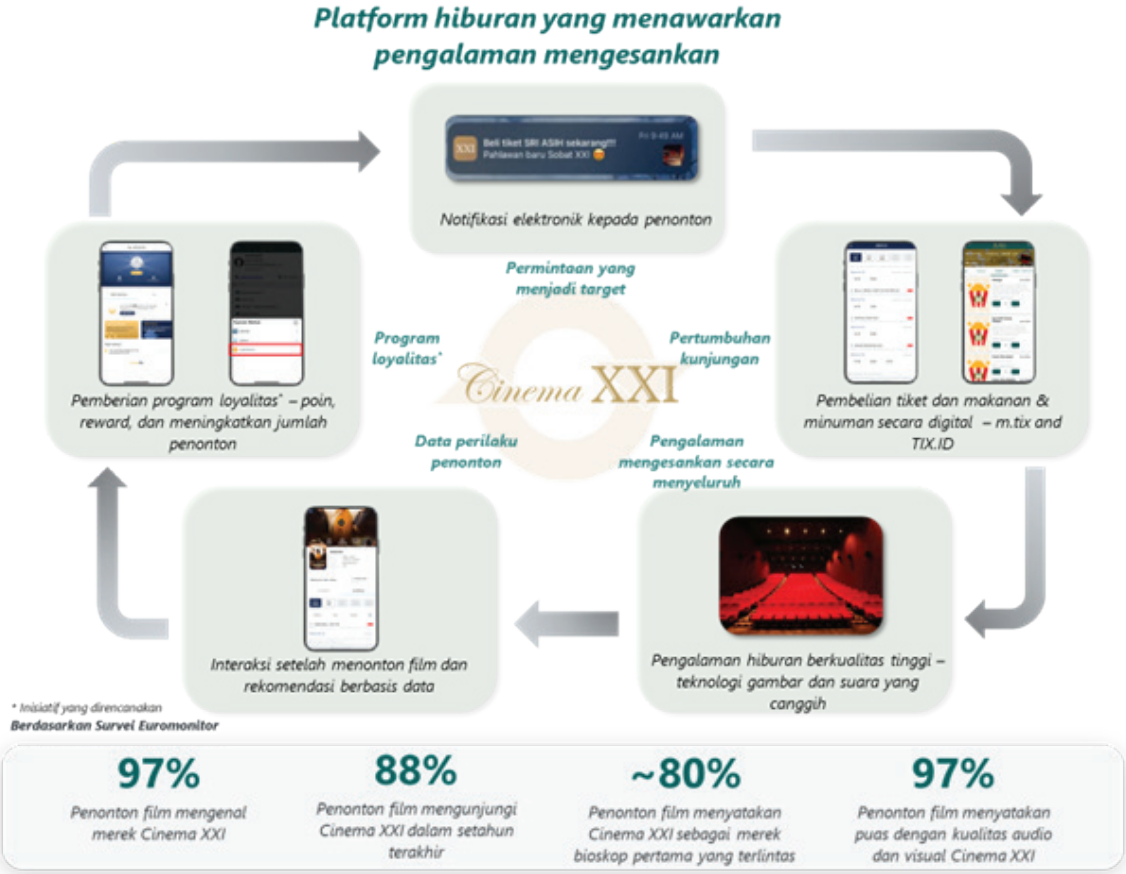
oleh penggemar film dan mendapatkan manfaat dari pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut untuk mengunjungi toko ritel, restoran dan toko lainnya. Keberadaan bioskop Cinema XXI di pusat perbelanjaan yang berfasilitas lengkap menyebabkan Cinema XXI bisa menjangkau kelompok pengunjung yang lebih luas dan datang ke pusat perbelanjaan untuk tujuan lain. Pengunjung pusat perbelanjaan tersebut mungkin memutuskan untuk menonton film di bioskop Cinema XXI karena lokasi bioskop yang nyaman. Dengan mempertimbangkan karakteristik pusat perbelanjaan tersebut, Cinema XXI berkeyakinan akan dapat meningkatkan basis penonton yang bukan penggemar film dalam jumlah relatif besar, selain kunjungan berulang dari para penggemar film. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tingkat keterisian di seluruh bioskop Cinema XXI. Dengan memanfaatkan arus pengunjung yang tinggi di pusat perbelanjaan dan beragam penyewa yang melengkapi penawaran dalam pusat perbelanjaan, Cinema XXI akan dapat mencapai tingkat keterisian yang tinggi, menjangkau basis penonton yang lebih luas dan kunjungan berulang.

Selain itu, Cinema XXI memiliki kemampuan untuk memilih lokasi bioskop secara selektif dikarenakan Cinema XXI, sebagai penyewa, berkeyakinan dapat menarik arus pengunjung dan menempati area di pusat perbelanjaan yang biasanya dianggap kurang menarik oleh penyewa potensial lain (seperti lantai tinggi di sebuah pusat perbelanjaan). Cinema XXI berkeyakinan bahwa pengembang pusat perbelanjaan juga memiliki preferensi untuk menyertakan penyewa dengan merek yang dikenal luas seperti Cinema XXI ke dalam portofolio penyewa mereka. Cinema XXI juga telah menjalin dan membina hubungan yang kuat dengan pengembang pusat perbelanjaan, seperti grup Pakuwon Jati Grup, grup Trans Retail dan grup Jakarta Intiland, dan hubungan tersebut telah membuka banyak peluang penyewaan bagi Cinema XXI, termasuk sebagai penyewa utama di pusat perbelanjaan baru yang sedang dikembangkan. Hubungan Cinema XXI dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan terkemuka sudah berlangsung lama karena Cinema XXI telah menandatangani kontrak penyewaan jangka panjang dengan mereka dan hubungan ini tidak mudah untuk digantikan.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendekatan analisis berbasis data untuk menentukan lokasi bioskop Cinema XXI yang baru merupakan faktor penting yang berperan dalam kesuksesan Cinema XXI. Bioskop Cinema XXI saat ini tersebar di 55 kota di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2022, 67,4% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 1 dan sekitarnya, sedangkan 19,9% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 2 dan 12,7% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 3. Cinema XXI melakukan serangkaian evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria, di mana hal ini memungkinkan untuk secara berkelanjutan memperluas cakupan wilayah geografis. Pada tahun 2019, Cinema XXI telah membuka 34 bioskop baru dan hanya melakukan penutupan tiga bioskop. Selain itu, Cinema XXI juga tidak melakukan penutupan satupun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan telah membuka tiga bioskop baru pada tahun 2022.

Platform hiburan yang menawarkan pengalaman menonton film yang mengesankan secara menyeluruh di Indonesia

Cinema XXI memiliki platform hiburan yang menawarkan pengalaman menonton film yang mengesankan secara menyeluruh, dengan membantu penonton Cinema XXI mulai dari penelusuran film yang akan ditonton dan lokasi bioskop, pemesanan dan pembelian tiket, pengalaman menonton film sampai dengan berbagi pengalaman pasca menonton film. Sejak Cinema XXI berdiri, penonton merupakan faktor penggerak di balik semua inisiatif pengembangan yang dilakukan oleh Cinema XXI. Dedikasi Cinema XXI untuk memberikan pengalaman hiburan yang luar biasa telah mendorong pertumbuhan dan mengokohkan posisi Cinema XXI sebagai pemimpin pasar terkemuka. Cinema XXI terus berkomitmen dalam memberikan pengalaman terbaik kepada penonton, sebagaimana dibuktikan oleh merek Cinema XXI yang dikenal luas. Cinema XXI berkeyakinan bahwa etos Cinema XXI yang memprioritaskan kepuasan penonton sangat penting dalam meningkatkan loyalitas penonton.



Permintaan dari pasar yang ditargetkan: Cinema XXI menggunakan notifikasi elektronik yang dipersonalisasi untuk memberikan informasi mengenai film dan promosi dalam rangka mendorong pemesanan tiket bioskop.

Pembelian tiket secara digital: Cinema XXI menyediakan media yang nyaman dan efisien melalui m.tix dan TIX.ID untuk melakukan reservasi tiket bioskop di muka dan memilih tempat duduk yang disukai. Melalui m.tix dan TIX.ID, penonton dapat dengan mudah mengakses informasi ketersediaan tiket bioskop dan mendapatkan rekomendasi serta promosi yang dipersonalisasi, serta melakukan pemesanan tiket secara nyaman dan mudah, di samping melihat ulasan dari pengguna lainnya, untuk TIX.ID.

Pembelian F&B secara digital: Selain untuk pembelian tiket bioskop, penonton dapat dengan nyaman menggunakan m.tix untuk memesan berbagai produk F&B.

Pengalaman hiburan: Pada saat penonton masuk ke bioskop, Cinema XXI memberikan pengalaman hiburan imersif yang berkualitas tinggi. Cinema XXI menggunakan teknologi audiovisual tercanggih dan pilihan tempat duduk yang mewah untuk menghadirkan pengalaman menonton terbaik.

Interaksi setelah menonton film: Setelah penonton meninggalkan bioskop, Cinema XXI terus berinteraksi dengan penonton secara digital dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk film-film lain yang mungkin disukai oleh mereka. Cinema XXI juga menyediakan ruang di platform digitalnya yang dapat digunakan oleh penonton untuk meninggalkan ulasan mengenai film dan berbagi pengalaman menonton.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa integrasi sistem reservasi tiket digital dengan database penonton yang besar, serta penawaran produk yang lengkap dan berkualitas premium telah menjadikan Cinema XXI sebagai platform yang dapat menyediakan pengalaman hiburan yang menyeluruh.

Cinema XXI memberikan penawaran yang beragam untuk melayani berbagai segmen penggemar film

Cinema XXI merupakan operator bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI menempati posisi yang unggul dalam setiap aspek penawaran di dalam industri bioskop. Cinema XXI terus beradaptasi untuk mengakomodasi perilaku dan preferensi penonton yang dinamis dan menyediakan penawaran yang beragam untuk melayani segmen penggemar film yang berbeda.

Tipe

Tipe teater yang beragam. Cinema XXI berkeyakinan bahwa berbagai tipe teater dengan harga tiket yang berbeda memungkinkan Cinema XXI melayani pasar tersedia di Indonesia yang beragam dan besar, sehingga menjadikan Cinema XXI sebagai operator bioskop utama bagi beragam penonton. Cinema XXI menawarkan tiga pilihan teater utama untuk menikmati pengalaman sinematik, meliputi Regular/ Deluxe, The Premiere, dan IMAX, masing-masing dengan target penonton dan harga tiket yang berbeda. Strategi penetapan harga tiket yang digunakan oleh Cinema XXI mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain tipe teater dan lokasi bioskop. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 1.114 layar teater Regular/Deluxe, 93 layar teater The Premiere, dan sembilan layar teater IMAX.

Konten

Konten film yang luas. Cinema XXI menerapkan pendekatan hiper lokal yang dinamis dalam pemutaran film untuk melayani permintaan dari masyarakat di sekitar lokasi bioskop. Cinema XXI menawarkan berbagai film domestik untuk mengurangi ketergantungan pada konten film internasional. Cinema XXI percaya bahwa konten domestik dapat menarik dan melayani segmen masyarakat yang lebih luas, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan ke bioskop. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman operasional di kota Tier 2 dan kota Tier 3, masyarakat setempat di kota-kota tersebut lebih memilih untuk menonton film domestik. Pada bulan Mei 2022, satu film internasional yang diharapkan menjadi *blockbuster*, dan satu film domestik dirilis dalam bulan yang sama. Namun, jumlah penonton konten film domestik dan internasional masing-masing pada bulan tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,2% dan 34,8% dari jumlah penonton di kota Tier 2 dan 64,9% dan 35,1% dari jumlah penonton di kota Tier 3. Pada tahun 2022, penonton Cinema XXI untuk film domestik mencapai rekor baru, dengan konten domestik dan internasional yang diputar di bioskop Cinema XXI masing-masing menyumbang 55,6% dan 44,4% dari jumlah penonton bioskop, yang merupakan kontribusi tertinggi sejak tahun 2008.

F&B

Penawaran F&B yang saling melengkapi: Menu F&B yang ditawarkan oleh Cinema XXI juga dibedakan sesuai karakteristik bioskop. Saat mengkurasi menu F&B, Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya meliputi preferensi masyarakat lokal dan profil pendapatan masyarakat di sekitar lokasi bioskop. Cinema XXI berkeyakinan bahwa menu F&B yang beragam akan menarik pengunjung yang menonton film dan memberikan pengalaman menonton film yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan dari penjualan F&B. Menu F&B Cinema XXI meliputi berbagai masakan mulai dari jajanan hingga makanan berkualitas tinggi. Berdasarkan Survei Euromonitor, 82,0% dari responden menilai menu F&B yang ditawarkan Cinema XXI "Sangat Baik" atau "Baik." Beberapa menu F&B yang lebih unik meliputi croffles, oyakodon, choux dan Kopi Pandan. Bisnis F&B di dalam bioskop Cinema XXI juga mendapatkan dampak positif dari kebijakan yang berlaku umum bahwa penonton hanya diperbolehkan membawa dan mengkonsumsi produk F&B yang dibeli di lokasi selama berada di dalam bioskop. Cinema XXI juga menawarkan menu kombo dan berbagai paket makanan dengan harga menarik untuk mendorong penonton agar membeli lebih banyak produk F&B, sehingga meningkatkan belanja F&B per penonton.

Memperluas jangkauan pelanggan F&B di luar penonton film: Dengan memanfaatkan kekuatan dari menu F&B, dan bertambah luasnya pasar yang tersedia, Cinema XXI telah dapat menjangkau permintaan atas produk F&B dari pengunjung yang tidak menonton film.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis F&B, belanja F&B rata-rata (sebelum pajak) per penonton juga turut meningkat dari Rp17.615 pada tahun 2019 menjadi Rp23.447 pada tahun 2022. Kontribusi penjualan produk F&B terhadap total pendapatan Cinema XXI telah meningkat secara bertahap dari 26,1% pada tahun 2019 menjadi 32,5% pada tahun 2022, yang menunjukkan keunggulan dari penawaran F&B Cinema XXI. Marjin F&B pada tahun 2022 terhitung sebesar 72,4% dan berdampak positif terhadap profil marjin Cinema XXI secara keseluruhan.

Cinema XXI sejak awal berdirinya senantiasa menjadi pelopor dalam teknologi bioskop

Cinema XXI berkeyakinan bahwa inovasi yang dilakukan telah mendukung Cinema XXI untuk selalu menjadi yang terdepan dalam persaingan, meningkatkan pengalaman menonton, dan mendorong arus pendapatan baru yang menguntungkan. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor yang memperkenalkan konsep multipleks modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya membuka teater berkonsep premium pertama dengan kursi yang dapat direbahkan melalui pembukaan teater "The Premiere" pada tahun 2002. Berdasarkan Survei Euromonitor, 52,0% responden yang mengunjungi bioskop menunjukkan preferensi untuk teater tipe premium dan Cinema XXI berkeyakinan bahwa The Premiere adalah pilihan yang disukai oleh masyarakat Indonesia.

Cinema XXI berkeyakinan berada di garis terdepan dalam menghadirkan teknologi canggih dan berfokus untuk memberikan pengalaman sinematik berkualitas tinggi bagi penggemar film. Pada tahun 2012, Cinema XXI menjadi operator bioskop yang mengkonversi seluruh sistem proyeksi film seluloid menjadi digital. Pada tahun yang sama, Cinema XXI juga membuka teater IMAX pertama di sebuah pusat perbelanjaan di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan sembilan dari 10 teater IMAX di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, Cinema XXI menjadi operator jejaring bioskop pertama yang memperkenalkan proyektor laser di teater IMAX di Jakarta. Sebagaimana telah terbukti selama bertahun-tahun, Cinema XXI selalu berupaya menghadirkan teknologi sinematik tercanggih dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam jejaring bioskop, sehingga dapat menyediakan pengalaman sinematik yang premium kepada penonton.

Cinema XXI telah juga meluncurkan dua sistem reservasi tiket berbasis seluler yang inovatif, m.tix dan TIX.ID. m.tix awalnya diluncurkan pada tahun 2006 agar penonton dapat memesan tiket film melalui pesan teks atau SMS dan kemudian sebagai aplikasi berbasis seluler yang tersedia di *Apple App store* pada tahun 2013 dan di *Google Play store* pada tahun 2014, dan saat ini menjadi aplikasi pemesanan tiket berbasis seluler yang banyak digunakan di Indonesia. m.tix merupakan sistem reservasi tiket eksklusif untuk Cinema XXI dan melayani pembelian tiket serta menu F&B yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. TIX.ID diluncurkan pada tahun 2018 dan merupakan sistem reservasi tiket berbasis seluler yang dikembangkan bersama dengan mitra eksternal. TIX.ID memiliki fitur antarmuka yang sederhana, bersih dan mudah digunakan untuk melihat informasi film, rekomendasi film, *voucher deal*, dan film yang sedang maupun akan ditayangkan oleh Cinema XXI dan operator bioskop lainnya. TIX.ID saat ini merupakan satu-satunya platform agregator yang menjual tiket bioskop bagi tiga pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia, termasuk Cinema XXI dan melayani penjualan tiket untuk lebih dari 90,0% dari layar di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berkeyakinan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan potensi monetisasi lebih lanjut yang dapat dibawa oleh sistem reservasi tiket bioskop secara digital di Indonesia. Berdasarkan Euromonitor, reservasi tiket daring telah menyumbang sekitar 35 hingga 40% dari total volume penjualan tiket bioskop di Indonesia pada tahun 2022, dan Cinema XXI memandang bahwa terdapat ruang pertumbuhan yang signifikan untuk meningkatkan penjualan tiket bioskop digital di Indonesia. Sebagai operator bioskop terbesar, Cinema XXI berkeyakinan bahwa sistem reservasi tiket Cinema XXI memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan dengan pesaing yang juga memiliki sistem reservasi tiket bioskop digital. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan m.tix dan TIX.ID secara luas. Meskipun m.tix awalnya dirancang sebagai sistem reservasi tiket, namun saat ini m.tix telah berkembang dengan penambahan opsi pembelian F&B dan telah menjadi metode reservasi tiket yang semakin disukai oleh penonton, mewakili 20,8% dari total volume penjualan tiket bioskop pada tahun 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, sistem reservasi tiket berbasis seluler m.tix memiliki 7,5 juta pengguna dan telah diunduh lebih dari 19 juta kali sejak peluncurannya. m.tix juga telah diakui sebagai salah

satu pemimpin dalam segmen pemesanan tiket bioskop secara digital di Indonesia dan diakui sebagai sepuluh aplikasi hiburan terbaik pada tahun 2020 oleh App Annie Top Publisher Award berdasarkan pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. Keberhasilan TIX.ID juga menunjukkan keunggulan Cinema XXI di bidang ini. Sejak peluncurannya, TIX.ID telah diunduh lebih dari 25 juta kali dan lebih dari 60 juta tiket bioskop telah dibeli di sistem ini. Cinema XXI menjual tiket bioskop secara eksklusif di m.tix dan TIX.ID, di mana hal ini memberikan keunggulan yang besar bagi Cinema XXI di segmen penjualan tiket bioskop digital, mengingat pangsa pasar Cinema XXI yang besar dalam hal pendapatan *gross box office*. Selain itu, Cinema XXI telah bekerja sama dengan mitra eksternal dan investor, yang telah menjadi kunci dalam mendukung peluncuran dan mendorong tingkat penggunaan TIX.ID, melalui dukungan finansial dalam bentuk inisiatif penjualan tiket seperti "beli satu dapat gratis satu" atau distribusi tiket gratis bagi pengguna TIX.ID, yang berdampak pada basis penonton Cinema XXI.

Cinema XXI telah melakukan digitalisasi beberapa kegiatan operasional melalui implementasi papan iklan digital pada titik pemesanan dan pengambilan F&B, untuk memisahkan area pemesanan dan pengambilan produk F&B dalam rangka menyediakan area yang jelas bagi pembeli sesuai status pesanan F&B mereka. Hal ini juga membantu Cinema XXI untuk menentukan jumlah staf yang diperlukan di area pemesanan atau pengambilan pada setiap waktu, sehingga proses layanan lebih lancar dan lebih cepat, serta mencapai tingkat penetrasi yang lebih tinggi. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan sejumlah manfaat, yaitu fleksibilitas lebih banyak dalam mendesain konten, dan kemampuan lebih besar untuk mengendalikan dan mengelola konten yang ditampilkan, serta kemampuan untuk memperbarui konten dan harga secara *real time*. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan peluang monetisasi dan menjadi saluran lain bagi klien iklan Cinema XXI untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Cinema XXI juga menggunakan sistem POS baru yang tersentralisasi, Ravintola, untuk mengelola data secara terpusat, di mana hal ini memberikan fleksibilitas bagi Cinema XXI untuk menawarkan lebih banyak variasi dalam berpromosi dan meluncurkan produk dengan lebih cepat.

Selain itu, Cinema XXI memanfaatkan perangkat lunak seperti *dashboard* Gen 21 dan Ranvintola (sebagai bagian dari Project Digital 21) untuk memperkuat dan mendukung kegiatan operasi dari kegiatan usaha iklan dan F&B, di mana *dashbord* tersebut juga telah membantu Cinema XXI untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebelumnya, seperti diantaranya, kurangnya *data master*, kurangnya pemantauan yang efektif, ketergantungan pada proses manual, dan pembaruan biaya inventaris berkala. *Dashboard* Gen 21 dan Ravintola membantu kegiatan operasional iklan dan F&B dengan menyediakan sistem yang terpusat dan terstandarisasi dalam input data, mengurangi intervensi manual, memungkinkan Cinema XXI memantau pesanan dan menampilkan status, serta memungkinkan pembaruan biaya inventaris terus-menerus.

Cinema XXI memiliki kinerja operasional dan keuangan yang kuat di berbagai metrik operasional utama serta posisi keuangan yang solid

Cinema XXI telah menunjukkan kepemimpinannya di dalam pasar melalui kinerja operasional dan keuangan yang solid selama bertahun-tahun. Cinema XXI memiliki sumber pendapatan yang beragam, meliputi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, produk F&B, layanan iklan, dan lainnya, termasuk *e-commerce*, imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID, dan biaya layanan dari bisnis acara. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kinerja keuangan yang tangguh dan indikator kinerja utama yang kuat tidak terlepas dari kehadiran Cinema XXI secara luas di Indonesia, konten yang beragam, dan teknologi canggih, sehingga Cinema XXI dapat menghadirkan pengalaman menonton film yang lebih baik, menawarkan beragam pilihan F&B, dan memiliki kemampuan untuk melakukan penghematan biaya yang didukung oleh strategi model bisnis aset ringan (sebagaimana ditunjukkan dengan fakta bahwa Cinema XXI menyewa sekitar 99,6% dari bioskop per tanggal 31 Desember 2022).

Selama pandemi COVID-19, Cinema XXI berhasil menerapkan berbagai langkah efisiensi, termasuk menyesuaikan jumlah personil, menunda belanja modal untuk proyek-proyek baru serta mengurangi aktivitas pemasaran. Sebagai hasilnya, Cinema XXI berhasil menghadapi tantangan operasional yang timbul dan berhasil keluar dari pandemi COVID-19 dengan struktur biaya yang lebih efisien dan marjin operasi yang lebih baik. Hubungan yang kuat antara Cinema XXI dengan pengembang dan pemilik pusat perbelanjaan juga memungkinkan Cinema XXI untuk mendapatkan tarif sewa yang lebih kompetitif, dan bahkan periode bebas sewa selama masa pandemi COVID-19 di mana terjadi pembatasan kapasitas

serta jam operasional pusat perbelanjaan. Upaya penghematan biaya yang dilakukan Cinema XXI untuk bisnis F&B seperti rasionalisasi SKU produk F&B telah membantu Cinema XXI dalam mengelola biaya agar lebih efektif.

Dengan kinerja operasional dan keuangan Cinema XXI yang solid, termasuk arus kas yang dihasilkan, Cinema XXI dapat mengimplementasi strategi usaha yang lebih efektif, termasuk penambahan jumlah layar bioskop.

Cinema XXI didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman, dengan rekam jejak yang terbukti

Cinema XXI memperoleh manfaat dari pengalaman para pendiri dan tim kepemimpinan yang memiliki pengetahuan dan keahlian industri yang luas. Jajaran direksi dan manajemen senior Cinema XXI memiliki pengetahuan mendalam tentang industri bioskop dan basis penonton bioskop di Indonesia, serta memiliki keterampilan operasional dan manajerial yang kuat untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Cinema XXI. Tim kepemimpinan Cinema XXI yang berpengalaman telah membantu memimpin dan mengarahkan Cinema XXI untuk melalui beberapa periode ketidakpastian, seperti pandemi COVID-19, sekaligus membantu Cinema XXI dalam meningkatkan dan mempertahankan kepemimpinan Cinema XXI dalam pangsa pasar.

Direksi dan manajemen senior Perseroan telah berperan penting dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan Cinema XXI. Direksi Perseroan mengadakan rapat mingguan dan bulanan secara rutin untuk mendiskusikan perkembangan inisiatif yang direncanakan dalam tahun berjalan, dan melaporkan pencapaian operasional dan keuangan Cinema XXI serta perkembangan terkini mengenai industri kepada Dewan Komisaris. Cinema XXI bermaksud untuk terus memanfaatkan pengalaman tim kepemimpinan untuk lebih mendorong pertumbuhan usaha dan secara strategis menyasar peluang pasar baru.

3. Strategi usaha

Cinema XXI bermaksud untuk menghadirkan pengalaman menonton film yang unik bagi pelanggan melalui strategi berikut:

Memperluas jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia

Cinema XXI berencana untuk terus memperluas jejaring bioskop di Indonesia karena industri bioskop di Indonesia diyakini masih memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Berdasarkan Euromonitor, pendapatan *gross box office* di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari Rp4,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp12,4 triliun pada tahun 2027, yang mencerminkan CAGR sebesar 23,7%. Pertumbuhan Cinema XXI juga didukung oleh tren pasar di Indonesia, termasuk bertambahnya penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi, peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan pengeluaran konsumen, menurut Euromonitor. Cinema XXI juga yakin bahwa terdapat permintaan yang signifikan untuk membuka lebih banyak bioskop di seluruh Indonesia. Dalam hal penetrasi layar, Indonesia memiliki tingkat penetrasi sebesar 7,6 layar per satu juta penduduk pada tahun 2022, yang sangat rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Tiongkok berdasarkan Euromonitor.

Cinema XXI berencana untuk terus memanfaatkan hubungan yang kuat dengan pengembang real estat komersial di Indonesia, dan mengejar peluang ekspansi bioskop dan layar berformat premium secara organik di kota Tier 1. Cinema XXI telah lama menjalin hubungan baik dengan berbagai pengembang dan pemilik pusat perbelanjaan, yang biasanya memprioritaskan Cinema XXI menjadi penyewa utama di lokasi pusat perbelanjaan baru yang akan dikembangkan, di mana hal ini merupakan keuntungan sebagai pemain pertama yang mendapatkan penawaran. Cinema XXI bermaksud untuk memanfaatkan hubungan tersebut agar dapat membuka bioskop baru di lokasi yang selektif. Meskipun Cinema XXI telah membuka banyak bioskop secara strategis di kota Tier 1 dalam beberapa tahun terakhir, Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat peluang untuk memperluas jejaring bioskop di kota Tier 1. Untuk kota Tier 1, fokus Cinema XXI adalah untuk menyediakan layanan yang lebih premium dan mewah kepada penonton. Layanan ini lebih disukai oleh penonton di kota Tier 1 dan umumnya memberikan

marjin lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan non-premium. Cinema XXI juga berkeyakinan bahwa terdapat peluang pertumbuhan cukup besar bagi Cinema XXI di kota Tier 2 dan kota Tier 3, sejalan peningkatan pendapatan siap dibelanjakan dan pengeluaran konsumen. Cinema XXI berkeyakinan bahwa pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan yang kuat pada akhirnya akan memengaruhi pola konsumsi dan meningkatkan permintaan akan barang dan layanan diskresioner termasuk hiburan. Perkembangan dan pertumbuhan industri film nasional, dan bertambah banyaknya rilis film domestik selanjutnya juga akan menarik jumlah penonton di kota Tier 2 dan kota Tier 3, yang biasanya, menurut pengalaman usaha Cinema XXI, memiliki preferensi lebih kuat untuk menonton film domestik. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, fokus Cinema XXI di kota Tier 2 dan kota Tier 3 adalah untuk memperkuat kehadiran di kota-kota tersebut, yang akan menempatkan Cinema XXI pada posisi yang baik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan memperkuat pangsa pasar dalam industri bioskop di Indonesia.

Cinema XXI berencana untuk terus menggunakan pendekatan berbasis data dalam menganalisis dan menentukan lokasi bioskop baru. Keputusan untuk membuka teater antara tipe reguler dan tipe yang lebih permium akan didasarkan pada selera dan pendapatan masyarakat di sekitar bioskop.

Cinema XXI bermaksud untuk secara selektif mengejar peluang yang akan memperkokoh posisi sebagai pemimpin pasar dan meningkatkan kinerja keuangan, memperluas penawaran produk yang ada, meningkatkan jejaring penjualan dan pemasaran, jangkauan penonton dan geografis serta meningkatkan kualitas pengalaman menonton. Rencana ekspansi bioskop Cinema XXI akan lebih banyak dilakukan secara organik, namun demikian Cinema XXI juga mungkin mempertimbangkan akuisisi strategis, kolaborasi teknis, atau pembelian aset secara oportunistik. Secara keseluruhan, Cinema XXI menargetkan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar *gross box office* menjadi sekitar 75% dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Memaksimalkan pendapatan gross box office dari bioskop Cinema XXI

Cinema XXI berencana meningkatkan pendapatan *gross box office* dari bioskop dengan menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan ATP. Menurut Euromonitor, ATP di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari Rp44,3 ribu menjadi Rp52,4 ribu antara tahun 2022 dan 2027 dengan CAGR 3,4%. Selanjutnya, Cinema XXI berkeyakinan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di industri bioskop di Indonesia, mengingat posisinya saat ini sebagai pemimpin pasar di Indonesia, dengan pangsa pasar 69,7% dan 57,7% masing-masing berdasarkan pendapatan *gross box office* dan jumlah layar pada tahun 2021, menurut Euromonitor, serta memiliki merek yang telah dikenal luas di Indonesia. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk terus memanfaatkan posisi kepemimpinan pasar dan kekuatan mereknya untuk meningkatkan ATP dari waktu ke waktu. Ke depannya, Cinema XXI memperkirakan ATP akan tumbuh sekitar 2,5%. Cinema XXI mengambil pendekatan moderat dalam meningkatkan ATP karena prioritas Cinema XXI adalah untuk mempertahankan tingkat keterisian bioskop.

Pada setiap tahun, jumlah penonton Cinema XXI proporsional terhadap jumlah dan kualitas film yang ditayangkan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Cinema XXI biasanya menayangkan sekitar 200 hingga 250 film di bioskop setiap tahunnya. Cinema XXI memperkirakan trend yang sama akan berlanjut ke depannya karena industri bioskop terus membaik. Dengan memanfaatkan deretan film yang kuat di masa mendatang, dan didukung dengan posisi kepemimpinan dalam pasar dan kekuatan mereknya, Cinema XXI bermaksud untuk memaksimalkan pendapatan *gross box office* dengan menayangkan lebih banyak film dan meningkatkan ATP dari waktu ke waktu.

Cinema XXI berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan strategi penetapan harga melalui kemampuan internal dalam menganalisis data. Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan harga tiket bioskop dan tim Cinema XXI yang bertugas menetapkan harga tiket juga secara terus menerus menganalisis harga pesaing berdasarkan lokasi dan variabel lainnya setiap harinya. Cinema XXI berencana untuk terus memperkuat model penetapan harga berdasarkan analisis data penjualan tiket yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dengan memanfaatkan data penjualan secara *online* maupun fisik, dengan opsionalitas untuk menetapkan harga yang berbeda berdasarkan tingkat permintaan, serta pertimbangan jadwal waktu tayang dan tingkat keterisian.

Pendapatan *gross box office* Cinema XXI bergantung pada jumlah penonton, dan Cinema XXI berencana untuk menambah pendapatan bioskop dengan meningkatkan tingkat keterisian di bioskop yang ada. Cinema XXI bermaksud untuk mencapai hal ini melalui penetapan harga tiket yang dinamis, inisiatif pemasaran, kegiatan promosi dan pemutaran film populer yang disukai oleh penonton, serta memberikan pengalaman yang berkualitas dan nyaman di bioskop Cinema XXI yang ditingkatkan dengan penawaran F&B yang menarik.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa strategi ini, bersama deretan film yang akan dirilis, akan mampu memaksimalkan potensi pendapatan *box office*.

Fokus pada optimalisasi pendapatan dan biaya dalam segmen bisnis F&B baik di dalam maupun di luar bioskop Cinema XXI

Cinema XXI berencana untuk mengoptimalkan pendapatan serta biaya dalam segmen bisnis F&B. Segmen F&B telah menjadi penyumbang pendapatan serta pendorong marjin yang penting bagi Cinema XXI, mewakili sekitar 26,1% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 71,1% pada tahun 2019 dan sekitar 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 72,4% pada tahun 2022. Sejak tahun 2013, pendapatan Cinema XXI dari segmen F&B tidak hanya secara konsisten mewakili lebih dari 30% dari total pendapatan *gross box office*, namun pendapatan dari segmen F&B terhadap pendapatan bioskop juga menunjukan pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun. Secara khusus, pendapatan dari penjualan F&B pada tahun 2022 mewakili sekitar 53,0% dari pendapatan bioskop, menunjukkan kenaikan sebesar 12,5% dibandingkan dengan tahun 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa segmen bisnis F&B cukup menarik dalam hal prospek marjin keuntungan sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman operasional Cinema XXI bahwa segmen bisnis F&B memiliki marjin kotor yang lebih tinggi dibanding segmen bioskop. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk terus meningkatkan investasinya pada segmen F&B untuk mencapai pendapatan dan marjin kotor yang lebih baik. Dengan demikian, Cinema XXI berkeyakinan akan dapat terus meningkatkan segmen F&B untuk mencapai pendapatan dan marjin kotor yang lebih besar lagi. Sasaran Cinema XXI saat ini adalah untuk mengembangkan segmen F&B hingga mencapai 70,0% dari pendapatan bioskop dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun ke depan, yang didorong oleh strategi inovasi produk dan penentuan harga yang efektif. Cinema XXI juga bermaksud untuk memperbaiki marjin laba segmen F&B sebesar 60 basis poin setiap tahunnya dalam jangka waktu yang sama.

Meningkatkan arus pendapatan dari segmen bisnis F&B di dalam bioskop

Cinema XXI bermaksud untuk terus mengembangkan, memperbarui, dan memperluas penawaran F&B, serta menambahkan lebih banyak pilihan makanan, baik makanan ringan maupun produk makanan berkualitas tinggi lainnya. Cinema XXI akan terus menyempurnakan proses pengembangan produk baru yang digunakan untuk menentukan produk optimal yang akan diluncurkan. Cinema XXI menggunakan proses pengembangan produk yang menyeluruh untuk menciptakan produk yang sesuai dan tepat dengan target pasar. Cinema XXI juga mempertimbangkan sejumlah pertimbangan selama proses pengembangan produk, seperti tren F&B dan preferensi konsumen saat ini, diferensiasi harga berdasarkan jenis produk, segmentasi penawaran F&B berdasarkan kelompok penghasilan penonton dan kompleksitas proses persiapan F&B.

Cinema XXI juga bermaksud untuk melanjutkan beberapa inisiatif yang penting dalam meningkatkan pendapatan dan marjin F&B. Cinema XXI melakukan proses rasionalisasi SKU berdasarkan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja segmen bisnis F&B secara keseluruhan. Cinema XXI berkeyakinan bahwa proses rasionalisasi SKU telah berhasil menjaga biaya tetap rendah dan oleh karena itu, akan terus menerapkan strategi ini.

Cinema XXI bermaksud untuk terus melaksanakan proses digitalisasi di saluran penjualan maupun kegiatan operasional. Pada tahun 2021, Cinema XXI telah mengembangkan dan meluncurkan m.food, yaitu sebuah saluran penjualan digital. Cinema XXI berkeyakinan bahwa penjualan produk F&B melalui m.food memiliki ruang yang besar untuk berkembang dan Cinema XXI bermaksud untuk ke depannya lebih aktif mempromosikan m.food. Cinema XXI juga bermaksud untuk menyempurnakan dan

mengembangkan sistem m.food dengan memperbaiki desain antarmuka pengguna (*user interface*) dan pengalaman pengguna (*user experience*), menambahkan The Premiere ke dalam m.food, memperkenalkan opsi untuk memilih waktu pengambilan dan memperbanyak metode pembayaran yang tersedia. Selain itu, Cinema XXI memiliki rencana untuk mereplikasi model m.food ke dalam platform TIX.ID dan memperluas basis pelanggan F&B Cinema XXI yang potensial. Dengan mengenalkan sistem pemesanan makanan di muka dalam platform TIX.ID, bisnis F&B Cinema XXI akan dapat menjangkau penonton yang memesan tiket di platform TIX.ID. Cinema XXI bermaksud untuk melakukan *soft launch* fitur tersebut di beberapa lokasi bioskop untuk mengukur respon terhadap fitur ini, sebelum meluncurkannya secara luas di berbagai lokasi bioskop. Cinema XXI juga telah melakukan digitalisasi kegiatan operasi F&B dengan menerapkan papan iklan digital pada tahun 2019 dan sistem POS pada tahun 2021 di semua gerai F&B. Berdasarkan pengalaman Cinema XXI sebelumnya, penerapan strategi tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan segmen F&B secara keseluruhan, sebagaimana ditunjukan dari pemulihan penjualan F&B sebelum pajak untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 yang kuat dengan mencapai 95,9% dari penjualan sebelum pandemi COVID-19 untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019, dan Cinema XXI berkeyakinan bahwa implementasi strategi digitalisasi secara berkelanjutan akan memberikan hasil keuangan yang lebih baik untuk segmen F&B.

Meskipun segmen F&B telah mencapai tingkat marjin kotor yang relatif tinggi, Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan biaya lebih lanjut melalui kenaikan daya tawar sejalan dengan pertumbuhan skala bisnis Cinema XXI.

Meningkatkan arus pendapatan dari segmen bisnis F&B di luar bioskop Cinema XXI

Cinema XXI juga bermaksud untuk terus meningkatkan penjualan produk F&B melalui saluran penjualan di luar bioskop. Berdasarkan Survei Euromonitor, 64% dari responden yang menonton film di Indonesia telah membeli produk F&B untuk dikonsumsi di luar bioskop. Cinema XXI bermaksud untuk memperluas penawaran F&B bagi pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film dan khususnya, melalui pengiriman berbasis daring, gerai XXI Café Box dan produk dalam kemasan.

Pengiriman daring. Cinema XXI mulai menawarkan F&B melalui platform pengiriman berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood di bulan November 2021 untuk menghasilkan pendapatan tambahan selama pandemi COVID-19. Pendapatan segmen F&B Cinema XXI dari pengiriman berbasis daring untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 memberikan kontribusi sebesar 1,5% dari total pendapatan F&B sebelum pajak. Pendapatan F&B sebelum pajak Cinema XXI melalui platform pihak ketiga mencapai Rp22.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan penjualan dari pengiriman berbasis daring tersebut memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,0% terhadap pendapatan F&B bulanan sebelum pajak untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2022, yang membuktikan adanya permintaan terhadap produk F&B Cinema XXI dari pengunjung yang tidak menonton film.

Gerai XXI Café Box. XXI Café Box adalah gerai yang menjual produk F&B Cinema XXI di luar lokasi bioskop. XXI Café Box biasanya berlokasi di lantai dasar pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan arus pengunjung yang lebih tinggi. Gerai XXI Café Box dibuka untuk menangkap permintaan pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film. Cinema XXI melakukan uji coba pembukaan gerai XXI Café Box pertama di bulan Agustus 2022 dan per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 20 gerai XXI Café Box di seluruh Indonesia. Gerai XXI Café Box telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam hal pendapatan bulanan. Pendapatan dari XXI Café Box meningkat sebesar 73,2% menjadi Rp1,8 miliar pada bulan Desember 2022 dibandingkan dengan November 2022. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kontribusi XXI Café Box terhadap pendapatan *gross box office* akan terus meningkat dan karenanya bermaksud untuk terus memperluas jejaring XXI Café Box. Cinema XXI menargetkan untuk memiliki 50 gerai XXI Café Box pada akhir tahun 2023, yang bergantung pada hasil evaluasi lebih lanjut atas berbagai faktor, termasuk daya tarik lokasi, permintaan pasar dan biaya pembukaan gerai.

Produk dalam kemasan. Cinema XXI bermaksud untuk terus menyesuaikan menu yang ditawarkan berdasarkan permintaan pasar. Selain itu, Cinema XXI juga bermaksud untuk mengembangkan lebih banyak produk F&B yang dapat dinikmati di luar lokasi bioskop. Cinema XXI telah meluncurkan

makanan ringan "Popcorn Caramel pack" di bulan November 2022. Makanan ringan "Popcorn Caramel pack" tersebut saat ini tersedia di sistem pemesanan makanan berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood and Gofood. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Cinema XXI bermaksud untuk memperkenalkan lebih banyak produk dalam kemasan dan pada saat bersamaan memperluas saluran distribusi dengan membuka lebih banyak saluran penjualan berbasis daring.

Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan aktivitas penggunaan platform digital

Cinema XXI bermaksud untuk terus memberikan pengalaman menonton yang menyeluruh dengan meningkatkan pengalaman dalam perjalanan membeli tiket film. Menurut Euromonitor, jumlah pengguna internet di Indonesa telah meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2017 dan 2022 dan menurut survei mereka "*Voices of the Consumer Life Survey 2022*" pada tahun 2022, hampir 80% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 42,3% dari volume penjualan tiket Cinema XXI didistribusikan secara daring sedangkan 57,7% dari volume penjualan tiket didistribusikan secara *offline*. Meskipun penjualan tiket secara *offline* lebih tinggi, data Cinema XXI menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam distribusi tiket secara daring untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dibandingkan dengan tahun 2019 di mana hanya 37,3% dari volume penjualan tiket Cinema XXI didistribusikan secara daring. Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat ruang pertumbuhan lebih lanjut dalam distribusi tiket secara daring dan bermaksud untuk meningkatkan penggunaan pemesanan daring dikarenakan platform pemesanan digital sangat penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk lebih mempromosikan penggunaan m.tix dan TIX.ID dan mendorong pelanggan untuk membeli tiket film dari platform berbasis daring dan digital. Cinema XXI berencana untuk melakukannya dengan menyediakan lebih banyak opsi pembayaran kepada pelanggan di dalam platform digital yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperlancar proses *checkout*. Rencana ini juga memberikan kesempatan bagi mitra Cinema XXI untuk mempromosikan metode pembayaran mereka. Cinema XXI bermaksud untuk mengkonsolidasikan semua promosi ke dalam platform digital agar pelanggan dapat lebih mudah mengakses berbagai promosi dan diskon yang tersedia, di mana Cinema XXI berkeyakinan bahwa hal ini akan mendorong pelanggan untuk membeli tiket secara daring daripada *offline*.

Cinema XXI memiliki visi untuk menjadikan TIX.ID sebagai platform penjualan tiket digital yang holistik, yang akan menjadikannya tempat untuk membeli semua tiket hiburan bagi masyarakat Indonesia. Cinema XXI bermaksud untuk lebih mengembangkan dan mempromosikan TIX.ID kepada penyedia hiburan lainnya, dengan tujuan meningkatkan jenis penawaran di dalam platform TIX.ID, seperti tiket untuk pertunjukan hiburan *live* termasuk konser dan pertunjukan komedi tunggal. Apabila berhasil, hal ini akan memperluas cakupan layanan TIX.ID dan menghasilkan pendapatan tambahan.

Berinvestasi lebih lanjut dalam teknologi film canggih untuk meningkatkan pengalaman menonton

Cinema XXI berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang berkualitas tinggi. Cinema XXI terdorong untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang meningkatkan pengalaman menonton. Sebagai contoh, Cinema XXI berencana untuk terus mengadopsi dan mengikuti perkembangan teknologi sinema terbaru, seperti IMAX dengan laser dan Dolby Atmos, secara berhati-hati untuk memastikan pengalaman menonton film yang premium bagi penonton. Apabila teknologi tersebut dinilai terjangkau secara finansial, Cinema XXI juga akan menyediakan teknologi tersebut di lebih banyak lokasi bioskop. Cinema XXI bermaksud untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur bioskop dengan biaya yang efektif agar penonton dapat menikmati pengalaman menonton berbasis pengalaman dengan standar yang tinggi, dan juga menghindari pengeluaran belanja modal dalam jumlah besar yang tak terduga di masa mendatang.

Untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih baik dengan biaya yang efektif, Cinema XXI merancang bioskop dengan menggunakan peralatan berkualitas tinggi dan tahan lama. Hal ini memungkinkan bioskop Cinema XXI memiliki kualitas baik dari sejak awal dan mengurangi frekuensi untuk melakukan penggantian teknologi. Selain itu, Cinema XXI juga secara aktif memantau dan mengelola fasilitas yang dimiliki secara efisien dan, apabila diperlukan, melakukan pembaruan infrastruktur dan mengembangkan format layar baru, tempat duduk, serta prasarana lainnya untuk

meningkatkan kualitas bioskop, dan berencana untuk melakukan hal ini secara berkelanjutan. Cinema XXI juga mengoptimalkan biaya perawatan harian guna menghindari keausan peralatan dan menekan biaya penggantian peralatan dan fasilitas bioskop yang lebih sering.

Memperkuat kerja sama dan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan

Cinema XXI berkeyakinan bahwa hubungannya yang erat dengan para pemangku kepentingan utama, seperti produsen dan distributor film, telah menjadi kunci kesuksesan Cinema XXI di dalam industri film tanah air. Cinema XXI bermaksud untuk terus mempertahankan dan memperdalam hubungan yang kuat ini, di mana hal ini akan membantu Cinema XXI untuk memastikan pasokan film yang baik.

Cinema XXI juga bermaksud untuk lebih memperkuat hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama di industri film tanah air seperti rumah produksi lokal, dan secara proaktif mengeksplorasi kampanye kolaborasi dengan rumah produksi lokal agar Cinema XXI dapat tumbuh sejalan dengan industri film tanah air yang bertambah besar dan terus berkembang menurut Euromonitor.

Selanjutnya, Cinema XXI bermaksud untuk memelihara dan memperkuat hubungannya dengan pengembang pusat perbelanjaan komersial di Indonesia, yang telah memungkinkan bioskop Cinema XXI hadir di lokasi yang strategis. Cinema XXI pada umumnya membayar biaya sewa dan biaya layanan bulanan kepada pengelola properti, namun juga dapat menggunakan kombinasi model sewa tetap ataupun bagi hasil. Pembayaran untuk kontrak sewa Cinema XXI umumnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (i) pembayaran sewa tetap dan (ii) bagi hasil. Per tanggal 31 Desember 2022, mayoritas kontrak sewa bioskop Cinema XXI menggunakan skema pembayaran sewa tetap dengan sebagian kecil menggunakan skema bagi hasil. Untuk kontrak sewa dengan skema bagi hasil, hanya sebagian kecil yang menggunakan pembayaran minimum.

4. Visi dan misi Cinema XXI

Visi Cinema XXI adalah menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Cinema XXI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai visi Cinema XXI berdasarkan misi inti Cinema XXI, sebagai berikut:

- *Kualitas terbaik*: Cinema XXI bertekad untuk memberikan standar kualitas terbaik dalam semua aspek kegiatan usahanya, mulai dari kualitas layar dan suara, kebersihan, pilihan film, hingga ketepatan waktu jadwal tayang di seluruh bioskop Cinema XXI.

- *Hiburan yang terjangkau*: Cinema XXI berupaya untuk menyediakan layanan hiburan yang terjangkau berdasarkan penilaian menyeluruh mengenai tipe teater dan target penonton dalam menentukan harga tiket, produk F&B, dan layanan iklan, serta kolaborasi dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai promosi yang sesuai.

- *Selalu lebih baik*: Cinema XXI selalu berupaya meningkatkan kualitas seluruh aspek kegiatan usaha Cinema XXI dari layanan pemutaran film, penjualan produk F&B hingga pemasangan iklan. Cinema XXI bermaksud untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penonton dalam memesan dan membeli tiket, makanan dan minuman, serta memasang iklan (bagi klien iklan).

5. Sejarah dan kejadian penting Cinema XXI

Didirikan pada tahun 1988, Cinema XXI telah berhasil mengukuhkan diri sebagai operator bioskop berkualitas tinggi yang melayani penonton dan penggemar film di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI telah melampaui beberapa tonggak pencapaian penting dalam sejarah perkembangannya dengan mendiversifikasi layanannya melalui penawaran berbagai tipe teater, yaitu Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, serta berbagai produk F&B dan pilihan pemasangan iklan untuk pelanggan Cinema XXI.

Berikut merupakan pencapaian penting Cinema XXI sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
1988	Perseroan (sebelumnya dikenal dengan nama PT Subentra Nusantara) didirikan sebagai perseroan terbatas di Jakarta pada tanggal 16 September 1988.
1989	Cinema XXI pertama kali membuka bioskop di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
1990	Cinema XXI membuka bioskop di wilayah Jawa Timur, dan sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
1991	Cinema XXI membuka bioskop di wilayah Bandung dan sekitarnya.
1999	Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya pada tanggal 15 Juli 1999.
2001	Cinema XXI membuka bioskop unggulan (*flagshi*p) di Jakarta pada tanggal 21 November 2001.
2002	Cinema XXI mulai memperkenalkan bioskop berkonsep premium dengan kursi yang bisa direbahkan dan diberi nama "The Premiere" kepada pelanggan. Cinema XXI telah memiliki 282 layar pada 67 lokasi bioskop.
2006	Cinema XXI meluncurkan sistem reservasi tiket bioskop yang dimulai sebagai layanan berbasis SMS pertama di Indonesia, yaitu m.tix. Cinema XXI telah memiliki 350 layar pada 82 lokasi bioskop.
2012	Cinema XXI membuka teater IMAX digital pertama secara komersial di Indonesia, tepatnya di Gandaria City, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Cinema XXI telah memiliki 624 layar pada 129 lokasi bioskop. Cinema XXI menyelesaikan konversi sistem proyektor di seluruh bioskopnya menjadi sepenuhnya digital di bulan Desember 2012.
2016	Masing-masing HJB dan APN menandatangani *Call Option Agreement* dengan Salween Investment Private Limited, afiliasi dari GIC. Berdasarkan perjanjian tersebut, Salween Investment Private Limited, memiliki hak untuk membeli saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 18.750.000.000 saham. Cinema XXI telah memiliki 865 layar pada 157 lokasi bioskop.
2017	Pada bulan November 2017, Cinema XXI meluncurkan pertama kali restoran Hello Sunday di Tangerang.
2018	Cinema XXI memasang dan membuka layar ke-1.000 di Nipah, Makassar, Indonesia, dan memiliki 1.045 layar pada 182 lokasi bioskop di akhir tahun 2018. Cinema XXI juga menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yaitu penyedia dompet digital, untuk mengembangkan dan meluncurkan TIX.ID, aplikasi agregator tiket pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menjual tiket Cinema XXI. Pendapatan penjualan iklan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,49 kali dibandingkan tahun 2017. Cinema XXI menerapkan sistem *dashboard* baru untuk memantau penggunaan layar dan mengoptimalkan kegiatan operasi penjualan.
2019	Cinema XXI meluncurkan sistem distribusi papan iklan digital dan menempatkan papan iklan digital di seluruh bioskop Cinema XXI. Cinema XXI berkerjasama dengan Go-pay untuk mempromosikan penjualan F&B. Cinema XXI melakukan pengembangan sistem pemantauan kinerja harian untuk kegiatan usaha F&B.
2020	Cinema XXI membuka teater IMAX dengan teknologi laser pertama di Indonesia, tepatnya di Gandaria City, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Cinema XXI telah memiliki 1.195 layar pada 219 lokasi bioskop. Cinema XXI membangun sistem persediaan dan *point-of-sales* ("**POS**") baru di sembilan bioskop: Metropole, Puri, Pondok Indah 2, City Plaza Jatinegara, Arion, The Park Sawangan, Transmart Cilegon, Green Sedayu, dan Blok M Plaza.
2021	Cinema XXI menerapkan sistem persediaan dan POS di semua gerai F&B. Cinema XXI melakukan kerjasama kemitraan untuk promosi penjualan F&B dengan Belcube, Fanta, Mobile Legend: Bang Bang, dan Oat Side. Cinema XXI juga meluncurkan layanan pemesanan F&B secara daring yang diambil secara *offline*, yaitu m.food di dalam aplikasi m.tix. Cinema XXI telah memiliki 1.206 layar pada 222 lokasi bioskop. Pada akhir tahun 2021, Cinema XXI mulai memonetisasi penggunaan papan iklan digital di beberapa lokasi.

Tahun	Keterangan
2022	Cinema XXI membuka berbagai kanal pembayaran digital dalam aplikasi m.tix untuk penjualan tiket bioskop. Penjualan F&B Cinema XXI mencapai 53,0% dari total pendapatan bioskop, yang merupakan tingkat tertinggi yang dicapai sejak tahun 2013 dan meningkat sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2019. Cinema XXI juga mencatatkan kontribusi film domestik tertinggi dalam 14 tahun terakhir, dengan kontribusi 55,6% dari total penonton selama tahun 2022. Cinema XXI melakukan uji coba pembukaan gerai XXI Café Box pertama pada bulan Agustus 2022, untuk menawarkan produk F&B di luar area bioskop. Pada bulan Oktober 2022, Cinema XXI secara penuh meluncurkan gerai XXI Café Box di 11 lokasi. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI telah membuka 20 gerai XXI Café Box. Cinema XXI meluncurkan papan iklan digital di 129 lokasi bioskop. Cinema XXI telah memiliki 1.216 layar pada 225 lokasi bioskop.

6. Segmen bisnis Cinema XXI

Umum

Kegiatan usaha utama Cinema XXI terdiri dari kegiatan usaha bioskop, penjualan F&B, serta penyelenggaraan acara dan periklanan:

- ***Bioskop***: merupakan kegiatan penjualan tiket bioskop baik melalui loket fisik di bioskop atau melalui sistem penjualan tiket berbasis daring Cinema XXI, yaitu m.tix dan TIX.ID.

- ***F&B***: merupakan kegiatan penjualan makanan dan minuman melalui gerai XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounge, gerai restoran Hello Sunday dan gerai XXI Café Box serta sistem berbasis daring Cinema XXI yaitu m.food, dan sistem pengiriman makanan berbasis daring pihak ketiga seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood.

- ***Iklan***: merupakan kegiatan pemasangan iklan di layar teater di lokasi bioskop Cinema XXI, iklan berbasis *offline* di papan iklan digital, stan, dan iklan berbasis *online* melalui situs web serta mengadakan acara promosi.

- ***Digital platform***: merupakan kegiatan transaksi yang menghasilkan imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID; dan

- ***Acara dan pendapatan lainnya***: acara dan kegiatan usaha lainnya meliputi layanan untuk acara yang diadakan di XXI Ballroom, *arcade game, voucher,* dan *movie card*.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian mengenai pendapatan dari masing-masing kegiatan usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Pendapatan				
Bioskop	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Makanan dan minuman	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Iklan	130.730	10.777	96.583	494.898
Digital platform	116.848	30.954	17.459	114.732
Acara dan pendapatan lainnya[(1)]	21.800	3.536	7.418	30.950
Jumlah	**4.401.050**	**1.280.186**	**1.218.993**	**6.890.034**

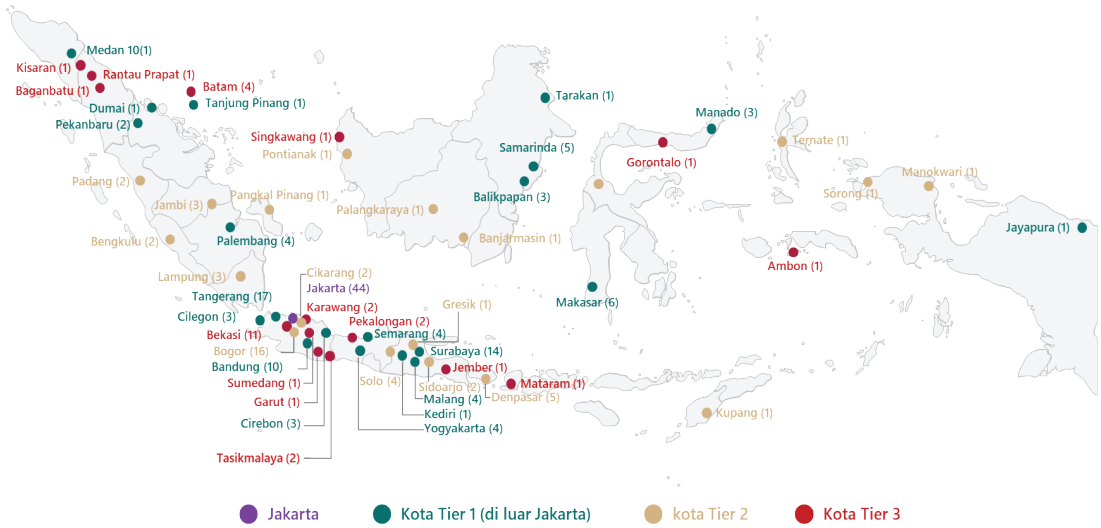
Catatan:
(1) Termasuk pendapatan dari XXI Ballroom, *arcade games, voucher* dan *movie card*.

Segmen bisnis bioskop

Kegiatan usaha utama Cinema XXI adalah pemutaran film di bioskop Cinema XXI yang berlokasi di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Menurut Euromonitor, per tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI adalah operator jaringan bioskop terbesar di Indonesia dari segi pendapatan *gross box office*, jumlah penonton, dan jumlah layar. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 1.216 layar di 225 lokasi bioskop dengan kapasitas tempat duduk keseluruhan sebanyak 195.408 kursi. Menurut Euromonitor, per tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI memiliki pangsa pasar sebesar 69,7%, 68,8%, dan 57,7% masing-masing dari segi pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar.

Jejaring bioskop dan layar Cinema XXI

Peta di bawah ini menunjukkan sebaran geografis bioskop Cinema XXI di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022.



Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah layar Cinema XXI berdasarkan wilayah di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022:

	Per tanggal 31 Desember 2022	
Provinsi/Daerah	**Jumlah bioskop**	**Jumlah layar**
Sumatra	36	192
Jawa (di luar Jakarta)	108	577
Jakarta	44	245
Kalimantan	14	75
Bali dan Nusa Tenggara	7	33
Sulawesi	11	65
Maluku	2	13
Papua	3	16
Total	**225**	**1.216**

Tipe Kota	**Jumlah bioskop**	**Jumlah layar**
Kota Tier 1[(1)]	148	819
Kota Tier 2[(2)]	46	242
Kota Tier 3[(3)]	31	155
Total	**225**	**1.216**

Catatan:
(1) Kota Tier 1 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.

(2) Kota Tier 2 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Manokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
(3) Kota Tier 3 merupakan kota-kota dengan PDB pada PPP per kapita yang tidak termasuk dalam rentang kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.

Tipe teater Cinema XXI

Cinema XXI merencanakan pembukaan bioskop sesuai dengan karakteristik target pasar dan Cinema XXI memiliki berbagai tipe teater, yaitu Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX. Teater tipe Regular/Deluxe Cinema XXI adalah teater standar yang dilengkapi dengan kursi empuk dan nyaman, dan tersedia di semua tingkatan kota. Teater dengan tipe Deluxe dirancang sedikit lebih premium dibandingkan dengan teater tipe Regular, meskipun sebagian besar teater Cinema XXI adalah teater tipe Regular/Deluxe. The Premiere adalah versi yang disempurnakan dari teater Deluxe yang dikembangkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penonton Cinema XXI dan umumnya tersedia di kota Tier 1 dan kota Tier 2. Di teater The Premiere, penonton menikmati layanan yang lebih premium dan pengalaman hiburan yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, kemewahan meliputi kursi yang dapat direbahkan, sofa berbahan kulit dengan ukuran besar, ruang tunggu eksklusif, dan berbagai pilihan hidangan berkualitas yang hanya tersedia di teater The Premiere. Teater IMAX mendukung teknologi 3D, memiliki layar yang lebih lebar, kapasitas tempat duduk yang lebih banyak dibandingkan teater standar, dan dilengkapi dengan sistem suara yang lebih menawan untuk menciptakan pengalaman menonton film yang imersif. Teater IMAX khususnya tersedia di kota Tier 1. Beberapa teater dengan layar IMAX Cinema XXI dilengkapi dengan teknologi laser, menampilkan sistem proyektor 4K generasi mutakhir dari IMAX yang memberikan resolusi yang lebih tinggi, gambar visual yang lebih cerah dan kontras yang lebih dalam dengan cakupan warna yang lebih luas dan teknologi suara 12 saluran yang memberikan kualitas suara yang disempurnakan, serta rentang dan presisi dinamika suara yang lebih besar, sehingga menawarkan pengalaman menonton film yang lebih mengesankan bagi penonton Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh teater Cinema XXI berdasarkan tipe:

Tipe Teater	Visual
Regular/Deluxe	
The Premier	
IMAX	

Tabel di bawah ini menyajikan komposisi portofolio bioskop Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022:

	Layar	
Tipe teater	**Jumlah layar**	**% terhadap total**
Regular/Deluxe[1]	1.114	91,6
The Premiere	93	7,7
IMAX	9	0,7
Total	**1.216**	**100,0**

Catatan:
(1) Teater tipe Regular/Deluxe ada di seluruh 225 lokasi bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian keseluruhan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan harga tiket rata-rata dan pertumbuhan harga tiket rata-rata untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Gross box office (Rp juta) (sebelum dipotong pajak)	2.997.713	920.797	859.802	4.936.269
Jumlah Penonton (‘000)	67.057	22.343	20.340	111.746
Harga tiket rata-rata (ATP) (Rp)[1]	44.704	41.212	42.271	44.174
Pertumbuhan harga tiket rata-rata *year on-year* (%)	8,5	(2,5)	(4,3)	-

Catatan:
(1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak, dibagi dengan jumlah penonton.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, harga tiket rata-rata untuk semua kategori tiket berkisar dari Rp39.401 hingga Rp47.042 untuk kota Tier 1, kota Tier 2 dan kota Tier 3.

Film yang ditayangkan di teater Cinema XXI

Meskipun sebagian besar konten yang ditayangkan oleh Cinema XXI adalah film internasional (termasuk film Hollywood), Cinema XXI juga menawarkan berbagai konten film regional dan domestik. Pada tahun 2022, konten film internasional dan domestik masing-masing mewakili 48,9% dan 51,1% dari total pendapatan *gross box office*, sedangkan pada tahun 2021, konten film internasional dan domestik masing-masing menyumbang 12,1% dan 87,9% dari total pendapatan *gross box office* karena kurangnya film internasional yang dirilis akibat pandemi COVID-19.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan *gross box office* dan jumlah penonton berdasarkan jenis film untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022		**2021**		**2020**		**2019**	
	Pendapatan *gross box office*[1]	**Jumlah penonton**	**Pendapatan *gross box office*[1]**	**Jumlah Penonton**	**Pendapatan *gross box office*[1]**	**Jumlah penonton**	**Pendapatan *gross box office*[1]**	**Jumlah Penonton**
	(Rp juta)	**(‘000)**	**(Rp juta)**	**(‘000)**	**(Rp juta)**	**(‘000)**	**(Rp juta)**	**(‘000)**
Film internasional[2]	1.467.185	29.757	809.366	19.247	478.966	10.541	3.452.607	75.336
% terhadap total	48,9	44,4	87,9	86,1	55,7	51,8	69,9	67,4
Film domestik	1.530.528	37.300	111.423	3.095	380.835	9.799	1.483.663	36.410
% terhadap total	51,1	55,6	12,1	13,9	44,3	48,2	30,1	32,6
Total	**2.997.713**	**67.057**	**920.797**	**22.342**	**859.802**	**20.340**	**4.936.269**	**111.746**

Catatan:
(1) Merupakan pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak yang berlaku.
(2) Merupakan film yang diimpor.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani kelompok penonton dari berbagai latar belakang karena menayangkan berbagai pilihan film dan jadwal tayang yang beragam. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah film internasional dan domestik yang melampaui satu juta penonton pada tahun 2019 dan 2022:

	2022	2021	2020	2019
Jumlah film yang melampaui satu juta penonton	21	6	3	33
Film internasional	9	6	1	23
Film domestik	12	-	2	10

Fasilitas dan desain bioskop

Selain itu, bioskop Cinema XXI juga dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman, seperti layar dengan resolusi tinggi, teknologi audio dan proyektor terbaru, stan F&B dengan beberapa loket pemesanan, sistem pemesanan tiket yang terkomputerisasi, penataan tempat duduk bertingkat, serta interior dan eksterior yang mewah.

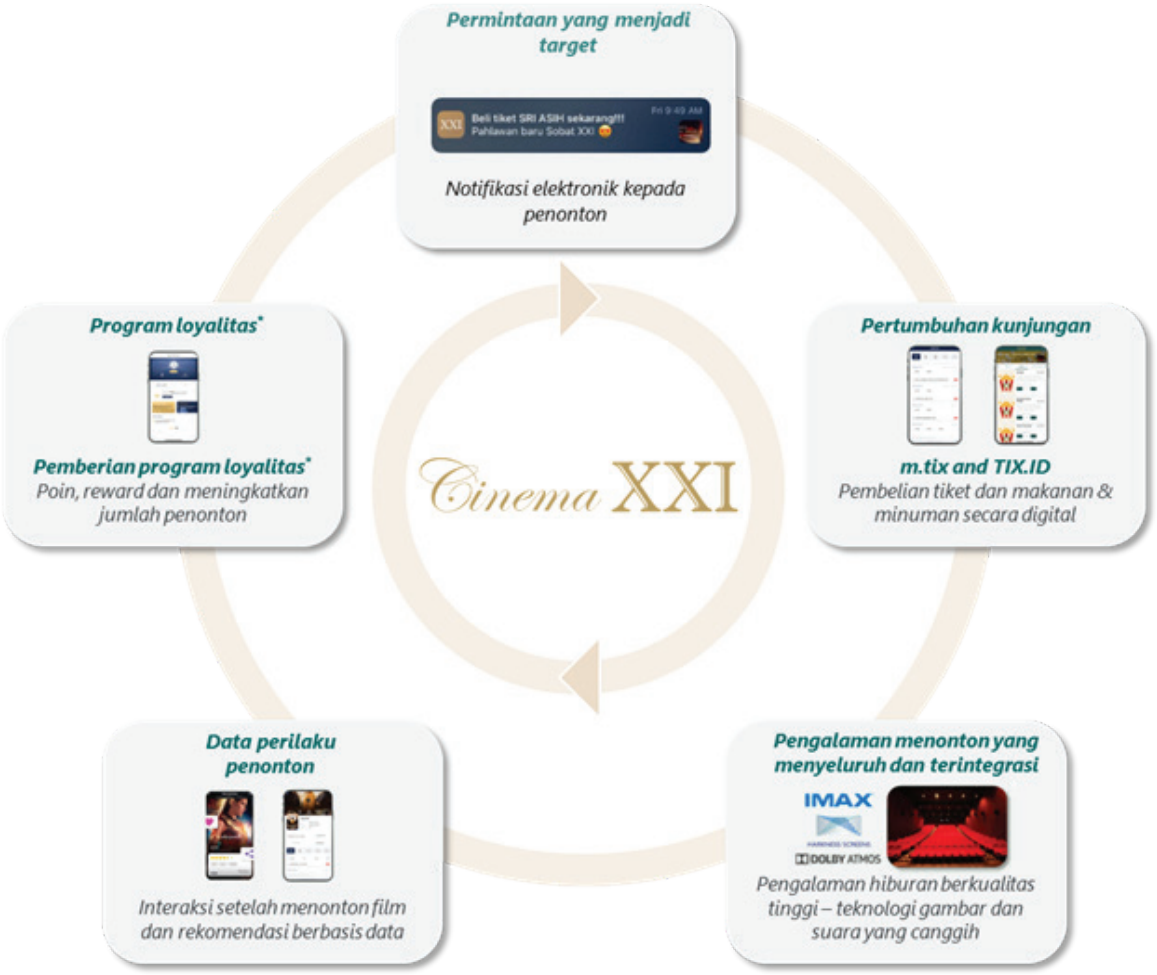
Bioskop Cinema XXI didesain untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan pendapatan per kaki persegi dan mengurangi biaya operasi per kaki persegi. Cinema XXI memiliki kapasitas tempat duduk yang bervariasi di masing-masing layar di dalam sebuah teater multipleks, sehingga memiliki fleksibilitas untuk memutar satu film dimulai dari layar berkapasitar besar dan kemudian dipindahkan ke layar yang lebih kecil. Dengan demikian, Cinema XXI dapat menampilkan film untuk periode yang lebih lama, dengan biaya yang lebih efektif dan mencapai mencapai tingkat keterisian yang lebih tinggi di keseluruhan jejaring layar Cinema XXI.

Selain itu, Cinema XXI mencapai efisiensi operasional yang signifikan dengan memiliki desain yang seragam untuk fasilitas penjualan tiket, pembelian F&B, ruang tunggu, dan kamar kecil di berbagai lokasi bioskop. Dengan memiliki perangkat fasilitas yang sama untuk seluruh multipleks, Cinema XXI memperoleh manfaat dari skala ekonomis yang dicapai dengan menghemat biaya yang tidak perlu, seperti mempekerjakan terlalu banyak karyawan dalam mengelola area yang berbeda, sehingga Cinema XXI dapat mengurangi beban karyawan, serta mengurangi jumlah ruang yang dibutuhkan, sehingga Cinema XXI dapat menurunkan biaya sewa. Cinema XXI melakukan penjadwalkan waktu pemutaran film secara strategis untuk mengurangi kebutuhan karyawan dan kepadatan di lobi, sehingga arus pengunjung menjadi lebih teratur. Dengan perencanaan arus pengunjung dan pengendalian keramaian secara strategis, Cinema XXI tidak hanya meningkatkan kapasitas penonton selama pemutaran film, tetapi juga menciptakan pengalaman menonton film yang lebih menyenangkan, sehingga meningkatkan kemampuan Cinema XXI dalam menarik penonton.

Platform Cinema XXI yang menyeluruh dan terintegrasi

Cinema XXI melakukan penjualan tiket melalui loket fisik yang berada di setiap biokop dan melalui plaform reservasi tiket berbasis daring, m.tix dan TIX.ID. Melalui penawaran di dalam platform m.tix dan TIX.ID serta dukungan teknologi dan data dalam pengelolaan hubungan pelanggan, Cinema XXI dapat menciptakan pengalaman hiburan yang menyeluruh bagi penonton. Pengalaman ini dimulai dari notifikasi elektronik yang diterima oleh pelanggan Cinema XXI, kemudian dilanjutkan dengan pembelian tiket dan F&B secara digital melalui m.tix dan TIX.ID, dan menonton film di bioskop Cinema XXI. Setelah menonton film, penonton diharapkan memberikan *rating* pelanggan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 42,3% dari tiket bioskop Cinema XXI dijual melalui platform berbasis daring. Secara khusus, 20,8% dari volume penjualan tiket pada tahun 2022 dilakukan melalui m.tix sedangkan 21,7% dari volume penjualan tiket pada tahun 2022 dilakukan melalui TIX.ID.

Diagram di bawah ini menggambarkan siklus *customer engagement* secara menyeluruh:



*Inisiatif yang direncanakan.

Penggunaan notifikasi elektronik yang terarah dan dipersonalisasi bagi segmen penonton tertentu untuk film atau promosi dapat meningkatkan penjualan tiket bioskop Cinema XXI. Kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem Cinema XXI tidak terbatas pada pembelian tiket bioskop, karena penonton dapat menggunakan m.tix untuk membeli berbagai macam produk F&B yang ditawarkan melalui platform m.food. Pengalaman menonton di Cinema XXI juga dilengkapi dengan penawaran F&B yang unik, seperti "The Croffle," "Popcorn Caramel," "Java Tea Special" dan "Milo Dinosours." Sejak penonton memasuki teater, penonton menikmati pengalaman menonton berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi canggih, seperti layar yang lebih lebar dan sistem suara yang menawan, serta tempat duduk yang nyaman. Cinema XXI berkeyakinan memiliki teknologi bioskop terkini dan sejumlah bioskop Cinema XXI telah dilengkapi dengan sistem proyektor digital, serta sistem suara merek Dolby Surround 7.1. Bioskop Cinema XXI yang berkualitas tinggi juga telah meluncurkan format layar besar dan sistem suara IMAX dan Dolby Atmos untuk melayani penonton yang menginginkan pengalaman menonton yang lebih imersif. Berdasarkan Survei Euromonitor, 96,6% dari responden menilai kualitas suara dan visual teater Cinema XXI sebagai "Sangat Baik" atau "Baik," dan 94,7% dari responden menilai pengalaman menonton film sebagai "Sangat Baik" atau "Baik" dalam hal kenyamanan.

Pengalaman menonton yang lengkap di Cinema XXI masih terus berlanjut bahkan setelah film selesai. Cinema XXI menyediakan ruang bagi penonton di platform TIX.ID untuk memberikan *rating* film dan berbagi pengalaman menonton film. Cinema XXI menggunakan masukan ini untuk memberikan rekomendasi berbasis data dalam rangka meningkatkan hubungan Cinema XXI dengan para pelanggannya. Cinema XXI bermaksud untuk meningkatkan pengalaman hiburan yang lengkap ini dengan

memperkenalkan program loyalitas untuk pelanggan di masa mendatang. Cinema XXI berkeyakinan bahwa integrasi sistem reservasi tiket digital berbasis data pelanggan yang besar tidak hanya memperkuat merek Cinema XXI, tetapi juga menciptakan pengalaman menonton yang menyenangkan, yang selanjutnya mendorong rekomendasi penonton.

m.tix dan TIX.ID

Cinema XXI memiliki dua platform milik sendiri, yaitu m.tix dan TIX.ID, yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan. Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket[(1)]	42,3%	41,6%	28,8%	37,3%
Kontribusi m.tix terhadap total volume penjualan tiket[(2)]	20,8%	21,8%	12,0%	15,8%
Kontribusi TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket[(3)]	21,6%	19,8%	16,8%	21,5%

Catatan:
(1) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dan TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
(2) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
(3) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui TIX.ID bagi dengan total total tiket Cinema XXI yang terjual.

m.tix adalah platform milik Cinema XXI yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan mendukung Cinema XXI untuk lebih memahami perilaku pelanggan. Sistem m.tix pertama kali diluncurkan sebagai layanan berbasis SMS di mana pelanggan dapat memesan tiket bioskop dan kemudian dikembangkan menjadi aplikasi berbasis seluler di tahun 2013 yang tersedia pada berbagai toko aplikasi. Per tanggal 31 Desember 2022, sistem reservasi berbasis seluler m.tix memiliki sekitar 7,5 juta pengguna dan telah diunduh lebih dari 19 juta kali sejak diluncurkan pada berbagai toko aplikasi. m.tix adalah sistem reservasi tiket berbasis seluler pertama di Indonesia dan diakui sebagai sepuluh aplikasi hiburan terbaik pada tahun 2020 oleh App Annie Top Publisher Award berdasarkan pengguna aktif bulanan. Per bulan Desember 2022, m.tix merupakan aplikasi ketiga yang paling banyak diunduh dari semua aplikasi gratis di Apple App store di Indonesia.

Diagram di bawah ini menggambarkan fitur utama m.tix:



TIX.ID adalah platfom penjualan tiket berbasis daring lainnya yang dikembangkan oleh Cinema XXI bersama mitra pihak ketiga dan diluncurkan pada tahun 2018. TIX.ID dimiliki dan dioperasikan oleh salah satu Perusahaan Anak, yaitu NES, di mana Perseroan memiliki 60% saham. Meskipun operasional sehari-hari TIX.ID dikelola oleh Perusahaan Anak, pihak ketiga bertanggung jawab atas inovasi dan pengembangan TIX.ID dari segi konsultasi teknis, promosi, kampanye iklan, dan akuisisi pelanggan. Berbeda dengan m.tix, TIX.ID tidak hanya melayani penjualan tiket bioskop Cinema XXI, tetapi juga mendukung dan melayani penjualan tiket untuk operator bioskop utama lainnya dan juga pemain di industri hiburan, termasuk industri layanan *streaming*. TIX.ID saat ini adalah satu-satunya platform agregator tiket yang menjual tiket Cinema XXI dan menurut Euromonitor, telah melayani reservasi untuk lebih dari 90% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. TIX.ID tersedia sebagai aplikasi berbasis seluler, dan sejak peluncurannya, telah diunduh lebih dari 25 juta kali serta digunakan untuk membeli lebih dari 60 juta tiket bioskop. TIX.ID menjadi aplikasi gratis hiburan yang paling banyak diunduh di Apple App store di Indonesia per bulan Mei 2022, dan menjadi salah satu aplikasi paling banyak diunduh dari semua aplikasi gratis di Apple App store di Indonesia per bulan Desember 2022. Untuk periode tanggal 25 sampai 31 Juli 2022, Google Play juga menempatkan TIX.ID sebagai koleksi dari aplikasi yang mendefinisikan satu generasi. Per tanggal 31 Desember 2022, TIX.ID memiliki pengguna terdaftar sebanyak 14,8 juta, mewakili CAGR sebesar 31,0% dari 3,8 juta pengguna per tanggal 31 Desember 2018.

Diagram di bawah ini menggambarkan beberapa fitur utama TIX.ID:



Operasional bioskop

Lisensi memutar film

Cinema XXI mendapatkan film dari studio film besar, rumah produksi lokal, dan distributor film independen yang umumnya terlibat dalam distribusi film dari rumah produksi yang relatif lebih kecil. Karena tidak ada distributor untuk film domestik, Cinema XXI mengandalkan hubungan yang sudah ada dan telah lama terjalin dengan rumah produksi lokal untuk konten film domestik yang ditayangkan di bioskop. Cinema XXI memiliki tim internal yang didedikasikan untuk mengevaluasi prospek setiap film yang akan datang berdasarkan berbagai parameter, seperti alur cerita, pemain, sutradara, genre, publisitas, dan perkiraan pendapatan *box office*, performa dari film sebelumnya dalam seri (jika film tersebut adalah sekuel) atau performa film dengan genre atau subyek yang serupa, ulasan film dari industri dan media, dan performa film di negara-lain di mana film tersebut telah tayang. Keberhasilan strategi pemilihan film Cinema XXI sangat bergantung pada penilaian yang akurat terhadap preferensi target pasar masing-masing bioskop. Informasi yang dikumpulkan oleh sistem teknologi informasi Cinema XXI tentang jumlah penonton *box office* berdasarkan lokasi bioskop dapat membantu proses pemilihan film. Setelah film dipilih, Cinema XXI mulai membahas rencana rilis dengan distributor/ produser masing-masing film untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari film-film tersebut.

Secara umum, Cinema XXI memperoleh film dengan skema bagi hasil sama rata (50:50) dengan distributor/produser melalui kesepakatan non-eksklusif. Berdasarkan kesepakatan ini, pendapatan *box office* (setelah dikurangi pajak hiburan dan biaya) dibagi dengan distributor/produser sesuai persentase yang telah disepakati. Menurut Euromonitor, skema bagi hasil seperti ini telah menjadi praktik industri yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Proses pengadaan film biasanya dinegosiasikan dengan menggunakan kerangka syarat dan ketentuan standar yang menetapkan bahwa kontrak dengan distributor/produser tidak bersifat eksklusif dan tidak terdapat durasi penayangan yang wajib. Oleh karena itu, durasi penayangan film dinegosiasikan dengan distributor dan berdasarkan minat pasar terhadap masing-masing film.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, beban penayangan film dari pemasok yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian Cinema XXI berasal dari Omega. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, dan untuk periode tiga bulan

yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, total pembelian dari Omega mencerminkan 57%, 36%, 80%, 45%, 47% dan 42% dari total beban penayangan film untuk periode-periode tersebut. Keponakan dari salah satu Komisaris dan pemegang saham minoritas Perseroan merupakan direktur dan memegang kepemilikan saham yang signifikan pada Omega meskipun dia bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi berdasarkan UUPM dan peraturan pasar modal di Amerika Serikat. Cinema XXI dan Omega telah menandatangani berbagai perjanjian bagi hasil eksploitasi film. Syarat dan ketentuan dari perjanjian bagi hasil eksploitasi film dengan Omega secara umum setara dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian bagi hasil eksploitasi film antara Cinema XXI dengan distributor film lainnya.

Sewa bioskop

Sebagian besar bioskop Cinema XXI berada di lokasi yang disewa, kecuali satu properti yang dimiliki, yaitu Mandala 21 di Malang. Cinema XXI biasanya menandatangani perjanjian sewa dengan pengembang dari berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk membuka bioskop. Mengingat 98,6% dari semua layar Cinema XXI berada di pusat perbelanjaan, Cinema XXI telah menjalin hubungan jangka panjang dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan, seperti grup Pakuwon Jati, grup Trans Retail dan grup Jakarta Intiland. Pengembang pusat perbelanjaan umumnya menganggap Cinema XXI sebagai penyewa utama yang dapat mendorong arus pengunjung ke pusat perbelanjaan mereka. Oleh karena itu, pengembang biasanya menghubungi Cinema XXI terlebih dahulu untuk menempati lokasi yang akan dibangun oleh pengembang pusat perbelanjaan dengan syarat penyewaan yang kompetitif. Sebagai contoh, pengembang pusat perbelanjaan umumnya menawarkan ruang yang terletak di lantai tertinggi pusat perbelanjaan karena Cinema XXI dianggap mampu untuk menarik kunjungan. Dikarenakan ruang-ruang ini biasanya dianggap kurang sesuai bagi penyewa lain, Cinema XXI cenderung memperoleh kontrak sewa dengan tarif yang lebih baik. Cinema XXI memiliki bioskop di berbagai pusat perbelanjaan terkenal, antara lain Summarecon Mall Kelapa Gading, pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas di Jakarta Utara dengan area yang disewakan bersih sebesar 112.000 m2 dan jumlah pengunjung lebih dari 21 juta orang per tahun (menurut PT Summarecon Agung Tbk), Tunjungan Plaza, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur, dengan area yang disewakan bersih lebih dari 360.000 m2 dan jumlah pengunjung lebih dari 26 juta orang per tahun (menurut Grup Pakuwon), Mall Taman Anggrek, salah satu pusat perbelanjaan ritel terbesar dengan area yang disewakan bersih sebesar 110.000 m2 dan jumlah pengunjung yang tinggi sebanyak 18 juta orang per tahun (menurut Mall Taman Anggrek), dan Pakuwon Mall di Surabaya, pusat perbelanjaan ritel dengan area yang disewakan bersih lebih dari 130.000 m2 (menurut PT Pakuwon Jati Tbk). Periode sewa Cinema XXI biasanya berjangka waktu maksimum sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Cinema XXI bermaksud untuk memperbarui perjanjian sewa secara bertahap dan biasanya akan memulai negosiasi untuk memperbarui perjanjian sewa satu tahun sebelum akhir masa berlaku sewa. Perjanjian sewa biasanya mensyaratkan Cinema XXI untuk mengajukan permintaan perpanjangan sewa enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sewa. Per tanggal 31 Desember 2022, 84,0% dari perjanjian sewa Cinema XXI memiliki masa berlaku lebih dari lima tahun, dan secara rata-rata, memiliki sisa masa berlaku sewa 11,2 tahun untuk keseluruhan kontrak sewa.

Cinema XXI mulai membayar sewa dan biaya layanan bulanan kepada pengelola properti setelah dimulainya kegiatan operasi komersial. Pembayaran sewa umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (i) pembayaran tetap; dan (ii) bagi hasil. Per tanggal 31 Desember 2022, mayoritas bioskop Cinema XXI memiliki kontrak sewa berdasarkan pembayaran tetap, dan sebagian kecil bioskop lainnya memiliki kontrak sewa berdasarkan bagi hasil. Untuk kontrak sewa berdasarkan bagi hasil, hanya sebagian kecil memerlukan pembayaran minimum. Pada tahun 2020 dan 2021, beban sewa dan biaya layanan Cinema XXI lebih rendah dikarenakan Cinema XXI menegosiasikan keringanan atau pengurangan beban sewa dan biaya layanan untuk semua lokasi Cinema XXI akibat pandemi COVID-19.

Pembukaan dan ekspansi bioskop

Selain dari portofolio yang dimiliki Cinema XXI saat ini yang terdiri dari 225 bioskop dan 1.216 layar (per tanggal 31 Desember 2022), Cinema XXI bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya melalui pembukaan bioskop baru dan ekspansi secara selektif.

Dalam menentukan lokasi strategis untuk dikembangkan, Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi wilayah sekitar, di mana Cinema XXI mempertimbangkan jumlah populasi, profil demografi dari penonton potensial, ketersediaan dan jarak ke fasilitas transportasi umum, jarak ke lokasi bioskop lainnya, dan kehadiran operator hiburan lainnya. Cinema XXI juga mempertimbangkan profil pengembang pusat perbelanjaan, desain bangunan, bauran penyewa dan fasilitas tambahan di pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI akan berada. Selanjutnya untuk menentukan lokasi, Cinema XXI juga mempertimbangkan minat masyarakat sekitar terhadap bioskop baru, daya beli masyarakat, dan potensi persaingan. Dalam mengevaluasi potensi pembukaan bioskop baru di lokasi tertentu, Cinema XXI biasanya mempertimbangkan jumlah masyarakat sekitar yang dapat dijangkau dalam jarak 15 menit berkendara dari calon lokasi. Dalam kasus tertentu Cinema XXI dapat membuka bioskop baru yang lebih kecil berdasarkan populasi sebagai tolok ukur minimum untuk menilai apakah area tersebut dapat mendukung bioskop dengan tiga layar atau lebih. Selain itu, Cinema XXI juga mencari area perkotaan yang lebih besar yang belum memiliki bioskop multipleks atau memiliki jumlah layar bioskop per orang yang rendah. Faktor lain yang diperhitungkan termasuk peluang untuk bersaing dengan bioskop multipleks lama yang berkualitas lebih rendah atau berlokasi kurang strategis. Setelah pengembang pusat perbelanjaan memberikan tawaran untuk menyewakan ruang di satu pusat perbelanjaan, Cinema XXI melakukan proses untuk mengevaluasi kota dan profil pusat perbelanjaan, menegosiasikan sewa, dan membuat keputusan akhir untuk menyewa ruang yang biasanya membutuhkan waktu hingga tiga bulan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi secara historis mengenai bioskop Cinema XXI termasuk pembukaan dan penutupan/pelepasan untuk masing-masing periode:

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jumlah bioskop	225	222	219	213
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Jumlah pembukaan baru				
Bioskop	3	5	6	34
Layar	10	21	27	138
Jumlah penutupan lokasi				
Bioskop	-	2	-	3
Layar	-	10	-	15

Pada tahun 2019, Cinema XXI menutup tiga lokasi bioskop karena berakhirnya masa sewa. Dua diantaranya terletak di pusat perbelanjaan yang mengoperasikan jejaring bioskop mereka sendiri, dan satu bioskop terletak di properti yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang saat itu sedang direnovasi.

Pada tahun 2021, Cinema XXI menutup dua lokasi bioskop. Satu bioskop ditutup karena berakhirnya kontrak sewa yang berlokasi di pusat perbelanjaan yang mengoperasikan jejaring bioskop mereka sendiri, sehingga Cinema XXI kemudian membuka bioskop baru dalam jarak 1-2 kilometer dari lokasi sebelumnya. Cinema XXI menutup satu bioskop lainnya karena kinerjanya di bawah standar dan memerlukan renovasi. Tidak ada satupun dari penutupan tersebut dikarenakan pandemi COVID-19.

Pemeliharaan

Sebagai bagian dari filosofi Cinema XXI untuk menyediakan atmosfir yang baik di seluruh bioskop, manajemen selalu memastikan bahwa seluruh bioskop Cinema XXI memenuhi standar kebersihan tertinggi, di mana semua teater dibersihkan oleh petugas bioskop setiap selesai pemutaran film dan di akhir hari. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh sarana bioskop secara umum terjaga dengan baik. Untuk saat ini, departemen teknis operasional Cinema XXI bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan bioskop, sementara kebersihan dan pemeliharaan sarana lainnya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyediakan pengelolaan fasilitas gedung.

Renovasi

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk memberikan kualitas terbaik dalam semua aspek bisnis, dan untuk memastikan para penonton mendapatkan pengalaman hiburan yang terbaik, Cinema XXI melakukan program evaluasi berkala untuk kebutuhan peremajaan sarana di jejaring bioskop Cinema XXI, yang umumnya dilakukan setiap lima tahun secara internal. Cinema XXI juga secara berkala mengganti kursi dan/atau melakukan *upgrade* pada bioskop tertentu dalam jejaring bioskop Cinema XXI. Peremajaan umumnya dilaksanakan pada periode *off-peak* agar tidak ada lokasi yang benar-benar ditutup secara operasional untuk umum. Peremajaan memungkinkan Cinema XXI untuk terus memberikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi, dan hal ini penting untuk membantu Cinema XXI tetap berada di garis depan persaingan.

Pendapatan bioskop

Pendapatan bioskop dari penjualan tiket bioskop tergantung pada jumlah penonton bioskop dan harga tiket yang dikenakan. Kedua faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan profitabilitas bioskop Cinema XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Cinema XXI. Selain membuka bioskop baru, Cinema XXI juga terus berupaya meningkatkan jumlah pelanggan dengan mendorong tingkat keterisian di bioskop Cinema XXI melalui penetapan harga tiket yang bervariasi, inisiatif pemasaran untuk meningkatkan profil film yang akan ditayangkan, dan inisiatif lain seperti *gift card*, promosi melalui saluran digital, serta inisiatif lainnya untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Jumlah penonton Cinema XXI mencapai sebesar 111,7 juta, 20,3 juta, 22,3 juta, dan 67,1 juta masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Selain itu, tingkat keterisian bioskop Cinema XXI mencapai sebesar 36,8%, 23,5%, 19,0%, dan 25,6% masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Harga tiket bioskop Cinema XXI bervariasi tergantung pada tipe teater dan hari pemutaran film. Sebagai contoh, harga tiket untuk teater IMAX biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket di teater Regular/Deluxe, harga tiket untuk teater The Premiere lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket di teater IMAX, dan harga tiket untuk akhir pekan lebih tinggi daripada harga tiket pada hari kerja. Tujuan Cinema XXI adalah untuk menawarkan tiket dengan harga yang akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan *box office* yang lebih maksimal.

Cinema XXI menggunakan strategi yang bervariasi dalam penetapan harga tiket bioskop. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga tiket seperti (i) harga historis di lokasi bioskop tertentu; (ii) tingkat keterisian bioskop; (iii) sensitivitas harga dari penduduk di daerah tersebut; dan (iv) jenis lokasi pusat perbelanjaan. Dalam mempertimbangkan jenis lokasi sebagai faktor, Cinema XXI juga mempertimbangkan target pasar yang ada di lokasi tersebut. Tim penetapan harga Cinema XXI melakukan peninjauan setiap minggu atas data tiket dan tingkat keterisian harian dan mengusulkan perubahan harga tiket kepada manajemen secara mingguan. Jika usulan penyesuaian harga tiket tersebut disetujui, penyesuaian harga tiket akan diterapkan secara bulanan atau kuartalan. Harga tiket rata-rata Cinema XXI relatif stabil karena strategi bisnis dan berbagai faktor eksternal, seperti pertumbuhan industri film domestik, ekspansi jejaring bioskop yang dilakukan, serta peningkatan tingkat keterisian dan penjualan F&B. Harga tiket rata-rata dari tahun 2019 hingga 2022 umumnya stabil, dan dengan dicabutnya PPKM, harga tiket rata-rata pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Harga tiket rata-rata Cinema XXI juga telah meningkat pada CAGR 8,5% dari tahun 2019 hingga 2022. Struktur harga yang ditetapkan Cinema XXI berdasarkan variabel yang disebutkan di atas dapat menjadi pedoman untuk menentukan titik harga setiap bioskop, yang mungkin menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan karakteristik setiap bioskop. Oleh karena itu, bioskop yang berada di area yang sama dapat memiliki harga tiket yang berbeda.

Segmen bisnis F&B

Selain pendapatan *gross box office*, Cinema XXI menghasilkan pendapatan dari penjualan produk F&B di dalam ataupun di luar bioskop, dan melalui platform berbasis daring milik sendiri ataupun pihak ketiga. Merek F&B Cinema XXI meliputi XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounge, restoran Hello Sunday dan XXI Café Box. Masing-masing merek F&B tersebut menawarkan proposisi nilai yang berbeda dan ditujukan untuk melayani segmen pasar tertentu.

Produk F&B Cinema XXI dijual melalui saluran *offline,* seperti gerai XXI Café yang berlokasi di dalam bioskop, plaform berbasis digital milik sendiri m.food, dan platform pengiriman berbasis daring pihak ketiga melalui kemitraan seperti Shopeefood, Grabfood, dan Gofood. Untuk menumbuhkan bisnis F&B dan memperkuat arus pendapatan, Cinema XXI juga menyediakan produk F&B bagi pelanggan di luar bioskop melalui gerai XXI Café Box, sehingga dapat memperluas penawaran F&B dengan memanfaatkan basis pelanggan baru di luar penonton film.

Merek F&B

XXI Café adalah merek layanan F&B Cinema XXI yang melayani penonton bioskop dengan menu dengan konsep *grab and go* untuk dikonsumsi selama menonton film. Layanan yang ditawarkan di gerai XXI Café adalah makanan ringan dan camilan (seperti *Popcorn Caramel*) dengan minuman siap saji (seperti Es Kopi Pandan), untuk pelayanan penjualan yang lebih cepat dan bisa disajikan kepada penonton dalam jumlah besar. The Premiere Café adalah layanan F&B premium yang memberikan pengalaman bersantap kepada penonton film Cinema XXI selama pemutaran film. The Premiere Café menyajikan hidangan utama yang lebih berkualitas (seperti Spaghetti Tuna Sambal Matah dan Nasi Goreng Basmati Hijau) dan disajikan lebih mewah. Hal ini bertujuan agar penggemar film di teater The Premiere dapat menikmati hidangan makanan sambil menonton film dengan nyaman. XXI Lounge adalah fasilitas bersantap yang menggabungkan *fine-dining* dengan hiburan seperti pertunjukan musik. XXI Lounge dapat digunakan untuk mengadakan acara khusus atau pribadi bagi individu ataupun perusahaan dan menyediakan fasilitas mewah untuk melayani segmen pasar kelas atas. Merek Hello Sunday adalah restoran *dine-in* yang belokasi di bioskop Cinema XXI tertentu untuk memenuhi gaya hidup modern. Hello Sunday mengkhususkan diri pada makanan penutup dan makanan gurih dengan menu terlaris seperti berbagai wafel gurih dan manis, nasi goreng dan es krim. XXI Café Box adalah gerai dan stan F&B Cinema XXI yang khusus didirikan di luar area bioskop untuk melayani pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film.

Tabel di bawah ini mnyajikan merek-merek F&B Cinema XXI:

Tipe	XXI Café	The Premiere	XXI Lounge	Hello Sunday	XXI Café Box
Logo	XXI Café	the Premiere	XXI Lounge	Hello Sunday	XXI Café
Proposisi nilai	Makanan ringan, minuman untuk dibawa menonton	Hidangan untuk disantap sambil menonton	Kombinasi pengalaman *fine dining* dengan hiburan *live*	Restoran berkonsep *dine-in* yang berfokus pada makanan penutup dan makanan gurih	F&B dengan konsep *grab and go* untuk dibawa pelanggan yang bukan penonton bioskop
Penawaran pilihan	Makanan: Popcorn, kentang goreng, nachos Minuman: Milo Dinosaurs, Ice Java Tea 	Makanan: Pasta, nasi goreng, *rice bowl* Minuman: Mojito, Ice Mango Latte 	Makanan: Burger, *steak*, nasi goreng Minuman: Jus, bir, *ice blended drinks* 	Makanan: Waffle, pasta, nasi goreng, es krim Minuman: Kopi, jus, bir 	Popcorn, pastri dan bakeri Minuman khusus: Ice Java Tea dan Milo Dinosaurs 
Nilai transaksi rata-rata per tagihan(1) (Rp '000)	100	200	1.300	177	67

Catatan:
(1) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Portofolio produk dan proses pengembangan

Cinema XXI menawarkan pilihan menu F&B yang bervariasi di gerai XXI Café yang cocok bagi pelanggan yang menggemari film. Penawaran F&B Cinema XXI mencakup popcorn, minuman ringan, permen, gorengan, pastri, hot dog, dan burger. Cinema XXI menyesuaikan menu berdasarkan lokasi dan segmen pasar di sekitar bioskop dan berupaya memberikan hidangan terbaik, termasuk pilihan, rasa, dan layanan. Cinema XXI secara rutin meluncurkan produk baru berdasarkan proses pengembangan produk yang komprehensif dan metodologis dengan mempertimbangkan beragam kategori bioskop untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan melakukan promosi terkait produk tersebut melalui berbagai saluran.

Proses pengembangan produk dimulai dengan tahap pra-pengembangan di mana Cinema XXI mengusulkan dan menyaring ide, mengkonseptualisasikan pengembangan produk dan melakukan analisis bisnis tentang potensi suatu produk. Setelah produk diputuskan untuk diproduksi, Cinema XXI memasuki tahap selanjutnya dengan melakukan penelitian dan pengembangan menyeluruh serta mempertimbangkan aspek keuangan (yaitu biaya untuk mengembangkan produk tersebut). Cinema XXI kemudian memasuki tahap pasca pengembangan di mana Cinema XXI berfokus pada penyusunan strategi promosi dan pengadaan bahan baku produk, mempersiapkan dan berkerja sama dengan rantai pasokan, dan melatih staf operasional yang terlibat dalam produksi. Pada akhir ketiga tahap tersebut, Cinema XXI meluncurkan produk dan kemudian melakukan tinjauan atas produk setelah diluncurkan selama sebulan. Tujuan dari proses pengembangan produk yang menyeluruh adalah untuk meluncurkan produk

yang tepat, pada waktu yang tepat dan ke target pasar yang tepat. Cinema XXI juga mempertimbangkan sejumlah faktor selama proses pengembangan produk, seperti tren dan popularitas produk F&B yang sedang terjadi di kalangan konsumen, diferensiasi harga berdasarkan jenis produk, segmentasi penawaran produk F&B menurut kelompok penghasilan dari target pelanggan dan kompleksitas proses persiapan F&B. Cinema XXI memiliki rangkaian produk F&B yang inovatif dan seringkali merupakan yang pertama di industri bioskop. Sebagai contoh, Cinema XXI memperkenalkan jenis produk pastri baru yang disebut croffle dan melakukan berbagai promosi *offline* dan media sosial secara *online* melalui Instagram, Twitter, Tiktok dan YouTube serta *key opinion leader*.

Cinema XXI berkolaborasi dengan merek-merek terkenal dalam pengadaan bahan baku dan juga platform pemasaran dan media sosial dan *influencer* untuk peluncuran produk. Selain penawaran jenis F&B khusus, Cinema XXI juga menawarkan produk standar seperti popcorn dan minuman ringan. Untuk penawaran tersebut, Cinema XXI membina dan menjaga kemitraan dengan merek F&B utama, seperti Coca-Cola, Aqua dari Danone, Hershey, dan Oat Side serta berkolaborasi dengan merek-merek ini untuk membuat menu kombo, misalnya mengkombinasikan minuman Coca-Cola dengan pilihan makanan Cinema XXI. Dalam kemitraan tersebut, mitra Cinema XXI menanggung semua biaya promosi. Melalui promosi dan rekomendasi dari petugas bioskop, Cinema XXI mendorong pelanggan untuk membeli paket kombo karena lebih mudah dan cepat untuk dipersiapkan sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kecepatan layanan.

Selain itu, Cinema XXI juga menawarkan F&B tematik tertentu di mana produk F&B dikemas khusus, atau menu kombo terkait dengan film *blockbuster* yang sedang ditayangkan saat itu. Cinema XXI juga melakukan aktivitas pemasaran *offline* seperti penggunaan papan iklan digital di gerai XXI Café untuk menampilkan produk F&B atau *item* promosi, aktivitas *upselling* di tempat, penyebaran menu yang dicetak di lokasi Cinema XXI serta mengadakan siaran pers dan acara khusus.

Dengan beragam pilihan makanan, pelanggan Cinema XXI diharapkan terdorong untuk memilih menu kombo yang menarik agar belanja per penonton meningkat dan dengan demikian meningkatkan kontribusi produk F&B terhadap pendapatan Cinema XXI secara keseluruhan. Sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kesehatan akibat munculnya COVID-19, Cinema XXI telah mendesain ulang menu dan metode layanan lebih lanjut untuk merespon perubahan perilaku pelanggan dan kondisi pasar, melalui penambahan opsi menu untuk meningkatkan imunitas, seperti jus buah segar, dan minuman dengan kandungan bahan tambahan untuk membangun kekebalan tubuh yang dikurasi secara khusus. Cinema XXI juga meningkatkan kualitas kemasan produk F&B dengan menyediakan lapisan kemasan tambahan dan tisu basah untuk menu gorengan.

Aktivitas operasional F&B

Cinema XXI memiliki petugas internal yang terlatih dan berpengalaman serta terus berupaya untuk menghadirkan beragam menu produk F&B yang komprehensif. Cinema XXI memiliki pedoman dan prosedur operasi standar yang jelas untuk gerai F&B yang memproduksi produk F&B, dan juga menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti bumbu siap masak, untuk memastikan konsistensi kualitas produk F&B dan efisiensi dalam memproduksi menu F&B yang memiliki permintaan tinggi seperti popcorn. Pedoman ini bertujuan untuk membantu Cinema XXI mewujudkan kepuasan penonton secara konsisten.

Prosedur dan pedoman operasi standar Cinema XXI mencakup:

- *Keamanan makanan*: Cinema XXI mematuhi standar keamanan pangan yang ketat termasuk penggunaan prosedur penyimpanan, penanganan, dan penyiapan makanan yang konsisten untuk mencegah penyakit yang mungkin disebabkan oleh makanan;

- *Kontrol kualitas*: Cinema XXI secara rutin memantau kualitas F&B yang dijual di gerai dengan melakukan prosedur pencicipan, pengujian, dan kontrol porsi untuk memastikan konsistensi kualitas di semua gerai;

- *Standarisasi resep*: Cinema XXI menggunakan resep, metode memasak, dan spesifikasi bahan baku yang baku untuk memastikan *item* menu Cinema XXI memiliki rasa dan tampilan yang konsisten;

- *Pengelolaan persediaan*: Cinema XXI mengelola persediaan F&B untuk mengurangi pemborosan, menghemat biaya, dan memastikan ketersediaan *item* menu Cinema XXI secara konsisten;

- *Pelatihan karyawan:* Cinema XXI secara rutin melakukan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memastikan kualitas layanan yang konsisten di seluruh lokasi;

- *Masukan pelanggan:* Cinema XXI mengumpulkan dan menganalisis masukan pelanggan untuk mengidentifikasi menu dan kegiatan operasi Cinema XXI yang perlu dilakukan perbaikan atau perubahan; dan

- *Identitas merek:* Cinema XXI menyajikan identitas visual yang konsisten dari merek Cinema XXI dalam menu dan materi promosi untuk memastikan *brand experience* yang konsisten bagi pelanggan di semua lokasi.

Selanjutnya, Cinema XXI telah menerapkan sistem digitalisasi operasi melalui pemasangan papan iklan digital di titik pemesanan dan pengambilan F&B, yang memisahkan area pemesanan dan pengambilan produk F&B dalam rangka menyediakan area yang jelas bagi pembeli sesuai status pesanan F&B mereka. Hal ini juga membantu Cinema XXI dalam menentukan jumlah staf yang diperlukan pada bagian pemesanan dan pengambilan pada setiap waktu sehingga proses layanan lebih lancar dan lebih cepat, serta mencapai tingkat penetrasi yang lebih tinggi. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan sejumlah manfaat, yaitu fleksibilitas yang lebih dalam mendesain konten, kemampuan yang lebih besar untuk mengendalikan dan mengelola konten yang ditampilkan serta kesempatan yang lebih banyak untuk memperbarui konten dan harga secara *real time*. Cinema XXI juga menggunakan sistem POS baru yang tersentralisasi, Ravintola, untuk mengelola data secara terpusat, di mana hal ini memberikan fleksibilitas bagi Cinema XXI untuk menawarkan lebih banyak variasi dalam berpromosi dan meluncurkan produk dengan lebih cepat.

Cinema XXI berusaha memperluas basis pelanggan dengan menyediakan produk F&B yang dapat dibeli dan dibawa pulang oleh konsumen yang mungkin bukan penonton bioskop Cinema XXI. Untuk tujuan ini, Cinema XXI telah memperluas strategi bisnis F&B melalui kemitraan dengan platform pengiriman makanan seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood untuk mengantarkan penawaran F&B Cinema XXI kepada pelanggan umum di luar bioskop. Inisiatif ini dimulai pada bulan November 2021, ketika PPKM diberlakukan, sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Setelah PPKM dicabut, Cinema XXI melihat potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut di area ini dan penjualan bulanan produk F&B di platform pengiriman makanan tersebut telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Cinema XXI bermaksud untuk terus mendistribusikan produk F&B Cinema XXI di platform berbasis daring.

Selain menyediakan produk F&B secara daring, Cinema XXI juga meluncurkan uji coba pertama XXI Café Box pada bulan Agustus 2022, gerai F&B secara khusus didirikan di luar bioskop untuk memungkinkan pelanggan yang bukan penonton menikmati penawaran F&B. Pada bulan Oktober 2022, Cinema XXI meluncurkan sepenuhnya gerai XXI Café Box dan selanjutnya membuka 11 gerai. Per 31 Desember 2022, Cinema XXI telah membuka 20 gerai XXI Café Box yang menawarkan makanan berkonsep *grab and go* dan minuman dalam berbagai menu dan paket kombo. Pendapatan Cinema XXI dari XXI Café Box telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak diluncurkan dan mencapai Rp1,8 miliar pada Desember 2022. Menu XXI Café Box mencakup berbagai donat, popcorn, dan croffle dengan berbagai pilihan berbeda untuk topping serta minuman khas Cinema XXI untuk dibawa pulang. Selain itu, Cinema XXI juga meluncurkan produk F&B dalam kemasan pada bulan November 2022 untuk optimalisasi penjualan lebih lanjut. Produk dalam kemasan pertama Cinema XXI adalah camilan popcorn karamel di XXI Café, dan tersedia di platform pengiriman makanan (termasuk Shopee). Cinema XXI berencana untuk meluncurkan lebih banyak SKU dalam kemasan dan memperluas saluran distribusi pada saat yang bersamaan. Dengan meluncurkan XXI Café Box dan memperluas jenis penawaran F&B yang dapat dibawa pulang, Cinema XXI bermaksud untuk memanfaatkan basis konsumen baru dan memperkuat arus pendapatan dari F&B.

Cinema XXI melakukan pengadaan *item* menu siap saji, seperti produk roti, burger dan roti hotdog, dan makanan ringan tradisional yang diproduksi pihak ketiga. Cinema XXI memperhatikan standar keselamatan dan menandatangani perjanjian dengan pemasok bereputasi dan tersertifikasi dengan resep baku untuk menjaga keseragaman menu di seluruh bioskop Cinema XXI. Harga dengan pemasok biasanya dinegosiasikan secara berkala. Cinema XXI juga melakukan audit secara rutin untuk memeriksa standar keamanan, kebersihan, dan sanitasinya. Cinema XXI juga melakukan pemeriksaan kendali mutu secara rutin. Penekanan yang sama terhadap keamanan makanan berlaku juga untuk kegiatan operasi dan Cinema XXI secara teratur mengadakan pelatihan staf dan melakukan pemeriksaan kendali mutu di berbagai lokasi.

Pendapatan F&B

Bisnis F&B adalah sumber pendapatan Cinema XXI terbesar kedua setelah pendapatan *gross box office*. Penjualan produk F&B berkontribusi sebesar 26,1%, 26,5%, 31,6% dan 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Pendapatan dari bisnis F&B memiliki marjin yang lebih tinggi daripada penjualan tiket. Marjin F&B Cinema XXI pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah 71,1%, 65,1, 71,0%, dan 72,4%, dibandingkan dengan marjin kotor penjualan tiket Cinema XXI sebesar 50,0%, 50,0%, 50,0% dan 50,0% masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian tentang belanja F&B rata-rata per penonton untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Belanja F&B rata-rata per penonton (Rp)[1]	23.447	19.951	17.379	17.615
Transaksi F&B (‘000)	15.380	5.011	3.996	21.978
Tingkat penetrasi (%)[2]	22,9	22,4	19,7	19,7

Catatan:
(1) Merupakan total pendapatan F&B sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop, dimana pendapatan F&B sebelum pajak merupakan pendapatan F&B sebelum dipotong pajak yang berlaku.
(2) Mengacu pada presentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.

Penonton hanya diperbolehkan membawa dan mengkonsumsi produk F&B yang dibeli di bioskop Cinema XXI. Pendapatan Cinema XXI dari penjualan produk F&B telah meningkat secara signifikan pada masa pemulihan pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B adalah Rp215,5 miliar pada bulan Mei 2022, yang meningkat dari pendapatan dari penjualan F&B sebesar Rp143,7 miliar pada bulan Mei 2019. Pendapatan penjualan F&B Cinema XXI mewakili 40,4%, 41,7%, 48,9% dan 53,0% dari pendapatan bioskop Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Untuk mencapai hal ini, Cinema XXI telah menerapkan beberapa inisiatif selama beberapa tahun terakhir, seperti (i) rasionalisasi SKU untuk memastikan Cinema XXI mempertahankan produk yang diminati dan menguntungkan; (ii) digitalisasi stan F&B Cinema XXI untuk mengoptimalkan waktu layanan termasuk peningkatan penggunaan m.food dan menyediakan area pemesanan dan pengambilan khusus; (iii) pengembangan produk baru, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan target penonton masing-masing teater; (iv) komunikasi produk dan strategi pemasaran yang efektif; (v) kemitraan yang kuat dan konsisten; dan (vi) diversifikasi ke saluran penjualan daring dan di luar bioskop.

Cinema XXI melakukan proses rasionalisasi SKU berbasiskan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja F&B secara keseluruhan. Cinema XXI mengoptimalkan jenis SKU yang dijual dengan menganalisis kuantitas dan nilai penjualan, marjin laba kotor, kegiatan operasi dalam persiapan dan proses produksi, beban pokok penjualan dan jumlah gerai untuk masing masing SKU setiap bulan. Jika suatu SKU teridentifikasi berkinerja di bawah target, tim Cinema XXI akan mempertimbangkan apakah SKU tersebut harus dipertahankan. Antara tahun 2019 dan 2022, melalui proses rasionalisasi, Cinema XXI telah mengganti 46 SKU dalam kategori makanan dan 44 SKU dalam kategori minuman.

Strategi penetapan harga produk F&B dilakukan berdasarkan lokasi dan daya beli target pasar. Cinema XXI menggunakan strategi penetapan harga variabel untuk menentukan harga produk F&B. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga produk F&B meliputi (i) biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat *item* menu; (ii) kompleksitas operasional (dalam hal waktu dan proses) untuk menyiapkan *item* menu; harga umumnya lebih tinggi untuk produk F&B yang membutuhkan lebih banyak waktu persiapan atau memasak atau lebih kompleks untuk disiapkan; (iii) harga pesaing untuk produk substitusi di daerah tersebut; (iv) jenis lokasi pusat perbelanjaan tempat gerai F&B Cinema XXI berada, dan wilayah tempat gerai F&B Cinema XXI berada (sebagai contoh, Jawa, di luar Jawa dan Indonesia Timur); setiap jenis gerai F&B Cinema XXI memiliki skema harga sendiri tergantung pada wilayah dan jenis lokasi, misalnya XXI Café di lokasi Tipe A di Jawa akan memiliki harga yang sama untuk produk yang sama; dan (v) perbedaan harga dari *item* menu lainnya. Tim penetapan harga Cinema XXI senantiasa menganalisis berbagai variabel tersebut dan menetapkan harga secara semi-tahunan kecuali untuk situasi khusus yang memerlukan evaluasi sesuai kebutuhan. Harga produk F&B Cinema XXI secara historis menunjukkan tren peningkatan antara tahun 2018 dan 2022 kecuali untuk tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana hal ini menunjukkan kemampuan Cinema XXI untuk mempertahankan strategi penetapan harga yang sehat.

Produk F&B Cinema XXI dijual secara *offline* seperti di gerai XXI Café yang berlokasi di bioskop, The Premiere Café, XXI Lounge, restoran Hello Sunday dan melalui platform digital internal Cinema XXI, m.food, dan platform pengiriman berbasis daring lain seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 95,0% dan 5,0% dari produk F&B Cinema XXI masing-masing dijual di gerai *offline* dan platform berbasis daring Cinema XXI.

Cinema XXI juga memperluas saluran penjualan dengan membuka saluran *online* dan saluran lain di luar bioskop. Secara khusus, pengenalan m.food telah memungkinkan layanan F&B yang lebih lancar dan lebih cepat. Sistem *pre-order* pada m.food ditambah dengan titik pengambilan makanan terpisah memungkinkan penonton bioskop untuk menghindari antrian panjang dan mendapatkan pengalaman menonton yang lebih menyenangkan. Penonton akan terhindar dari rasa kecewa karena tidak dapat memesan camilan atau makanan tertentu (terutama apabila mereka menghabiskan waktu untuk mengantri) karena mereka dapat melihat ketersediaan produk F&B terlebih dahulu. Selain menciptakan pengalaman yang menyenangkan, m.food juga mendorong peningkatan belanja F&B dengan menargetkan penonton yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengantri pemesanan sebelum film berlangsung. Per tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari penjualan F&B melalui m.food mewakili 71,0% dari total pendapatan dari penjualan F&B *online*. Cinema XXI bermaksud untuk menawarkan fitur penjualan F&B yang serupa di aplikasi selular TIX.ID. Cinema XXI juga bermaksud untuk meluncurkan fitur tersebut lebih awal di beberapa bioskop untuk mengukur respon penonton sebelum meluncurkannya secara luas di berbagai lokasi bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi m.tix terhadap total penjualan F&B untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Kontribusi m.tix terhadap total penjualan F&B	3,6%	2,4%	0,8%	0,4%

Segmen bisnis iklan

Cinema XXI menyediakan layanan iklan berbasis layar, *offline* dan *online,* dengan memanfaatkan infrastruktur bioskop dan platform berbasis daring Cinema XXI yang ada untuk menampilkan iklan. Iklan berbasis layar mencakup iklan film dan *slide* yang ditampilkan sebelum pemutaran film. Iklan *offline* termasuk tampilan di lobi bioskop Cinema XXI, loket tiket, display LED dan kotak popcorn, iklan di toilet dan eksterior bioskop dalam rangka *branding*. Beberapa merek yang beriklan di bioskop Cinema XXI termasuk barang *fast-moving consumer goods*, perbankan dan layanan keuangan lainnya, properti, *e-commerce*, otomotif, pendidikan, teknologi, klinik kecantikan, dan biro iklan. Iklan daring dilakukan melalui *banner* di situs web dan aplikasi digital berbasis seluler Cinema XXI. Bisnis periklanan Cinema XXI menawarkan sejumlah keuntungan kepada pelanggan, seperti jangkauan luas, dan kemampuan penargetan.

Pendapatan iklan Cinema XXI mewakili 7,2%, 7,9%, 0,8%, dan 3,0% dari total pendapatan Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Pendapatan iklan Cinema XXI pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan pendapatan secara historis sebagai akibat pandemi COVID-19.

Pendapatan iklan

Mayoritas bisnis periklanan Cinema XXI berupa iklan berbasis layar. Per tanggal 31 Desember 2022, iklan berbasis layar menyumbang 98,9% dari pendapatan iklan dan sisanya sebesar 1,1% dari iklan berbasis *offline* dan *online*.

Strategi penetapan harga untuk pendapatan iklan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti (i) jumlah penonton historis dan potensial; (ii) total biaya potensial yang mungkin perlu ditanggung termasuk pajak, biaya infrastruktur, dan biaya operasional; (iii) karakteristik bioskop untuk menentukan jumlah total penonton potensial dan segmen target pasar; dan (iv) data historis dan proyeksi utilisasi layar. Cinema XXI memutuskan daftar tarif iklan sesuai dengan lokasi yang tersedia untuk pendapatan iklan. Cinema XXI menggunakan pendekatan yang sama untuk iklan berbasis layar, iklan berbasis *offline*, dan iklan berbasis *online,* kecuali data utilisasi layar yang hanya dipakai untuk iklan berbasis layar.

Untuk iklan berbasis layar, Cinema XXI mengevaluasi semua lokasi bioskop yang tersedia dan mengklasifikasikan tarif iklan untuk teater Deluxe ke dalam delapan kategori harga, di mana setiap lokasi teater Deluxe hanya menggunakan satu dari delapan kategori harga tersebut. Kategori harga ini tidak berlaku untuk teater The Premiere dan IMAX, yang mengenakan tarif iklan tetap per layar di manapun lokasinya. Setelah delapan kategori harga untuk teater Deluxe ditetapkan, Cinema XXI juga membedakan tarif iklan yang dikenakan berdasarkan durasi iklan dan kelompok layar. Tarif dasar iklan dipatok berdasarkan durasi (baik 30 atau 60 detik), dan terdapat tiga slot premium untuk menayangkan iklan tepat sebelum pemutaran film yang harganya 25% lebih tinggi dari tarif dasar iklan yang berdurasi 30 detik. Selain itu, Cinema XXI juga menawarkan kepada klien tiga pilihan untuk menampilkan dan menempatkan iklannya, yaitu (i) reguler; (ii) premium; dan (iii) iklan yang mengikuti judul film. Iklan reguler dikenakan tarif dasar dan klien tidak dapat memilih posisi iklan dan jenis film. Iklan premium dikenakan biaya tambahan atau tarif khusus dan klien dapat memilih posisi penayangan iklan mendekati pemutaran film. Secara khusus, untuk iklan yang mengikuti judul film, klien dapat memilih opsi untuk menempatkan iklan mereka dengan film tertentu, sehingga iklan dapat menjangkau penonton yang ditargetkan. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat bisnis iklan berbasis layar, Cinema XXI telah menambahkan total waktu yang tersedia untuk pemutaran iklan per pertunjukan dengan meningkatkan efisiensi proses pembersihan teater dari sekitar 15 menit menjadi sekitar lima menit.

Untuk iklan berbasis *offline*, tarif iklan ditentukan berdasarkan masa tayang iklan, jenis bioskop dan penonton. Cinema XXI juga membedakan tarif iklan berbasis *offline* sesuai dengan jenis aktivitas yang dipertimbangkan klien. *Booth* dapat disewa oleh klien selama tujuh hari atau 30 hari, sementara papan nama digital dapat disewa selama 30 hari. Cinema XXI dapat menyesuaikan tarif dan masa sewa apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien. Daftar harga *booth* dikelompokkan menjadi tujuh kategori harga, sedangkan daftar harga untuk papan nama digital dikelompokkan menjadi lima kategori harga, tergantung pada tipe teater (Regular/Deluxe, The Premiere atau IMAX) dan target pasar.

Cinema XXI menggunakan situs web dan platform media sosial untuk iklan berbasis *online*. Strategi penetapan harga untuk beriklan di situs web Cinema XXI memperhitungkan sejumlah variabel, seperti (i) jumlah kunjungan ke situs web; (ii) jumlah *impression* (ketika pengguna melihat iklan); (iii) rasio klik-tayang (*the click through rate*); dan (iv) penempatan materi iklan di situs web. Daftar harga untuk beriklan di platform media sosial mempertimbangkan variabel yang sama. Cinema XXI mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk posisi iklan tertentu di dalam situs web yang memiliki jumlah kunjungan, *impression*, dan rasio klik-tayang yang lebih tinggi. Strategi penetapan harga di platform media sosial mempertimbangkan variabel, seperti (i) jumlah *follower* di media sosial Cinema XXI; (ii) tingkat *engagement* di platform media sosial; dan (iii) jenis media sosial. Daftar harga iklan untuk platform media sosial juga memperhitungkan jumlah *posting*, durasi *posting*, jenis *posting* dan platform yang dipilih oleh klien. Cinema XXI meninjau daftar harga iklan berbasis *online* setahun sekali tetapi tarif iklan dapat disesuaikan untuk kasus-kasus tertentu. Dikarenakan bisnis iklan berbasis *online* saat ini

masih berkembang dan memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan iklan secara keseluruhan, Cinema XXI seringkali menawarkan paket iklan gabungan berbasis *online* dan *offline* agar lebih menarik bagi klien, sambil tetap mempromosikan iklan berbasis *online*.

Sebagai bagian dari upaya Cinema XXI untuk meningkatkan pemasangan iklan pasca COVID-19 dan menarik klien untuk bekerja sama lagi, Cinema XXI saat ini juga menawarkan diskon besar untuk tarif iklan.

Segemen bisnis platform digital

Cinema XXI memperoleh pendapatan dari imbalan atas layanan (*convenience fee*) yang dibayarkan pengguna sistem reservasi tiket berbasis seluler Cinema XXI, m.tix dan TIX.ID.

Segmen bisnis acara dan segmen bisnis lainnya

Cinema XXI memperoleh pendapatan dari sewa peralatan dan biaya layanan (*service fee*) untuk acara yang diselenggarakan di lokasi privat, XXI Ballroom. *Venue* ini melayani penyelenggaraan acara pribadi atau perusahaan dengan jumlah peserta yang besar. XXI Ballroom menawarkan layanan F&B yang fleksibel termasuk menu prasmanan atau set menu. Pelanggan Cinema XXI dapat menggunakan XXI Ballroom untuk acara presentasi, konferensi, dan pernikahan.





Lebih lanjut, Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari *arcade game* yang berlokasi di area lobi bioskop dan penjualan *voucher* dan *movie card*.

7. Penjualan, promosi dan pemasaran

Setiap arus pendapatan Cinema XXI didukung oleh serangkaian kegiatan penjualan, promosi, dan pemasaran yang disesuaikan dengan sifat dari masing-masing kegiatan usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar Cinema XXI.

Segmen bisnis bioskop

Cinema XXI memanfaatkan pemasaran omnichannel yang inovatif melalui saluran *offline* dan *online* untuk penjualan, pemasaran, dan promosi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 57,7% dari volume penjualan tiket Cinema XXI dikontribusikan oleh penjualan *offline* sementara sisanya sebesar 42,3% dari penjualan *online*. Saluran distribusi *offline* Cinema XXI mencakup *outlet* penjualan di semua bioskop Cinema XXI, sementara penjualan *online* dilakukan melalui m.tix dan TIX.ID. m.tix adalah sistem reservasi tiket eksklusif untuk bioskop Cinema XXI sementara TIX.ID adalah sistem reservasi tiket untuk berbagai bioskop utama di Indonesia, termasuk Cinema XXI.

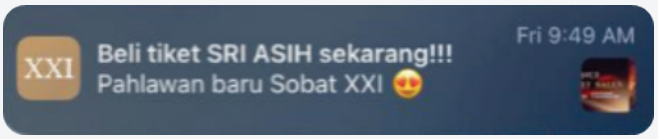
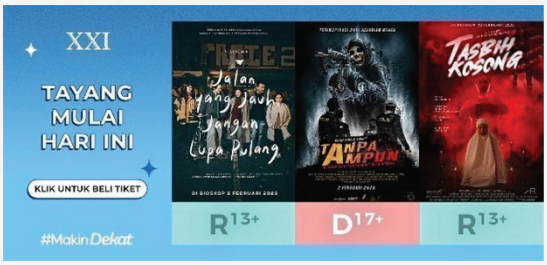
Strategi pemasaran Cinema XXI untuk meningkatkan penjualan *gross box office* dilakukan dengan cara mengkomunikasikan (i) lokasi baru; (ii) skema promosi baru; dan (iii) penawaran film baru kepada penonton dan calon penonton. Cinema XXI mengkomunikasikan informasi tersebut melalui kegiatan pemasaran *online* dan *offline*.

Cinema XXI melakukan aktivitas pemasaran *online* yang dilakukan oleh tim internal, meliputi pengiriman notifikasi elektronik, dan mengunggah konten dan berita di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok dan YouTube, hingga melibatkan *key opinion leader* dan *influencer* untuk bermitra dengan Cinema XXI dalam mempromosikan film yang akan diputar di bioskop, produk Cinema XXI, skema promosi dan lokasi bioskop baru. Iklan dan promosi *online* Cinema XXI di berbagai platform Instagram, Facebook dan YouTube menjangkau setidaknya 881.000 orang per bulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh platform media sosial. Untuk kampanye khusus, Cinema XXI juga melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan iklan Cinema XXI di platform media sosial.

Untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, Cinema XXI juga menjangkau pelanggan yang terdaftar di dalam platform digital Cinema XXI, m.tix dan TIX.ID, melalui berbagai aktivitas pemasaran mulai dari pengiriman email hingga notifikasi elektronik untuk memberitahukan skema promosi dan informasi terbaru. Kegiatan pemasaran *offline* juga meliputi penggunaan *billboard*, *tent card*, spanduk film dan poster film. Pada saat peluncuran produk dan layanan spesial, konferensi pers juga dapat diadakan sebagai bagian dari pemasaran Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh aktivitas pemasaran Cinema XXI dalam penjualan *gross box office*:

Saluran	Kegiatan Pemasaran
Offline – Pemasaran lokasi baru menggunakan *billboard* dan spanduk	
Online – Pemasaran film baru menggunakan media sosial	

Saluran	Kegiatan Pemasaran
Online – Pemasaran film baru di situs web Cinema XXI	
Online – Pemasaran film baru menggunakan notifikasi elektronik	
Online – Pemasaran film baru menggunakan aplikasi	
Offline/Online – Kemitraan pihak ketiga dengan lembaga keuangan dan non-keuangan untuk melakukan promosi di media sosial dan media *offline*	

Strategi promosi Cinema XXI berfokus dan terpusat pada kampanye bersama mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Cinema XXI menandatangani perjanjian dengan mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank dalam mempromosikan metode pembayaran mitra dalam bentuk diskon atau penawaran khusus tertentu untuk pembayaran yang menggunakan kartu atau metode pembayaran mereka. Diskon dan penawaran khusus tersebut juga bisa mendorong penonton untuk meningkatkan belanja mereka di bioskop. Cinema XXI juga dapat diharuskan oleh beberapa lembaga keuangan untuk mengintegrasikan metode pembayaran mereka ke dalam sistem reservasi tiket (khususnya, m.tix) sebagai bagian dari kampanye bersama. Semua biaya yang timbul dari kegiatan promosi akan ditanggung oleh mitra Cinema XXI. Metode promosi, serta tingkat integrasi promosi dan metode pembayaran dapat bervariasi tergantung pada masing-masing perjanjian. Cinema XXI juga bersama-sama mitra mempromosikan kampanye ini di berbagai platform media sosial.

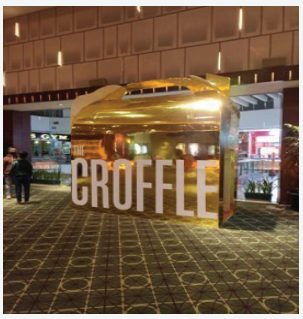
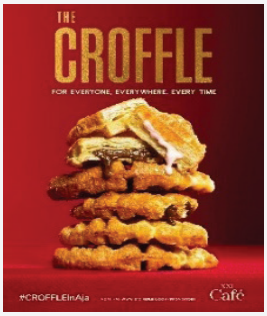
Segemen bisnis F&B

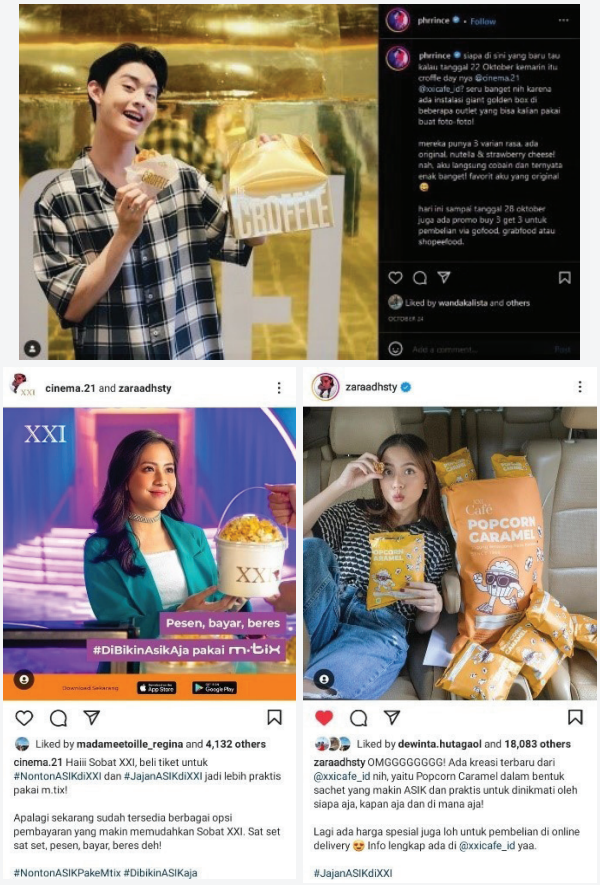
Cinema XXI melakukan penjualan produk F&B baik secara *offline* maupun *online* dengan sebagian besar produk F&B dijual melalui saluran *offline*. Pada tanggal 31 Desember 2022, 95,0% dari penjualan F&B berasal dari saluran *offline*, sedangkan 5,0% sisanya berasal dari saluran *online*. Saluran *offline* Cinema XXI mencakup penjualan di XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounges, dan restoran Hello

Sunday. Cinema XXI juga menjual makanan di platform digital eksklusif milik Cinema XXI, yaitu m.food. Selain itu, produk F&B juga tersedia di platform pengiriman berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood.

Strategi pemasaran Cinema XXI untuk bisnis F&B berfokus pada (i) menu yang disesuaikan berdasarkan lokasi outlet dan segmen target pasar; (ii) mengkomunikasikan promosi dan peluncuran produk baru; dan (iii) melakukan kolaborasi dengan merek-merek populer pada saat peluncuran produk baru untuk mendapatkan dukungan pemasaran berupa diskon produk merek tersebut. Cinema XXI melakukan pemasaran untuk produk F&B baik secara *offline* maupun *online*. Kegiatan pemasaran *offline* meliputi penggunaan papan iklan digital di semua lokasi bioskop Cinema XXI untuk menampilkan menu dan promosi, menyediakan menu cetak dan kegiatan *upselling* yang dilakukan oleh staf bioskop. Cinema XXI juga memanfaatkan siaran pers dan acara khusus untuk mendukung peluncuran produk. Untuk pemasaran *online*, Cinema XXI menggunakan berbagai kanal media sosial dan digital untuk melakukan notifikasi elektronik, pemasaran, pemasaran berbasis kinerja, kemitraan dengan para *key opinion leader* dan *influencer*, serta mengelola hubungan dengan pelanggan.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh aktivitas pemasaran untuk penjualan F&B:

Saluran	Kegiatan Pemasaran
Offline – Peluncuran produk baru	  
Online – Peluncuran produk baru menggunakan media sosial	     

Saluran	Kegiatan Pemasaran
Online **–** Kegiatan promosi dan komunikasi rutin mengenai produk melalui media sosial	
Online – Pemasaran di media sosial melalui kemitraan dengan *key opinion leader*	

Strategi promosi F&B dilakukan secara konsisten dengan strategi promosi Cinema XXI untuk penjualan *gross box office* dan berfokus pada kegiatan promosi bersama dengan mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Mitra Cinema XXI saat ini meliputi, antara lain PT Bank Central Asia Tbk, Coca Cola dan DBS, dan penonton Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat menikmati promosi berupa diskon atau penawaran khusus jika menggunakan metode pembayaran pihak ketiga pada saat membeli produk F&B. Cinema XXI mengintegrasikan promosi dari mitra pembayaran dengan penawaran F&B serta melakukan promosi melalui notifikasi elektronik terkait promosi F&B. Biaya promosi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mitra Cinema XXI, dan syarat serta ketentuan untuk metode dan skema promosi bersama tersebut umumnya fleksibel.

Selain itu, Cinema XXI juga memasarkan produk F&B dengan mempromosikan dan mengkombinasikan berbagai pilihan paket dan harga. Cinema XXI saat ini menyesuaikan paket F&B berdasarkan lokasi bioskop, dan daya beli masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Cinema XXI terkadang menyesuaikan paket F&B berdasarkan perayaan atau tren musiman, misalnya paket F&B Ramadan selama periode

Ramadan. Cinema XXI bermaksud untuk terus melakukan hal ini dikarenakan paket F&B tidak hanya meningkatkan nilai transaksi rata-rata, tetapi juga memudahkan penonton pada saat memilih produk F&B sehingga mengurangi waktu layanan dan antrian, serta meningkatkan penetrasi secara keseluruhan. Selain membuat penawaran paket F&B, Cinema XXI juga menggabungkan penawaran produk F&B dengan tiket film, baik tiket film yang dijual di platform *online* maupun *offline*. Cinema XXI juga terus menerapkan strategi *upsize*/*add-on* untuk menjual produk F&B dengan melatih staf Cinema XXI agar melakukan *up-sell* atau membujuk penonton untuk melakukan *upgrade* atas pilihan produk mereka, di mana hal ini akan meningkatkan nilai transaksi rata-rata dan pendapatan F&B secara keseluruhan.

Segmen bisnis iklan

Strategi pemasaran dan penjualan Cinema XXI untuk bisnis periklanan berfokus untuk (i) meningkatkan jumlah klien yang bekerja sama dengan Cinema XXI secara langsung untuk layanan iklan dikarenakan Cinema XXI dapat mengenakan tarif yang lebih baik kepada klien langsung dibandingkan tarif kepada agensi periklanan yang seringkali meminta diskon lebih besar untuk penggunaan layanan yang sama; (ii) meningkatkan utilisasi aset Cinema XXI (terutama layar bioskop) di luar Jakarta; dan (iii) memperbaiki skema penjualan jasa periklanan Cinema XXI dan menawarkan tarif dasar untuk iklan dengan waktu tayang 60 dan 30 detik untuk menarik lebih banyak klien yang biasa bekerja sama dengan industri televisi. Cinema XXI menyelenggarakan acara tahunan untuk klien iklan serta berbagai acara lainnya guna mempertahankan dan mempererat hubungan dengan klien langsung maupun agensi periklanan. Cinema XXI juga menggunakan acara tahunan tersebut dan tim penjualan internal untuk menjangkau dan memperoleh kesempatan bisnis dan klien baru.

Untuk mempromosikan bisnis periklanan, Cinema XXI menawarkan berbagai variasi skema diskon untuk agensi periklanan dan klien langsung berdasarkan jumlah lokasi yang digunakan untuk layanan Cinema XXI, *bundling* iklan berbasis *offline* dengan iklan berbasis layar (seperti menawarkan *booth* atau papan iklan digital bersama-sama dengan iklan berbasis layar pada harga yang menarik) dan penggunaan paket yang ditawarkan selama periode *low season* (seperti strategi "*Buy 1 Get 1 Location Free*" saat mempromosikan suatu lokasi pemasangan iklan). Beberapa skema diskon yang pernah ditawarkan Cinema XXI termasuk diskon berjenjang tergantung pada jenis dan nilai iklan yang dipasang oleh klien. Selain potongan harga, Cinema XXI juga memberikan persentase tambahan kepada agensi periklanan saat mencapai nilai pesanan tertentu. Hal tersebut membantu Cinema XXI dalam memperoleh nilai transaksi yang lebih tinggi untuk layanan periklanan dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari agensi periklanan.

8. Utilitas dan pengadaan bahan baku dan peralatan

Utilitas

Cinema XXI menggunakan berbagai macam utilitas untuk kegiatan operasi, termasuk listrik, gas, dan air. Seluruh bioskop Cinema XXI rata-rata setiap hari menggunakan total 302.415 kilowatt listrik per jam, 1.269 meter kubik air per hari dan 144,8 meter kubik gas per hari antara tahun 2019 sampai dengan 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022, biaya utilitas masing-masing menyumbang sebesar 11,9%, 13,8%, 24,1%, dan 16,5% dari total beban dan biaya operasi, dan 19,2% dan 15,3% dari total beban dan biaya operasi masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. Mengingat sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di pusat perbelanjaan, listrik dan air telah disediakan oleh manajemen gedung tersebut. Gas hanya digunakan di beberapa lokasi dan penggunaannya tidak signifikan. Biaya untuk gas hanya sekitar 0,1%, 0,1%, 0,1% dan 0,2% dari total beban dan biaya operasi Cinema XXI (tidak termasuk penyusutan) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 serta 0,1%, dan 0,2% dari total beban dan biaya operasi masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. Cinema XXI sebelumnya tidak pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan utilitas yang memadai sesuai dengan tarif pasaran.

Pengadaan bahan baku dan peralatan

Cinema XXI menggunakan biji popcorn *non-Genetically Modified Organism* ("**non-GMO**"), garam, mentega dan minyak sebagai bahan baku utama untuk memproduksi produk F&B utama, yaitu popcorn. Cinema XXI mengimpor bahan baku ini dari Amerika Serikat. Cinema XXI memperoleh kentang goreng dari merek global terpercaya di Amerika Serikat agar dapat menyajikan produk berkualitas lebih baik bagi pelanggan dibandingkan dengan restoran cepat saji di Indonesia. Untuk roti *burger* dan sosis *hot dog*, Cinema XXI menggunakan produk bersertifikasi halal serta saus dan roti berkualitas. Bahan-bahan ini dipasok oleh pihak terafiliasi dengan Cinema XXI, yaitu Delta Sejahtera dan Delta Sentosa.

Delta Sejahtera dan Delta Sentosa membantu Cinema XXI dalam mengelola distribusi produk F&B Cinema XXI dan bertanggung jawab atas:

- *Pembelian*: Pengadaan dan pembelian produk F&B dari pemasok;

- *Penyimpanan*: Penyimpanan bahan baku dan produk dalam lingkungan yang aman dan terkendali untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan-bahan tersebut serta mengelola pasokan untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai;

- *Transportasi*: Pengangkutan bahan baku dan produk dari sumbernya ke berbagai lokasi bioskop secara langsung maupun melalui perantara dan memastikan pengiriman bahan baku dan produk tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan;

- *Logistik*: Pengelolaan logistik di dalam proses distribusi Cinema XXI, mencakup perencanaan dan penjadwalan pengiriman, koordinasi dengan pemasok dan perantara, serta pelacakan status pengiriman; dan

- *Pengendalian kualitas*: Pemantauan dan pengendalian kualitas bahan baku dan produk selama proses distribusi, termasuk melalui pengujian dan inspeksi secara teratur untuk memastikan bahwa produk F&B yang diperoleh dari pemasok memenuhi standar kualitas dan kebersihan Cinema XXI.

Sebagian besar bahan baku, termasuk minuman ringan seperti air mineral Aqua dan Coca-Cola, diperoleh dari pemasok utama melalui kontrak pemasokan yang umumnya mengirimkan bahan baku langsung kepada Cinema XXI. Harga bahan baku dalam beberapa kontrak pemasokan ditentukan menggunakan formula yang mengikuti harga pasar, sementara kontrak pemasokan bahan baku lainnya menggunakan harga yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar dan nilai tukar mata uang asing.

Cinema XXI membeli peralatan untuk bioskop melalui satu importir, Megatech, yang juga merupakan pihak terafiliasi. Peralatan Cinema XXI untuk proyektor IMAX yang menyajikan sistem laser komersial IMAX dan sistem digital Xenon saat ini dipasok sesuai dengan perjanjian jual dan beli dan proyektor IMAX yang menyajikan sistem laser XT dari IMAX dipasok sesuai dengan perjanjian sewa. Ke depannya, Cinema XXI bermaksud untuk hanya melakukan perjanjian sewa untuk proyektor IMAX yang digunakan di teater baru dikarenakan pengaturan tersebut mengurangi kebutuhan investasi awal.

9. Faktor musiman

Pendapatan dan arus kas Cinema XXI bergantung pada jadwal penayangan film dari para distributor utama film internasional. Film-film yang paling banyak menarik penonton biasanya dirilis dan diimpor pada musim libur sekolah, libur lebaran dan libur akhir tahun. Oleh karenanya, bisnis Cinema XXI sangat musiman, dengan jumlah penonton dan pendapatan yang cenderung lebih tinggi selama libur sekolah, libur lebaran dan musim libur pada bulan Mei-Juli dan November-Desember. Sebaliknya, Cinema XXI secara historis mengalami tingkat kunjungan yang lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal lainnya, dan hasil operasional Cinema XXI kemungkinan akan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari satu kuartal ke kuartal lainnya.

Dampak faktor musiman terhadap pendapatan Cinema XXI sebagian dapat dimitigasi dengan meningkatkan rilis film domestik yang memiliki jadwal rilis yang berbeda dengan jadwal film impor. Cinema XXI berusaha mengurangi dampak musiman dalam pendapatan Cinema XXI melalui kerja sama dengan rumah produksi lokal untuk jadwal rilis film domestik dan memperbanyak penayangan film lokal di luar periode musim libur sekolah, liburan lebaran dan liburan akhir tahun.

10. Riset dan pengembangan

Untuk memastikan Cinema XXI selalu menawarkan produk inovatif dan terbaru, seperti croffle, yang sesuai dengan perkembangan tren pasar dan preferensi konsumen terbaru, Cinema XXI menyelenggarakan program tahunan "Hari Inovasi" sejak tahun 2012 (kecuali selama pandemi COVID-19). Program "Hari Inovasi" merupakan acara yang mempromosikan kreativitas dan inovasi, mendorong kolaborasi, dan menyediakan sarana bagi individu dan tim untuk saling berbagi ide mengenai produk. Acara ini diadakan secara internal dan dimaksudkan untuk menginspirasi karyawan Cinema XXI agar berpikir di luar kebiasaan, menghasilkan solusi kreatif untuk masalah yang mungkin ada, dan berbagi ide mereka dengan orang lain di dalam organisasi. Hal ini menyediakan sarana bagi karyawan Cinema XXI untuk saling terhubung dan berkolaborasi, serta mengembangkan ide, produk, dan kemitraan baru yang dapat membantu mengembangkan bisnis Cinema XXI. Melalui program tersebut, karyawan memiliki waktu satu bulan untuk saling berkompetisi dalam menciptakan menu inovatif yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha F&B atau untuk mendesain solusi bisnis yang inovatif maupun proses untuk meningkatkan efisiensi layanan. Ide tersebut selanjutnya akan diajukan ke panel juri internal, dan produk dan ide yang menang dapat diimplementasi ke dalam kegiatan usaha atau disempurnakan di tahap pengembangan produk. Program ini juga telah berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI, dan ide dari pemenang sebelumnya telah diimplementasikan sebagai bagian dari menu F&B. Sebagai contoh, Cinema XXI sebelumnya telah meluncurkan usulan dari pemenang seperti *pink berry yoghurt*, *ice milk coffee* dan soto mi ke dalam menu untuk berbagai merek F&B. Cinema XXI juga menerima *update* berkala mengenai tren produk F&B terbaru dari pemasok global dan mengirim karyawan Cinema XXI ke luar negeri untuk memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam berbagai tren bisnis F&B. Cinema XXI juga memiliki proses pengembangan produk F&B yang ketat.

11. Persaingan

Kompetitor utama Cinema XXI di industri bioskop di Indonesia termasuk CJ CGV dan Cinépolis. Menurut Euromonitor, Cinema XXI adalah operator bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2021. Terlepas dari pesaingan dalam industri bioskop, Cinema XXI juga bersaing dengan platform hiburan alternatif seperti layanan *streaming* termasuk Netflix dan Disney+ yang memfasilitasi rilis film. Secara khusus, film Hollywood tertentu dan film Marvel Cinematic Universe dapat ditayangkan di platform *streaming* (khususnya Disney+) tidak lama setelah dirilis di bioskop sehingga penggemar film dapat memilih untuk menunggu rilis film di platform *streaming* daripada menonton di bioskop.

12. Teknologi informasi

Dalam rangka memenuhi komitmen Cinema XXI terhadap visi memberikan kualitas terbaik, Cinema XXI menggunakan teknologi dan data dalam setiap aspek kegiatan usaha. Hal tersebut tercermin dalam berbagai aplikasi dan teknologi pendukung yang digunakan oleh Cinema XXI. Teknologi informasi Cinema XXI terdiri dari tiga kelompok aplikasi: (i) aplikasi inti; (ii) aplikasi pendukung; dan (iii) aplikasi *back-office*. Aplikasi inti sangat penting bagi operasi bisnis Cinema XXI yang meliputi aplikasi reservasi tiket bioskop, penjualan F&B, m.tix dan TIX.ID. Tim internal Cinema XXI mengembangkan aplikasi reservasi tiket Cinema XXI, yaitu m.tix, sementara aplikasi F&B dikembangkan oleh pihak ketiga dan telah disesuaikan dengan kebutuhan Cinema XXI. TIX.ID dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra pihak ketiga yang berperan sebagai penasihat teknis dalam hal inovasi teknologi, serta mitra promosi, kampanye dan akuisisi pelanggan. Aplikasi inti Cinema XXI ditempatkan dalam platform

Google Cloud. Cinema XXI menggunakan aplikasi pendukung untuk platform iklan dan pemasaran. Aplikasi *back-office* terdiri dari sistem yang digunakan oleh tim akuntansi, keuangan dan sumber daya manusia. Aplikasi pendukung dan sistem *back-office* Cinema XXI ditempatkan di pusat data Indonet dengan pusat pemulihan bencana berada di kantor Parama.

Cinema XXI telah melakukan otomatisasi seluruh proses pemesanan tiket, pembayaran dan penyelesaian pembayaran. Penonton dapat memilih film yang diputar di bioskop tertentu pada tanggal dan waktu tertentu melalui aplikasi m.tix atau TIX.ID. Cinema XXI secara otomatis memvalidasi setiap pesanan terhadap data ketersediaan tempat duduk di pusat data Cinema XXI. Setelah penonton memilih tempat duduk yang tersedia, sistem Cinema XXI akan terhubung dengan mitra pembayaran melalui *application programming interface* (API) untuk melakukan pengecekan saldo dan konfirmasi pembayaran. Setelah dikonfirmasi, sistem akan melanjutkan dengan konfirmasi pesanan yang dikirim melalui aplikasi Cinema XXI atau email berupa id pemesanan dan/atau kode QR yang dibuat secara otomatis. Apabila tempat duduk tidak tersedia, maka sistem Cinema XXI akan membatalkan pemesanan dan memberikan notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi m.tix atau TIX.ID. Penyelesaian pembayaran dengan mitra pembayaran biasanya dilakukan dalam waktu dua hari kerja. Cinema XXI menerima dokumen penyelesaian dari mitra pembayaran dan membandingkan data tersebut dengan data transaksi internal Cinema XXI untuk proses rekonsiliasi harian.

Dalam hal proses otomatisasi transaksi penjualan tiket bioskop dan produk F&B, Cinema XXI masih menerapkan sistem campuran (*hybrid*) untuk melayani transaksi secara *offline* maupun *online*. Hal tersebut dilakukan agar Cinema XXI dapat tetap melayani pembelian tiket melalui sistem *offline* jika terjadi gangguan jaringan data atau internet antara server pusat dengan bioskop. Transaksi *offline* Cinema XXI akan disinkronisasi kembali dengan server pusat pada saat bioskop Cinema XXI terhubung kembali ke server pusat. Rekonsiliasi kas juga dilakukan secara harian dengan mitra pembayaran Cinema XXI. Sistem m.tix adalah sistem utama untuk memesan tiket Cinema XXI secara digital. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki lebih dari 7,5 juta anggota terdaftar pada m.tix. Perseroan memulai promosi bersama untuk dompet m.tix dengan BCA-Sakuku pada bulan Agustus 2022 berdasarkan perjanjian kerja sama *cobranding* dengan PT Bank Central Asia Tbk.

Cinema XXI telah menggunakan sistem POS untuk sinkronisasi data dengan sistem di kantor pusat secara *real-time* agar dapat meningkatkan kemampuan Cinema XXI dalam memaksimalkan pendapatan, pengendalian biaya dan pengelolaan operasi dengan efisien. Sistem POS yang terpasang di semua lokasi bioskop Cinema XXI akan memberikan informasi ketersediaan tempat duduk dan penjualan secara *real-time* kepada manajemen. Informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen dan staf penjualan tiket untuk mencegah penjualan ganda suatu film dan memberikan respon yang cepat dan akurat akan permintaan informasi jadwal penayangan film dan ketersediaan tempat duduk bagi penonton. Sistem tersebut juga menyediakan laporan persediaan di dalam bioskop yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian persediaan yang efisien, memiliki pilihan bahasa, menawarkan berbagai opsi harga tiket, mengintegrasikan penjualan tiket secara daring dan memproses transaksi kartu kredit.

Cinema XXI telah menggunakan *Oracle E-Business Suite* untuk kebutuhan akuntansi dan keuangan, serta *Oracle Analytic Cloud* dan *Oracle Planning and Budgeting* sebagai sistem pendukung divisi keuangan. Cinema XXI juga menggunakan *Sunfish* dari PT Indodev Niaga Internet sebagai sistem pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian. Kegiatan usaha F&B Cinema XXI menggunakan Ravintola yaitu solusi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Cinema XXI dan dikembangkan oleh PT Cipta Solusi Datarindo untuk sistem POS termasuk untuk pengelolaan rantai pasokan.

Cinema XXI juga menggunakan Gen 21 dari PT Infotech Solutions untuk solusi iklan dan pemasaran. Dengan sistem *dashboard* pada Gen 21, Cinema XXI dapat memonitor utilisasi layar dan waktu tayang di bioskop, serta urutan iklan untuk kelancaran proses penayangan iklan tersebut agar tepat waktu. Solusi tersebut juga dapat digunakan untuk memantau data dan mengelola konten sehingga dapat lebih mengoptimalkan proses penjualan iklan dengan cara mengidentifikasi slot waktu dan layar bioskop yang tersedia. Hal ini telah berhasil mengurangi pekerjaan manual dan membantu proses evaluasi kinerja penjualan iklan yang lebih efisien.

Cinema XXI juga telah membentuk Departemen Kebijakan dan Keamanan TI, yang terdiri dari dua unit kolaboratif yaitu Operasional Keamanan TI dan Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI. Sebagai contoh, unit Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI telah mengembangkan kebijakan kepatuhan dan keamanan data privasi yang telah diimplementasikan oleh unit Operasional Keamanan TI. Unit Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI juga memantau implementasinya. Cinema XXI juga memiliki Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang telah dikembangkan dengan referensi standar ISO (ISO/IEC 27001:2013) dan *National Institute of Standards and Technology's Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Cinema XXI ditinjau dan diperbarui setidaknya sekali dalam setahun. Cinema XXI juga berencana untuk membuat kebijakan tersebut tersedia di dalam portal karyawan. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengatur mengenai keamanan informasi dalam organisasi, keamanan perorangan, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan operasional, kontrol akses dan siklus hidup keamanan. Cinema XXI telah mengimplementasikan kebijakan tersebut dan memantau seluruh data dan perangkat yang material. Untuk mengelola dan mengontrol akses data, Cinema XXI juga telah memiliki Kebijakan Manajemen Akses Pengguna, Kebijakan Manajemen Otentikasi Pengguna, Kebijakan Manajemen Otorisasi Pengguna, Kebijakan Kontrol Akses Jaringan, dan Kebijakan Kontrol Akses Sistem.

Melalui sistem reservasi tiket berbasis seluler, Cinema XXI menangani informasi sensitif. Oleh karena itu, Cinema XXI telah menerapkan otentikasi dua faktor melalui nomor ponsel dan email penonton. Semua informasi data pelanggan dan transaksinya ditempatkan pada platform Google Cloud, dan Cinema XXI mempergunakan infrastruktur dan fasilitas keamanan yang tersedia di platform tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI tidak pernah mengalami masalah teknologi yang signifikan atau insiden mengenai privasi data.

13. Penghargaan

Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan utama yang membuktikan kualitas dan daya tarik produk Cinema XXI. Beberapa penghargaan terkemuka yang diterima dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Penghargaan "*Brand of the Year*" dalam Kategori Hiburan (Bioskop) pada tingkat nasional yang diberikan oleh World Branding Awards pada tahun 2017, 2018, dan 2019, sebagai pengakuan atas kinerja dan pencapaian Cinema XXI sebagai salah satu merek terbaik di dunia;

- Penghargaan "*Millennial's Top Brand Award*" yang diberikan oleh Warta Ekonomi pada tahun 2019, sebagai pengakuan atas Cinema XXI yang menjadi pilihan utama generasi milenial dalam kategori Operator Bioskop;

- Penghargaan "*Better Brand Award*" dalam kategori Merek Bioskop yang diberikan oleh Majalah Infobank kepada Cinema XXI pada tahun 2019;

- Penghargaan "*Industry Champions of the* Year" yang diberikan oleh Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020, sebagai pengakuan atas kepemimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi;

- Penghargaan "*Top Publisher Award*" yang diberikan oleh App Annie pada tahun 2020 kepada Cinema XXI sebagai pengakuan atas m.tix sebagai salah satu dari 10 aplikasi hiburan teratas berdasarkan pengguna aktif bulanan; dan

- Cinema XXI (bioskop Plaza Senayan) meraih penghargaan "*Jakarta Tourism Award*" dalam kategori Bioskop dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022**.**

14. Lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (*Environmental, social and Governance* atau ESG)

Lingkungan hidup

Menghadirkan produk F&B dengan cara yang bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk menjadi kebanggaan Indonesia, Cinema XXI memastikan bahwa produk F&B yang ditawarkan kepada pelanggan adalah produk yang aman, berkualitas tinggi dan memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan. Cinema XXI terutama memastikan bahwa produk F&B yang ditawarkan aman untuk dikonsumsi. Keamanan produk makanan adalah prioritas utama bagi Cinema XXI dan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Cinema XXI memiliki pedoman dan prosedur operasi standar untuk memastikan kebersihan makanan sepanjang siklus produk F&B. Cinema XXI menjaga standar kebersihan yang ketat dalam semua operasi bisnis.

Cinema XXI juga menghadirkan rangkaian produk F&B berkualitas. Cinema XXI menggunakan bahan berkualitas tinggi dan segar untuk produk F&B-nya. Produk khas Cinema XXI, yaitu popcorn menggunakan jagung non-GMO sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan pelanggan. Selain jagung non-GMO, Cinema XXI juga memakai minyak kelapa bebas lemak dan gula merah organik dalam rangkaian produk F&B, serta bahan baku yang segar untuk sebagian besar produk F&B. Cinema XXI juga memastikan bahwa produk F&B yang dihasilkan diberikan label yang tepat. Sebagai contoh, produk F&B yang diberikan label halal maka akan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang halal juga. Hal tersebut terutama berlaku untuk produk daging seperti sosis.

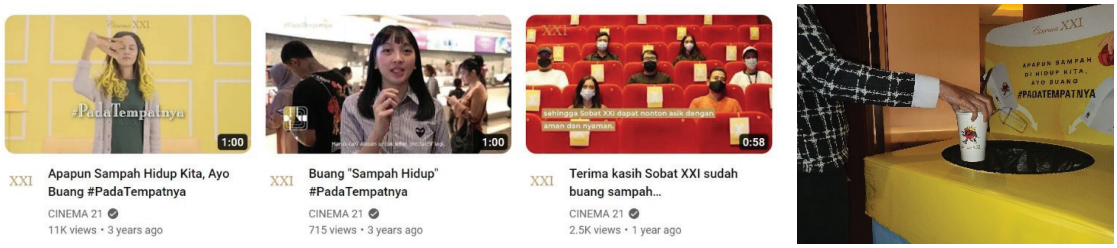
Penggunaan air dan listrik yang efisien

Cinema XXI berkomitmen untuk menggunakan air dan listrik secara efisien dalam kegiatan operasinal sehari-hari. Sebagai contoh, Cinema XXI menyadari bahwa penggunaan AC adalah konsumsi listrik utama sehingga Cinema XXI berupaya secara berhati-hati menjaga keseimbangan antara memberikan pengalaman yang nyaman bagi penonton dengan menjaga konsumsi energi yang diperlukan. Sistem pendingin udara di dalam setiap teater Cinema XXI hanya akan dimulai satu jam sebelum dimulainya film dan di luar jam tersebut akan dimatikan. Cinema XXI menerapkan kebijakan yang sama untuk ruang penyimpanan XXI Café di mana terdapat dua sistem pendingin udara yang akan saling bergantian dimatikan, dengan setiap sistem akan bekerja untuk waktu maksimum 12 jam.

Mengurangi dampak lingkungan dari produk F&B

Cinema XXI berinvestasi pada kemasan yang aman dan ramah lingkungan untuk rangkaian produk F&B yang dihasilkan, yaitu kemasan yang terbuat dari bahan baku *food grade*. Cinema XXI juga telah mulai untuk menggunakan bahan-bahan *biodegradable* untuk berbagai kemasan yang dapat didaur ulang.

Selain upaya-upaya di atas, Cinema XXI juga menghadirkan kampanye kepada publik, *#PadaTempatnya*, untuk mendorong penonton membuang sisa makanan dan minuman mereka ke tempat sampah yang telah disediakan pada akhir pemutaran film. Kampanye ini dikomunikasikan melalui akun media sosial Cinema XXI serta melalui iklan di layar bioskop. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari kebiasaan terkecil, dan Cinema XXI berharap kampanye ini dapat menginspirasi penonton untuk menjaga kebiasaan ini, baik di dalam dan di luar lingkungan bioskop, dan pada akhirnya dapat menjadi bagian dari gaya hidup mereka.



Sosial

Komitmen Cinema XXI untuk menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan kebanggaan Indonesia terefleksi dari bagaimana Cinema XXI berinteraksi dan memperlakukan para pemangku kepentingan. Cinema XXI menghargai kontribusi dan memberikan perlakuan yang adil kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis Cinema XXI, dan ditunjukkan melalui hal-hal berikut:

Pengembangan masyarakat dan sosial

Cinema XXI secara rutin berkolaborasi dengan pihak lain, seperti rumah produksi di Indonesia, untuk mengatur rangkaian inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Salah satu inisiatif yang telah Cinema XXI lakukan secara konsisten sejak tahun 2018 adalah menyelenggarakan acara perfilman yang diikuti oleh anggota dari berbagai kelompok masyarakat. Acara perfilman ini diadakan untuk anggota kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk secara rutin menonton film atau menghadiri acara perfilman lainnya. Cinema XXI juga percaya dalam memberikan kontribusi bagi industri film Indonesia dan secara rutin mendukung dan mengorganisir festival film untuk mendorong pertumbuhan industri film Indonesia.

Perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan

Cinema XXI benar-benar mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan memperlakukan karyawan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor antara lain atribut fisik, ras, jenis kelamin dan agama. Cinema XXI menganggap pelanggaran UU Ketenagakerjaan sangat serius dan bekerja sama untuk memantau kepatuhan Cinema XXI terhadap UU Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan mengenai pekerja anak dan upah minimum. Departemen Kebijakan Sumber Daya Manusia mengawasi kepatuhan dengan UU Ketenagakerjaan, termasuk kebijakan organisasi, seperti kebijakan remunerasi terkait pembayaran upah, upah lembur, insentif, pensiun dan pesangon, yang disusun dan dikelola oleh tim Manajemen Kinerja & Kompensasi dan berbagai kebijakan terkait industri yang disusun dan dikelola oleh tim Hubungan Industrial. Ketika kebijakan tersebut direviu dan disetujui oleh ketua tim Sumber Daya Manusia, Departemen Kebijakan Sumber Daya Manusia akan menyampaikannya kepada manajemen untuk disetujui dan disebarluaskan kapada seluruh karyawan. Tim Manajemen Kinerja dan Kompensasi memastikan bahwa seluruh kebijakan remunerasi terkait antara lain upah, upah lembur, insentif dan pesangon sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Sehubungan dengan upah, kompensasi dan remunerasi bagi karyawan tidak tetap dan karyawan tetap, Cinema XXI memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan tanggung jawab dan kinerja karyawan dan secara berkala melakukan reviu atas kebijakan insentif untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan remunerasi yang adil. Cinema XXI juga melakukan upaya-upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam praktik rekrutmen dan pekerjaan, serta promosi dan peluang karir. Sebagai pemberi kerja, Cinema XXI selalu terbuka untuk berdiskusi dengan karyawan dan mempertimbangkan setiap keluhan yang dimiliki oleh karyawan, khususnya keluhan terkait hak normatif pekerja. Tim Hubungan Industrial menetapkan kebijakan perusahaan yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan pemberi kerja, seperti peraturan perusahaan atau kebijakan jam kerja dan terlibat dalam mediasi bipartit dalam hal terjadi perselisihan hubungan industri. Cinema XXI juga menyediakan perlindungan sosial bagi karyawan dan seluruh karyawan terdaftar dalam BPJS Kesehatan untuk asuransi kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial, pensiun dan asuransi kecelakaan kerja. Selain itu, Cinema XXI juga memberikan asuransi swasta.

Selain memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara adil sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Cinema XXI juga berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana karyawan merasa nyaman. Cinema XXI melakukan hal ini dengan menekankan pada perlunya keterlibatan yang kuat antara pemberi kerja dan karyawan di semua jenjang dalam organisasi, dan pentingnya bagi pemimpin tim untuk mengembangkan hubungan baik dengan anggota tim mereka. Selain itu, Cinema XXI juga mengadakan berbagai kegiatan di luar kerja yang lebih santai dan menghibur di mana karyawan dapat berpartisipasi sebagai bagian dari upaya Cinema XXI untuk membangun budaya dan hubungan antara karyawan.

Pengembangan SDM

Cinema XXI menghargai para karyawan dan percaya bahwa kualitas SDM sangat penting bagi keberhasilan operasional. Cinema XXI berkomitmen untuk membina talenta, khususnya talenta muda, dan beranggapan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memajukan karir mereka. Cinema XXI melakukan pemilihan talenta dari internal untuk menjadi bagian dari kepemimpinan organisasi apabila mereka menunjukan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan performa kerja yang baik. Sampai saat ini, Cinema XXI telah mengembangkan sejumlah kebijakan SDM, seperti kebijakan pengelolaan talenta, program pelatihan dan pengembangan, dan kebijakan insentif dan kompensasi. Melalui program pengembangan khusus, karyawan diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (*up-skill*) dan terus menerus belajar.

Tata kelola

Sejalan dengan visi Cinema XXI untuk menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan kebanggaan Indonesia, Cinema XXI berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik di organisasi Cinema XXI dan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi basis untuk manajemen perusahaan yang kuat dan kesuksesan usaha. Cinema XXI melakukan kegiatan usaha dengan cara yang jujur dan terbuka dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan ketika bekerja untuk mewujudkan tujuan Cinema XXI. Beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diintegrasikan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan, dan prinsip-prinsip ini telah ditekankan dalam kebijakan dan narasi Cinema XXI. Cinema XXI juga menekankan kepada karyawan Cinema XXI akan pentingnya menerapkan etika bisnis yang kuat, konsisten dan efektif dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan nilai tambah. Cinema XXI juga menerapkan kebijakan untuk mengurangi dan menghindari konflik kepentingan, menyampaikan laporan ketenagakerjaan yang diwajibkan dan secara teratur memperbarui peraturan perusahaan untuk mengikuti perubahan praktik pasar saat ini dan yang nantinya akan terjadi. Cinema XXI dengan tegas melarang manajemen dan karyawan untuk memberi dan menerima suap, menegakkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan memastikan keamanan, kerahasiaan dan pembatasan akses ke data atau informasi. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan Cinema XXI sehubungan dengan hal di atas meliputi:

Kebijakan pengadaan barang dan jasa

Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan usaha, Cinema XXI telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Tim pengadaan Cinema XXI mematuhi pedoman tersebut untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang sesuai. Cinema XXI berkeyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Cinema XXI berjalan efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar, bertanggung jawab, berhati-hati dan bijaksana, dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Cinema XXI didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan pedoman, tim pengadaan Cinema XXI melakukan pengadaan barang dan jasa melalui tender atau penunjukan langsung. Terlepas dari metode yang digunakan, tim pengadaan Cinema XXI harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk anti penyuapan, anti korupsi dan anti pencucian uang, penghindaran konflik kepentingan, anti gratifikasi, menjaga keakuratan catatan bisnis, dan mengikuti mekanisme pelaporan penipuan.

Kode etik

Sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa etika bisnis dan kerja karyawan Cinema XXI konsisten dengan budaya Cinema XXI, Cinema XXI telah mengembangkan dan menyebarluaskan Kode Etik Cinema XXI kepada karyawan. Kode Etik juga didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kode Etik dimaksudkan untuk menginstruksikan karyawan tentang bagaimana melaksanakan visi dan misi Cinema XXI secara profesional, membimbing perilaku semua karyawan, menghindari situasi konflik kepentingan, dan membina hubungan kerja yang harmonis dalam setiap aspek perusahaan dan bisnis.

Di Cinema XXI, semua karyawan diwajibkan untuk berperilaku dan bekerja dengan pihak internal dan eksternal sesuai dengan Kode Etik Cinema XXI. Tidak ada pengecualian dan Kode Etik mengatur perilaku karyawan Cinema XXI di tempat kerja. Karyawan diharapkan dapat menjaga hubungan kerja

yang harmonis dengan atasan, bawahan, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Karyawan juga diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan, menghormati kerahasiaan informasi internal. Cinema XXI dengan tegas melarang penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga dengan tegas tidak mentolerir pemberian dan penerimaan suap. Karyawan diharapkan untuk menegakkan kebijakan anti penggelapan dana, melindungi aset perusahaan dan menjaga catatan bisnis yang akurat dari transaksi perusahaan. Terakhir, karyawan juga harus mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan mengingat reputasi Cinema XXI harus dijaga.

Cinema XXI telah mensosialisasikan Kode Etik Cinema XXI dan secara teratur melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa karyawan mematuhi Kode Etik. Jika ada pelanggaran Kode Etik, karyawan diharuskan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan mereka atau divisi Sumber Daya Manusia. Cinema XXI tidak menganggap mudah pelanggaran Kode Etik Cinema XXI dan akan menegur karyawan dengan tegas dan menjatuhkan hukuman tambahan jika perlu.

*Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management System *atau ISMS) dan Kebijakan Manajemen Insiden Keamanan Informasi*

Cinema XXI menghargai perlindungan informasi dan data dan berkeyakinan bahwa keamanan informasi adalah upaya bersama antara karyawan dan manajemen Cinema XXI. Keamanan informasi melampaui informasi internal yang ditangani karyawan Cinema XXI, tetapi juga meluas ke informasi yang dapat dikelola atau diakses oleh pihak ketiga. Untuk tujuan ini, Cinema XXI menerapkan tata kelola keamanan informasi melalui Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ("**ISMS**") dan kebijakan tersebut ditinjau setidaknya setahun sekali.

Implementasi Kebijakan ISMS diawasi oleh Tim Keamanan dan Kebijakan TI sebagai perpanjangan dari manajemen. Terdapat beberapa area yang menjadi perhatian ketika berhadapan dengan keamanan informasi, yaitu menangani informasi sebagai aset yang dilindungi dengan aman, memastikan bahwa informasi itu akurat dan dapat diandalkan, melindungi informasi dari akses tanpa izin sepanjang masa pakai informasi, memastikan bahwa informasi dibuat, diperoleh, dan digunakan hanya untuk mendukung kegiatan usaha dan akhirnya, menjaga akuntabilitas individu dan kelompok dalam akses sumber daya Cinema XXI. Tim Keamanan & Kebijakan TI Cinema XXI menyusun, memformalkan, dan menegakkan kebijakan dan prosedur operasi standar untuk mendukung penegakan kebijakan keamanan Cinema XXI. Kebijakan ISMS mengatur perlakuan terhadap informasi dan memandu karyawan tentang cara menyimpan informasi penting dan sensitif di tempat yang aman dan terjamin dengan kendali keamanan yang tepat serta melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi sesuai dengan komitmen Cinema XXI terhadap manajemen risiko.

Jika terjadi pelanggaran keamanan, Cinema XXI juga telah membentuk Tim Respons Insiden Keamanan (*Security Incident Response Team* atau "**SIRT**") untuk menyelesaikan insiden tersebut. Tanggapan Cinema XXI terhadap insiden keamanan informasi diatur oleh Kebijakan Manajemen Insiden Keamanan Informasi Cinema XXI. Insiden keamanan dikategorikan agar masalah dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Untuk setiap insiden yang diverifikasi, divisi terkait akan bertanggung jawab untuk melakukan analisis awal dan berkoordinasi dengan tim terkait lainnya. SIRT mengembangkan strategi dalam menanggapi setiap insiden keamanan informasi dan mengoordinasikan proses pemulihan dengan fungsi departemen masing-masing. Dalam kasus di mana insiden keamanan informasi dapat mengarah pada tindakan hukum, SIRT harus mengumpulkan dan mengamankan semua bukti sesuai dengan persyaratan hukum dan mencegah gangguan.

Pedoman Audit Internal dan Kebijakan Manajemen Risiko

Unit Audit Internal Perseroan bekerja untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen terhadap kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Melalui evaluasi dan saran terhadap manajemen risiko, pengendalian dan proses, Unit Audit Internal membantu Cinema XXI dalam mencapai target. Unit Audit Internal Cinema XXI dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal dan ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk menyusun rencana audit tahunan, secara teratur meninjau pengelolaan dan proses risiko, melaporkan pengendalian kegiatan perusahaan, menyiapkan laporan berkala tentang pelaksanaan rencana

audit tahunan, mengkoordinasikan dan mengawasi pada tingkat umum semua fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dalam organisasi Perseroan bersama dengan auditor eksternal, serta membuat laporan kepada Direksi jika terjadi potensi penyimpangan atau inefisiensi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal dituntut untuk secara ketat menjunjung tinggi kode etik profesi berdasarkan Kode Etik Audit Internal Lembaga Auditor Internal. Kegiatan Unit Audit Internal dilakukan secara independen dan objektif dan ruang lingkup audit, implementasi, dan laporan hasil harus bebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain.

Cinema XXI berencana mendirikan sistem manajemen risiko untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan operasi Cinema XXI. Cinema XXI bermaksud untuk merancang sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan mengelola risiko agar tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi. Sistem ini dibuat untuk memandu proses pengambilan keputusan, keputusan strategi, dan perencanaan operasi. Manajemen risiko diharapkan untuk diintegrasikan ke dalam pengembangan, penetapan tujuan bisnis dan evaluasi kinerja Cinema XXI melalui pengembangan budaya tata kelola perusahaan yang berfokus pada kesadaran risiko, identifikasi risiko secara teratur yang dapat mempengaruhi tujuan strategis dan operasional Cinema XXI, tinjauan secara rutin untuk menilai efektivitas manajemen risiko, dan implementasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi manajemen risiko.

15. Hak atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai hak merek dan hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan usaha Cinema XXI, dengan rincian sebagai berikut:

- **Hak Merek**

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
1.	8 Agustus 2017 dan IDM000633671	10 tahun	Kelas 25	
2.	8 Agustus 2017 dan IDM000772003	10 tahun	Kelas 9	
3.	8 Agustus 2017 dan IDM000772052	10 tahun	Kelas 16	
4.	8 Agustus 2017 dan IDM000772005	10 tahun	Kelas 21	
5.	8 Agustus 2017 dan IDM000772058	10 tahun	Kelas 35	
6.	8 Agustus 2017 dan IDM000772085	10 tahun	Kelas 24	
7.	8 Agustus 2017 dan IDM000772009	10 tahun	Kelas 38	
8.	8 Agustus 2017 dan IDM000772054	10 tahun	Kelas 40	
9.	8 Agustus 2017 dan IDM000772056	10 tahun	Kelas 42	

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
10.	19 Desember 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000058378	10 tahun sejak 12 Mei 2014	Kelas 43	
11.	2 Februari 2012, sebagaimana diperpanjang pada 23 November 2022 dan IDM000357249	10 tahun sejak 12 September 2022	Kelas 41	
12.	4 Agustus 2017 dan IDM000715770	10 tahun	Kelas 24	
13.	4 Agustus 2017 dan IDM000715665	10 tahun	Kelas 21	
14.	4 Agustus 2017 dan IDM000715637	10 tahun	Kelas 30	
15.	4 Agustus 2017 dan IDM000769865	10 tahun	Kelas 42	
16.	4 Agustus 2017 dan IDM000769851	10 tahun	Kelas 35	
17.	4 Agustus 2017 dan IDM000769883	10 tahun	Kelas 38	
18.	4 Agustus 2017 dan IDM000769879	10 tahun	Kelas 16	
19.	25 Agustus 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000047226	10 tahun sejak 20 Januari 2014	Kelas 41	
20.	25 Agustus 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000047225	10 tahun sejak 20 Januari 2014	Kelas 43	
21.	8 Agustus 2017 dan IDM000772087	10 tahun	Kelas 42	
22.	21 April 2017 dan IDM000629178	10 tahun	Kelas 35	
23.	8 Agustus 2017 dan IDM000772086	10 tahun	Kelas 9	
24.	11 Maret 2022 dan IDM001042293	10 tahun	Kelas 16	
25.	11 Maret 2022 dan IDM001042291	10 tahun	Kelas 30	
26.	11 Maret 2022 dan IDM001042288	10 tahun	Kelas 32	
27.	11 Maret 2022 dan IDM001042277	10 tahun	Kelas 42	
28.	11 Maret 2022 dan IDM001042275	10 tahun	Kelas 43	
29.	11 Maret 2022 dan IDM001042295	10 tahun	Kelas 9	
30.	11 Maret 2022 dan IDM001042285	10 tahun	Kelas 35	
31.	21 September 2016 dan IDM000655900	10 tahun	Kelas 41	
32.	4 Agustus 2017 dan IDM000637140	10 tahun	Kelas 9	

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
33.	4 Agustus 2017 dan IDM000769821	10 tahun	Kelas 16	
34.	4 Agustus 2017 dan IDM000769786	10 tahun	Kelas 25	
35.	4 Agustus 2017 dan IDM000715953	10 tahun	Kelas 42	
36.	4 Agustus 2017 dan IDM000769653	10 tahun	Kelas 35	
37.	4 Agustus 2017 dan IDM000769666	10 tahun	Kelas 16	
38.	2 Desember 2013 dan IDM000550198	10 tahun	Kelas 41	
39.	4 Agustus 2017 dan IDM000715932	10 tahun	Kelas 9	
40.	4 Agustus 2017 dan IDM000715810	10 tahun	Kelas 35	
41.	4 Agustus 2017 dan IDM000715792	10 tahun	Kelas 42	
42.	2 Desember 2013 dan IDM000550197	10 tahun	Kelas 41	
43.	12 April 2019 dan IDM000726513	10 tahun	Kelas 21	
44.	12 April 2019 dan IDM000726577	10 tahun	Kelas 14	
45.	12 April 2019 dan IDM000726565	10 tahun	Kelas 16	
46.	12 April 2019 dan IDM000726543	10 tahun	Kelas 18	
47.	12 April 2019 dan IDM000726528	10 tahun	Kelas 20	
48.	3 Agustus 2021 dan IDM001001637	10 tahun	Kelas 35	
49.	3 Agustus 2021 dan IDM000990246	10 tahun	Kelas 43	
50.	21 April 2017 dan IDM000620169	10 tahun	Kelas 9	
51.	4 Agustus 2017 dan IDM000769685	10 tahun	Kelas 42	
52.	4 Agustus 2017 dan IDM000769689	10 tahun	Kelas 16	
53.	14 Februari 2012 dan IDM000435175	20 tahun	Kelas 43	
54.	14 Februari 2012 dan IDM000435178	20 tahun	Kelas 43	

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
55.	5 Desember 2013 dan IDM000521809	10 tahun	Kelas 43	
56.	5 Desember 2013 dan IDM000521339	10 tahun	Kelas 43	
57.	5 Desember 2013 dan IDM000521811	10 tahun	Kelas 43	

- **Hak Cipta**

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Materi Yang Dilindungi	Jangka Waktu Perlindungan/ Keterangan
1.	000139325 tanggal 3 Juli 2018	Seni Gambar Karakter "Cornell"	50 tahun

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Informasi yang terdapat dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Industri Pasar ini disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber publik yang tersedia dan survei opini perdagangan, dan disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Referensi kepada Euromonitor International Limited tidak boleh dianggap sebagai pendapat Euromonitor International Limited mengenai nilai keamanan atau kesesuaian investasi dalam Cinema XXI. Direktur tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau bahwa fakta material telah dihilangkan yang akan membuat informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan dituangkan dalam Ringkasan Eksekutif ini belum diverifikasi secara independen oleh Cinema XXI, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi atau pihak lain yang terlibat dalam penawaran global dan tidak ada yang memberikan representasi mengenai keakuratannya dan informasi tersebut tidak boleh diandalkan dalam membuat atau menahan keputusan investasi.

LINGKUNGAN MAKROEKONOMI

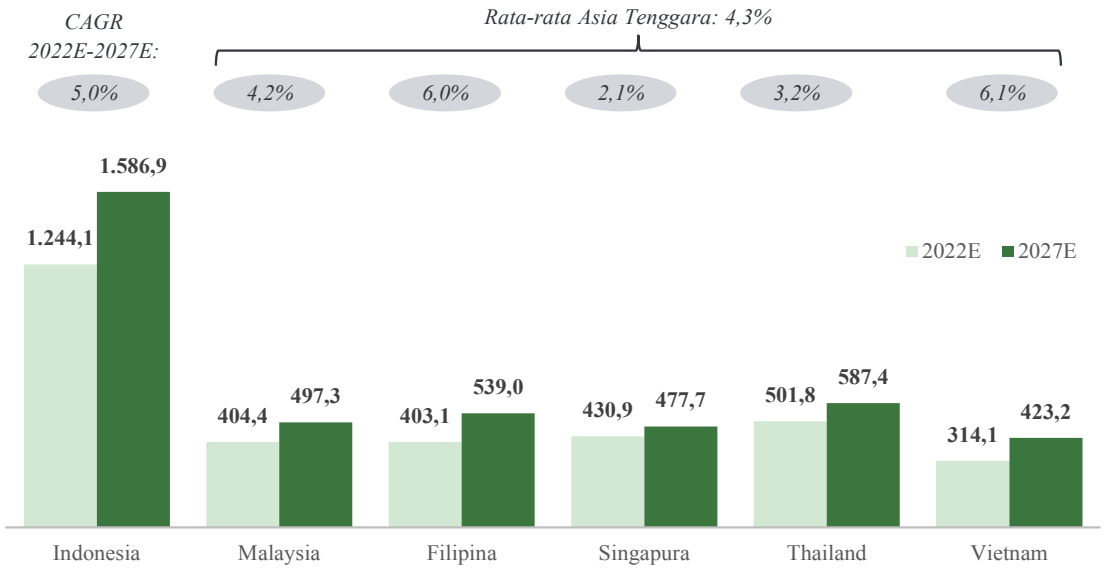
Faktor-faktor pendorong makroekonomi dan demografi penting yang mendukung pertumbuhan industri bioskop Indonesia:

- Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pengeluaran konsumsi yang meningkat.
- Munculnya kota Tier 2 dan kota Tier 3 sebagai penggerak pertumbuhan masa depan.
- Bisnis yang berorientasi pada konsumen mendapat manfaat dari demografi penduduk Indonesia dan preferensi pengeluarannya.
- Peningkatan adopsi layanan dan teknologi digital.

Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pengeluaran konsumsi yang meningkat

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pasar sebesar US$1,2 triliun pada tahun 2022E. Ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dengan PDB meningkat pada CAGR 5,0% dari 2022E hingga 2027E. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan rata-rata di Asia Tenggara sebesar 4,3%, dan lebih tinggi dari Malaysia (4,2%), Singapura (2,1%), dan Thailand (3,2%) untuk periode yang sama.

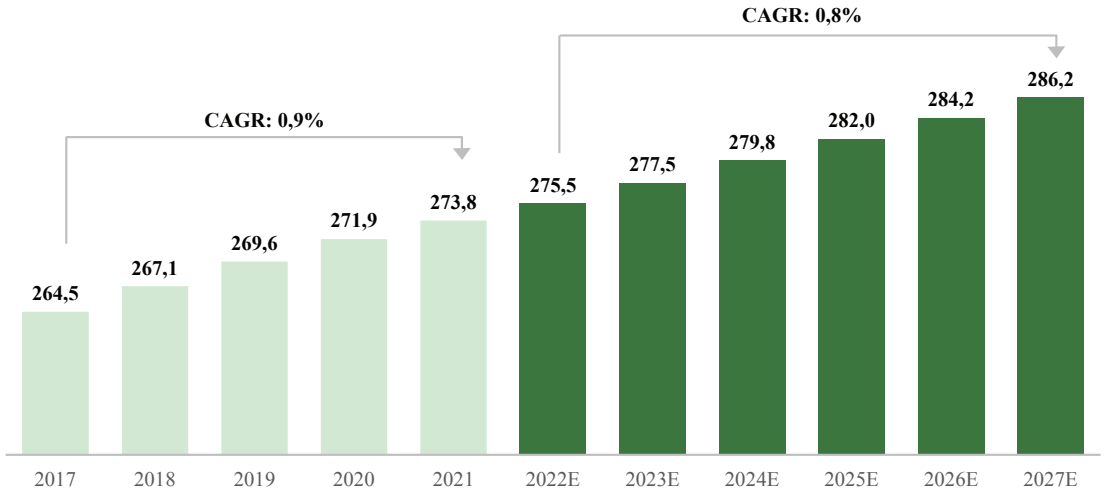
Grafik 1. PDB Nominal di Indonesia dan ASEAN (dalam miliar US$)



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan banyak didukung oleh populasi Indonesia yang besar. Negara Indonesia memiliki 275,5 juta penduduk[10], menjadikannya negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Ukuran populasi diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 0,8% untuk mencapai 286,2 juta pada tahun 2027E.

Grafik 2. Ukuran populasi di Indonesia (dalam juta)



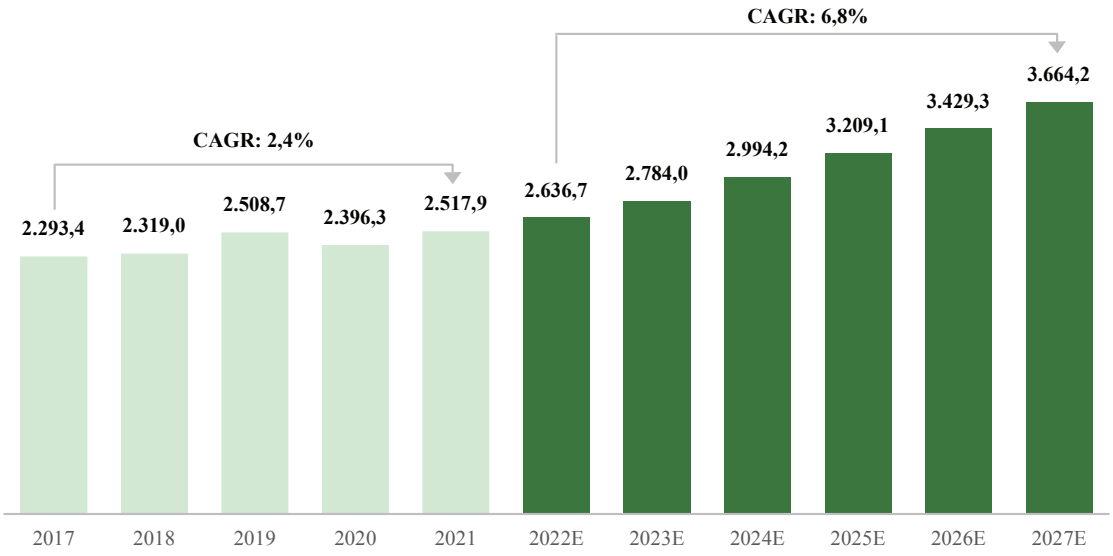
Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

10 Per 2022E.

Di Indonesia, terdapat 20,8 juta rumah tangga kelas menengah pada tahun 2022E. Pertumbuhan kelas menengah[11] terus mengubah pola konsumsi, dengan pengeluaran penduduk Indonesia menuju ke barang dan layanan berkualitas tinggi serta premium seiring dengan meningkatnya pendapatan siap dibelanjakan.

Pendapatan siap dibelanjakan per kapita di Indonesia telah tumbuh pada CAGR 2,4% dari tahun 2017 hingga 2021. Baru-baru ini, Pemerintah telah menerapkan reformasi ekonomi untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Hal ini meliputi inisiatif untuk percepatan pertumbuhan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, penyederhanaan peraturan dan birokrasi, serta promosi transformasi ekonomi dan digital. Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai US$3.664,2 pada tahun 2027E, dengan CAGR yang lebih cepat yaitu 6,8% dari tahun 2022E hingga 2027E.

Grafik 3. Pendapatan siap dibelanjakan per kapita di Indonesia (dalam US$)

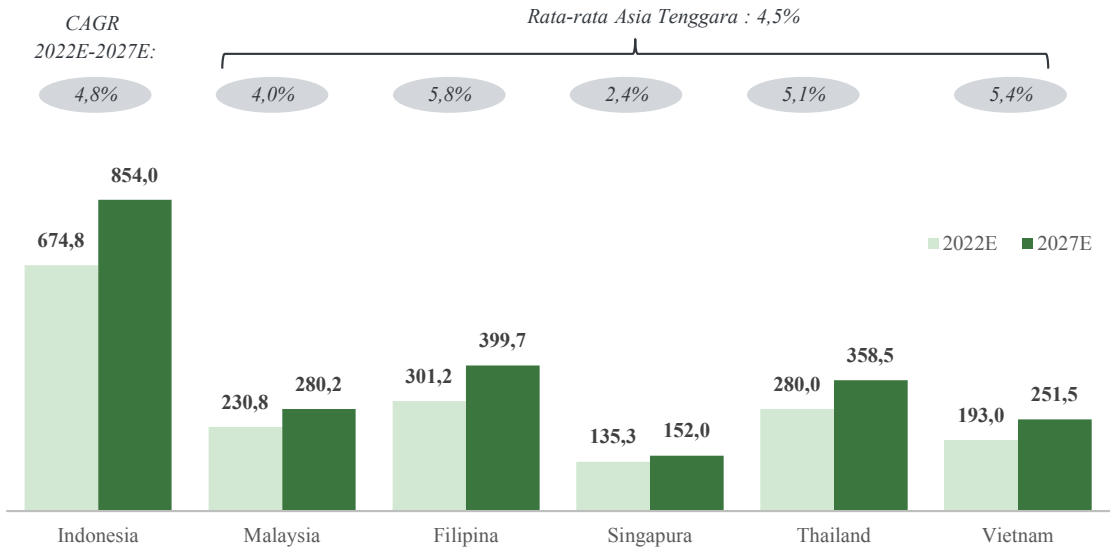


Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Di seluruh Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan pengeluaran konsumsi tertinggi. Didukung oleh peningkatan standar hidup yang berkelanjutan, total pengeluaran konsumsi di Indonesia diharapkan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR 4,8% dari tahun 2022E hingga 2027E untuk mencapai US$854,0 miliar pada tahun 2027E.

11 Didefinisikan sebagai pendapatan rumah tangga antara 75% dan 125% dari median pendapatan siap dibelanjakan.

Grafik 4. Pengeluaran konsumsi di Indonesia dan Asia Tenggara (dalam miliar US$)



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Munculnya kota Tier 2 dan kota Tier 3 sebagai penggerak pertumbuhan masa depan

Tingkat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di kota Tier 2 dan kota Tier 3 diproyeksikan akan menjadi salah satu yang tertinggi dari tahun 2022E hingga 2027E. Sebagai contoh, 4 dari 6 kota kunci dalam hal pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan adalah kota Tier 2 atau kota Tier 3. Kota-kota tersebut adalah Batam (Tier 3, 5,1%), Denpasar (Tier 2, 4,8%), Banjarmasin (Tier 2, 4,7%), dan Tasikmalaya (Tier 3, 4,7%). Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur di luar kota-kota Tier 1 diharapkan dapat membawa lebih banyak peluang pembangunan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota Tier 2 dan kota Tier 3, dan sebagai hasilnya dapat mendorong pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan lebih lanjut di daerah-daerah tersebut.

Tabel 1. Pendapatan siap dibelanjakan untuk 6 kota kunci berdasarkan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di Indonesia (dalam miliar US$)

Kota	Tier	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR 2022E-2027E
Batam	3	5,0	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	5,1%
Samarinda	1	9,3	9,7	10,2	10,7	11,3	11,8	4,9%
Pekanbaru	1	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,8%
Denpasar	2	7,0	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	4,8%
Banjarmasin	2	5,1	5,3	5,5	5,8	6,1	6,4	4,7%
Tasikmalaya	3	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	4,7%

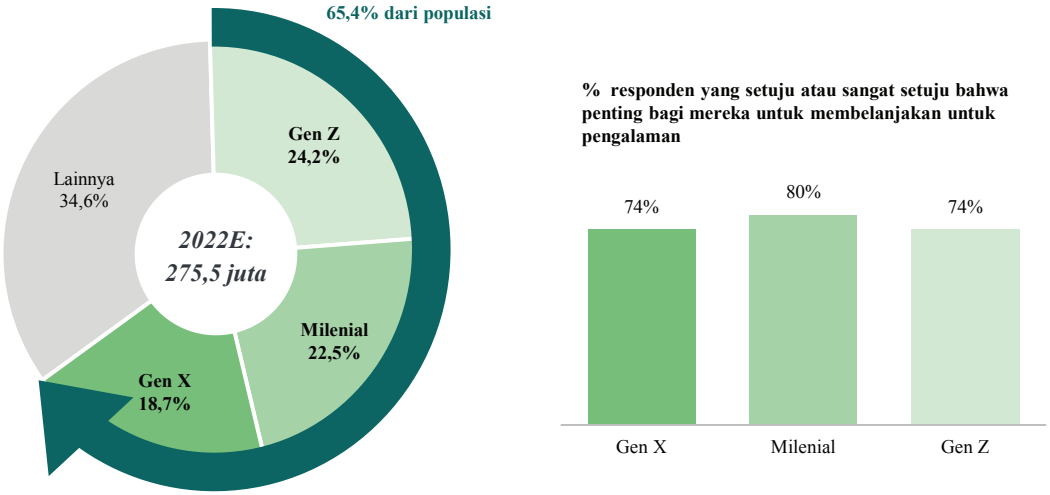
Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Bisnis yang berorientasi pada konsumen mendapat manfaat dari demografi penduduk Indonesia dan pereferensi pengeluarannya

Indonesia memiliki demografi penduduk yang relatif muda, dengan usia median 30,6 tahun pada tahun 2022E. Sebanyak 71,4%[12] dari total populasi berusia antara 13 hingga 64 tahun, sehingga menjadikannya pasar yang menarik bagi bisnis konsumen. Di masa depan, kelompok usia 13 hingga 64 tahun diperkirakan akan terus mewakili segmen populasi yang besar (sebesar 71,8% pada tahun 2027E).

Preferensi konsumsi dari populasi dipengaruhi oleh Gen Z (usia 15 hingga 24), yang mewakili 24,2% dari total populasi di Indonesia, Milenial (usia 25 hingga 39 tahun), yang mewakili 22,5%, dan Gen X (usia 40 hingga 54 tahun) yang mewakili 18,7% pada tahun 2022E. Kelompok-kelompok ini cenderung lebih banyak menghabiskan uang untuk pengalaman daripada material. Berdasarkan survei "*Voice of the Consumer Lifestyle*" yang dilakukan oleh Euromonitor International pada tahun 2022[13], 74% dari responden Gen Z, 80% dari responden Milenial, dan 74% dari responden Gen X setuju atau sangat setuju bahwa penting bagi mereka untuk menghabiskan uang untuk pengalaman. Berdasarkan survei yang sama, aktivitas hiburan yang paling populer untuk orang Indonesia adalah berbelanja, jalan-jalan, dan menonton film.[14]

Grafik 5. Pembagian penduduk di Indonesia berdasarkan kelompok usia dan preferensi pengeluaran



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition), Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia.

Menurut Survei Euromonitor yang dilakukan pada bulan Januari 2023, masyarakat Indonesia sering mengunjungi bioskop, dengan lebih dari 76% dari responden melaporkan pergi ke bioskop setidaknya sekali sebulan.[15]

12 Per tahun 2022E.

13 Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Sejauh mana Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Penting untuk mengeluarkan uang untuk pengalaman.

14 Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respon diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000-2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Seberapa banyak Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Memikirkan kebiasaan santai Anda, seberapa sering Anda melakukan kegiatan-kegiatan tersebut?

15 Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa sering Anda pergi ke bioskop?

Peningkatan adopsi layanan dan teknologi digital

Masyarakat Indonesia semakin terampil menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan meningkatnya akses ke produk digital dan konektivitas internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 77,9 juta pada tahun 2017 menjadi 165,9 juta pada tahun 2022. Bersamaan dengan peningkatan akses internet, penggunaan ponsel pintar yang semakin meningkat telah meningkatkan kemudahan dalam bisnis digital, hiburan, dan layanan keuangan. Menurut survei "*Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2022*"[16] dari Euromonitor International di Indonesia, hampir 80% dari responden mengatakan mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dan pengalaman virtual bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 2. Indikator digitalisasi di Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Pengguna internet (juta)	77,9	97,3	117,7	133,9	156,1	165,9	175,5	184,9	193,9	202,4	210,5
Kepemilikan ponsel seluler (% dari total populasi)	89,0	89,9	90,8	91,7	92,4	93,1	93,8	94,4	94,9	95,4	95,8

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

RANTAI NILAI INDUSTRI BIOSKOP DI INDONESIA

Rantai nilai industri film di Indonesia terdiri dari dua bagian: produksi film dan konten (sisi suplai) dan konsumen akhir (sisi permintaan), dengan bioskop sebagai penghubung antara keduanya. Sebagian besar film berasal dari rumah produksi lokal atau asing. Rumah produksi lokal meliputi pemain veteran (seperti Starvision, Soraya, Rapi Films, dan MD Entertainment) yang memproduksi film dengan anggaran kecil maupun besar, dan pemain baru (seperti Falcon Pictures, Screenplay Films, dan Legacy Pictures) serta pemain dengan spesialisasi yang berbeda (seperti KG Production, Mizan, 13 Entertainment, dan Multivision). Film asing biasanya diimpor melalui perjanjian lisensi dengan pemilik asing. Di Indonesia, Omega merupakan distributor utama yang ditunjuk oleh rumah produksi asing untuk mendistribusikan film mereka.

Model pendapatan untuk film biasanya melalui lisensi, dengan beberapa perjanjian bagi hasil antara bioskop dan rumah produksi. Operator bioskop tidak diizinkan untuk melakukan integrasi vertikal dengan rumah produksi dan mitra distribusi, oleh karena itu cara utama bagi bioskop untuk membedakan diri mereka adalah melalui pengalaman pelanggan. Di Indonesia, pembagian pendapatan antara operator bioskop dan distributor film biasanya sama, berdasarkan pendapatan *box office* setelah dipotong pajak, dengan pembagian lebih lanjut antara distributor dan rumah produksi. Hal ini telah menjadi praktik pasar yang berlangsung lama dan membedakan Indonesia dari negara lain. Di pasar perfilman lainnya, pembagian bagi hasil dapat bervariasi berdasarkan film, dengan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi distributor untuk judul yang sangat populer dalam beberapa minggu pertama.

PENGGERAK INDUSTRI UTAMA

Beberapa penggerak utama industri yang mendukung pertumbuhan industri bioskop Indonesia adalah**:**

- Pasar bioskop di Indonesia masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
- Pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3.
- Industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop.

16 Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Sejauh mana Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Saya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari saya.

- Deretan film domestik dan internasional yang kuat.
- Budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya.
- Peningkatan jumlah saluran pemesanan digital.
- Lingkungan regulasi industri yang mendukung.

Pasar bioskop di Indonesia masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar

Dalam hal penetrasi layar, Indonesia memiliki 7,6 layar per satu juta penduduk pada tahun 2022E. Dibandingkan dengan negara-negara global yang lebih maju seperti Amerika Serikat (133,1), Inggris (72,6), dan Tiongkok (47,3), penetrasi layar di Indonesia masih jauh lebih rendah.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (42,9), Singapura (58,5), Filipina (6,6), dan Thailand (12,9), serta negara-negara berkembang lainnya seperti Brasil (15,2), Meksiko (58,5), dan Rusia (37,6), jumlah layar per satu juta penduduk di Indonesia masih rendah.

Meskipun penetrasi layar di Indonesia meningkat dari 5,8 pada tahun 2017 menjadi 7,6 pada tahun 2022E, Indonesia masih relatif belum terlayani, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam pasokan layar.

Penetrasi bioskop dan layar yang rendah di Indonesia menawarkan peluang pertumbuhan bagi operator bioskop, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3, yang mengalami kenaikan pendapatan siap dibelanjakan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan kota Tier 1.

Tabel 3. Jumlah layar dan penetrasi layar

	Jumlah layar bioskop				Penetrasi layar (layar per sejuta penduduk)		
Negara	**2017**	**2021**	**2022E**	**CAGR '17 - '20E**	**2017**	**2021**	**2022E**
Indonesia	**1.533**	**2.091**	**2.107**	**6,6%**	**5,8**	**7,6**	**7,6**
Asia Tenggara							
Malaysia	1.094	1.377	1.454	5,9%	34,3	41,0	42,9
Filipina	743	760	765	0,6%	7,0	6,7	6,6
Singapura	253	301	314	4,4%	45,1	55,2	58,5
Thailand	908	921	922	0,3%	12,8	12,9	12,9
Rata-rata Asia Tenggara	750	840	864	2,8%	24,8	29,0	30,2
Negara maju							
Tiongkok	50.776	64.525	66.860	5,7%	36,5	45,7	47,3
Amerika Serikat	40.174	43.646	44.340	2,0%	123,0	131,5	133,1
Inggris	4.512	4.809	4.905	1,7%	68,5	71,5	72,6
Rata-rata negara maju	31.821	37.660	38.702	3,1%	76,0	82,9	84,3
Negara berkembang							
Brasil	3.223	3.274	3.263	0,2%	15,5	15,3	15,2
Meksiko	6.633	7.282	7.430	2,3%	54,0	57,6	58,5
Rusia	4.805	5.364	5.384	2,3%	33,3	37,3	37,6
Rata-rata negara berkembang	4.887	5.307	5.359	1,6%	34,3	36,7	37,1
Rata-rata keseluruhan	11.312	13.226	13.564	2,5%	43,0	47,5	48,5

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3

Sekitar 80 hingga 90% dari bioskop di Indonesia berlokasi di pusat perbelanjaan, yang biasanya menawarkan toko ritel, restoran, dan toko lainnya yang melengkapi pengalaman menonton film. Hal ini memungkinkan bioskop mendapatkan manfaat dari arus pengunjung yang pergi ke pusat perbelanjaan untuk mengunjungi penyewa gedung lain. Peningkatan pembangunan pusat perbelanjaan memberikan kesempatan bagi operator bioskop untuk meningkatkan kehadiran dan memperluas jangkauannya di seluruh negeri.

Pada tahun 2020, Jakarta memiliki konsentrasi pusat perbelanjaan tertinggi, dengan 96 dari total 649 pusat perbelanjaan di Indonesia berlokasi di Jakarta. Seiring dengan peningkatan pendapatan siap dibelanjakan dan pengeluaran konsumsi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 di Indonesia, pusat perbelanjaan semakin populer di kalangan keluarga yang tinggal pinggiran kota, di mana pusat perbelanjaan menjadi lokasi hiburan yang lengkap.

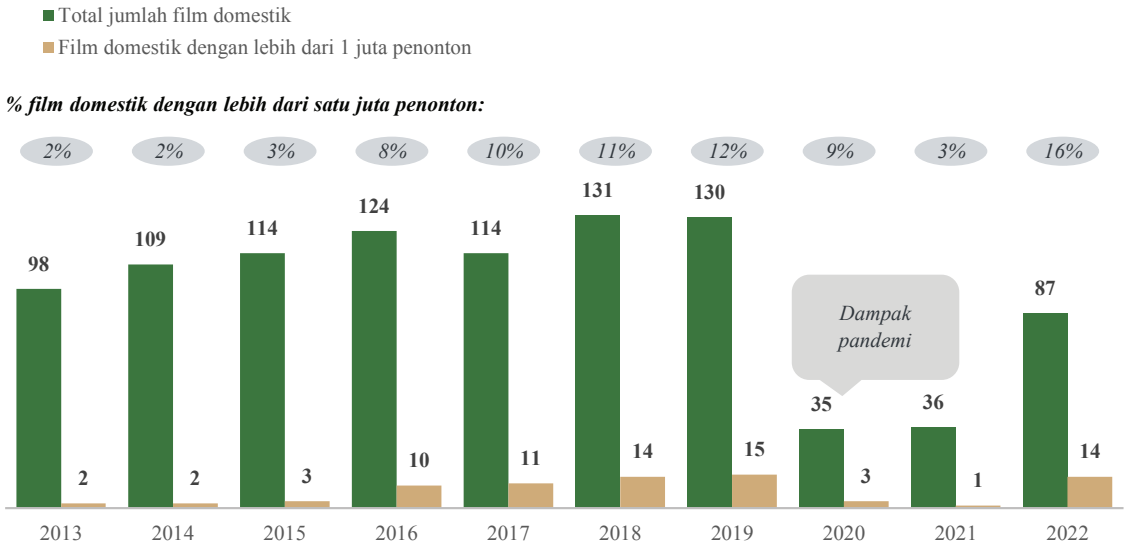
Pengembang pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sedang menjajaki peluang untuk meningkatkan keberadaan mereka di kota Tier 2 dan kota Tier 3 yang masih kurang terlayani. Tren ekspansi ini sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia untuk memberikan pembiayaan infrastruktur guna mendukung distribusi ekonomi ke daerah-daerah yang kurang berkembang.

Penambahan pasokan pusat perbelanjaan baru di kota Tier 2 dan kota Tier 3 di Indonesia memberikan kesempatan bagi operator bioskop untuk memperluas jangkauannya melalui penambahan layar baru.

Industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop

Bioskop-bioskop di Indonesia semakin menarik konsumen karena meningkatnya popularitas film-film produksi dalam negeri, yang menyumbang sekitar setengah dari total pendapatan *box office* di Indonesia pada tahun 2022E. Popularitas dan kualitas film-film domestik telah meningkat dari waktu ke waktu, dengan jumlah film domestik yang mencapai lebih dari satu juta penonton meningkat dari dua judul pada tahun 2013 menjadi 14 judul pada tahun 2022. Hal ini terjadi meskipun terdapat dampak negatif dari pandemi yang memengaruhi jumlah film yang dirilis. Genre-genre populer termasuk film pahlawan super, horor, dan cerita cinta.

Grafik 6. Jumlah film yang diproduksi di Indonesia[17]



Sumber: Film Indonesia.

17 Film dikategorikan berdasarkan tahun rilis.

Baru-baru ini, film horor Indonesia, yaitu KKN di Desa Penari, yang dirilis pada April 2022, menjadi film Indonesia dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa setelah mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton pada tahun 2022 dan mengalahkan rekor yang telah dipegang selama enam tahun oleh Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Bagian 1.

Popularitas film domestik memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop di Indonesia, memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan film yang dapat ditayangkan dan mengurangi ketergantungan pada deretan film internasional.

Dengan meningkatnya popularitas konten domestik, pemangku kepentingan industri menginvestasikan lebih banyak dalam produksi film domestik. Setoran modal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas film domestik, sehingga akan dapat menarik lebih banyak penonton dan penggemar. Film domestik diharapkan akan terus menyumbang sebagian besar dari total pendapatan *box office* di Indonesia ke depannya.

Aliran film domestik dan internasional yang kuat

Industri bioskop diperkirakan akan mendapatkan dorongan dari serangkaian film internasional dan domestik yang kuat pada tahun 2023. Deretan film ini termasuk, misalnya, Ant-Man, Spider-Man, dan The Marvels dari kumpulan cerita pahlawan super Marvel. Waralaba internasional terkenal lainnya seperti Mission Impossible, Indiana Jones, dan The Hunger Games juga diperkirakan akan dirilis.

Di sisi domestik, film baru juga diharapkan akan dirilis setiap bulannya. Judul film yang termasuk dalam *franchise* yang dikenal dengan baik termasuk Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini 2, Bangku Kosong 2, Catatan si Boy, dan Sundel Bolong.

Pipeline film ini tidak akan berhenti pada tahun 2024, dengan lebih banyak judul populer yang dijadwalkan akan dirilis. Contoh film yang diharapkan akan dirilis pada tahun 2024 adalah The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Quiet Place 3 bersama dengan waralaba The Lion King dan Captain America. Rilis film dari *franchise* yang disukai penonton diharapkan dapat membantu menarik kerumunan besar ke bioskop Indonesia untuk periode yang berkelanjutan. Informasi lebih lanjut mengenai deretan film mendatang dapat dilihat pada bagian dari Bab ini dengan judul ”Lampiran: Materi Tambahan Mengenai Industri.”

Selain film *blockbuster* Hollywood dan film domestik, bioskop juga memutar konten regional lainnya, seperti konten Korea, untuk menjangkau gelombang Hallyu di Indonesia dan popularitas *influencer* Korea dan idola K-pop yang juga membintangi film Korea.

Budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya

Menurut Survei Euromonitor pada bulan Januari 2023, masyarakat Indonesia sering mengunjungi bioskop, dengan lebih dari 76% melaporkan pergi ke bioskop setidaknya sekali sebulan[18]. Masyarakat Indonesia cenderung melihat menonton film sebagai kegiatan sosial dan kesempatan untuk mengikat hubungan dengan keluarga dan teman. Menurut survei tersebut, 62% responden menikmati menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman di bioskop[19].

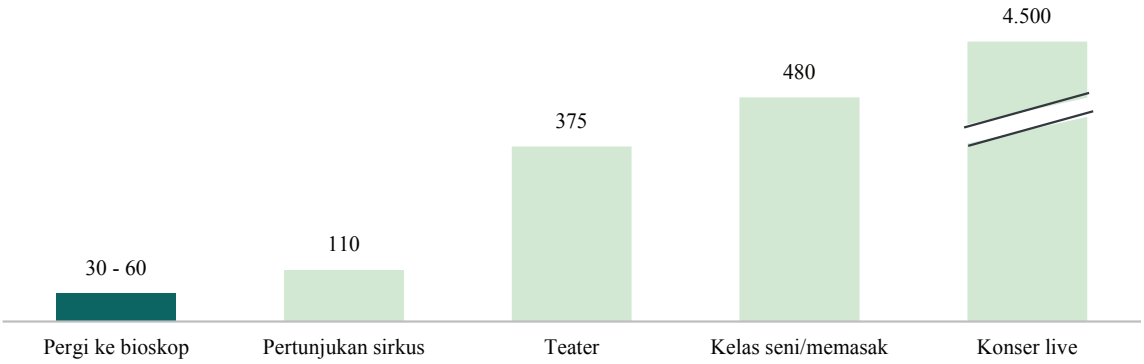
Dibandingkan dengan bentuk hiburan lainnya, menonton film adalah kegiatan yang hemat biaya. Tergantung pada lokasi dan format, harga rata-rata tiket menonton film di Indonesia berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000.

18 Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa sering Anda pergi ke bioskop?

19 Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apa motivasi Anda untuk pergi ke bioskop?

Dibandingkan dengan bentuk hiburan lain seperti menonton pertunjukan teater, mengambil kelas seni/ memasak, atau pergi ke konser musik langsung, menonton film adalah pilihan hiburan yang jauh lebih hemat.

Grafik 7. Biaya rata-rata menurut jenis aktivitas hiburan (dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Analisis Euromonitor per bulan Februari 2023.

Peningkatan jumlah saluran pemesanan digital

Kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam membeli tiket secara digital memudahkan kegiatan menonton film. Semakin meningkatnya jumlah orang yang ingin membeli tiket nonton film terlebih dahulu, membuat pembelian tiket secara digital semakin penting bagi para penonton di Indonesia.

Platform pemesanan digital memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket film dan memilih lokasi duduk yang diinginkan. Pada tahun 2022, sekitar 35-40% dari tiket nonton film dibeli secara digital. Beberapa platform pemesanan tiket digital yang terkenal di Indonesia antara lain m.tix (dimiliki oleh operator bioskop), TIX.ID (agregator tiket), dan GoTix (agregator tiket). *E-commerce, super-apps*, dan platform perjalanan seperti Gojek, Shopee, Traveloka, Blibli, dan Tiket.com juga menjadi platform pemesanan tiket digital untuk nonton film.

Meskipun terdapat beberapa platform pemesanan tiket digital pihak ketiga, perlu diperhatikan bahwa TIX.ID adalah satu-satunya agregator yang menjual tiket bioskop Cinema XXI. Mengingat besarnya skala Cinema XXI, TIX.ID memperoleh keuntungan yang unik dibandingkan dengan agregator film digital lainnya.

Lingkungan regulasi industri yang mendukung

Kebijakan Pemerintah telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri bioskop. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 1/2022 yang membatasi tarif pajak hiburan yang dikenakan pada bioskop maksimum hingga 10%, dari sebelumnya 35%. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan industri dengan mengurangi biaya pajak dan menyederhanakan negosiasi operasional. Pada tahun 2015, industri perfilman dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi, yang memungkinkan investasi dan persaingan oleh pihak asing di pasar. Selain itu, Pemerintah Indonesia mendukung industri ini melalui langkah-langkah lain seperti pengembangan sumber daya, alokasi anggaran untuk pembelian film, promosi film Indonesia di acara internasional, dan pengembangan infrastruktur. Terlepas dari hal di atas, terdapat lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan industri perfilman, termasuk penegakan perlindungan IP yang lebih ketat dan regulasi konten yang kurang restriktif.

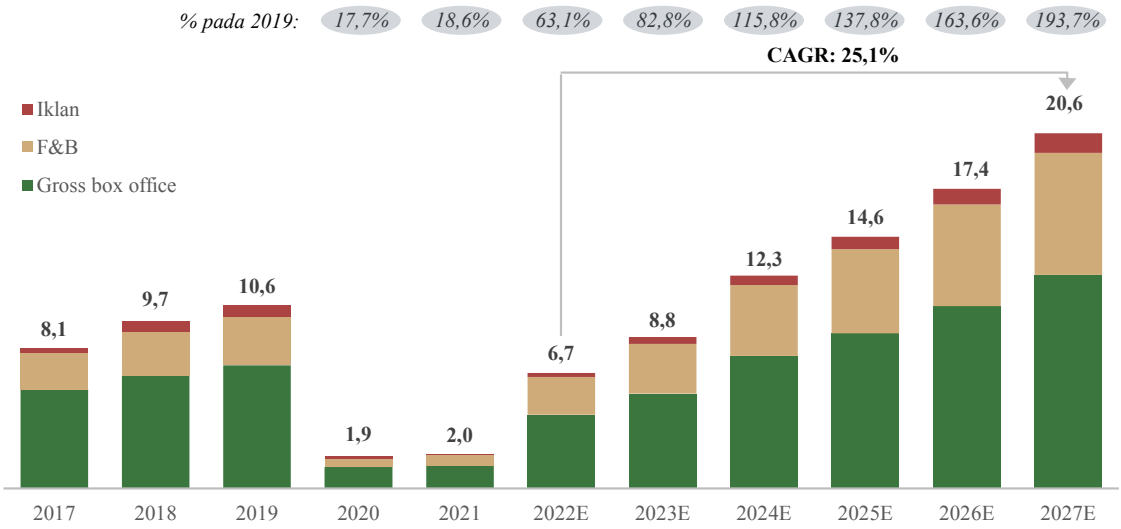
INDUSTRI BIOSKOP DI INDONESIA

Ukuran pasar industri bioskop di Indonesia

Industri bioskop telah berkembang dengan bantuan teknologi digital, yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas jangkauan operator bioskop. Bioskop saat ini semakin banyak menawarkan pengalaman menonton film yang lebih berkualitas, seperti kursi yang lebih nyaman dan teknologi audio/visual mutakhir. Bioskop juga berhasil meningkatkan sumber pendapatan tambahan dari F&B, serta penggunaan alternatif bioskop seperti acara dan pertemuan.

Pada tahun 2019, industri bioskop secara keseluruhan mencapai omset bruto sebesar Rp10,6 triliun, sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan terkait, pasar industri bioskop turun menjadi Rp2,0 triliun pada tahun 2021 dan Rp6,7 triliun pada tahun 2022E. Industri bioskop diperkirakan akan pulih dengan cepat setelah pandemi COVID-19 dengan ukuran pasar mencapai Rp8,8 triliun pada tahun 2023E (82,8% dari 2019) dan Rp12,3 triliun pada tahun 2024E (115,8% dari 2019). Industri bioskop diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 25,1% dari tahun 2022E hingga 2027E.

Grafik 8. Omset bruto industri bioskop di Indonesia (dalam triliun Rupiah)



(triliun Rp)	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR '22E-'20E
Gross box office	5,7	6,6	7,2	1,2	1,3	4,3	5,5	7,7	9,0	10,6	12,4	23,7%
F&B	2,1	2,5	2,8	0,5	0,6	2,2	2,9	4,1	4,9	5,9	7,1	26,3%
Iklan	0,3	0,6	0,7	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	37,3%

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Gambaran mengenai jumlah bioskop dan layar

Untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat, operator bioskop telah membuka lebih banyak gerai bioskop. Jumlah gerai bioskop di Indonesia meningkat menjadi 427 pada tahun 2022E dari 268 pada tahun 2017, dengan CAGR mencapai 9,8%. Selama periode yang sama, jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat dari 1.533 menjadi 2.107, yang mewakili CAGR 6,6%. Ke depan, momentum pertumbuhan diharapkan akan terus berlanjut, dengan jumlah gerai bioskop diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 8,9% dari tahun 2022E hingga 2027E dan jumlah layar diharapkan tumbuh pada CAGR 9,8% selama periode yang sama.

Tabel 4. Jumlah bioskop (termasuk teater, multiplex, dan megaplex) dan layar di Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR '17E-'22E	CAGR '22E-'20E
Bioskop	268	336	414	424	420	427	450	509	557	605	653	9,8%	8,9%
Layar	1.533	1.777	2.063	2.113	2.091	2.107	2.248	2.505	2.764	3.066	3.368	6,6%	9,8%

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Saat ini, kota-kota Tier 1 mendominasi dalam hal konsentrasi bioskop dan jumlah layar, dengan menyumbang 67,9% dari total pendapatan *gross box office* pada tahun 2021, dibandingkan dengan kota-kota Tier 2 dengan 21,5% dan kota-kota Tier 3 dengan 10,7%.

Tabel 5. Industri bioskop berdasarkan tingkatan kota di Indonesia, 2019/2021

	Kota Tier 1		Kota Tier 2		Kota Tier 3	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021
Gross box office (% dari total di Indonesia)	70,9	67,9	18,5	21,5	10,7	10,7
Jumlah bioskop	274	276	82	87	58	57
Jumlah layar	1.401	1.408	392	418	270	265
Jumlah penonton per layar	80.813	15.172	75.706	16.448	71.527	14.417

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

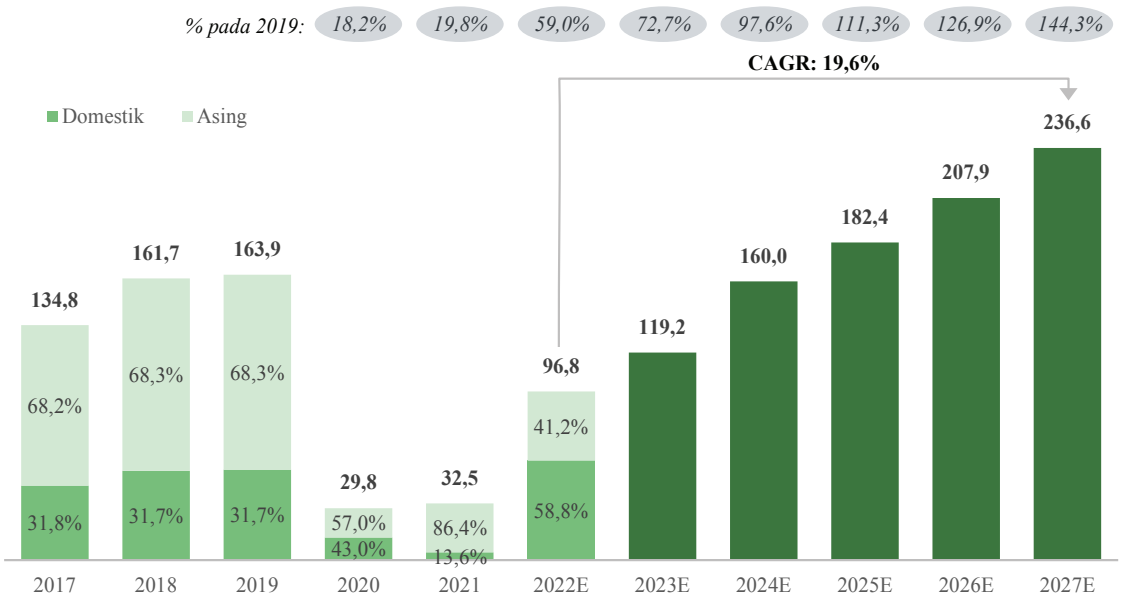
Ke depan, operator bioskop diharapkan akan lebih memperhatikan peluang pertumbuhan di kota Tier 2 dan kota Tier 3, mengingat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan yang diharapkan lebih tinggi dan penetrasi bioskop dan layar yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota Tier 1. Operator bioskop diharapkan akan memanfaatkan ekspansi ritel modern di wilayah ini untuk memperluas kehadiran mereka secara nasional.

Gambaran mengenai jumlah penonton, harga tiket rata-rata, dan pendapatan *gross box office*

Peningkatan tingkat pendapatan siap dibelanjakan secara keseluruhan di Indonesia berdampak pada kecenderungan yang lebih tinggi bagi konsumen untuk meningkatkan pengeluaran diskresioner, seperti hiburan dan rekreasi. Di antara faktor-faktor lain, deretan film yang akan datang dan menarik diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan penonton dan *box office* yang kuat.

Angka penonton terkena dampak negatif pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi, namun saat ini telah menunjukkan pemulihan yang kuat paska pembukaan kembali ekonomi. Angka penonton diharapkan akan mencapai 119,2 juta pada tahun 2023E (72,2% dari tahun 2019) dan 160,0 juta pada tahun 2024E (97,6% dari tahun 2019).

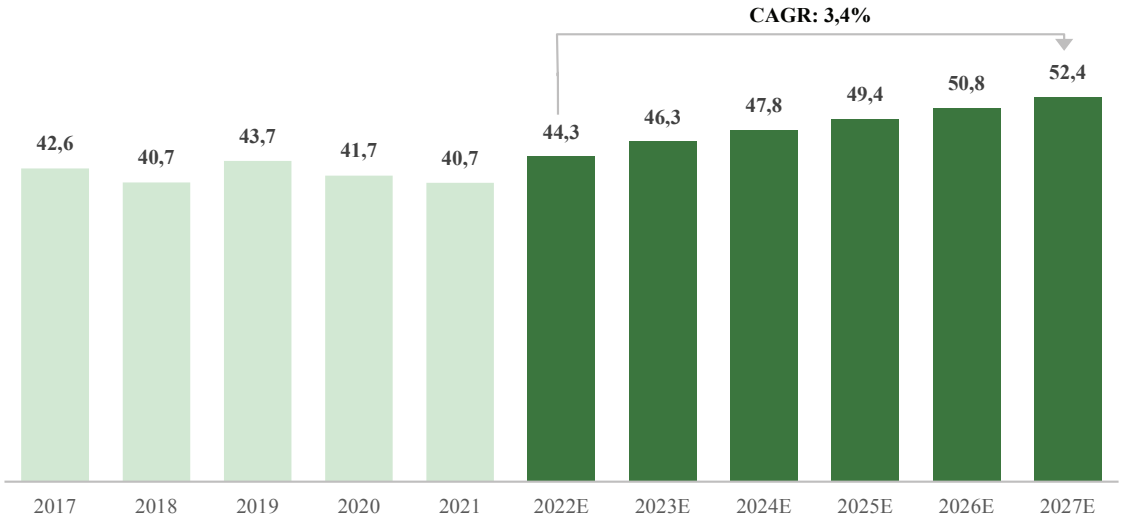
Grafik 9. Jumlah penonton bioskop di Indonesia (jutaan)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Harga tiket rata-rata di industri telah relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, meskipun pada masa pandemi. Ke depan, harga tiket diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan CAGR 3,4% dari tahun 2022E hingga 2027E, umumnya didorong oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan pendapatan.

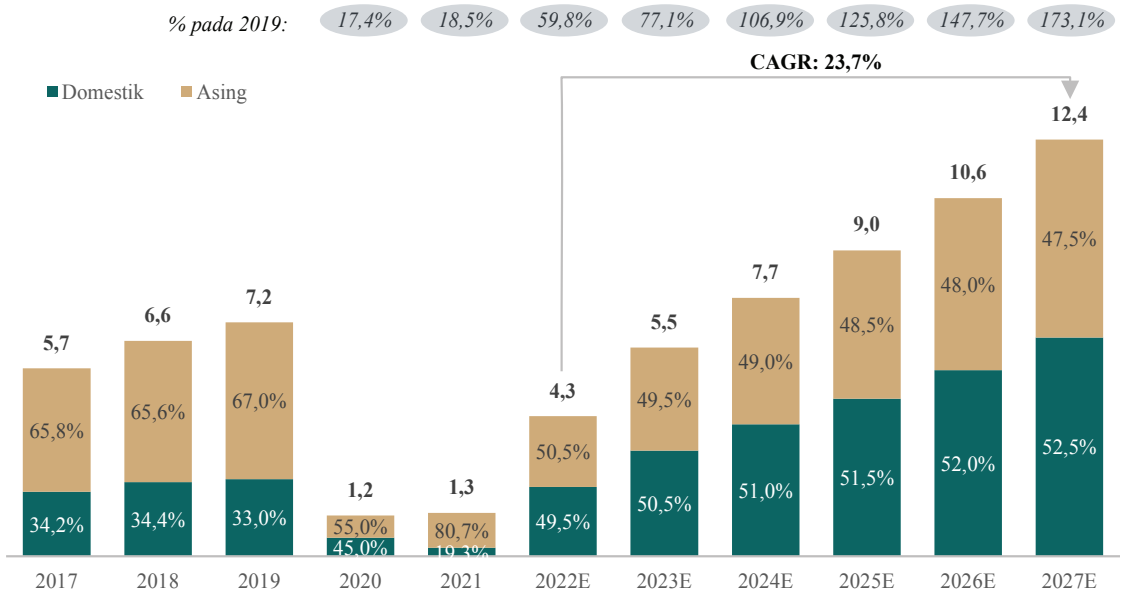
Grafik 10. Harga tiket rata-rata bioskop di Indonesia (dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Oleh karena itu, pendapatan *gross box office* diharapkan akan menunjukkan pemulihan cepat paska pandemi COVID-19 yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan dan harga tiket rata-rata. Ukuran pasar diharapkan akan mencapai Rp5,5 triliun pada tahun 2023E (77,1% dari tahun 2019) dan Rp7,7 triliun pada tahun 2024E (106,9% dari tahun 2019). Sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk film domestik, kontribusi film domestik terhadap pendapatan *gross box office* diharapkan akan meningkat dari 49,5% pada tahun 2022E menjadi 52,5% pada tahun 2027E. Apabila dibandingkan dengan kontribusi film domestik pada tahun 2017 sebesar34,2%, film dalam negeri saat ini terbukti menjadi semakin relevan dan diharapkan tetap menjadi kontributor besar terhadap pendapatan *gross box office* di masa mendatang.

Grafik 11. Pendapatan *gross box office* di Indonesia (dalam triliun Rupiah)



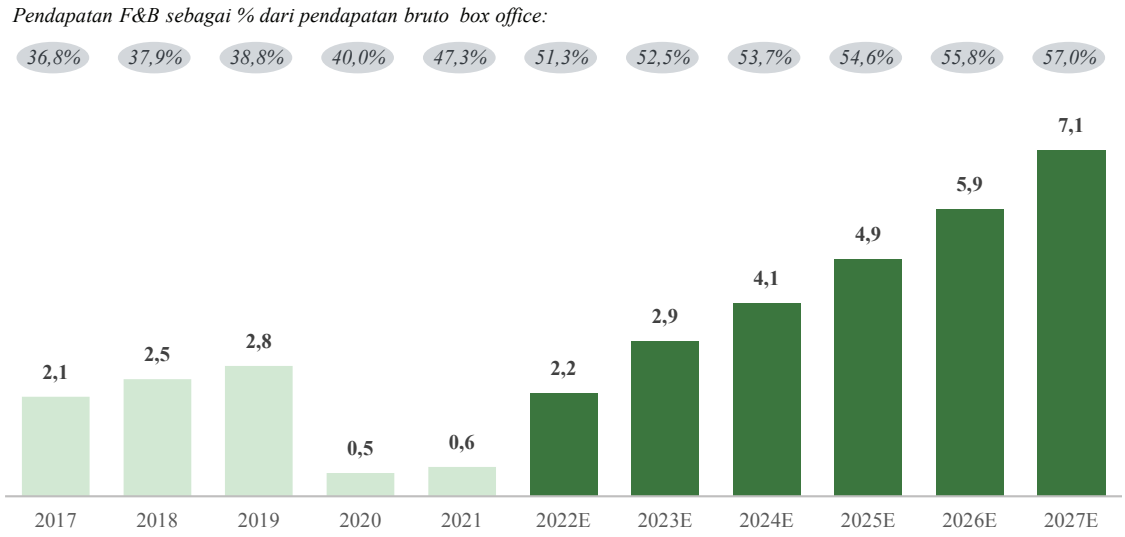
Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Gambaran pendapatan F&B[20]

Selain pendapatan *gross box office*, belanja F&B juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan F&B diharapkan mencapai Rp2,9 triliun pada tahun 2023E (104,5% dari tahun 2019) dan Rp4,1 triliun pada tahun 2024E (148,0% dari tahun 2019). Pendapatan ini masing-masing mewakili 52,5% dan 53,7% dari pendapatan *gross box office* masing-masing untuk tahun tersebut. Peningkatan dari 36,8% yang ditunjukkan pada tahun 2017 menunjukkan kesediaan konsumen untuk membelanjakan uang pada layanan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman menonton film mereka secara keseluruhan.

20 Semua referensi pengeluaran / pendapatan F&B adalah secara bruto (sebelum pajak).

Grafik 12. Pendapatan F&B bioskop di Indonesia (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Menurut Survei Euromonitor yang dilakukan pada bulan Januari 2023, lebih dari 64% responden setuju bahwa mereka membeli F&B di bioskop untuk dikonsumsi di luar bioskop[21]. Oleh karena itu, distribusi F&B di luar bioskop merupakan peluang pertumbuhan lebih lanjut bagi operator bioskop untuk dieksplorasi.

HAMBATAN UTAMA INDUSTRI

Meningkatnya prevalensi platform OTT dan media sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton dari menonton film di bioskop

Tantangan utama

Peningkatan popularitas OTT dan media sosial sebagai bentuk hiburan alternatif untuk menonton film menimbulkan tantangan bagi industri bioskop. OTT seperti Vidio (didukung oleh Grup Emtek), RCTI+, MNC+, Vision+, dan platform asing seperti Netflix dan Disney+ menawarkan berbagai konten untuk memenuhi preferensi konsumen. Platform media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Tiktok juga bersaing untuk konten film dan serial dengan format singkat yang menarik.

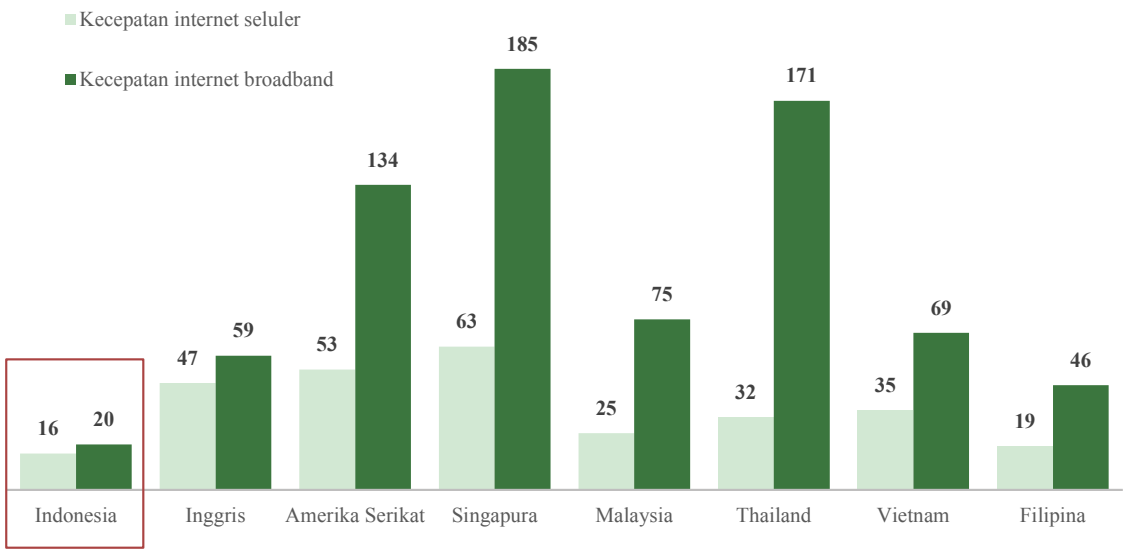
Faktor mitigasi

Infrastruktur pendukung yang terbatas

Infrastruktur internet di Indonesia menjadi tantangan bagi adopsi layanan OTT secara luas, yang bahkan lebih banyak terjadi di kota Tier 2 dan kota Tier 3. Dalam hal kecepatan internet seluler dan *broadband*, Indonesia kalah dari Amerika Serikat dan Inggris, serta negara-negara di Asia Tenggara lainnya - Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Konektivitas yang buruk dan keterbatasan pada pengalaman audio dan video berkualitas tinggi menjadi faktor pembatas utama bagi adopsi OTT.

21 Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apakah Anda pernah membeli makanan dan minuman di bioskop untuk dikonsumsi di luar bioskop itu sendiri (misalnya membawa popcorn pulang, membeli makanan tetapi tidak tertarik untuk menonton di bioskop)?

Grafik 13. Kecepatan internet di Indonesia pada tahun 2022 (dalam Mbps)



Sumber: Datareportal.com.

Gaya hiburan yang berbeda

Berdasarkan Survei Euromonitor di Indonesia mengenai tren menonton film, konsumen diketahui lebih sering menonton film *blockbuster* di bioskop dibandingkan platform lainnya13F[22]. Sedangkan platform OTT lebih sering digunakan untuk menonton konten berseri daripada film. Karena kedua platform menawarkan bentuk konten dan nilai hiburan yang berbeda, maka keduanya diharapkan dapat bersama-sama berdampingan. Menonton film di bioskop juga terbukti sebagai bentuk hiburan yang tetap dimintai di tengah perkembangan teknologi hiburan yang lain.

Preferensi untuk rilis teatrikal

Meskipun platform OTT bisa digunakan sebagai tempat rilis film yang layak, film *blockbuster* dan waralaba tidak mungkin hanya dirilis di platform OTT saja dikarenakan kemampuan film tersebut untuk menarik kunjungan penonton ke bioskop. Selain itu, penggemar film ingin menikmati efek audiovisual yang memuaskan dan hanya tersedia di bioskop. Lebih lanjut, merilis film secara simultan di bioskop dan OTT dapat menimbulkan masalah pembajakan, seperti yang terjadi pada film Black Widow milik Disney. Film ini dirilis secara bersamaan di Disney+ dan di bioskop pada tahun 2021, namun mengalami penurunan penjualan tiket sebesar 67% pada minggu kedua pasca penayangan perdana dan menjadi salah satu film Marvel dengan pendapatan terendah. Studio dan produser film secara bertahap kembali menayangkan film di bioskop secara ekslusif selama 45 hari dan bahkan memperpanjang penayangan di layar bioskop untuk film-film besar.

INDUSTRI DARI PERSPEKTIF KONSUMEN

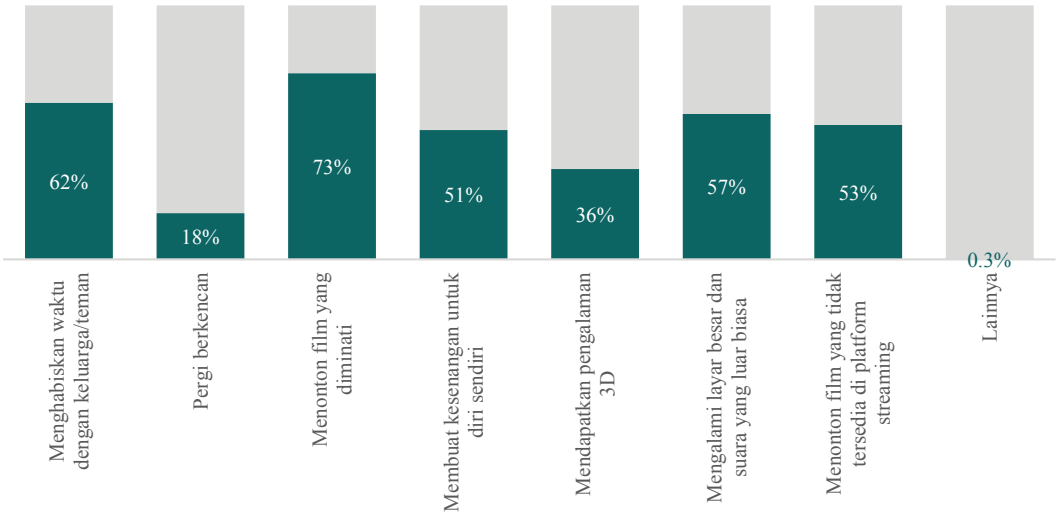
Euromonitor International melakukan survei pada konsumen Indonesia di bulan Januari 2023 untuk memahami sikap dan preferensi mereka dalam menonton film di bioskop. Hasil survei dan pembelajaran dijelaskan dalam bagian ini.

22 Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bisakah Anda memperkirakan persentase pemakaian saluran-saluran di bawah ini untuk menonton film-film Blockbuster /rilisan terbaru?

Masyarakat Indonesia menikmati film favorit mereka bersama keluarga dan teman-teman

Ketika konsumen Indonesia berkunjung ke bioskop, biasanya tidak hanya sekadar menonton film. 62% dari responden menikmati waktu bersama keluarga dan teman di bioskop.[23].

Grafik 14. Motivasi untuk pergi ke bioskop (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.

Kualitas audiovisual dan kenyamanan tempat duduk adalah faktor utama yang memengaruhi pilihan bioskop

Sebesar 92%[24] dari konsumen Indonesia percaya bahwa kualitas layar dan sistem suara sangat penting ketika memilih bioskop, dibandingkan dengan 93%[25] untuk kenyamanan tempat duduk, dan 91%[26] untuk pilihan film yang ditawarkan. Pilihan dan ketersediaan tempat duduk juga berperan signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

23 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apa motivasi Anda untuk pergi ke bioskop?

24 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?

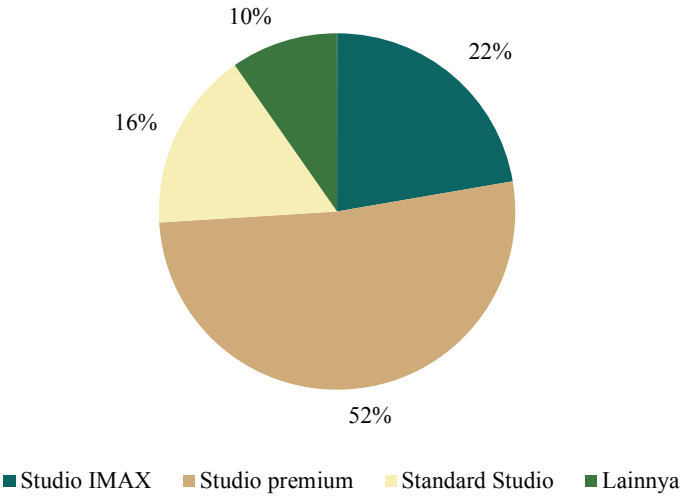
25 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?

26 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?

Penonton film Indonesia bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengalaman yang lebih baik

Menurut hasil survei Euromonitor International pada konsumen Indonesia dalam memilih format bioskop, format premium menjadi pilihan terpopuler dengan 52% responden memilih studio premium dan 22% memilih IMAX[27].

Grafik 15. Preferensi berdasarkan tipe teater (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.

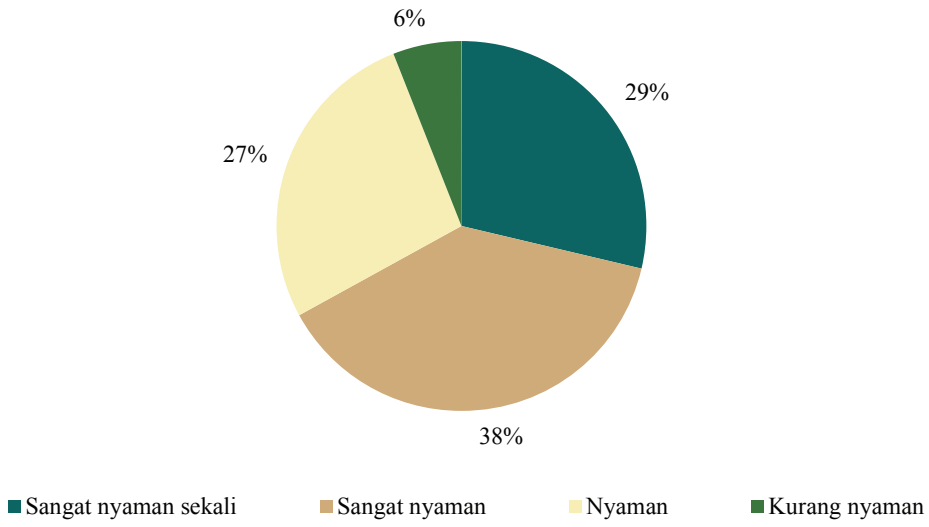
Konsumen Indonesia menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi untuk kembali menonton film di bioskop setelah COVID-19

Mayoritas konsumen Indonesia tidak merasa tidak nyaman untuk kembali ke bioskop setelah pandemi COVID-19 dengan lebih separuh dari responden sangat nyaman atau sangat nyaman untuk pergi ke bioskop.[28]

27 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Jenis bioskop apa yang biasanya Anda pilih?

28 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa nyaman perasaan Anda untuk kembali ke bioskop setelah COVID-19?

Grafik 16. Tingkat kenyamanan untuk kembali ke bioskop setelah COVID-19 (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.

LANSKAP PERSAINGAN

Gambaran umum mengenai persaingan pasar

Pasar bioskop Indonesia sangat terkonsolidasi dengan Cinema XXI yang mendominasi dalam hal skala

Pasar bioskop di Indonesia didominasi oleh tiga pemain yang memiliki lebih dari 90% dari total layar bioskop. Cinema XXI adalah pemain terbesar dengan pangsa pasar berdasarkan pendapatan *gross box office* sebesar 69,7%, jumlah penonton sebesar 68,8% dan jumlah layar sebesar 57,7% pada tahun 2021. Pemain yang lebih kecil umumnya menargetkan cerukan pasar tertentu seperti kelas premium dan kota-kota tier lebih rendah.

F&B, bersama dengan produk tambahan lainnya, untuk memberikan pengalaman yang bernilai tambah bagi konsumen

Operator jaringan bioskop Indonesia menawarkan produk tambahan, seperti produk F&B, untuk mengembangkan bisnis inti mereka dalam menayangkan film. Sebagai contoh, sebagai pemimpin pasar berdasarkan pendapatan dan jumlah bioskop yang dioperasikan, Cinema XXI memiliki penawaran produk F&B yang kuat. Salah satu penawaran F&B-nya, yaitu XXI Café, populer di kalangan penonton bioskop dan menawarkan produk yang laris bahkan untuk konsumen non-penonton bioskop atau konsumsi di luar bioskop. Sementara itu, pemain pasar lainnya telah memperluas konsep makanan mereka, yang memungkinkan konsumen menikmati berbagai minuman dan camilan selama menunggu penayangan film mereka. Lebih banyak bioskop ke depannya diharapkan akan melakukan diversifikasi dan mengintegrasikan fasilitas olahraga dan pusat hiburan keluarga untuk menjadi tempat atraksi atau hiburan yang terintegrasi.

Jejaring industri yang kuat dan biaya modal yang tinggi menjadi penghalang kuat untuk masuk ke pasar

Biaya modal yang tinggi untuk membangun dan mengoperasikan bioskop, ditambah kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemain industri utama seperti distributor film dan pengembang pusat perbelanjaan, menjadi penghalang yang kuat untuk masuk ke pasar. Rantai bioskop yang memimpin pasar memiliki keuntungan dalam mengakses peluang melalui kesepakatan bagi hasil dengan operator atau pengembang pusat perbelanjaan, sehingga sulit bagi operator kecil untuk bersaing dalam mendapatkan ruang bioskop yang terbatas.

Pemain pasar yang inovatif menawarkan produk tambahan untuk membedakan diri dari persaingan

Meskipun pasar bioskop Indonesia didominasi oleh beberapa jaringan besar, pemain baru dapat masuk untuk menawarkan pengalaman bioskop yang berbeda. Hal ini meliputi antara lain penerapan konsep yang berbeda, yang disebut sebagai "*the lifestyle cinema*", di mana bioskop dilengkapi dengan desain interior yang *stylish* dan dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal bagi konsumen. Pemain baru lain juga menargetkan dan menarik basis konsumen muda dan peduli lingkungan, dengan mempromosikan konsep ramah lingkungan dalam menggunakan sedotan kertas dan layanan *self-service* dalam penawaran produk F&B untuk menurunkan jejak ekologi.

Posisi lima pemain utama di pasar

Cinema XXI memimpin pasar bioskop di Indonesia dalam berbagai parameter

Cinema XXI adalah pemain utama di pasar bioskop Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, pendapatan F&B, jumlah bioskop dan layar, tingkat keterisian, dan jumlah penonton. Pada tahun 2021, Cinema XXI mencatatkan pendapatan *gross box office* sebesar Rp920,8 miliar, hampir lima kali lipat dari pemain terbesar kedua, CGV. Cinema XXI juga memiliki jumlah gerai dan layar bioskop terbanyak masing-masing sebesar 222 dan 1.206 pada tahun 2021, lebih tinggi dari jumlah gabungan empat perusahaan teratas lainnya. Cinema XXI memiliki tingkat keterisian tertinggi di antara lima pemain teratas dan memiliki pendapatan *gross box office* per layar sekitar 1,6 kali dan penonton sekitar lima kali lipat dari CGV pada tahun 2021.

Tabel 6. Peringkat pasar dari operator bioskop terkemuka Indonesia pada tahun 2021

Peringkat	Perusahaan	Pendapatan (Rp miliar)	*Pendapatan gross box office* (Rp miliar)	Pendapatan F&B bruto (Rp miliar)	Jumlah bioskop	Jumlah layar
1	Cinema XXI	1.411,8	920,8	446,0	222	1.206
2	CGV	284,9	190,2	82,5	69	397
3	Cinepolis	n/a	n/a	n/a	59	302
4	New Star Cineplex	n/a	n/a	n/a	27	55
5	Platinum Cineplex	n/a	n/a	n/a	10	44

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Cinema XXI paling dikenal dan dikunjungi dalam setahun terakhir

Cinema XXI memiliki pengenalan merek[29] tertinggi di antara jaringan bioskop di Indonesia dengan kesadaran sebesar 97%, diikuti oleh CGV sebesar 75% dan Cinepolis sebesar 56%. Hampir 80% dari responden juga mengatakan bahwa Cinema XXI adalah merek bioskop pertama yang terlintas dalam pikiran mereka[30], dengan 18% menjawab dengan CGV, dan 4% menyebut merek lain. Baik Cinema XXI maupun CGV dianggap nyaman, modern, dan aman di samping Cinema XXI juga dianggap elegan. Kedua bioskop ini juga yang paling banyak[31] dikunjungi dengan 88% mengunjungi Cinema XXI, 47% mengunjungi CGV, dan 21% mengunjungi Cinepolis dalam setahun terakhir.

29 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Dari merek-merek berikut, mana saja yang Anda kenal?

30 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Merek bioskop mana yang pertama kali terlintas di pikiran Anda saat ingin menonton film?

31 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bioskop mana yang Anda kunjungi dalam setahun terakhir?

Sebagian besar konsumen merasa puas dengan kualitas audiovisual dan kenyamanan bioskop

Sebagian besar responden survei merasa cukup puas dengan pengalaman mereka di operator bioskop teratas Indonesia, di mana sebagian besar memberikan penilaian positif untuk berbagai faktor, termasuk harga tiket, pengalaman kenyamanan, pilihan film yang ditawarkan, harga dan opsi F&B, lokasi bioskop, kualitas audiovisual, dan layanan secara keseluruhan. Untuk Cinema XXI, faktor yang paling banyak memuaskan[32] responden (dinilai baik atau sangat baik) adalah kualitas audiovisual (97% mengatakan begitu) dan kenyamanan (95%). Dalam hal pilihan F&B, 82% responden merasa puas dengan Cinema XXI. Untuk CGV, hal ini berkaitan dengan layanan secara keseluruhan (95%) dan kualitas audiovisual (94%).

Mayoritas bioskop di Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari pelanggan yang memberikan tingkat kepuasan yang positif secara keseluruhan.

Operator bioskop teratas di Indonesia mendapatkan skor promotor positif. Mayoritas responden survei memberi nilai minimal 9 dari skala 1-10 dalam hal keinginan merekomendasikan bioskop kepada orang lain. Cinema XXI memiliki 63% responden yang memberikan nilai 9 atau lebih[33], dibandingkan dengan 53% untuk CGV dan 58% untuk Cinepolis.

32 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bagaimana pengalaman terakhir Anda dengan merek bioskop yang disebutkan sebelumnya?

33 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa mungkin Anda merekomendasikan ke teman atau kolega?

LAMPIRAN: MATERI TAMBAHAN MENGENAI INDUSTRI

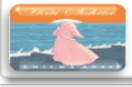
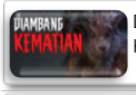
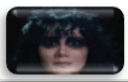
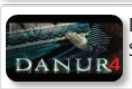
Contoh film yang akan dirilis pada tahun 2023-2024 (tentatif)

Deretan film internasional pilihan (2023)

Apr 2023	The Pope Exorcist	The Super Mario Bros	Renfield
May 2023	★ Guardians of the Galaxy Vol 3	★ Fast X	★ Spiderman: Across the Spider-Verse
Jun 2023	★ Transformers: Rise of the Beasts	★ The Flash	★ Indiana Jones 5
Jul 2023	★ Insidious 5	★ Mission: Impossible Dead Reckoning Part 1	★ The Marvels
Aug 2023	★ The Meg 2: The Trench	★ Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem	Blue Beetle
Sep 2023	★ The Nun 2	★ The Expendables 4	A Haunting in Venice
Oct 2023	Kraven the Hunter	True Love	★ PAW Patrol: The Mighty Movie
Nov 2023	★ Dune: Part Two	★ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes	★ Trolls 3
Dec 2023	★ Aquaman and the Lost Kingdom	★ Wonka	

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.
Catatan: Simbol bintang menunjukkan film *franchise* / sekuel.

Deretan film domestik pilihan (2023)

Apr 2023	 Sewu Dino	 Hati Suhita	 Jin & Jun
May 2023	 Indigo	 24 Jam Bersama Gaspar	 Sehidup Semati
Jun 2023 ★	 Petualangan Sherina 2	 Dilan 1980 ★	 Ganjil Genap
Jul 2023	 Diambang Kematian	 Halo Ibu Apa Kabar?	 Bangku Kosong 2 ★
Aug 2023	 Gong Nyai Gandrung	 Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul	 Janji Jiwa
Sep 2023 ★	 Catatan si Boy	 Suzzanna Malam Jumat Kliwon ★	 Guna – Guna Istri Muda ★
Oct 2023 ★	 Sundel Bolong	 Suicide Hotline	 Dua Hati Biru
Nov 2023	 Do You See What I See	 Gowok	 Shaka Oh Shaka
Dec 2023 ★	 Danur 4: Senjakala	 Catatan Harian Menantu Sinting	 Koes Plus

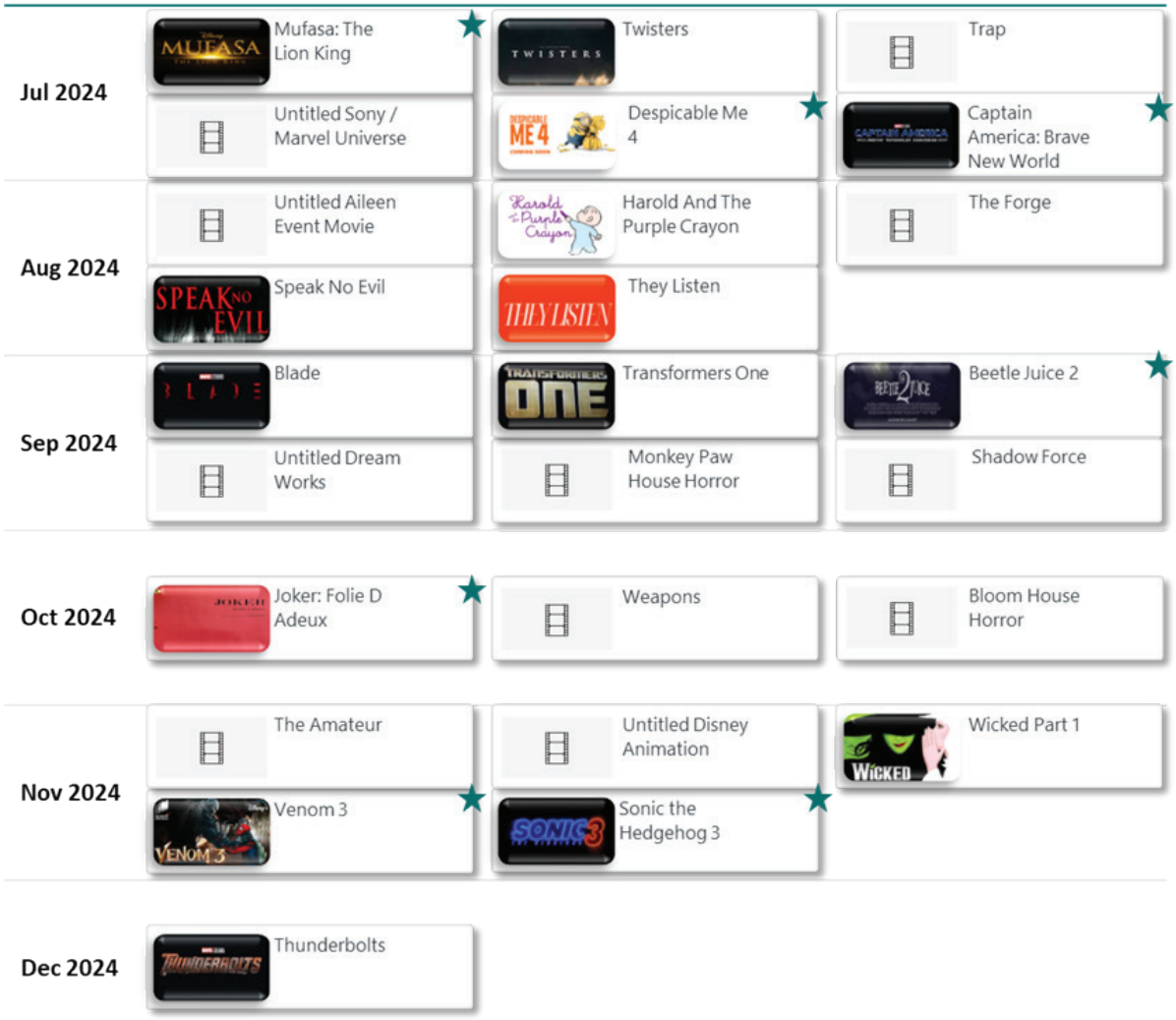
Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia
Catatan: Simbol bintang menunjukkan film *franchise* / sekuel

Deretan film internasional pilihan (2024)

Jan 2024	The Color Purple	Untitled Bob Marley	Argylle
	Night Swim	Wise Guys	
Feb 2024	Elio	Untitled Disney	Tiger's Apprentice
	Madame Web	Fall Guy	Canary Black
Mar 2024	Mickey 17	Quiet Place: Day One ★	Kungfu Panda 4 ★
	Spiderman Beyond The Spider-verse ★	Disney's Snow White	Godzilla x Kong: The New Empire ★
Apr 2024	Lord of the Rings: War of Rohirrim ★	Companion	Ministry Of Ungentlemanly Warfare
	Untitled Monster Thriller		
May 2024	Deadpool 3 ★	Kingdom Of The Planet Of The Apes ★	Furiosa ★
	IF	Garfield	
Jun 2024	Inside Out 2 ★	MI8 ★	Untitled DC Event Film
	Karate Kid ★	The Watchers	Ballerina

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.
Catatan: Simbol bintang menunjukkan film *franchise* / sekuel.

Deretan film internasional pilihan (2024)



Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.
Catatan: Simbol bintang menunjukkan film *franchise* / sekuel.

Film domestik teratas dari tahun 2013 hingga 2022 (berdasarkan tahun liris)

Top 15 film domestik, 2013

#	Judul	Penonton
1	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck	1.724.110
2	99 Cahaya di Langit Eropa	1.189.709
3	Soekarno: Indonesia Merdeka	960.071
4	Cinta Brontosaurus	892.915
5	Coboy Junior The Movie	683.604
6	Taman Lawang	526.761
7	Manusia Setengah Salmon	442.631
8	Laskar Pelangi 2: Edensor	390.810
9	308	358.507
10	Get M4rried	315.390
11	Refrain	281.922
12	Slank Nggak Ada Matinya	278.244
13	La Tahzan	235.718
14	Sang Kiai	234.207
15	Air Terjun Pengantin Phuket	215.161

Top 15 film domestik, 2013

#	Judul	Penonton
1	Comic 8	1.624.067
2	The Raid 2: Berandal	1.434.272
3	Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar	715.851
4	Hijrah Cinta	711.205
5	Marmut Merah Jambu	640.682
6	99 Cahaya di Langit Eropa Part 2	587.042
7	Assalamualaikum Beijing	560.465
8	Supernova: Ksatria. Putri. & Bintang Jatuh	501.258
9	Bajaj Bajuri The Movie	460.779
10	Haji Backpacker	375.799
11	7/24	374.769
12	Runaway	371.567
13	Mall Klender	334.173
14	Rumah Gurita	319.516
15	Kamar 207	311.469

Top 15 film domestik, 2015

#	Judul	Penonton
1	Surga yang Tak Dirindukan	1.523.790
2	Single	1.351.324
3	Comic 8: Casino Kings part 1	1.211.820
4	Bulan Terbelah di Langit Amerika	917.865
5	Magic Hour	859.705
6	Ngenest	785.786
7	Di Balik 98	684.727
8	3 Dara	666.183
9	Negeri Van Oranje	490.788
10	Air Mata Surga	425.179
11	Tarot	329.258
12	Sunshine Becomes You	321.838
13	Warisan Olga	296.773
14	Komedi Moderen Gokil	296.232
15	Toba Dreams	255.933

Top 15 film domestik, 2016

#	Judul	Penonton
1	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1	6.858.616
2	Ada Apa Dengan Cinta 2	3.665.509
3	My Stupid Boss	3.052.657
4	Cek Toko Sebelah	2.642.957
5	Hangout	2.620.644
6	{rudy habibie}	2.012.025
7	Koala Kumal	1.863.541
8	Comic 8: Casino Kings Part 2	1.835.644
9	ILY from 38.000 Ft	1.574.576
10	London Love Story	1.124.876
11	Headshot	732.763
12	Sabtu Bersama Bapak	639.530
13	Bulan Terbelah di Langit Amerika 2	582.487
14	Talak 3	567.917
15	The Doll	550.252

Top 15 film domestik, 2017

#	Judul	Penonton
1	Pengabdi Setan	4.206.103
2	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2	4.083.190
3	Ayat Ayat Cinta 2	2.840.159
4	Danur: I Can See Ghosts	2.736.391
5	Jailangkung	2.550.271
6	Susah Sinyal	2.172.512
7	Surga Yang Tak Dirindukan 2	1.637.559
8	Mata Batin	1.282.557
9	The Doll 2	1.226.864
10	Surat Cinta untuk Starla the Movie	1.218.317
11	Sweet 20	1.044.045
12	Critical Eleven	881.530
13	London Love Story 2	862.874
14	Insya Allah Sah	833.010
15	Surat Kecil untuk Tuhan	715.361

Top 15 film domestik, 2018

#	Judul	Penonton
1	Dilan 1990	6.315.664
2	Suzzanna: Bernapas dalam Kubur	3.346.185
3	Danur 2: Maddah	2.572.871
4	Si Doel the Movie	1.757.653
5	Asih	1.714.798
6	#Teman tapi Menikah	1.655.829
7	Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga	1.563.188
8	Wiro Sebleng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212	1.552.014
9	Jailangkung 2	1.498.635
10	A Man Called Ahok	1.465.145
11	Sabrina	1.337.510
12	Kuntilanak	1.236.000
13	Sebelum Iblis Menjemput	1.122.187
14	Eiffel… I'm In Love 2	1.008.392
15	Yowis Ben	935.622

XXI

Top 15 film domestik, 2019

#	Judul	Penonton
1	Dilan 1991	5.253.411
2	Imperfect: Karier. Cinta & Timbangan	2.662.356
3	Dua Garis Biru	2.538.473
4	Danur 3: Sunyaruri	2.416.691
5	Habibie & Ainun 3	2.245.576
6	My Stupid Boss 2	1.876.052
7	Perempuan Tanah Jahanam	1.795.068
8	Kuntilanak 2	1.726.570
9	Keluarga Cemara	1.701.498
10	Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot	1.699.433
11	Bumi Manusia	1.316.583
12	Preman Pensiun	1.147.469
13	Orang Kaya Baru	1.118.738
14	Ghost Writer	1.116.676
15	Yowis Ben 2	1.031.856

Top 15 film domestik, 2020

#	Judul	Penonton
1	Milea: Suara dari Dilan	3.157.817
2	Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini	2.256.908
3	Akhir Kisah Cinta Si Doel	1.155.859
4	Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2	863.003
5	Mangkujiwo	834.806
6	#Teman Tapi Menikah 2	832.801
7	Mariposa	766.429
8	Aku Tahu Kapan Kamu Mati	567.701
9	Rasuk 2	382.765
10	Asih 2	334.282
11	Dignitate	236.210
12	Toko Barang Mantan	217.818
13	Janin	183.673
14	Titus: Mystery of The Enygma	156.738
15	Mangga Muda	112.317

Top 15 film domestik, 2021

#	Judul	Penonton
1	Makmum 2	1.764.372
2	Nussa	446.482
3	Yowis Ben 3	418.526
4	Yowis Ben Finale	369.211
5	Tarian Lengger Maut	222.062
6	Teka-teki Tika	173.017
7	Backstage	138.258
8	Kuyang The Movie	126.108
9	Losmen Bu Broto	120.413
10	Yuni	117.160
11	Seperti Dendam. Rindu Harus Dibayar Tuntas	
12	Kadet 1947	84.196
13	Paranoia	76.614
14	Pintu Surga Terakhir	43.078
15	Akhirat: A Love Story	41.524

Top 15 film domestik, 2022

#	Judul	Penonton
1	KKN Desa Penari	10.061.033
2	Pengabdi Setan 2: Communion	6.390.970
3	Miracle in Cell No 7	5.860.917
4	Ngeri-ngeri Sedap	2.886.121
5	Ivanna	2.793.775
6	Sayap-Sayap Patah	2.426.084
7	Mencuri Raden Saleh	2.350.741
8	Kukira Kau Rumah	2.220.180
9	The Doll 3	1.764.077
10	Qodrat	1.761.237
11	Jailangkung: Sandekala	1.546.295
12	Qorin	1.330.323
13	Kuntilanak 3	1.313.304
14	Argantara	1.101.359
15	Keramat 2: Caruban Larang	918.099

Sumber: Film Indonesia (per tanggal 2 Maret 2023).

X. PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRI

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan PP No. 5/2021, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi:

(i) persyaratan dasar perizinan berusaha;
(ii) perizinan berusaha berbasis risiko.

Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Persyaratan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:

(i) kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
(ii) persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
(iii) pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
(iv) standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pelaksanaan analisis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yang dilakukan melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha serta penetapan jenis perizinan berusaha.

Kewajiban perolehan perizinan berusaha berbasis risiko bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha terkait, sebagai berikut:

(i) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB;
(ii) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar;
(iii) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar terverifikasi; dan
(iv) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.

Pemerintah pusat, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS akan menerbitkan NIB kepada perusahaan melalui sistem OSS. Berdasarkan PP No. 5/2021, NIB berlaku sebagai identitas bagi perusahaan sebagai bukti registrasi atau pendaftaran perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai (i) angka pengenal impor; (ii) hak akses kepabeanan; (iii) pendaftaran kepesertaan perusahaan untuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan (iv) wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama perusahaan.

Pada saat PP No. 5/2021 berlaku:

(i) ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021 dikecualikan bagi pelaku usaha yang Perizinan Berusaha-nya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP No. 5/2021 berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP No. 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha; dan
(ii) pelaku usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum PP No. 5/2023 berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5/2021.

Perizinan Sehubungan Aktivitas Pemutaran Film

Kegiatan usaha perfilman diatur berdasarkan UU Film. Kegiatan usaha perfilman terbagi menjadi kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Berdasarkan Pasal 1 UU Film, kegiatan perfilman adalah penyelenggara perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial dan usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial. Usaha perfilman meliputi, pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan film dan/atau penyewaan film, pengarsipan film, ekspor film dan impor film. Berdasarkan Pasal 30 UU Film, pertunjukan film dapat dilakukan melalui (a) layar lebar; (b) penyiaran televisi; dan (c) jaringan teknologi informatika. Pertunjukan film melalui layar lebar meliputi pertunjukan film di bioskop atau di gedung pertunjukan nonbioskop dan lapangan terbuka. Sebelum PP No. 5/2021 diberlakukan, pelaku usaha pertunjukan film wajib untuk memiliki izin usaha perfilman sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, izin usaha perfilman tidak lagi diperlukan setelah diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko. Berdasarkan Lampiran IA - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pendidikan dan Kebudayaan PP No. 5/2021, pelaku usaha pertunjukan film, dengan kode KBLI 59140 – Kegiatan Pertunjukan Film, hanya diwajibkan untuk memiliki NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan ("**Permendikbud No. 11/2021**"), pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perfilman wajib memiliki perizinan berusaha sektor kebudayaan. Dengan demikian, apabila pelaku usaha perfilman ditemukan tidak memiliki perizinan berusaha, maka dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut. Sanksi administratif subsektor kebudayaan diatur dalam Pasal 454 PP No. 5/2021 dan Pasal 6 Permendikbud No. 11/2021, di mana dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pengenaan daya paksa polisional, dan/atau pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. Berdasarkan Pasal 454 ayat (2) PP No. 5/2021, pengenaan daya paksa polisional yang relevan dengan aktivitas pemutaran film berupa penghentian pertunjukan film.

Sanksi administratif atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk memiliki perizinan berusaha dijatuhkan secara bertahap sesuai dengan aturan pada Pasal 8 Permendikbud No. 11/2021, dengan rincian sebagai berikut:

(i) sanksi administratif berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada pelaku usaha perfilman yang tidak memiliki perizinan berusaha, di mana pelaku usaha diberikan waktu 14 hari kerja untuk memenuhi perizinan berusaha.
(i) sanksi administratif berupa penutupan sementara dijatuhkan kepada pelaku usaha perfilman yang masih belum memenuhi perizinan berusaha setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis. Penutupan sementara dikenakan selama tujuh hari kerja.
(ii) apabila setelah jangka waktu penutupan sementara pelaku usaha perfilman masih belum melakukan kewajiban untuk memenuhi perizinan berusaha, pelaku usaha dijatuhkan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha perfilman.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Restoran

Berdasarkan Lampiran IA - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata PP No. 5/2021, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Restoran (KBLI No. 56101) dikategorikan sebagai sektor pariwisata. Tingkat risiko kegiatan usaha restoran ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang diukur dari jumlah tempat duduk tamu di masing-masing cabang restoran, dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit diklasifikasikan sebagai risiko rendah, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB;
(ii) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit diklasifikasikan sebagai risiko menengah-rendah, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan sertifikat standar;

(iii) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 diklasifikasikan sebagai risiko menengah-tinggi, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi;
(iv) restoran dengan jumlah tempak duduk tamu > 200 unit diklasifikasikan sebagai risiko tinggi dan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha berupa NIB, sertifikat standar dan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, pelaku usaha pariwisata (termasuk restoran) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha dalam Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI No. 46511) diklasifikasikan sebagai risiko rendah. Oleh karena itu, perizinan berusaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha risiko rendah adalah NIB.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha untuk KBLI No. 46511 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan ushaa, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana terakhir kali diubah melalui UU Cipta Kerja ("**UU Perdagangan**").

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Konsultasi Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial

Berdasarkan Lampiran IA PP No. 5/2021, kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial (KBLI No. 63122) dapat diklasifikasikan sebagai risiko rendah hingga risiko tinggi. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**PMSE**") dan tergolong berisiko tinggi harus memiliki NIB dan Izin Usaha.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Perdagangan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 tahun dan denda setinggi-tingginya 10 miliar rupiah.

Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("SIUPMSE")

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**Permendag No. 50/2020**"), setiap Penyelenggara Perdagangan PMSE ("**PPMSE**") wajib memiliki SIUPMSE.

Berdasarkan Pasal 44 Permendag No. 50/2020, PPMSE yang tidak memiliki SIUPMSE dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang mengikuti tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:

(i) peringatan tertulis dikenakan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu 14 Hari Kalender antara masing-masing peringatan.
(ii) dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.

Perizinan Berusaha Restoran Berbasis Risiko Untuk Jasa Reservasi

Kegiatan usaha jasa reservasi lainnya yang berhubungan bersangkutan dengan itu – yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI No. 79990 merupakan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha dalam KBLI No. 79990 diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha risiko rendah. Oleh karena itu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB.

Berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dikenakan secara bertahap.

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TD PSE")

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("**PP No. 71/2019**"), penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Adapun tanda pendaftaran tersebut berupa TD PSE. Dalam PP No. 71/2019, penyelenggara sistem elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu penyelenggara sistem elekstronik publik dan penyelenggara sistem elektronik privat. Dalam PP No. 71/2019, pelaku usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) huruf (b) PP No. 71/2019, pelaku usaha yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi kriteria berikut wajib memiliki TD PSE:

(i) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
(ii) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
(iii) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
(iv) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
(v) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/ atau
(vi) pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Ketentuan mengenai proses perolehan TD PSE Lingkup Privat tunduk kepada ketentuan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ("**Permenkominfo No. 5/2020**").

Pelaku usaha yang wajib namun tidak memiliki TD PSE, dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo No. 5/2020 diatur bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran TD PSE dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Berdasarkan Lampiran I.A PP No. 5/2021, di mana perizinan berusaha yang diwajibkan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI No. 62029) adalah berupa NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi.

Pelaku usaha industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha industri dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penutupan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 170 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Perizinan Berusaha Real Estat Yang Dimiliki atau Disewa

Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dalam KBLI No. 68111 diklasifikasikan sebagai usaha risiko rendah dalam Lampiran I.A PP No. 5/2021, dengan kualifikasi berada di pusat perbelanjaan dan dengan skala menengah atau besar. Berdasarkan Pasal 12 PP No. 5/2021, perizinan berusaha untuk risiko rendah adalah NIB. Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha ini digolongkan ke dalam sektor perdagangan.

Berdasarkan Pasal 77A UU Perdagangan, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha ini dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan ushaa, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan

Secara umum, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha di bidang perdagangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum empat tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Perdagangan. Namun sanksi pidana hanya dikenakan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha risiko tinggi. Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sesuai dengan Pasal 413 PP No. 5/2021 dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan berusaha dilakukan secara gradual maupun non-gradual dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan masing-masing maksimal dua kali dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja oleh Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
(ii) sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran dan penghentian sementara kegiatan usaha dikenakan sejak berakhirnya teguran tertulis kedua sampai dengan pelaku usaha memperbaiki pelanggarannya;
(iii) sanksi administratif berupa penutupan gudang dikenakan sejak berakhirnya teguran tertulis kedua sampai dengan pemilik, pengelola, atau penyewa memperbaiki pelanggaran;
(iv) sanksi administratif berupa denda dikenakan apabila, pelaku usaha tidak memperbaiki pelanggaran setelah jangka waktu 30 hari sejak penetapan sanksi penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan gudang, pelaku usaha tidak melakukan perbaikan penutupan pelanggaran denda sebesar Rp5 juta untuk setiap hari keterlambatan perbaikan pelanggaran, maksimal 30 hari sejak pengenaan denda pertama;
(v) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang tidak memperbaiki pelanggaran setelah selesai masa pengenaan denda pengenaan denda.

Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian

Berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, pelaku usaha industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif dan/atau penutupan sementara kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kerja;

(ii) sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Denda administrasi ditetapkan paling banyak 1% dari nilai investasi, dan pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya surat pengenaan denda administrasi;
(iii) sanksi administratif berupa penutupan sementara sampai dengan pelaku usaha yang bersangkutan memperoleh izin usaha apabila denda administratif yang dikenakan tidak dibayar dalam jangka waktu 30 hari kerja.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Cinema XXI tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950
Kepentingan non pengendali	169.889	194.843	198.858	232.825
JUMLAH EKUITAS	**2.652.649**	**3.956.563**	**4.117.118**	**4.702.775**

Setelah tanggal 31 Desember 2022, terdapat perubahan struktur permodalan yang diungkapkan pada bagian "Tabel ekuitas yang telah disesuaikan" di bawah ini.

Tabel ekuitas yang disesuaikan

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara aktual dan secara basis penyesuaian. Data pada kolom "Penyesuaian" yang disajikan pada tabel di bawah ini terdiri dari pembayaran dividen pada bulan Maret 2023 dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham." Tabel di bawah ini harus dibaca bersama dengan Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting," Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham," dan Bab V dalam Prospektus ini dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen," serta laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan catatan terkait yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Dengan menggunakan asumsi bahwa perubahan ekuitas Perseroan sebagai hasil dari:

1. Pembayaran dividen

Pada RUPS luar biasa Perseroan tanggal 24 Maret 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp600.000 juta dari saldo laba per tahun buku 2022. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada bulan Maret 2023.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Penerbitan sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, melalui Sistem *e-IPO*. Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* wajib didukung dengan dana yang cukup pada rekening dana nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemodal yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), sebelum dikurangi biaya Emisi.

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas konsolidasian menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	Pembayaran dividen	Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham[(1)]	Posisi ekuitas konsolidasian proforma yang telah disesuaikan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022
Modal saham	600.080	-	66.680	666.760
Tambahan modal disetor	1.830	-	2.104.474	2.106.304
Komponen ekuitas lainnya	143.296	-	-	143.296
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-		120.016
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	(600.000)	-	1.017.538
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	(600.000)	2.171.154	4.053.914
Kepentingan non pengendali	169.889	-	-	169.889
JUMLAH EKUITAS	**2.652.649**	**(600.000)**	**2.171.154**	**4.223.803**

Catatan:
(1) Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham mengacu pada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp2.171,2 miliar yang telah dikurangi dengan Biaya Emisi sebagaimana diuraikan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham."

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM Pembagian dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Cinema XXI, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan persyaratan lainnya. Perseroan dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan, dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan hukum di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, keputusan pembagian dividen dibuat berdasarkan persetujuan pemegang saham pada RUPS atas rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan yang telah ditentukan dalam RUPS, setelah dikurangi pajak, harus dialokasikan ke dalam cadangan wajib hingga jumlah dana cadangan wajib tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS, bagian tersisa dari laba bersih (setelah dikurangi dana cadangan wajib) dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen final. Perseroan akan mengadakan RUPS tahunan atau RUPS luar biasa tidak lebih dari enam bulan setelah akhir setiap tahun buku laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Keputusan, jumlah, dan pembayaran dividen tunai di masa depan, jika ada, akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain (i) laba ditahan Perseroan, kinerja operasional, arus kas, prospek bisnis di masa depan, dan kondisi keuangan, serta (ii) faktor lain yang dianggap relevan oleh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, sebelum akhir tahun buku, dividen interim dapat dibagikan dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana diatur pada Pasal 72 ayat (6) UUPT, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Rekomendasi terkait penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan pertimbangan mereka dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, rencana investasi dan peluang pertumbuhan Cinema XXI. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35% dari laba bersih Perseroan. Kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, dan Direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap saat untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh.

Apabila keputusan telah dibuat untuk melakukan pembagian dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%. Pengurangan tarif tersedia tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda yang ditandatangani oleh Indonesia dan negara mitra.

XXI

Kebijakan dividen Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai masing-masing sebesar Rp1.700.000 juta dan Rp600.000 juta kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("**UU No. 7/2021**") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("**PP No. 55/2022**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarannya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER-25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Saham Pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pemegang

saham yang merupakan individu atau entitas korporasi, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya, dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2020 dan seterusnya, dan penerapan tarif sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Porsi Penjaminan		
Keterangan	**Saham**	**Rp**	**(%)**
1. PT Indo Premier Sekuritas	1.250.250.000	337.567.500.000	15,0
2. PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia	2.917.250.000	787.657.500.000	35,0
3. PT Mandiri Sekuritas	1.250.250.000	337.567.500.000	15,0
4. PT UBS Sekuritas Indonesia	2.917.250.000	787.657.500.000	35,0
Jumlah	**8.335.000.000**	**2.250.450.000.000**	**100,0**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Juli 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) - Rp288 (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan operasional, kinerja keuangan, sejarah singkat dan informasi mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terkini Perseroan; dan
- Kinerja saham di pasar sekunder dari perusahaan-perusahaan dari industri sejenis.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*a member Firm of KPMG International*)
Wisma GKBI, lantai 33
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Nama Rekan	:	Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA.
STTD	:	STTD.AP-59/PM.22/2018.
Pedoman kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Pacific Century Place, lantai 35
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Nama Rekan	:	Iqbal Darmawan.
STTD	:	STTD.KH-213/PM.2018 tanggal 21 September 2018.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 200720.
Pedoman kerja	:	Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal**").

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H.
Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

STTD	:	No. STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10210

Izin usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke SRE pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Setiap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XVI. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 16/2023. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 dan UUPT.

1. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan Persseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; (v) real estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) aktivitas pemuturan film; (ii) aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) restoran; (ii) aktivtas konsultasi manajemen lainnya; (iii) penyewaan *venue*, penyelenggaraan aktifitas MICE dan *event* khusus

2. Ketentuan yang mengatur perubahan permodalan

Perseroan dapat mengubah struktur permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, melalui penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan BEI di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum yang berlaku, sebagaimana relevan; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di BEI, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam

jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi; (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

3. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS tahunan

RUPS tahunan adalah pertemuan pemegang saham yang dilakukan secara tahunan serta wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS tahunan, hal-hal berikut wajib disampaikan kepada dan/atau disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS:

(i) persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan, dan pesetujuan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
(ii) disampaikan laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris;
(iii) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
(iv) jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
(v) diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris
(vi) diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; dan
(vii) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

RUPS luar biasa

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. RUPS luar biasa dapat diadakan untuk tujuan membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada RUPS tahunan.

Penyelenggaraan RUPS

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perseroan dapat menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Ketentuan yang mengatur hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham

Hak dividen, termasuk batas waktunya hak dividen

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat satu hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

5. Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua orang atau lebih anggota Direksi. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa tindakan-tindakan berikut harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris: (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank); (ii) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris; (iii) membeli dan/atau melepaskan barang-barang tidak bergerak atau bergerak serta perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk transaksi mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; (iv) mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan/atau ikut serta dalam perusahaan-perusahaan lain; (v) mengadakan perjanjian sewa menyewa gedung dan ruangan-ruangan; (vi) memberikan keputusan di dalam RUPS dalam perusahaan lain di mana Perseroan menjadi pemegang saham dalam perusahaan lain tersebut; (vii) menjual saham-saham dalam perusahaan lain; dan (viii) mengikat Perseroan menjadi penjamin, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan (ii) keputusan yang diambil oleh RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

6. Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Apabila diperlukan, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

XVII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

a. secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada website www.e-ipo.co.id).

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:
   - identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("**SID**"), nomor Sub Rekening Efek ("**SRE**") dan RDN;
   - jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
   - salinan kartu identitas;
   - informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:
a. SID;
b. SRE Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam SRE atas nama pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE.

c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.

d. Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki SRE di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat kolektif saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

g. Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.

h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, mulai tanggal 27 - 31 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 27 Juli 2023	09.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua – 30 Juli 2023	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga – 31 Juli 2023	00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

A. Penjatahan pasti (*fixed allotment)*

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum sekitar 96,67% (sembilan puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.

b. Jumlah porsi penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:

   (i) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

   (i) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
   (ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
   (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penjatahan terpusat *(pooling allotment)*

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham[1]	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:
(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku paling sedikit senilai Rp75.000.006.000 (tujuh puluh lima miliar enam ribu Rupiah) atau sekitar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk penawaran umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

   Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

b. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :

(i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
(ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.

c. Dalam hal terjadi :

(i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
(ii) terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
(iii) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

d. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:

(i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
(ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
(iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
(iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
(v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

(1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

(2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
   iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

(3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

(4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya, maka uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan melalui Sistem e-IPO dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Sistem *e-IPO* di mana dana pesanan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemodal. Apabila Perseroan melakukan

pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran Umum, yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke dalam Sistem *e-IPO* yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7167
www.indopremier.com

PT J.P. Morgan Indonesia

Gedung The Energy, lantai 6
Sudirman Central Business District Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 291 8181
Fax: (021) 529 18266
www.jpmorgan.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT UBS Sekuritas Indonesia

Sequis Tower, lantai 22 Unit 22-1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Sudirman Central Business District Lot 11B
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 574 0111
Fax: (021) 2511662
www.ubs.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dan Prusahaan Anak dan aspek hukum Perseroan dan Perusahaan terkait sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang disiapkan oleh Konsultan Hukum, Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

HHP Law Firm

Pacific Century Place, Level 35
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999
www.hhp.co.id

24 Juli 2023

No. Ref. 424745552v8

Kepada Yth.
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 96A
Jakarta Pusat

U.p. : Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Darmawan, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-213/PM.2018, tanggal 21 September 2018, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 201012, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 03/NSR-HHP/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS, seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS dengan nilai nominal Rp8 (delapan rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") yang ditawarkan pada Harga Penawaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jumlah seluruh nilai PUPS ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("**ESA**") dengan mengalokasikan sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam rangka PUPS ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

B. DEFINISI

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

"**BEI**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**Grup Perseroan**" berarti secara bersama-sama, Perseroan dan Perusahaan Anak yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan.

"**Harga Penawaran**" berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada PUPS ini, yaitu sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh rupiah).

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Pengendali**" berarti, untuk keperluan LUT dan Pendapat Hukum ini, pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum yang memiliki secara langsung lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dalam hal ini adalah Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman.

"**Penjamin Emisi Efek**" berarti PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT UBS Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" berarti PT Indo Premier, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT UBS Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"**Peraturan Pencatatan BEI**" berarti Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Propsketus dan LUT.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perizinan Material**" berarti perizinan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha utama yang bersifat material terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak.

"**Perizinan Umum**" berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan anggaran dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 3 (tiga) tahun terakhir.

"**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia.

"**POJK 3/2021**" berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

"**POJK 15/2020**" berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"**POJK 17/2020**" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"**POJK 25/2017**" berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"**POJK 30/2015**" berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"**POJK 33/2014**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 34/2014**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 35/2014**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 41/2020**" berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

"**POJK 42/2020**" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"**POJK 55/2015**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"**POJK 56/2015**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**SEOJK 15/2020**" berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

"**Surat Pernyataan Perseroan**" berarti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 17 Juli 2023.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 24 Juli 2023.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

"**UU**" berarti Undang-Undang.

"**UU Ketenagakerjaan**" berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

"**UUPT**" berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

"**UU Cipta Kerja**" berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas dan merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 424745552-v7 tanggal 18 Juli 2023.

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Pengendali, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali yang rincian yang lebih lengkapnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.

2. Perseroan dan Pengendali telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan uji tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

3. Seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan tanggal pendapat hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak.

4. Dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui.

5. Dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan, Perusahaan Anak atau Pengendali untuk kepentingannya masing-masing.

6. Untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

7. Untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (a.l., persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut.

8. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali, atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia.

9. Bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

10. Dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

11. Pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan, Perusahaan Anak dan Pengendali sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia dengan nama PT Subentra Nusantara. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak

tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th'88 tanggal 16 September 1988, yang telah di daftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 6 Oktober 1992, dan Tambahan No. 4956 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan PUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 16 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 ("**Akta Perseroan No. 16/2023**").

Akta Pendirian Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

2. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendiriannya dan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0064831.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289525 tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179034.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 ("**Akta Perseroan No. 13/2022**"), struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp680.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp600.080.000.000

   Modal dasar Perseroan terbagi atas 85.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp8 per lembar saham.

3. Berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Harkatjaya Bumipersada	Rp480.000.000.000	60.000.000.000	79,99
2.	PT Adi Pratama Nusantara	Rp120.000.000.000	15.000.000.000	20
3.	Salween Investment Private Limited	Rp80.000.000	10.000.000	0,01

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		**Rp600.080.000.000**	**75.010.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**Rp79.920.000.000**	**9.990.000.000**	**-**

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Juni 2023, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman yang secara bersama-sama memiliki kewenangan untuk mengendalikan Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Mei 2023, pemegang saham Perseroan menetapkan Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman, yang merupakan kelompok yang terorganisasi (*acting in concert*), sebagai Pengendali Perseroan, sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK 3/2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0106689 tanggal 4 April 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066474.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 April 2023 yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Hans Gunadi, M.Sc
Direktur	:	Arif Suherman
Direktur	:	Tri Rudy Anitio
Direktur	:	Dody Suhartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suryo Suherman
Komisaris	:	Melia Suherman
Komisaris	:	Harris Lasmana
Komisaris	:	Sacheen Harris Lasmana
Komisaris Independen	:	Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Komisaris Independen	:	Ir. Ongki Wanadjati Dana

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

5. Perseroan:

   (a) Telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35/2015.

   (b) Telah memiliki Komite Audit dan Piagam Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK sesuai dengan POJK 55/2015.

   (c) Telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56/2015.

   (d) Telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NR**") dan Pedoman Komite NR sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 34/2014.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami, Surat Pernyataan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas pemutaran film dan aktivitas perusahaan holding dan kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah restoran, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan penyewaan venue, penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini serta telah sesuai dengan Hukum Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini secara riil dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas pemutaran film dan restoran. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

   Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor IX.J.1 dan KBLI 2020.

7. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana, seluruh dana hasil PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, akan digunakan sebagai berikut:

   (a) Sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Grup Perseroan di Indonesia ("**Belanja Modal**"). Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Grup Perseroan, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

      Grup Perseroan saat ini berencana untuk menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga lima tahun ke depan yang tersebar di kota Tier 1, kota Tier 2 dan kota Tier 3. Pada tahun 2023 dan 2024 penambahan layar akan dilakukan

di 37 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi, serta Kepulauan Riau sementara lokasi untuk tahun-tahun selanjutnya masih dalam pengkajian Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki komitmen untuk menambah layar baru di 50 lokasi dengan nilai Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp1.900.000 juta, di mana sebagian dari nilai tersebut akan didanai dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil PUPS. Sehubungan dengan rencana penambahan jumlah layar, Perseroan terutama akan menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Delta Raya Sejahtera ("**Delta Sejahtera**") dan PT Megatech Engineering ("**Megatech**"), keduanya merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, serta IMAX Corporation dan IMAX Theatres International Limted ("**IMAX Limited**") untuk peralatan bioskop dan prasarana lainnya, dan PT Prakarsa Gunawan & Son ("**PGS**") untuk pembangunan bioskop dan/atau teater baru.

(b) Sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal sebagian utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta ("**Pinjaman BRI**"). Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi Rp962.969 juta.

Per tanggal 12 Mei 2023, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari BRI berdasarkan:

(i) Surat Pengakuan Hutang Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* ("**SPH KMK *Cash Collateral***") No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022

(ii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022

(iii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022

(iv) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022

(v) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022

(vi) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022

(vii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022

(viii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022

(ix) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022

(x) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022

(xi) SPH KMK Cash Collateral No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023

masing-masing dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta untuk fasilitas butir (i) sampai dengan (x) dan Rp399.400 juta untuk fasilitas butir (xi), yang seluruhnya memiliki tingkat bunga 1,70% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling dekat pada tanggal 20 Desember 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Maret 2024. Seluruh fasilitas digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja.

Atas pembayaran lebih awal tersebut, Perseroan tidak akan dikenakan denda/penalti. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BRI sebagai kreditur.

(c) sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Grup Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk Belanja Modal, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Delta Sejahtera dan Megatech yang keduanya merupakan Afiliasi Perseroan sehingga transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib tunduk pada POJK 42/2020 setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Berdasarkan keterangan Perseroan, IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Afiliasi Perseroan sehingga transaksi dengan IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Rencana Penggunaan Dana terkait pembayaran utang bank bukanlah merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 maupun Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

8. Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil PUPS telah direalisasikan. Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 30/2015, Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

9. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh Perizinan Material dan Perizinan Umum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali NES yang belum memiliki Sertifikat Standar untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan KBLI No. 62029. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, konsekuensi tidak diperolehnya perizinan

berusaha di bidang industri dapat dikenakan peringatan tertulis, denda administratif dan/atau penutupan sementara.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya dan pelaporan berkala lainnya kepada instansi yang berwenang. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya selama 3 tahun terakhir.

10. Perseroan dan Perusahaan Anak yang relevan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material untuk kegiatan usahanya dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa.

11. Perseroan memiliki penyertaan dalam Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan berikut ini:

    (a) PT Sekar Saridana ("**SSD**") dengan penyertaan langsung sejumlah 599 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan adalah Rp599.000.000 yang merupakan 99,83% dari seluruh saham yang dikeluarkan SSD dan penyertaan tidak langsung melalui PT Intra Mandiri ("**IMD**") sejumlah 1 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp1.000.000 yang merupakan 0,17% dari seluruh saham yang dikeluarkan SSD.

    (b) IMD dengan penyertaan langsung sejumlah 4.999.999 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan adalah Rp49.999.990 yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang dikeluarkan IMD.

    (c) PT Kartika Insani Raya ("**KIR**") dengan penyertaan langsung sejumlah 119 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan adalah Rp119.000.000 yang merupakan 99,17% dari seluruh saham yang dikeluarkan KIR dan penyertaan tidak langsung melalui SSD sejumlah 1 lembar saham dengan nominal keseluruhan Rp1.000.000 yang merupakan 0,83% dari seluruh saham yang dikeluarkan KIR.

    (d) PT Lestari Mitra Sembada ("**LMS**") dengan penyertaan langsung sejumlah 480 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp480.000.000 yang merupakan 75,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan LMS.

    (e) PT Lia Anugrah Semesta ("**LAS**") dengan penyertaan langsung sejumlah 420 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp420.000.000 yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan LAS.

    (f) PT Kharisma Maju Abadi ("**KMA**") dengan penyertaan langsung sejumlah 630 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp630.000.000 yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan KMA.

    (g) PT Gading Adi Permai ("**GAP**") dengan penyertaan langsung sejumlah 700 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan adalah Rp42.000.000 yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan GAP.

(h) PT Pan Mitra Sembada ("**PMS**") dengan penyertaan langsung sejumlah 80 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp80.000.000 yang merupakan 66,67% dari seluruh saham yang dikeluarkan PMS.

(i) PT Sanggar Usaha Mandiri ("**SUM**") dengan penyertaan langsung sejumlah 80 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp80.000.000 yang merupakan 66,67% dari seluruh saham yang dikeluarkan SUM dan penyertaan tidak langsung melalui SSD sejumlah 40 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp40.000.000 yang merupakan 33,33% dari seluruh saham yang dikeluarkan SUM.

(j) PT Nusantara Elang Sejahtera ("**NES**") dengan penyertaan langsung sejumlah 600.000 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp60.000.000.000 yang merupakan 60,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan NES.

(k) PT Prima Mandala ("**PMD**") dengan penyertaan tidak langsung melalui IMD sejumlah 50 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp50.000.000 yang merupakan 50,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan PMD.

Pendirian Perusahaan Anak serta perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia. Kepemilikan saham Perseroan dalam Perusahaan Anak telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Seluruh penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Perseroan di Perusahaan Anak tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

12. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali NES yang belum memiliki peraturan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan sehubungan peraturan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran berupa denda sebesar paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.

13. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah menutup asuransi atas aset-aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh Perusahaan Anak merupakan turut tertanggung dalam asuransi yang ditutup oleh Perseroan untuk aset-aset Perusahaan Anak yang bersifat material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

14. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dalam Perjanjian Material yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan terikat dalam

Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan PUPS dan menghalangi PUPS serta Rencana Penggunaan Dana.

15. Tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya dalam Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK 25/2017.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau rencana PUPS secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

17. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam perkara hukum serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau rencana PUPS secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

18. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan LUT.

19. Sehubungan dengan pelaksanaan PUPS, Perseroan telah memperoleh:

    (a) Persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023. Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham baru sejumlah sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS.

    (b) Persetujuan prinsip pencatatan efek dari BEI berdasarkan surat No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk.

20. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani:

    (a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 45 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 43 tanggal 18 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

    (b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 46 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 48 tanggal 24 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom ("**Perjanjian Administrasi Efek**").

    (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-019/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 April 2023 antara Perseroan dan KSEI.

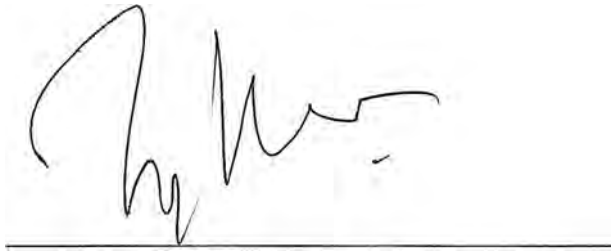
    Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Berdasarkan keterangan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan keterangan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Efek.

HHP
Law Firm.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Iqbal Darmawan, S.H.
No. STTD.KH-213/PM.2018

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta 10340, Indonesia. T. (021) 3190 1188 F. (021) 3192 3799
www.cinema21.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 DAN 2019
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini,

1. Nama : Hans Gunadi
   Alamat kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Alamat domisili : Bukit Golf Utama PA 5
   Telepon : 021 - 319 01188
   Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Tri Rudy Anitio
   Alamat kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Alamat domisili : Taman Kedoya Permai Blok B2/25
   Telepon : 021 - 319 01188
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Akuntansi

atas nama Direksi, menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya dan entitas anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung infomasi yang menyesatkan, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian;

4. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
AND SUBSIDIARIES

We, the undersigned,

1. *Name : Hans Gunadi*
   Office address : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Home address : Bukit Golf Utama PA 5
   Telephone : 021 - 319 01188
   Title : President Director

2. *Name : Tri Rudy Anitio*
   Office address : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Home address : Taman Kedoya Permai Blok B2/25
   Telephone : 021 - 319 01188
   Title : Finance and Accounting Director

on behalf of the Board of Directors, declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya and subsidiaries;*

2. *The consolidated financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and*

   b. The consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any material information or facts that would be material to the consolidated financial statements;

4. *We are responsible for the internal control.*

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 4 April 2023



Hans Gunadi	Tri Rudy Anitio
Presiden Direktur/	Direktur Keuangan dan Akuntansi/
President Director	*Finance and Accounting Director*

KPMG

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00129/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/IV/2023

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Nusantara Sejahtera Raya:

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya ("Perseroan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No.: 00129/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/IV/2023

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT Nusantara Sejahtera Raya:

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya ("the Company") and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2022, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

KPMG

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran liabilitas sewa

Lihat Catatan 2g (Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi), Catatan 3d (Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan – Sewa) dan Catatan 7 (Aset Tetap).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Group mencatat liabilitas sewa sebesar Rp 1.622.968 juta, di mana 99,33% merupakan liabilitas sewa yang berasal dari kontrak sewa untuk bioskop.

Kami mengidentifikasi pengukuran liabilitas sewa sebagai hal audit utama karena penentuan liabilitas sewa memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Penentuan suku bunga pinjaman inkremental untuk mengukur liabilitas sewa karena suku bunga implisit tidak tersedia di kontrak sewa.
- Penilaian manajemen dalam menentukan apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa.

Lebih lanjut, karena Grup memiliki kontrak sewa dalam jumlah yang banyak dan perhitungan liabilitas sewa dilakukan secara manual, maka terdapat risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Untuk merespon hal audit utama, prosedur-prosedur yang kami lakukan mencakup hal-hal berikut:

- Mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal utama yang terkait dengan pengukuran liabilitas sewa.
- Menguji kelengkapan kontrak sewa atas lokasi bioskop dengan membandingkan kontrak sewa yang mendasari pengukuran liabilitas sewa ke daftar lokasi bioskop.
- Mengevaluasi metodologi Grup dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental dan menguji sensitivitas pengukuran liabilitas sewa dengan menerapkan suatu rentang suku bunga pinjaman inkremental yang cukup memadai.
- Mengevaluasi pendekatan Grup dalam menentukan masa sewa dan opsi perpanjangan, dan membandingkannya dengan keputusan manajemen atas rencana bisnis yang telah disetujui, strategi dan praktik di masa lalu.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Measurement of lease liabilities

Refer to Note 2g (Use of judgments, estimates and assumptions), Note 3d (Summary of significant accounting policies - Leases) and Note 7 (Fixed Assets).

As of 31 December 2022, the Group recorded lease liabilities amounted to IDR 1,622,968 million in which 99.33% represented lease liabilities arising from lease contracts for cinema theaters.

We identified measurement of lease liabilities as a key audit matter because the determination of lease liabilities requires significant management judgment, including, among others:

- *Determination of incremental borrowing rate to measure lease liability because implicit interest rates were not available in the lease contracts.*
- *Management's assessment to determine whether it is reasonably certain to exercise the lease extension options.*

In addition, due to the fact that the Group has a large number of lease contracts and the calculation of lease liabilities are performed manually, there is risk of material misstatement due to unintentional error.

How our audit addressed the key audit matter

To address the key audit matter, the procedures we have performed included the following:

- *Evaluated the design and implementation of key internal controls related to the measurement of lease liabilities.*
- *Tested the completeness of lease contracts of cinema outlets by comparing the lease contracts underlying lease liability measurement to the list of cinema outlets.*
- *Evaluated the Group's methodology for developing the incremental borrowing rate and tested sensitivity of lease liability measurement by applying a reasonably possible range of incremental borrowing rate.*
- *Evaluated the Group's approach in determining lease term and extension options, and compared it against management decisions on the approved business plans, strategies and past practices.*

- Menguji keakurasian informasi yang digunakan dalam pengukuran liabilitas sewa, seperti pembayaran sewa dan periode sewa, dengan menginspeksi kontrak sewa terkait.

- Menguji keakurasian perhitungan liabilitas sewa untuk seluruh populasi kontrak sewa.

Hal Lain

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen No. 00039/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali dengan pengungkapan tambahan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

- *Tested the accuracy of information used in the measurement of lease liabilities, such as lease payments and lease periods, by inspecting the respective lease contracts.*

- *Tested the accuracy of calculation of lease liabilities for the entire population of lease contracts.*

Other Matter

Prior to the issuance of this report, we have audited and issued our independent auditors' report No. 00039/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2023 dated 1 March 2023 on the Group's consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2022. The accompanying consolidated financial statements constitute a reissuance of those consolidated financial statements with additional disclosure in connection with the Company's plan for initial public offering of its shares.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

KPMG

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan



Dra Tohana Widjaja, MBA, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0846

4 April 2023

4 April 2023

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00129R/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/IV/2023

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Nusantara Sejahtera Raya:

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya dan entitas anaknya yang terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00129R/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/IV/2023

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT Nusantara Sejahtera Raya:

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2021, 2020 and 2019, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and notes, comprising summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Siddharta Widjaja & Rekan - Registered Public Accountants, an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

License No. : 918/KM.1/2014

KPMG

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan presentasi wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Sejahtera Raya and its subsidiaries as of 31 December 2021, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen No. 00039R/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Other matter

Prior to the issuance of this report, we have audited and issued our independent auditors' report No. 00039R/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2023 dated 1 March 2023 on the consolidated financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya and its subsidiaries for the years ended 31 December 2021, 2020, and 2019.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali dengan pengungkapan tambahan sehubungan dengan rencana PT Nusantara Sejahtera Raya untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya.

The accompanying consolidated financial statements constitute a reissuance of those consolidated financial statements with additional disclosures in connection with PT Nusantara Sejahtera Raya's plan for initial public offering of its shares.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan

Susanto, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0854

4 April 2023

4 April 2023

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019/
31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December*				
		2022	2021	2020	2019	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	3a,3g,4	2,048,962	1,089,780	573,854	1,494,838	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha dan piutang lainnya	3g,5					*Trade and other receivables*
- Pihak ketiga		69,231	35,304	23,982	143,971	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	115	136	136	1,413	*Related parties -*
Persediaan	3b	96,395	58,497	67,742	80,799	*Inventories*
Uang muka dan beban dibayar di muka	6	21,411	32,123	29,076	62,064	*Advances and prepayments*
JUMLAH ASET LANCAR		2,236,114	1,215,840	694,790	1,783,085	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	3c,3d,3e,7	3,942,447	4,417,703	4,492,729	3,392,753	*Fixed assets*
Uang muka untuk pembelian aset tetap	7					*Advance payment for purchase of fixed assets*
- Pihak ketiga		83,805	104,280	206,802	133,828	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	50,750	69,000	117,000	152,750	*Related parties -*
Klaim pengembalian pajak	11a	129,456	140,540	137,832	8,273	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	3k,11g	218,815	382,815	274,305	165,579	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya	8	98,159	87,563	90,599	90,075	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		4,523,432	5,201,901	5,319,267	3,943,258	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**6,759,546**	**6,417,741**	**6,014,057**	**5,726,343**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019/
31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2022	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS						*LIABILITIES AND EQUITY*
LIABILITAS JANGKA PENDEK						*CURRENT LIABILITIES*
Utang usaha dan utang lainnya	3g,9					*Trade and other payables*
- Pihak ketiga		394,798	379,856	189,441	514,279	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	47,656	75,590	26,725	73,475	*Related parties -*
Utang pajak penghasilan	3k,11b	7,681	-	-	31,949	*Income tax payable*
Utang pajak lainnya	11c	75,649	62,461	22,025	142,776	*Other taxes payable*
Pinjaman bank	3g,10	1,697,415	-	-	-	*Bank loans*
Pendapatan diterima di muka	12	171,966	170,580	162,191	154,932	*Unearned revenue*
Liabilitas sewa	3d,7	71,119	73,011	63,101	-	*Lease liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		2,466,284	761,498	463,483	917,411	*TOTAL CURRENT LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						*NON-CURRENT LIABILITIES*
Liabilitas sewa	3d,7	1,551,849	1,604,259	1,309,711	-	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	3f,13	88,764	95,421	123,745	106,157	*Employee benefits obligation*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1,640,613	1,699,680	1,433,456	106,157	*TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES*
JUMLAH LIABILITAS		4,106,897	2,461,178	1,896,939	1,023,568	*TOTAL LIABILITIES*
EKUITAS						*EQUITY*
Modal saham	14	600,080	75,010	75,010	75,010	*Share capital*
Tambahan modal disetor		1,830	1,830	1,830	1,830	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya	16	143,296	183,712	-	-	*Other equity component*
Saldo laba						*Retained earnings*
Ditentukan penggunaanya	14	120,016	-	-	-	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		1,617,538	3,501,168	3,841,420	4,393,110	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2,482,760	3,761,720	3,918,260	4,469,950	*Equity attributable to owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali	16	169,889	194,843	198,858	232,825	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		2,652,649	3,956,563	4,117,118	4,702,775	*TOTAL EQUITY*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6,759,546	6,417,741	6,014,057	5,726,343	*TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN -TAHUN 31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 DAN 2019/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Tahun-tahun berakhir 31 Desember/*Years ended 31 December* 2022	2021	2020	2019	
Pendapatan						*Revenue*
Bioskop		2,700,828	829,548	774,411	4,449,955	*Cinema*
Makanan dan minuman		1,430,844	405,371	323,122	1,799,499	*Food and beverages*
Iklan		130,730	10,777	96,583	494,898	*Advertisement*
Digital platform		116,848	30,954	17,459	114,732	*Digital platform*
Acara dan pendapatan lainnya		21,800	3,536	7,418	30,950	*Event and other revenue*
Total pendapatan	3h,17	4,401,050	1,280,186	1,218,993	6,890,034	*Total revenue*
Beban and biaya operasi						*Operating cost and expenses*
Beban penayangan film		(1,350,414)	(414,974)	(387,205)	(2,224,953)	*Film exhibition costs*
Beban makanan dan minuman		(394,622)	(117,481)	(112,809)	(519,856)	*Food and beverage costs*
Beban penyediaan *digital platform*		(27,752)	(9,087)	(4,400)	(30,778)	*Cost of providing digital platform*
Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap	18	(1,233,901)	(425,784)	(720,112)	(1,997,380)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Beban penyusutan aset tetap	7	(668,713)	(669,459)	(648,702)	(425,365)	*Depreciation expense of fixed assets*
Lainnya		(1,510)	(229)	(713)	(2,506)	*Others*
Total beban dan biaya operasi		(3,676,912)	(1,637,014)	(1,873,941)	(5,200,838)	*Total operating cost and expenses*
Pendapatan (beban) lainnya						*Other income (expense)*
Penghasilan lainnya		8,182	3,347	70,928	30,481	*Other income*
Beban lainnya		(15,312)	(2,532)	(5,730)	(66,046)	*Other expenses*
Total pendapatan (beban) lainnya, neto		(7,130)	815	65,198	(35,565)	*Total other income (expense), net*
LABA (RUGI) USAHA		717,008	(356,013)	(589,750)	1,653,631	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Penghasilan keuangan	3j	50,338	15,188	37,718	44,333	*Finance income*
Beban keuangan	3j	(131,871)	(136,742)	(134,044)	-	*Finance costs*
BEBAN KEUANGAN NETO		(81,533)	(121,554)	(96,326)	44,333	***NET FINANCE COST***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		635,475	(477,567)	(686,076)	1,697,964	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
Manfaat (beban) pajak penghasilan	3k,11d	(130,940)	111,764	107,200	(423,530)	*Income tax benefit (expenses)*
LABA (RUGI) - DIPINDAHKAN		**504,535**	**(365,803)**	**(578,876)**	**1,274,434**	***PROFIT (LOSS) - CARRYFORWARD***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)/
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
TAHUN -TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 DAN 2019/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ *Notes*	Tahun-tahun berakhir 31 Desember/*Years ended 31 December* 2022	2021	2020	2019	
LABA (RUGI) - PINDAHAN		504,535	(365,803)	(578,876)	1,274,434	*PROFIT (LOSS) - CARRIED FORWARD*
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						*OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	3f,13	1,690	14,790	(7,632)	(4,976)	*Remeasurement of defined benefit obligation*
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	3k,11g	(372)	(3,254)	1,526	1,244	*Tax on other comprehensive income*
Penghasilan komprehensif lain, neto		1,318	11,536	(6,106)	(3,732)	*Other comprehensive income, net*
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		**505,853**	**(354,267)**	**(584,982)**	**1,270,702**	*TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)*
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:						*Profit (loss) attributable to:*
Pemilik entitas induk		460,384	(351,315)	(545,744)	1,201,312	*Owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali		44,151	(14,488)	(33,132)	73,122	*Non-controlling interest*
		504,535	**(365,803)**	**(578,876)**	**1,274,434**	
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:						*Total comprehensive income (loss) attributable to:*
Pemilik entitas induk		461,456	(340,252)	(551,690)	1,197,676	*Owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali		44,397	(14,015)	(33,292)	73,026	*Non-controlling interest*
		505,853	**(354,267)**	**(584,982)**	**1,270,702**	
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	3m,20	6.14	(4.68)	(7.28)	16.02	*Earnings (losses) per share, basic and dilutive (in full amount)*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019/
31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Ditentukan penggunaanya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		75,010	1,830	-	-	3,195,434	3,272,274	240,366	3,512,640	*Balance as of 31 December 2018*
Penghasilan komprehensif - 2019:										*Comprehensive income - 2019:*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	1,201,312	1,201,312	73,122	1,274,434	*Profit during the year*
Penghasilan komprehensif lain, bersih		-	-	-	-	(3,636)	(3,636)	(96)	(3,732)	*Other comprehensive income, net of tax*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	16	-	-	-	-	-	-	(80,575)	(80,575)	*Dividend paid to non-controlling interest*
Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan nonpengendali tanpa perubahan kendali	16	-	-	-	-	-	-	8	8	*Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		75,010	1,830	-	-	4,393,110	4,469,950	232,825	4,702,775	*Balance as of 31 December 2019*
Penghasilan komprehensif - 2020:										*Comprehensive income - 2020:*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	(545,744)	(545,744)	(33,132)	(578,876)	*Loss during the year*
Penghasilan komprehensif lain, bersih		-	-	-	-	(5,946)	(5,946)	(160)	(6,106)	*Other comprehensive income, net of tax*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	16	-	-	-	-	-	-	(675)	(675)	*Dividend paid to non-controlling interest*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		75,010	1,830	-	-	3,841,420	3,918,260	198,858	4,117,118	*Balance as of 31 December 2020*
Penghasilan komprehensif - 2021:										*Comprehensive income - 2021:*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	(351,315)	(351,315)	(14,488)	(365,803)	*Loss during the year*
Penghasilan komprehensif lain bersih		-	-	-	-	11,063	11,063	473	11,536	*Other comprehensive income, net of tax*
Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan nonpengendali tanpa perubahan kendali	2f,16	-	-	183,712	-	-	183,712	10,000	193,712	*Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		75,010	1,830	183,712	-	3,501,168	3,761,720	194,843	3,956,563	*Balance as of 31 December 2021*
Penghasilan komprehensif - 2022:										*Comprehensive income - 2022:*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	460,384	460,384	44,151	504,535	*Profit during the year*
Penghasilan komprehensif lain bersih		-	-	-	-	1,072	1,072	246	1,318	*Other comprehensive income, net of tax*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	16	-	-	-	-	-	-	(69,351)	(69,351)	*Dividend paid to non-controlling interest*
Pembagian dividen – Dividen kas	15	-	-	-	-	(1,700,000)	(1,700,000)	-	(1,700,000)	*Dividend distribution – Cash dividend*
Pembagian dividen – Dividen saham	14,15	525,070	-	-	-	(525,070)	-	-	-	*Dividend distribution – Stock dividend*
Saldo laba yang dicadangkan	14	-	-	-	120,016	(120,016)	-	-	-	*Appropriated retained earnings*
Efek pajak atas komponen ekuitas lainnya		-	-	(40,416)	-	-	(40,416)	-	(40,416)	*Tax effect on other equity component*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		600,080	1,830	143,296	120,016	1,617,538	2,482,760	169,889	2,652,649	*Balance as of 31 December 2022*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA AND SUBSIDIARIES

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
TAHUN -TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022, 2021, 2020 DAN 2019/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022, 2021, 2020 AND 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*				
		2022	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		4,366,063	1,280,600	1,418,446	6,994,756	*Cash received from customers*
Penerimaan dari pendapatan bunga		26,561	15,188	31,416	44,333	*Cash received from interest income*
Pembayaran kas kepada:						*Cash payment to:*
Pemasok		(2,657,150)	(689,627)	(1,370,759)	(4,199,649)	*Suppliers*
Karyawan		(431,708)	(184,517)	(360,168)	(659,287)	*Employees*
Pembayaran pajak penghasilan		(46)	(2,707)	(178,412)	(513,614)	*Payment of income tax*
Pembayaran bunga		-	-	-	-	*Payment for interest*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		1,303,720	418,937	(459,477)	1,666,539	***Net cash flows from (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan atas penjualan saham entitas anak	16	-	193,712	-	8	*Proceeds from sale of subsidiary's shares*
Perolehan aset tetap		(100,084)	(80,162)	(404,198)	(1,376,265)	*Acquisition of fixed assets*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(100,084)	113,550	(404,198)	(1,376,257)	***Net cash flows from (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman bank	10	1,697,415	-	-	-	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	7	(172,518)	(16,561)	(56,634)	-	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen tunai	15, 16	(1,769,351)	-	(675)	(98,325)	*Cash dividends paid*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(244,454)	(16,561)	(57,309)	(98,325)	***Net cash flows used in financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		959,182	515,926	(920,984)	191,957	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1,089,780	573,854	1,494,838	1,302,881	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	**2,048,962**	**1,089,780**	**573,854**	**1,494,838**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM / *1. GENERAL*

a. Pendirian dan Informasi Utama

PT Nusantara Sejahtera Raya ("Perseroan"), suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan pada tanggal 7 Juni 1988 dengan akta pendirian No. 67 oleh Benny Kristianto, S.H., yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No. C2.8731.HT.01.01-TH88 tertanggal 16 September 1988. Akta pendirian di daftarkan dengan Pendaftaran Perusahaan No. 109/1988 tertanggal 20 September 1988 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4956 pada Berita Negara No. 80, tanggal 6 Oktober 1992.

Perubahan terakhir dilakukan dengan akta notaris Aulia Taufani, SH. No. 13, tanggal 8 September 2022 mengenai, antara lain, perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp 100 (dalam nilai Rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp 8 (dalam nilai Rupiah penuh) per lembar saham, peningkatan modal dasar menjadi Rp 680.000.000.000 (dalam nilai Rupiah penuh), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 600.080.000.000 (dalam nilai Rupiah penuh). Perubahan tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0064831.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 9 September 2022 dan telah dilakukan penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289525 tertanggal 9 September 2022.

Berdasarkan anggaran dasar, Perseroan bergerak dalam industri pemutaran film dan restoran. Perseroan mulai beroperasi komersial sejak 1989.

Perseroan berkantor pusat di Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta. Perseroan memiliki dan mengoperasikan jaringan bioskop dengan merek dagang 21 dan XXI yang tersebar di seluruh Indonesia.

b. Entitas Anak

Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:

a. Establishment and General Information

PT Nusantara Sejahtera Raya (the "Company") an Indonesian domiciled company, established on 7 June 1988 by deed of establishment No. 67, drawn up by Benny Kristianto, S.H., which was approved by the Minister of Justice under decree No. C2.8731.HT.01.01-TH88 dated 16 September 1988. The deed of establishment was registered with Company Registration No. 109/1988 dated 20 September 1988 and published in Supplement No. 4956 to State Gazette No. 80, dated 6 October 1992.

The latest amendment was effected by deed of notary public Aulia Taufani, SH. No. 13, dated 8 September 2022, concerning, among others, the change of par value per share from Rp 100 (in full Rupiah amount) per share to Rp 8 (in full Rupiah amount) per share, increase of authorized capital to Rp 680,000,000,000 (in full Rupiah amount) and the increase of issued and paid up capital to Rp 600,080,000,000 (in full Rupiah amount). The amendment was approved by Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-0064831.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 9 September 2022 and has been received by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0289525 dated 9 September 2022.

Based on the article of association, the Company is engaged in movie screening industry and restaurant. The Company commenced its commercial operations in 1989.

The Company's head office is located at Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta. The Company owns and operates cinemas network with trademark 21 and XXI located throughout Indonesia.

b. Subsidiaries

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Nama entitas anak / *Name of subsidiaries*	Kegiatan bisnis/ *Business activity*	Lokasi/ *Location*	Tahun mulai beroperasi komersial/ *Year of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/*December* 2022	2021	2020	2019	Total Aset sebelum eliminasi/ *Total Assets before elimination* 31 Desember/*December* 2022	2021	2020	2019
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*											
PT Lestari Mitra Sembada (LMS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	2006	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	613,665	685,225	712,473	684,369
PT Lia Anugrah Semesta (LAS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1990	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	119,967	143,756	137,774	126,811
PT Intra Mandiri (IM)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1992	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94,399	139,316	167,359	130,796

1. UMUM (Lanjutan) / *1. GENERAL (Continued)*

b. Entitas Anak (Lanjutan)

Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut (Lanjutan):

b. Subsidiaries (Continued)

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries (Continued):

Nama entitas anak / *Name of subsidiaries*	Kegiatan bisnis/ *Business activity*	Lokasi/ *Location*	Tahun mulai beroperasi komersial/ *Year of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/*December* 2022	2021	2020	2019	Total Aset sebelum eliminasi/ *Total Assets before elimination* 31 Desember/*December* 2022	2021	2020	2019
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*											
PT Pan Mitra Sembada (PMS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	61,916	97,035	84,386	81,596
PT Kharisma Maju Abadi (KMA)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1990	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	90,263	109,162	102,153	103,260
PT Kartika Insani Raya (KIR)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	23,098	51,182	49,008	57,416
PT Sekar Saridana (SSD)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	2002	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	51,888	73,289	69,488	55,492
PT Gading Adi Permai (GAP)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	14,264	15,808	14,918	7,305
PT Nusantara Elang Sejahtera (NES)	Penyediaan *platform* tiket online / *Provide online ticketing platform*	Jakarta, Indonesia	2017	60.00%	60.00%	70.00%	70.00%	99,663	54,102	22,832	73,727
PT Sanggar Usaha Mandiri (SUM)	Penyewaan tanah/ *Land leasing*	Jakarta, Indonesia	1989	100.00%	100.00%	100.00%	67.00%	20,626	21,126	19,344	18,499
Kepemilikan tidak langsung melalui/*Indirect ownership through PT Intra Mandiri*											
PT Prima Mandala (PM)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Malang, Indonesia	1989	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5,141	5,650	5,635	8,443

Perseroan dan entitas anaknya secara kolektif disebut sebagai Grup.

The Company and its subsidiaries are collectively referred to as the Group.

1. UMUM (Lanjutan) / 1. GENERAL (Continued)

c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah seluruh komisaris, direksi dan manajemen senior yang membawahi departemen.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

c. Boards of Commissioners, Directors and employees

Key management includes all commissioners, directors and senior management in charge of department.

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019 the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2022	2021	2020	2019	
Dewan Komisaris					*Board of Commissioners*
Presiden Komisaris	Suryo Suherman	Suryo Suherman	Suryo Suherman	Suryo Suherman	*President Commissioner*
Komisaris	Melia Suherman	Melia Suherman	Melia Suherman	Melia Suherman	*Commissioner*
Komisaris	Harris Lasmana	Harris Lasmana	Harris Lasmana	Harris Lasmana	*Commissioner*
Komisaris	Sacheen Harris Lasmana	Sacheen Harris Lasmana	Sacheen Harris Lasmana	Sacheen Harris Lasmana	*Commissioner*
Komisaris	Wong Weihan	Wong Weihan	Lau Eng Boon	Lau Eng Boon	*Commissioner*
Komisaris	Dominic Soon Keng Yew	Dominic Soon Keng Yew	Amit Kunal	Amit Kunal	*Commissioner*
Direksi					*Board of Directors*
Presiden Direktur	Hans Gunadi	Hans Gunadi	Hans Gunadi	Hans Gunadi	*President Director*
Direktur	Arif Suherman	Arif Suherman	Arif Suherman	Arif Suherman	*Director*
Direktur	Tri Rudy Anitio	Tri Rudy Anitio	Tri Rudy Anitio	Tri Rudy Anitio	*Director*

Jumlah karyawan tetap Grup adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The Group's permanent employees were as follows (unaudited):

	31 Desember/ *December*				
	2022	2021	2020	2019	
Jumlah karyawan tetap	1,361	1,355	1,484	1,563	*Number of permanent employees*

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / 2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed and Public Companies.

b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 4 April 2023.

b. The Company's Board of Directors approved the consolidated financial statements for issuance on 4 April 2023.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali dinyatakan lain, serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, dibulatkan ke dalam jutaan terdekat, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

f. Dasar konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan milik Perseroan dan entitas anak di mana Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan entitas anak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan mengendalikan entitas ketika Perseroan terekpos dengan, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan Perseroan di entitas.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasi sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

c. Basis of measurement

The consolidated financial statements have been prepared on the basis of historical cost, unless otherwise specified, and also using the accruals basis, except in the consolidated statements of cash flows.

d. Statement of cash flows

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classification of cash flows into operating, investing, and financing activities.

e. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, rounded to the nearest million, which is the Group's functional currency.

f. Basis of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries in which the Company has the ability to control the subsidiaries, both directly or indirectly.

Subsidiaries are entities controlled by the Company. The Company controls an entity when it is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is obtained by the Company, and are no longer consolidated from the date such control ceases.

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries are identified at the date of business combination and afterwards are adjusted by proportion of changes in equity of subsidiaries and presented as a part of equity in the consolidated statement of financial position.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

f. Dasar konsolidasi (Lanjutan)

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) dan atas jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari jumlah laba (rugi) konsolidasian dan penghasilan (kerugian) komprehensif konsolidasian yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian untuk bagian dari tahun di mana pengendalian masih berlangsung.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup dalam semua hal yang material, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara entitas-entitas yang dikonsolidasikan telah dieliminasi, termasuk keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar entitas yang belum direalisasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

g. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari nilai-nilai estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkesinambungan. Perubahan terhadap estimasi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang dapat mengakibatkan penyesuaian material pada tahun berikutnya termasuk di dalam Catatan 3c, 3d dan 7 – taksiran masa manfaat aset tetap dan periode sewa serta Catatan 3f dan 13 – pengukuran kewajiban imbalan kerja: asumsi aktuaria.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

f. Basis of consolidation (Continued)

Non-controlling interests in profit (loss) and in total comprehensive income (loss) of subsidiaries is identified at its portion and presented as a part of total attributable consolidated profit (loss) and consolidated comprehensive income (loss) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Where control of an entity is obtained during a financial period, its results are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the consolidated financial statements for the part of the year during which control existed.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group in all material respects, unless otherwise stated.

All material transactions and balances between consolidated entities have been eliminated, including unrealized gains and losses arising from intercompany transactions.

Changes in the Company's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in profit or loss.

g. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of the consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from those estimated amounts.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognised prospectively.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in a material adjustment within the following year is included in Notes 3c, 3d and 7 – estimated useful life of fixed assets and lease period and Notes 3f and 13 – measurement of employee benefits obligation: actuarial assumptions.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

h. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amendemen dan penyesuaian tahunan standar yang telah efektif sejak 1 Januari 2022 dan yang akan efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2023 dinilai tidak berlaku untuk atau diperkirakan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Amendments and annual improvements to the standard that have been effective since 1 January 2022 and those that will be effective for annual periods beginning on 1 January 2023 are assessed as either not applicable or are not expected to have material impacts to the Group's consolidated financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi signifikan dibawah ini telah diterapkan untuk semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali yang dijelaskan pada Catatan 3d, 3g dan 3h.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang terhitung sejak ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

b. Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya persediaan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah; biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang dan mencakup pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta biaya lain untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

c. Aset tetap

Aset tetap (termasuk aset hak-guna, lihat Catatan 3d), diukur dengan model biaya, yaitu pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya diukur pada nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Pengembangan prasarana	10 – 20 tahun/*years*	*Leasehold improvements*
Aset hak-guna	10 – 20 tahun/*years*	*Right-of-use assets*
Peralatan studio dan kantor	5 – 10 tahun/*years*	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	8 tahun/*years*	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	5 tahun/*years*	*Vehicles*

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies set out below have been applied to all periods presented in these consolidated financial statements, except as explained in Notes 3d, 3g and 3h.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks, and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

b. Inventory

Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value; cost is determined using the weighted average method and includes expenditures incurred in acquiring the inventories and other costs incurred in bringing them to their present condition and location.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary cost of business less the estimated costs necessary to make the sale.

c. Fixed assets

Fixed assets (including right-of-use assets, see Note 3d) are measured using the cost model, i.e. initially measured at cost and subsequently are carried net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation is computed starting from the month such assets are ready for their intended use, using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Aset tetap (Lanjutan)

Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir tahun pelaporan keuangan, dan jika diperlukan akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi.

Jika nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai aset dibebankan pada laba rugi tahun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan.

d. Sewa

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

- Kontrak melibatkan penggunaan secara substansial semua kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik dapat dibedakan (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit di dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset; yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan untuk tujuan penggunaan aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. *Fixed assets (Continued)*

The residual value and the useful life of an asset are reviewed at least at each financial year end, and if required, they will be adjusted and applied in accordance with the prevailing accounting standards.

Normal maintenance expenses are charged to the profit or loss when incurred, while betterments, renovations, expansion, etc, that increase the useful lives or capacity of fixed assets are capitalized.

When the carrying amount of fixed assets is higher than its estimated recoverable amount, the carrying amount of fixed assets shall be reduced to its recoverable amount and the impairment losses are charged to profit or loss for the year.

The gains or losses from fixed assets, which are no longer utilized or sold, are removed from fixed assets and recorded in the current year profit or loss.

d. *Leases*

Policy applicable from 1 January 2020

At inception of a contract, the Group determines if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. A contract conveys the right to control the use of an identified asset, if all of the following conditions are met:

- *The contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset i.e. it has decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal pemulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Estimasi umur manfaat aset hak-guna ditentukan dengan menggunakan basis yang sama untuk aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Pembayaran minimum yang harus dibayarkan untuk kontrak sewa dengan skema bagi hasil pendapatan;

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

d. *Leases (Continued)*

Policy applicable from 1 January 2020 (Continued)

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of fixed assets. In addition, the right-of-use assets are periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, it can be using the Group's incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on the index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Minimum required payment from lease contracts with revenue sharing arrangements;*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi (Lanjutan):

- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali jika Grup cukup yakin untuk tidak mengakhirinya lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Aset hak-guna Grup disajikan sebagai "Aset tetap" dan liabilitas sewa disajikan sebagai "Liabilitas sewa" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa bagi hasil pendapatan yang tidak terdapat pembayaran minimum yang harus dibayarkan.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah seperti peralatan kantor. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Leases (Continued)

Policy applicable from 1 January 2020 (Continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following (Continued):

- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Group reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Group reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Group reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a changes in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is measured this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented as "Lease liabilities" in the consolidated statement of financial position.

The Group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for lease contracts with revenue sharing arrangement which have no minimum payment requirement.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets such as office equipment. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sewa dimana Grup mengambil alih secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset yang diperoleh diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, aset sewa diukur pada jumlah yang sama dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, aset sewa dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk aset tersebut. Jika tidak terdapat cukup kepastian bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan dari masa manfaatnya.

Pengaturan sewa di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dialihkan kepada Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, di mana pembayaran sewa diakui sebagai beban selama masa sewa, dan aset pendasar tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup.

e. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Grup ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Leases (Continued)

Policy that was applicable before 1 January 2020

Leases in which the Group assume substantially all the risks and rewards of ownership of the assets acquired are classified as finance leases. Upon initial recognition, the leased asset is measured at an amount equal to the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments. Subsequent to initial recognition, the leased asset is accounted for in accordance with the accounting policy applicable to that asset. If there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

Leasing arrangements in which risks and rewards of ownership are not conveyed to the Group are classified as operating leases and treated as an executory contract, wherein lease payments are recognized as expense over the lease term, and the underlying assets are not recognized in the Group's consolidated statement of financial position.

e. Impairment of non-financial asset

The carrying amounts of the Group's non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs of disposal. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Imbalan kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain.

Ketika manfaat program berubah atau ketika suatu kurtailmen atas program terjadi, dampak perubahan manfaat tersebut yang terkait dengan jasa masa lalu atau keuntungan/kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

g. Instrumen keuangan

(i) Aset keuangan

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2020

Pada pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan sebagai yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal kecuali jika Grup mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan di mana semua aset keuangan yang terkena dampak direklasifikasi pada hari pertama periode pelaporan setelah perubahan model bisnis.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, dan dana jaminan (bagian dari aset tidak lancar lainnya). Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga, keuntungan dan kerugian selisih kurs dan kerugian nilai diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian penurunan penghentian pengakuan diakui dalam laba atau rugi.

Kebijakan yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, dan dana jaminan (bagian dari aset tidak lancar lainnya) yang dikategorikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Employee benefits

The obligation for post-employment benefits is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected-unit-credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

g. Financial instruments

(i) Financial assets

Policy that was applicable from 1 January 2020

At initial recognition, a financial asset is classified as measured at amortized cost; fair value through other comprehensive income (FVOCI) or fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Group changes its business model for managing financial assets in which case all affected financial assets are reclassified on the first day of the first reporting period following the change in the business model.

The financial assets that are measured at amortized cost are cash and cash equivalent, trade and other receivables, and refundable deposits (part of other non-current assets). These financial assets are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortized cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment loss are recognized in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is recognized in profit or loss.

Policy that was applicable before 1 January 2020

The Group's financial assets comprise cash and cash equivalents, trade and other receivables, and refundable deposits (part of other non-current assets) which are categorized as "Loans and receivables".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(i) Aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan non-derivatif ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan atas rugi penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendiskontokan jumlah aset menggunakan suku bunga efektif, kecuali efek diskonto tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai neto tercatat, pada pengakuan awal. Efek bunga pada penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada FVTPL jika dimiliki untuk diperdagangkan, derivatif, atau ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal.

Utang usaha dan utang lainnya, dan pinjaman bank pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Beban bunga serta keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan juga diakui dalam laba rugi.

(iii) Penghentian pengakuan

Aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau ketika Grup mengalihkan seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Grup secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

(i) Financial assets (Continued)

Policy that was applicable before 1 January 2020 (Continued)

Financial assets that are categorized as loans and receivables are initially measured at fair value, plus any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these non-derivative financial assets are measured at amortized cost, net of provision for impairment, if necessary. Amortized cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

(ii) Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either measured at amortized cost, or FVTPL. A financial liability is classified as FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative, or it is designated as such on initial recognition.

Trade and other payables, and bank loans are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is also recognized in profit or loss.

(iii) Derecognition

Financial assets

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial asset that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Aset keuangan (Lanjutan)

Dalam transaksi di mana aset keuangan dialihkan tetapi risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan tetap dipertahankan, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya.

Liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika kewajiban kontraktualnya dilepaskan, dibatalkan, atau dihapuskan. Grup juga menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika persyaratannya dimodifikasi dan arus kas dari liabilitas yang dimodifikasi berbeda secara substansial, dalam hal ini liabilitas keuangan baru, berdasarkan persyaratan yang diubah, diakui pada nilai wajar.

Pada penghentian pengakuan liabilitas keuangan, perbedaan antara nilai tercatat yang dihentikan dan imbalan yang dibayarkan (termasuk aset non-tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih) diakui dalam laba rugi.

(iv) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan bermaksud untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

(v) Penurunan nilai

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. *Financial instruments (Continued)*

(iii) Derecognition (Continued)

Financial assets (Continued)

In transactions where a financial asset is transferred but the risks and rewards associated with ownership are somehow retained, the transferred asset is not derecognized.

Financial liabilities

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled, or otherwise extinguished. The Group also derecognizes a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability, based on the modified terms, is recognized at fair value.

On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognized in profit or loss.

(iv) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(v) Impairment

Policy that was applicable from 1 January 2020

The Group recognizes loss allowances for expected credit loss (ECL) on financial assets measured at amortized cost.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(v) Penurunan nilai (Lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pengukuran KKE

KKE adalah estimasi probabilitas-tertimbang atas kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai kini dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang terutang kepada Grup berdasarkan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima Grup). KKE didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Penyajian penyisihan KKE dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah bruto aset tersebut.

Grup mengukur penyisihan kerugian dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya, kecuali untuk saldo bank di mana risiko kredit (yaitu risiko gagal bayar yang terjadi selama umur ekpektasian instrumen keuangan) tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, yaitu diukur sebagai KKE 12 bulan.

Penyisihan kerugian untuk piutang usaha dan piutang lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selalu diukur pada jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Penyisihan penurunan nilai diakui untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang bila terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak akan mampu memulihkan nilai tercatat sesuai dengan ketentuan awal dari instrumen tersebut. Jumlah kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Perubahan pada penyisihan penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

g. *Financial instruments (Continued)*

(v) Impairment (Continued)

Policy applicable from 1 January 2020 (Cotinued)

Measurement of ECLs

ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The Group measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for bank balances for which credit risk (i.e. the risk of default occurring over the expected life of the financial instrument) has not increased significantly since initial recognition, which are measured as 12-month ECL.

Loss allowances for trade and other receivables measured at amortized cost are always measured at an amount equal to lifetime ECL.

Policy applicable before 1 January 2020

An impairment provision is recognized for financial assets that were categorized as loans and receivables when there is objective evidence that the Group would not be able to recover the carrying amounts according to the original terms of the instrument. The amount of the impairment loss is the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of its estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Changes in the impairment provision are recognized in profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

h. Pengakuan pendapatan

Pendapatan diukur sebesar imbalan yang ditetapkan dalam kontrak dengan pelanggan. Grup memperoleh pendapatan terutama dari penjualan tiket bioskop, makanan dan minuman, menyewakan tempat untuk acara, dan penayangan iklan.

Tabel berikut memberikan informasi tentang sifat dan waktu pemenuhan pelaksanaan kewajiban dalam kontrak dengan pelanggan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan, dan kebijakan pengakuan pendapatan terkait.

h. Revenue recognition

Revenue is measured based on the consideration specified in a contract with a customer. The Group derives its revenues principally from sale of cinema ticket, food and beverages, premises rental for events, and advertisement.

The following table provides information about the nature and timing of the satisfaction of performance obligations in contracts with customers, including significant payment terms, and the related revenue recognition policies.

Sifat dan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan/ *Nature and timing of satisfaction of performance obligations, including significant payment terms*	**Pengakuan pendapatan sejak 1 Januari 2020/***Revenue recognition from 1 January 2020*	**Pengakuan pendapatan sebelum 1 Januari 2020/***Revenue recognition before 1 January 2020*
Untuk penjualan tiket bioskop, Grup memenuhi kewajibannya pada saat tiket dicetak. Pembayaran dari pelanggan diterima pada saat tiket dicetak/*For sale of cinema ticket, the Group fulfills its obligation when ticket is printed at cinema. Payment from customers is received upon the print of cinema ticket.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat tiket dicetak di bioskop/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when the ticket is printed at cinema.*	Pendapatan diakui pada saat tiket dicetak di bioskop/*Revenue is recognized when the ticket is printed at cinema.*
Untuk makanan dan minuman, Grup memenuhi kewajibannya pada saat makanan dan minuman diserahkan kepada pelanggan bersamaan dengan pembayaran dari pelanggan (*point of sale*)/*For sale of foods and beverages, the Group fulfills its obligation when foods and beverages are handed over to customers upon the receipt of payment from customers (point of sale).*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat makanan dan minuman diserahkan kepada pelanggan/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when foods and beverages are handed over to customers.*	Pendapatan diakui pada *point of sale*/*Revenue is recognized at point of sale.*
Untuk *digital platform*, Grup memenuhi kewajibannya pada saat pelanggan melakukan pembelian tiket bioskop atau makanan dan minuman pada *website* atau aplikasi daring Grup/*For digital platform, the Group fulfills its obligation when customers make payment for purchase of movie ticket or food and beverages in the Group's website or online application.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat pelanggan melakukan pembayaran di *website* atau aplikasi daring/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when customers make payment in the Group's website or online application.*	Pendapatan diakui pada saat pelanggan melakukan pembayaran di *website* atau aplikasi daring/*Revenue is recognized when customers make payment in the Group's website or online application.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

h. Pengakuan pendapatan (Lanjutan)

h. *Revenue recognition (Continued)*

Sifat dan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan/ *Nature and timing of satisfaction of performance obligations, including significant payment terms*	Pengakuan pendapatan sejak 1 Januari 2020/*Revenue recognition from 1 January 2020*	Pengakuan pendapatan sebelum 1 Januari 2020/*Revenue recognition before 1 January 2020*
Untuk pendapatan sewa tempat acara, Grup memenuhi kewajibannya pada saat acara diadakan. Pembayaran dari pelanggan diterima sebelum acara diadakan/*For revenue from premises rental for events, the Group fulfills its obligation when the event is held. Payment from customers is received before the event is held.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat acara diadakan/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when the event is held.*	Pendapatan diakui pada saat pada saat acara diadakan/*Revenue is recognized when the event is held.*
Untuk pendapatan iklan, Grup memenuhi kewajibannya sepanjang masa kontrak penayangan iklan/*For advertisement revenue, the Group fulfills its obligation over the duration of contract for advertisement viewing.*	Pendapatan diakui sepanjang waktu, yaitu selama masa kontrak penayangan iklan/*Revenue is recognized over time, i.e. over the duration of contract for advertisement viewing.*	Pendapatan diakui secara proporsional sepanjang masa kontrak iklan/*Revenue is recognized proportionately over the duration of advertisement contract.*

Tidak ada pelaksanaan kewajiban material yang belum dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019.

There were no unsatisfied material performance obligations as of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019.

i. Transaksi mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang fungsional Grup (Rupiah) dengan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter berdenominasi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian kurs atas aset dan liabilitas moneter terdiri dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata uang fungsional pada awal periode, disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata uang asing yang dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing yang diukur pada nilai historis dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs dari penjabaran aset dan liabilitas moneter yang berasal dari aktivitas operasi pada umumnya diakui pada laba rugi.

i. Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are translated to the Group's functional currency (Rupiah) at the rates of exchange prevailing at transaction date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated to the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Foreign currency gains or losses on monetary items are comprised of the difference between amortized cost measured in the functional currency at the beginning of the period as adjusted for effective interest and payments during the period, and the amortized cost measured in foreign currency translated at the exchange rate at reporting date.

Non-monetary assets and liabilities denominated in a foreign currency that are measured at historical cost are translated using the exchange rate at the date of the transaction.

Foreign currency gains and losses on retranslation of monetary assets and liabilities that arise from operating activities are generally recognized in profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Penghasilan dan biaya keuangan

Penghasilan keuangan terdiri dari penghasilan bunga atas dana yang ditempatkan pada bank. Laba dan rugi kurs dilaporkan secara neto baik sebagai pendapatan atau beban keuangan bergantung pada apakah jumlah pergerakan kurs berada pada laba atau rugi neto. Beban keuangan terdiri dari beban bunga pinjaman.

k. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah atas pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik dari jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat direalisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Finance income and finance costs

Finance income comprises interest income on funds placed in the banks. Foreign exchange gains and losses are reported on a net basis as either finance income or finance costs depending on whether foreign currency movements amount to a net gain or net loss. Finance costs comprise interes expenses on borrowings.

k. Income taxes

Income tax expenses consist of current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for difference arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGIFIKAN (Lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dikaji ulang pada tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa mendatang akan tersedia untuk digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda dengan cara yang sama seperti penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

l. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait atas transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Grup adalah Direksi Perseroan.

m. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan dalam tahun yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perseroan, yaitu opsi saham.

Ketika opsi dieksekusi, Perseroan menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham tresurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Income taxes (Continued)

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

l. Operating segment

Operating segment is a component of Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components, whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operation decision maker. Chief operating decision maker of the Group is the Company's Board of Directors.

m. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company by the weighted average of total outstanding/issued shares during the year.

Diluted earnings per share are calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Company, which is stock option.

When the options are exercised, the Company issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGIFIKAN (Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

n. Transactions with related parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7, "Related Party Disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUVALENTS

	2022	2021	2020	2019	
Kas	35,363	17,647	12,946	48,004	*Cash on hand*
Kas di bank					*Cash in banks*
Pihak ketiga:					*Third parties:*
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	485,660	296,657	68,569	430,340	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	127,682	97,288	14,178	140,460	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78,996	81,749	11,590	86,214	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	131,687	20,626	8,668	149,580	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	105,104	7,900	4,419	12,762	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,280	7,632	2,965	29,127	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	1,504	5,607	5,010	10,220	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	735	1,136	837	3,353	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	85	298	494	3,708	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	278	279	3,683	21,961	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Mega Tbk	14	-	-	-	*PT Bank Mega Tbk*
	947,025	519,172	120,413	887,725	

	2022	2021	2020	2019	
Dolar Amerika Serikat					*US Dollar*
PT Bank Shinhan Indonesia	711	-	-	-	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	1,614	49,940	-	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	32	112	127	86	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10	10	11	12	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	2,367	50,062	138	98	
Jumlah kas di bank	949,392	569,234	120,551	887,823	*Total cash in banks*

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUVALENT (Continued)*

	2022	2021	2020	2019	
Deposito berjangka					*Time deposits*
Pihak ketiga:					*Third parties:*
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Shinhan Indonesia	500,000	316,000	169,000	-	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank Permata Tbk	-	19,000	19,000	17,000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	200,073	16,381	42,103	309,878	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	220	5,780	10,080	14,418	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,119	3,048	56,177	59,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	147,000	-	-	-	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	20,997	86,515	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	-	-	70,000	63,200	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	-	53,000	-	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	-	-	5,000	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	4,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	853,412	360,209	440,357	559,011	
Dolar Amerika Serikat					*US Dollar*
PT Bank Shinhan Indonesia	210,795	142,690	-	-	*PT Bank Shinhan Indonesia*
Jumlah deposito berjangka	1,064,207	502,899	440,357	559,011	*Total time deposits*
Kas dan setara kas	2,048,962	1,089,780	573,854	1,494,838	*Cash and cash equivalents*

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The contractual interest rates on time deposits during the year were as follows:

	2022	2021	2020	2019	
Rupiah	1.9% - 5.55%	2% - 6.5%	4.25% - 8%	4.25% - 8.25%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.21%- 1.15%	0.4%	-	-	*US Dollar*

5. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAINNYA / *5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES*

	2022	2021	2020	2019	
Piutang usaha:					*Trade receivables:*
Pihak ketiga	64,201	18,817	5,060	129,253	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 19)					*Related party (Note 19)*
PT Megatech Engineering	115	7	7	1,254	*PT Megatech Engineering*
	64,316	18,824	5,067	130,507	
Piutang lainnya:					*Other receivables:*
Pihak ketiga	5,030	16,487	18,922	14,718	*Third parties*
Pemegang saham (Catatan 19)	-	129	129	159	*Shareholder (Note 19)*
	5,030	16,616	19,051	14,877	
	69,346	35,440	24,118	145,384	

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha dari pihak ketiga sebagian besar terdiri piutang dari iklan yang sudah ditayangkan di bioskop.

As of 31 December 2022, trade receivables from third parties mainly consist of outstanding receivable from advertisement showed in the cinema.

5. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAINNYA (Lanjutan) / 5. *TRADE AND OTHER RECEIVABLES (Continued)*

Rincian piutang usaha dan piutang lainnya berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The details of trade and other receivables based on aging as follows:

	31 Desember/*December*				
	2022	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	35,120	29,780	20,267	111,226	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:					*Overdue:*
1 - 30 hari	12,466	4,185	525	15,168	*1 -30 days*
31 - 180 hari	19,691	692	308	6,623	*31-180 days*
180 - 360 hari	445	502	4	8,189	*180-360 days*
Lebih dari 360 hari	1,624	281	3,014	4,178	*More than 360 days*
	69,346	35,440	24,118	145,384	

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat piutang usaha dan piutang lainnya berdenominasi Rupiah.

As at reporting date, all the carrying amount of trade and other receivables were denominated in Rupiah.

Piutang dari PT Megatech Engineering pada 31 Desember 2022 merupakan piutang atas pendapatan sewa untuk ruang *arcade game* (Catatan 23) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah lunas pada Januari 2023. Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas piutang tersebut.

Trade receivables from PT Megatech Engineering as of 31 December 2022 was from rental income of arcade game room (Note 23) which was due on 31 December 2022 and settled in January 2023. There was no interest, guarantee, limitation and other conditions related to this receivable.

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing debitur pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan untuk tidak membuat penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha dan piutang lainnya.

Based on evaluation of the status of each debtors at year end, management believes no provision for impairment of trade and other receivables is nedeed.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, tidak ada piutang usaha dan piutang lain-lain yang dijaminkan untuk pinjaman tertentu.

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, no trade and other receivables were used as collateral for certain loans.

6. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / 6. *ADVANCE AND PREPAYMENTS*

	31 Desember/*December*				
	2022	2021	2020	2019	
Sewa dan biaya layanan	8,336	21,042	21,519	48,201	*Rental and service charges*
Utilitas	2,606	2,377	6	2,411	*Utilities*
Asuransi	6,088	5,715	5,595	4,853	*Insurance*
Lain-lain	4,381	2,989	1,956	6,597	*Others*
	21,411	32,123	29,076	62,064	

7. ASET TETAP / 7. *FIXED ASSETS*

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pengukuran kembali/ *Remeasurement*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	3,367,512	68,692	(12,015)	-	3,424,189	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	3,381,977	55,966	(20,293)	-	3,417,650	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	895,145	23,112	(1,645)	-	916,612	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	14,810	2,745	(1,816)	-	15,739	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	1,818,106	20,633	-	11,393	1,850,132	*Right-of-use assets*
	9,477,550	171,148	(35,769)	11,393	9,624,322	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(1,845,602)	(272,133)	11,946	-	(2,105,789)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,395,481)	(172,524)	19,803	-	(2,548,202)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(525,016)	(86,056)	1,536	-	(609,536)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(12,150)	(1,312)	1,818	-	(11,644)	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	(280,357)	(136.688)	-	11,582	(405,463)	*Right-of-use assets*
	(5,058,606)	(668,713)	35,103	11,582	(5,680,634)	
Cadangan penurunan nilai atas pengembangan prasarana	(1,241)	-	-	-	(1,241)	*Allowance for impairment of leasehold improvements*
Nilai tercatat	**4,417,703**				**3,942,447**	***Carrying amount***

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:					***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung					*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	3,273,916	107,526	(13,930)	3,367,512	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	3,283,459	108,221	(9,703)	3,381,977	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	881,377	14,936	(1,168)	895,145	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	20,354	-	(5,544)	14,810	*Vehicles*
Perjanjian sewa					*Lease agreement*
Aset hak-guna	1,452,936	365,594	(424)	1,818,106	*Right-of-use assets*
	8,912,042	596,277	(30,769)	9,477,550	
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung					*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(1,588,380)	(270,747)	13,525	(1,845,602)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,221,687)	(183,424)	9,630	(2,395,481)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(452,129)	(73,930)	1,043	(525,016)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(16,370)	(1,324)	5,544	(12,150)	*Vehicles*
Perjanjian sewa					*Lease agreement*
Aset hak-guna	(140,747)	(140,034)	424	(280,357)	*Right-of-use assets*
	(4,419,313)	(669,459)	30,166	(5,058,606)	
Cadangan penurunan nilai atas pengembangan prasarana	-	(1,241)	-	(1,241)	*Allowance for impairment of leasehold improvements*
Nilai tercatat	**4,492,729**			**4,417,703**	***Carrying amount***

7. ASET TETAP (Lanjutan) / 7. *FIXED ASSETS (Continued)*

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 73/*Adjustment on initial application of PSAK 73**	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	3,121,011	-	157,855	(4,950)	3,273,916	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	3,187,924	-	95,535	-	3,283,459	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	841,218	-	40,304	(145)	881,377	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	18,626	-	2,151	(423)	20,354	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	-	1,452,936	-	-	1,452,936	*Right-of-use assets*
	7,168,779	1,452,936	295,845	(5,518)	8,912,042	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(1,334,225)	-	(259,025)	4,870	(1,588,380)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,064,151)	-	(157,536)	-	(2,221,687)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(362,243)	-	(90,008)	122	(452,129)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(15,407)	-	(1,386)	423	(16,370)	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	-	-	(140,747)	-	(140,747)	*Right-of-use assets*
	(3,776,026)	-	(648,702)	5,415	(4,419,313)	
Nilai tercatat	**3,392,753**				**4,492,729**	***Carrying amount***

	2019				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:					***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung					*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	2,512,170	660,745	(51,904)	3,121,011	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	2,909,679	407,489	(129,244)	3,187,924	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	630,273	221,174	(10,229)	841,218	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	18,865	1,308	(1,547)	18,626	*Vehicles*
	6,070,987	1,290,716	(192,924)	7,168,779	
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung					*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(1,163,301)	(218,833)	47,909	(1,334,225)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,057,268)	(132,545)	125,662	(2,064,151)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(297,886)	(73,117)	8,760	(362,243)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(16,084)	(870)	1,547	(15,407)	*Vehicles*
	(3,534,539)	(425,365)	183,878	(3,776,026)	
Nilai tercatat	**2,536,448**			**3,392,753**	***Carrying amount***

* Pada tanggal 1 Januari 2020 Grup telah menerapkan PSAK 73: Sewa menggunakan pendekatan retrospektif modifikasian. Pada saat transisi, Grup mengakui aset hak-guna sebesar Rp 1.452.936, setelah reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp 21.871 (yang sebelumnya disajikan sebagai bagian dari uang muka dan biaya dibayar dimuka), dan liabilitas sewa sebesar Rp 1.431.065

* *On 1 January 2020 the Group has applied PSAK 73: Lease using the modified retrospective approach. On transition, the Group recognize Rp 1,452,936 of right-of-use assets, after reclassification of prepayments totaling Rp 21,871 (that were previously presented as part of advances and prepayments), and Rp 1,431,065 of lease liabilities.*

7. ASET TETAP (Lanjutan) / 7. FIXED ASSETS (Continued)

Saat mengukur liabilitas sewa, Grup mendiskontakan pembayaran sewa dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Suku bunga rata-rata tertimbang yang diterapkan adalah 9,6% per tahun.

When measuring the lease liabilities, the Group discounted lease payments using its incremental borrowing rate at 1 January 2020. The weighted-average rate applied is 9.6% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi di mana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga (Catatan 3c).

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, management has reviewed the estimated useful life of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful life is based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any adverse changes in circumstances or events (Note 3c).

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, pembelian pengembangan prasarana, peralatan studio dan kantor, dan perabot dan perlengkapan yang masih terutang masing-masing adalah Rp 29.304, Rp 28.332, Rp 3.767 dan Rp 87.258.

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, purchases of leasehold improvements, studio and office equipment and furniture and fixtures which remain payables were Rp 29,304, Rp 28,332, Rp 3,767 and Rp 87,258, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa nilai terpulihkan aset tetap melebihi nilai tercatat aset tetap.

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, management believes that the recoverable amounts of property, plant and equipment exceed their net carrying amounts.

Pada 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 3.942.447, Rp 4.417.703, Rp 4.492.729 dan Rp 3.392.753 diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 7.768.176, Rp 7.652.467, Rp 7.451.546 dan Rp 7.161.747. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi ini dapat menutupi kemungkinan kerugian yang antara lain dapat timbul akibat banjir, bencana alam, dan kerusuhan.

At 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019 fixed assets with a total carrying amount of Rp 3,942,447, Rp 4,417,703, Rp 4,492,729 and Rp 3,392,753, respectively, was insured for Rp 7,768,176, Rp 7,652,467, Rp 7,451,546 and Rp 7,161,747, respectively. Management believes that the sum insured is sufficient to cover potential loss due to, among other flood, disaster, and riot.

Berikut ini adalah perusahaan asuransi yang digunakan oleh Grup:
a. PT Asuransi Etiqa Internasional (pihak ketiga)
b. PT Asuransi FPG Indonesia (pihak ketiga)
c. PT Sompo Insurance Indonesia (pihak ketiga)

The following are insurance companies used by the Group:
a. PT Asuransi Etiqa Internasional (third party)
b. PT Asuransi FPG Indonesia (third party)
c. PT Sompo Insurance Indonesia (third party)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, tidak ada aset tetap yang dijaminkan untuk fasilitas pinjaman.

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, no fixed assets had been placed as collateral for loans facility.

Jumlah harga perolehan tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.196.584, Rp 2.047.816, Rp 1.895.249 dan Rp 1.798.543. Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup.

The acquisition cost of fixed assets that are fully depreciated and still in use for production as of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 2,196,584, Rp 2,047,816, Rp 1,895,249 and Rp 1,789,543, respectively. All of the fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Group's operation activities.

7. ASET TETAP (Lanjutan) / 7. *FIXED ASSETS (Continued)*

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka yang dibayarkan kepada pemasok pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana untuk bioskop baru. Waktu yang diperlukan untuk membangun bioskop berkisar dari 3 bulan sampai 6 bulan. Total nilai kontrak pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 871.000, Rp 990.000, Rp 1.297.000 and Rp 1.508.000.

Advance payment for purchase of fixed assets represents the advance paid to third party and related party suppliers in relation to the purchase of studio equipment and leasehold improvement of new cinema. Time needed to develop cinemas is ranging from 3 months to 6 months. Total contract amount as of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019 were Rp 871,000, Rp 990,000, Rp 1,297,000 and Rp 1,508,000, respectively.

Grup menyewa ruangan untuk bioskop untuk jangka waktu sekitar 10-20 tahun.

The Group leases space for cinema for a term of 10-20 years.

	2022	2021	2020	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi				***Amount recognized in profit or loss***
Beban bunga atas liabilitas sewa	131,156	136,742	134,044	*Interest expense of lease liabilities*
Penyusutan aset hak-guna	136,688	140,034	140,747	*Depreciation of right-of-use assets*

	31 Desember/*December*			
	2022	2021	2020	
Liabilitas sewa terutang:				***Lease liabilities payable:***
Dalam 1 tahun	199,652	209,273	188,757	*Within 1 year*
Dalam 1 dan 5 tahun	1,114,989	1,592,218	756,349	*Between 1 and 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1,345,919	1,077,807	1,585,855	*More than 5 years*
Total minimum pembayaran sewa di masa depan	2,660,560	2,879,298	2,530,961	*Total future minimum lease payments*
Porsi bunga atas pembayaran sewa	(1,037,592)	(1,202,028)	(1,158,149)	*Interest portion of the lease payments*
Nilai kini pembayaran sewa saat ini	1,622,968	1,677,270	1,372,812	*Present value of lease payments*
Liabilitas jangka pendek	(71,119)	(73,011)	(63,101)	*Lease Liabilities, current portion*
Liabilitas jangka panjang	**1,551,849**	**1,604,259**	**1,309,711**	*Lease Liabilities, non-current portion*

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki perjanjian sewa dengan beberapa pihak ketiga yang metode pembayarannya ditentukan berdasarkan tarif sewa tetap ataupun dengan basis bagi hasil pendapatan. Jumlah pembayaran minimum sewa yang akan dibayar di masa datang yang berasal dari sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2019, The Group has lease agreement with several third parties, for which the payment methods are determined using either fixed rental payment or revenue share. Future minimum lease payments that will be paid under non-cancellable operating leases are as follows:

	31 Desember/ *December* 2019	
Sampai dengan satu tahun	159,056	*Not later than one year*
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun	622,831	*More than one year but not later than five years*
Lebih dari lima tahun	1,636,058	*More than five years*
	2,417,945	

7. ASET TETAP (Lanjutan) / *7. FIXED ASSETS (Continued)*

Berikut ini ringkasan perubahan komponen pada liabilitas terkait aktivitas sewa selama tahun berjalan:

The following summarizes the components of change in the liabilities arising from lease activities during the year:

	31 Desember/December			
	2022	2021	2020	
Saldo pada 1 Januari	1,677,270	1,372,812	1,431,065	*Balance at 1 January*
Arus kas:				*Cash flows:*
Pembayaran liabilitas sewa	(172,518)	(16,561)	(56,634)	*Payment of lease liabilities*
Perubahan non-kas:				*Non-cash changes:*
Penambahan pada tahun berjalan	21,997	365,594	-	*Addition during the year*
Bunga atas liabilitas sewa	131,156	136,742	134,044	*Interest of lease liabilities*
Konsesi sewa yang diterima	(27,016)	(141,988)	(51,257)	*Lease concession received*
Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya	(15,744)	(36,256)	(78,104)	*Overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*
Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing	7,823	(3,073)	(6,302)	*Loss(gain) on foreign currency*
Saldo pada 31 Desember	1,622,968	1,677,270	1,372,812	*Balance at 31 December*

8. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *8. OTHER NON-CURRENT ASSET*

	2022	2021	2020	2019	
Uang jaminan	79,272	76,398	76,108	74,973	*Security deposit*
Perangkat lunak	8,359	1,807	1,951	2,878	*Software*
Lain-lain	10,528	9,358	12,540	12,224	*Other*
	98,159	87,563	90,599	90,075	

9. UTANG USAHA DAN UTANG LAINNYA / *9. TRADE PAYABLES AND OTHER*

	2022	2021	2020	2019	
Utang usaha kepada pihak ketiga					*Trade payables to third parties*
PT Omega Film	49,895	60,078	3,987	52,842	*PT Omega Film*
PT Cinemaxx Global Pasifik	9,675	19,256	223	-	*PT Cinemaxx Global Pasifik*
PT Graha Layar Prima Tbk	8,692	1,731	464	7,947	*PT Graha Layar Prima Tbk*
PT Kharisma Starvision Plus	7,684	3,899	4	21,072	*PT Kharisma Starvision Plus*
PT Triniti Jaya Abadi	5,497	3,379	2,413	205	*PT Triniti Jaya Abadi*
PT Visinema Pictures	5,394	56	249	733	*PT Visinema Pictures*
Lainnya	36,484	59,311	45,904	186,672	*Other*
Liabilitas sewa yang belum di bayarkan (Catatan 7)	126,580	114,363	78,104	-	*Unpaid lease liabilities (Note 7)*
Liabilitas ke pemilik gedung selain sewa	19,643	20,817	20,817	18,574	*Liability to building owners other than lease*
Utang usaha kepada pihak berelasi (Catatan 19)					*Trade payables to related parties (Note 19)*
PT Megatech Engineering	17,598	28,332	3,767	16,129	*PT Megatech Engineering*
PT Delta Raya Sejahtera	12,373	19,650	19,313	33,138	*PT Delta Raya Sejahtera*
PT Multi Interbuana Teknindo	12,342	21,234	257	6,470	*PT Multi Interbuana Teknindo*
PT Delta Raya Sentosa	5,343	6,374	3,097	17,150	*PT Delta Raya Sentosa*
Lainnya – dibawah Rp 1 Miliar	-	-	291	588	*Others – below Rp 1 Billion*
	317,200	358,480	178,890	361,520	
Utang lainnya dan beban yang masih harus dibayar:					*Other payables and accrued expenses:*
Beban akrual pembelian makanan dan minuman	57,403	50,254	9,736	-	*Accrued purchases food and beverages*
Beban akrual sewa, utilitas, dan jasa pengelola	22,988	21,126	14,493	-	*Accrued rent, utilities, and service charges*
Lain-lain	44,863	25,586	13,047	226,234	*Others*
	125,254	96,966	37,276	226,234	
	442,454	455,446	216,166	587,754	

9. UTANG USAHA DAN UTANG LAINNYA (Lanjutan) / 9. TRADE PAYABLES AND OTHER (Continued)

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat utang usaha dan utang lainnya berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha dan utang lainnya diperkirakan mendekati nilai tercatatnya.

As at reporting date, all the carrying amount of trade and other payables were denominated in Rupiah. Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on aging were as follows:

	31 Desember/*December*				
	2022	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	90,184	81,730	39,109	197,095	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:					*Overdue:*
1 – 30 hari	87,736	100,244	22,471	124,046	*1 – 3- days*
31 – 180 hari	513	36,191	13,702	11,816	*31 – 180 days*
180 – 360 hari	4,131	4,523	7,633	1,372	*180-360 days*
Lebih dari 360 hari	134,637	135,792	95,975	27,191	*More than 360 days*
	317,201	358,480	178,890	361,520	

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang yang telah jatuh tempo masing-masing sebesar Rp 126.580, Rp 114.363 dan Rp 78.104 yang merupakan liabilitas sewa untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringanan yang akan diberikan kepada Grup sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 (Catatan 7 dan 24).

As of 31 December 2022, 2021 and 2020, there were overdue payables amounted to Rp 126,580, Rp 114,363 and Rp 78,104, respectively, which represented the unpaid lease liabilities for cinema lease which are under negotiation of final lease concession that will be granted to the Group due to the impact of COVID-19 pandemic (Note 7 and 24).

Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas utang tersebut.

There was no interest, guarantee, limitation and other conditions related to this payable.

10. PINJAMAN BANK / 10. LOAN BORROWINGS

	2022	2021	2020	2019	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Fasilitas pinjaman *non-revolving* dengan tujuan pendanaan modal kerja; dijamin dengan tabungan dari dua pemegang saham; dikenakan bunga sebesar 1,7% per tahun.	1,497,265	-	-	-	*Non-revolving loan facility for the purpose of working capital financing; collateralized by cash deposits from two shareholders; bearing interest at an annual rate of 1.7% per annum.*
PT Bank DBS Indonesia					*PT Bank DBS Indonesia*
Fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp 200.000 dengan tujuan pendanaan modal kerja; dijamin dengan deposito berjangka dari dua pemegang saham; dikenakan bunga sebesar 3% per tahun; jatuh tempo pada 20 Desember 2023.	200,150	-	-	-	*Maximum loan facility of Rp 200,000 for the purpose of working capital financing; collateralized by time deposits from two shareholders; bearing interest at an annual rate of 3% per annum ; due on 20 December 2023.*
	1,697,415	-	-	-	

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. LOAN BORROWINGS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman bank ini tidak memiliki persyaratan khusus maupun pembatasan fasilitas pinjaman.

1. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.743/SPH/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

2. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.745/SPH/12/2022 tanggal 17 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

3. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.747/SPH/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

4. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.751/SPH/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

These bank loan agreements have no convenants requirements and limitations.

1. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.743/SPH/12/2022, dated 16 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 16 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

2. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.745/SPH/12/2022, dated 17 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 17 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

3. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.747/SPH/12/2022, dated 18 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 18 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

4. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.751/SPH/12/2022, dated 19 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 19 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. LOAN BORROWINGS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

5. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

6. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

7. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

8. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

5. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.754/SPH/12/2022, dated 20 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 20 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

6. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.764/SPH/12/2022, dated 21 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 21 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

7. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.767/SPH/12/2022, dated 22 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 22 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

8. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.769/SPH/12/2022, dated 23 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 23 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. LOAN BORROWINGS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

9. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

10. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

11. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

12. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

13. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.784/SPH/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

9. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.771/SPH/12/2022, dated 24 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 24 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

10. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.773/SPH/12/2022, dated 25 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 25 December 2023.*

    This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

11. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.777/SPH/12/2022, dated 26 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 26 December 2023.*

    This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

12. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.782/SPH/12/2022, dated 27 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 27 December 2023.*

    This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

13. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.784/SPH/12/2022, dated 28 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 28 December 2023.*

    This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. LOAN BORROWINGS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

14. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

15. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99,780. Pinjaman pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 200.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 3% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama PT Harkatjaya Bumipersada dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar Rp 200.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang fasilitas ini adalah sebesar Rp 200.000.

Perjanjian pinjaman bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, di mana Perseroan tidak boleh tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada bank, diantaranya:

a. Mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham, dengan ketentuan keluarga Suherman dan Lasmana secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung tetap menjaga dan mempertahankan kepemilikan minimum 51% atas jumlah saham pada Perseroan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

14. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.790/SPH/12/2022, dated 29 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 29 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

15. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.793/SPH/12/2022, dated 30 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 30 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

PT Bank DBS Indonesia

Based on Banking Facility Agreement No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022, dated December 20, 2022, the Company obtained Credit Cash Collateral facility from PT Bank DBS Indonesia with the maximum credit limit of Rp 200,000. This facility bears an interest rate of 3% per annum and mature on 20 December 2023.

This facility is secured by time deposit in the name of PT Harkatjaya Bumipersada and PT Adi Pratama Nusantara amount of Rp 200,000.

As of 31 December 2022, the outstanding balances of this facility amounted to Rp 200,000.

The bank loan agreement contains convenants and restrictions in which, the Company shall not without prior written notice to be bank, among others:

a. Change the ownership or composition of shareholders, provided that the Suherman and Lasmana families jointly, directly or indirectly maintain and maintain a minimum ownership of 51% of the number of shares in the Company.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. LOAN BORROWINGS (Continued)*

PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

b. Dalam keadaan pailit atau permintaan penundaan pembayaran.

c. Membuat atau memberikan izin untuk mengalihkan hak fidusia, SPH (Surat Pengakuan Hutang), hak tanggungan atau penanggung lainnya.

d. Membuat atau memberikan izin untuk melakukan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan kerugian, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau jaminan dan/atau perjanjian lain dan/atau pengaturan lain yang pada hakikatnya mempunyai akibat yang sama terhadap kekayaan atau hak yang timbul dari tagihan Perseroan, selain dari jaminan yang diberikan kepada bank (bila ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian utang.

PT Bank DBS Indonesia (continued)

b. In state of bankruptcy or payment delay request.

c. Make or give permission to transfer fiducia rights, SPH (Surat Pengakuan Hutang), mortgage right or other guarantor.

d. Making or giving permission to make fiduciary transfers of rights, letters of acknowledgment of loss, mortgage rights, imposition of fees, pledges, or other guarantees and/or agreements and/or other arrangements which in essence have the same effect on wealth or rights that arise from the Company's bill, other than the guarantee given to the bank (if any) or which has been notified in writing by the bank.

As of 31 December 2022, the Company was in compliance with the terms and conditions of the loan agreement.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Klaim pengembalian pajak: / *a. Claims for tax refund:*

	2022	2021	2020	2019	
Perseroan:					*The Company:*
Tahun fiskal 2019	-	506	-	38	*Fiscal year 2019*
Tahun fiskal 2020	74,360	89,898	89,898	-	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2021	-	550	-	-	*Fiscal year 2021*
Tahun fiskal 2022	2,535	-	-	-	*Fiscal year 2022*
	76,895	90,954	89,898	38	
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Tahun fiskal 2019	26	2,327	2,963	8,235	*Fiscal year 2019*
Tahun fiskal 2020	49,881	44,971	44,971	-	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2021	-	2,288	-	-	*Fiscal year 2021*
Tahun fiskal 2022	2,654	-	-	-	*Fiscal year 2022*
	52,561	49,586	47,934	8,235	
Konsolidasian:					*Consolidated:*
Tahun fiskal 2019	26	2,833	2,963	8,273	*Fiscal year 2019*
Tahun fiskal 2020	124,241	134,869	134,869	-	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2021	-	2,838	-	-	*Fiscal year 2021*
Tahun fiskal 2022	5,189	-	-	-	*Fiscal year 2022*
	129,456	140,540	137,832	8,273	

Klaim pengembalian pajak merupakan lebih bayar yang berasal dari pajak penghasilan badan

Claim for tax refund represent overpayment from corporate income tax

b. Utang pajak penghasilan: / *b. Income taxes payable:*

	2022	2021	2020	2019	
Perseroan	-	-	-	22,857	*The Company*
Entitas anak	7,681	-	-	9,092	*Subsidiaries*
	7,681	-	-	31,949	

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

c. Utang pajak lainnya: / *c. Other taxes payable:*

	2022	2021	2020	2019	
Perseroan:					*The Company:*
Pajak pertambahan nilai	17,070	4,024	9,304	54,687	*Value added taxes*
Pajak hiburan	20,292	21,188	1,480	30,548	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	11,974	11,044	944	12,900	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	3,957	3,283	3,523	8,908	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2,028	3,168	689	4,715	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4,046	3,774	898	4,633	*Withholding tax article 4 (2)*
	59,367	46,481	16,838	116,391	
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Pajak pertambahan nilai	(228)	149	318	4,251	*Value added taxes*
Pajak hiburan	7,317	7,054	915	10,866	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	3,787	3,241	469	4,283	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	201	182	47	868	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	904	1,078	212	1,145	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4,301	4,276	3,226	4,972	*Withholding tax article 4 (2)*
	16,282	15,980	5,187	26,385	
Konsolidasian:					*Consolidated:*
Pajak pertambahan nilai	16,842	4,173	9,622	58,938	*Value added taxes*
Pajak hiburan	27,609	28,242	2,395	41,414	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	15,761	14,285	1,413	17,183	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	4,158	3,465	3,570	9,776	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2,932	4,246	901	5,860	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	8,347	8,050	4,124	9,605	*Withholding tax article 4 (2)*
	75,649	62,461	22,025	142,776	

d. Beban (manfaat) pajak penghasilan: / *d. Income tax expense (benefit):*

	2022	2021	2020	2019	
Perseroan:					*The Company:*
Beban pajak kini – tahun berjalan	-	-	-	274,407	*Current tax expense – current year*
Beban pajak kini – penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	-	(1,449)	*Current tax expense – adjustments in respect of prior years*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	87,346	(96,642)	(77,108)	48,893	*Deferred tax (benefit) expense*
	87,346	(96,642)	(77,108)	321,851	
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Beban pajak kini – tahun berjalan	7,728	-	-	87,388	*Current tax expense – current year*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	-	-	-	171	*Adjustment to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	35,866	(15,122)	(30,092)	14,120	*Deferred tax (benefit) expense*
	43,594	(15,122)	(30,092)	101,679	
Konsolidasian:					*Consolidated:*
Beban pajak kini – tahun berjalan	7,728	-	-	361,795	*Current tax expense – current year*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	-	-	-	(1,278)	*Adjustment to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	123,212	(111,764)	(107,200)	63,013	*Deferred tax (benefit) expense*
	130,940	(111,764)	(107,200)	423,530	

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

e. Rekonsiliasi antara laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak dengan beban (manfaat) pajak penghasilan:

e. Reconciliation of consolidated profit (loss) before tax and income tax expense (benefit):

	2022	2021	2020	2019	
Laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak	635,475	(477,567)	(686,076)	1,697,964	*Consolidated profit (loss) before tax*
(Laba) rugi entitas anak	(204,519)	73,292	135,769	(375,654)	*Subsidiary's (profit) loss*
Dividen dari entitas anak	255,032	-	-	209,400	*Dividend from subsidiaries*
Laba dari penjualan entitas anak	-	183,712	-	-	*Gain from sales subsidiaries*
Transaksi eliminasi dengan entitas anak	(1,254)	-	-	-	*Elimination transactions with the subsidiaries*
Perseroan:					*The Company:*
Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan	684,734	(220,563)	(550,307)	1,531,710	*The Company's profit (loss) before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	22%	25%	*Applicable tax rate*
	150,641	(48,524)	(121,068)	382,929	
Perbedaan permanen	(63,295)	(27,172)	(4,219)	(59,629)	*Permanent differences*
Pengaruh perubahan tarif pajak	-	(20,946)	48,179	-	*Effect of change statutory tax rate*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	-	-	-	(1,449)	*Adjustments to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak penghasilan perseroan	87,346	(96,642)	(77,108)	321,851	*The Company's Income tax expense (benefit)*
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	204,519	(73,292)	(135,769)	375,654	*Subsidiaries' profit (loss) before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	22%	25%	*Applicable tax rate*
	44,994	(16,124)	(29,869)	93,914	
Perbedaan permanen	(9,669)	4,783	(2,761)	2,393	*Permanent differences*
Pengaruh perubahan tarif pajak	-	(4,401)	(544)	-	*Effect of change statutory tax rate*
Kompensasi kerugian fiskal yang tidak diakui	-	620	3,082	5,202	*Unrecognized tax loss carry Forward*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	8,269	-	-	171	*Adjustments to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak penghasilan entitas anak	43,594	(15,122)	(30,092)	101,679	*Subsidiaries' income tax expense (benefit)*
Beban (manfaat) pajak penghasilan	130,940	(111,764)	(107,200)	423,530	*Income tax expense (benefit)*

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

f. Pajak penghasilan dihitung untuk setiap badan hukum entitas karena pelaporan pajak penghasilan badan konsolidasian tidak diperbolehkan.

f. Income tax expense is computed for each legal entity as consolidated corporate income tax returns are not permitted.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan kini Perseroan:

Reconciliation of consolidated profit (loss) before tax and the Company's current income tax expense:

	2022	2021	2020	2019	
Laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak	635,475	(477,567)	(686,076)	1,697,964	*Consolidated profit (loss) before tax*
(Laba) rugi entitas anak	(204,519)	73,292	135,769	(375,654)	*Subsidiary's (profit) loss*
Dividen dari entitas anak	255,032	-	-	209,400	*Dividend from subsidiaries*
Laba penjualan sebagian saham entitas anak	-	183,712	-	-	*Gain from sale of shares in a subsidiary*
Transaksi eliminasi dengan entitas anak	(1,254)	-	-	-	*Elimination transactions with the subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan:	684,734	(220,563)	(550,307)	1,531,710	*The Company's profit (loss) before tax:*
Perbedaan temporer:					*Temporary difference:*
Depresiasi	(88,919)	(172,013)	(183,867)	(191,064)	*Depreciation*
Imbalan kerja	(4,079)	(1,109)	-	(4,508)	*Employee benefit*
Sewa	112,286	15,879	170,622	-	*Leases*
Perbedaan permanen:					*Permanent difference:*
Dividen	(255,032)	-	-	(209,400)	*Dividend*
Penghasilan dikenakan pajak final	(20,169)	(7,699)	(22,077)	(34,587)	*Income subject to final tax*
Penurunan nilai persediaaan	10,648	-	-	-	*Inventory write down*
Hiburan	4,062	-	421	7,380	*Entertainment*
Natura karyawan	1,230	(10,229)	305	1,794	*Employee benefit in kind*
Donasi	360	254	1,506	-	*Donation*
Lain-lain	(28,805)	(105,836)	666	(3,695)	*Others*
	416,316	(501,316)	(582,731)	1,097,630	
Penggunaan rugi fiskal tahun lalu	(416,316)	-	-	-	*Utilization of prior year fiscal loss*
Laba kena pajak (rugi fiskal)	-	(501,316)	(582,731)	1,097,630	*Taxable income (fiscal loss)*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	22%	25%	*Applicable tax rate*
Beban pajak penghasilan Perseroan	-	-	-	274,407	*The Company's current income tax expense*

Perseroan sudah melaporkan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2022 pada April 2023. Laba kena pajak tahun 2022 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan Perseroan.

The Company has submitted its corporate income tax return for fiscal year 2022 in April 2023. Taxable income of 2022 become the basis for filing the Company's income tax returns.

Perseroan sudah melaporkan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 pada April 2022. Perseroan berencana untuk melaporkan revisi pelaporan pajak penghasilan tahun fiskal 2021 berdasarkan rugi fiskal tahun 2021 di atas. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan belum melaporkan revisi pelaporan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021.

The Company has submitted its corporate income tax return for fiscal year 2021 in April 2022. The Company plans to submit revision to corporate income tax return for fiscal year 2021 based on the fiscal loss above. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the Company has not submitted the revised corporate income tax return for fiscal year 2021.

Perseroan sudah melaporkan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 pada Februari 2022. Rugi fiskal tahun 2020 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan Perseroan.

The Company has submitted its corporate income tax return for fiscal year 2020 in February 2022. Fiscal loss of 2020 become the basis for filing the Company's income tax returns.

Perseroan sudah melaporkan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2019 pada Juni 2020. Laba kena pajak tahun 2019 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan Perseroan.

The Company has submitted its corporate income tax return for fiscal year 2019 in June 2020. Taxable income of 2019 become the basis for filing the Company's income tax returns.

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan: / *g. Deferred tax assets and liabilities:*

	2021	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	Diakui di komponen ekuitas lainnya/ *Recognized in other equity component*	2022	
Perseroan:						*The Company:*
Kompensasi kerugian fiskal	238,490	(91,589)	-	(40,416)	106,485	*Tax loss carry forward*
Imbalan Kerja	17,878	(898)	(116)	-	16,864	*Employee benefit*
Aset tetap	36,537	(19,562)	-	-	16,975	*Fixed assets*
Sewa	31,319	24,703	-	-	56,022	*Lease*
Aset pajak tangguhan	324,224	(87,346)	(116)	(40,416)	196,346	*Deferred tax assets*
Entitas anak:						*Subsidiaries:*
Kompensasi kerugian fiskal	58,737	(40,571)	-	-	18,166	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	3,115	(195)	(256)	-	2,664	*Employee benefit*
Aset tetap	(12,206)	(65)	-	-	(12,271)	*Fixed assets*
Sewa	8,945	4,965	-	-	13,910	*Lease*
Aset pajak tangguhan	58,591	(35,866)	(256)	-	22,469	*Deferred tax assets*
Konsolidasi:						*Consolidated:*
Kompensasi kerugian fiskal	297,227	(132,160)	-	(40,416)	124,651	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	20,993	(1,093)	(372)	-	19,528	*Employee benefit*
Aset tetap	24,331	(19,627)	-	-	4,704	*Fixed assets*
Sewa	40,264	29,668	-	-	69,932	*Lease*
Aset pajak tangguhan	382,815	(123,212)	(372)	(40,416)	218,815	*Deffered tax assets*

	2020	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	2021	
Perseroan:					*The Company:*
Kompensasi kerugian fiskal	116,546	121,944	-	238,490	*Tax loss carry forward*
Imbalan Kerja	20,832	(244)	(2,710)	17,878	*Employee benefit*
Aset tetap	67,618	(31,081)	-	36,537	*Fixed assets*
Sewa	25,296	6,023	-	31,319	*Lease*
Aset pajak tangguhan	230,292	96,642	(2,710)	324,224	*Deferred tax assets*
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Kompensasi kerugian fiskal	34,690	24,047	-	58,737	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	3,917	(258)	(544)	3,115	*Employee benefit*
Aset tetap	(1,097)	(11,109)	-	(12,206)	*Fixed assets*
Sewa	6,503	2,442	-	8,945	*Lease*
Aset pajak tangguhan	44,013	15,122	(544)	58,591	*Deferred tax assets*
Konsolidasi:					*Consolidated:*
Kompensasi kerugian fiskal	151,236	145,991	-	297,227	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	24,749	(502)	(3,254)	20,993	*Employee benefit*
Aset tetap	66,521	(42,190)	-	24,331	*Fixed assets*
Sewa	31,799	8,465	-	40,264	*Lease*
Aset pajak tangguhan	274,305	111,764	(3,254)	382,815	*Deferred tax assets*

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan): / *g. Deferred tax assets and liabilities (Continued):*

	2019	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/*Recognized in other comprehensive income*	2020	
Perseroan:					*The Company:*
Kompensasi kerugian fiskal	-	116,546	-	116,546	*Tax loss carry forward*
Imbalan Kerja	21,920	(2,399)	1,311	20,832	*Employee benefit*
Aset tetap	129,953	(62,335)	-	67,618	*Fixed assets*
Sewa	-	25,296	-	25,296	*Lease*
Aset pajak tangguhan	151,873	77,108	1,311	230,292	*Deferred tax assets*
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Kompensasi kerugian fiskal	-	34,690	-	34,690	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	4,619	(917)	215	3,917	*Employee benefit*
Aset tetap	9,087	(10,184)	-	(1,097)	*Fixed assets*
Sewa	-	6,503	-	6,503	*Lease*
Aset pajak tangguhan	13,706	30,092	215	44,013	*Deferred tax assets*
Konsolidasi:					*Consolidated:*
Kompensasi kerugian fiskal	-	151,236	-	151,236	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	26,539	(3,316)	1,526	24,749	*Employee benefit*
Aset tetap	139,040	(72,519)	-	66,521	*Fixed assets*
Sewa	-	31,799	-	31,799	*Lease*
Aset pajak tangguhan	165,579	107,200	1,526	274,305	*Deferred tax assets*

	2018	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	2019	
Perseroan:					*The Company:*
Imbalan kerja	21,951	(1,127)	1,096	21,920	*Employee benefit*
Aset tetap	177,719	(47,766)	-	129,953	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	199,670	(48,893)	1,096	151,873	*Deferred tax assets*
Entitas anak:					*Subsidiaries:*
Imbalan kerja	4,122	349	148	4,619	*Employee benefit*
Aset tetap	23,556	(14,469)	-	9,087	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	27,678	(14,120)	148	13,706	*Deferred tax assets*
Konsolidasi:					*Consolidated:*
Imbalan kerja	26,073	(778)	1,244	26,539	*Employee benefit*
Aset tetap	201,275	(62,235)	-	139,040	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	227,348	(63,013)	1,244	165,579	*Deferred tax assets*

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan):

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal pelaporan telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

Aset pajak tangguhan diakui sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas karena besar kemungkinan laba kena pajak pada periode mendatang akan tersedia sehingga Grup dapat menggunakan manfaat dari kompensasi kerugian fiskal Rp 566.596 yang akan kadaluarsa antara tahun 2023 dan 2026.

Aset pajak tangguhan berikut ini tidak diakui:

g. Deferred tax assets and liabilities (Continued):

Deferred tax assets and liabilities as at reporting date have been calculated taking into account tax rates applicable for each respective period.

Deferred tax assets have been recognized with respect to the above mentioned items because it is probable that future taxable profits will be available against which the Group can utilize the benefits from tax loss carry forward amounted to Rp 566,596 which will be expired between 2023 and 2026.

The following deferred tax asset has not been recognized:

	2022	2021	2020	2019	
Kompensasi kerugian fiskal – entitas anak	9,537	20,303	19,522	20,900	*Tax loss carry forwards – a subsidiary*

Kompensasi kerugian fiskal, yang tidak diakui di entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 43.349, akan kadaluarsa antara tahun 2023 dan 2026 jika tidak dimanfaatkan dengan laba kena pajak pada masa mendatang.

Tax loss carry forwards, which was not recognized in subsidiary as of 31 December 2022 amounted to Rp 43,349, will expire in varying amounts between 2023 and 2026 if not utilized against future taxable profits.

h. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Grup melaporkan/menyetorkan pajak-pajaknya berdasarkan sistem *self-assessment*. Otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Posisi pajak Grup mungkin dapat dipertanyakan otoritas pajak. Manajemen dengan seksama mempertahankan posisi pajak Grup yang diyakininya berlandaskan dasar teknis yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa akrual atas liabilitas pajak mencukupi untuk seluruh tahun pajak yang belum diperiksa berdasarkan penelaahan atas berbagai faktor, termasuk interpretasi peraturan perpajakan dan pengalaman sebelumnya. Penelaahan tersebut didasarkan atas estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan akan kejadian di masa depan. Informasi baru mungkin dapat tersedia yang menyebabkan manajemen merubah pertimbangannya mengenai kecukupan liabilitas pajak yang ada. Perubahan terhadap liabilitas pajak ini akan mempengaruhi beban pajak di periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Pada bulan Maret 2020, diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan tarif tunggal untuk pajak penghasilan perusahaan yaitu sebesar 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan akan turun menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022. Pada bulan Mei 2020, Perpu ini ditetapkan menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2020.

Berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 yang efektif pada 29 Oktober 2021, pemerintah telah membatalkan rencananya untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% untuk tahun fiskal 2022 dan memilih untuk tetap sebesar 22%.

h. Under the taxation laws of Indonesia, the Group submit tax returns on the basis of self-assessment system. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

The Group's tax positions may be challenged by the tax authorities. Management vigorously defends the Group's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on the assessment of various factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period which such determination is made.

In March 2020, a Government Regulation in lieu of Law ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 was enacted and provided a 22% flat rate of corporate income tax for fiscal year 2020 and 2021, and then further reduced to 20% for fiscal year 2022 onwards. In May 2020, the Perpu was stipulated as Law No. 2 Tahun 2020.

Pursuant to Law No. 7 Tahun 2021 which became effective on 29 October 2021, the government has nullified its plans to reduce the corporate income tax rate to 20% for fiscal year 2022 and has opted for it to remain 22%.

12. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA / *12. UNEARNED REVENUE*

	2022	2021	2020	2019	
M-Tix	137,388	132,956	124,493	124,033	*M-Tix*
Movie Card dan *voucher*	34,570	35,516	35,560	25,505	*Movie Card and voucher*
Lainnya	8	2,108	2,138	5,394	*Others*
	171,966	170,580	162,191	154,932	

M-Tix adalah *platform* tiket *online* milik Grup yang dapat digunakan pelanggan untuk menyetorkan uang untuk pembelian tiket bioskop. M-Tix diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan membeli tiket bioskop.

M-Tix is the Group's online ticketing platform which enables customers to deposit cash for purchase of cinema ticket. M-Tix is recognized as revenue when customers purchase cinema ticket.

Movie Card dan *voucher* diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan menukarkannya dengan tiket bioskop atau makanan dan minuman.

Movie Card and voucher are recognized as revenue when customers redeem them with cinema ticket or food and beverages.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*

Grup mengakui liabilitas pascakerja atas karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

The Group recognizes post-employment benefits obligation for its qualifying employees in accordance with Indonesian regulation concerning labor.

Tabel berikut ini menyajikan saldo kewajiban untuk imbalan pascakerja pada saat tanggal pelaporan, perubahan saldo liabilitas, dan beban yang diakui pada tahun 2022, 2021, 2020, dan 2019:

The following table presents the balance of the obligation for post-employment benefits as of the reporting dates, as well as the movements in the obligation, and the expense recognized during 2022, 2021, 2020 and 2019:

	2022	2021	2020	2019	
Perubahan liabilitas imbalan pascakerja					*Movement of post-employment benefits obligation*
Saldo awal	95,421	123,745	106,157	104,293	*Beginning balance*
Termasuk dalam laba rugi					*Included in profit or loss*
- Beban jasa kini	11,434	13,111	13,660	11,669	*Current service cost -*
- Keuntungan jasa masa lalu	(16,241)	(28,769)	-	(1,850)	*Past service gain -*
- Beban bunga	5,793	6,527	8,018	7,256	*Interest cost -*
	986	(9,131)	21,678	17,075	
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain					*Included in other comprehensive income*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:					*Actuarial (gains) losses arising from :*
- Penyesuaian tingkat bunga	1,755	(4,717)	11,487	4,392	*Financial assumptions -*
- Asumsi demografis	-	-	(130)	-	*Demographic assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	(3,445)	(10,073)	(3,725)	584	*Experience adjustment -*
	(1,690)	(14,790)	7,632	4,976	
Lainnya					*Others*
- Pembayaran manfaat	(5,953)	(4,403)	(11,722)	(20,187)	*Benefits paid -*
Saldo akhir	88,764	95,421	123,745	106,157	*Ending balance*

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)*

Tabel berikut ini menyajikan mutasi akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain selama tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019:

The following table reflects the balance of the accumulated actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income during 2022, 2021, 2020 and 2019:

	2022	2021	2020	2019	
Saldo awal	(541)	(15,331)	(7,699)	(2,723)	*Beginning balance*
Diakui ditahun berjalan	1,690	14,790	(7,632)	(4,976)	*Recognized during the year*
Saldo akhir	1,149	(541)	(15,331)	(7,699)	*Ending balance*

Asumsi aktuaria / ***Actuarial assumptions***

Asumsi dasar aktuarial yang digunakan dalam menghitung nilai kewajiban pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in computing the amount of obligation as of reporting dates were as follows:

	2022	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	7.25%	7.50%	7.00%	8.00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan upah	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	*Salary increment rate*
Tingkat mortalitas	100% TMI4	100% TMI4	100% TMI4	100% TMI4	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	*Disability rate*
Tingkat perputaran pekerja	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and become 0% at age 55*	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and become 0% at age 55*	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and become 0% at age 55*	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and became 0% at age 55*	*Resignation rate*
Usia pensiun normal	55	55	55	55	*Normal retirement age*

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan pascakerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

The future salary increase assumption projects the benefits obligations starting from the valuation date up to the normal retirement age. The increase rate of salary is generally determined based on inflation adjustment to pay scales and increase in the length of service.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban pascakerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 16,94 tahun (2021: 15,19 tahun; 2020: 15,48 tahuin; 2019: 15,81 tahun)

The weighted average duration of post-employment benefits obligation as of 31December 2022 was 16.94 years (2021: 15.19 years; 2020: 15.48 years; 2019: 15.81 years).

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah tanpa kupon yang ada di pasar aktif pada tanggal pelaporan.

The discount rate is used in determining the present value of the benefits obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availabillty of zero-coupon government bond in active market at the reporting date.

Informasi historis: / *Historical information:*

	31 Desember/*December*				
	2022	*2021*	*2020*	*2019*	*2018*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	88,764	95,421	123,745	106,157	104,293
Penyesuaian pengalaman	(1,690)	(14,790)	7,632	4,976	(2,759)

Present value of defined benefit obligation
Experience adjustments

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)*

Analisa sensitivitas

Kemungkinan adanya perubahan pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial terkait, di mana asumsi lainnya konstan, akan mempengaruhi liabilitas imbalan pascakerja sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah ini:

Sensitivity analysis

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the post-employment benefits obligation by the amount shown below:

	2022	2021	2020	2019	
Tingkat bunga diskonto (kenaikan 1%)	(6,694)	(8,408)	(11,466)	(8,731)	*Discount rate (1% increase)*
Tingkat bunga diskonto (penurunan 1%)	7,632	9,823	13,422	10,202	*Discount rate (1% decrease)*
Tingkat kenaikan gaji (kenaikan 1%)	8,366	10,777	14,521	11,176	*Salary increment rate (1% increase)*
Tingkat kenaikan gaji (penurunan 1%)	(7,408)	(9,329)	(12,566)	(9,687)	*Salary increment rate (1% decrease)*

Meskipun analisa ini tidak memperhitungkan seluruh distribusi arus kas yang diharapkan dari program tersebut, analisa tersebut memberikan perkiraan sensitivitas dari asumsi yang ditampilkan.

Although the analysis does not take into account the full distribution of cash flows expected under the plan, it approximates the sensitivity of the assumption shown.

14. MODAL SAHAM / *14. SHARE CAPITAL*

Berdasarkan akta notaris Ilmiawan Dekrit S, SH. MH. No 39 tanggal 31 Mei 2017 yang telah disahkan oleh keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia No AHU-0071639.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Ilmiawan Dekrit S, SH. MH. No. 39 dated 31 May 2017 which was ratified by the Decree of the Minister of law and Human Rights number AHU-0071639.AH.01.11.Tahun 2017 dated 5 June 2017, the Company's authorized, issued and paid-up capital as of 31 December 2021, 2020 and 2019 were as follows:

Modal dasar:		*Authorized capital:*
Jumlah saham	3,000,000,000 saham/*shares*	*Number of shares*
Nilai nominal per saham (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 100	*Par value per share (in full Rupiah amount)*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 300,000,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		*Issued and paid-up capital:*
Jumlah saham	750,100,000 saham/*shares*	*Number of shares*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 75,010,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2021, 2020 and 2019 was as follows:

Pemegang saham/*Shareholders*	Jumlah saham/ *Number of shares*	Jumlah nominal/ *Nominal value*	%
PT Harkatjaya Bumipersada	600,000,000	60,000	79.99
PT Adi Pratama Nusantara	150,000,000	15,000	20.00
Salween Investment Pte. Ltd., Singapura/Singapore	100,000	10	0.01
	750,100,000	75,010	100.00

14. MODAL SAHAM (Lanjutan) / *14. SHARE CAPITAL (Continued)*

Berdasarkan akta notaris Aulia Taufani, SH. No. 13 tanggal 8 September 2022 yang telah disahkan oleh keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia No AHU-0179034.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 9 September 2022, pemegang saham menyetujui:

Based on Dead of Aulia Taufani, SH. No 13 dated 8 September 2022 which was ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights number No AHU-0179034.AH.01.11. Tahun 2022 dated 9 September 2022, the general meeting of shareholders approves:

1. Perubahan nilai nominal per saham dari Rp 100 per lembar saham (dalam nilai Rupiah penuh) menjadi Rp 8 per lembar saham (dalam nilai Rupiah penuh).

   1. To change the par value of shares from Rp 100 per share (in full Rupiah amount) become Rp 8 per share (in full Rupiah amount).

2. Peningkatan modal dasar dari Rp 300.000 menjadi Rp 680.000.

   2. To increaase authorized capital from Rp 300,000 to become Rp 680,000.

3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 75.010 menjadi Rp 600.080 melalui pembagian dividen saham sebesar Rp 525.070 kepada pemegang saham.

   3. To increase issued and paid up capital from Rp 75,010 to become Rp 600,080 through distribution of share dividend amounting Rp 525,070 to the shareholders.

Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's authorized, issued and paid-up capital as of 31 December 2022 were as follows:

Modal dasar:		*Authorized capital:*
Jumlah saham	85,000,000,000 saham/shares	*Number of shares*
Nilai nominal per saham (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 8	*Par value per share (in full Rupiah amount)*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 680,000,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		*Issued and paid-up capital:*
Jumlah saham	75,010,000,000 saham/shares	*Number of shares*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 600,080,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2022 was as follows:

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham/ *Number of shares*	Jumlah nominal/ *Nominal value*	%
PT Harkatjaya Bumipersada	60,000,000,000	480,000	79.99
PT Adi Pratama Nusantara	15,000,000,000	120,000	20.00
Salween Investment Pte. Ltd., Singapura/Singapore	10,000,000	80	0.01
	75,010,000,000	600,080	100.00

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 13 Desember 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan per tahun buku 2021 sebesar Rp 120.016 sebagai cadangan wajib sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Based on the Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 13 December 2022, the shareholders of the Company has approved the appropriation of 2021 financial year retained earnings amounted to Rp 120,016 as mandatory reserve in accordance with the Company Law.

15. DIVIDEN / *15. DIVIDEND*

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 13 Desember 2022, pemegang saham telah menyetujui pembagian total dividen tunai sejumlah Rp 1.700.000 atau Rp 23 (dalam satuan Rupiah penuh) per saham biasa. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada bulan Desember 2022.

At the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 13 December 2022, the shareholders approved declaration of cash dividends with total dividend of Rp 1,700,000 or Rp 23 (in full Rupiah amount) per ordinary share. The cash dividend was paid in December 2022.

Berdasarkan akta notaris Aulia Taufani, SH. No. 13 tanggal 8 September 2022, pemegang saham menyetujui untuk pembagian dividen saham sejumlah Rp 525.070 atau sebanyak 65.633.750.000 saham baru dengan nilai saham Rp 8 per lembar.

Based on notary deed of Aulia Taufani, SH. No 13 dated 8 September 2022, the general meeting of shareholders approved to distributed share dividend of Rp 525,070 or 65,633,750,000 new shares with par value of share Rp 8 per share.

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *16. NON-CONTROLLING INTEREST*

	2022	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	194,843	198,858	232,825	240,366	*Balance at beginning of year*
Bagian atas pendapatan komprehensif tahun berjalan	44,397	(14,015)	(33,292)	73,026	*Share of comprehensive income for the year*
Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(69,351)	-	(675)	(80,575)	*Subsidiaries dividend paid to non-controlling interest*
Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan nonpengendali tanpa perubahan pengendalian	-	10,000	-	8	*Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*
Saldo akhir tahun	169,889	194,843	198,858	232,825	*Balance at end of year*

Pada tanggal 23 Desember 2021, Perseroan menjual 100.000 saham, dengan nilai nominal Rp 100.000 (dalam nilai Rupiah penuh), di PT Nusantara Elang Sejahtera (NES) kepada PT Elang Andalan Nusantara (EAN). Saham tersebut dijual senilai USD 13.500.000 atau setara Rp 193.712. Perseroan mengakui keuntungan sebesar Rp 183.712 yang dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya. Atas penjualan saham ini, kepemilikan Perseroan pada NES berkurang dari 70% menjadi 60%.

On 23 December 2021, the Company sold 100,000 shares, at par value of Rp 100,000 (in full Rupiah amount), in PT Nusantara Elang Sejahtera (NES) to PT Elang Andalan Nusantara (EAN). The shares were sold at total amount of USD 13,500,000 or equivalent with Rp 193,712. The Company recognized gain amounted to Rp 183,712 which was recorded as other equity component. As the result of the sale, the Company's ownership in NES was reduced from 70% to 60%.

Ringkasan informasi keuangan entitas anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material, dijabarkan berikut ini. Ringkasan informasi keuangan berikut ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

The summary of financial information of subsidiaries that has material non-controlling interest, is set out as follow. The summary of financial information as follow represents figures before intragroup elimination.

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan) / *16. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)*

	2022					
	Saldo awal tahun/ *Balance at beginning of year*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan nonpengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan non pengendali tanpa perubahan kendali/ *Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*	Saldo akhir tahun/ *Balance at end of year*	
PT Lestari Mitra Sembada	102,804	19,587	(63,750)	-	58,641	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	27,092	1,605	(5,100)	-	23,597	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	34,307	8,411	-	-	42,718	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	11,404	3,509	-	-	14,913	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	(54)	1,011	-	-	957	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	13,076	9,557	-	-	22,633	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Prima Mandala	6,214	717	(501)	-	6,430	*PT Prima Mandala*
Saldo akhir tahun	194,843	44,397	(69,351)	-	169,889	*Balance at end of year*

	2021					
	Saldo awal tahun/ *Balance at beginning of year*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan nonpengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan non pengendali tanpa perubahan kendali/ *Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*	Saldo akhir tahun/ *Balance at end of year*	
PT Lestari Mitra Sembada	111,602	(8,798)	-	-	102,804	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	28,984	(1,892)	-	-	27,092	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	34,713	(406)	-	-	34,307	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	12,907	(1,503)	-	-	11,404	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	166	(220)	-	-	(54)	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	4,179	(1,103)	-	10,000	13,076	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Prima Mandala	6,307	(93)	-	-	6,214	*PT Prima Mandala*
Saldo akhir tahun	198,858	(14,015)	-	10,000	194,843	*Balance at end of year*

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan) / *16. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)*

	2020					
	Saldo awal tahun/ *Balance at beginning of year*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan nonpengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan non pengendali tanpa perubahan kendali/ *Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*	Saldo akhir tahun/ *Balance at end of year*	
PT Lestari Mitra Sembada	125,241	(13,639)	-	-	111,602	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	32,478	(3,494)	-	-	28,984	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	36,009	(621)	(675)	-	34,713	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	15,756	(2,849)	-	-	12,907	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	448	(282)	-	-	166	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	8,610	(4,431)	-	-	4,179	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Prima Mandala	14,283	(7,976)	-	-	6,307	*PT Prima Mandala*
Saldo akhir tahun	232,825	(33,292)	(675)	-	198,858	*Balance at end of year*

	2019					
	Saldo awal tahun/ *Balance at beginning of year*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan non pengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Penjualan saham entitas anak kepada kepentingan non pengendali tanpa perubahan kendali/ *Sale of subsidiary's shares to non-controlling interest without a change in control*	Saldo akhir tahun/ *Balance at end of year*	
PT Lestari Mitra Sembada	145,737	44,504	(65,000)	-	125,241	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	41,520	(1,242)	(7,800)	-	32,478	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	22,099	13,910	-	-	36,009	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	12,846	7,710	(4,800)	-	15,756	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	219	229	-	-	448	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	14,478	(5,868)	-	-	8,610	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Sanggar Usaha Mandiri	(400)	392	-	8	-	*PT Sanggar Usaha Mandiri*
PT Prima Mandala	3,867	13,391	(2,975)	-	14,283	*PT Prima Mandala*
Saldo akhir tahun	240,366	73,026	(80,575)	8	232,825	*Balance at end of year*

17. PENDAPATAN / 17. REVENUE

Selama tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, tidak ada pendapatan dari pelanggan yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During 2022, 2021, 2020 and 2019, there was no revenue earned from any customer that exceeded 10% of total consolidated revenue.

	2022	2021	2020	2019	
Saat pengakuan pendapatan					***Timing of revenue recognition***
Produk dan layanan dialihkan pada waktu tertentu	4,270,320	1,269,409	1,122,410	6,395,136	*Product and services transferred at a point in time*
Layanan dialihkan sepanjang waktu	130,730	10,777	96,583	494,898	*Services transferred over time*
	4,401,050	1,280,186	1,218,993	6,890,034	

Pembelian dari pemasok yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian, terdiri dari :

Purchases from suppliers that exceeded 10% of total consolidated revenue, consist of:

	2022	2021	2020	2019	
Bioskop					*Cinema*
PT Omega Film	608,454	334,018	140,201	1,263,960	*PT Omega Film*

18. BEBAN OPERASIONAL / 18. OPERATING EXPENSES

	2022	2021	2020	2019	
Kompensasi karyawan	425,755	180,114	360,168	659,287	*Employees' compensation*
Perbaikan dan pemeliharaan	240,143	138,445	131,330	382,645	*Repairs and maintenance*
Utilitas	203,709	102,447	99,113	237,671	*Utilities*
Sewa	115,059	39,436	45,105	299,710	*Rental*
Perpajakan	90,361	31,022	39,436	133,387	*Taxes*
Jasa manajemen	46,989	11,666	6,814	52,041	*Management fees*
Perjalanan dinas dan akomodasi	41,127	10,709	16,289	44,905	*Travel and accommodation*
Keperluan kantor	27,742	9,915	19,774	53,440	*Office supplies*
Komunikasi	21,368	15,597	13,988	19,607	*Communication*
Asuransi	14,505	13,796	12,876	11,245	*Insurance*
Promosi	6,758	1,967	7,511	39,548	*Promotion*
Jasa profesional	5,891	2,419	5,219	22,429	*Professional fees*
Rugi penurunan nilai aset tetap	-	1,241	-	-	*Impairment loss of fixed assets*
Konsesi sewa	(27,016)	(141,988)	(51,257)	-	*Lease concession*
Lain-lain	21,510	8,998	13,746	41,465	*Miscellaneous*
	1,233,901	425,784	720,112	1,997,380	

Konsesi sewa merupakan potongan atas sewa ruangan yang diberikan oleh pemilik gedung kepada Grup karena penutupan sementara bioskop untuk mengikuti instruksi pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Grup menerapkan panduan praktis PSAK 73 untuk seluruh konsesi sewa yang memenuhi kondisi yang ditetapkan dan mengakui dampak atas konsesi sewa sebagai pengurang beban operasional.

Lease concession represents discount of space rental granted by building management to the Group due to temporary closure of cinemas as instructed by government to curb COVID-19 pandemic. The Group applied PSAK 73 practial expedient to all rent concessions that meet the conditions and recorded the impact of rent concession as reduction of operating expense.

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI / *19. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Perseroan dikendalikan oleh PT Harkatjaya Bumipersada (berbadan hukum di Indonesia), yang memiliki 79,99% saham Perseroan.

The Company is controlled by PT Harkatjaya Bumipersada (incorporated in Indonesia), which owns 79.99% of the Company's shares.

a. Penghasilan sewa dan pembelian barang / *a. Rental income and purchase of goods*

	2022	2021	2020	2019	
Penghasilan sewa:					*Rental income:*
Entitas sepengendali	1,391	29	684	4,703	*Entity under common control*
Pembelian barang dan jasa:					*Purchase of goods and services:*
Entitas sepengendali	584,701	188,020	83,245	1,642,864	*Entities under common control*

b. Kompensasi personil manajemen kunci / *b. Key management employees compensation*

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah seluruh komisaris, direktur dan manajemen senior yang membawahi departemen. Berikut ini mencerminkan kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci atas jasa yang diberikan dalam kapasitas mereka sebagai karyawan:

Key management includes all commissioners, directors and senior management incharge of department. The following reflects compensation paid or payable to key management individuals for services rendered in their capacity as employees:

	2022	2021	2020	2019	
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya					*Salaries, and other short-term benefits*
Direksi	15,056	2,790	5,759	11,893	*Board of Director*
Dewan komisaris	12,162	1,535	5,153	12,741	*Board of Commissioners*
Manajemen senior	6,902	1,927	2,260	3,142	*Senior management*
Jumlah	34,120	6,252	13,172	27,776	*Total*

	2022	2021	2020	2019	
Sebagai persentase dari beban kompensasi karyawan	8.01%	3.47%	3.66%	4.21%	*As a percentage from total employee cost*

c. Saldo akhir tahun yang timbul dari tagihan lainnya dan pembelian barang atau jasa. / *c. Year-end balances arising from other charges and purchase of goods or services.*

	2022	2021	2020	2019	
Piutang usaha dan piutang lainnya dari pihak-pihak berelasi					*Trade and other receivables from related parties*
Entitas sepengendali	115	7	7	1,254	*Entity under common control*
Pemegang saham	-	129	129	159	*Shareholders*
	115	136	136	1,413	
Sebagai persentase dari piutang usaha dan piutang lainnya	0.17%	0.38%	0.56%	0.97%	*As a percentage from trade and other receivables*
Uang muka untuk pembelian aset tetap dari pihak-pihak berelasi					*Advance payment for purchase of fixed assets from related parties)*
Entitas sepengendali (Catatan 23a)	50,750	69,000	117,000	152,750	*Entity under common control (Note 23a)*
Sebagai persentase dari uang muka untuk pembelian aset tetap	37.72%	39.82%	36.13%	53.30%	*As a percentage from advance payment for purchase of fixed assets*
Utang usaha dan utang lainnya kepada pihak-pihak berelasi					*Trade and other payables to related parties*
Entitas sepengendali	47,656	75,590	26,725	73,475	*Entities under common control*
Sebagai persentase dari utang usaha dan utang lainnya	10.77%	16.59%	12.36%	12.50%	*As a percentage from trade and other payables*

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan) / *19. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)*

c. Saldo akhir tahun yang timbul dari tagihan lainnya dan pembelian barang atau jasa (lanjutan):

Utang lain-lain pada pihak-pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai liabilitas lancar.

c. Year-end balances arising from other charges and purchase of goods or services (continued):

Other payables from related parties will be settled within one year, therefore, they are presented as current liabilities.

d. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

d. The related parties and the nature of relationship are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*
PT Megatech Engineering	Pembelian peralatan bioskop, sewa gedung, dan penyewaan ruang untuk video game arcade/ *Purchase of cinema equipment, office rental, and revenue sharing rental for video arcade game.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Multi Interbuana Teknindo	Pemeliharaan peralatan bioskop/ *Cinema maintenance service.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Delta Raya Sejahtera	Manajemen operasional pada segment makanan dan minuman dan pasokan material makanan dan minuman/ *Operational management of food and beverages segment and supply of food and beverages material.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Delta Raya Sentosa	Pembelian material makanan dan minuman/ *Purchase of food and beverages material.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Citrabersama Mututama	Sewa gedung dan sewa mobil/ *Building rental and car rental.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Eka Jaya Agung	Sewa gedung, jasa pengelolaan dan utilitas/ *Building rental for cinema, service charge and utilities.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Bioskop Metropole	Sewa gedung, jasa pengelolaan dan utulitas/ *Building rent, service charge and utilities.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Bumtraco Agung	Sewa mobil/ *Car rental.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
Harris Lasmana	Sewa gedung dan jasa pengelolaan/ *Building rental, car rental and service charge.*	Pengendali PT Adi Pratama Nusantara/ *Party who is controlling PT Adi Pratama Nusantara.*
Dewan Komisaris dan Direksi/ *Board of Commissioners and Directors*	Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya/ *Salaries and other short-term benefits.*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel.*

20. LABA PER SAHAM / *20. EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba bersih per saham adalah berdasarkan data sebagai berikut:

The computation of basic earnings per share are based on the following data:

	2022	2021	2020	2019	
Laba (rugi) untuk perhitungan laba per saham dasar	460,384	(351,315)	(545,744)	1,201,312	*Profit (loss) for computations of basic earnings per share*
Jumlah saham biasa beredar sebelum pemecahan nilai nominal saham dan pembagian dividen saham	750,100,000	750,100,000	750,100,000	750,100,000	*Number of ordinary shares before stock split and distribution of share dividend*
Jumlah tambahan saham karena pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham menjadi Rp 8 (dalam nilai penuh) per lembar saham (Catatan 14)	8,626,150,000	8,626,150,000	8,626,150,000	8,626,150,000	*Additional shares issued due to the stock split (change of nominal value per share from Rp 100 to Rp 8) (Note 14)*
Pembagian dividen saham (Catatan 14)	65,633,750,000	65,633,750,000	65,633,750,000	65,633,750,000	*Distribution of share dividend (Note 14)*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar untuk perhitungan laba bersih per saham dasar (dalam nilai penuh)*	75,010,000,000	75,010,000,000	75,010,000,000	75,010,000,000	*Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share (in full amount)**
Laba (rugi) bersih per saham (dalam nilai penuh)	6.14	(4.68)	(7.28)	16.02	*Basic earnings (loss) per share (in full amount)*

Perseroan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa dilusian pada tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019.

The Company has no dilutive potential ordinary shares in 2022, 2021, 2020 and 2019.

* Disesuaikan atas dampak pemecahan nilai nominal saham dan pembagian dividen saham (Catatan 14)

** Adjusted for the impact of stock split and distribution of share dividend (Note 14)*

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN / *21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

Instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup diharapkan dapat terealisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan jika pelanggan atau pihak rekanan dari instrumen keuangan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit Grup pada prinsipnya timbul dari piutang usaha dari pelanggan.

Nilai tercatat aset keuangan merupakan nilai maksimum risiko kredit.

Financial instruments

The Group's financial assets and liabilities are expected to be realized or settled in the near term. Therefore, their carrying amount approximate their fair values.

Financial risk management

In performing its operating, investing and financing activities, the Group faces financial risks such as credit risk, liquidity risk and market risk.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss in the event that a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations. The Group's credit risk principally arises from trade receivables from customers.

The carrying amounts of financial assets represent the maximum credit exposure.

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. *Credit Risk (Continued)*

	Nilai tercatat/ *Carrying value*				
	2022	2021	2020	2019	
Kas di bank dan setara kas	2,013,599	1,072,133	560,908	1,446,834	*Cash in banks and cash equivalents*
Piutang usaha dan piutang lainnya	69,346	35,440	24,118	145,384	*Trade and other receivables*
Dana jaminan (bagian dari aset tidak lancar lainnya)	77,968	75,212	74,961	73,737	*Refundable deposits (part of other non-current assets)*
	2,160,913	1,182,785	659,987	1,665,955	

Piutang usaha

Eksposur risiko kredit Grup dipengaruhi terutama oleh karakteristik individu dari setiap pelanggan. Namun, manajemen juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit pelanggannya, termasuk risiko gagal bayar yang terkait dengan industri tempat pelanggan beroperasi.

Grup meminimalkan eksposur terhadap risiko kredit dari piutang usaha dengan memastikan bahwa penjualan produk dilakukan hanya kepada pelanggan yang layak mendapatkan kredit dengan rekam jejak yang terbukti atau riwayat kredit yang baik, menetapkan batasan kredit yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Eksposur juga dibatasi lebih lanjut dengan mewajibkan syarat pembayaran tidak lebih dari 30 hari dan dengan secara aktif memberlakukan penagihan dari pelanggan sebelum tanggal jatuh tempo.

Trade receivables

The Group's exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. However, management also considers the factors that may influence the credit risk of its customer base, including the default risk associated with the industry in which customers operate.

The Group minimizes its exposure to credit risk of trade receivables by setting policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history, setting credit limit for customers and monitor the exposure associated with these restrictions. The exposure is also further limited by mandating payment terms of no longer than 30 days and by actively enforcing collection from customers prior to the due date.

Kas dan setara kas

Kas di bank dan setara kas Grup ditempatkan di bank yang bereputasi baik yang tunduk terhadap peraturan yang ketat, oleh sebab itu, eskposur terhadap kerugian diminimalkan.

Cash and cash equivalents

The Group's cash in banks and cash equivalents are deposited at reputable banks that are subject to tight regulations, therefore, the exposure to loss is minimized.

b. Risiko Likuiditas

b. *Liquidity Risk*

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Grup memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Group monitor their liquidity needs by closely monitoring their cash outflows due to day to day operations.

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

b. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

b. *Liquidity Risk (Continued)*

Berikut ini adalah arus kas kontraktual liabilitas keuangan:

The following is the contractual maturities of financial liabilities:

	Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*					
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Desember 2022						***31 December 2022***
Utang usaha dan utang lainnya	442,454	442,454	442,454	-	-	*Trade and other payables*
Liabilitas sewa	1,622,968	2,660,560	199,652	1,114,989	1,345,919	*Lease liabilities*
Pinjaman bank	1,697,415	1,728,547	1,728,547	-	-	*Bank Loan*
	3,762,837	4,831,561	2,370,653	1,114,989	1,345,919	

	Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*					
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Desember 2021						***31 December 2021***
Utang usaha dan utang lainnya	455,446	455,446	455,446	-	-	*Trade and other payables*
Liabilitas sewa	1,677,270	2,879,298	209,273	1,592,218	1,077,807	*Lease liabilities*
	2,132,716	3,334,744	664,719	1,592,218	1,077,807	

	Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*					
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Desember 2020						***31 December 2020***
Utang usaha dan utang lainnya	216,166	216,166	216,166	-	-	*Trade and other payables*
Liabilitas sewa	1,372,812	2,530,961	188,757	756,349	1,585,855	*Lease liabilities*
	1,588,978	2,747,127	404,923	756,349	1,585,855	

	Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*					
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Desember 2019						***31 December 2019***
Utang usaha dan utang lainnya	587,754	587,754	587,754	-	-	*Trade and other payables*

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan kurs dan tingkat bunga akan mempengaruhi penghasilan Grup atau nilai dari instrumen keuangannya. Tujuan manajemen risiko pasar adalah untuk menjaga eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, sementara mengoptimalisasi imbal hasil.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Net eksposur Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang asing sebagai berikut

Dalam Dolar AS	2022	2021	2020	2019
Aset	13,550,408	13,508,457	9,757	7,071

Pada tanggal pelaporan, saldo aset moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku yaitu Rp 15.731/USD pada tanggal 31 Desember 2022, Rp 14.269/USD pada tanggal 31 Desember 2021, Rp 14.105/USD pada tanggal 31 Desember 2020, Rp 13.901/USD pada tanggal 31 Desember 2019.

Menguatnya/melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS akan menyebabkan kenaikan (penurunan) ekuitas dan laba atau rugi setelah pajak penghasilan. Analisa ini didasarkan pada perbedaan kurs Dolar AS yang manajemen pertimbangkan akan terjadi pada tanggal pelaporan. Analisa ini mengasumsikan semua variable lainnya konstan dan tidak memperhitungkan pengaruh dari perkiraan penjualan dan pembelian.

Analisis sensitivitas

Grup menilai penguatan/pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah pada 31 Desember 2022 tidak akan berdampak signifikan terhadap ekuitas dan laba setelah pajak penghasilan.

Financial risk management (Continued)

c. Market Risk

Market risk is the risk that changes in foreign exchange rates and interest rates will affect the Group's income or the value of its financial instruments. The objective of market risk management is to maintain market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

Currency risk

The Group's net exposure to currency risk is as follows:.

In US Dollar	2022	2021	2020	2019
Assets	13,550,408	13,508,457	9,757	7,071

At reporting dates, balances of monetary assets denominated in currencies other than Rupiah are translated into Rupiah using the prevailing exchange rates, which were as of 31 December 2022: Rp 15,731/USD, 31 December 2021: Rp 14,269/USD, 31 December 2020: Rp 14,105/USD,31 December 2019: Rp 13,901/USD.

A strengthening/weakening of the Rupiah against the US Dollar would have increased (decreased) equity and profit or loss after income tax. This analysis is based on US Dollar rate variances that management considers as being reasonably possible at the reporting date. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant and ignores any impact of forecasted sales and purchases.

Sensitivity analysis

The Group assessed that the strengthening/weakening of US Dollar against Indonesian Rupiah at 31 December 2022 would not have significant to equity and profit after income tax .

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

c. Risiko Pasar (Lanjutan)

Analisis sensitivitas (Lanjutan)

Risiko tingkat bunga

Grup memiliki pinjaman bank dengan suku bunga tetap, dan oleh karena itu Grup terekspos risiko atas perubahan nilai wajar pinjaman bank. Meski demikian, pinjaman bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan jangka waktu pinjaman bank kurang dari 1 tahun sehingga dampak perubahan nilai wajar tidak signifikan.

Manajemen risiko modal

Grup mengelola modal dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan mendukung kemampuannya untuk memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal efektif. Tujuan ini dicapai dengan menyesuaikan jumlah dividen dan mengoptimalisasi tingkat utang.

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Financial risk management (Continued)

c. Market Risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

Interest rate risk

The Group has fixed-rate bank loans, and thus the Group is exposed to risk of change in fair value of the loans. However, loans are measured at amortized cost and bank loans term are within 1 year, so that changes in fair value do not significant.

Capital risk management

The Group manages capital with the objective of being able to continue as a going concern and sustaining its ability to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, as well as maintaining an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. This objective is achieved by adjusting the amounts of dividends and by optimizing debt levels.

22. SEGMEN OPERASI

Grup mengkategorikan kegiatan usahanya berdasarkan produk utama, yaitu film, makanan dan minuman, iklan, *digital platform* dan lainnya. Tidak terdapat penjualan antar segmen selama tahun berjalan.

22. OPERATING SEGMENT

The Group categorizing its business based on key products, namely movie, food and beverages, advertisement, digital platform and others. There is no inter-segment sales during the year.

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Informasi mengenai segmen usaha Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 disajikan sebagai berikut:

The information concerning the Group business segments for years ended 31 December 2022, 2021, 2020, and 2019 are presented as follows:

	2022						
	Film/ *Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	2,700,828	1,430,844	130,730	116,848	21,800	4,401,050	*External customers*
Beban dan biaya operasi:							*Operating cost and expenses:*
Beban	(1,350,414)	(394,622)	-	(27,752)	(1,510)	(1,774,298)	*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(760,236)	(240,622)	(35,866)	(28,518)	(168,659)	(1,233,901)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(625,985)	(29,705)	-	(664)	(12,359)	(668,713)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-	*Other income*
Beban lainnya	-	-	-	-	(7,130)	(7,130)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	50,338	-	-	-	-	50,338	*Finance income*
Beban keuangan	(131,871)	-	-	-	-	(131,871)	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	(117,340)	765,895	94,864	59,914	(167,858)	635,475	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	24,178	(157,813)	(19,547)	(12,345)	34,587	(130,940)	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**(93,162)**	**608,082**	**75,317**	**47,569**	**(133,271)**	**504,535**	***Profit (loss)***

	2021						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	829,548	405,371	10,777	30,954	3,536	1,280,186	*External customers*
Beban dan biaya operasi:	(414,974)	(117,481)	-	(9,087)	(229)	(541,771)	*Operating cost and expenses:*
Beban							*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(234,543)	(72,400)	(29,938)	(16,614)	(72,289)	(425,784)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(625,102)	(34,835)	-	(550)	(8,972)	(669,459)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	3,347	3,347	*Other income*
Beban lainnya	-	-	-	-	(2,532)	(2,532)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	15,188	-	-	-	-	15,188	*Finance income*
Beban keuangan	(136,742)	-	-	-	-	(136,742)	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	(566,625)	180,655	(19,161)	4,703	(77,139)	(477,567)	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	132,606	(42,278)	4,484	(1,101)	18,053	111,764	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**(434,019)**	**138,377**	**(14,677)**	**3,602**	**(59,086)**	**(365,803)**	***Profit (loss)***

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

	2020						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian / *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	774,411	323,122	96,583	17,459	7,418	1,218,993	*External customers*
Beban dan biaya operasi:							*Operating cost and expenses:*
Beban	(387,205)	(112,809)	-	(4,400)	(713)	(505,127)	*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(457,677)	(139,039)	(35,866)	(21,686)	(65,844)	(720,112)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(601,643)	(35,184)	-	(546)	(11,329)	(648,702)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	70,928	70,928	*Other income*
Beban lainnya	-	-	-	-	(5,730)	(5,730)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	37,718	-	-	-	-	37,718	*Finance income*
Beban keuangan	(134,044)	-	-	-	-	(134,044)	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	(768,440)	36,090	60,717	(9,173)	(5,270)	(686,076)	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	120,069	(5,639)	(9,486)	1,433	823	107,200	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**(648,371)**	**30,451**	**51,231**	**(7,740)**	**(4,447)**	**(578,876)**	***Profit (loss)***

	2019						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	4,449,955	1,799,499	494,898	114,732	30,950	6,890,034	*External customers*
Beban dan biaya operasi:							*Operating cost and expenses:*
Beban	(2,224,953)	(519,856)	-	(30,778)	(2,506)	(2,778,093)	*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1,304,116)	(56,889)	(5,978)	(9,377)	(621,020)	(1,997,380)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(392,330)	(30,700)	-	(326)	(2,009)	(425,365)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	30,481	30,481	*Other income*
Beban lainnya	-	-	-	-	(66,046)	(66,046)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	44,333	-	-	-	-	44,333	*Finance income*
Beban keuangan	-	-	-	-	-	-	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	572,889	1,192,054	488,920	74,251	(630,150)	1,697,964	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(142,898)	(297,339)	(121,953)	(18,521)	157,181	(423,530)	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**429,991**	**894,715**	**366,967**	**55,730**	**(472,969)**	**1,274,434**	***Profit (loss)***

Aset dan liabilitas segmen / ***Segment assets and liabilities***

	31 Desember/*December* 2022						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/*Food and Beverages*	Iklan/ *Advertising*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen	3,766,470	203,099	-	3,823	62,708	4,036,100	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						2,723,446	*Unallocated segment assets*
						6,759,546	
Liabilitas segmen	1,700,280	399,713	-	137,388	7	2,237,388	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						1,869,509	*Unallocated segment liabilities*
						4,106,897	

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Aset dan liabilitas segmen (Lanjutan) / ***Segment assets and liabilities (Continued)***

	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/*Food and Beverages*	Iklan/ *Advertising*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember/*December* 2021							
Aset segmen	4,241,526	181,557	-	637	44,296	4,468,016	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						1,949,725	*Unallocated segment assets*
						6,417,741	
Liabilitas segmen	1,756,500	411,732	-	132,956	2,108	2,303,296	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						157,882	*Unallocated segment liabilities*
						2,461,178	
31 Desember/*December* 2020							
Aset segmen	4,308,563	216,832	-	1,173	24,404	4,550,972	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						1,463,085	*Unallocated segment assets*
						6,014,057	
Liabilitas segmen	1,317,830	306,708	-	124,493	2,138	1,751,169	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						145,770	*Unallocated segment liabilities*
						1,896,939	
31 Desember/*December* 2019							
Aset segmen	3,181,884	246,843	-	1,268	19,186	3,449,181	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						2,277,162	*Unallocated segment assets*
						5,726,343	
Liabilitas segmen	562,971	50,288	-	124,033	5,394	742,686	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						280,882	*Unallocated segment liabilities*
						1,023,568	

Jumlah yang dilaporkan kepada Direksi sehubungan dengan jumlah aset dan liabilitas diukur dengan cara yang konsisten dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Aset dan liabilitas ini dialokasikan berdasarkan segmen operasi.

The amount provided to the Directors with respect to assets and liabilities are measured in a manner consistent with that of the financial statements. These assets and liabilities are allocated based on the operating segment.

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Aset dan liabilitas segmen (Lanjutan) / ***Segment assets and liabilities (Continued)***

Rekonsiliasi aset segmen terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut: / *Reportable segments' assets are reconciled to total assets as follows:*

	2022	2021	
Aset segmen untuk segmen yang dilaporkan	4,036,100	4,468,016	*Segment assets for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Kas dan setara kas	2,048,962	1,089,780	*Cash and cash equivalents* -
- Piutang usaha dan piutang lainnya	69,346	35,440	*Trade and other receivables* -
- Uang muka dan beban dibayar di muka	21,411	32,123	*Advances and prepayments* -
- Aset tetap	2,742	8,184	*Fixed assets* -
- Uang muka untuk pembelian aset tetap	134,555	173,280	*Advance payment for purchase of fixed assets* -
- Klaim pengembalian pajak	129,456	140,540	*Claims for tax refund* -
- Aset pajak tangguhan	218,815	382,815	*Deferred tax assets* -
- Aset tidak lancar lainnya	98,159	87,563	*Other non-current assets* -
Jumlah aset menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**6,759,546**	**6,417,741**	*Total assets per consolidated statement of financial position*

Rekonsiliasi liabilitas segmen terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut: / *Reportable segments' liabilities are reconciled to total liabilities as follows:*

	2022	2021	
Liabilitas segmen untuk segmen yang dilaporkan	2,237,388	2,303,296	*Segment liabilities for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Utang pajak penghasilan	7,681	-	*Income tax payable* -
- Utang pajak lainnya	75,649	62,461	*Other taxes payable* -
- Pinjaman bank	1,697,415	-	*Bank loans* -
- Kewajiban imbalan kerja	88,764	95,421	*Employee benefits obligation* -
Jumlah liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**4,106,897**	**2,461,178**	*Total liabilities per consolidated statement of financial position*

Rekonsiliasi aset segmen terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut: / *Reportable segments' assets are reconciled to total asets as follows:*

	2020	2019	
Aset segmen untuk segmen yang dilaporkan	4,550,972	3,449,181	*Segment assets for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Kas dan setara kas	573,854	1,494,838	*Cash and cash equivalents* -
- Piutang usaha dan piutang lainnya	24,118	145,384	*Trade and other receivables* -
- Aset tetap	9,499	24,371	*Fixed assets* -
- Uang muka dan beban dibayar di muka	29,076	62,064	*Advances and prepayments* -
- Uang muka untuk pembelian aset tetap	323,802	286,578	*Advance payment for purchase of fixed assets* -
- Klaim pengembalian pajak	137,832	8,273	*Claims for tax refund* -
- Aset pajak tangguhan	274,305	165,579	*Deferred tax assets* -
- Aset tidak lancar lainnya	90,599	90,075	*Other non-current assets*-
Jumlah aset menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**6,014,057**	**5,726,343**	*Total assets per consolidated statement of financial position*

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Segmen aset dan liabilitas (Lanjutan) / ***Segment assets and liabilities (Continued)***

Rekonsiliasi liabilitas segmen terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut: / *Reportable segments' liabilities are reconciled to total liabilities as follows:*

	2020	2019	
Liabilitas segmen untuk segmen yang dilaporkan	1,751,169	742,686	*Segment liabilities for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Utang pajak penghasilan	-	31,949	*Income tax payable* -
- Utang pajak lainnya	22,025	142,776	*Other taxes payable* -
- Kewajiban imbalan kerja	123,745	106,157	*Employee benefits obligation* -
Jumlah liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**1,896,939**	**1,023,568**	*Total liabilities per consolidated statement of financial position*

Informasi Geografis / ***Geographical Information***

Tier 1			Tier 2		Tier 3	
Balikpapan	Manado	Tanjung	Banjarmasin	Padang	Ambon	Pekalongan
Bandung	Medan	Pinang	Bengkulu	Palangkaraya	Baganbatu	Rantau Rapat
Cilegon	Palembang	Tarakan	Bogor	Palu	Batam	Singkawang
Cirebon	Pekanbaru	Yogyakarta	Cikarang	Pangkal Pinang	Bekasi	Sumedang
Dumai	Samarinda		Denpasar	Pontianak	Garut	Tasikmalaya
Jakarta	Semarang		Gresik	Sidoarjo	Gorontalo	
Jayapura	Solo		Jambi	Sorong	Jember	
Kediri	Surabaya		Kupang	Ternate	Karawang	
Makasar	Tangerang		Lampung		Kisaran	
Malang			Monokwari		Mataram	

	2022				
	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Total	
Pendapatan					*Revenue*
Film	1,827,802	572,121	300,905	2,700,828	*Movie*
Makanan dan minuman	968,924	294,360	167,560	1,430,844	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	5,256	762	142	6,160	*Other revenue attributable to each cinema location*
	2,801,982	**867,243**	**468,607**	**4,137,832**	

	2021				
	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Total	
Pendapatan					*Revenue*
Film	564,443	177,092	88,013	829,548	*Movie*
Makanan dan minuman	266,860	90,038	48,473	405,371	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	1,271	153	54	1,478	*Other revenue attributable to each cinema location*
	832,574	**267,283**	**136,540**	**1,236,397**	

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Informasi Geografis (Lanjutan) / ***Geographical Information (Continued)***

	2020				
	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Total	
Pendapatan					*Revenue*
Film	531,452	158,243	84,716	774,411	*Movie*
Makanan dan minuman	220,188	65,049	37,885	323,122	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	1,850	66	55	1,971	*Other revenue attributable to each cinema location*
	753,490	**223,358**	**122,656**	**1,099,504**	

	2019				
	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Total	
Pendapatan					*Revenue*
Film	3,157,356	816,619	475,980	4,449,955	*Movie*
Makanan dan minuman	1,277,266	318,322	203,911	1,799,499	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	8,546	642	374	9,562	*Other revenue attributable to each cinema location*
	4,443,168	**1,135,583**	**680,265**	**6,259,016**	

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING / *23. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

Grup memiliki perjanjian eksploitasi teatrikal dengan pemilik dan importir film yang memasok film ke bioskop yang dimiliki dan dioperasikan oleh Grup. Perjanjian ini bersifat non-eksklusif dan dibuat untuk setiap judul film dengan mekanisme pembagian pendapatan sebesar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan sesuai ketentuan pajak daerah. Perseroan pemilik dan importir film tersebut, diantaranya adalah, PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film dan PT Omega Film.

The Group has a theatrical exploitation agreement with the owners and importers of films to supply films to cinemas owned and operated by the Group. This agreement is non-exclusive and shall be made for each title of the film with a revenue sharing mechanism of 50% of total ticket sales after deducted by entertainment tax under regional tax law. The Companies who own and import the films, among others, are PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film and PT Omega Film.

Grup juga memiliki perjanjian-perjanjian penting lainnya, yaitu:

The Group also has others significant agreements with:

a. PT Megatech Engineering, Grup memiliki dua perjanjian, sebagai berikut:
   - Perjanjian sewa pada tanggal 2 Januari 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 28 Desember 2018. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan perjanjian ini, PT Megatech Engineering antara lain diwajibkan untuk menyediakan pembayaran sewa untuk ruang *arcade game* yang disewa di ruang bioskop Grup. Pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari penjualan kotor *video/game arcade* di bioskop Grup. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah pendapatan sewa yang diterima Grup masing-masing sebesar Rp 1.391, Rp 29, Rp 684 dan Rp 4.703 Perjanjian ini secara otomatis akan diakhiri jika sewa antara Grup dan pesewa diakhiri.

a. PT Megatech Engineering, Group has two agreements, as follows:
   - *Lease agreement dated 2 January 2017, as amended on 28 December 2018. This agreement is valid until 31 December 2023. Pursuant to this agreement, PT Megatech Engineering is required to, among others, provide payment of lease for the arcade game room rented within the space of the Group's cinemas. The lease payment is in the amount of 35% from gross sales of video/arcade games in the Group cinema. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total rental income received by the Group were Rp 1,391, Rp 29, Rp 684 and Rp 4,703 , respectively. This agreement will automatically be terminated if the lease between the Group and the lessor is terminated.*

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

- Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini kewajiban PT Megatech Engineering, antara lain: (i) menyediakan peralatan bioskop berdasarkan pesanan Grup; (ii) mengirimkan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan, dan (iii) melakukan pemasangan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan. Besaran imbalan mengacu kepada negoisasi kedua belah pihak, yang akan dimasukan ke dalam tagihan yang diterbitkan oleh PT Megatech Engineering. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing besar Rp 81.875, Rp 112.681, Rp 303.274 dan Rp 942.895 Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika salah satu pihak, diantaranya, (i) dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan usaha, (ii) tidak dapat melakukan pembayaran atau (iii) berhenti melakukan bisnis utamanya atau asetnya disita.

b. PT Multi Interbuana Teknindo (MIT), Perjanjian Kerjasama tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, MIT berkewajiban untuk, antara lain, memberikan jasa perawatan peralatan bioskop di lokasi yang telah ditentukan dan melakukan pemeriksaan setiap peralatan bioskop yang sudah diperbaiki berdasarkan permintaan Grup. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah imbalan yang ditagih ke Grup untuk jasa yang diterima berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 47.695, Rp 41.267, Rp 28.293 dan Rp 76.817.

c. PT Delta Raya Sejahtera, Perjanjian Memasok tanggal 26 April 2017. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahun berikutnya, kecuali diputus lebih dini atau tidak diperpanjang oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan perjanjian ini, kewajiban PT Delta Raya Sejahtera, antara lain, menyediakan produk makanan dan minuman berdasarkan permintaan Grup. Suatu pihak dapat mengakhiri perjanjian jika (i) pihak lain menjadi bangkrut atau pailit atau menjalani proses serupa atau (ii) pihak yang gagal bayar melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak gagal bayar. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 326.246 Rp 49.974, Rp 130.836 and Rp 443.950.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

- *Cooperation of Sale and Purchase and Installation of Cinema Equipment Agreement dated 12 April 2017. Pursuant to this agreement, PT Megatech Engineering is required to, among others: (i) provide cinema equipment based on the Group's order (ii) deliver the ordered cinema equipment at the designated locations, and (iii) install the cinema equipment at the designated locations. The fee refers to negotiations between both parties, which then will be included in the invoices issued by PT Megatech Engineering. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total purchases under this agreement were amounted to Rp 81,875, Rp 112,681, Rp 303,274 and Rp 942,895, respectively. Either party may at any time immediately terminate this agreement, if either party, among others, (i) is in the process of voluntary liquidation other than for the purposes of reconstruction or mergers, (ii) is unable to make any payments or (iii) ceases to conduct its main business or its assets are confiscated.*

b. *PT Multi Interbuana Teknindo (MIT), Cooperation Agreement dated 12 April 2017. Pursuant to this agreement, MIT is required to, among others, provide cinema equipment maintenance services at the designated locations and inspect each of cinema equipment that has been serviced based on the Grup's request. This agreement is valid from 1 January 2016 until one of the parties terminates the agreement. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total fees charged to the Group for services received under this agreement were amounted to Rp 47,695, Rp 41,267, Rp 28,293 and Rp 76,817, respectively.*

c. *PT Delta Raya Sejahtera, Supply Agreement dated 26 April 2017. The agreement is valid until 31 December 2017 and will be automatically renewed for subsequent period of one year each, unless terminated earlier or not extended by any of the parties with prior written notification. Pursuant to this agreement, PT Delta Raya Sejahtera is required to, among others, provide the supply of food and beverage products based on request by the Group. A party may terminate the agreement if (i) the other party becomes bankrupt or insolvent or undergoes similar proceedings or (ii) the defaulting party breaches its obligation under this agreement and does not remedy of such breach within 14 days after receiving notice from the non-defaulting party. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total purchases under this agreement were amounted to Rp 326,246, Rp 49,974, Rp 130,836 and Rp 443,950, respectively.*

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

d. PT Delta Raya Sentosa, Perjanjian Memasok tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PT Delta Raya Sentosa berkewajiban untuk memasok produk makanan dan minuman kepada Grup. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan perpanjangan secara otomatis. Nilai perjanjian ini ditentukan berdasarkan pada faktur yang diterbitkan oleh PT Delta Raya Sentosa. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 119.631, Rp 19.705, Rp 32.892 dan Rp 167.063.

d. PT Prakarsa Gunawan dan Sons (PGS), Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PGS diwajibkan untuk menyerahkan setiap dan seluruh hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan Grup. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai diakhiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini. Nilai perjanjian kerjasama ini sesuai dengan nilai masing-masing invoice pembangunan bioskop yang disetujui oleh para pihak. Di tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019, jumlah imbalan yang ditagih ke Grup untuk jasa yang diterima berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 65.559, Rp 70.666, Rp 383.150 dan Rp 879.089.

d. PT Delta Raya Sentosa, Supply Agreement dated 26 April 2017. Based on this agreement, PT Delta Raya Sentosa is obliged to supply food and beverage products to the Group. This agreement is valid until 31 December 2017 with automatic extension. The value of this agreement is determined based on the invoice issued by PT Delta Raya Sentosa. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total purchases under this agreement were amounted to Rp 119,631, Rp 19,705, Rp 32,892 and Rp 167,063, respectively.

e. PT Prakarsa Gunawan and Sons (PGS), Cinema Development Cooperation Agreement dated 12 April 2017. Based on this agreement, PGS is required to deliver any and all development results in accordance with the provisions of this agreement and in a form that satisfies the Group. This agreement is valid from 1 January 2016 until terminated by one of the parties of this agreement. The value of this cooperation agreement is in accordance with the value of each cinema construction invoice agreed by the parties. In 2022, 2021, 2020 and 2019, total fees charged to the Group for services received under this agreement were amounted to Rp 65,559, Rp 70,666, Rp 383,150 and Rp 879,089, respectively.

24. DAMPAK COVID-19 / *24. IMPACT OF COVID-19*

Pada tahun 2020 dan 2021, wabah pandemi COVID-19 dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia untuk mengurangi penyebaran pandemi memiliki dampak yang signifikan kepada Grup. Tindakan-tindakan tersebut mengharuskan Grup untuk menutup bioskopnya di berbagai lokasi selama enam sampai sembilan bulan sepanjang tahun 2020 dan sekitar dua setengah bulan di pertengahan 2021. Situasi ini berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Grup.

Manajemen telah mengambil beberapa tindakan-tindakan berikut untuk menekan biaya, mengoptimalkan arus kas Grup dan menjaga likuiditas:

- Pembatalan rencana pembagian dividen tahunan;
- Negosiasi ulang dengan pesewa (pemilik mal) untuk pembebasan biaya sewa dan pengurangan biaya jasa;
- Pemotongan gaji karyawan;
- Menahan perpanjangan kontrak karyawan, dan merekrut karyawan baru hanya untuk menggantikan karyawan yang berhenti;
- Penundaan belanja modal untuk proyek baru;
- Mengurangi aktivitas pemasaran, dan

In 2020 and 2021, the outbreak of the COVID-19 pandemic and the measures adopted by Indonesian's central and regional governments to mitigate the pandemic's spread have significantly impacted the Group. These measures required the Group to close its cinemas in various locations for periods of six to nine months during 2020 and approximately two and half months in mid-2021. This situation has negatively impacted the Group's financial performance.

Management has taken the following mitigating actions to reduce costs, optimise the Group's cash flow and preserve liquidity:

- *Cancellation of planned annual dividend;*
- *Renegotiation with landlords (mall owners) to waive rental fee and to reduce service charge;*
- *Employees' salary cuts;*
- *Holding back renewal of employee contracts, and hiring new employees only to replace resigned employees;*
- *Postponement of capital expenditure for new projects;*
- *Reducing marketing activity and,*

24. DAMPAK COVID-19 (LANJUTAN) / *24. IMPACT OF COVID-19 (Continued)*

- Meningkatkan efisiensi pengeluaran pada beban umum dan administrasi.

Selama tahun 2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia melonggarkan pembatasan terkait COVID-19 untuk operasional bioskop. Bioskop diinzinkan untuk beroperasi pada kapasitas penuh mulai dari tanggal 24 Mei 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah pusat mencabut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Grup mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4.401.050.

Masih terdapat ketidakpastian tentang bagaimana wabah COVID-19 berdampak pada bisnis Grup di masa depan dan minat konsumen untuk kembali ke bioskop. Oleh karena itu, manajemen telah membuat beberapa skenario yang berbeda. Asumsi dibuat berdasarkan perkiraan terhadap dampak pembatasan dan peraturan terkait mitigasi COVID-19 dan tingkat permintaan konsumen yang diharapkan.

Selain itu, melihat perkembangan positif situasi COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia, manajemen yakin bahwa *pipeline* film dari Amerika Serikat akan dibuka kembali untuk film *box office* besar, dan pada saat yang sama kepercayaan masyarakat untuk mengunjungi bioskop di Indonesia akan pulih kembali. Oleh karena itu, manajemen optimistis industri bioskop akan berangsur pulih di masa mendatang.

- *Increasing efficiency of spending in general and administrative expenses.*

During 2022, Indonesian's central and regional government has significantly loosened the COVID-19 restriction for cinema operation. Cinemas were permitted to operate at full capacity started from 24 May 2022. On 30 December 2022, central government revoked PPKM (Community Activities Restrictions Enforcement) in Indonesia. Therefore, during 2022 the Group was able to record revenue of Rp 4,401,050.

There is still uncertainty over how the outbreak will impact the Group's business in future periods and customer demand for cinema visits. Management has therefore modelled several different scenarios. The assumptions modelled are based on the estimated potential impact of COVID-19 restrictions and regulations and expected levels of consumer demand.

Furthermore, looking at recent positive development of COVID-19 situation in United States and Indonesia, management believes that film pipeline from United States would be re-opened for big box office movies, and at the same time public confidence in Indonesia to visit cinema would be restored. Therefore, management is optimistic that the cinema industry will steadily recover in the future.

25. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH / *25. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION*

Rekonsiliasi pergerakan liabilitas sewa terhadap arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of movement of lease liabilities to cash flow arising from financing activities are as follows:

	2022								
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas keluar-bersih/ *Net cash out-flows*	Kontrak sewa baru/*New lease contracts*	Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing/ *Loss (gain) on foreign currency*	Konsesi sewa diterima/ *Lease concession received*	Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya/ *overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*	Pergerakan utang bunga/ *Interest payable movement*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas sewa	1,677,270	(172,518)	21,997	7,823	(27,016)	(15,744)	131,156	1,622,968	*Lease liabilities*

25. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH (LANJUTAN) / *25. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION (Continued)*

	2021								
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas keluar-bersih/ *Net cash out-flows*	Kontrak sewa baru/*New lease contracts*	Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing/ *Loss (gain) on foreign currency*	Konsesi sewa diterima/ *Lease concession received*	Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya/ *overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*	Pergerakan utang bunga/ *Interest payable movement*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas sewa	1,372,812	(16,561)	365,594	(3,073)	(141,988)	(36,256)	136,742	1,677,270	*Lease liabilities*

	2020								
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas keluar-bersih/ *Net cash out-flows*	Kontrak sewa baru/*New lease contracts*	Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing/ *Loss (gain) on foreign currency*	Konsesi sewa diterima/ *Lease concession received*	Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya/ *overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*	Pergerakan utang bunga/ *Interest payable movement*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas sewa	1,431,065	(56,634)	-	(6,302)	(51,257)	(78,104)	134,044	1,372,812	*Lease liabilities*

26. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN RUPIAH / *26. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES IN CURRENCY OTHER THAN RUPIAH*

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, Grup memiliki aset keuangan dalam denominasi mata uang selain Rupiah sebagai berikut:

As of 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019, The Group has financial assets denominated in currencies other than Rupiah as follows:

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		31 Desember/*December* 2020		31 Desember/*December* 2019		
	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	
Aset									*Asset*
Kas dan setara kas									*Cash and cash equivalents*
Dolar AS	13,550,408	213,161	13,508,457	192,752	9,757	138	7,071	98	*US Dollar*

27. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA / *27. SUBSEQUENT EVENT*

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Maret 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp 600.000 dari saldo laba per tahun buku 2022. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada bulan Maret 2023.

At the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24 March 2023, the shareholders approved distribution of cash dividends amounted to Rp 600,000 from retained earnings as per year 2022. The cash dividend was paid in March 2023.

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN / *28. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS*

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 untuk menyesuaikan dengan pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan pasar modal. Oleh karena itu, perubahan dan penambahan pengungkapan telah dilakukan pada Catatan 1a, 1c, 2a, 2b, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 28.

In relation with the Company's plan for Initial Public Offering of its shares, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended 31 December 2022, 2021, 2020 and 2019 in order to align with the disclosures as required by the capital market regulations. Therefore, changes and additions of disclosures have been made on Notes 1a, 1c, 2a, 2b, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 28.

Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK
Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta 10340, Indonesia. T. (021) 3190 1188 F. (021) 3192 3799
www.cinema21.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK TANGGAL 31 MARET 2023 DAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini,

1. Nama : Hans Gunadi
   Alamat kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Alamat domisili : Bukit Golf Utama PA 5
   Telepon : 021 - 319 01188
   Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Tri Rudy Anitio
   Alamat kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Alamat domisili : Taman Kedoya Permai Blok B2/25
   Telepon : 021 - 319 01188
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Akuntansi

atas nama Direksi, menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk dan entitas anak;

2. Laporan keuangan interim konsolidasian PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan interim konsolidasian tidak mengandung infomasi yang menyesatkan, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap interim laporan keuangan konsolidasian;

4. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2023 AND FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022

We, the undersigned,

1. *Name : Hans Gunadi*
   Office address : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Home address : Bukit Golf Utama PA 5
   Telephone : 021 - 319 01188
   Title : President Director

2. *Name : Tri Rudy Anitio*
   Office address : Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A
   Home address : Taman Kedoya Permai Blok B2/25
   Telephone : 021 - 319 01188
   Title : Finance and Accounting Director

on behalf of the Board of Directors, declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated interim financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk and subsidiaries;*

2. *The consolidated interim financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information in the consolidated interim financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and*

   b. The consolidated interim financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any material information or facts that would be material to the interim consolidated financial statements;

4. *We are responsible for the internal control.*

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

New York, Jakarta, 28 April 2023

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk
METERAI TEMPEL
8052BAKX326581822

Hans Gunadi Presiden Direktur/ *President Director*	Tri Rudy Anitio Direktur Keuangan dan Akuntansi/ *Finance and Accounting Director*

KPMG

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan atas Reviu Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

No.: L.23-1000693031-23/004.01

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk:

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan interim konsolidasian PT Nusantara Raya Sejahtera Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan catatan, yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim konsolidasian ini berdasarkan reviu kami.

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan bedasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Report on Review of Consolidated Interim Financial Statements

No.: L.23-1000693031-23/004.01

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk:

Introduction

We have reviewed the accompanying consolidated interim financial statements of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 March 2023, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these consolidated interim financial statements based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

KPMG

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2023, serta kinerja keuangan konsolidasiannya dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying consolidated interim financial statements do not present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 March 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan

Dra Tohana Widjaja, MBA, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0846

28 April 2023

28 April 2023

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 MARET 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2022/
31 MARCH 2023 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2022
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	3a,3g,4	2,044,303	2,048,962	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha dan piutang lainnya	3g,3n,5			*Trade and other receivables*
- Pihak ketiga		45,728	69,231	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	57	115	*Related parties -*
Persediaan	3b	93,293	96,395	*Inventories*
Uang muka dan beban dibayar di muka	6	34,545	21,411	*Advances and prepayments*
Klaim pengembalian pajak	11a	28,146	-	*Claims for tax refund*
Pajak dibayar di muka		13,297	-	*Prepaid taxes*
JUMLAH ASET LANCAR		2,259,369	2,236,114	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	3c,3d,3e,7	3,929,595	3,942,447	*Fixed assets*
Uang muka untuk pembelian aset tetap	7			*Advance payment for purchase of fixed assets*
- Pihak ketiga		138,743	83,805	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	28,400	50,750	*Related parties -*
Klaim pengembalian pajak	11a	-	129,456	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	3k,11g	215,292	218,815	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya	8	101,756	98,159	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		4,413,786	4,523,432	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**6,673,155**	**6,759,546**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
31 MARET 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2022/
31 MARCH 2023 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2022
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha dan utang lainnya	3g,9			*Trade and other payables*
- Pihak ketiga		338,780	394,798	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3n,19	41,323	47,656	*Related parties -*
Utang pajak penghasilan	3k,11b	8,409	7,681	*Income tax payable*
Utang pajak lainnya	11c	60,518	75,649	*Other taxes payable*
Pinjaman bank	3g,10	2,299,223	1,697,415	*Bank loans*
Pendapatan diterima di muka	12	178,617	171,966	*Unearned revenue*
Liabilitas sewa	3d,7	86,465	71,119	*Lease liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		3,013,335	2,466,284	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	3d,7	1,539,824	1,551,849	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	3f,13	92,936	88,764	*Employee benefits obligation*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1,632,760	1,640,613	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		4,646,095	4,106,897	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham	14	600,080	600,080	*Share capital*
Tambahan modal disetor		1,830	1,830	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya		143,296	143,296	*Other equity component*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaanya	14	120,016	120,016	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		993,088	1,617,538	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1,858,310	2,482,760	*Equity attributable to owners of the Company*
Kepentingan non-pengendali	16	168,750	169,889	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		2,027,060	2,652,649	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**6,673,155**	**6,759,546**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)/
THREE – MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
		2023 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	
Pendapatan				*Revenue*
Bioskop		530,275	406,948	*Cinema*
Makanan dan minuman		310,728	200,364	*Food and beverages*
Iklan		18,223	14,647	*Advertisement*
Digital platform		17,364	11,742	*Digital platform*
Acara dan pendapatan lainnya		6,665	1,950	*Event and other revenue*
Total pendapatan	3h,17	883,255	635,651	*Total revenue*
Beban and biaya operasi				*Operating cost and expenses*
Beban penayangan film		(265,138)	(203,474)	*Film exhibition costs*
Beban makanan dan minuman		(91,687)	(57,152)	*Food and beverage costs*
Beban penyediaan *digital platform*		(3,997)	(3,249)	*Cost of providing digital platform*
Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap	18	(337,824)	(231,951)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Beban penyusutan aset tetap	7	(167,290)	(166,895)	*Depreciation expense of fixed assets*
Lainnya		(702)	(104)	*Others*
Total beban dan biaya operasi		(866,638)	(662,825)	*Total operating cost and expenses*
Pendapatan (beban) lainnya				*Other income (expense)*
Penghasilan lainnya		898	181	*Other income*
Beban lainnya		(234)	(82)	*Other expenses*
Total pendapatan (beban) lainnya, neto		664	99	*Total other income (expense), net*
LABA (RUGI) USAHA		17,281	(27,075)	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Penghasilan keuangan	3j	8,310	6,711	*Finance income*
Beban keuangan	3j	(41,233)	(33,327)	*Finance costs*
BEBAN KEUANGAN NETO		(32,923)	(26,616)	***NET FINANCE COST***
RUGI SEBELUM PAJAK		(15,642)	(53,691)	***LOSS BEFORE TAX***
Manfaat (beban) pajak penghasilan	3k,11d	(9,947)	6,076	*Income tax benefit (expenses)*
RUGI - DIPINDAHKAN		**(25,589)**	**(47,615)**	***LOSS - CARRYFORWARD***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)/
THREE – MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March* 2023 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	
RUGI - PINDAHAN		(25,589)	(47,615)	***LOSS – CARRIED FORWARD***
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF		**(25,589)**	**(47,615)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS***
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				***Profit (loss) attributable to:***
Pemilik entitas induk		(24,450)	(47,891)	*Owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali		(1,139)	276	*Non-controlling interest*
		(25,589)	**(47,615)**	
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income (loss) attributable to:***
Pemilik entitas induk		(24,450)	(47,891)	*Owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali		(1,139)	276	*Non-controlling interest*
		(25,589)	**(47,615)**	
Rugi per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	3m,20	(0.33)	(0.64)	***Loss per share, basic and dilutive (in full amount)***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)/
THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Ditentukan penggunaanya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		75,010	1,830	183,712	-	3,501,168	3,761,720	194,843	3,956,563	*Balance as of 31 December 2021*
Penghasilan komprehensif – periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 (tidak diaudit):										*Comprehensive income - three-month period ended 31 March 2022 (unaudited) :*
(Rugi) laba periode berjalan		-	-	-	-	(47,891)	(47,891)	276	(47,615)	*(Loss) profit during the period*
Saldo pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit)		75,010	1,830	183,712	-	3,453,277	3,713,829	195,119	3,908,948	*Balance as of 31 March 2022 (unaudited)*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		600,080	1,830	143,296	120,016	1,617,538	2,482,760	169,889	2,652,649	*Balance as of 31 December 2022*
Penghasilan komprehensif – periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 (tidak diaudit):										*Comprehensive income - three-month period ended 31 March 2023 (unaudited) :*
Rugi periode berjalan		-	-	-	-	(24,450)	(24,450)	(1,139)	(25,589)	*Loss during the period*
Pembagian dividen kas	15	-	-	-	-	(600,000)	(600,000)	-	(600,000)	*Distribution of cash dividend*
Saldo pada tanggal 31 Maret 2023 (tidak diaudit)		600,080	1,830	143,296	120,016	993,088	1,858,310	168,750	2,027,060	*Balance as of 31 March 2023 (unaudited)*

Lihat Catatan atas Laporan Interim Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)/
THREE – MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified)*

	Catatan/ *Notes*	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
		2023 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		914,410	638,010	*Cash received from customers*
Penerimaan dari pendapatan bunga		3,789	6,711	*Cash received from interest income*
Pembayaran kas kepada:				*Cash payment to:*
Pemasok		(679,799)	(510,834)	*Suppliers*
Karyawan		(123,702)	(91,507)	*Employees*
Penerimaan dari restitusi pajak penghasilan		80,266	-	*Receipt from income tax refund*
Pembayaran pajak penghasilan		-	(462)	*Payment of income tax*
Pembayaran bunga		(7,145)	-	*Payment for interest*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		187,819	41,918	***Net cash flows from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap		(148,458)	(16,000)	*Acquisition of fixed assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(148,458)	(16,000)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman bank	10	1,099,147	-	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran pinjaman bank	10	(498,900)	-	*Payment of bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	7	(44,267)	(39,372)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen tunai	15	(600,000)	-	*Cash dividends paid*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(44,020)	(39,372)	***Net cash flows used in financing activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(4,659)	(13,454)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		2,048,962	1,089,780	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	4	**2,044,303**	**1,076,326**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Interim Financial Statements, which form an integral part of these consolidated interim financial statements.

1. UMUM / *1. GENERAL*

a. Pendirian dan Informasi Utama

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk ("Perseroan"), suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan pada tanggal 7 Juni 1988 dengan akta pendirian No. 67 oleh Benny Kristianto, S.H., yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No. C2.8731.HT.01.01-TH88 tertanggal 16 September 1988. Akta pendirian di daftarkan dengan Pendaftaran Perusahaan No. 109/1988 tertanggal 20 September 1988 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4956 pada Berita Negara No. 80, tanggal 6 Oktober 1992.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir tertuang pada akta notaris Aulia Taufani, SH. No.16 tanggal 6 Maret 2023 terkait persetujuan pemegang saham untuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengadakan penawaran umum perdana sahamnya, dan perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi Perseroan yang berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, dan real estat. Perubahan tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014879.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 9 Maret 2023 dan telah dilakukan penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tertanggal 9 Maret 2023.

Perseroan bergerak dalam aktivitas pemutaran film dan perusahaan induk, restoran, konsultasi manajemen lainnya, penyewaan *venue*, penyelenggaraan aktifitas *MICE* (*Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions*) dan *event* khusus. Perseroan mulai beroperasi komersial sejak 1989.

Perseroan berkantor pusat di Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta. Perseroan memiliki dan mengoperasikan jaringan bioskop dengan merek dagang 21 dan XXI yang tersebar di seluruh Indonesia.

a. Establishment and General Information

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (the "Company") an Indonesian domiciled company, established on 7 June 1988 by deed of establishment No. 67, drawn up by Benny Kristianto, S.H., which was approved by the Minister of Justice under decree No. C2.8731.HT.01.01-TH88 dated 16 September 1988. The deed of establishment was registered with Company Registration No. 109/1988 dated 20 September 1988 and published in Supplement No. 4956 to State Gazette No. 80, dated 6 October 1992.

The Company's article of association has been amended several times with the latest amendment based on the deed of notary public Aulia Taufani, SH. No.16 dated 6 March 2023 in which the shareholders resolved to approve the change of the Company's name to PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk in relation with the Company's plan to conduct initial public offering of its shares, and to change the purpose and objective of the Company to become involved in information and communication, professional activity, scientific and technical activities, provision of accommodation and food and beverages, finance and insurance activities, and real estate. The amendment was approved by Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-0014879.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 9 March 2023 and has been received by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0037191 dated 9 March 2023.

The Company is engaged in movie screening and holding company activities, restaurant, other management consulting, venue rental, organizing MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) activities and special event. The Company commenced its commercial operations in 1989.

The Company's head office is located at Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Jakarta. The Company owns and operates cinemas network with trademark 21 and XXI located throughout Indonesia.

1. UMUM (Lanjutan) / *1. GENERAL (Continued)*

b. Entitas Anak

Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:

b. Subsidiaries

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Nama entitas anak/ *Name of subsidiaries*	Kegiatan bisnis/*Business activity*	Lokasi/ *Location*	Tahun mulai beroperasi komersial/ *Year of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total Aset sebelum eliminasi/ *Total Assets before elimination*	
				31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*							
PT Lestari Mitra Sembada (LMS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	2006	75.00%	75.00%	585,088	613,665
PT Lia Anugrah Semesta (LAS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1990	70.00%	70.00%	113,270	119,967
PT Intra Mandiri (IM)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1992	100.00%	100.00%	91,097	94,399
PT Pan Mitra Sembada (PMS)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	66.67%	66.67%	64,040	61,916
PT Kharisma Maju Abadi (KMA)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1990	70.00%	70.00%	81,301	90,263
PT Kartika Insani Raya (KIR)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	100.00%	100.00%	28,473	23,098
PT Sekar Saridana (SSD)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	2002	100.00%	100.00%	52,155	51,888
PT Gading Adi Permai (GAP)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Jakarta, Indonesia	1989	70.00%	70.00%	21,007	14,264
PT Nusantara Elang Sejahtera (NES)	Penyediaan *platform* tiket online / *Provide online ticketing platform*	Jakarta, Indonesia	2017	60.00%	60.00%	47,622	99,663
PT Sanggar Usaha Mandiri (SUM)	Penyewaan tanah/ *Land leasing*	Jakarta, Indonesia	1989	100.00%	100.00%	29,664	20,626
Kepemilikan tidak langsung melalui/*Indirect ownership through* PT Intra Mandiri							
PT Prima Mandala (PM)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman/ *Cinema industry and provision of food and beverages*	Malang, Indonesia	1989	50.00%	50.00%	4,472	5,141

Perseroan dan entitas anaknya secara kolektif disebut sebagai Grup.

The Company and its subsidiaries are collectively referred to as the Group.

1. UMUM (Lanjutan) / *1. GENERAL (Continued)*

c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah seluruh komisaris, direksi dan manajemen senior yang membawahi departemen.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

c. Boards of Commissioners, Directors and employees

Key management includes all commissioners, directors and senior management in charge of department.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022 the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	31 Maret/*March* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
Presiden Komisaris	Suryo Suherman	Suryo Suherman	*President Commissioner*
Komisaris	Melia Suherman	Melia Suherman	*Commissioner*
Komisaris	Harris Lasmana	Harris Lasmana	*Commissioner*
Komisaris	Sacheen Harris Lasmana	Sacheen Harris Lasmana	*Commissioner*
Komisaris	-	Wong Weihan	*Commissioner*
Komisaris	-	Dominic Soon Keng Yew	*Commissioner*
Komisaris Independen	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	-	*Independent Commissioner*
Direksi			*Board of Directors*
Presiden Direktur	Hans Gunadi	Hans Gunadi	*President Director*
Direktur	Arif Suherman	Arif Suherman	*Director*
Direktur	Tri Rudy Anitio	Tri Rudy Anitio	*Director*
Direktur	Dody Suhartono	-	*Director*
Komite Audit			*Audit Committe*
Ketua	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	-	*Chairman*
Anggota	Fitradewata Teramihardja	-	*Member*
Anggota	Sammy TS Lalamentik	-	*Member*

Jumlah karyawan tetap Grup adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The Group's permanent employees were as follows (unaudited):

	31 Maret/ *March* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Jumlah karyawan tetap	1,405	1,361	*Number of permanent employees*

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan interim konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

b. Laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 28 April 2023.

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan interim konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali dinyatakan lain, serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan interim konsolidasian disajikan dalam Rupiah, dibulatkan ke dalam jutaan terdekat, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

f. Dasar konsolidasi

Laporan keuangan interim konsolidasian menggabungkan laporan keuangan milik Perseroan dan entitas anak di mana Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan entitas anak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan mengendalikan entitas ketika Perseroan terekpos dengan, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan Perseroan di entitas.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

a. Statement of compliance

The consolidated interim financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed and Public Companies.

b. The Company's Board of Directors approved the consolidated interim financial statements for issuance on 28 April 2023.

c. Basis of measurement

The consolidated interim financial statements have been prepared on the basis of historical cost, unless otherwise specified, and also using the accruals basis, except in the consolidated statements of cash flows.

d. Statement of cash flows

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classification of cash flows into operating, investing, and financing activities.

e. Functional and presentation currency

The consolidated interim financial statements are presented in Rupiah, rounded to the nearest million, which is the Group's functional currency.

f. Basis of consolidation

The consolidated interim financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries in which the Company has the ability to control the subsidiaries, both directly or indirectly.

Subsidiaries are entities controlled by the Company. The Company controls an entity when it is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

f. Dasar konsolidasi (Lanjutan)

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasi sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) dan atas jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari jumlah laba (rugi) konsolidasian dan penghasilan (kerugian) komprehensif konsolidasian yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan interim konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan interim konsolidasian untuk bagian dari periode di mana pengendalian masih berlangsung.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup dalam semua hal yang material, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara entitas-entitas yang dikonsolidasikan telah dieliminasi, termasuk keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar entitas yang belum direalisasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

g. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari nilai-nilai estimasi tersebut.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

f. Basis of consolidation (Continued)

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is obtained by the Company, and are no longer consolidated from the date such control ceases.

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries are identified at the date of business combination and afterwards are adjusted by proportion of changes in equity of subsidiaries and presented as a part of equity in the consolidated statement of financial position.

Non-controlling interests in profit (loss) and in total comprehensive income (loss) of subsidiaries is identified at its portion and presented as a part of total attributable consolidated profit (loss) and consolidated comprehensive income (loss) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Where control of an entity is obtained during a financial period, its results are included in the consolidated interim financial statements from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the consolidated interim financial statements for the part of the period during which control existed.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated interim financial statements have been consistently applied by the Group in all material respects, unless otherwise stated.

All material transactions and balances between consolidated entities have been eliminated, including unrealized gains and losses arising from intercompany transactions.

Changes in the Company's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in profit or loss.

g. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of the consolidated interim financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from those estimated amounts.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

g. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkesinambungan. Perubahan terhadap estimasi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang dapat mengakibatkan penyesuaian material pada tahun berikutnya termasuk di dalam Catatan 3c, 3d dan 7 – taksiran masa manfaat aset tetap dan periode sewa serta Catatan 3f dan 13 – pengukuran kewajiban imbalan kerja: asumsi aktuaria.

h. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amendemen standar yang telah efektif sejak 1 Januari 2023 tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan interim konsolidasian Grup.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

g. Use of judgments, estimates and assumptions (Continued)

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognised prospectively.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in a material adjustment within the following year is included in Notes 3c, 3d and 7 – estimated useful life of fixed assets and lease period and Notes 3f and 13 – measurement of employee benefits obligation: actuarial assumptions.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Amendments to the standard that have been effective since 1 January 2023 do not have material impacts to the Group's consolidated interim financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi signifikan dibawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan interim konsolidasian ini.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang terhitung sejak ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

b. Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya persediaan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah; biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang dan mencakup pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta biaya lain untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated interim financial statements.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks, and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

b. Inventory

Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value; cost is determined using the weighted average method and includes expenditures incurred in acquiring the inventories and other costs incurred in bringing them to their present condition and location.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary cost of business less the estimated costs necessary to make the sale.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) / *3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

c. Aset tetap / *c. Fixed assets*

Aset tetap (termasuk aset hak-guna, lihat Catatan 3d), diukur dengan model biaya, yaitu pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya diukur pada nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Fixed assets (including right-of-use assets, see Note 3d) are measured using the cost model, i.e. initially measured at cost and subsequently are carried net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation is computed starting from the month such assets are ready for their intended use, using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Pengembangan prasarana	10 – 20 tahun/*years*	*Leasehold improvements*
Aset hak-guna	10 – 20 tahun/*years*	*Right-of-use assets*
Peralatan studio dan kantor	5 – 10 tahun/*years*	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	8 tahun/*years*	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	5 tahun/*years*	*Vehicles*

Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir tahun pelaporan keuangan, dan jika diperlukan akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

The residual value and the useful life of an asset are reviewed at least at each financial year end, and if required, they will be adjusted and applied in accordance with the prevailing accounting standards.

Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi.

Normal maintenance expenses are charged to the profit or loss when incurred, while betterments, renovations, expansion, etc, that increase the useful lives or capacity of fixed assets are capitalized.

Jika nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai aset dibebankan pada laba rugi periode yang bersangkutan.

When the carrying amount of fixed assets is higher than its estimated recoverable amount, the carrying amount of fixed assets shall be reduced to its recoverable amount and the impairment losses are charged to profit or loss for the period.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi periode berjalan.

The gains or losses from fixed assets, which are no longer utilized or sold, are removed from fixed assets and recorded in the current period profit or loss.

d. Sewa / *d. Leases*

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

At inception of a contract, the Group determines if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. A contract conveys the right to control the use of an identified asset, if all of the following conditions are met:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

- Kontrak melibatkan penggunaan secara substansial semua kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik dapat dibedakan (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit di dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset; yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan untuk tujuan penggunaan aset.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal pemulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Estimasi umur manfaat aset hak-guna ditentukan dengan menggunakan basis yang sama untuk aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Leases (Continued)

- *The contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset i.e. it has decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of fixed assets. In addition, the right-of-use assets are periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, it can be using the Group's incremental borrowing rate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Pembayaran minimum yang harus dibayarkan untuk kontrak sewa dengan skema bagi hasil pendapatan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali jika Grup cukup yakin untuk tidak mengakhirinya lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Aset hak-guna Grup disajikan sebagai "Aset tetap" dan liabilitas sewa disajikan sebagai "Liabilitas sewa" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa bagi hasil pendapatan yang tidak terdapat pembayaran minimum yang harus dibayarkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Leases (Continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on the index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Minimum required payment from lease contracts with revenue sharing arrangement;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Group reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Group reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Group reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is measured this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented as "Lease liabilities" in the consolidated statement of financial position.

The Group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for lease contracts with revenue sharing arrangement which have no minimum payment requirement.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Sewa (Lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah seperti peralatan kantor. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa di mana Grup mengambil alih secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset yang diperoleh diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, aset sewa diukur pada jumlah yang sama dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, aset sewa dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk aset tersebut. Jika tidak terdapat cukup kepastian bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaatnya.

Pengaturan sewa di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dialihkan kepada Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, di mana pembayaran sewa diakui sebagai beban selama masa sewa, dan aset pendasar tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup.

e. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Grup direviu pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Leases (Continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets such as office equipment. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Leases in which the Group assume substantially all the risks and rewards of ownership of the assets acquired are classified as finance leases. Upon initial recognition, the leased asset is measured at an amount equal to the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments. Subsequent to initial recognition, the leased asset is accounted for in accordance with the accounting policy applicable to that asset. If there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

Leasing arrangements in which risks and rewards of ownership are not conveyed to the Group are classified as *operating leases and treated as an executory contract, wherein lease payments are recognized as expense over the lease term, and the underlying assets are not recognized in the Group's consolidated statement of financial position.*

e. Impairment of non-financial asset

The carrying amounts of the Group's non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs of disposal. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Imbalan kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain.

Ketika manfaat program berubah atau ketika suatu kurtailmen atas program terjadi, dampak perubahan manfaat tersebut yang terkait dengan jasa masa lalu atau keuntungan/kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

g. Instrumen keuangan

(i) Aset keuangan

Pada pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan sebagai yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal kecuali jika Grup mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan di mana semua aset keuangan yang terkena dampak direklasifikasi pada hari pertama periode pelaporan setelah perubahan model bisnis.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, dan dana jaminan (bagian dari aset tidak lancar lainnya). Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga, keuntungan dan kerugian selisih kurs dan kerugian nilai diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian penurunan penghentian pengakuan diakui dalam laba atau rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Employee benefits

The obligation for post-employment benefits is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected-unit-credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

g. Financial instruments

(i) Financial assets

At initial recognition, a financial asset is classified as measured at amortized cost; fair value through other comprehensive income (FVOCI) or fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Group changes its business model for managing financial assets in which case all affected financial assets are reclassified on the first day of the first reporting period following the change in the business model.

The financial assets that are measured at amortized cost are cash and cash equivalent, trade and other receivables, and refundable deposits (part of other non-current assets). These financial assets are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortized cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment loss are recognized in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is recognized in profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada FVTPL jika dimiliki untuk diperdagangkan, derivatif, atau ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal.

Utang usaha dan utang lainnya, dan pinjaman bank pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Beban bunga serta keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan juga diakui dalam laba rugi.

(iii) Penghentian pengakuan

Aset keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau ketika Grup mengalihkan seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Grup secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi di mana aset keuangan dialihkan tetapi risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan tetap dipertahankan, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

(ii) Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either measured at amortized cost, or FVTPL. A financial liability is classified as FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative, or it is designated as such on initial recognition.

Trade and other payables, and bank loans are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is also recognized in profit or loss.

(iii) Derecognition

Financial assets
The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial asset that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

In transactions where a financial asset is transferred but the risks and rewards associated with ownership are somehow retained, the transferred asset is not derecognized.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika kewajiban kontraktualnya dilepaskan, dibatalkan, atau dihapuskan. Grup juga menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika persyaratannya dimodifikasi dan arus kas dari liabilitas yang dimodifikasi berbeda secara substansial, dalam hal ini liabilitas keuangan baru, berdasarkan persyaratan yang diubah, diakui pada nilai wajar.

Pada penghentian pengakuan liabilitas keuangan, perbedaan antara nilai tercatat yang dihentikan dan imbalan yang dibayarkan (termasuk aset non-tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih) diakui dalam laba rugi.

(iv) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan bermaksud untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

(v) Penurunan nilai

Grup mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

(iii) Derecognition (Continued)

Financial liabilities

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled, or otherwise extinguished. The Group also derecognizes a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability, based on the modified terms, is recognized at fair value.

On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognized in profit or loss.

(iv) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(v) Impairment

The Group recognizes loss allowances for expected credit loss (ECL) on financial assets measured at amortized cost.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

(v) Penurunan nilai (Lanjutan)

Pengukuran KKE

KKE adalah estimasi probabilitas-tertimbang atas kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai kini dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang terutang kepada Grup berdasarkan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima Grup). KKE didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Penyajian penyisihan KKE dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah bruto aset tersebut.

Grup mengukur penyisihan kerugian dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya, kecuali untuk saldo bank di mana risiko kredit (yaitu risiko gagal bayar yang terjadi selama umur ekpektasian instrumen keuangan) tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, yaitu diukur sebagai KKE 12 bulan.

Penyisihan kerugian untuk piutang usaha dan piutang lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selalu diukur pada jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

(v) Impairment (Continued)

Measurement of ECLs

ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The Group measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for bank balances for which credit risk (i.e. the risk of default occurring over the expected life of the financial instrument) has not increased significantly since initial recognition, which are measured as 12-month ECL.

Loss allowances for trade and other receivables measured at amortized cost are always measured at an amount equal to lifetime ECL.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Pengakuan pendapatan

Pendapatan diukur sebesar imbalan yang ditetapkan dalam kontrak dengan pelanggan. Grup memperoleh pendapatan terutama dari penjualan tiket bioskop, makanan dan minuman, menyewakan tempat untuk acara, dan penayangan iklan.

Tabel berikut memberikan informasi tentang sifat dan waktu pemenuhan pelaksanaan kewajiban dalam kontrak dengan pelanggan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan, dan kebijakan pengakuan pendapatan terkait.

h. Revenue recognition

Revenue is measured based on the consideration specified in a contract with a customer. The Group derives its revenues principally from sale of cinema ticket, food and beverages, premises rental for events, and advertisement.

The following table provides information about the nature and timing of the satisfaction of performance obligations in contracts with customers, including significant payment terms, and the related revenue recognition policies.

Sifat dan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan/ ***Nature and timing of satisfaction of performance obligations, including significant payment terms***	**Kebijakan pengakuan pendapatan /*Revenue recognition policies***
Untuk penjualan tiket bioskop, Grup memenuhi kewajibannya pada saat tiket dicetak. Pembayaran dari pelanggan diterima pada saat tiket dicetak/*For sale of cinema ticket, the Group fulfills its obligation when ticket is printed at cinema. Payment from customers is received upon the print of cinema ticket.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat tiket dicetak di bioskop/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when the ticket is printed at cinema.*
Untuk makanan dan minuman, Grup memenuhi kewajibannya pada saat makanan dan minuman diserahkan kepada pelanggan bersamaan dengan pembayaran dari pelanggan (*point of sale*)/*For sale of foods and beverages, the Group fulfills its obligation when foods and beverages are handed over to customers upon the receipt of payment from customers (point of sale).*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat makanan dan minuman diserahkan kepada pelanggan/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when foods and beverages are handed over to customers.*
Untuk *digital platform*, Grup memenuhi kewajibannya pada saat pelanggan melakukan pembelian tiket bioskop atau makanan dan minuman pada *website* atau aplikasi daring Grup/*For digital platform, the Group fulfills its obligation when customers make payment for purchase of movie ticket or food and beverages in the Group's website or online application.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat pelanggan melakukan pembayaran di *website* atau aplikasi daring/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when customers make payment in the Group's website or online application.*
Untuk pendapatan sewa tempat acara, Grup memenuhi kewajibannya pada saat acara diadakan. Pembayaran dari pelanggan diterima sebelum acara diadakan/*For revenue from premises rental for events, the Group fulfills its obligation when the event is held. Payment from customers is received before the event is held.*	Pendapatan diakui pada waktu tertentu, yaitu saat acara diadakan/*Revenue is recognized at point in time, i.e. when the event is held.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Pengakuan pendapatan (Lanjutan)

Sifat dan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, termasuk syarat pembayaran yang signifikan/
Nature and timing of satisfaction of performance obligations, including significant payment terms

Untuk pendapatan iklan, Grup memenuhi kewajibannya sepanjang masa kontrak penayangan iklan/*For advertisement revenue, the Group fulfills its obligation over the duration of contract for advertisement viewing.*

Tidak ada pelaksanaan kewajiban material yang belum dipenuhi pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022.

h. Revenue recognition (Continued)

Kebijakan pengakuan pendapatan /*Revenue recognition from policies*

Pendapatan diakui sepanjang waktu, yaitu selama masa kontrak penayangan iklan/*Revenue is recognized over time, i.e. over the duration of contract for advertisement viewing.*

There were no unsatisfied material performance obligations as of 31 March 2023 and 31 December 2022.

i. Transaksi mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang fungsional Grup (Rupiah) dengan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter berdenominasi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian kurs atas aset dan liabilitas moneter terdiri dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata uang fungsional pada awal periode, disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata uang asing yang dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing yang diukur pada nilai historis dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs dari penjabaran aset dan liabilitas moneter yang berasal dari aktivitas operasi pada umumnya diakui pada laba rugi.

i. Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are translated to the Group's functional currency (Rupiah) at the rates of exchange prevailing at transaction date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated to the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Foreign currency gains or losses on monetary items comprised of the difference between amortized cost measured in the functional currency at the beginning of the period as adjusted for effective interest and payments during the period, and the amortized cost measured in foreign currency translated at the exchange rate at reporting date.

Non-monetary assets and liabilities denominated in a foreign currency that are measured at historical cost are translated using the exchange rate at the date of the transaction.

Foreign currency gains and losses on retranslation of monetary assets and liabilities that arise from operating activities are generally recognized in profit or loss.

j. Penghasilan dan biaya keuangan

Penghasilan keuangan terdiri dari penghasilan bunga atas dana yang ditempatkan pada bank. Laba dan rugi kurs dilaporkan secara neto baik sebagai pendapatan atau beban keuangan bergantung pada apakah jumlah pergerakan kurs berada pada laba atau rugi neto. Beban keuangan terdiri dari beban bunga pinjaman.

j. Finance income and finance costs

Finance income comprises interest income on funds placed in the banks. Foreign exchange gains and losses are reported on a net basis as either finance income or finance costs depending on whether foreign currency movements amount to a net gain or net loss. Finance costs comprise interest expenses on borrowings.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah atas pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk periode yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik dari jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat direalisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Income taxes

Income tax expenses consist of current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the period, using tax rates enacted or substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for difference arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dikaji ulang pada tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa mendatang akan tersedia untuk digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda dengan cara yang sama seperti penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

l. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait atas transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Grup adalah Direksi Perseroan.

m. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan dalam periode yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perseroan, yaitu opsi saham.

Ketika opsi dieksekusi, Perseroan menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham tresurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Income taxes (Continued)

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

l. Operating segment

Operating segment is a component of Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components, whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operation decision maker. Chief operating decision maker of the Group is the Company's Board of Directors.

m. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing profit for the period attributable to owners of the Company by the weighted average of total outstanding/issued shares during the period.

Diluted earnings per share are calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Company, which is stock option.

When the options are exercised, the Company issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) / *3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

n. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian.

n. Transactions with related parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7, "Related Party Disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated interim financial statements.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUVALENTS*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Kas	11,829	35,363	*Cash on hand*
Kas di bank			*Cash in banks*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	448,378	105,104	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	382,261	485,660	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	103,668	131,687	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83,818	78,996	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	73,354	127,682	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52,387	15,280	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1,497	735	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	1,193	1,504	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	762	85	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	278	278	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Mega Tbk	46	14	*PT Bank Mega Tbk*
	1,147,642	947,025	
Dolar Amerika Serikat			*US Dollar*
PT Bank Shinhan Indonesia	1,809	711	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	1,545	1,614	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	28	32	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9	10	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	3,391	2,367	
Jumlah kas di bank	1,151,033	949,392	*Total cash in banks*

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUVALENT (Continued)*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Shinhan Indonesia	350,000	500,000	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	150,735	200,073	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	100,000	147,000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	78,655	6,119	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	220	220	*PT Bank Central Asia Tbk*
	679,610	853,412	
Dolar Amerika Serikat			*US Dollar*
PT Bank Shinhan Indonesia	201,831	210,795	*PT Bank Shinhan Indonesia*
Jumlah deposito berjangka	881,441	1,064,207	*Total time deposits*
Kas dan setara kas	2,044,303	2,048,962	*Cash and cash equivalents*

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

The contractual interest rates on time deposits during the period were as follows:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah	0.5% - 5.50%	1.9% - 5.55%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1.15% - 3.40%	0.21%- 1.15%	*US Dollar*

5. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAINNYA / *5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Piutang usaha:			*Trade receivables:*
Pihak ketiga	41,276	64,201	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 19)			*Related party (Note 19)*
PT Megatech Engineering	57	115	*PT Megatech Engineering*
	41,333	64,316	
Piutang lainnya:			*Other receivables:*
Pihak ketiga	4,452	5,030	*Third parties*
	45,785	69,346	

5. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAINNYA (Lanjutan) / 5. *TRADE AND OTHER RECEIVABLES (Continued)*

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, piutang usaha dari pihak ketiga sebagian besar terdiri dari piutang dari iklan yang sudah ditayangkan di bioskop.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, trade receivables from third parties mainly consist of outstanding receivables from advertisement showed in the cinema.

Rincian piutang usaha dan piutang lainnya berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The details of trade and other receivables based on aging were as follows:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Belum jatuh tempo	17,517	35,120	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	6,035	12,466	*1 -30 days*
31 - 180 hari	19,017	19,691	*31-180 days*
180 - 360 hari	1,702	445	*180-360 days*
Lebih dari 360 hari	1,514	1,624	*More than 360 days*
	45,785	69,346	

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat piutang usaha dan piutang lainnya berdenominasi Rupiah.

As at reporting date, all the carrying amount of trade and other receivables were denominated in Rupiah.

Piutang dari PT Megatech Engineering pada 31 Maret 2023 merupakan piutang atas pendapatan sewa untuk ruang *arcade game* (Catatan 23) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023 dan telah lunas pada April 2023 (31 Desember 2022: lunas pada Januari 2023). Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas piutang tersebut.

Trade receivables from PT Megatech Engineering as of 31 March 2023 was from rental income of arcade game room (Note 23) which was due on 31 March 2023 and settled in April 2023 (31 December 2022: settled in January 2023). There was no interest, guarantee, limitation and other conditions related to this receivable.

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing debitur pada akhir periode/tahun, manajemen berkeyakinan untuk tidak membuat penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha dan piutang lainnya.

Based on evaluation of the status of each debtors at the end of period/year, management believes no provision for impairment of trade and other receivables is needed.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, tidak ada piutang usaha dan piutang lain-lain yang dijaminkan untuk pinjaman tertentu.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, no trade and other receivables that had been used as collateral for certain loans.

6. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / 6. *ADVANCE AND PREPAYMENTS*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Sewa dan biaya layanan	10,662	8,336	*Rental and service charges*
Utilitas	3,083	2,606	*Utilities*
Asuransi	2,411	6,088	*Insurance*
Lain-lain	18,389	4,381	*Others*
	34,545	21,411	

7. ASET TETAP / *7. FIXED ASSETS*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pengukuran kembali/ *Remeasurement*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	3,424,189	68,167	-	-	3,492,356	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	3,417,650	41,656	(796)	-	3,458,510	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	916,612	24,465	-	-	941,077	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	15,739	396	-	-	16,135	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	1,850,132	20,640	(317)	(846)	1,869,609	*Right-of-use assets*
	9,624,322	155,324	(1,113)	(846)	9,777,687	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(2,105,789)	(67,585)	-	-	(2,173,374)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,548,202)	(44,604)	756	-	(2,592,050)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(609,536)	(20,440)	-	-	(629,976)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(11,644)	(423)	-	-	(12,067)	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	(405,463)	(34,238)	317	-	(439,384)	*Right-of-use assets*
	(5,680,634)	(167,290)	1,073	-	(5,846,851)	
Cadangan penurunan nilai atas pengembangan prasarana	(1,241)				(1,241)	*Allowance for impairment of leasehold improvements*
Nilai tercatat	**3,942,447**				**3,929,595**	***Carrying amount***

	31 Desember/ *December* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pengukuran kembali/ *Remeasurement*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	3,367,512	68,692	(12,015)	-	3,424,189	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	3,381,977	55,966	(20,293)	-	3,417,650	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	895,145	23,112	(1,645)	-	916,612	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	14,810	2,745	(1,816)	-	15,739	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	1,818,106	20,633	-	11,393	1,850,132	*Right-of-use assets*
	9,477,550	171,148	(35,769)	11,393	9,624,322	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan prasarana	(1,845,602)	(272,133)	11,946	-	(2,105,789)	*Leasehold improvements*
Peralatan studio dan kantor	(2,395,481)	(172,524)	19,803	-	(2,548,202)	*Studio and office equipment*
Perabot dan perlengkapan	(525,016)	(86,056)	1,536	-	(609,536)	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	(12,150)	(1,312)	1,818	-	(11,644)	*Vehicles*
Perjanjian sewa						*Lease agreement*
Aset hak-guna	(280,357)	(136,688)	-	11,582	(405,463)	*Right-of-use assets*
	(5,058,606)	(668,713)	35,103	11,582	(5,680,634)	
Cadangan penurunan nilai atas pengembangan prasarana	(1,241)				(1,241)	*Allowance for impairment of leasehold improvements*
Nilai tercatat	**4,417,703**				**3,942,447**	***Carrying amount***

7. ASET TETAP (Lanjutan) / *7. FIXED ASSETS (Continued)*

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi di mana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga (Catatan 3c).

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, management has reviewed the estimated useful life of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful life is based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any adverse changes in circumstances or events (Note 3c).

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, pembelian pengembangan prasarana, peralatan studio dan kantor, dan perabot dan perlengkapan yang masih terutang masing-masing adalah Rp 49.318 dan Rp 29.304.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, purchases of leasehold improvements, studio and office equipment and furniture and fixtures which remain payables were Rp 49,318 and Rp 29,304, respectively.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa nilai terpulihkan aset tetap melebihi nilai tercatat aset tetap.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, management believes that the recoverable amounts of property, plant and equipment exceed their net carrying amounts.

Pada 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 3.929.595 dan Rp 3.942.447, diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 8.466.712 dan Rp 7.768.176. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi ini dapat menutupi kemungkinan kerugian yang antara lain dapat timbul akibat banjir, bencana alam, dan kerusuhan.

At 31 March 2023 and 31 December 2022 fixed assets with a total carrying amount of Rp 3,929,595 and Rp 3,942,447, respectively, was insured for Rp 8,466,712 and Rp 7,768,176, respectively. Management believes that the sum insured is sufficient to cover potential loss due to, among other flood, disaster, and riot.

Berikut ini adalah perusahaan asuransi yang digunakan oleh Grup:
a. PT Asuransi Etiqa Internasional (pihak ketiga)
b. PT Asuransi FPG Indonesia (pihak ketiga)
c. PT Sompo Insurance Indonesia (pihak ketiga)
d. PT Tokio Marine (pihak ketiga)

The following are insurance companies used by the Group:
a. PT Asuransi Etiqa Internasional (third party)
b. PT Asuransi FPG Indonesia (third party)
c. PT Sompo Insurance Indonesia (third party)
d. PT Tokio Marine (third party)

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, tidak ada aset tetap yang dijaminkan untuk fasilitas pinjaman.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, no fixed assets had been placed as collateral for loans facility.

Jumlah harga perolehan tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 2.236.078 dan Rp 2.196.584. Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup.

The acquisition cost of fixed assets that are fully depreciated and still in use for production as of 31 March 2023 and 31 December 2022 amounted to Rp 2,236,078 and Rp 2,196,584, respectively. All of the fixed assets as at the reporting date are used to support the Group's operation activities.

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka yang dibayarkan kepada pemasok pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana untuk bioskop baru. Waktu yang diperlukan untuk membangun bioskop berkisar dari 3 bulan sampai 6 bulan. Total nilai kontrak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.038.000 dan Rp 871.000.

Advance payment for purchase of fixed assets represents the advance paid to third party and related party suppliers in relation to the purchase of studio equipment and leasehold improvement of new cinema. Time needed to develop cinemas is ranging from 3 months to 6 months. Total contract amount as of 31 March 2023 and 31 December 2022 were Rp 1,038,000 and Rp 871,000, respectively.

Grup menyewa ruangan untuk bioskop untuk jangka waktu sekitar 10-20 tahun.

The Group leases space for cinema for a term of 10-20 years.

7. ASET TETAP (Lanjutan) / *7. FIXED ASSETS (Continued)*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Maret/ *March* 2022 (Tidak diaudit/*Unaudited)*	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi			***Amount recognized in profit or loss***
Beban bunga atas liabilitas sewa	32,537	33,327	*Interest expense of lease liabilities*
Penyusutan aset hak-guna	34,238	34,826	*Depreciation of right-of-use assets*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Liabilitas sewa terutang:			***Lease liabilities payable:***
Dalam 1 tahun	213,890	199,652	*Within 1 year*
Dalam 1 dan 5 tahun	1,129,541	1,114,989	*Between 1 and 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1,317,958	1,345,919	*More than 5 years*
Total minimum pembayaran sewa di masa depan	2,661,389	2,660,560	*Total future minimum lease payments*
Porsi bunga atas pembayaran sewa	(1,035,100)	(1,037,592)	*Interest portion of the lease payments*
Nilai kini pembayaran sewa saat ini	1,626,289	1,622,968	*Present value of lease payments*
Liabilitas jangka pendek	(86,465)	(71,119)	*Lease Liabilities, current portion*
Liabilitas jangka panjang	1,539,824	1,551,849	*Lease Liabilities, non-current portion*

Berikut ini ringkasan perubahan komponen pada liabilitas terkait aktivitas sewa selama periode/tahun berjalan:

The following summarizes the components of change in the liabilities arising from lease activities during the period/year:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo pada 1 Januari	1,622,968	1,677,270	*Balance at 1 January*
Arus kas:			*Cash flows:*
Pembayaran liabilitas sewa	(44,267)	(172,518)	*Payment of lease liabilities*
Perubahan non-kas:			*Non-cash changes:*
Penambahan dan pengukuran kembali pada periode berjalan	19,794	21,997	*Addition and remeasurement during the period*
Bunga atas liabilitas sewa	32,537	131,156	*Interest of lease liabilities*
Konsesi sewa yang diterima	-	(27,016)	*Lease concession received*
Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya	-	(15,744)	*Overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*
Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing	(4,743)	7,823	*Loss(gain) on foreign currency*
Saldo pada 31 Maret 2023/ 31 Desember 2022	1,626,289	1,622,968	*Balance at 31 March 2023/ 31 December 2022*

8. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *8. OTHER NON-CURRENT ASSET*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Uang jaminan	81,164	79,272	*Security deposit*
Perangkat lunak	8,145	8,359	*Software*
Lain-lain	12,447	10,528	*Other*
	101,756	98,159	

9. UTANG USAHA DAN UTANG LAINNYA / *9. TRADE PAYABLES AND OTHER*

	31 Maret/ March 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ December 2022	
Utang usaha kepada pihak ketiga			*Trade payables to third parties*
PT Prima Cinema Multimedia	22,096	301	*PT Prima Cinema Multimedia*
PT Omega Film	13,932	49,895	*PT Omega Film*
PT Triniti Jaya Abadi	6,411	5,497	*PT Triniti Jaya Abadi*
PT Visinema Pictures	712	5,394	*PT Visinema Pictures*
PT Cinemaxx Global Pasifik	472	9,675	*PT Cinemaxx Global Pasifik*
PT Kharisma Starvision Plus	276	7,684	*PT Kharisma Starvision Plus*
PT Graha Layar Prima Tbk	168	8,692	*PT Graha Layar Prima Tbk*
Lainnya	43,436	36,183	*Other*
Liabilitas sewa yang belum di bayarkan	119,595	126,580	*Unpaid lease liabilities*
Liabilitas ke pemilik gedung selain sewa	19,643	19,643	*Liability to building owners other than lease*
Utang usaha kepada pihak berelasi (Catatan 19)			*Trade payables to related parties (Note 19)*
PT Megatech Engineering	16,786	17,598	*PT Megatech Engineering*
PT Delta Raya Sejahtera	10,028	12,373	*PT Delta Raya Sejahtera*
PT Multi Interbuana Teknindo	9,966	12,342	*PT Multi Interbuana Teknindo*
PT Delta Raya Sentosa	4,543	5,343	*PT Delta Raya Sentosa*
	268,064	317,200	
Utang lainnya dan beban yang masih harus dibayar:			*Other payables and accrued expenses:*
Beban akrual pembelian makanan dan minuman	41,543	57,403	*Accrued purchases of food and beverages*
Beban akrual sewa, utilitas, dan jasa pengelola	24,561	22,988	*Accrued rent, utilities, and service charges*
Lain-lain	45,935	44,863	*Others*
	112,039	125,254	
	380,103	442,454	

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat utang usaha dan utang lainnya berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha dan utang lainnya diperkirakan mendekati nilai tercatatnya.

As at reporting date, all the carrying amount of trade and other payables were denominated in Rupiah. Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

9. UTANG USAHA DAN UTANG LAINNYA (Lanjutan) / *9. TRADE PAYABLES AND OTHER (Continued)*

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables based on aging were as follows:*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ December 2022	
Belum jatuh tempo	72,566	90,184	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 – 30 hari	55,047	87,736	*1 – 3- days*
31 – 180 hari	13,501	513	*31 – 180 days*
180 - 360 hari	42	4,131	*180-360 days*
Lebih dari 360 hari	126,908	134,636	*More than 360 days*
	268,064	317,200	

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, utang yang telah jatuh tempo masing-masing sebesar Rp 119.595 dan Rp 126.580 yang merupakan liabilitas sewa untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringanan yang akan diberikan kepada Grup sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 (Catatan 7 dan 24).

As of 31 March 2023 and 31 December, there were overdue payables amounted to Rp 119,595 and Rp 126,580, respectively, which represented the unpaid lease liabilities for cinema lease which are under negotiation of final lease concession that will be granted to the Group due to the impact of COVID-19 pandemic (Notes 7 and 24).

Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas utang tersebut.

There was no interest, guarantee, limitation and other conditions related to this payable.

10. PINJAMAN BANK / *10. BANK LOANS*

	31 Maret/ March 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Fasilitas pinjaman *non-revolving* dengan tujuan pendanaan modal kerja; dijamin dengan tabungan dari dua pemegang saham; dikenakan bunga sebesar 1,7% per tahun.	1,397,496	1,497,265	*Non-revolving loan facility for the purpose of working capital financing; collateralized by cash deposits from two shareholders; bearing interest at an annual rate of 1.7% per annum.*
PT Bank DBS Indonesia			*PT Bank DBS Indonesia*
Fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp 200.000 dengan tujuan pendanaan modal kerja; dijamin dengan deposito berjangka dari dua pemegang saham; dikenakan bunga sebesar 3% per tahun; jatuh tempo pada 20 Desember 2023.	201,650	200,150	*Maximum loan facility of Rp 200,000 for the purpose of working capital financing; collateralized by time deposits from two shareholders; bearing interest at an annual rate of 3% per annum; due on 20 December 2023.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Fasilitas pinjaman *non-revolving* dengan tujuan pendanaan modal kerja; dijamin dengan deposito berjangka dari dua pemegang saham; dikenakan bunga sebesar 2,69% per tahun; jatuh tempo pada 30 Januari 2024.	700,077	-	*Non-revolving loan facility for the purpose of working capital financing; collateralized by time deposits from two shareholders; bearing interest at an annual rate of 2.69% per annum; due on 30 January 2024.*
	2,299,223	1,697,415	

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. BANK LOANS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman bank ini tidak memiliki persyaratan khusus maupun pembatasan fasilitas pinjaman.

1. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.743/SPH/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

   Pinjaman ini telah dibayar lunas pada tanggal 31 Januari 2023.

2. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.745/SPH/12/2022 tanggal 17 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

   Pinjaman ini telah dibayar lunas pada tanggal 31 Januari 2023.

3. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.747/SPH/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

   Pinjaman ini telah dibayar lunas pada tanggal 31 Januari 2023.

4. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.751/SPH/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

These bank loan agreements have no convenants requirements and limitations.

1. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.743/SPH/12/2022, dated 16 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 16 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

   This loan was fully paid on 31 January 2023.

2. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.745/SPH/12/2022, dated 17 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 17 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

   This loan was fully paid on 31 January 2023.

3. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.747/SPH/12/2022, dated 18 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 18 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

   This loan was fully paid on 31 January 2023.

4. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.751/SPH/12/2022, dated 19 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 19 December 2023.*

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) | ***10. BANK LOANS (Continued)***

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

Pinjaman ini telah dibayar lunas pada tanggal 31 Januari 2023.

5. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

6. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

7. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

8. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023.

   Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

This loan was fully paid on 31 January 2023.

5. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.754/SPH/12/2022, dated 20 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 20 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

6. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.764/SPH/12/2022, dated 21 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 21 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

7. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.767/SPH/12/2022, dated 22 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 22 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

8. *Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.769/SPH/12/2022, dated 23 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 23 December 2023.*

   This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. BANK LOANS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

9. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023.

10. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

11. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

12. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

13. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.784/SPH/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2023.
    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

    Pinjaman ini telah dibayar lunas pada tanggal 31 Januari 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

9. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.771/SPH/12/2022, dated 24 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 24 December 2023.

10. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.773/SPH/12/2022, dated 25 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 25 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

11. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.777/SPH/12/2022, dated 26 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 26 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

12. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.782/SPH/12/2022, dated 27 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 27 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

13. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.784/SPH/12/2022, dated 28 December 2022 the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 28 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

This loan was fully paid on 31 January 2023.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. BANK LOANS (Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

14. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Harkatjaya Bumipersada.

15. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 99.780. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, PT Adi Pratama Nusantara.

16. Berdasarkan SPH Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 399.400. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2024.

    Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan atas nama PT Harkatjaya Bumipersada dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar Rp 400.000.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 200.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 3% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito atas nama PT Harkatjaya Bumipersada dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar Rp 200.000.

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo terutang fasilitas ini adalah sebesar Rp 200.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

14. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.790/SPH/12/2022, dated 29 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 29 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Harkatjaya Bumipersada.

15. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.793/SPH/12/2022, dated 30 December 2022, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 99,780. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 30 December 2023.

This facility is secured by cash deposits from a shareholder, PT Adi Pratama Nusantara.

16. Based on SPH Working Capital Credit Cash Collateral No. B.179/SPH/03/2023, dated 31 March 2023, the Company received loan for working capital from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 399,400. The loan bears an interest rate of 1.7% per annum and mature on 31 March 2024.

This facility is secured by cash deposits in the name of PT Harkatjaya Bumipersada and PT Adi Pratama Nusantara amount of Rp 400,000.

PT Bank DBS Indonesia

Based on Banking Facility Agreement No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022, dated December 20, 2022, the Company obtained Credit Cash Collateral facility from PT Bank DBS Indonesia with the maximum credit limit of Rp 200,000. This facility bears an interest rate of 3% per annum and mature on 20 December 2023.

This facility is secured by time deposit in the name of PT Harkatjaya Bumipersada and PT Adi Pratama Nusantara amount of Rp 200,000.

As of 31 March 2023, the outstanding balances of this facility amounted to Rp 200,000.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. BANK LOANS (Continued)*

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

Perjanjian pinjaman bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, di mana Perseroan tidak boleh tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada bank, diantaranya:

a. Mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham, dengan ketentuan keluarga Suherman dan Lasmana secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung tetap menjaga dan mempertahankan kepemilikan minimum 51% atas jumlah saham pada Perseroan.

b. Dalam keadaan pailit atau permintaan penundaan pembayaran.

c. Membuat atau memberikan izin untuk mengalihkan hak fidusia, SPH (Surat Pengakuan Hutang), hak tanggungan atau penanggung lainnya.

d. Membuat atau memberikan izin untuk melakukan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan kerugian, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau jaminan dan/atau perjanjian lain dan/atau pengaturan lain yang pada hakikatnya mempunyai akibat yang sama terhadap kekayaan atau hak yang timbul dari tagihan Perseroan, selain dari jaminan yang diberikan kepada bank (bila ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh bank.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian utang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/LASB/2023 tanggal 31 Januari 2023, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah kredit sebesar Rp 500.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 0,19% per tahun diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan dan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Maret 2023, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/LASB/2023 untuk Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 200.000.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama PT Harkatjaya Bumipersada dan PT Adi Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp 560.000 dan Rp 140.000.

PT Bank DBS Indonesia (Continued)

The bank loan agreement contains convenants and restrictions in which, the Company shall not without prior written notice to be bank, among others:

a. Change the ownership or composition of shareholders, provided that the Suherman and Lasmana families jointly, directly or indirectly maintain and maintain a minimum ownership of 51% of the number of shares in the Company.

b. In state of bankruptcy or payment delay request.

c. Make or give permission to transfer fiducia rights, SPH (Surat Pengakuan Hutang), mortgage right or other guarantor.

d. Making or giving permission to make fiduciary transfers of rights, letters of acknowledgment of loss, mortgage rights, imposition of fees, pledges, or other guarantees and/or agreements and/or other arrangements which in essence have the same effect on wealth or rights that arise from the Company's bill, other than the guarantee given to the bank (if any) or which has been notified in writing by the bank.

As of 31 March 2023, the Company was in compliance with the terms and conditions of the loan agreement.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Securities Collateral Credit Agreement No. WCO.KP/111/LASB/2023, dated 31 January 2023, the Company obtained Securities Collateral Credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the credit of Rp 500,000. This facility bears an interest rate of 0.19% per annum above the interest rate on deposit used as collateral and mature on 30 January 2024.

On 28 March 2023 the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agree to make changes on the Securities Collateral Credit Agreement No. WCO.KP/111/LASB/2023 for the Company to obtain an additional credit facility of Rp 200,000.

This facility is secured by time deposit in the name of PT Harkatjaya Bumipersada and PT Adi Pratama Nusantara amounted to Rp 560,000 and Rp 140,000, respectively.

10. PINJAMAN BANK (Lanjutan) / *10. BANK LOANS (Continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo terutang fasilitas ini adalah sebesar Rp 700.000.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian utang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Continued)

As of 31 March 2023, the outstanding balance of this facility amounted to Rp 700,000.

As of 31 March 2023, the Company was in compliance with the terms and conditions of the loan agreement.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Klaim pengembalian pajak: / *a. Claims for tax refund:*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Perseroan:			*The Company:*
Tahun fiskal 2020	-	74,360	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2022	-	2,535	*Fiscal year 2022*
	-	76,895	
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Tahun fiskal 2019	-	26	*Fiscal year 2019*
Tahun fiskal 2020	28,146	49,881	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2022	-	2,654	*Fiscal year 2022*
	28,146	52.561	
Konsolidasian:			*Consolidated:*
Tahun fiskal 2019	-	26	*Fiscal year 2019*
Tahun fiskal 2020	28,146	124,241	*Fiscal year 2020*
Tahun fiskal 2022	-	5,189	*Fiscal year 2022*
	28,146	129,456	

Klaim pengembalian pajak merupakan lebih bayar yang berasal dari pajak penghasilan badan.

Claim for tax refund represent overpayment from corporate income tax.

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

a. Klaim pengembalian pajak (Lanjutan):

Pada bulan Maret 2023, otoritas pajak menyetujui klaim pengembalian pajak untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2020 yang diajukan Perseroan sebesar Rp 74.360. Selain itu, otoritas pajak juga telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk pajak penghasilan pasal 21, 23, 26, 4(2) dan PPN dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp 11.199. Atas SKPKB yang diterbitkan, Perseroan berencana untuk mengajukan keberatan terhadap SKPKB untuk PPN sebesar Rp 1.183 dan menerima penetapan kurang bayar pajak lainnya sebesar Rp 10.016. Pada tanggal 17 Maret 2023, Perseroan telah menerima pengembalian kelebihan pajak sebesar Rp 64.344 yang merupakan selisih antara klaim pengembalian pajak sebesar Rp 74.360 yang disetujui dan jumlah penetapan kurang bayar pajak lainnya sebesar Rp 10.016. Untuk jumlah kurang bayar pajak yang telah disetujui, Perseroan telah membebankan ke laba rugi periode berjalan.

Pada bulan Maret 2023, entitas anak juga telah menerima hasil audit terhadap pengembalian pajak untuk tahun fiskal 2020 di mana otoritas pajak telah menyetujui seluruh atau sebagian dari klaim pengembalian pajak yang diajukan. Bersamaan dengan penerbitan hasil audit pajak penghasilan badan tahun 2020, otoritas pajak juga telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk pajak penghasilan 21, 23, 26, 4(2) dan PPN dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp 10.487. Pada tanggal 31 Maret 2023, sebagian dari SKPKB sebesar Rp 1.400 telah dipotong dari klaim pengembalian pajak yang telah disetujui dan entitas anak sedang mempertimbangkan pengajuan keberatan untuk SKPKB sebesar Rp 9.087.

Rincian klaim pengembalian pajak entitas anak tahun fiskal 2020 yang telah disetujui adalah sebagai berikut:

a. Claims for tax refund (Continued):

In March 2023, the tax authority approved the claim for tax refund of Rp 74,360 related to the corporate income tax for fiscal year 2020. In addition, the tax authority also issued several Tax Underpayment Assessment Letters ("SKPKB") for withholding tax article 21, 23, 26, 4(2) and VAT at total amount of Rp 11,199, On these tax underpayment assessments issued, the Company plans to file objection for the tax underpayment assessment amounted to Rp 1,183 related to VAT but accepts the other tax underpayment assessments at a total amount of Rp 10,016. On 17 March 2023, the Company received the tax refund of Rp 64,344 which represents the netting off amount of approved tax refund of Rp 74,360 and the agreed tax underpayment assessments of Rp 10,016. The agreed tax underpayment assessments was charged to the current period profit and loss.

In March 2023, the subsidiaries received the tax audits result related to the claim for tax refund for fiscal year 2020 corporate income tax where the tax authority approved all or majority of the claims for tax refund filed. When finalizing the tax audits result for corporate income tax fiscal year 2020, the tax authority has also issued several SKPKB for withholding tax article 21, 23, 26, 4(2) and VAT at total amount of Rp 10,487. As of 31 March 2023, part of SKPKB amounted to Rp 1,400 has been offset with the claim for tax refund approved. The subsidiaries plan to file objection for the tax underpayment assessment amounted to Rp 9,087.

The details of subsdiaries' claims for tax refunds for fiscal year 2020 approved are as follow:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Klaim pengembalian pajak yang dicatat/*Claim for tax refunds recorded*	Klaim pengembalian pajak yang disetujui/ *Claim for tax refunds approved*	Klaim pengembalian pajak yang telah diterima pada tanggal 31 Maret 2023/*Claim for tax refunds received as of 31 March 2023*	Klaim pengembalian pajak yang masih tersisa pada tanggal 31 Maret 2023/*Claim for tax refunds outstanding as of 31 March 2023*
LMS	27,524	27,524	-	27,524
PAN	7,413	6,848	6,848	-
LIA	3,440	3,440	3,440	-
KMA	4,106	30	30	-
KIR	1,691	1,691	1,691	-
GAP	3	3	3	-
SSD	875	875	875	-
INM	4,207	4,207	4,207	-
PRM	622	622	-	622
	49,881	45,240	17,094	28,146

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

b. Utang pajak penghasilan: / *b. Income taxes payable:*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Perseroan	-	-	*The Company*
Entitas anak	8,409	7,681	*Subsidiaries*
	8,409	7,681	

c. Utang pajak lainnya: / *c. Other taxes payable:*

	31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Perseroan:			*The Company:*
Pajak pertambahan nilai	20,913	17,070	*Value added taxes*
Pajak hiburan	12,602	20,292	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	6,983	11,974	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	1,306	3,957	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	1,520	2,028	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	3,848	4,046	*Withholding tax article 4 (2)*
	47,172	59,367	
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Pajak pertambahan nilai	1,801	(228)	*Value added taxes*
Pajak hiburan	4,362	7,317	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	2,092	3,787	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	261	201	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	595	904	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4,235	4,301	*Withholding tax article 4 (2)*
	13,346	16,282	
Konsolidasian:			*Consolidated:*
Pajak pertambahan nilai	22,714	16,842	*Value added taxes*
Pajak hiburan	16,964	27,609	*Entertainment tax*
Pajak pembangunan (PB1)	9,075	15,761	*Development tax (PB1)*
Pajak penghasilan pasal 21	1,567	4,158	*Withholding tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2,115	2,932	*Withholding tax article 23 and 26*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	8,083	8,347	*Withholding tax article 4 (2)*
	60,518	75,649	

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

d. Beban (manfaat) pajak penghasilan: / *d. Income tax expense (benefit):*

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Perseroan:			*The Company:*
Beban pajak kini – periode berjalan	-	-	*Current tax expense – current period*
Beban pajak kini – penyesuaian tahun sebelumnya	2,535	-	*Current tax expense – adjustments in respect of prior years*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(411)	(12,493)	*Deferred tax (benefit) expense*
	2,124	(12,493)	
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Beban pajak kini – periode berjalan	670	76	*Current tax expense – current period*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	3,219	-	*Adjustment to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	3,934	6,791	*Deferred tax (benefit) expense*
	7,823	6,867	
Konsolidasian:			*Consolidated:*
Beban pajak kini – periode berjalan	670	76	*Current tax expense – current period*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	5,754	-	*Adjustment to prior years tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	3,523	(6,152)	*Deferred tax (benefit) expense*
	9,947	(6,076)	

e. Rekonsiliasi antara laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak dengan beban (manfaat) pajak penghasilan: / *e. Reconciliation of consolidated profit (loss) before tax and income tax expense (benefit):*

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Rugi konsolidasian sebelum pajak	(15,642)	(53,691)	*Consolidated loss before tax*
Laba entitas anak	(6,495)	(4,543)	*Subsidiary's profit*
Transaksi eliminasi dengan entitas anak	(178)	-	*Elimination transactions with the subsidiaries*
Perseroan:			*The Company:*
Rugi sebelum pajak Perseroan	(22,315)	(58,234)	*The Company's loss before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Applicable tax rate*
	(4,909)	(12,811)	
Perbedaan permanen	(1,455)	(132)	*Permanent differences*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	2,535	-	*Adjustments to prior years tax expense*
Penyesuaian aset pajak tangguhan tahun sebelumnya	5,953	-	*Adjustments to prior years deferred tax assets*
Beban (manfaat) pajak penghasilan Perseroan	2,124	(12,943)	*The Company's Income tax expense (benefit)*
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Laba sebelum pajak entitas anak	6,495	4,543	*Subsidiaries' profit before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Applicable tax rate*
	1,429	999	
Perbedaan permanen	316	(248)	*Permanent differences*
Kompensasi kerugian fiskal yang tidak diakui	1,624	25	*Unrecognized tax loss carry forward*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	3,219	6,091	*Adjustments to prior years tax expense*
Penyesuaian aset pajak tangguhan tahun sebelumnya	1,235	-	*Adjustments to prior years deferred tax assets*
Beban pajak penghasilan entitas anak	7,823	6,867	*Subsidiaries' income tax expense*
Beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian	9,947	(6,076)	*Consolidated income tax expense (benefit)*

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

e. Rekonsiliasi antara laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak dengan beban (manfaat) pajak penghasilan (Lanjutan):

Pada bulan Maret 2023, otoritas pajak mengoreksi rugi fiskal Perseroan tahun 2020 dari Rp 582.731 menjadi Rp 556.495. Perseroan menerima koreksi rugi fiskal tersebut dan menyesuaikan aset pajak tangguhan atas kompensasi kerugian fiskal di tahun 2023.

Perseroan juga mengoreksi rugi fiskal yang dilaporkan untuk tahun pajak 2021 dari Rp 317.604 menjadi Rp 316.781.

Pada bulan Maret 2023, otoritas pajak mengoreksi rugi fiskal entitas anak tahun 2020 dari Rp 137.127 menjadi Rp 136.304. Entitas anak menerima koreksi rugi fiskal tersebut dan menyesuaikan aset pajak tangguhan atas kompensasi kerugian fiskal di tahun 2023.

Entitas anak juga mengoreksi rugi fiskal yang dilaporkan untuk tahun pajak 2021 dari Rp 92.275 menjadi Rp 87.485.

e. Reconciliation of consolidated profit (loss) before tax and income tax expense (benefit) (Continued):

In March 2023, the tax authority corrected fiscal loss of the Company for year 2020 from Rp 582,731 to Rp 556,495. The Company accepted the correction on fiscal loss and adjusted deferred tax assets from tax loss carryforward in 2023.

The Company also corrected fiscal loss reported for fiscal year 2020 from Rp 317,604 to Rp 316,781.

In March 2023, the tax authority corrected fiscal loss of subsidiaries for year 2020 from Rp 137,127 to Rp 136,304. Subsidiaries accepted the correction on fiscal loss and adjusted deferred tax assets from tax loss carryforward in 2023.

The Company also corrected fiscal loss of fiscal year 2021 from Rp 92,275 to Rp 87,485.

f. Pajak penghasilan dihitung untuk setiap badan hukum entitas karena pelaporan pajak penghasilan badan konsolidasian tidak diperbolehkan.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan kini Perseroan:

f. Income tax expense is computed for each legal entity as consolidated corporate income tax returns are not permitted.

Reconciliation of consolidated profit (loss) before tax and the Company's current income tax expense:

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month period ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Rugi konsolidasian sebelum pajak	(15,642)	(53,691)	*Consolidated loss before tax*
Laba rugi entitas anak	(6,495)	(4,543)	*Subsidiary's profit*
Transaksi eliminasi dengan entitas anak	(178)	-	*Elimination transactions with the subsidiary*
Rugi sebelum pajak Perseroan:	(22,315)	(58,234)	*The Company's loss before tax:*
Perbedaan temporer:			*Temporary difference:*
Depresiasi	(34,111)	(27,138)	*Depreciation*
Imbalan kerja	3,466	(4,154)	*Employee benefit*
Sewa	8,930	88,485	*Leases*
Perbedaan permanen:			*Permanent difference:*
Penghasilan dikenakan pajak final	(12,150)	(3,001)	*Income subject to final tax*
Penurunan nilai persediaaan	3,931	2,009	*Inventory write down*
Hiburan	1,137	471	*Entertainment*
Natura karyawan	160	66	*Employee benefit in kind*
Donasi	101	92	*Donation*
Lain-lain	209	(237)	*Others*
Rugi fiskal	(50,642)	(1,641)	*Fiscal loss*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Applicable tax rate*
Beban pajak penghasilan Perseroan	-	-	*The Company's current income tax expense*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	2,535	-	*Adjustments to prior years tax expense*
	2,535	-	

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan: / *g. Deferred tax assets and liabilities:*

	31 Desember/ *December* 2022	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	Diakui di komponen ekuitas lainnya/ *Recognized in other equity component*	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	
Perseroan:						*The Company:*
Kompensasi kerugian fiskal	106,485	5,188	-	-	111,673	*Tax loss carry forward*
Imbalan Kerja	16,864	762	-	-	17,626	*Employee benefit*
Aset tetap	16,975	(7,504)	-	-	9,471	*Fixed assets*
Sewa	56,022	1,965	-	-	57,987	*Lease*
Aset pajak tangguhan	196,346	411	-	-	196,757	*Deferred tax assets*
Entitas anak:						*Subsidiaries:*
Kompensasi kerugian fiskal	18,166	(3,877)	-	-	14,289	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	2,664	156	-	-	2,820	*Employee benefit*
Aset tetap	(12,271)	(525)	-	-	(12,796)	*Fixed assets*
Sewa	13,910	312	-	-	14,222	*Lease*
Aset pajak tangguhan	22,469	(3,934)			18,535	*Deferred tax assets*
Konsolidasi:						*Consolidated:*
Kompensasi kerugian fiskal	124,651	1,311	-	-	125,962	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	19,528	918	-	-	20,446	*Employee benefit*
Aset tetap	4,704	(8,029)	-	-	(3,325)	*Fixed assets*
Sewa	69,932	2,277	-	-	72,209	*Lease*
Aset pajak tangguhan	218,815	(3,524)			215,292	*Deferred tax assets*

	31 Desember/ *December* 2021	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	Diakui di komponen ekuitas lainnya/ *Recognized in other equity component*	31 Desember/ *December* 2022	
Perseroan:						*The Company:*
Kompensasi kerugian fiskal	238,490	(91,589)	-	(40,416)	106,485	*Tax loss carry forward*
Imbalan Kerja	17,878	(898)	(116)	-	16,864	*Employee benefit*
Aset tetap	36,537	(19,562)	-	-	16,975	*Fixed assets*
Sewa	31,319	24,703	-	-	56,022	*Lease*
Aset pajak tangguhan	324,224	(87,346)	(116)	(40,416)	196,346	*Deferred tax assets*
Entitas anak:						*Subsidiaries:*
Kompensasi kerugian fiskal	58,737	(40,571)	-	-	18,166	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	3,115	(195)	(256)	-	2,664	*Employee benefit*
Aset tetap	(12,206)	(65)	-	-	(12,271)	*Fixed assets*
Sewa	8,945	4,965	-	-	13,910	*Lease*
Aset pajak tangguhan	58,591	(35,866)	(256)	-	22,469	*Deferred tax assets*

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXATION (Continued)*

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan): / *g. Deferred tax assets and liabilities (Continued):*

Konsolidasi: / *Consolidated:*	31 Desember/ *December* 2021	Diakui di laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ *Recognized in other comprehensive income*	Diakui di komponen ekuitas lainnya/ *Recognized in other equity component*	31 Desember/ *December* 2022	
Kompensasi kerugian fiskal	297,227	(132,160)	-	(40,416)	124,651	*Tax loss carry forward*
Imbalan kerja	20,993	(1,093)	(372)	-	19,528	*Employee benefit*
Aset tetap	24,331	(19,627)	-	-	4,704	*Fixed assets*
Sewa	40,264	29,668	-	-	69,932	*Lease*
Aset pajak tangguhan	382,815	(123,212)	(372)	(40,416)	218,815	*Deferred tax assets*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal pelaporan telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

Deferred tax assets and liabilities as at reporting date have been calculated taking into account tax rates applicable for each respective period.

Aset pajak tangguhan diakui sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas karena besar kemungkinan laba kena pajak pada periode mendatang akan tersedia sehingga Grup dapat menggunakan manfaat dari kompensasi kerugian fiskal Rp 572.557 yang akan kadaluarsa antara tahun 2023 dan 2027.

Deferred tax assets have been recognized with respect to the above mentioned items because it is probable that future taxable profits will be available against which the Group can utilize the benefits from tax loss carry forward amounted to Rp 572,557 which will be expired between 2023 and 2027.

Aset pajak tangguhan berikut ini tidak diakui: / *The following deferred tax asset has not been recognized:*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Kompensasi kerugian fiskal – entitas anak	5,969	9,536	*Tax loss carry forwards – a subsidiary*

Kompensasi kerugian fiskal yang tidak diakui di entitas anak pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 27.133, akan kadaluarsa antara tahun 2023 dan 2027 jika tidak dimanfaatkan dengan laba kena pajak pada masa mendatang.

Tax loss carry forwards which was not recognized in subsidiary as of 31 March 2023 amounted to Rp 27,133, will expire in varying amounts between 2023 and 2027 if not utilized against future taxable profits.

h. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Grup melaporkan/menyetorkan pajak-pajaknya berdasarkan sistem self-assessment. Otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Under the taxation laws of Indonesia, the Group submit tax returns on the basis of self-assessment system. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

Posisi pajak Grup mungkin dapat dipertanyakan otoritas pajak. Manajemen dengan seksama mcmpertahankan posisi pajak Grup yang diyakininya berlandaskan dasar teknis yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa akrual atas liabilitas pajak mencukupi untuk seluruh tahun pajak yang belum diperiksa berdasarkan penelaahan atas berbagai faktor, termasuk interpretasi peraturan perpajakan dan pengalaman sebelumnya. Penelaahan tersebut didasarkan atas estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan akan kejadian di masa depan. Informasi baru mungkin dapat tersedia yang menyebabkan manajemen merubah pertimbangannya mengenai kecukupan liabilitas pajak yang ada. Perubahan terhadap liabilitas pajak ini akan mempengaruhi beban pajak di periode di mana penentuan tersebut dibuat.

The Group's tax positions may be challenged by the tax authorities. Management vigorously defends the Group's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on the assessment of various factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period which such determination is made.

12. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA / *12. UNEARNED REVENUE*

	31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
M-Tix	135,576	137,388	*M-Tix*
Movie Card dan *voucher*	43,032	34,570	*Movie Card and voucher*
Lainnya	9	8	*Others*
	178,617	171,966	

M-Tix adalah *platform* tiket *online* milik Grup yang dapat digunakan pelanggan untuk menyetorkan uang untuk pembelian tiket bioskop. M-Tix diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan membeli tiket bioskop.

M-Tix is the Group's online ticketing platform which enables customers to deposit cash for purchase of cinema ticket. M-Tix is recognized as revenue when customers purchase cinema ticket.

Movie Card dan *voucher* diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan menukarkannya dengan tiket bioskop atau makanan dan minuman.

Movie Card and voucher are recognized as revenue when customers redeem them with cinema ticket or food and beverages.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*

Grup mengakui liabilitas pascakerja atas karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

The Group recognizes post-employment benefits obligation for its qualifying employees in accordance with Indonesian regulation concerning labor.

Tabel berikut ini menyajikan saldo kewajiban untuk imbalan pascakerja pada saat tanggal pelaporan, perubahan saldo liabilitas, dan beban yang diakui pada periode tiga bulan berakhir 31 Maret 2023 dan tahun berakhir 31 Desember 2022:

The following table presents the balance of the obligation for post-employment benefits as of the reporting dates, as well as the movements in the obligation, and the expense recognized during three-month period ended 31 March 2023 and year ended 31 December 2022:

	31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Perubahan liabilitas imbalan pascakerja			*Movement of post-employment benefits obligation*
Saldo awal	88,764	95,421	*Beginning balance*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
- Beban jasa kini	2,964	11,434	*Current service cost* -
- Keuntungan jasa masa lalu	-	(16,241)	*Past service gain* -
- Beban bunga	1,741	5,793	*Interest cost* -
	4,705	986	
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive Income*
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:			*Actuarial (gains) losses arising from:*
- Penyesuaian tingkat bunga	-	1,755	*Financial assumptions* -
- Asumsi demografis	-	-	*Demographic assumptions* -
- Penyesuaian pengalaman	-	(3,445)	*Experience adjustment* -
	-	(1,690)	
Lainnya			*Others*
- Pembayaran manfaat	(533)	(5,953)	*Benefits paid* -
Saldo akhir	92,936	88,764	*Ending balance*

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)*

Tabel berikut ini menyajikan mutasi akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain.

The following table reflects the balance of the accumulated actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income.

	31 Maret/ March 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	1,149	(541)	*Beginning balance*
Diakui selama periode berjalan	-	1,690	*Recognized during the period*
Saldo akhir	1,149	1,149	*Ending balance*

Asumsi aktuaria / ***Actuarial assumptions***

Asumsi dasar aktuarial yang digunakan dalam menghitung nilai kewajiban pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in computing the amount of obligation as of reporting dates were as follows:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat diskonto	7.25%	7.25%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan upah	8.00%	8.00%	*Salary increment rate*
Tingkat mortalitas	100% TMI4	100% TMI4	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI4	*Disability rate*
Tingkat perputaran pekerja	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and become 0% at age 55*	5% per tahun sampai umur 35 lalu berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55/*5% p.a until age 35 then decrease linearly and become 0% at age 55*	*Resignation rate*
Usia pensiun normal	55	55	*Normal retirement age*

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan pascakerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

The future salary increase assumption projects the benefits obligations starting from the valuation date up to the normal retirement age. The increase rate of salary is generally determined based on inflation adjustment to pay scales and increase in the length of service.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban pascakerja pada tanggal 31 Maret 2023 adalah 17,24 tahun (31 Desember 2022: 16,94 tahun).

The weighted average duration of post-employment benefits obligation as of 31 March 2023 was 17.24 years (31 December 2022: 16.94 years).

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah tanpa kupon yang ada di pasar aktif pada tanggal pelaporan.

The discount rate is used in determining the present value of the benefits obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availabillty of zero-coupon government bond in active market at the reporting date.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)*

Asumsi aktuaria (Lanjutan) / ***Actuarial assumptions (Continued)***

Informasi historis: / *Historical information:*

	31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December 2021*	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	92,936	88,764	95,421	123,745	106,157	*Present value of defined benefit obligation*
Penyesuaian pengalaman	-	(1,690)	(14,790)	7,632	4,976	*Experience adjustments*

14. MODAL SAHAM / *14. SHARE CAPITAL*

Berdasarkan akta notari Aulia Taufani, SH. No. 13 tanggal 8 September 2022, pemegang saham menyetujui:

1. Perubahan nilai nominal per saham dari Rp 100 per lembar saham (dalam nilai Rupiah penuh) menjadi Rp 8 per lembar saham (dalam nilai Rupiah penuh).
2. Peningkatan modal dasar dari Rp 300.000 menjadi Rp 680.000
3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 75.010 menjadi Rp 600.080 melalui pembagian dividen saham sebesar Rp 525.070 kepada pemegang saham.

Based on notary deed of Aulia Taufani, SH. No 13 dated 8 September 2022, the general meeting of shareholders approved:

1. *To change the par value of shares from Rp 100 per share (in full amount) become Rp 8 per share (in full amount).*
2. *To increase authorized capital from Rp 300,000 to become Rp 680,000*
3. *To increase issued and paid up capital from Rp 75,010 to become Rp 600,080 through distribution of share dividend amounting Rp 525,070 to the shareholders.*

Modal dasar ditempatkan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's authorized, issued and paid-up capital as of 31 March 2023 and 31 December 2022 were as follows:

Modal dasar:		*Authorized capital:*
Jumlah saham	85,000,000,000 saham/*shares*	*Number of shares*
Nilai nominal per saham (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 8	*Par value per share (in full Rupiah amount)*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 680,000,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*
Modal ditempatkan dan dietor penuh:		*Issued and paid-up capital:*
Jumlah saham (dalam nilai penuh)	75,010,000,000 saham/*shares*	*Number of shares (in full amount)*
Total nominal (dalam nilai Rupiah penuh)	Rp 600,080,000,000	*Total par value (in full Rupiah amount)*

14. MODAL SAHAM (Lanjutan) / *14. SHARE CAPITAL (Continued)*

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 March 2023 and 31 December 2022 was as follows:

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham (dalam nilai penuh)/ *Number of shares (in full amount)*	Jumlah nominal/ *Nominal value*	%
PT Harkatjaya Bumipersada	60,000,000,000	480,000	79.99
PT Adi Pratama Nusantara	15,000,000,000	120,000	20.00
Salween Investment Pte. Ltd., Singapura/Singapore	10,000,000	80	0.01
	75,010,000,000	600,080	100.00

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 13 Desember 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan per tahun buku 2021 sebesar Rp 120.016 sebagai cadangan wajib sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Based on the Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 13 December 2022, the shareholders of the Company has approved the appropriation of 2021 financial year retained earnings amounted to Rp 120,016 as mandatory reserve in accordance with the Company Law.

15. DIVIDEN / *15. DIVIDEND*

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Maret 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian total dividen tunai sejumlah Rp 600.000 atau Rp 8 (dalam satuan Rupiah penuh) per saham biasa yang berasal dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2022. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada bulan Maret 2023.

At the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 24 Maret 2023, the shareholders approved declaration of cash dividends with total dividend of Rp 600,000 or Rp 8 (in full Rupiah amount) per ordinary share based on the retained earnings as of 31 December 2022. The cash dividend was paid in March 2023.

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *16. NON-CONTROLLING INTEREST*

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal periode/tahun	169,889	194,843	*Balance at beginning of period/year*
Bagian atas pendapatan komprehensif periode/tahun berjalan	(1,139)	44,397	*Share of comprehensive income for the period/year*
Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	(69,351)	*Subsidiaries dividend paid to non-controlling interest*
Saldo akhir periode/tahun	168,750	169,889	*Balance at end of period/year*

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan) / *16. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)*

Ringkasan informasi keuangan entitas anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material, dijabarkan berikut ini. Ringkasan informasi keuangan berikut ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

The summary of financial information of subsidiaries that has material non-controlling interest, is set out as follow. The summary of financial information as follow represents figures before intragroup elimination.

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)				
	Saldo awal periode/ *Balance at beginning of period*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan nonpengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Saldo akhir periode/ *Balance at end of period*	
PT Lestari Mitra Sembada	58,641	1,374	-	60,015	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	23,597	(538)	-	23,059	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	42,718	901	-	43,619	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	14,913	76	-	14,989	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	957	118	-	1,075	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	22,633	(3,034)	-	19,599	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Prima Mandala	6,430	(36)	-	6,394	*PT Prima Mandala*
	169,889	(1,139)	-	168,750	

	31 Desember/ *December* 2022				
	Saldo awal tahun/ *Balance at beginning of year*	Bagian jumlah penghasilan komprehensif kepentingan nonpengendali/ *Minority interest share of total comprehensive income*	Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali/ *Dividend paid to non-controlling interest*	Saldo akhir tahun/ *Balance at end of year*	
PT Lestari Mitra Sembada	102,804	19,587	(63,750)	58,641	*PT Lestari Mitra Sembada*
PT Lia Anugrah Semesta	27,092	1,605	(5,100)	23,597	*PT Lia Anugrah Semesta*
PT Pan Mitra Sembada	34,307	8,411	-	42,718	*PT Pan Mitra Sembada*
PT Kharisma Maju Abadi	11,404	3,509	-	14,913	*PT Kharisma Maju Abadi*
PT Gading Adi Permai	(54)	1,011	-	957	*PT Gading Adi Permai*
PT Nusantara Elang Sejahtera	13,076	9,557	-	22,633	*PT Nusantara Elang Sejahtera*
PT Prima Mandala	6,214	717	(501)	6,430	*PT Prima Mandala*
	194,843	44,397	(69,351)	169,889	

17. PENDAPATAN / *17. REVENUE*

Selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, tidak ada pendapatan dari pelanggan yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, there was no revenue earned from any customer that exceeded 10% of total consolidated revenue.

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	
Saat pengakuan pendapatan			***Timing of revenue recognition***
Produk dan layanan dialihkan pada waktu tertentu	865,032	621,004	*Product and services transferred at a point in time*
Layanan dialihkan sepanjang waktu	18,223	14,647	*Services transferred over time*
	883,255	635,651	

Pembelian dari pemasok yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian, terdiri dari :

The purchase from suppliers that exceeded 10% of total consolidated revenue, consist of:

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	
Bioskop			*Cinema*
PT Omega Film	111,034	96,172	*PT Omega Film*

18. BEBAN OPERASIONAL / *18. OPERATING EXPENSES*

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	
Kompensasi karyawan	123,702	91,507	*Employees' compensation*
Perbaikan dan pemeliharaan	67,575	41,470	*Repairs and maintenance*
Utilitas	51,614	44,645	*Utilities*
Perpajakan	28,067	14,858	*Taxes*
Sewa	26,519	21,342	*Rental*
Perjalanan dinas, transportasi dan akomodasi	11,856	5,365	*Travel, transportation and accommodation*
Keperluan kantor	7,919	5,209	*Office supplies*
Komunikasi	5,042	6,315	*Communication*
Promosi	3,811	312	*Promotion*
Asuransi	3,680	3,472	*Insurance*
Jasa manajemen	1,230	7,420	*Management fees*
Jasa profesional	1,313	731	*Professional fees*
Konsesi sewa	-	(14,109)	*Lease concession*
Lain-lain	5,496	3,414	*Miscellaneous*
	337,824	231,951	

Konsesi sewa merupakan potongan atas sewa ruangan yang diberikan oleh pemilik gedung kepada Grup karena penutupan sementara bioskop untuk mengikuti instruksi pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Grup menerapkan panduan praktis PSAK 73 untuk seluruh konsesi sewa yang memenuhi kondisi yang ditetapkan dan mengakui dampak atas konsesi sewa sebagai pengurang beban operasional.

Lease concession represents discount of space rental granted by building management to the Group due to temporary closure of cinemas as instructed by government to curb COVID-19 pandemic. The Group applied PSAK 73 practial expedient to all rent concessions that meet the conditions and recorded the impact of rent concession as reduction of operating expense.

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI / *19. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Perseroan dikendalikan oleh PT Harkatjaya Bumipersada (berbadan hukum di Indonesia), yang memiliki 79,99% saham Perseroan.

The Company is controlled by PT Harkatjaya Bumipersada (incorporated in Indonesia), which owns 79.99% of the Company's shares.

a. Penghasilan sewa dan pembelian barang / *a. Rental income and purchase of goods*

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	
Penghasilan sewa:			*Rental income:*
Entitas sepengendali	199	13	*Entity under common control*
Pembelian barang dan jasa:			*Purchase of goods and services:*
Entitas sepengendali	150,298	88,802	*Entities under common control*

b. Kompensasi personil manajemen kunci / *b. Key management employees compensation*

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah direktur dan komisaris. Berikut ini mencerminkan kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci atas jasa yang diberikan dalam kapasitas mereka sebagai karyawan:

Key management includes directors and commissioners. The following reflects compensation paid or payable to key management individuals for services rendered in their capacity as employees:

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month periods ended 31 March*		
	2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	2022 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya			*Salaries, and other short-term benefits*
Direksi	5,375	3,764	*Board of Director*
Dewan komisaris	3,094	3,040	*Board of Commissioners*
Manajemen senior	775	1,726	*Senior management*
Jumlah	9,244	8,530	*Total*
Sebagai persentase dari beban kompensasi karyawan	7.47%	9.32%	*As a percentage from total employee cost*

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan) / *19. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)*

c. Saldo akhir yang timbul dari tagihan lainnya dan pembelian barang atau jasa.

c. Ending balances arising from other charges and purchase of goods or services.

	31 Maret/ *31 March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *31 December* 2022	
Piutang usaha dan piutang lainnya dari pihak-pihak berelasi			*Trade and other receivables from related parties*
Entitas sepengendali	57	115	*Entity under common control*
Pemegang saham	-	-	*Shareholders*
	57	115	
Sebagai persentase dari piutang usaha dan piutang lainnya	0.12%	0.17%	*As a percentage from trade and other receivables*
Uang muka untuk pembelian aset tetap dari pihak-pihak berelasi			*Advance payment for purchase of fixed assets from related parties*
Entitas sepengendali (Catatan 23a)	28,400	50,750	*Entity under common control (Note 23a)*
Sebagai persentase dari uang muka untuk pembelian aset tetap	16.99%	37.72%	*As a percentage from advance payment for purchase of fixed assets*
Utang usaha dan utang lainnya kepada pihak-pihak berelasi			*Trade and other payables to related parties*
Entitas sepengendali	41,323	47,656	*Entities under common control*
Sebagai persentase dari utang usaha dan utang lainnya	10.87%	10.77%	*As a percentage from trade and other payables*

Utang lain-lain pada pihak-pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai liabilitas lancar.

Other payables from related parties will be settled within one year, therefore, they are presented as current liabilities.

d. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

d. The related parties and the nature of relationship are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*
PT Megatech Engineering	Pembelian peralatan bioskop, sewa gedung, dan penyewaan ruang untuk video game arcade/ *Purchase of cinema equipment, office rental, and revenue sharing rental for video arcade game.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Multi Interbuana Teknindo	Pemeliharaan peralatan bioskop/ *Cinema maintenance service.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Delta Raya Sejahtera	Manajemen operasional pada segment makanan dan minuman dan pasokan material makanan dan minuman/ *Operational management of food and beverages segment and supply of food and beverages material.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Delta Raya Sentosa	Pembelian material makanan dan minuman/ *Purchase of food and beverages material.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Citrabersama Mututama	Sewa gedung dan sewa mobil/ *Building rental and car rental.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Eka Jaya Agung	Sewa gedung, jasa pengelolaan dan utilitas/ *Building rental for cinema, service charge and utilities.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Bioskop Metropole	Sewa gedung, jasa pengelolaan dan utulitas/ *Building rent, service charge and utilities.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
PT Bumtraco Agung	Sewa mobil/ *Car rental.*	Entitas sepengendali – dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ *An entity under common control – owned by the same ultimate shareholder.*
Harris Lasmana	Sewa gedung dan jasa pengelolaan/ *Building rental, car rental and service charge.*	Pengendali PT Adi Pratama Nusantara/ *Party who is controlling PT Adi Pratama Nusantara.*
Dewan Komisaris dan Direksi/ *Board of Commissioners and Directors*	Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya/ *Salaries and other short-term benefits.*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel.*

20. RUGI PER SAHAM / *20. LOSS PER SHARE*

Perhitungan rugi per saham adalah berdasarkan data sebagai berikut:

The computation of loss per share are based on the following data:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Maret/ *March* 2022 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Rugi untuk perhitungan rugi per saham dasar	(24,450)	(47,891)	*Loss for computations of loss per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar untuk perhitungan laba bersih per saham dasar (dalam nilai penuh)*	75,010,000,000	75,010,000,000	*Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share (in full amount)**
Rugi per saham, dasar (dalam nilai penuh)	(0.33)	(0.64)	*Loss per share, basic (in full amount)*

Perseroan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa dilusian pada tahun 2023 dan 2022.

The Company has no dilutive potential ordinary shares in 2023 and 2022.

* Disesuaikan atas dampak pemecahan nilai nominal saham dan pembagian dividen saham (Catatan 14)

** Adjusted for the impact of stock split and distribution of share dividend (Note 14)*

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN / *21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

Instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup diharapkan dapat terealisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Financial instruments

The Group's financial assets and liabilities are expected to be realized or settled in the near term. Therefore, their carrying amount approximate their fair values.

Manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

Financial risk management

In performing its operating, investing and financing activities, the Group faces financial risks such as credit risk, liquidity risk and market risk.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan jika pelanggan atau pihak rekanan dari instrumen keuangan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit Grup pada prinsipnya timbul dari piutang usaha dari pelanggan.

Nilai tercatat aset keuangan merupakan nilai maksimum risiko kredit.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss in the event that a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations. The Group's credit risk principally arises from trade receivables from customers.

The carrying amounts of financial assets represent the maximum credit exposure.

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	Nilai tercatat/ *Carrying value*		
	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Kas di bank dan setara kas	2,032,474	2,013,599	*Cash in banks and cash equivalents*
Piutang usaha dan piutang lainnya	45,785	69,346	*Trade and other receivables*
Dana jaminan (bagian dari aset tidak lancar lainnya)	79,794	77,968	*Refundable deposits (part of other non-current assets)*
	2,158,053	2,160,913	

Piutang usaha

Eksposur risiko kredit Grup dipengaruhi terutama oleh karakteristik individu dari setiap pelanggan. Namun, manajemen juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit pelanggannya, termasuk risiko gagal bayar yang terkait dengan industri tempat pelanggan beroperasi.

Grup meminimalkan eksposur terhadap risiko kredit dari piutang usaha dengan memastikan bahwa penjualan produk dilakukan hanya kepada pelanggan yang layak mendapatkan kredit dengan rekam jejak yang terbukti atau riwayat kredit yang baik, menetapkan batasan kredit yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Eksposur juga dibatasi lebih lanjut dengan mewajibkan syarat pembayaran tidak lebih dari 30 hari dan dengan secara aktif memberlakukan penagihan dari pelanggan sebelum tanggal jatuh tempo.

Trade receivables

The Group's exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. However, management also considers the factors that may influence the credit risk of its customer base, including the default risk associated with the industry in which customers operate.

The Group minimizes its exposure to credit risk of trade receivables by setting policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history, setting credit limit for customers and monitor the exposure associated with these restrictions. The exposure is also further limited by mandating payment terms of no longer than 30 days and by actively enforcing collection from customers prior to the due date.

Kas dan setara kas

Kas di bank dan Setara kas Grup ditempatkan di bank yang bereputasi baik yang tunduk terhadap peraturan yang ketat, oleh sebab itu, eskposur terhadap kerugian diminimalkan.

Cash and cash equivalents

The Group's cash in banks and cash equivalents are deposited at reputable banks that are subject to tight regulations, therefore, the exposure to loss is minimized.

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup memiliki modal kerja negatif sebesar Rp 753.966, namun ekuitas tetap positif. Manajemen yakin bahwa Grup akan dapat membayar pinjaman-pinjamannya pada saat jatuh tempo, dengan pertimbangan bahwa semua pinjaman bank dijamin rekening tabungan pemegang saham (Catatan 10). Selain itu, Grup memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp 2.044.303 pada tanggal 31 Maret 2023 dan Grup menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 187.819 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023. Grup memonitor kebutuhan likuiditas Grup dengan memonitor arus kas keluar untuk aktivitas operasional sehari-hari dan mengantisipasi lebih awal arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Berikut ini adalah arus kas kontraktual liabilitas keuangan:

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

As of 31 March 2023, the Group has negative working capital amounted to Rp 753,966, but the equity remains positive. Management believes that the Group will be able to repay its debts, as and when they fall due, considering that all of the bank loans are fully secured with the cash deposit pledged by the shareholders (Note 10). In addition, the Group has cash and cash equivalents of Rp 2,044,303 as of 31 March 2023 and the Group was able to generate positive cash inflow from operating activities amounted to Rp 187,819 during three-month period ended 31 March 2023. The Group monitors their liquidity need by closely monitoring the cash outflows for day to day operations as well as early anticipation of cash outflows for investment and financing activities.

The following is the contractual maturities of financial liabilities:

		Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*				
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Maret 2023 (Tidak diaudit)						***31 March 2023 (Unaudited)***
Utang usaha dan utang lainnya	380,103	380,103	380,103	-	-	*Trade and other payables*
Liabilitas sewa	1,626,289	2,661,389	213,890	1,129,541	1,317,958	*Lease liabilities*
Pinjaman bank	2,299,223	2,336,782	2,336,782	-	-	*Bank Loan*
	4,305,615	5,378,274	2,930,775	1,129,541	1,317,958	

		Arus kas kontraktual/*Contractual cash flows*				
	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Total/ *Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Dalam 1 dan 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
31 Desember 2022						***31 December 2022***
Utang usaha dan utang lainnya	442,454	442,454	442,454	-	-	*Trade and other payables*
Liabilitas sewa	1,622,968	2,660,560	199,652	1,114,989	1,345,919	*Lease liabilities*
Pinjaman bank	1,697,415	1,728,547	1,728,547	-	-	*Bank Loan*
	3,762,837	4,831,561	2,370,653	1,114,989	1,345,919	

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan kurs dan tingkat bunga akan mempengaruhi penghasilan Grup atau nilai dari instrumen keuangannya. Tujuan manajemen risiko pasar adalah untuk menjaga eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, sementara mengoptimalisasi imbal hasil.

Net eksposur Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Dalam Dolar AS			*In US Dollar*
Aset	13,625,145	13,550,408	*Assets*

Pada tanggal pelaporan, saldo aset moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku yaitu Rp 15.062/USD pada tanggal 31 Maret 2023 dan Rp 15.731/USD pada tanggal 31 Desember 2022.

Menguatnya/melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS akan menyebabkan kenaikan (penurunan) ekuitas dan laba atau rugi setelah pajak penghasilan. Analisa ini didasarkan pada perbedaan kurs Dolar AS yang manajemen pertimbangkan akan terjadi pada tanggal pelaporan. Analisa ini mengasumsikan semua variable lainnya konstan dan tidak memperhitungkan pengaruh dari perkiraan penjualan dan pembelian.

Analisis sensitivitas

Grup menilai penguatan/pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 tidak akan berdampak signifikan terhadap ekuitas dan laba atau rugi setelah pajak penghasilan.

Risiko tingkat bunga

Grup memiliki pinjaman bank dengan suku bunga tetap, dan oleh karena itu Grup terekspos risiko atas perubahan nilai wajar pinjaman bank. Meski demikian, pinjaman bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan jangka waktu pinjaman bank kurang dari 1 tahun sehingga dampak perubahan nilai wajar tidak signifikan.

Financial risk management (Continued)

c. Market Risk

Market risk is the risk that changes in foreign exchange rates and interest rates will affect the Group's income or the value of its financial instruments. The objective of market risk management is to maintain market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

The Group's net exposure to currency risk is as follows:

At reporting dates, balances of monetary assets denominated in currencies other than Rupiah are translated into Rupiah using the prevailing exchange rates, which were Rp 15,062/USD as of 31 March 2023 and Rp 15,731/USD as of 31 December 2022.

A strengthening/weakening of the Rupiah against the US Dollar would have increased (decreased) equity and profit or loss after income tax. This analysis is based on US Dollar rate variances that management considers as being reasonably possible at the reporting date. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant and ignores any impact of forecasted sales and purchases.

Sensitivity analysis

The Group assessed that the strengthening/weakening of US Dollar against Indonesian Rupiah at 31 March 2023 and 31 December 2022 would not have significant to equity and profit or loss after income tax .

Interest rate risk

The Group has fixed-rate bank loans, and thus the Group is exposed to risk of change in fair value of the loans. However, loans are measured at amortized cost and bank loans term are within 1 year, so that changes in fair value do not significant.

21. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

c. Risiko Pasar (Lanjutan)

Analisis sensitivitas (Lanjutan)

Risiko tingkat bunga (Lanjutan)

Grup mengelola modal dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan mendukung kemampuannya untuk memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal efektif. Tujuan ini dicapai dengan menyesuaikan jumlah dividen dan mengoptimalisasi tingkat utang.

Financial risk management (Continued)

c. Market Risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

Interest rate risk (Continued)

The Group manages capital with the objective of being able to continue as a going concern and sustaining its ability to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, as well as maintaining an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. This objective is achieved by adjusting the amounts of dividends and by optimizing debt levels.

22. SEGMEN OPERASI

22. OPERATING SEGMENTS

Grup mengkategorikan kegiatan usahanya berdasarkan produk utama, yaitu film, makanan dan minuman, iklan, *digital platform* dan lainnya. Tidak terdapat penjualan antar segmen selama periode berjalan.

Informasi mengenai segmen usaha Grup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

The Group categorizing its business based on key products, namely movie, food and beverages, advertisement, digital platform and others. There is no inter-segment sales during the period.

The information concerning the Group business segments for three-month periods ended 31 March 2023 and 2022 are presented as follows:

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENTS (Continued)*

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month period ended 31 March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)						
	Film/ *Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	530,275	310,728	18,223	17,364	6,665	883,255	*External customers*
Beban dan biaya operasi:							*Operating cost and expenses:*
Beban	(265,138)	(91,687)	-	(3,997)	(702)	(361,524)	*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(202,503)	(55,722)	(811)	(10,971)	(67,817)	(337,824)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(157,197)	(7,025)	(4)	(131)	(2,933)	(167,290)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	317	402	-	-	179	898	*Other income*
Beban lainnya	(60)	(34)	-	(100)	(40)	(234)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	5,329	29	-	671	2,281	8,310	*Finance income*
Beban keuangan	(31,733)	-	-	-	(9,500)	(41,233)	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	(120,710)	156,691	17,408	2,836	(71,867)	(15,642)	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(76,757)	99,636	11,070	1,803	(45,699)	(9,947)	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**(197,467)**	**256,327**	**28,478**	**4,639**	**(117,566)**	**(25,589)**	***Profit (loss)***

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month period ended 31 March* 2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)						
	Film/ *Movie*	Makanan dan Minuman/ *Food and Beverages*	Iklan/ *Advertisement*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Pendapatan							***Revenue***
Pihak eksternal	406,948	200,364	14,647	11,742	1,950	635,651	*External customers*
Beban dan biaya operasi:							*Operating cost and expenses:*
Beban	(203,474)	(57,152)	-	(3,249)	(104)	(263,979)	*Cost*
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(143,228)	(40,377)	(555)	(5,474)	(42,317)	(231,951)	*Operating expense, excluding depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	(157,140)	(7,347)	-	(107)	(2,301)	(166,895)	*Depreciation of fixed assets*
Pendapatan (beban) lainnya:							*Other income (expense):*
Pendapatan lainnya	151	4	2	-	24	181	*Other income*
Beban lainnya	(3)	(5)	-	(2)	(72)	(82)	*Other expenses*
Penghasilan keuangan	1,136	20	-	200	5,355	6,711	*Finance income*
Beban keuangan	(33,111)	-	-	-	(216)	(33,327)	*Finance cost*
Laba (rugi) sebelum pajak	(128,721)	95,507	14,094	3,110	(37,681)	(53,691)	*Profit (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	14,567	(10,808)	(1,595)	(352)	4,264	6,076	*Income tax (expense) benefit*
Laba (rugi)	**(114,154)**	**84,699**	**12,499**	**2,758**	**(33,417)**	**(47,615)**	***Profit (loss)***

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENTS (Continued)*

Aset dan liabilitas segmen / ***Segment assets and liabilities***

	31 Maret/ *March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/*Food and Beverages*	Iklan/ *Advertising*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen	3,802,547	203,531	104	1,247	15,459	4,022,888	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						2,650,267	*Unallocated segment assets*
						6,673,155	
Liabilitas segmen	1,668,052	381,372	-	135,576	9	2,185,009	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						2,461,086	*Unallocated segment liabilities*
						4,646,095	

	31 Desember/*December* 2022						
	Film/*Movie*	Makanan dan Minuman/*Food and Beverages*	Iklan/ *Advertising*	*Digital platform*	Acara dan lainnya/ *Event and others*	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen	3,766,470	203,099	-	3,823	62,708	4,036,100	*Segment assets*
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						2,723,446	*Unallocated segment assets*
						6,759,546	
Liabilitas segmen	1,700,280	399,713	-	137,388	7	2,237,388	*Segment liabilities*
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						1,869,509	*Unallocated segment liabilities*
						4,106,897	

Jumlah yang dilaporkan kepada Direksi sehubungan dengan jumlah aset dan liabilitas diukur dengan cara yang konsisten dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Aset dan liabilitas ini dialokasikan berdasarkan segmen operasi.

The amount provided to the Board of Directors with respect to assets and liabilities are measured in a manner consistent with that of the financial statements. These assets and liabilities are allocated based on the operating segment.

Rekonsiliasi aset segmen terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

Reportable segments' assets are reconciled to total assets as follows:

	31 Maret/ March 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset segmen untuk segmen yang dilaporkan	4,022,888	4,036,100	*Segment assets for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Kas dan setara kas	2,044,303	2,048,962	*Cash and cash equivalents* -
- Piutang usaha dan piutang lainnya	45,785	69,346	*Trade and other receivables* -
- Uang muka dan beban dibayar di muka	34,545	21,411	*Advances and prepayments* -
- Aset tetap	-	2,742	*Fixed assets* -
- Uang muka untuk pembelian aset tetap	167,143	134,555	*Advance payment for purchase of fixed assets* -
- Klaim pengembalian pajak	28,146	129,456	*Claims for tax refund* -
- Pajak dibayar di muka	13,297	-	*Prepaid taxes* -
- Aset pajak tangguhan	215,292	218,815	*Deferred tax assets* -
- Aset tidak lancar lainnya	101,756	98,159	*Other non-current assets* -
Jumlah aset menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**6,673,155**	**6,759,546**	*Total assets per consolidated statement of financial position*

22. SEGMEN OPERASI (Lanjutan) / *22. OPERATING SEGMENTS (Continued)*

Aset dan liabilitas segmen (Lanjutan) / ***Segment assets and liabilities (Continued)***

Rekonsiliasi liabilitas segmen terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut: / *Reportable segments' liabilities are reconciled to total liabilities as follows:*

	31 Maret/ March 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2022	
Liabilitas segmen untuk segmen yang dilaporkan	2,185,009	2,237,388	*Segment liabilities for reportable segments*
Yang tidak dapat dialokasikan:			*Unallocated:*
- Utang pajak penghasilan	8,409	7,681	*Income tax payable* -
- Utang pajak lainnya	60,518	75,649	*Other taxes payable* -
- Pinjaman bank	2,299,223	1,697,415	*Bank loans* -
- Kewajiban imbalan kerja	92,936	88,764	*Employee benefits obligation* -
Jumlah liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian	**4,646,095**	**4,106,897**	*Total liabilities per consolidated statement of financial position*

Informasi Geografis / ***Geographical Information***

Tier 1			Tier 2		Tier 3	
Balikpapan	Manado	Tanjung Pinang	Banjarmasin	Padang	Ambon	Pekalongan
Bandung	Medan	Tarakan	Bengkulu	Palangkaraya	Baganbatu	Rantau Rapat
Cilegon	Palembang	Yogyakarta	Bogor	Palu	Batam	Singkawang
Cirebon	Pekanbaru		Cikarang	Pangkal Pinang	Bekasi	Sumedang
Dumai	Samarinda		Denpasar	Pontianak	Garut	Tasikmalaya
Jakarta	Semarang		Gresik	Sidoarjo	Gorontalo	
Jayapura	Solo		Jambi	Sorong	Jember	
Kediri	Surabaya		Kupang	Ternate	Karawang	
Makasar	Tangerang		Lampung		Kisaran	
Malang			Monokwari		Mataram	

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month period ended 31 March* 2023				
	Tier 1	**Tier 2**	**Tier 3**	**Total**	
Pendapatan					*Revenue*
Film	362,682	110,350	57,243	530,275	*Movie*
Makanan dan minuman	212,798	63,315	34,615	310,728	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	934	71	6	1,011	*Other revenue attributable to each cinema location*
	576,414	**173,736**	**91,864**	**842,014**	

	Periode tiga bulan berakhir 31 Maret/ *Three-month period ended 31 March* 2022 (Tidak diaudit/*Unaudited*)				
	Tier 1	**Tier 2**	**Tier 3**	**Total**	
Pendapatan					*Revenue*
Film	275,066	86,934	44,948	406,948	*Movie*
Makanan dan minuman	135,237	41,549	23,578	200,364	*Food and beverages*
Lainnya yang dapat diattribusikan ke tiap lokasi bioskop	295	69	35	399	*Other revenue attributable to each cinema location*
	410,598	**128,552**	**68,561**	**607,711**	

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING / *23. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

Grup memiliki perjanjian eksploitasi teatrikal dengan pemilik dan importir film yang memasok film ke bioskop yang dimiliki dan dioperasikan oleh Grup. Perjanjian ini bersifat non-eksklusif dan dibuat untuk setiap judul film dengan mekanisme pembagian pendapatan sebesar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan sesuai ketentuan pajak daerah. Perseroan pemilik dan importir film tersebut, diantaranya adalah, PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film dan PT Omega Film.

The Group has a theatrical exploitation agreement with the owners and importers of films to supply films to cinemas owned and operated by the Group. This agreement is non-exclusive and shall be made for each title of the film with a revenue sharing mechanism of 50% of total ticket sales after deducted by entertainment tax under regional tax law. The Companies who own and import the films, among others, are PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film and PT Omega Film.

Grup juga memiliki perjanjian-perjanjian penting lainnya, yaitu:

The Group also has others significant agreements with:

a. PT Megatech Engineering, Grup memiliki dua perjanjian, sebagai berikut:
   - Perjanjian sewa pada tanggal 2 Januari 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 28 Desember 2018. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan perjanjian ini, PT Megatech Engineering antara lain diwajibkan untuk menyediakan pembayaran sewa untuk ruang *arcade game* yang disewa di ruang bioskop Grup. Pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari penjualan kotor *video/game arcade* di bioskop Grup. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah pendapatan sewa yang diterima Grup masing-masing sebesar Rp 199 dan Rp 13 Perjanjian ini secara otomatis akan diakhiri jika sewa antara Grup dan pesewa diakhiri.

   - Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini kewajiban PT Megatech Engineering, antara lain: (i) menyediakan peralatan bioskop berdasarkan pesanan Grup; (ii) mengirimkan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan, dan (iii) melakukan pemasangan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan. Besaran imbalan mengacu kepada negoisasi kedua belah pihak, yang akan dimasukan ke dalam tagihan yang diterbitkan oleh PT Megatech Engineering. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing besar Rp 60.461 dan Rp 8.523. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika salah satu pihak, diantaranya, (i) dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan usaha, (ii) tidak dapat melakukan pembayaran atau (iii) berhenti melakukan bisnis utamanya atau asetnya disita.

a. PT Megatech Engineering, Group has two agreements, as follows:
   - *Lease agreement dated 2 January 2017, as amended on 28 December 2018. This agreement is valid until 31 December 2023. Pursuant to this agreement, PT Megatech Engineering is required to, among others, provide payment of lease for the arcade game room rented within the space of the Group's cinemas. The lease payment is in the amount of 35% from gross sales of video/arcade games in the Group cinema. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total rental income received by the Group were Rp 199 and Rp 13, respectively. This agreement will automatically be terminated if the lease between the Group and the lessor is terminated.*

   - *Cooperation of Sale and Purchase and Installation of Cinema Equipment Agreement dated 12 April 2017. Pursuant to this agreement, PT Megatech Engineering is required to, among others: (i) provide cinema equipment based on the Group's order (ii) deliver the ordered cinema equipment at the designated locations, and (iii) install the cinema equipment at the designated locations. The fee refers to negotiations between both parties, which will be included in the invoices issued by PT Megatech Engineering. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total purchases under this agreement were amounted to Rp 60,461 and Rp 8,523, respectively. Either party may at any time immediately terminate this agreement, if either party, among others, (i) is in the process of voluntary liquidation other than for the purposes of reconstruction or mergers, (ii) is unable to make any payments or (iii) ceases to conduct its main business or its assets are confiscated.*

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

b. PT Multi Interbuana Teknindo (MIT), Perjanjian Kerjasama tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, MIT berkewajiban untuk, antara lain, memberikan jasa perawatan peralatan bioskop di lokasi yang telah ditentukan dan melakukan pemeriksaan setiap peralatan bioskop yang sudah diperbaiki berdasarkan permintaan Grup. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah imbalan yang ditagih ke Grup untuk jasa yang diterima berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 9.137 dan Rp 8.024.

b. PT Multi Interbuana Teknindo (MIT), Cooperation Agreement dated 12 April 2017. Pursuant to this agreement, MIT is required to, among others, provide cinema equipment maintenance services at the designated locations and inspect each of cinema equipment that has been serviced based on the Grup's request. This agreement is valid from 1 January 2016 until one of the parties terminates the agreement. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total fees charged to the Group for services received under this agreement were amounted to Rp 9,137 and Rp 8,024, respectively.

c. PT Delta Raya Sejahtera, Perjanjian Memasok tanggal 26 April 2017. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahun berikutnya, kecuali diputus lebih dini atau tidak diperpanjang oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan perjanjian ini, kewajiban PT Delta Raya Sejahtera, antara lain, menyediakan produk makanan dan minuman berdasarkan permintaan Grup. Suatu pihak dapat mengakhiri perjanjian jika (i) pihak lain menjadi bangkrut atau pailit atau menjalani proses serupa atau (ii) pihak yang gagal bayar melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak gagal bayar. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 96.732 dan Rp 49.737.

c. PT Delta Raya Sejahtera, Supply Agreement dated 26 April 2017. The agreement is valid until 31 December 2017 and will be automatically renewed for subsequent period of one year each, unless terminated earlier or not extended by any of the parties with prior written notification. Pursuant to this agreement, PT Delta Raya Sejahtera is required to, among others, provide the supply of food and beverage products based on request by the Group. A party may terminate the agreement if (i) the other party becomes bankrupt or insolvent or undergoes similar proceedings or (ii) the defaulting party breaches its obligation under this agreement and does not remedy of such breach within 14 days after receiving notice from the non-defaulting party. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total purchases under this agreement were amounted to Rp 96,732 and Rp 49,737, respectively.

d. PT Delta Raya Sentosa, Perjanjian Memasok tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PT Delta Raya Sentosa berkewajiban untuk memasok produk makanan dan minuman kepada Grup. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan perpanjangan secara otomatis. Nilai perjanjian ini ditentukan berdasarkan pada faktur yang diterbitkan oleh PT Delta Raya Sentosa. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 27.889 dan Rp 16.922.

d. PT Delta Raya Sentosa, Supply Agreement dated 26 April 2017. Based on this agreement, PT Delta Raya Sentosa is obliged to supply food and beverage products to the Group. This agreement is valid until 31 December 2017 with automatic extension. The value of this agreement is determined based on the invoice issued by PT Delta Raya Sentosa. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total purchases under this agreement were amounted to Rp 27.889 and Rp 16.922, respectively.

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

e. PT Prakarsa Gunawan dan Sons (PGS), Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PGS diwajibkan untuk menyerahkan setiap dan seluruh hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan Grup. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai diakhiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini. Nilai perjanjian kerjasama ini sesuai dengan nilai masing-masing invoice pembangunan bioskop yang disetujui oleh para pihak. Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, jumlah imbalan yang ditagih ke Grup untuk jasa yang diterima berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 91.952 dan Rp 7.066.

e. PT Prakarsa Gunawan and Sons (PGS), Cinema Development Cooperation Agreement dated 12 April 2017. Based on this agreement, PGS is required to deliver any and all development results in accordance with the provisions of this agreement and in a form that satisfies the Group. This agreement is valid from 1 January 2016 until terminated by one of the parties of this agreement. The value of this cooperation agreement is in accordance with the value of each cinema construction invoice agreed by the parties. In the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022, total fees charged to the Group for services received under this agreement were amounted to Rp 91.952 and Rp 7.066, respectively.

24. DAMPAK COVID-19 / *24. IMPACT OF COVID-19*

Selama tahun 2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia melonggarkan pembatasan terkait COVID-19 untuk operasional bioskop. Bioskop diinzinkan untuk beroperasi pada kapasitas penuh mulai dari tanggal 24 Mei 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah pusat mencabut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia.

During 2022, Indonesian's central and regional government has significantly loosened the COVID-19 restriction for cinema operation. Cinemas were permitted to operate at full capacity started from 24 May 2022. On 30 December 2022, central government revoked PPKM (Community Activities Restrictions Enforcement) in Indonesia.

Masih terdapat ketidakpastian tentang bagaimana wabah COVID-19 berdampak pada bisnis Grup di masa depan dan minat konsumen untuk kembali ke bioskop. Oleh karena itu, manajemen telah membuat beberapa skenario yang berbeda. Asumsi dibuat berdasarkan perkiraan terhadap dampak pembatasan dan peraturan terkait mitigasi COVID-19 dan tingkat permintaan konsumen yang diharapkan.

There is still uncertainty over how the outbreak will impact the Group's business in future periods and customer demand for cinema visits. Management has therefore modelled several different scenarios. The assumptions modelled are based on the estimated potential impact of COVID-19 restrictions and regulations and expected levels of consumer demand.

Selain itu, melihat perkembangan positif situasi COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia serta dibuka kembalinya *pipeline* film dari Amerika Serikat untuk film *box office* besar, dan pada saat yang sama kepercayaan masyarakat untuk mengunjungi bioskop di Indonesia telah pulih secara bertahap. Oleh karena itu, manajemen optimistis industri bioskop akan berangsur pulih di masa mendatang.

Furthermore, looking at recent positive development of COVID-19 situation in United States and Indonesia, and re-opening film pipeline from United States for big box office movies, and at the same time public confidence in Indonesia to visit cinema is gradually restored. Therefore, management is optimistic that the cinema industry will steadily recover in the future.

25. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH / *25. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION*

Rekonsiliasi pergerakan liabilitas sewa terhadap arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of movement of lease liabilities to cash flow arising from financing activities are as follows:

Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 (Tidak diaudit)
The three-month period ended 31 March 2023 (Unaudited)

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas keluar-bersih/ *Net cash out-flows*	Kontrak sewa baru/*New lease contracts*	Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing/ *Loss (gain) on foreign currency*	Konsesi sewa diterima/ *Lease concession received*	Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya/ *overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*	Pergerakan utang bunga/ *Interest payable movement*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas sewa	1,622,968	(44,267)	19,794	(4,743)	-	-	32,537	1,626,289	*Lease liabilities*

Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
The three-month period ended 31 March 2022 (Unaudited)

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas keluar-bersih/ *Net cash out-flows*	Kontrak sewa baru/*New lease contracts*	Kerugian (keuntungan) dari mata uang asing/ *Loss (gain) on foreign currency*	Konsesi sewa diterima/ *Lease concession received*	Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya/ *overdue lease liabilities which was reclassified as trade and other payables*	Pergerakan utang bunga/ *Interest payable movement*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas sewa	1,677,270	(39,372)	-	257	(14,109)	-	33,327	1,657,373	*Lease liabilities*

26. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN RUPIAH

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, Grup memiliki aset keuangan dalam denominasi mata uang selain Rupiah sebagai berikut:

26. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES IN CURRENCY OTHER THAN RUPIAH

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, The Group has financial assets denominated in currencies other than Rupiah as follows:

	31 Maret/*March* 2023 (Tidak diaudit/*Unaudited*)		31 Desember/*December* 2022		
	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent* IDR	
Aset					***Asset***
Kas dan setara kas					*Cash and cash equivalents*
Dolar AS	13,625,145	205,222	13,550,408	213,161	*US Dollar*

XXI. LAPORAN TINJAUAN INDUSTRI

Halaman ini sengaja dikosongkan

IPO Project Maverick – Kajian Riset IPO terkait Industri Bioskop di Indonesia

Laporan khusus yang disusun oleh Euromonitor International untuk

Cinema XXI
Februari 2023

www.euromonitor.com

© Hak Cipta oleh Euromonitor International Ltd 2023. Seluruh materi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan hak eksklusif dari Euromonitor International Ltd dan pemberi lisensinya dan disediakan tanpa jaminan atau representasi mengenai akurasi atau kelengkapan. Setiap kepercayaan terhadap materi tersebut dilakukan atas risiko pengguna. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal oleh PTA dan afiliasinya saja. Publikasi atau membuat tersedia untuk pihak ketiga seluruh atau sebagian materi yang terdapat dalam dokumen ini (atau data atau materi lain yang berasal dari materi tersebut) tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari Euromonitor sangat dilarang. Mohon merujuk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dengan Euromonitor.

PEMBERITAHUAN PENTING

Informasi yang terdapat dalam Laporan Industri Pasar ini disusun oleh Euromonitor International Limited dan mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber publik dan survei opini perdagangan, dan disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Referensi kepada Euromonitor International Limited tidak boleh dianggap sebagai pendapat Euromonitor International Limited mengenai nilai dari setiap sekuritas atau kebijaksanaan investasi di Grup tersebut. Para direktur tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut adalah palsu atau menyesatkan atau bahwa fakta material telah dihilangkan sehingga membuat informasi tersebut menjadi palsu atau menyesatkan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan tercantum dalam Laporan Industri Pasar ini belum diverifikasi secara independen oleh Cinema XXI, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi atau pihak lain yang terlibat dalam penawaran global dan tidak ada dari mereka memberikan representasi mengenai akurasi informasi tersebut dan informasi tersebut tidak boleh diandalkan dalam membuat atau menahan keputusan investasi.

© Euromonitor International Ltd 2023. Syarat dan ketentuan penggunaan yang berlaku dan disclaimer di bagian depan dokumen ini berlaku.

Daftar Isi

Pemberitahuan Penting 2
1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 4
1.1 Objek penelitian 4
1.2 Sumber informasi industri 4
1.3 Metodologi penelitian 4
1.4 Dasar prakiraan dan asumsi 4
1.5 Definisi dan cakupan 5
1.6 Tentang euromonitor 5
2. LINGKUNGAN MAKROEKONOMI 6
2.1 Analisis indikator makroekonomi 6
3. BIOSKOP DI INDONESIA 17
3.1 Sejarah kinerja industri 17
3.2 Tinjauan industri bioskop berdasarkan kota 22
3.3 Penggerak industri 23
3.4 Penghalang industri 26
3.5 Industri bioskop dari prespektif konsumen di Indonesia 28
3.6 Perbandingan industri bioskop di seluruh pasar 33
3.7 Peraturan dan investasi yang mempengaruhi industri bioskop dan keseluruhan bidang rekreasi. 36
3.8 Analisis rantai nilai 37
3.9 Prospek industri 38
4. ANALISIS LANSKAP KOMPETITIF DI INDONESIA 42
4.1 Gambaran umum persaingan pasar 42
4.2 Pemain utama pasar 43
4.3 Lima besar pemain pasar dari perspektif konsumen 44
5. LAMPIRAN 46

© Euromonitor International Ltd 2023. Syarat dan ketentuan penggunaan yang berlaku dan disclaimer di bagian depan dokumen ini berlaku.

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

1.1 OBJEK PENELITIAN

Cinema XXI ("Klien") merencanakan untuk melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memerlukan penilaian independen mengenai industri bioskop di Indonesia dalam bentuk Laporan Analisa Industri.

1.2 SUMBER INFORMASI INDUSTRI

Bagian "Analisis Industri" ini berisi informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International dengan tujuan prospektus. Laporan terakhir diperbarui pada bulan Feburari 2023

1.3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyusun dan mempersiapkan Laporan Industri Pasar Euromonitor, Euromonitor International menggunakan sejumlah metodologi untuk mengumpulkan berbagai sumber data, memvalidasi data dan informasi yang terkumpul, dan memeriksa informasi dan pandangan setiap responden dengan informasi dan pandangan dari ahli lainnya.

Penelitian sekunder melibatkan tinjauan terhadap sumber-sumber yang telah diterbitkan, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, *United Nations Development Programme*, Badan Perfilman Indonesia, pers perdagangan khusus, laporan perusahaan (bila tersedia), dan laporan penelitian independen.

Penelitian primer melibatkan wawancara dengan sejumlah partisipan dan ahli industri terkemuka untuk mendapatkan data terbaru dan wawasan tentang tren masa depan, yang dilengkpai dengan verifikasi dan pengecekan silang data dan estimasi penelitian untuk memastikan konsistensi.

Data proyeksi diperoleh dari analisis data historis yang ditempatkan di atas data makroekonomi dengan mengacu pada faktor-faktor penggerak industri tertentu dan pandangan dari ahli industri.

Tinjauan dan pengecekan ulang dari semua sumber dan analisis independen dilakukan untuk membentuk estimasi akhir termasuk ukuran, bentuk, faktor penggerak, dan tren masa depan dari industri bioskop di Indonesia untuk menyusun laporan akhir.

1.4 DASAR PRAKIRAAN DAN ASUMSI

Euromonitor International didasarkan pada asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Laporan Euromonitor:

- Ekonomi Indonesia diharapkan akan tetap tumbuh stabil selama periode proyeksi.
- Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia diperkirakan akan tetap stabil selama periode proyeksi.
- Faktor penggerak pasar utama, seperti pertumbuhan populasi, peningkatan pendapatan tersedia, penetrasi layar bioskop yang relatif masih rendah, kenaikan harga tiket rata-rata, investasi yang terus berlanjut oleh pemain pasar, percepatan digitalisasi, potensi pertumbuhan

di kota tier 2 dan 3, yang diharapkan akan mendorong pengembangan industri bioskop di Indonesia.

Hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh akurasi dari asumsi-asumsi ini dan pilihan parameter tersebut. Penelitian pasar dilakukan pada Februari 2023, dan semua data statistik dalam Laporan Euromonitor International didasarkan pada informasi yang tersedia pada periode penelitian inti (yaitu, Desember 2022, Januari, dan Februari 2023). Data proyeksi Euromonitor International berasal dari analisis perkembangan pasar sebelumnya, lingkungan ekonomi, dan faktor penggerak pasar yang mendasar, dan diselaraskan dengan data industri yang telah mapan dan wawancara perdagangan dengan ahli industri.

1.5 DEFINISI DAN CAKUPAN

Cakupan Geografis

Pasar inti: Indonesia

Sebagai perbandingan: China, India, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Meksiko, dan Rusia

Cakupan Industri

Perusahaan penyiaran film dan operasi bioskop: perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan bioskop, multipleks, dan megapleks. Ini termasuk penyiaran semua gambar bergerak atau proyeksi video di tempat-tempat tersebut, baik di ruangan terbuka atau di fasilitas khusus, serta pengelolaan pendapatan dalam bentuk penetapan harga dan tiket (misalnya, pendapatan *box office*) dan sumber pendapatan lainnya (misalnya, iklan dalam teater, penjualan pemegang konsesi yang ditawarkan di tempat dan royalti, penjualan makanan, minuman, dan merchandise, jika ada). Perusahaan yang mengoperasikan bioskop juga dikenal sebagai perusahaan manajemen teater.

Periode Cakupan

Peninjauan pasar untuk laporan ini telah dilakukan untuk periode yang mencakup 2017-2027, kecuali dinyatakan lain. Secara khusus, periode 2017-2021 akan disebut periode historis atau peninjauan, dan 2012-2027 akan dianggap sebagai periode prakiraan untuk seluruh laporan ini.

1.6 TENTANG EUROMONITOR

Didirikan pada tahun 1972, Euromonitor International merupakan perusahaan unggulan dunia dalam riset strategi untuk pasar konsumen dan industri. Cakupan internasional yang komprehensif dan inovasi terkemuka menjadikan produk kami sebagai sumber daya yang penting bagi perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, nasional maupun global. Dengan kantor di seluruh dunia dan analis di 80 negara, perusahaan kami adalah penyedia intelijen pasar global terkemuka. Produk dan layanan kami dihargai tinggi oleh komunitas bisnis internasional dan kami memiliki 5.000 klien aktif, termasuk 90% dari perusahaan *Fortune* 500.

2. LINGKUNGAN MAKROEKONOMI

2.1 ANALISIS INDIKATOR MAKROEKONOMI

Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang kuat, meskipun terdapat risiko penurunan jangka pendek

Indonesia mulai bangkit dari pandemi COVID-19 dengan mencatat pertumbuhan PDB tertinggi sejak tahun 2017 sebesar 9,9% menjadi USD1,19 triliun pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan peningkatan partumbuhan ekonomi sebesar 2,5% yang terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh pelonggaran pembatasan sosial COVID-19, pemulihan konsumsi domestik, dan meningkatnya permintaan global untuk ekspor komoditas Indonesia. Ekonomi Indonesia diharapkan terus mengalami tren pertumbuhan ini pada tahun 2022, dengan PDB yang meningkat sebesar 4,9% menjadi USD1,24 triliun, didorong oleh percepatan konsumsi domestik yang terus berlanjut setelah pengangkatan pembatasan mobilitas dan pendapatan yang lebih tinggi yang diperoleh dari ekspor komoditas. Berdasarkan data pemerintah Indonesia, konsumsi pribadi domestik, yang menyumbang lebih dari setengah dari PDB, tumbuh 5,4% secara tahunan pada Q3 2022 didorong olah peningkatan pembelanjaan dari kelompok menengah dan atas. Indonesia juga diproyeksikan untuk mencatat pendapatan ekspor terbesarnya pada tahun 2022 karena negara yang kaya akan sumber daya ini mendapat manfaat dari kenaikan harga komoditas global. Sebagai hasilnya, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah guncangan global, bahkan mampu mengalami ekspansi pada tingkat tercepat dalam lebih dari satu tahun pada kuartal ketiga 2022, menuju tahun 2022 yang kuat.

Meskipun mencatatkan kinerja ekonomi yang stabil di tahun 2022, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi risiko penurunan dalam jangka pendek. Meskipun Indonesia menikmati lonjakan ekspor pada tahun 2022, inflasi global yang meningkat dan pengetatan kebijakan moneter diharapkan akan memicu pelemahan pada permintaan global terhadap komoditas Indonesaia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, permintaan untuk ekspor seperti produk tekstil dan furnitur telah melambat. Meskipun permintaan eksternal yang melambat dapat meredupkan prospek ekonomi Indonesia, permintaan domestik yang kuat dari kelas menengah yang semakin berkembang diharapkan dapat melindungi ekonomi dari perlambatan dan menjadi pilar pertumbuhan jangka panjang yang tangguh. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki rencana investasi sebesar USD430 miliar dalam proyek infrastruktur selama 2020-2024. Proyek-proyek strategis nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi melalui konektivitas yang lebih baik, yang meningkatkan mobilitas barang dan orang. Dua proyek besar termasuk proyek Tol Trans-Sumatera senilai USD 34 miliar yang bertujuan untuk menghubungkan dua provinsi - Riau dan Sumatera Barat, dan proyek kereta api cepat senilai USD 6 miliar yang akan menghubungkan kota-kota terbesar Indonesia, Jakarta dan Bandung. Dengan demikian, PDB Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% CAGR dari 2022E untuk mencapai USD1,59 triliun pada tahun 2027E.

Tabel 1 PDB Nominal dan Pertumbuhan, PDB per kapita, CPI dan GNI di Indonesia (2017-2027)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
PDB Nominal (USD Miliar)	949,8	1,037,1	1.106,5	1.079,0	1.186,1	*1.244, 1*	*1.303,8*	*1.370,2*	*1.439,3*	*1.511,3*	*1.586,9*
Pertumbuhan PDB Nominal (%)	9,6	9,2	6,7	-2,5	9,9	*4,9*	*4,8*	*5,1*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
PDB Nominal per kapita (USD)	3.590,9	3.883,2	4.104,7	3.968,9	4.332,7	*4.515,6*	*4.697,7*	*4.897,2*	*5.103,9*	*5.318,6*	*5.544,0*
CPI (2010=100)	142,2	146,7	151,2	154,1	156,5	*163,2*	*170,7*	*176,3*	*182,0*	*187,4*	*193,0*
GNI (USD Miliar)	919,7	1.006,2	1.072,9	1.049,6	1.142,8	*1.202,2*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Bank sentral Indonesia menaikkan suku bunga untuk menghadapi kenaikan inflasi baru-baru ini

Bank Indonesia (BI), bank sentral Indonesia, telah menaikkan suku bunga sebanyak 125 basis poin sejak Agustus 2022 untuk mengatasi inflasi yang meningkat. Suku bunga acuan Indonesia saat ini berada di posisi 5,5% pada bulan Desember 2022, level tertinggi sejak Agustus 2019. Indikator kuat pemulihan ekonomi dari kontraksi ekonomi akibat Covid-19 di 2020 memberikan keyakinan kepada BI untuk menaikkan suku bunga. Peningkatan harga komoditas dan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi karena kenaikan harga minyak pada bulan September 2022 menjadi penyebab utama inflasi di Indonesia. Menurut BI, laju inflasi bulanan di Indonesia berada pada posisi 5,42% pada bulan November 2022. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari 5,71% pada bulan Oktober 2022, inflasi masih berada di atas target rentang inflasi sebesar 2% sampai 4% yang BI telah pertahankan sejak 2020. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan akan menaikkan konsumsi, suku bunga kebijakan bank sentral diperkirakan akan terus tumbuh pada periode proyeksi untuk menekan tekanan inflasi. BI bukanlah satu-satunya bank sentral di wilayah ini yang menaikkan suku bunga acuan untuk menahan inflasi. Pada bulan November 2022, Bank Negara Malaysia menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin menjadi 2.75%. Sementara itu, pada bulan Desember 2022, bank sentral Filipina meningkatkan suku bunga acuannya sebanyak setengah persen menjadi 5,5%, level tertinggi sejak Januari 2009.

Tabel 2 Inflasi dan Suku Bunga di Indonesia (2017-2027E)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Tingkat Inflasi (%)	3,8	3,2	3,0	1,9	1,6	*4,3*	*4,6*	*3,3*	*3,2*	*3,0*	*3,0*
Suku Bunga Bank Sentral (%)	4,6	5,0	5,7	4,3	3,5	*3,8*	*5,4*	*5,3*	*5,2*	*6,0*	*6,9*
Suku Bunga (%)*	4,8	4,3	6,0	5,0	3,8	*3,5*	*5,8*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

*Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022) and Bank of Indonesia; ; * Suku bunga per Januari tahun itu*

Populasi yang besar dan muda yang terus bertumbuh dan cenderung membelanjakan uangnya untuk pengalaman, termasuk menonton film di bioskop.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipicu secara besar-besaran oleh populasi yang besar. Indonesia memiliki 275,5 juta penduduk pada tahun 2022E, menjadikannya negara paling padat penduduknya di Asia Tenggara. Basis konsumen yang besar dan berkembang di Indonesia, serta kelas menengah yang semakin bertumbuh, membuatnya menjadi pasar yang menarik bagi bisnis konsumen. Sebagai pasar keempat terbesar di dunia berdasarkan ukuran populasi, diperkirakan Indonesia akan memiliki sekitar 286,2 juta penduduk pada tahun 2027E, meningkat sebesar 3,9% dari tahun 2022E. Demografi populasi Indonesia relatif muda, dengan median usia 30,6 tahun pada tahun 2022E. Populasi yang berusia antara 13 hingga 64 tahun mencakup 71,4% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2022E, dan diperkirakan akan mewakili segmen yang substansial dari populasi secara keseluruhan ke depannya (71,8% pada tahun 2027E). Preferensi konsumsi di Indonesia dipengaruhi oleh Generasi Z (berusia 15 hingga 24 tahun), yang menyumbang 24,2% dari populasi Indonesia, Millennial (berusia 25 hingga 39 tahun), yang menyumbang 22,5%, dan Generasi X (berusia 40 hingga 54 tahun) yang menyumbang 18,7% pada tahun 2022E. Segmen konsumen besar ini cenderung lebih suka mengeluarkan uang untuk pengalaman daripada menumpuk harta materi. Berdasarkan *"Voice of the Consumer Lifestyle Survey"*[1] Euromonitor International pada tahun 2022, 74% responden Generasi Z, 80% responden Millennials, dan 74% responden Generasi X setuju atau sangat setuju bahwa penting bagi mereka untuk membelanjakan uangnya untuk pengalaman. Secara singkat, bisnis yang berorientasi pada konsumen mendapat manfaat dari demografi populasi Indonesia dan preferensi pengeluaran.

Menonton film adalah contoh kegiatan pengalaman. Berdasarkan *"Voice of the Consumer Lifestyle Survey 2022"*[2] Euromonitor International tahun 2022, aktivitas hiburan teratas bagi masyarakat Indonesia adalah berbelanja, pergi liburan sehari, dan menonton film. Menurut "Survei Khusus Sinema di Indonesia" Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023[3], warga Indonesia sering pergi ke bioskop, dengan lebih dari 76% melaporkan pergi ke bioskop setidaknya sekali sebulan. Dalam hal menonton film, kelompok tengah dari Millennials dan Generasi X yang paling terlibat dalam aktivitas tersebut.

Tabel 3 Populasi berdasarkan Umur di Indonesia (2017-2027E, Juta)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Bayi (berumur 0-2)	13,9	13,7	13,6	13,5	13,4	*13,3*	*13,2*	*13,1*	*13,0*	*13,0*	*13,0*
Anak-anak (berumur 3-7)	24,0	23,9	23,7	23,4	23,1	*22,8*	*22,6*	*22,4*	*22,2*	*22,0*	*21,9*

[1] *Sumber: Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. P: Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Penting untuk mengeluarkan uang untuk pengalaman.*

[2] *Sumber: Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. P: Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Berpikir tentang kebiasaan rekreasi Anda yang tipikal, seberapa sering Anda melakukan aktivitas-aktivitas berikut?*

[3] *Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, pada basis jatuh alami. P: Seberapa rutin Anda pergi ke bioskop?*

Pra-remaja (berumur 8-12)	23,2	23,4	23,7	23,8	23,9	*23,9*	*23,9*	*23,7*	*23,4*	*23,0*	*22,8*
Remaja (berumur 13-17)	22,0	22,1	22,3	22,5	22,8	*23,1*	*23,4*	*23,6*	*23,8*	*23,9*	*23,9*
Dewasa muda (berumur 18-29)	51,2	51,4	51,5	51,7	51,8	*52,0*	*52,2*	*52,5*	*52,8*	*53,1*	*53,4*
Dewasa (berumur 30-44)	60.3	60.6	61.0	61.2	61.4	*61.5*	*61.6*	*61.7*	*61.8*	*61.9*	*62.0*
Pra-pensiun (berumur 45-64)	53,1	54,6	56,1	57,5	58,8	*60,0*	*61,3*	*62,6*	*63,9*	*65,1*	*66,3*
Paruh baya (berumur 65-79)	14,3	14,6	15,1	15,5	15,8	*16,2*	*16,7*	*17,5*	*18,2*	*19,1*	*20,0*
Lanjut usia(berumur 80+)	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	*2,7*	*2,8*	*2,9*	*3,0*	*3,1*	*3,2*
Total	264,5	267,1	269,6	271,9	273,8	*275,5*	*277.5*	*279,8*	*282,0*	*284,2*	*286,2*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Tingkat pendapatan meningkat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

Tingkat pendapatan di Indonesia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada perkembangan kelas menengah di negara ini. Pendapatan per kapita yang dapat digunakan diproyeksikan mencapai USD 2.637 pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan CAGR sebesar 2,8% sejak 2017. Peningkatan ini terutama dipicu oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi di perkotaan, yang secara konsisten selalu dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan di pedesaan sejak 2017. Selain itu, jumlah rumah tangga kelas menengah di Indonesia juga diharapkan meningkat dari 19,2 juta pada tahun 2017 menjadi 20,8 juta pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 1,6%. Rumah tangga kelas menengah mengacu pada mereka yang memiliki pendapatan yang berkisar antara 75% dan 125% dari median pendapatan pribadi.

Sementara penambahan 1,6 juta rumah tangga ke dalam kelas menengah dalam 5 tahun terakhir dari 2017 sampai 2022E merupakan hasil dari pembangunan yang hebat, Indonesia masih memiliki beberapa cara untuk menjembatani kesenjangan pembangunan dan pendapatan. Jumlah rumah tangga kelas menengah mencapai 29,6% dari total rumah tangga pada tahun 2022, meningkat sebesar 0,8 poin persentase dari tahun 2017. Tantangan dalam meningkatkan tingkat pendapatan nasional secara keseluruhan terletak pada tingkat partisipasi tenaga kerja wanita yang relatif rendah, pertumbuhan produktivitas yang lambat, dan kekurangan keterampilan. Pandemi Covid-19 yang terjadi baru-baru ini juga memperdalam ketimpangan yang sudah ada sebelumnya, di mana pekerja dengan keterampilan rendah dan wanita lebih banyak terkena dampak kerugian pendapatan karena bekerja di industri yang terkena dampak berat, seperti tekstil dan pakaian, pariwisata, dan ritel.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi ekonomi untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Prioritas kebijakan meliputi percepatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta promosi transformasi ekonomi dan digital. Misalnya, Undang-Undang Omnibus disahkan pada akhir

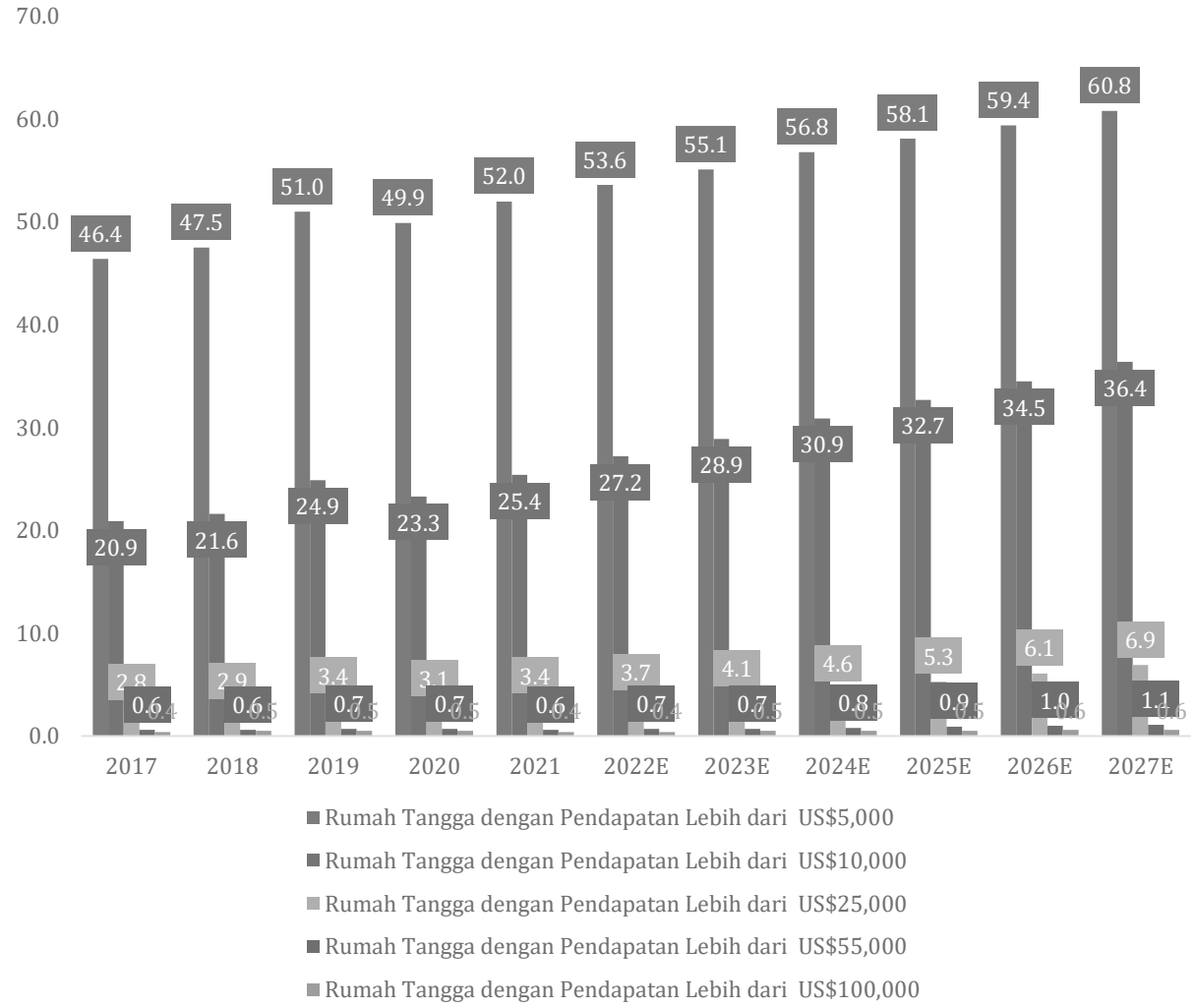
2020 untuk menyederhanakan perizinan bisnis dan meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia, sehingga menarik investasi asing dan mendorong penciptaan lapangan kerja di industri bernilai tambah lebih tinggi. Akibatnya, pendapatan bersih per kapita diharapkan terus tumbuh mencapai USD 3.664 pada 2027, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,8% dari 2022E.

Tabel 4 Data pendapatan pribadi dan rumah tangga di Indonesia (2017-2027E, '000s)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Pendapatan pribadi per kapita (USD)	2.293,4	2.319,0	2.508,7	2.396,3	2.517,9	*2.636,7*	*2.784,0*	*2.994,2*	*3.209,1*	*3.429,3*	*3.664,2*
Rumah tangga kelas menengah (Juta)	19,2	19,7	20,2	20,4	20,6	*20,8*	*21,0*	*21,3*	*21,5*	*21,8*	*22,0*
Rumah tangga kelas menengah (% dari total)	28,8	29,1	29,6	29,5	29,6	*29,6*	*29,7*	*29,8*	*29,9*	*29,9*	*30,0*
Pendapatan pribadi perkotaan (USD Miliar)	382,3	416,2	454,4	452,9	471,9	*496,3*	*518,6*	*546,5*	*575,0*	*604,8*	*636,5*
Populasi perkotaan (Juta)	145,9	149,2	152,4	155,5	158,4	*161,2*	*164,1*	*167,1*	*170,1*	*173,0*	*175,8*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Bagan 1 Rumah Tangga menurut Pendapatan siap dibelanjakan di Indonesia (2017-2027E, Juta)



Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Meningkatnya Peran Kota-Kota Tier 2 dan Tier 3 Sebagai Penggerak Pertumbuhan Masa Depan

Tingkat pertumbuhan pendapatan yang dapat dibelanjakan di kota-kota tier 2 dan 3 akan menjadi salah satu yang tertinggi dalam periode proyeksi 2022E hingga 2027E. Sebagai contoh, 4 dari 6 kota kunci dalam hal pertumbuhan pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah kota-kota tier 2 atau 3. Kota-kota tersebut adalah Batam (tier 3, 5,1%), Denpasar (tier 2, 4,8%), Banjarmasin (tier 2, 4,7%), dan Tasikmalaya (tier 3, 4,7%). Upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur di luar kota-kota tier 1 diharapkan dapat membawa lebih banyak peluang pengembangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota-kota tier 2 dan 3, dan sebagai hasilnya dapat mendorong pertumbuhan pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih lanjut di daerah-daerah tersebut.

Table 5 Pendapat yang dapat dibelanjakan tersedia 6 kota kunci berdasarkan pertumbuhan pendapatan tersedia di Indonesia (dalam US$ Miliar)

Kota	Tier	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR 22E-27E
Batam	3	*5,0*	*5,2*	*5,5*	*5,8*	*6,1*	*6,4*	*5,1%*
Samarinda	1	*9,3*	*9,7*	*10,2*	*10,7*	*11,3*	*11,8*	*4,9%*

Pekanbaru	1	*3,4*	*3,5*	*3,7*	*3,8*	*4,0*	*4,2*	*4,8%*
Denpasar	2	*7,0*	*7,3*	*7,7*	*8,1*	*8,5*	*8,9*	*4,8%*
Banjarmasin	2	*5,1*	*5,3*	*5,5*	*5,8*	*6,1*	*6,4*	*4,7%*
Tasikmalaya	3	*1,6*	*1,7*	*1,8*	*1,8*	*1,9*	*2,0*	*4,7%*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Pengeluaran konsumsi di Indonesia diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan beralih ke barang dan jasa yang lebih berkualitas dan premium.

Konsumsi domestik menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kecuali di saat pandemi Covid-19, pengeluaran konsumen terus tumbuh secara konsisten sejak 2017. Diperkirakan mencapai USD 647,8 miliar pada 2022E dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun (selanjutnya disebut "CAGR") sebesar 4,8% sejak 2017. Bahkan selama tahun 2020 ketika perlambatan ekonomi menjadi hal umum di seluruh dunia, pengeluaran konsumen hanya turun sebesar 0,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk makanan dan minuman non-alkohol menjadi sebagian besar pengeluaran konsumen Indonesia, sedikit lebih dari 30% dari total pengeluaran tahun 2022E. Ini diikuti oleh transportasi dan perumahan. Disebabkan oleh tekanan inflasi global yang meningkat, konsumen Indonesia mungkin lebih cenderung pada kesadaran harga dan memaksimalkan pengeluaran mereka dengan mengonsumsi produk dan pengalaman yang bernilai dalam jangka pendek. Selain itu, Indonesia telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% baru-baru ini pada April 2022 dan berencana untuk meningkatkannya lagi menjadi 12% pada tahun 2025E, yang dapat mendorong orang Indonesia untuk berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Namun, diharapkan bahwa total pengeluaran konsumen di pasar besar ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,8% CAGR menjadi USD 854 miliar pada 2027E berkat peningkatan standar hidup yang berkelanjutan, tingkat utang rumah tangga yang rendah serta kelas menengah yang besar dan berkembang.

Tabel 6 Pengeluaran Konsumer di Indonesia (2017-2027E, '000s)

Indonesia	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	***2022E***	***2023E***	***2024E***	***2025E***	***2026E***	***2027E***
Pengeluaran konsumer (USD Miliar)	533,0	579,0	625,0	623,2	646,3	674,8	701,9	737,7	774,3	813,0	854,0

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Meningkatnya akses internet dan ponsel pintar memungkinkan gaya hidup digital bagih lebih banyak masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia semakin terampil dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan meningkatnya akses terhadap produk digital dan konektivitas internet. Jumlah pengguna internet telah meningkat pesat dengan CAGR 16,3% dari 77,9 juta di tahun 2017 menjadi mencapai 165,9 juta di tahun 2022E. Dengan kata lain, pengguna internet di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Bersamaan dengan peningkatan akses internet, penggunaan ponsel pintar yang semakin meningkat telah meningkatkan kemudahan warga Indonesia untuk melakukan bisnis digital, hiburan, dan layanan keuangan. Ditambah dengan meningkatnya tingkat pendapatan, teknologi digital memungkinkan masyarakat Indonesia untuk lebih mudah mengakses produk dan layanan yang sebelumnya sulit untuk diperoleh. Menurut survei "*Voice of the Consumer:*

Lifestyles Survey 2022"[4] dari Euromonitor International di Indonesia, kegiatan *online* teratas di Indonesia termasuk penjelajahan internet, penggunaan situs jaringan sosial, dan mengakses situs berita *online*. Lebih dari 70% dari responden melaporkan melakukan kegiatan tersebut setidaknya seminggu sekali. Berdasarkan survei yang sama, hampir 80% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, mayoritas dari mereka (71% dari Gen Z, 73% dari Millennials, 74% dari Gen X) akan merasa kehilangan tanpa adnaya akses internet. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dan pengalaman virtual bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 7 Indikator Digitalisasi di Indonesia (2017-2027E)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Pengguna Internet (Juta)	77,9	97,3	117,7	133,9	156,1	*165,9*	*175,5*	*184,9*	*193,9*	*202,4*	*210,5*
Kepemilikan Ponsel (% dari total populasi)	89,0	89,9	90,8	91,7	92,4	*93,1*	*93,8*	*94,4*	*94,9*	*95,4*	*95,8*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

2.2 PERBANDINGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DI BERBAGAI PASAR UTAMA ASEAN

Indonesia tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sementara Vietnam dan Filipina tumbuh pesat

Indonesia, yang sudah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, diharapkan akan terus memimpin dalam ukuran pasar di wilayah tersebut. Saat ini, ukuran PDB Indonesia sebesar USD 1,2 triliun, lebih dari dua kali lipat dari pasar terbesar berikutnya, yaitu Thailand yang diperkirakan akan mencatatkan PDB sebesar USD 0,5 triliun pada tahun 2022E. Perekonomian Indonesia saat ini juga diuntungkan oleh basis konsumsi domestik yang sedang berkembang dan ekspor komoditas yang melonjak, yang mengangkat pertumbuhannya. Sementara semua ekonomi utama Asia Tenggara pulih pada tahun 2021 dari kontraksi PDB yang disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2020, Indonesia, Singapura, dan Vietnam adalah tiga pasar yang ekonominya kembali atau melampaui level sebelum COVID-19. Sebagian besar ekonomi Asia Tenggara memiliki populasi yang relatif muda, kecuali Singapura, Thailand, dan Malaysia di mana penuaan menjadi masalah, atau masalah yang sedang muncul. Vietnam, Filipina, dan Indonesia diharapkan akan mengoptimalkan dividen demografi mereka dalam periode proyeksi 2022E-2027E. Ekonomi Vietnam diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tercepat dari semua ekonomi Asia Tenggara dengan CAGR 6,1%, Filipina dengan CAGR 6,0%, dan Indonesia dengan CAGR 5,0%.

Dengan demikian, tren PDB per kapita mengikuti tren ekonomi secara umum, dengan Vietnam, Filipina, dan Indonesia diharapkan mencatat tingkat pertumbuhan tercepat dalam periode perkiraan. Akan tetapi, dalam hal nilai absolut, Singapura tetap menjadi pemimpin regional, tumbuh dari USD 80.312,1 pada 2022E menjadi USD 86.127,9 pada 2027E. Angka tersebut delapan kali lipat lebih dari sebagian besar pasar utama lainnya di Asia Tenggara, kecuali Malaysia, di mana tingkat PDB per kapita akan tetap

[4] *Sumber: Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia.*

di atas USD 10.000 pada 2027E. Malaysia diperkirakan akan mencatat USD14.001 dalam PDB per kapita pada periode tersebut.

Sejalan dengan lingkungan inflasi global, indeks harga konsumen (CPI) di pasar-pasar utama Asia Tenggara mengalami peningkatan. Harga konsumen, dibandingkan dengan harga tahun 2010, mengalami kenaikan tertinggi di Vietnam, yang diperkirakan mencapai tingkat CPI sebesar 178,8 pada 2022E. Kemudian diikuti oleh Indonesia sebesar 163,2 dan Filipina sebesar 145,9. Sebagian besar bank sentral di pasar utama Asia Tenggara telah menaikkan suku bunga kebijakan mereka untuk memerangi inflasi. Meskipun demikian, pertumbuhan IHK diperkirakan akan menjadi tema yang konsisten dalam periode perkiraan, dengan tingkat harga di Indonesia, Filipina, dan Vietnam naik dengan laju tercepat dari tingkat harga tahun 2010 dibandingkan dengan pasar Asia Tenggara lainnya.

Tabel 8 Nominal PDB di ASEAN, USD Miliar (2017-2027E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Indonesia	949,8	1.037,1	1.106,5	1.079,0	1.186,1	1.244,1	1.303,8	1.370,2	1.439,3	1.511,3	1.586,9
Malaysia	311,7	328,8	358,2	322,1	351,0	404,4	421,0	440,8	459,7	478,2	497,3
Filipina	303,8	335,2	358,2	329,4	356,2	403,1	426,5	452,5	479,8	508,5	539,0
Singapura	343,7	368,8	371,5	345,5	386,8	430,9	439,6	449,7	459,2	468,4	477,7
Thailand	441,5	466,7	481,5	446,2	461,2	501,8	519,9	539,6	555,8	571,4	587,4
Vietnam	215,2	238,2	259,5	270,5	286,9	314,1	334,2	356,0	378,4	401,2	423,2

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Tabel 9 Indeks Harga Konsumen di ASEAN (2017-2027E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Indonesia	142,2	146,7	151,2	154,1	156,5	*163,2*	*170,7*	*176,3*	*182,0*	*187,4*	*193,0*
Malaysia	119,6	120,7	121,5	120,1	123,1	*127,1*	*130,9*	*134,4*	*137,8*	*141,2*	*144,8*
Filipina	120,3	126,7	129,7	132,7	137,9	*145,9*	*152,5*	*157,3*	*162,1*	*166,9*	*171,8*
Singapura	113,3	113,8	114,4	114,2	116,8	*124,1*	*129,0*	*132,2*	*134,3*	*136,4*	*138,4*
Thailand	111,3	112,5	113,3	112,3	113,7	*120,6*	*124,3*	*126,2*	*128,1*	*130,1*	*132,0*
Vietnam	154,9	160,3	164,8	170,1	172,3	*178,8*	*186,3*	*193,2*	*200,9*	*209,0*	*217,3*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Tabel 10 PDB per Kapita di ASEAN , USD billion (2017-2027E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Indonesia	533,0	579,0	625,0	623,2	646,3	*674,8*	*701,9*	*737,7*	*774,3*	*813,0*	*854,0*
Malaysia	180,0	195,6	212,3	194,2	199,8	*230,8*	*239,0*	*253,3*	*262,5*	*271,5*	*280,2*
Filipina	213,9	238,5	259,2	245,9	265,8	301,2	*319,2*	*336,5*	*356,3*	*377,2*	*399,7*
Singapura	121,0	126,1	130,3	112,0	120,3	*135,3*	*139,3*	*143,1*	*145,7*	*148,9*	*152,0*

Thailand	251,2	263,3	275,8	239,4	236,8	*280,0*	*304,8*	*329,4*	*342,6*	*348,7*	*358,5*
Vietnam	132,0	144,0	163,2	170,4	175,6	*193,0*	*203,9*	*215,6*	*226,9*	*238,8*	*251,5*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

Tabel 11 Populasi dibawah umur 35 tahun di ASEAN, juta (2017-2027E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*	*2023E*	*2024E*	*2025E*	*2026E*	*2027E*
Indonesia	155,3	155,4	155,4	155,5	155,6	*155,7*	*155,8*	*155,9*	*155,9*	*156,0*	*156,0*
Malaysia	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	*18,7*	*18,5*	*18,4*	*18,2*	*18,1*	*17,9*
Filipina	71,0	71,8	72,6	73,4	74,1	*74,9*	*75,5*	*76,2*	*76,8*	*77,3*	*77,8*
Singapura	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,7*	*1,7*
Thailand	31,8	31,5	31,1	30,7	30,3	*30,0*	*30,0*	*29,1*	*28,7*	*28,3*	*27,9*
Vietnam	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	*51,7*	*51,4*	*51,1*	*50,7*	*50,3*	*49,9*

Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022)

3. BIOSKOP DI INDONESIA

3.1 SEJARAH KINERJA INDUSTRI

Transformasi digital dan layanan bernilai tambah baru dalam memperluas industri perfilman

Industri perfilman telah mengalami evolusi dalam berbagai hal, baik dalam hal keseluruhan pengalaman pelanggan maupun perkembangan industri secara umum. Kemunculan teknologi digital telah membantu meningkatkan aksesibilitas ke bioskop dan membantu mempermudah pengalaman penonton yang ingin menonton film di bioskop. Pertama, akses internet dan perangkat mobile yang meluas membuat pemasaran digital menjadi cara yang efektif bagi operator bioskop untuk memperluas jangkauan mereka ke penonton yang lebih luas. Kedua, bagian berikutnya dari pengalaman pengguna - pembelian tiket - juga mengalami digitalisasi untuk menawarkan pengalaman yang lebih baik bagi penonton dalam hal kenyamanan dan kecepatan. Alih-alih mengantri di bioskop untuk pembelian tiket fisik, konsumen dapat memesan terlebih dahulu dan membayar secara digital menggunakan metode pembayaran pilihan mereka. Operator bioskop telah fokus mengembangkan situs web mobile dan internet untuk memungkinkan pengalaman semacam itu. Ketiga, operator bioskop juga terhubung dengan ekosistem digital dengan memperkuat kolaborasi dengan platform teknologi. Mereka telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti platform *e-commerce* dan platform agen perjalanan daring (OTA) untuk pembelian tiket dan pengeluaran konsumsi. Dengan adanya hal ini, memperluas jangkauan mereka ke pangsa pasar yang besar yang dinikmati oleh platform-platform tersebut. Konsumen juga dapat menikmati penawaran makanan dan minuman (selanjutnya disebut "F&B") dari operator bioskop di luar konteks bioskop.

Pengalaman menonton film di bioskop juga semakin berubah ketika operator bioskop meluncurkan produk dan layanan tambahan untuk membedakan diri dari persaingan. Menonton film tetap menjadi inti pengalaman dan faktor pendorong bagi konsumen untuk pergi ke bioskop. Namun, menarik lebih banyak konsumen ke bioskop, dan lebih sering, dapat membantu meningkatkan pendapatan melalui penawaran penjualan ke pengalaman premium, atau sumber pendapatan tambahan. Misalnya, operator bioskop meningkatkan penjualan dengan meningkatkan pengalaman menonton bioskop melalui menyediakan sofa berkualitas tinggi, akses ke ruang tunggu yang nyaman, atau menyediakan photo booth untuk mengakomodasi perilaku media sosial generasi muda. Operator bioskop juga meningkatkan sumber pendapatan dengan menggunakan bioskop untuk tujuan alternatif selain menonton film. Dengan contoh, bioskop menyewakan studio untuk acara dan pertemuan seperti ulang tahun dan acara korporat.

Untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat, operator bioskop juga membuka lebih banyak bioskop. Jumlah outlet bioskop di Indonesia meningkat menjadi 427 pada tahun 2022E dari 268 pada tahun 2017 dengan CAGR 9,8% yang cepat. Dalam hal ini, jumlah pertunjukan dan penayangan juga meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan *box office*. Jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat dari 1.533 menjadi 2.107 dalam periode waktu yang sama dengan CAGR 6,6%. Sementara itu, penerimaan *box office* bruto juga mengalami tren peningkatan, dari Rp5,7 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp7,2 triliun pada tahun 2019 dengan CAGR 11,6% sebelum pandemi

COVID-19. Meskipun penerimaan *box office* bruto turun selama pandemi COVID-19 karena pembatasan pergerakan, namun sejak itu mengalami tren pemulihan dan mencapai Rp4,3 triliun pada tahun 2022E. Angka ini hampir 3,5 kali lipat dari Rp1,3 triliun yang tercatat pada tahun 2021 tetapi masih dalam proses untuk mencapai level sebelum pandemi COVID-19. Angka pengunjung juga terkena dampak negatif pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi, tetapi sejak pembukaan kembali ekonomi, angka pengunjung telah menunjukkan pemulihan yang kuat. Diperkirakan angka pengunjung akan mencapai 119,2 juta pada tahun 2023E (72,7% dari 2019) dan 160,0 juta pada tahun 2024E (97,6% dari 2019).

Dalam hal preferensi konsumen, film lokal semakin menonjol (memberikan kontribusi sekitar 49,5% dari total pendapatan *box office* bruto pada tahun 2022E) karena minat yang semakin meningkat pada film Asia, terutama film Indonesia dan Korea. Hal ini didorong oleh peningkatan kualitas film Indonesia dan kreativitas yang semakin meningkat dalam trailer film oleh produsen, yang menarik lebih banyak konsumen untuk menonton film secara keseluruhan. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk film lokal, bioskop juga menyediakan lebih banyak slot penayangan untuk konten lokal. Lebih banyak bioskop juga mulai berinvestasi lebih banyak dalam kemitraan dan mendukung perusahaan lokal, daripada hanya mengandalkan lisensi film asing dan *Hollywood* untuk menarik penonton. Dalam hal genre film, yang populer tidak mengalami perubahan drastis, sebagian besar berkisar pada pahlawan super, horor, dan kisah cinta. Namun, masih ada tema-tema tertentu yang belum dijelajahi yang relatif sulit untuk digabungkan, seperti terorisme, polisi, dan militer, karena sensitivitas dari topik-topik tersebut.

Tabel 12 Data Utama Bioskop di Indonesia (2017-2022E)

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	2022E
Perusahaan penyiaran film dan bioskop, omzet (USD juta)	8.135,3	9.704,8	10.633,3	1.880,7	1.976,1	6.714,5
Jumlah Sinema (termasuk bioskop, multipleks dan megaplex)	268	336	414	424	420	427
Jumlah Layar	1.533	1.777	2.063	2.113	2.091	2.107
Penetrasi Layar (jumlah layar per juta penduduk)	5,8	6,7	7,7	7,8	7,6	7,6
Pendapatan Kotor *Box office* (Rp. Milliar)	5.746,5	6.587,3	7.158,0	1.242,0	1.321,2	4.282,9
Pendapatan kotor *box office* film asing (%)	65,8	65,6	67,0	55,0	80,7	50,5
Pendapatan kotor *box office* film domestik (%)	34,2	34,4	33,0	45,0	19,3	49,5
Pendapatan (Milliar)	134,8	161,7	163,9	29,8	32,5	*96,8*
% Domestik	31,8%	31,7%	31,7%	43,0%	13,6%	58,8%
% Asing	68,2%	68,3%	68,3%	57,0%	86,4%	4,.2%
Harga tiket rata-rata (Rp.)	42.634,8	40.748,4	43.670,6	41.691,9	40.704,5	44.265,9

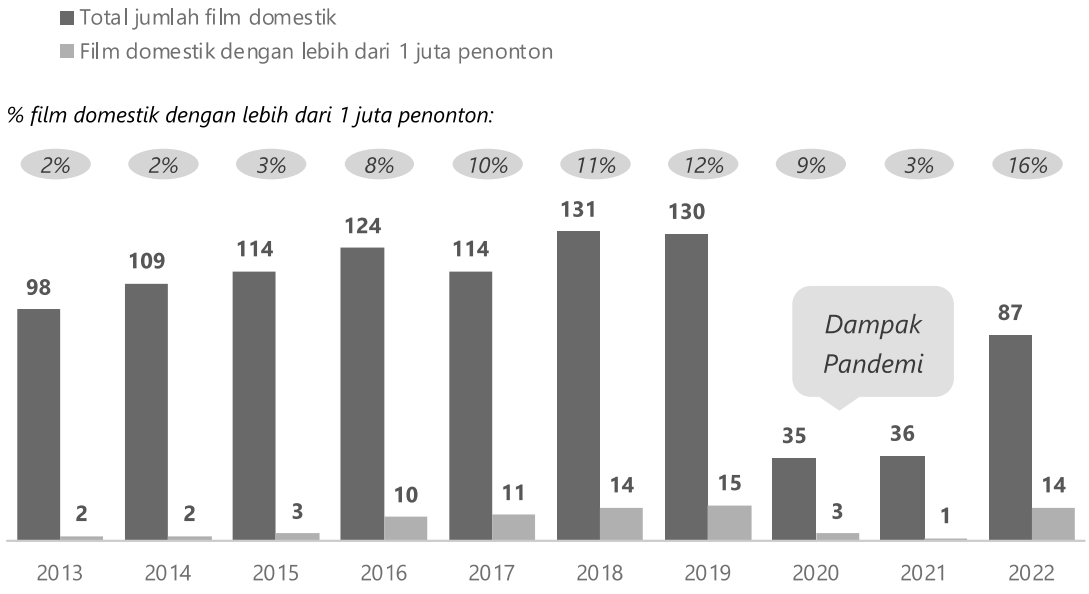
Penadapatan Makanan dan Minuman[5] (Rp. Milliar)	2.116,9	2.493,5	2.773,9	496,7	624,7	2.196,1
Pendapatan Iklan (Rp. Milliar)	271,8	623,9	701,4	142,0	30,1	235,6

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.

Keterkaitan yang tinggi dari tema-tema lokal, diperkuat oleh media sosial, membantu film-film lokal mendapatkan popularitas

Film-film yang diproduksi lokal di Indonesia semakin populer dibandingkan dengan film-film internasional, dan kini telah menyumbang sekitar setengah dari total pendapatan *box office*. Hal ini memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop pada tahun 2022E, meningkat dari sekitar sepertiga pada tahun 2017E. Semakin populernya film-film domestik telah berhasil menarik minat konsumen yang lebih banyak, sehingga pada tahun 2022E, film-film domestik telah menyumbang sekitar setengah dari total pendapatan bruto *box office* di negara ini. Popularitas dan kualitas film-film domestik semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jumlah film domestik yang berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton pun semakin meningkat, dari 2 judul pada tahun 2013 menjadi 14 judul pada tahun 2022. Hal ini terjadi meskipun dampak dari pandemi yang berdampak negatif terhadap jumlah film yang dirilis.

Bagan 2 Jumlah film produksi dalam negeri di Indonesia



Sumber: Film Indonesia

Popularitas film lokal berasal dari berbagai faktor, termasuk keterampilan akting yang kuat dari aktor lokal, bersama dengan nilai-nilai moral yang dikenal dalam film. Memasukkan kisah lokal dan unsur-unsur budaya Indonesia juga membuat narasi film menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh

[5] Semua referensi terkait pengeluaran/pendapatan F&B adalah bersifat bruto (sebelum pajak).

penonton lokal. Beberapa genre yang populer di kalangan konsumen Indonesia termasuk horor, komedi, romansa, drama, dan film sejarah-biografi.

KKN di Desa Penari adalah contoh bagus dari film produksi dalam negeri yang berhasil berkat popularitasnya di kalangan konsumen domestik. Film horor yang dirilis pada bulan April 2022 dan diproduksi oleh MD Pictures dan Pichouse Films, menjadi film Indonesia dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa setelah mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton pada tahun 2022, mengalahkan rekor yang dipegang selama enam tahun oleh Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Bagian 1. Popularitas film ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor penting. Pertama, rasa penasaran penonton terpicu oleh trailer film, dan permintaan terpendam untuk menonton film di bioskop fisik setelah pandemi membantu meningkatkan penjualan tiket. Kedua, mitos rakyat yang terjalin dengan cerita horor, membuatnya sangat relevan dengan publik Indonesia. Ketiga, ceritanya, berdasarkan akun kehidupan nyata, menjadi viral di media sosial, membantu meningkatkan kesadaran akan film tersebut dan, pada gilirannya, popularitasnya. Sri Asih adalah film produksi dalam negeri lainnya yang meraih kesuksesan. Film yang menggambarkan pahlawan super wanita pertama Indonesia, diproduksi oleh sutradara perempuan Upi Avianto dan ditulis bersama oleh Joko Anwar, yang menyutradarai seri Satan's Slaves yang sukses. Popularitas Sri Asih dapat diatribusikan pada faktor nostalgia, karena ia adalah pahlawan super pertama dalam dunia cerita Indonesia, yang telah dibuat dalam bentuk komik oleh penulis RA Kosasih pada tahun 1950-an. Kedua, dan menggabungkan tema lokal dalam KKN di Desa Penari, Sri Asih berpijak pada isu-isu kontemporer Indonesia, yang membantu membedakannya dari seri pahlawan super asing dan populer secara global. Secara khusus, pesan pemberdayaan perempuan yang kuat dalam Sri Asih sejalan dengan pemahaman isu-isu sensitif sosial dan agama di masyarakat. Banyak kota di Indonesia mewajibkan penggunaan jilbab sedangkan parlemen Indonesia menyetujui kode pidana baru, yang menjadikan hubungan seks di luar nikah sebagai tindak pidana, pada bulan Desember 2022. Kepopuleran film produksi dalam negeri memungkinkan alternatif yang kuat bagi film-film populer secara global, memungkinkan operator bioskop untuk memperluas jangkauan film yang dapat mereka tampilkan.

Saluran film domestik dan internasional yang kuat untuk terus menarik perhatian konsumen Indonesia.

Tren sinema sangat mirip dengan film-film yang telah sukses di *box office*. Misalnya, ketika film horor Satan's Slaves menjadi populer di kalangan konsumen, rumah produksi lain mulai memproduksi film-film horor untuk mengikuti popularitas tersebut. Sementara itu, ketika film Layangan Putus dengan tema romantis menjadi populer, cerita-cerita asmara lainnya mulai diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, dengan meningkatnya popularitas konten domestik, produsen film dan OTT berencana untuk memproduksi produksi asli domestik untuk memperluas dan memperluas target audiens. Platform OTT telah menuangkan sumber daya ke Indonesia untuk produksi asli. Ada juga peningkatan investasi di rumah produksi Indonesia, di mana banyak produsen sedang dicari. Misalnya, *Lionsgate* telah berinvestasi di *Falcon Pictures*. Rumah produksi lokal menggambarkan dan mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman di negara ini ketika memproduksi film, yang tidak disadari oleh perusahaan asing. Perusahaan asing yang lebih terfokus pada pendanaan dapat membantu

menyuntikkan modal untuk meningkatkan kualitas film domestik, sambil melakukan transfer pengetahuan.

Diharapkan bahwa pipeline film ke depan akan sebagian besar terbagi antara film lokal dan judul asing, seperti dari *Hollywood* di AS. Dalam hal genre film, diharapkan produsen lokal akan mengambil genre yang telah menjadi populer belakangan ini seperti pahlawan super dan horor dan mulai merilis film dengan tema serupa. Sementara itu, ketersediaan film asing, seperti dari studio Hollywood terkait, akan bergantung pada jadwal rilis mereka. Banyak dari hal tersebut akan mencakup seri pahlawan super yang sangat populer dari seri *Marvel*, dan franchise terkenal lainnya seperti *Indiana Jones* dan *Fast and Furious*. Selain film-film *blockbuster Hollywood* dan domestik, bioskop juga beralih ke konten regional lainnya, seperti konten Korea, untuk menyesuaikan dengan gelombang *Hallyu* di Indonesia dan popularitas *influencer* Korea dan idola *K-pop* yang juga membintangi film-film Korea.

Platform OTT memungkinkan lebih banyak film untuk dirilis secara *online*, namun judul-judul besar tetap merilis di layar lebar.

Rumah produksi semakin terbuka untuk menggunakan platform OTT sebagai platform rilis film yang layak. Hal ini terjadi karena kebutuhan selama pandemi COVID-19 dengan adanya pembatasan pergerakan dan pembatasan kunjungan ke pusat perbelanjaan dan bioskop. Platform OTT asing besar seperti Netflix dan Disney+ adalah contoh yang baik. Misalnya, seri populer Surga yang Tak Dirindukan 3 secara langsung dirilis di platform Disney+ Hotstar milik Disney. Platform OTT lainnya yang populer yang digunakan oleh produsen Indonesia untuk perilisan film adalah WeTV, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, Tencent. Meskipun platform OTT merupakan platform yang layak untuk perilisan film karena jangkauannya yang luas dan praktis bagi konsumen, film-film besar dan waralaba lebih memilih perilisan di bioskop karena kemampuan mereka untuk menarik kerumunan penonton yang besar untuk mengambil keuntungan penuh dari efek audiovisual yang ditawarkan bioskop. Namun, perilisan film secara bersamaan di bioskop dan OTT dapat menyebabkan komplikasi karena alasan pembajakan, seperti yang terjadi dengan film *Black Widow* oleh Disney pada tahun 2021. Film ini mengalami penurunan 67% di *box office* pada akhir pekan kedua setelah ditayangkan. Film ini akhirnya menjadi salah satu film *Marvel* dengan pendapatan terendah yang pernah ada. Studio dan produsen film secara bertahap kembali ke rentang waktu eksklusif 45 hari untuk perilisan di bioskop. Tidak hanya film utama yang dirilis di bioskop, jangka waktu tayang mereka juga diperpanjang. Berdasarkan *Indonesia Online Consumer Survey*[6] oleh Euromonitor Cinema tentang tren menonton film, konsumen lebih sering menonton film blockbuster di bioskop dibandingkan dengan platform lain seperti platform streaming *online*, platform *online* gratis, televisi satelit, dan televisi kabel on-demand. Platform OTT digunakan lebih banyak untuk konten seri daripada konten film. Mengingat bentuk konten dan nilai hiburan yang berbeda yang ditawarkan oleh bioskop dan platform OTT, keduanya dapat berdampingan. Berdasarkan

[6] *Euromonitor International - Survei konsumen daring yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang pernah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, pada dasar kejadian alami. P: Bisakah Anda memperkirakan persentase pembagian frekuensi penggunaan saluran di bawah ini untuk menonton film blockbuster/rilisan baru?*

tren di atas, menonton film telah menjadi bentuk hiburan yang tangguh di tengah munculnya teknologi hiburan baru yang berbeda.

3.2 TINJAUAN INDUSTRI BIOSKOP BERDASARKAN KOTA

Kota tier bawah dan konten lokal menghadirkan peluang pertumbuhan di masa depan

Sementara ini, kota tier 1 di Indonesia mendominasi konsentrasi bioskop dan lokasi layar pada tahun 2022. Namun, kota-kota tier 2 dan 3 menyediakan peluang pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2021, terdapat 276 bioskop di kota tier 1, lebih dari 3 kali jumlah 87 bioskop di kota tier 2 dan hampir 5 kali jumlah 57 bioskop di kota tier 3. Namun, dalam setahun terakhir di tengah pandemi COVID-19, banyak pengembang properti fokus pada memperluas mal di kota-kota tier 2 dan 3 di Indonesia, di mana pembatasan pemerintah lebih rendah dan persaingan relatif kurang ketat. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia dalam memberikan pembiayaan infrastruktur untuk mendukung distribusi ekonomi ke bagian Indonesia yang relatif kurang berkembang. Namun, harga tiket di kota-kota tingkat lebih rendah cenderung lebih murah karena menyesuaikan kecenderungan segmen konsumen pendapatan rendah dalam membayar tiket bioskop.

Bioskop di kota tier 1 menyumbang sebagian besar pendapatan kotor *box office* nasional, sekitar 67,9% dari total pendapatan, diikuti oleh kota tier 2 sebesar 21,5% dan kota tier 3 sebesar 10,7% pada tahun 2021. Dengan tren pembukaan bioskop di kota tier 2 yang baru muncul tetapi berkembang, persentase bioskop tier 2 dari total pendapatan kotor *box office* meningkat sebesar 3 poin persentase dari 18,5% pada tahun 2019 menjadi 21,5% pada tahun 2021.

Dalam hal lokasi bioskop, sebagian besar bioskop modern berada di pusat perbelanjaan karena biaya pengembangan yang relatif lebih tinggi untuk fasilitas tunggal. Bioskop juga menjalin kemitraan dan hubungan yang kuat dengan pengembang mal di industri properti untuk memperoleh akses ke ruang teater. Diperkirakan sekitar 80-90% bioskop berada di pusat perbelanjaan, yang umumnya mencakup toko-toko ritel, restoran, dan toko-toko lain yang melengkapi pengalaman menonton film. Hal ini memungkinkan bioskop untuk mendapatkan manfaat dari lalu lintas yang dihasilkan oleh penyewa lain. Bioskop dengan ukuran yang lebih kecil juga lebih populer di kota-kota kecil, di mana mereka menjadi faktor diferensiasi untuk mal di daerah tersebut. Dalam hal genre film yang ditayangkan, tidak ada formula yang cocok untuk semua, dan ini berbeda berdasarkan lokasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi preferensi film yang berbeda di antara segmen konsumen yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda.

Tabel 13 Industri bioskop menurut tingkatan kota di Indonesia, 2019/2021

	Kota tier 1		Kota tier 2		Kota tier 3	
Indonesia	2019	2021	2019	2021	2019	2021
Pendapatan Kotor *Box office* (% dari total negara)	70,9	67.9	18.5	21.5	10.7	10.7
Jumlah Sinema	274	276	82	87	58	57
Jumlah Layar	1.401	1.408	392	418	270	265
Jumlah Pendapatan per Layar	80.813	15.172	75.706	16.448	71.527	14.417

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.

3.3 PENGGERAK INDUSTRI

Kemajuan teknologi yang meningkatkan pengalaman menonton film terus mendorong minat konsumen

Kemajuan teknologi yang berhubungan dengan peningkatan pengalaman pengguna membantu terus mendorong minat konsumen dalam menonton film. Hal ini termasuk peningkatan kualitas audio, layar, dan tempat duduk. Peran teknologi terletak pada memfasilitasi apa yang ingin disampaikan oleh produsen film kepada audiens dengan cara yang mengesankan. Misalnya, kualitas suara memengaruhi informasi aural yang diperoleh penonton dari film. Kualitas layar dan suara yang lebih baik merupakan faktor yang membedakan pengalaman menonton film dibandingkan menonton film di rumah, dan diharapkan terus menarik penonton melalui pengalaman pengguna yang meningkat. Hal ini berlaku terutama untuk beberapa genre film populer. Film horor memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi konsumen dalam rilis teater dari segi audiovisual. Ke depan, munculnya teknologi baru yang disuntikkan ke dalam pengalaman menonton film diharapkan terus mendorong minat konsumen di bioskop. Misalnya, teknologi film 4DX, yang memberikan pengalaman sinematik multi-sensori yang imersif, diharapkan akan berkembang. 4DX menggabungkan visual di layar dengan kursi gerak yang disinkronkan dan efek lingkungan seperti air, angin, kabut, aroma, salju, dan efek lainnya untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif kepada penonton. Selain itu, muncul dan berkembangnya metaverse dan teknologi realitas tambahan dapat membantu mengubah pengalaman menonton film sehingga sulit direplikasi di rumah, sehingga menarik minat penonton bioskop.

Kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan pembelian tiket secara digital memudahkan nonton film

Kemudahan dalam pengalaman konsumen dalam tahap pembelian tiket pada perjalanan pelanggan membantu mendorong untuk menonton film di bioskop. Penggunaan saluran atau platform digital

untuk memesan dan membayar tiket di muka sangat berguna bagi pelanggan yang khawatir tentang posisi duduk atau menonton film yang menarik tepat waktu. Ini adalah faktor tambahan pada penghapusan kebutuhan untuk menghabiskan waktu di antrean di loket tiket *offline*. Platform-platform tersebut memungkinkan visualisasi yang jelas tentang status kapasitas bioskop dan teater yang menayangkan film yang diminati. Selain kenyamanan, platform digital menawarkan elemen penting lain bagi penonton bioskop – kecepatan. Ini penting bagi mereka untuk mendapatkan tiket untuk film-film populer yang cepat terjual. Penjualan tiket *online* meningkat, terutama digunakan oleh segmen konsumen milenial dan Gen Z yang mahir dalam digital, yang lebih suka pembelian *online* karena kecepatan, kenyamanan, dan kepastian jadwal dan posisi duduk. Sebagai hasilnya, platform digital menjadi saluran yang lebih penting untuk pembelian tiket. Penjualan *online* tiket sekarang menyumbang hampir 35-40% dari total penjualan tiket pada tahun 2022.

Meskipun layanan pemesanan digital telah disediakan oleh platform yang dioperasikan oleh bioskop, penggunaan platform pihak ketiga membantu memperluas jangkauan bioskop dan memperluas basis konsumen penonton film. Platform tiket khusus seperti TIX.ID dan GoTix sudah dikenal oleh konsumen Indonesia untuk kebutuhan tiket mereka. *E-commerce, super-apps*, dan platform perjalanan seperti Gojek, Shopee, Traveloka, Blibli, dan Tiket.com juga berperan sebagai platform pemesanan digital untuk tiket film. Meskipun mereka mungkin tidak secara alami menjadi tujuan utama yang terlintas dalam pikiran konsumen, mereka berfungsi sebagai saluran penjualan tambahan sebagai bagian dari ekosistem digital untuk memperluas jangkauan bioskop ke basis konsumen mereka yang luas. Pertama, ini sangat membantu ketika ada lalu lintas pengguna besar yang didorong oleh promosi yang diberikan di platform-platform tersebut. Kedua, platform-platform ini juga dapat menyertakan layanan tambahan dengan menonton film di bioskop. Misalnya, Gojek dapat membantu menyediakan transportasi bagi konsumen ke mal untuk menonton film di bioskop fisik, dalam proses memudahkan pembelian dan pembayaran tiket dan transportasi semua dalam satu platform. Saat ini, TIX.ID adalah satu-satunya aggregator yang mengelola inventaris tiket Cinema XXI. Karena posisi pasar terdepan Cinema XXI, ini memberikan keuntungan besar bagi TIX.ID pada penjualan tiket bioskop.

Meningkatnya popularitas konten lokal membantu menarik konsumen Indonesia ke layar lebar

Kepopuleran film-film produksi dalam negeri yang ditayangkan membantu menarik lebih banyak konsumen Indonesia untuk pergi ke bioskop. Pada tahun 2022, film lokal menyumbang sekitar 49,5% dari total penerimaan *box office* di Indonesia, dibandingkan dengan kurang dari 35% lima tahun yang lalu. Popularitas dan kualitas film-film domestik meningkat dari waktu ke waktu, dengan jumlah film lokal yang berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton tumbuh dari 2 judul pada tahun 2013 menjadi 14 judul pada tahun 2022. Ini terjadi meskipun dampak pandemi yang memengaruhi jumlah film yang dirilis.

Selain mendapatkan popularitas lokal, film Indonesia juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan lebih, seperti *The Raid* yang memenangkan *Asian Films Award*, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kesadaran konsumen di pasar domestik. Dalam hal genre film populer, berbagai film

horor, komedi, dan pahlawan super lokal juga mulai populer di kalangan konsumen. Film horor seperti KKN di Desa Penari dan Pengabdi Setan, serta film pahlawan super seperti Sri Asih, berhasil menarik perhatian penonton bioskop yang cukup besar. Hal ini menghasilkan *flywheel* positif dalam menghasilkan investasi lebih banyak dalam produksi film domestik, yang pada gilirannya memungkinkan produksi film berkualitas lebih baik yang menarik lebih banyak penonton, dan pada gilirannya menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi yang memberikan insentif untuk investasi selanjutnya. Selain konten lokal, bioskop-bioskop Indonesia juga beralih ke film-film Asia lainnya seperti film Korea, untuk melayani gelombang *Hallyu* di Indonesia dan popularitas *influencer* Korea dan idola *K-pop* yang juga membintangi film-film Korea.

Budaya nonton film yang kuat di Indonesia diakui sebagai opsi hiburan yang hemat biaya.

Harga tiket bioskop adalah salah satu faktor yang paling penting dalam memengaruhi permintaan konsumen Indonesia. Hal ini terutama berlaku bagi konsumen di kota-kota kecil, yang relatif lebih sensitif terhadap harga dibandingkan dengan konsumen di kota besar. Harga tiket Indonesia bervariasi tergantung pada dua variabel utama. Yang pertama berkaitan dengan jenis bioskop dan fasilitas. Dalam kebanyakan kasus, harga tiket di studio reguler yang dilengkapi dengan teknologi suara *Dolby Digital Surround* biasanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000. Dibandingkan dengan pengalaman menonton di studio IMAX yang memiliki layar lebih besar dan kualitas gambar yang lebih baik, harga tiket biasanya Rp10.000 lebih mahal dari harga tiket biasa. Rentang harga yang sama dapat diharapkan untuk jenis outlet bioskop premium lainnya, yang melibatkan penggunaan ruang kecil dan eksklusif dengan sofa yang nyaman. Variabel kedua berkaitan dengan perbedaan regional.

Dibandingkan dengan banyak bentuk kegiatan hiburan lainnya, nonton film tetap merupakan kegiatan yang relatif hemat biaya. Harga tiket rata-rata antara Rp30.000 hingga Rp60.000 dapat dianggap rendah dibandingkan dengan kegiatan lain seperti pergi ke sirkus (Rp110.000), pergi ke teater (Rp375.000), mengikuti kelas seni atau memasak (Rp480.000), atau pergi ke menonton konser (Rp4.500.000).

Rata-rata harga tiket industri film telah relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, meskipun terdampak pandemi. Kedepannya, diharapkan akan menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebesar 3,4% CAGR dari 2022E hingga 2027E, yang umumnya didorong oleh faktor makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan pendapatan.

Tren kenaikan pendapatan F&B[7]

Selain tiket *box office*, pengeluaran F&B untuk makanan dan minuman juga mengalami tren kenaikan di Indonesia, kecuali pada periode pandemi COVID-19. Pendapatan F&B tumbuh dari Rp2,1 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2,8 triliun pada tahun 2019, dengan CAGR yang cepat sebesar 14,5% dalam jangka waktu singkat tersebut. Setelah turun menjadi sebesar Rp.0,5 triliun pada tahun 2020, pendapatan penjualan F&Bpulih menjadi Rp2,2 triliun pada tahun 2022E, yang sudah lebih tinggi dari

[7] Semua referensi terkait pengeluaran/pendapatan F&B adalah bersifat bruto (sebelum pajak).

angka pada tahun 2017. Pendapatan F&B sebagai persentase dari penerimaan *box office* adalah sebesar 36,8% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 51,3% pada tahun 2022E.

Pengembangan mal baru di kota-kota tier 2 dan 3 menawarkan peluang ekspansi bagi operator bioskop

Pengembangan mal baru di kota-kota tier 2 dan 3 di Indonesia menawarkan peluang ekspansi lebih lanjut bagi operator bioskop di Indonesia. Saat ini, Jakarta, ibu kota Indonesia dan kota yang paling makmur, memiliki konsentrasi mal tertinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 649 pusat perbelanjaan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 18,2% atau 118 pusat perbelanjaan berlokasi di Jawa Barat. Jakarta menyumbang sebagian besar dari jumlah ini dengan 96 pusat perbelanjaan, atau 14,8% dari total nasional. Pusat perbelanjaan di kota-kota tier 2 dan 3 populer, terutama pada akhir pekan, sebagai destinasi satu atap bagi keluarga di pinggiran kota untuk mengunjungi tempat hiburan dan belanja. Karena popularitasnya, pengembang mulai menjelajahi lebih banyak peluang di kota-kota non-tier-1, di mana fasilitas ritel modern masih kurang. Mengingat sebagian besar bioskop modern, yang menyediakan sarana hiburan penting, terletak di pusat perbelanjaan, pengembangan mal baru menjadi peluang untuk penambahan *real estate* baru bagi penambahan fasilitas bioskop potensial di kota-kota tier rendah. Pada saat yang sama, pengembang *real estate* memperhatikan pengembangan jalan tol, seperti di daerah Lumajang, Probolinggo, dan Banyuwangi di bagian selatan Jawa Timur. Pengembangan infrastruktur akan memimpin pergerakan orang, yang pada gilirannya akan membuka peluang untuk membangun pusat perbelanjaan untuk melayani para migran area baru.

3.4 PENGHALANG INDUSTRI

Meningkatnya prevalensi OTT dan media sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan menonton film di bioskop

Meningkatnya penetrasi OTT dan media sosial memberikan bentuk hiburan alternatif selain nonton film. OTT dan media sosial dianggap sebagai alternatif kompetitif untuk bioskop karena bentuk konten yang sah, mudah diakses, dan dapat dinikmati tanpa batasan tempat. OTT dapat dibagi menjadi jenis lokal dan asing. Salah satu pemain OTT lokal yang kuat didukung oleh perusahaan media terbesar kedua di Indonesia. Mereka memiliki agensi bakat dan rumah produksi mereka sendiri, dan menawarkan konten lokal paling banyak di antara pemain OTT, dengan sekitar 36-40 judul. Selain video, mereka juga menyiarkan olahraga (seperti sepak bola), saluran telivisi, dan jenis konten lainnya untuk memenuhi berbagai preferensi konsumen. Pemain lokal lainnya juga muncul untuk bersaing dengan pemain kuat saat ini. Pemain OTT asing juga meningkatkan kemitraan mereka dengan rumah produksi film lokal untuk menawarkan konten lokal guna memenuhi permintaan pasar. Ada platform lain yang populer khususnya untuk konten Korea di kalangan warga Indonesia.

Pandemi COVID-19 memberikan dorongan pada pertumbuhan OTT, karena ketersediaan format kualitas layar dan audio yang tinggi, yang dapat dinikmati konsumen dari kenyamanan rumah mereka.

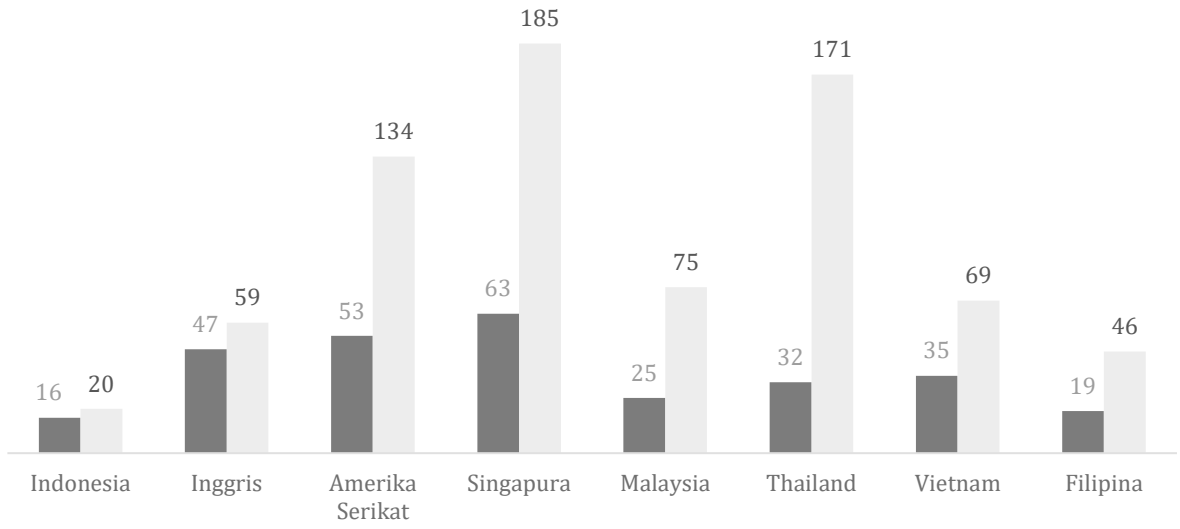
Konsumen, terutama mereka dengan pendapatan yang tinggi, meningkatkan peralatan hiburan rumah mereka, seperti layar TV beresolusi tinggi atau proyektor, teknologi audio *home theater* (yang sekarang dapat terhubung secara digital), membawa pengalaman video di rumah mereka lebih dekat dengan pengalaman di bioskop. Sementara itu, media sosial menimbulkan persaingan untuk film dan serial karena kualitas kontennya. Kemunculan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dan konten pendek dalam format yang menarik menyebabkan daya tarik konsumen semakin pendek. Platform ini juga memungkinkan kreator untuk mengunggah ringkasan film secara singkat tetapi menarik perhatian, sehingga orang yang menonton dapat menghemat waktu duduk selama durasi film penuh. Platform ini juga sebagian besar gratis digunakan (dengan versi berbayar yang menghapus iklan) dan dengan demikian memiliki jangkauan konsumen yang luas. Di sisi lain, platform media sosial juga dapat berfungsi sebagai platform yang efektif untuk meningkatkan permintaan untuk film di bioskop. Mengingat penggunaan media sosial yang luas, mereka berfungsi sebagai platform yang baik untuk memperluas jangkauan bioskop, dan untuk digunakan untuk berbagi trailer film yang menarik. Ini, pada gilirannya, menciptakan *hype* dan membantu mendorong lebih banyak penonton ke bioskop.

Dengan semakin populernya platform OTT, platform tersebut menjadi alternatif format yang layak bagi perilisan film. Sebelumnya, para pembuat film memiliki opsi distribusi yang terbatas dan relatif lambat: di televisi satelit, media lama seperti kaset video dan DVD, atau di teater. Produksi lebih banyak tayangan orisinal yang tidak bisa ditonton di bioskop berpotensi menjadi ancaman bagi para pemain bioskop. Hal ini khususnya berlaku untuk film dengan konten yang tidak memaksimalkan keunggulan kualitas audio dan visual setingkat bioskop. Dengan demikian, platform OTT dan bioskop hidup berdampingan di pasar penonton film yang berbeda, dengan bioskop cocok dan disukai untuk film blockbuster. Seiring dengan pertumbuhan peluang pasar, begitu juga anggaran produksi film untuk platform OTT. Biaya produksi ditentukan oleh teknologi, dan penerapan dalam skala besar dapat menjadi mahal, yang merupakan penghambat dalam pasar Indonesia yang sensitif terhadap harga. Namun, hal ini tidak menghalangi pemain dengan sumber daya yang lebih dalam, seperti Netflix, Prime Video, dan perusahaan telekomunikasi dan media Telkomsel, yang berinvestasi dalam pengembangan acara lokal.

Meskipun demikian, sifat ancaman platform OTT terhadap bioskop di Indonesia memerlukan segmentasi basis konsumen yang lebih rinci dan pemahaman tentang perbedaan preferensi pelanggan. Infrastruktur internet yang masih berkembang di Indonesia juga perlu dipertimbangkan, di mana penetrasi di kota tier 2 dan 3 masih dalam status pengembangan. Hal ini menimbulkan tantangan untuk adopsi layanan OTT yang lebih meluas di kota-kota di luar Jawa, Bali, dan Sumatra. Hal ini terbukti dari pendekatan pengembangan yang diambil oleh OTA utama, Traveloka, yang mencakup seluruh pasar Indonesia. Mereka harus mengatasi masalah konektivitas internet yang buruk dengan menyediakan fitur produk *offline* untuk menjaga pengalaman pengguna bahkan di daerah dengan konektivitas internet yang rendah. Platform yang menawarkan pengalaman audio-visual berkualitas tinggi juga terbatas pada saat ini. Saat ini, hanya platform OTT premium di Indonesia yang menyediakan kualitas audio dan video terbaik. Misalnya, film Ultra HD hanya tersedia melalui Amazon Prime Video dan sebagian konten Netflix. Selain itu, biaya langganan menghambat penetrasi OTT ke kota-kota tier 2 dan

3 yang relatif lebih sensitif terhadap harga. Misalnya, ketika platform menerbitkan episode gratis, banyak pengguna berasal dari segmen konsumen berpenghasilan rendah. Namun, pelanggan berbayar lebih banyak berasal dari segmen konsumen berpenghasilan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang pasar yang dapat dieksplorasi oleh operator bioskop., meskipun peluang tersebut mungkin semakin pendek karena upaya pengembangan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah Indonesia.

Bagan 3 Kecepatan Internet di 2022 (Mbps)



Sumber: Datareportal.com

Munculnya bentuk hiburan dan aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian dari bioskop.

Sementara OTT dan media sosial merupakan faktor kendala terbesar untuk film, bentuk hiburan lain juga semakin bermunculan sebagai bentuk hiburan yang layak. Misalnya, pada periode pasca-COVID-19, lebih banyak orang Indonesia yang menunjukkan minat pada acara dan aktivitas yang dapat dinikmati secara langsung dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk acara musik, teater tradisional langsung seperti Wayang Orang, pertunjukan komedi, kegiatan di taman hiburan, dan aksi langsung di acara olahraga. Sebagai hasilnya, telah terjadi pembukaan taman hiburan baru di kota-kota kecil, bahkan di daerah pedesaan, untuk mengikuti tren aktivitas pasca-COVID. Namun, para pemangku kepentingan pasar telah mengamati bahwa mungkin ada perbedaan pada segmen konsumen yang dapat memengaruhi frekuensi penggunaan. Bioskop lebih bergantung pada penonton reguler, sedangkan taman hiburan menarik lebih banyak konsumen selama puncak musiman seperti liburan sekolah dan hari libur umum. Operator bioskop juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan layanan bernilai tambah untuk menjadi pusat hiburan satu atap dengan mengintegrasikan zona aktivitas pelengkap seperti pusat permainan, atau pusat permainan video bagi para pembuat film untuk berkumpul bersamaan dengan menonton film.

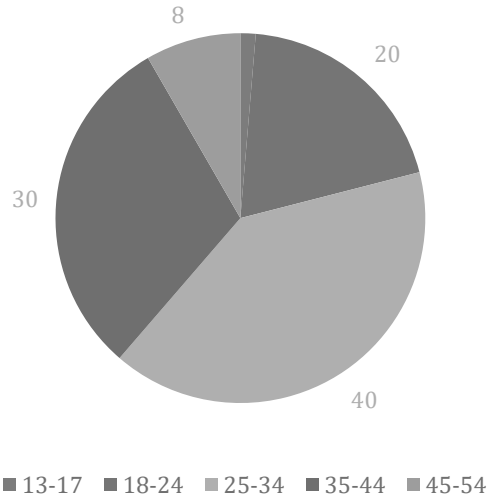
3.5 INDUSTRI BIOSKOP DARI PRESPEKTIF KONSUMEN DI INDONESIA

Euromonitor International melakukan survei pada Januari 2023 dengan konsumen Indonesia untuk memahami sikap dan preferensi mereka terhadap nonton film di bioskop. Hasil survei dan pembelajaran dapat dilihat pada bagian ini.

Penonton bioskop sebagian besar adalah kaum milenial dan Gen X, yang sebagian besar berasal dari kota tingkat 1

Segment konsumen utama bagi penonton bioskop Indonesia terletak pada kelompok demografis milenial dan Gen X. 40% dari responden survei yang sering mengunjungi bioskop berusia 25-34 tahun, sedangkan 30% dari mereka berusia 35-44 tahun. Hal ini sangat sejalan dengan survei sebelumnya oleh Euromonitor International, *Voice of the Consumer: Lifestyles Survey* pada tahun 2022[8], di mana milenial dan Gen X adalah penonton bioskop terbesar. Sebagian besar penonton bioskop yang disurvei tinggal di kota-kota tier 1. Jakarta (36%[9]) membentuk proporsi terbesar dari lokasi tempat responden survei tinggal, diikuti oleh Bandung (16%).

Bagan 4 Profil Usia Pengunjung Bioksop (%)



Sumber: Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, berdasarkan natural fallout basis. (T: Berapa usia Anda dalam satuan tahun?)

F&B menjadi pertimbangan penting bagi konsumen saat memilih bioskop.

Selain kegiatan utama menonton film, penonton bioskop Indonesia juga melakukan pembelian makanan dan minuman di bioskop. 87% dari responden menempatkan makanan dan minuman sebagai pertimbangan yang cukup penting hingga sangat penting saat memilih bioskop yang akan dikunjungi.[10] Meskipun pembelian makanan dan minuman sangat baik sebagai pendamping untuk menonton film,

[8] *Sumber: Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Tanggapan diambil setiap tahun dari konsumen daring yang berusia antara 15 hingga 65+ tahun, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. P: Ketika Anda berpikir tentang kebiasaan rekreasi Anda, seberapa sering Anda - Pergi ke bioskop*

[9] *Euromonitor International - Survei konsumen daring yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang pernah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, pada dasar kejadian alami. P: Anda mengatakan bahwa Anda tinggal di Indonesia. Di kota mana Anda tinggal saat ini?*

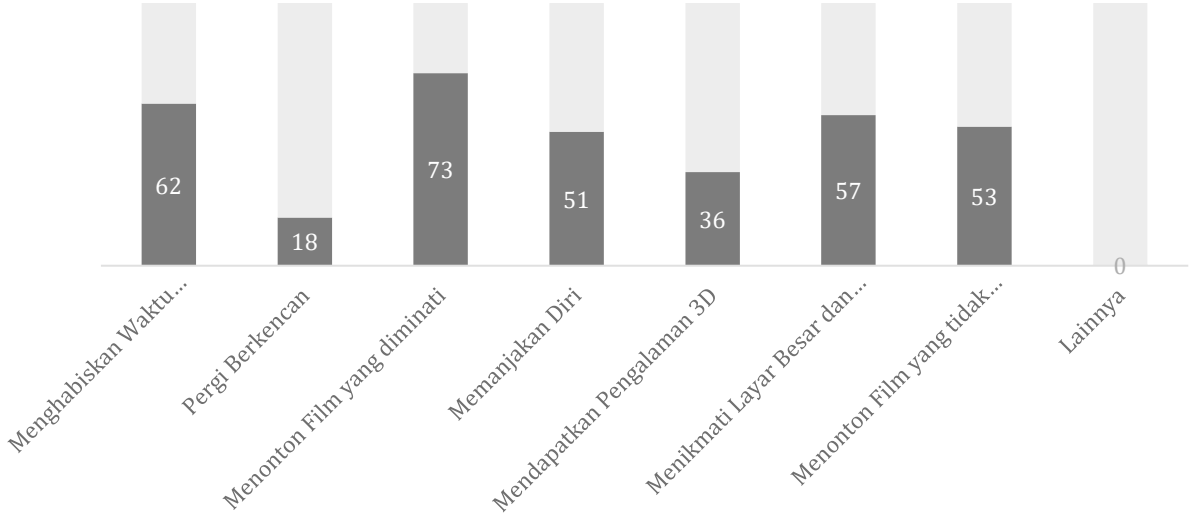
[10] *Euromonitor International - Survei konsumen daring yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang pernah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, pada dasar kejadian alami. P: Saat Anda mengunjungi bioskop, faktor di bawah ini yang mana yang penting bagi Anda?*

opsi makanan yang ditawarkan oleh bioskop juga dibeli untuk dikonsumsi di luar bioskop. Dalam survei yang sama, lebih dari setengah dari responden - sebanyak 64% - setuju bahwa mereka membeli F&B di bioskop untuk dikonsumsi di luar bioskop.

Masyarakat Indonesia senang menonton film favorit mereka bersama keluarga dan teman-teman.

Konsumen Indonesia seringkali pergi menonton film ke bioskop. Sebanyak 76% konsumen pergi ke bioskop setidaknya sekali dalam sebulan. Saat mereka pergi ke bioskop, menonton film tetap menjadi aktivitas utama. Sebanyak 73% responden mengatakan bahwa mereka pergi ke bioskop untuk menonton film yang mereka minati. Menonton film di bioskop juga biasanya bukanlah aktivitas yang dilakukan sendirian: 62% responden konsumen Indonesia menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman di bioskop. Selain itu, konsumen juga mencari pengalaman audiovisual terbaik. Sebanyak 57% responden pergi ke bioskop fisik untuk merasakan layar besar dan suara yang bagus, yang sulit direplikasi di tempat lain.

Bagan 5 Motivasi Pegi ke Bioskop (%)



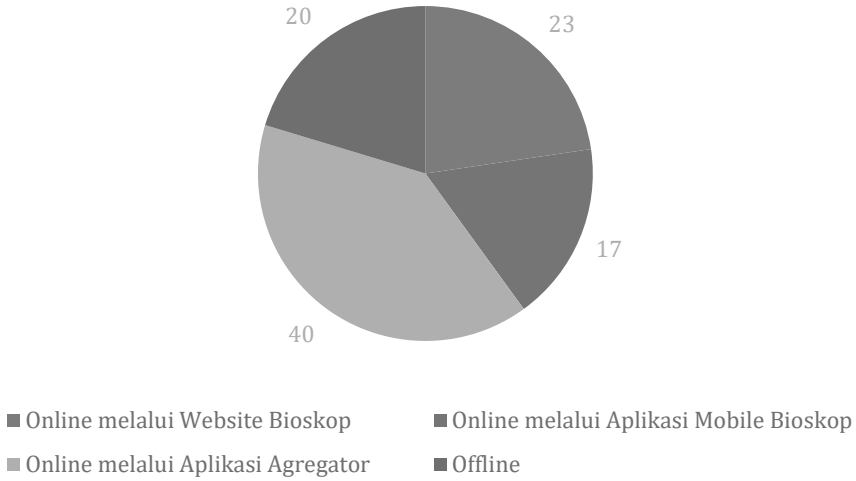
Sumber: Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. (T: Apa motivasi Anda pergi ke bioskop?)

Pembelian tiket film dan informasi berpindah secara *online*, tetapi *offline* tetap relevan untuk pembelian F&B

Dalam hal sumber informasi untuk film yang sedang dan akan tayang, konsumen Indonesia beralih ke media digital. Sebagian besar dari mereka - 56% responden - memperoleh informasi tersebut dari situs web yang dioperasikan oleh bioskop. Akun media sosial film dan aktor yang mereka ikuti adalah sumber informasi terpopuler berikutnya bagi sekitar separuh responden. Selain itu, kurang dari setengah, atau 48%, responden memperoleh informasi film di tempat pembelian tiket - aplikasi agregator tiket. Mengingat bahwa mereka menggunakan sarana digital untuk pengumpulan informasi, maka wajar bagi mereka untuk lebih memilih kanal *online* untuk pembelian tiket karena prosesnya yang mudah. Sebagian besar responden (40%) mencari agen tiket *online* untuk pembelian tiket, diikuti dengan

langsung di situs web bioskop (23%). Meskipun ketersediaan penjualan tiket secara *online* telah meluas, beberapa konsumen masih membeli tiket melalui saluran *offline* (20%), yang menunjukkan bahwa penjualan tiket *offline* tidak sepenuhnya tidak diperlukan meskipun semakin berkurang dalam signifikansinya. Hal yang berbeda berlaku untuk pilihan F&B, karena mayoritas responden (80%) membelinya secara *offline*.

Bagan 6 Preferensi Pemesanan Tiket (%)



Sumber: Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. (T: Ketika Anda mengunjungi bioskop, apa cara yang Anda sukai untuk memesan tiket dan membeli makanan & minuman?)

Kualitas audiovisual dan kenyamanan tempat duduk menjadi faktor utama yang mendorong pemilihan bioskop.

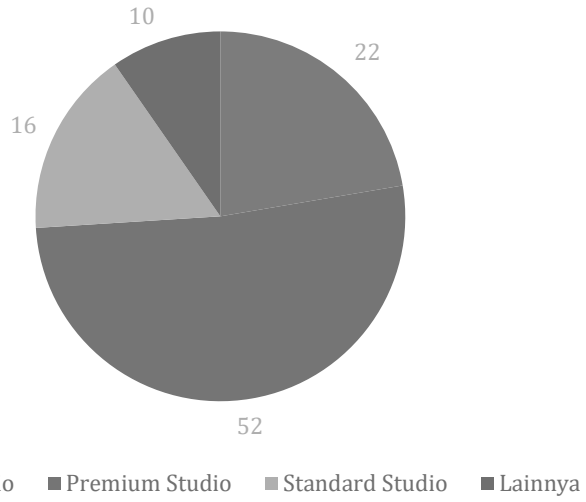
Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pilihan konsumen Indonesia dalam memilih bioskop. Faktor utama adalah dua faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menonton film. Lebih dari setengah responden survei (51%[11]) percaya bahwa kualitas layar dan sistem suara sangat penting, sedangkan 40% percaya bahwa faktor ini sangat penting. Sebagai contoh, sistem suara menjadi faktor penting dalam menyampaikan *soundtrack* film kepada penonton. Kenyamanan tempat duduk memiliki tingkat penting yang sama. Hampir setengah responden (50%) menganggap kenyamanan tempat duduk sangat penting, sedangkan 44% menganggapnya sangat penting. Meskipun kepuasan menonton film penting, faktor tersebut tidak relevan jika bioskop tidak menayangkan film yang diinginkan konsumen. Hampir setengah responden (49%) menganggap ketersediaan film di bioskop sangat penting, sedangkan faktor yang sama sangat penting bagi 42% responden. Hal ini diikuti dengan pilihan tempat duduk dan ketersediaannya. Sebanyak 36% responden menganggap faktor ini sangat penting, sedangkan lebih dari setengah (54%) percaya bahwa faktor ini penting.

[11] *Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. T: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor manakah di bawah ini yang penting bagi Anda?*

Konsumen Indonesia menonton film baik di bioskop maupun melalui platform streaming online.

Dalam hal platform yang lebih disukai untuk menonton film, konsumen Indonesia lebih sering menonton di bioskop (33%), diikuti oleh platform streaming *online* (29%)[12]. Selanjutnya, "pada platform *online* gratis dengan iklan", di mana sebagian besar responden menonton film di platform-platform ini sebanyak 20%. Di sisi lain, televisi satelit, televisi kabel, dan media *pay-per-view* adalah yang paling tidak populer. Platform streaming *online* populer di antara responden survei, dengan 88%[13] responden memiliki langganan aktif. Ketika konsumen Indonesia pergi ke bioskop, mereka memilih pengalaman yang lebih baik. Lebih dari setengah responden (52%) memilih studio premium, sedangkan 22% memilih studio IMAX berlayar lebar, dan sisanya memilih studio standar dan jenis studio lainnya. Dalam hal preferensi film, sedikit lebih dari separuh konsumen Indonesia lebih memilih menonton film *Hollywood*(57%[14]). Sisanya hampir sama-sama terbagi antara film Indonesia lokal dan film internasional lainnya.

Bagan 7 Preferensi Jenis Bioskop (%)



Sumber: Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. (T: Jenis bioskop apa yang biasanya Anda sukai?)

Konsumen Indonesia menunjukkan kenyamanan yang tinggi dengan kembali ke bioskop untuk menonton film pasca-COVID-19.

Sebagian besar konsumen Indonesia telah melupakan pandemi COVID-19 dan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada rasa tidak nyaman untuk pergi ke bioskop untuk menonton film. Hanya 6% responden survei yang mengungkapkan kewaspadaan, sedangkan sisanya setidaknya nyaman pergi ke bioskop.

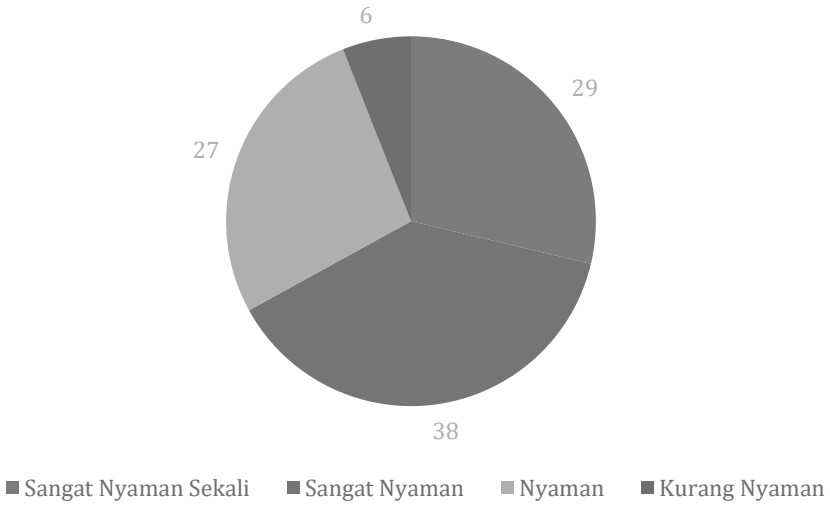
[12] *Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. T: Bisakah Anda memperkirakan pembagian persentase untuk frekuensi Anda menggunakan saluran yang tercantum di bawah untuk menonton film Blockbuster/rilis baru?*

[13] *Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. T: Apakah Anda memiliki langganan platform streaming film aktif?*

[14] *Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. Q: Jenis film apa yang Anda sukai?*

Sebagian besar merasa sangat nyaman (38%) sementara sebagian besar responden merasa sangat-sangat nyaman (29%) dengan pergi ke bioskop fisik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Indonesia tidak ragu untuk menonton film di bioskop. Hal ini terutama karena konsumen Indonesia cenderung menikmati film favorit mereka bersama keluarga dan teman.

Bagan 8 Kenyamanan untuk Pergi ke Bioskop Setelah Pandemi COVID-19 (%)



Sumber: Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, on natural fallout basis. (T: Seberapa nyaman Anda kembali ke bioskop setelah Covid-19?)

3.6 PERBANDINGAN INDUSTRI BIOSKOP DI SELURUH PASAR

Indonesia memiliki ruang untuk perbaikan baik dari segi kuantitas absolut maupun penetrasi layar bioskop

Jumlah layar bioskop di Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara berdasarkan PDB dan jumlah populasi, tentu saja besar. Indonesia memiliki 2.107 layar pada tahun 2022E, dibandingkan dengan 1.454 layar di Malaysia, 765 layar di Filipina, 314 layar di Singapura, dan 922 layar di Thailand. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal jumlah layar dibandingkan dengan pasar yang lebih berkembang secara ekonomi, serta dibandingkan dengan pasar regional lainnya dalam hal rasio layar-per-populasi. China memiliki hampir 67.000 layar bioskop, Amerika Serikat memiliki 44.340, sedangkan India memiliki 11.030. Penetrasi layar Indonesia (jumlah layar per juta penduduk) meningkat dari 5,8 pada tahun 2017 menjadi 7,6 pada tahun 2022E, dibandingkan dengan Singapura yang kecil tetapi makmur dengan penetrasi layar 58,5 pada tahun 2022E, hampir delapan kali lipat dari Indonesia Sementara itu, Malaysia dan Thailand masing-masing berada pada 42,9 dan 12,9. Hanya Filipina yang lebih rendah pada 6,6. Selain jumlah, Indonesia adalah pasar dengan sedikit layar, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2022E, ada 10 layar IMAX di Indonesia.

Dalam hal permintaan konsumen, pasar regional lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand juga relatif matang dengan prospek pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya penetrasi bioskop di pasar tersebut, yang dikombinasikan dengan adanya bentuk-bentuk hiburan

alternatif yang kuat yang dapat bertindak sebagai pengganti. Di sisi lain, Vietnam dan Filipina lebih dekat dengan Indonesia dalam hal prospek pertumbuhan populasi kelas menengah, yang memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan melalui ekspansi kuantitas layar dan waktu tayang bioskop.

Tabel 14 Jumlah Layar di Seluruh Pasar (2017-2022E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*
Brazil	3.223	3.294	3.356	3.304	3.274	3.263
China	50.776	54.542	58.177	61.534	64.525	66.860
India	10.884	10.927	10.958	10.988	11.012	11.030
Indonesia*	1.533	1.777	2.063	2.113	2.091	2.107
Malaysia	1.094	1.162	1.240	1.313	1.377	1.454
Mexico	6.633	6.811	6.990	7.132	7.282	7.430
Filipina	743	749	749	756	760	765
Russia	4.805	5.341	5.597	5.337	5.364	5.384
Singapura	253	266	278	290	301	314
Thailand	908	913	916	919	921	922
Amerika Serikat	40.174	40.174	41.172	40.998	43.646	44.340
Inggris	4.512	4.640	4.782	4.682	4.809	4.905

*Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022); * Estimasi Euromonitor International dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.*

Tabel 15 Penetrasi Layar – Jumlah layer per Juta Populasi (2017-2022E)

Markets	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*
Brazil	15,5	15,7	15,8	15,5	15,3	15,2
China	36,5	39,0	41,4	43,6	45,7	47,3
India	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0
Indonesia*	5,8	6,7	7,7	7,8	7,6	7,6
Malaysia	34,3	35,9	37,8	39,5	41,0	42,9
Mexico	54,0	54,9	55,9	56,7	57,6	58,5
Filipina	7,0	6,9	6,8	6,7	6,7	6,6
Russia	33,3	36,9	38,8	37,0	37,3	37,6
Singapura	45,1	47,2	48,7	51,0	55,2	58,5
Thailand	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9
Amerika Serikat	123,0	122,3	124,7	123,7	131,5	133,1

Inggris	68,5	70,0	71,8	69,9	71,5	72,6

*Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022); * Estimasi Euromonitor International dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.*

Pertumbuhan kunjungan tahunan ke bioskop per kapita di Indonesia dapat menjadi salah satu penggerak pasar yang paling penting.

Terdapat ruang yang cukup besar untuk pertumbuhan jumlah kunjungan bioskop per kapita di Indonesia, karena nilai tersebut tercatat sangat rendah dalam lima tahun terakhir. Jumlah kunjungan bioskop per kapita di Indonesia pada tahun 2022E diperkirakan mencapai 0,4. Meskipun angka ini meningkat dari nilai 0,1 pada tahun 2020 dan 2021, namun sangat berbeda dengan pasar tetangga, Singapura. Nilai kunjungan bioskop per kapita Singapura diperkirakan akan pulih dari titik terendah yang diakibatkan oleh pandemi, yaitu 2,8 pada tahun 2020, menjadi 3,9 pada tahun 2022E, 13 kali lebih tinggi daripada Indonesia. Selain Thailand dan Malaysia, seluruh ekonomi Asia besar seperti China dan India serta ekonomi maju seperti AS dan Inggris diperkirakan akan mencatatkan nilai kunjungan bioskop per kapita tahunan setidaknya lebih dari 1,0.

Tabel 16 Kunjungan Bioskop Tahunan per Kapita (2017-2022E)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022E
China	1,2	1,4	1,7	1,4	1,7	1,7
India	1,6	1,6	1,7	1,2	1,3	1,3
Indonesia*	0,5	0,6	0,6	0,1	0,1	0,4
Malaysia	2,3	2,3	2,3	1,9	2,0	2,1
Filipina	0,7	0,8	1,0	0,7	0,8	0,9
Singapura	3,6	3,6	3,4	2,8	3,5	3,9
Thailand	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
Amerika Serikat	3,8	4,0	3,8	0,7	1,4	2,0
Inggris	2,6	2,7	2,6	0,7	1,1	1,5

*Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022); * Estimasi Euromonitor International dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.*

Penerimaan *box office* Indonesia memiliki nilai absolut yang lebih tinggi daripada tetangganya yang lebih kecil, tetapi tertinggal dari pasar yang lebih besar dan maju

Pendapatan *box office* bioskop Indonesia dalam nilai absolut relatif lebih tinggi dibandingkan pasar regional lainnya di Asia Tenggara. Hal ini tidak mengherankan mengingat besarnya pasar. Pendapatan *box office* sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019 rata-rata sekitar USD500 juta di Indonesia, sekitar dua kali lipat dari Malaysia, dan sekitar empat kali lipat dari Singapura. Namun, Indonesia tertinggal dari pasar besar lain di Asia seperti China dan India, dengan rata-rata sekitar USD9,5 miliar dan USD1,6 miliar masing-masing sebelum pandemi. Hal ini juga terjadi jika dibandingkan dengan pasar maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang masing-masing rata-rata sekitar USD11,4 miliar dan

USD1,7 miliar pada tahun 2019. Dalam hal tren pertumbuhan, pendapatan *box office* Indonesia pada umumnya cenderung meningkat, menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir, sama seperti kebanyakan pasar lainnya. Namun, ada pasar lain di mana pendapatan *box office* tidak pulih pada tahun 2022 dari posisi terendah di tahun 2020 dan 2021. Misalnya, pendapatan *box office* China diperkirakan mencapai USD5,2 miliar pada tahun 2022, lebih rendah dari USD7,8 miliar dan USD7,3 miliar yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021, secara berturut-turut. Demikian pula, di Filipina, pendapatan *box office* telah menurun sejak 2017, turun dari USD3,5 juta menjadi USD0,8 juta pada tahun 2022E.

Tabel 17 Pendapatan Bruto *Box Office* (2017-2022E, USD Juta)

Pasar	2017	2018	2019	2020	2021	*2022E*
China	8.669,7	8.827,4	9.504,2	7.805,9	7.309,6	5.158,1
India	1.328,2	1.552,4	1.599,8	1.020,9	1.133,4	1.061,1
Indonesia*	401,6	460,4	500,3	86,8	92,3	299,3
Malaysia	237,4	252,4	269,2	210,5	235,1	251,2
Filipina	3,5	3,1	2,9	2,3	1,8	0,8
Singapura	108,8	109,9	105,6	5,9	83,1	96,6
Thailand	6,5	6,9	7,6	4,7	5,8	6,4
Amerika Serikat	11.091,0	11.858,0	11.400,0	2.200,0	4.500,0	6.048,4
Inggris	1.759,8	1.763,5	1.724,7	422,4	656,1	865,3

*Sumber: Data Paspor Euromonitor (Ekonomi dan Konsumen edisi 2022); * Estimasi Euromonitor International dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.*

3.7 PERATURAN DAN INVESTASI YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI BIOSKOP DAN KESELURUHAN BIDANG REKREASI.

Peraturan pemerintah membentuk dan memfasilitasi industri bioskop baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, regulasi atau kurangnya penegakan hukum dapat menjadi faktor pembatas dalam pasar. Sebagai contoh, kesulitan dalam penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia menyebabkan tantangan bagi permintaan film di bioskop, meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memblokir situs streaming ilegal. Sebuah studi pada tahun 2017 dari Institut Riset Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berusia antara 15 dan 45 tahun mengunduh film ilegal secara *online* atau membeli DVD bajakan karena tidak menyadari bahwa menonton konten kreatif yang didistribusikan secara ilegal adalah pelanggaran hukum. Laporan yang sama menemukan bahwa industri film Indonesia kehilangan Rp1,5 triliun (USD 107 Juta) karena pembajakan konten di empat kota Indonesia (Jakarta, Deli Serdang, Medan, Bogor) yang diteliti.

Regulasi juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi atau membentuk industri perfilman dengan menetapkan parameter untuk konten dan diskusi yang dapat dibahas melalui film. Hal ini terutama berlaku untuk topik sosial yang sensitif, termasuk konten seksual, *LGBTQ*, terorisme, dan kepolisian yang didasarkan pada nuansa sosial-budaya dan keagamaan lokal. Meskipun demikian, para pembuat film dapat menjadi kreatif dan mengatasi batasan tersebut dengan mendekati topik-topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, Sayap-sayap Patah menggabungkan tema-tema seperti terorisme, pengambilan keputusan polisi dengan elemen kemanusiaan yang kuat, sehingga mudah dipahami oleh pemirsa dan mencerminkan kejadian-kejadian nyata yang menjadi dasar dari film tersebut.

3.8 ANALISIS RANTAI NILAI

Bioskop menghubungkan konten film dari rumah produksi ke konsumen akhir.

Rantai nilai industri film dapat dibagi menjadi sisi pasokan - produksi film dan konten - dan sisi permintaan - konsumen akhir. Bioskop berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya dengan menyajikan film-film yang diproduksi dengan cara yang memukau dan menarik perhatian bagi konsumen. Dalam hal pasokan film, sebagian besar diperoleh dari rumah produksi lokal yang juga bekerja dengan produsen independen, seperti Joko Anwar, atau didapatkan dari pemasok asing. Rumah produksi lokal dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk pemain veteran seperti Starvision, Soraya, Rapi Films, dan MD Entertainment yang memproduksi film dengan anggaran kecil hingga besar. Pemain baru termasuk Falcon Pictures, Screenplay Films, dan Legacy Pictures juga yang menempati pasarnnya sendiri, seperti KG Production dan Mizan yang dikenal karena adaptasi film dari novel. Sementara itu, beberapa rumah produksi seperti 13 Entertainment dan Multivision mahir dalam merestorasi film-film lama dan mengubahnya ke dalam format digital. Untuk film asing, umumnya importir bekerja sama dengan pemegang lisensi asing untuk menjual lisensi di Indonesia. Di Indonesia, Omega Film adalah distributor besar yang ditunjuk oleh rumah produksi asing untuk mendistribusikan film-film mereka.

Dalam hal model pendapatan, sebagian besar film dibayar melalui metode lisensi, meskipun ada juga kesepakatan pembagian pendapatan antara bioskop dan rumah produksi. Pendekatan yang sama berlaku untuk film asing. Untuk bioskop Indonesia, yang menghubungkan pasokan film dengan permintaan konsumen, mereka dilarang melakukan integrasi vertikal untuk mengakuisisi rumah produksi dan mitra distribusi. Namun, ini tidak berlaku untuk perusahaan media, beberapa di antaranya telah mengakuisisi rumah produksi. Misalnya, IDN Media mengakuisisi rumah produksi Demi Istri dan mengubahnya menjadi IDN Pictures. Akibatnya, tidak ada perlakuan istimewa untuk operator bioskop dari rumah produksi dan mereka tidak mungkin mendapatkan akses eksklusif ke film. Cara utama untuk berbeda di pasar terletak pada pengalaman pelanggan yang mereka berikan - yang melibatkan layanan dan hiburan yang baik sepanjang perjalanan pelanggan.

Dalam hal model pembagian pendapatan antara operator bioskop dan distributor film di Indonesia, telah menjadi praktik umum selama bertahun-tahun untuk membagi pendapatan secara merata antara kedua belah pihak, berdasarkan jumlah penjualan tiket dikurangi pajak. Bagian distributor dari pendapatan *box office* kemudian dibagi kembali antara distributor dan rumah produksi. Praktik ini bervariasi di pasar lain, di mana distributor dapat bernegosiasi tentang pembagian pendapatan berdasarkan film yang diputar. Misalnya, dalam hal judul film yang sangat populer, studio film dan distributor cenderung menerima syarat pembagian pendapatan yang lebih menguntungkan dalam dua minggu pertama. Ini membantu mereka mendapatkan lebih banyak pendapatan karena kegembiraan film paling tinggi pada dua minggu pertama pemutaran film dan menarik volume penonton bioskop tertinggi. Namun, hal ini dapat berkurang dalam beberapa minggu berikutnya hingga periode penayangan film berakhir, di mana pembagian pendapatan dapat mencapai rasio 6:4 antara operator bioskop terhadap distributor dan rumah produksi.

3.9 PROSPEK INDUSTRI

Saluran film yang kuat dan ekspansi geografi baru memberikan peluang pertumbuhan industri bioskop.

Munculnya bentuk hiburan film alternatif seperti platform OTT menjadi pertanda pergeseran baru dalam industri film dan bioskop Indonesia dan memberikan peluang pertumbuhan. Meskipun beberapa pemain pasar telah terfokus pada bagaimana platform OTT merupakan tantangan bagi bioskop, industri film dan OTT menawarkan dua model bisnis yang berbeda. Pandemi juga telah menunjukkan bagaimana platform OTT dapat menjadi pilihan alternatif yang layak bagi pemain industri film untuk menampilkan konten mereka kepada audiens yang luas. Platform OTT dapat membantu meningkatkan kualitas konten film, mempromosikan pengembangan film nasional di Indonesia, dan bahkan menyebarkan film lebih luas di luar pulau utama Jawa, terutama di kota-kota yang belum memiliki akses tinggi ke bioskop. Seiring dengan peningkatan kualitas dan kesadaran merek film Indonesia, platform OTT juga bisa menjadi media untuk memberikan akses internasional bagi film Indonesia, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi produsen lokal.

Industri bioskop juga diharapkan mendapat dorongan dari daftar film internasional dan domestik yang kuat di masa depan. Hal ini dimulai pada tahun 2023, dengan banyak sekuel film waralaba internasional yang dijadwalkan akan ditayangkan di layar lebar. Ini termasuk, misalnya, *Ant-Man, Spider-Man* dan The *Marvels* dari alam semesta pahlawan super *Marvel*. Franchise internasional lain yang terkenal seperti *Mission Impossible, Indiana Jones*, dan *The Hunger Games* juga akan dirilis. Di sisi domestik, film-film baru juga diharapkan akan diluncurkan setiap bulannya. Judul-judul film yang termasuk dalam franchise yang terkenal meliputi Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini 2, Bangku Kosong 2, Catatan si Boy, dan Sundel Bolong. Pipa ini juga tidak akan berhenti pada tahun 2024, dengan judul-judul populer lainnya yang dijadwalkan akan dirilis. Contoh film yang diharapkan akan dirilis pada tahun 2024 adalah *The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Quiet Place 3* bersama dengan waralaba *The Lion King dan Captain*

America. Perilisan film-film yang akan datang dari waralaba yang disukai banyak orang akan membantu menarik banyak orang ke bioskop Indonesia untuk jangka waktu yang berkelanjutan.

Secara khusus dalam aspek bioskop dari industri film, penetrasi bioskop dan layar yang rendah saat ini memberikan peluang pertumbuhan di masa depan bagi operator bioskop untuk memperluas ke luar dari kota-kota utama tier 1. Peningkatan tingkat pendapatan yang merata di Indonesia juga berarti bahwa akan ada kecenderungan yang lebih tinggi bagi konsumen untuk meningkatkan pengeluaran diskresioner, seperti pada hiburan dan rekreasi. Peluang terbesar bagi operator bioskop yang memasuki wilayah baru terletak pada fakta bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan akan relatif lebih cepat dari wilayah yang ada, dan akan menciptakan peluang pertumbuhan permintaan meskipun tantangan logistik tetap ada. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur di luar kota-kota tier 1, termasuk membangun lebih banyak jalan tol, akan membantu membawa peluang pengembangan properti di daerah-daerah tersebut. Sebagai hasilnya, pendapatan *box office* untuk industri bioskop Indonesia diharapkan akan tumbuh dari Rp.5,5 triliun pada 2023E (77,1% dari level 2019) menjadi Rp.7,7 triliun pada 2024E (106,9% dari 2019). Sejalan dengan peningkatan permintaan untuk film domestik, diharapkan bahwa proporsi kontribusi film domestik terhadap *box office* bruto akan meningkat dari 49,5% pada 2022E menjadi 52,5% pada 2027E. Dibandingkan dengan kontribusi 34,2% yang ditunjukkan pada tahun 2017, jelas bahwa film domestik semakin relevan dan diharapkan akan tetap menjadi kontributor yang substansial untuk *box office* bruto ke depan.

Tabel 18 Data Utama tentang Tinjauan Sinema di Indonesia (2023E-2027E)

Indonesia	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Omzet Perusahaan Penyiaran Film Dan Operasi Bioskop (Rp Miliar)	8.809,6	12.310,0	14.650,0	17.391,4	20.595,9
Jumlah Bioskop (Termasuk Teater Film, Multiplex, Dan Megaplex)	450	509	557	605	653
Jumlah Layar	2.248	2.505	2.764	3.066	3.368
Pendapatan Bruto *Box Office* (Rp Miliar)	5.517,6	7.652,8	9.003,4	10.571,8	12.387,8
Pendapatan Bruto *Box Office* Untuk Film Asing (Rp Miliar)	2.731,2	3.749,9	4.366,6	5.074,5	5.884,2
Pendapatan Bruto *Box Office* Untuk Film Domestik (Rp Miliar)	2.786,4	3.902,9	4.636,7	5.497,3	6.503,6
Jumlah Penjualan Tiket (Rp Miliar)	119,2	160,0	182,4	207,9	236,6
Harga Tiket Rata-rata (Rp.)	46.302,1	47.830,1	49.360,6	50.841,5	52.366,7
Pengeluaran Makanan Dan Minuman (Rp Miliar)[15]	2.899,5	4.106,4	4.929,3	5.903,4	7.060,4

[15] *Semua referensi untuk pengeluaran/pendapatan F&B adalah berdasarkan bruto (sebelum pajak)*

Pendapatan Iklan (Rp Miliar)	392,5	550,7	717,2	916,2	1.147,7

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia. Angka pendapatan termasuk pajak.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat untuk meningkatkan pertumbuhan industri bioskop.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada industri bioskop dan film dari berbagai sudut. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan sumber daya pendukung, seperti sumber daya manusia, untuk memperkuat infrastruktur industri bioskop. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan jumlah bioskop dan menopangnya dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan film berkualitas tinggi dengan membangun lebih banyak akademi dan sekolah film. Indonesia juga telah melonggarkan pembatasan untuk memungkinkan investasi langsung asing dalam semua bagian industri film, termasuk layanan teknis, produksi, distribusi, pameran, dan bioskop. Indonesia juga perlu membantu memperkuat kemampuan rumah produksi lokal untuk mengganti dan menarik bakat lulusan masa depan dari akademi, karena kemungkinan rumah produksi asing memiliki sumber daya yang lebih tinggi untuk menarik bakat lokal.

Yang kedua berkaitan dengan pembelian film sebagai bentuk permintaan dari pemerintah. Hal ini juga sejalan untuk membantu mendorong agenda pemerintah. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, anggaran sekitar Rp300 miliar diharapkan dialokasikan untuk pembelian lisensi, produksi, dan promosi 50 film dari berbagai komunitas film di Indonesia. Selain itu, Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Indonesia juga telah menyiapkan dana stimulus sebesar Rp400 juta untuk membuat film pendidikan. Kemendikbud diharapkan menyediakan fasilitas produksi, dengan 10 paket keuangan, masing-masing sebesar Rp40 juta, untuk memberikan insentif bagi sektor kreatif untuk menciptakan film dengan narasi yang menarik, sambil membawa pesan moral.

Yang ketiga berkaitan dengan kehadiran acara internasional untuk meningkatkan profil industri film Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya untuk industri film Indonesia di *Busan International Film Festival*, di mana 20 peserta Indonesia menghadiri Platform Busan. Platform Busan dibuat untuk menyediakan ruang untuk kolaborasi dan berbagi ide dengan Direktorat Film, Musik, dan Media Indonesia.

Keempat, rencana pengembangan infrastruktur pemerintah adalah fasilitator tidak langsung bagi peluang ekspansi bioskop di pasar. Misalnya, ada lebih banyak rencana pengembangan untuk mendukung inisiatif nasional perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Sejalan dengan tren ini, beberapa operator pusat perbelanjaan menargetkan untuk memperluas ke wilayah di luar kota tier 1 ke wilayah di luar Jawa, termasuk pulau Kalimantan di bagian Timur. Ini menawarkan peluang bagi lebih banyak *real estate* untuk dikembangkan yang potensial dapat menampung lebih banyak bioskop.

Pemangku kepentingan industri bekerja sama untuk mendukung pekerja yang terdampak pandemi di industri bioskop.

Inisiatif dari pemangku kepentingan industri sektor publik dan swasta telah membantu mendukung pemulihan industri perfilman lokal Indonesia dari pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan melalui upaya bantuan pasca pandemi, dengan fokus pada mendukung kegiatan pemasaran, termasuk kampanye untuk industri film. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama erat dengan pemain sektor swasta seperti operator bioskop, platform OTT seperti Netflix dan Vidio.com, melalui kampanye promosi dan acara bersama termasuk festival film yang didukung oleh Kementerian di Indonesia. Bahkan, pemangku kepentingan industri sektor swasta juga bergerak untuk mendukung personel yang terkena dampak pandemi COVID-19. Misalnya, Netflix mengumumkan kerja sama dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana sebesar Rp.7,1 miliar. Melalui kerja sama dengan BPI dan dana bantuan, Netflix bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada kru dan pekerja lepas di industri film dan televisi Indonesia yang terdampak negatif oleh pandemi.

4. ANALISIS LANSKAP KOMPETITIF DI INDONESIA

4.1 GAMBARAN UMUM PERSAINGAN PASAR

Pasar bioskop yang sangat terkonsolidasi dengan Cinema XXI yang dominan dalam hal skala.

Industri bioskop Indonesia relatif terkonsolidasi, dengan tiga jaringan bioskop teratas memegang bagian besar pasar dalam hal jumlah bioskop dan layar. Tiga pemain pasar teratas menyumbang lebih dari 90% dari total layar bioskop di pasar pada tahun 2021. Dari ketiga pemain tersebut, Cinema XXI memimpin pasar dengan lebih dari setengah jumlah total layar bioskop, dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan gabungan pangsa pasar empat pemain pasar terbesar lainnya. Khususnya, Cinema XXI adalah pemain terbesar dengan pangsa pasar bruto *box office* sebesar 69,7%, pangsa pasar tiket sebesar 68,8%, dan pangsa pasar layar sebesar 57,7%, pada tahun 2021. Karena sifat pasar yang terkonsolidasi kuat, pemain pasar yang relatif lebih kecil harus menemukan target pasar mereka sendiri untuk bertahan hidup dalam industri bioskop Indonesia. Beberapa pemain pasar menemukan target pasar mereka dengan mengoperasikan bisnis di segmen pelanggan premium atau super premium. Lainnya menargetkan kota-kota tier rendah Indonesia dalam upaya untuk mendapatkan konsumen *long tail.*

F&B, bersama dengan penawaran komplementer lainnya, memberikan pengalaman tambahan bagi konsumen.

Kebanyakan operator jaringan bioskop di Indonesia menjalankan lini bisnis yang komplementer terhadap arus pendapatan inti mereka dari pemutaran film. Hal ini terutama terlihat dalam bentuk penawaran produk gabungan dari film dan F&B. Sebagai contoh, pemimpin pasar dari segi penerimaan pendapatan dan jumlah bioskop yang dioperasikan - Cinema XXI - memiliki penawaran produk F&B yang kuat. Salah satu penawaran F&B-nya - XXI Café - populer di kalangan penonton bioskop dan menawarkan produk yang laris bahkan untuk non-penonton atau konsumsi di luar area. Ini berasal dari popularitas produk popcorn andalannya dan produk croffle yang unik. Sementara itu, pemain pasar lain telah memperluas konsep restoran mereka, yang memungkinkan konsumen menikmati berbagai minuman dan camilan saat menunggu pemutaran film mereka. Ketika kombinasi pemutaran film dan F&B semakin umum, diharapkan lebih banyak bioskop akan memperluas penawaran mereka dan menempatkan beberapa outlet mereka menjadi tempat wisata dengan mengintegrasikan fasilitas olahraga dan pusat hiburan keluarga.

Jaringan industri yang kuat dan pengeluaran modal yang tinggi merupakan hambatan yang kuat untuk memasuki pasar.

Dua hambatan utama menimbulkan hambatan masuk yang kuat bagi calon pendatang baru. Yang pertama berkaitan dengan pengeluaran modal yang sangat besar yang diperlukan untuk ruang bioskop fisik dan sistem operasionalnya seperti tiket. Kedua, dan terkait, hubungan yang kuat yang perlu dibangun dengan pemangku kepentingan utama industri - di sisi pasokan film dan untuk ruang *real*

estate - membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun. Pusat perbelanjaan, tempat bioskop biasanya ditemukan, sering bekerja sama dengan mitra operator bioskop yang kuat. Biasa bagi mereka untuk menjalin kemitraan dengan pemain *real estate* dengan jaringan pusat perbelanjaan yang luas untuk mendapatkan akses ke ruang bioskop. Biasa bagi pemain pasar yang lebih besar untuk mendapatkan akses ke lebih banyak kesempatan ini karena mereka dapat menjalin kesepakatan bagi hasil pendapatan dengan operator atau pengembang pusat perbelanjaan, bukan hanya membayar biaya sewa. Hal ini sangat sulit bagi operator bioskop yang lebih kecil karena mereka harus bersaing dengan jaringan yang lebih besar untuk jumlah terbatas pusat perbelanjaan atau lokasi yang memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah outlet bioskop.

Pemain pasar melakukan inovasi penawaran produk untuk membedakan dari persaingan.

Meskipun industri bioskop Indonesia relatif terkonsolidasi dan didominasi oleh beberapa jaringan bioskop besar, ada beberapa pelaku pasar baru yang mencari untuk memberikan pengalaman menonton film yang berbeda. Hal ini termasuk tindakan seperti menerapkan konsep yang berbeda, yang disebut "*lifestyle cinema*", di mana bioskop dilengkapi dengan desain interior yang *stylish* dan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi konsumen. Orang lain juga menargetkan dan menarik basis konsumen muda dan sadar lingkungan, dengan mempromosikan konsep ramah lingkungan mereka dengan menggunakan sedotan kertas dan operasi *self-service* dalam penawaran produk F&B mereka untuk menurunkan jejak lingkungan mereka. Pelaku pasar utama tidak berdiam diri, namun mengembangkan penawaran layanan mereka untuk terus menarik konsumen. Salah satu contoh inisiatif baru adalah menawarkan penggunaan ruangan pribadi dan eksklusif, di mana konsumen dapat menonton film di ruangan tanpa gangguan dari penonton lain. Tujuannya adalah untuk memberikan paket pengalaman holistik kepada konsumen yang mencakup rasa eksklusivitas dan privasi, kenyamanan maksimal dari perabotan mewah, dan menikmati berbagai camilan.

4.2 PEMAIN UTAMA PASAR

Cinema XXI memimpin pasar bioskop Indonesia dalam berbagai parameter

Cinema XXI memimpin industri bioskop Indonesia berdasarkan berbagai parameter yang dipertimbangkan, termasuk jumlah bioskop dan layar, total pendapatan dan penerimaan *box office*, jumlah pengunjung dan tingkat okupansi, serta pendapatan F&B. Pada tahun 2021, Cinema XXI mencatatkan pendapatan kotor *box office* sebesar Rp920,8 miliar, hampir lima kali lipat dari Rp190,2 miliar yang dicatatkan oleh pemain terbesar kedua, CGV. Cinema XXI juga memiliki jumlah outlet bioskop dan layar terbanyak, yaitu 222 dan 1.206, masing-masing. Baik jumlah bioskop maupun layar Cinema XXI lebih banyak daripada jumlah bioskop dan layar yang dioperasikan oleh empat perusahaan besar lainnya yang digabungkan. Oleh karena itu, Cinema XXI juga memiliki jumlah pengunjung terbanyak per tahun yaitu sebesar 22,3 juta pada tahun 2021, yang sekitar 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan pengunjung pemain terbesar kedua di pasar.

Dalam hal pembelanjaan makanan dan minuman sebagai proporsi dari pendapatan kotor *box office* dan nilai absolutnya, Cinema XXI juga menjadi pemimpin pasar. Cinema XXI mencatatkan hampir setengah dari pengeluaran F&B sebagai proporsi dari total pendapatan kotor *box office* (48,3%) sebesar Rp446 miliar pada tahun 2021, hampir 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemain terbesar kedua, CGV. Cinema XXI memiliki tingkat okupansi tertinggi di antara 5 pemain teratas dan memiliki pendapatan kotor *box office* per layar sekitar 1,6 kali lipat dan pengunjung sekitar 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan CGV pada tahun 2021.

Tabel 19 Peringkat Pasar Operator Bioskop Terkemuka di Indonesia, 2021

Peringkat	Nama Perusahaan	Apakah perusahaan terdaftar (Y/T)	Pendapatan penerimaan dalam miliar Rp (jika perusahaan terdaftar)	Pendapatan F&B (Rp miliar)[16]	Jumlah bioskop Data publik pada Januari 2023	Jumlah Layar Data publik pada Januari 2023
1	Cinema XXI	Y	1.411,8	446,0	222	1.206
2	CGV	Y	284,9	82,5	69	397
3	Cinepolis	T	N.A.	N.A.	59	302
4	New Star Cineplex	T	N.A.	N.A.	27	55
5	Platinum Cineplex	T	N.A.	N.A.	10	44

Sumber: Estimasi Euromonitor dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia

4.3 LIMA BESAR PEMAIN PASAR DARI PERSPEKTIF KONSUMEN

Cinema XXI paling dikenal dan dikunjungi dalam setahun terakhir.

Berdasarkan survei konsumen daring sinema di Indonesia oleh Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, Cinema XXI menikmati pengenalan merek tertinggi di Indonesia. 97% responden menyadari bahwa operator bioskop terbesar di Indonesia adalah Cinema XXI. Diikuti oleh CGV sebesar 75% dan Cinepolis sebesar 56%. Kurang dari setengah (48%) mengenali Platinum Cineplex, sedangkan 27% menyadari Flix yang masih baru. Hampir 80% dari responden juga mengatakan bahwa Cinema XXI adalah merek bioskop pertama yang terlintas dalam pikiran mereka, dengan 18% menanggapinya dengan CGV, dan 4% menyebut merek lain. Dua merek bioskop paling dikenal - Cinema XXI dan CGV - hampir sama dalam hal kesan responden survei. Mereka menganggap bahwa keduanya nyaman, modern, dan aman, hanya saja Cinema XXI juga tampil elegan, sedangkan CGV tampak lebih inovatif. Karena pengenalan merek yang tinggi dan jumlah layar bioskop yang relatif lebih banyak, Cinema XXI dan CGV juga adalah bioskop yang paling banyak digunakan pada tahun 2022. 88% dari responden mengatakan bahwa mereka telah mengunjungi Cinema XXI dalam setahun terakhir,

[16] *Semua referensi untuk pengeluaran/pendapatan F&B adalah berdasarkan bruto (sebelum pajak)*

sedangkan sedikit kurang dari separuh (47%) telah mengunjungi CGV dalam periode yang sama. Hanya 21% yang melaporkan telah mengunjungi Cinepolis, sementara bahkan lebih sedikit yang pergi ke Platinum Cineplex (18,0%) dan Flix (10%).

Sebagian besar bioskop memuaskan konsumen dengan kualitas dan kenyamanan audiovisual.

Dalam hal kepuasan konsumen, berdasarkan survei yang sama[17], sebagian besar responden merasa cukup puas dengan pengalaman mereka dengan operator bioskop teratas. Kebanyakan dari mereka menilai pengalaman mereka sebagai positif atau baik di berbagai faktor, termasuk harga tiket, pengalaman kenyamanan, rentang film yang ditawarkan, harga dan opsi makanan dan minuman, lokasi bioskop, kualitas audio-visual, dan layanan secara keseluruhan. Untuk Cinema XXI, faktor yang paling banyak responden merasa puas (menilai baik atau sangat baik) adalah kualitas audio-visual (97% mengatakan begitu) dan kenyamanan (95%). Dalam hal opsi F&B, 82% responden merasa puas dengan Cinema XXI. Untuk CGV, hal ini terkait dengan layanan secara keseluruhan yang diberikan (95%) dan kualitas audio-visual (94%).

Sebagian besar bioskop mendapatkan skor promotor yang kuat, mengingat tingkat kepuasan positif secara keseluruhan.

Mengingat telah berhasil memuaskan sebagian besar konsumennya operator bioskop teratas di Indonesia memperoleh skor net promoter (selanjutnya disebut "NPS") yang positif. NPS di sini mengacu pada persentase mereka yang memilih 9 dan 10 dari skala 1-10 (promotor), dikurangi persentase mereka yang memilih 1 sampai 6 dari skala yang sama (pengurang). Dari survei yang sama, sebagian besar bioskop mencatat NPS di atas 50[18], kecuali salah satu pemimpin pasar. Sebagian besar responden survei menilai mereka setidaknya 9 pada skala 1-10 dalam hal kesediaan untuk merekomendasikan bioskop tersebut kepada orang lain. Cinema XXI memiliki 63% responden dengan peringkat 9 atau lebih, dibandingkan dengan 53% untuk CGV.

[17] *Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, dengan basis jatuh sendiri. Pertanyaan: Bagaimana Anda akan menggambarkan pengalaman terakhir Anda dengan merek bioskop yang disebutkan sebelumnya?*

[18] *Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, dengan basis jatuh sendiri. Pertanyaan: Seberapa mungkin Anda merekomendasikan merek bioskop yang disebutkan sebelumnya kepada teman atau rekan kerja?*

5. LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh film yang diharapkan hadir untuk 2023-2024 (daftar tidak termasuk semua).



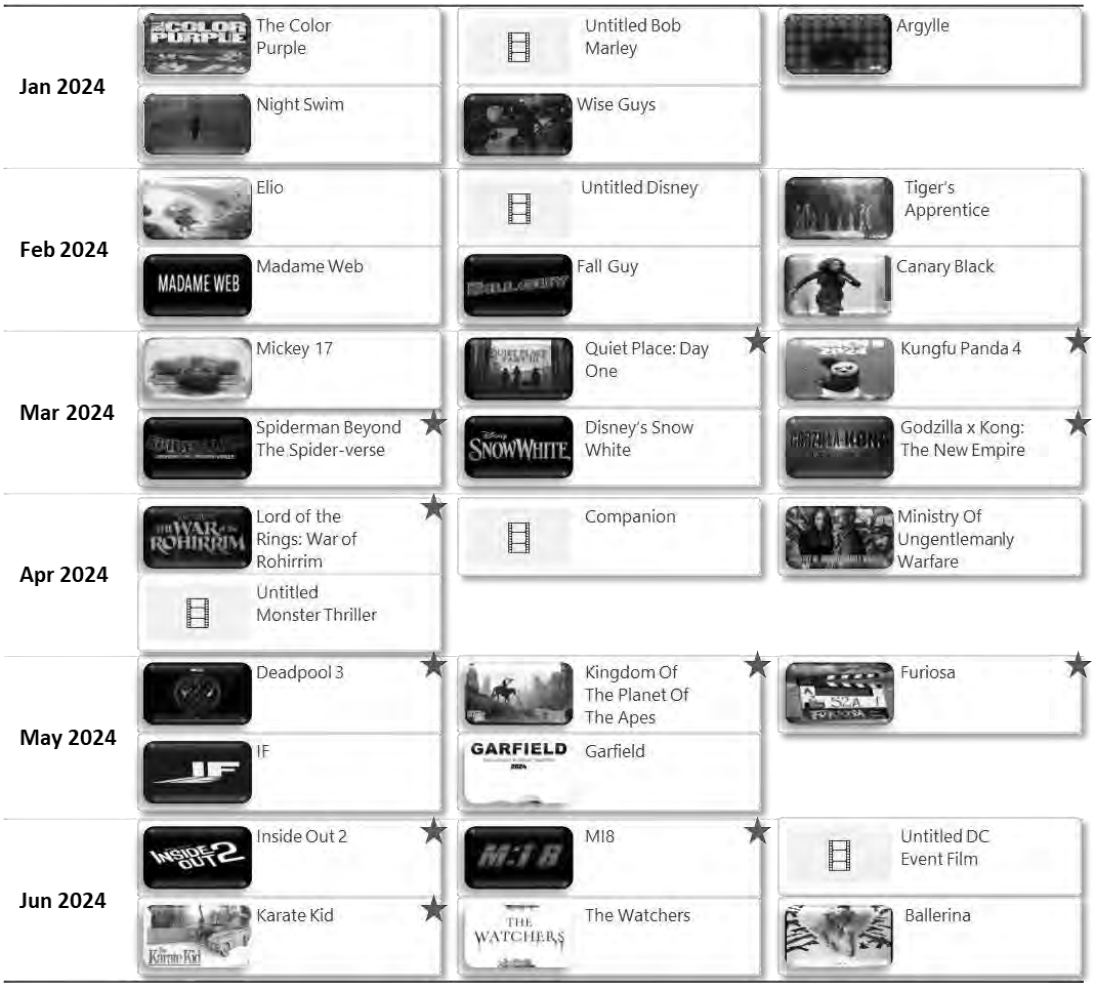
Sumber: Temuan Euromonitor dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia

Deretan film domestik pilihan (2023)

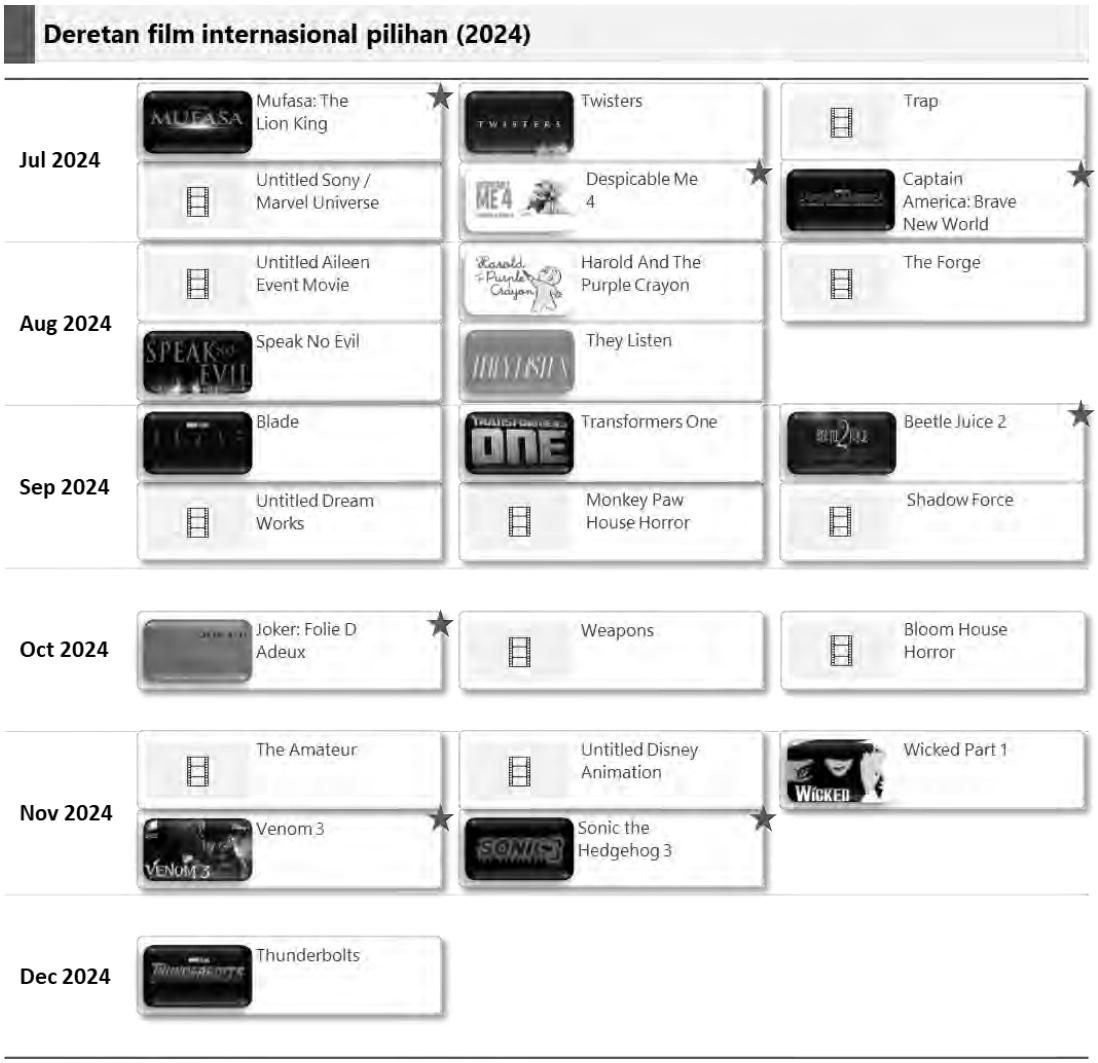
Apr 2023	Sewu Dino	Hati Suhita	Jin & Jun
May 2023	Indigo	24 Jam Bersama Gaspar	Sehidup Semati
Jun 2023	Petualangan Sherina 2 ★	Dilan 1980 ★	Ganjil Genap
Jul 2023	Diambang Kematian	Halo Ibu Apa Kabar?	Bangku Kosong 2 ★
Aug 2023	Gong Nyai Gandrung	Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul	Janji Jiwa
Sep 2023	Catatan si Boy ★	Suzzanna Malam Jumat Kliwon ★	Guna – Guna Istri Muda ★
Oct 2023	Sundel Bolong ★	Suicide Hotline	Dua Hati Biru
Nov 2023	Do You See What I See	Gowok	Shaka Oh Shaka
Dec 2023	Danur 4: Senjakala ★	Catatan Harian Menantu Sinting	Koes Plus

Sumber: Temuan Euromonitor dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia

Deretan film internasional pilihan (2024)



Sumber: Temuan Euromonitor dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia



Catatan: ★ Sekuel film waralaba

Sumber: Temuan Euromonitor dari desk research dan trade interview dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia

Lampiran 2 Film domestik teratas dari 2013 hingga 2022 (berdasarkan tahun rilis)

Top 15 film domestik, 2013

#	Judul	Penonton
1	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck	1,724,110
2	99 Cahaya di Langit Eropa	1,189,709
3	Soekarno: Indonesia Merdeka	960,071
4	Cinta Brontosaurus	892,915
5	Coboy Junior The Movie	683,604
6	Taman Lawang	526,761
7	Manusia Setengah Salmon	442,631
8	Laskar Pelangi 2: Edensor	390,810
9	308	358,507
10	Get M4rried	315,390
11	Refrain	281,922
12	Slank Nggak Ada Matinya	278,244
13	La Tahzan	235,718
14	Sang Kiai	234,207
15	Air Terjun Pengantin Phuket	215,161

Top 15 film domestik, 2014

#	Judul	Penonton
1	Comic 8	1,624,067
2	The Raid 2: Berandal	1,434,272
3	Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar	715,851
4	Hijrah Cinta	711,205
5	Marmut Merah Jambu	640,682
6	99 Cahaya di Langit Eropa Part 2	587,042
7	Assalamualaikum Beijing	560,465
8	Supernova: Ksatria, Putri, & Bintang Jatuh	501,258
9	Bajaj Bajuri The Movie	460,779
10	Haji Backpacker	375,799
11	7/24	374,769
12	Runaway	371,567
13	Mall Klender	334,173
14	Rumah Gurita	319,516
15	Kamar 207	311,469

Top 15 film domestik, 2015

#	Judul	Penonton
1	Surga yang Tak Dirindukan	1,523,790
2	Single	1,351,324
3	Comic 8: Casino Kings part 1	1,211,820
4	Bulan Terbelah di Langit Amerika	917,865
5	Magic Hour	859,705
6	Ngenest	785,786
7	Di Balik 98	684,727
8	3 Dara	666,183
9	Negeri Van Oranje	490,788
10	Air Mata Surga	425,179
11	Tarot	329,258
12	Sunshine Becomes You	321,838
13	Warisan Olga	296,773
14	Komedi Moderen Gokil	296,232
15	Toba Dreams	255,933

Top 15 film domestik,, 2016

#	Judul	Penonton
1	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1	6,858,616
2	Ada Apa Dengan Cinta 2	3,665,509
3	My Stupid Boss	3,052,657
4	Cek Toko Sebelah	2,642,957
5	Hangout	2,620,644
6	{rudy habibie}	2,012,025
7	Koala Kumal	1,863,541
8	Comic 8: Casino Kings Part 2	1,835,644
9	ILY from 38.000 Ft	1,574,576
10	London Love Story	1,124,876
11	Headshot	732,763
12	Sabtu Bersama Bapak	639,530
13	Bulan Terbelah di Langit Amerika 2	582,487
14	Talak 3	567,917
15	The Doll	550,252

Top 15 film domestik, 2017

#	Judul	Penonton
1	Pengabdi Setan	4,206,103
2	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2	4,083,190
3	Ayat Ayat Cinta 2	2,840,159
4	Danur: I Can See Ghosts	2,736,391
5	Jailangkung	2,550,271
6	Susah Sinyal	2,172,512
7	Surga Yang Tak Dirindukan 2	1,637,559
8	Mata Batin	1,282,557
9	The Doll 2	1,226,864
10	Surat Cinta untuk Starla the Movie	1,218,317
11	Sweet 20	1,044,045
12	Critical Eleven	881,530
13	London Love Story 2	862,874
14	Insya Allah Sah	833,010
15	Surat Kecil untuk Tuhan	715,361

Top 15 film domestik, 2018

#	Judul	Penonton
1	Dilan 1990	6,315,664
2	Suzzanna: Bernapas dalam Kubur	3,346,185
3	Danur 2: Maddah	2,572,871
4	Si Doel the Movie	1,757,653
5	Asih	1,714,798
6	#Teman tapi Menikah	1,655,829
7	Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga	1,563,188
8	Wiro Sebleng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212	1,552,014
9	Jailangkung 2	1,498,635
10	A Man Called Ahok	1,465,145
11	Sabrina	1,337,510
12	Kuntilanak	1,236,000
13	Sebelum Iblis Menjemput	1,122,187
14	Eiffel... I'm In Love 2	1,008,392
15	Yowis Ben	935,622

Top 15 film domestik, 2019

#	Judul	Penonton
1	Dilan 1991	5,253,411

Top 15 film domestik, 2020

#	Judul	Penonton
1	Milea: Suara dari Dilan	3,157,817

2	Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan	2,662,356	2	Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini	2,256,908
3	Dua Garis Biru	2,538,473	3	Akhir Kisah Cinta Si Doel	1,155,859
4	Danur 3: Sunyaruri	2,416,691	4	Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2	863,003
5	Habibie & Ainun 3	2,245,576	5	Mangkujiwo	834,806
6	My Stupid Boss 2	1,876,052	6	#Teman Tapi Menikah 2	832,801
7	Perempuan Tanah Jahanam	1,795,068	7	Mariposa	766,429
8	Kuntilanak 2	1,726,570	8	Aku Tahu Kapan Kamu Mati	567,701
9	Keluarga Cemara	1,701,498	9	Rasuk 2	382,765
10	Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot	1,699,433	10	Asih 2	334,282
11	Bumi Manusia	1,316,583	11	Dignitate	236,210
12	Preman Pensiun	1,147,469	12	Toko Barang Mantan	217,818
13	Orang Kaya Baru	1,118,738	13	Janin	183,673
14	Ghost Writer	1,116,676	14	Titus: Mystery of The Enygma	156,738
15	Yowis Ben 2	1,031,856	15	Mangga Muda	112,317

Top 15 film domestik, 2021

#	Judul	Penonton
1	Makmum 2	1,764,372
2	Nussa	446,482
3	Yowis Ben 3	418,526
4	Yowis Ben Finale	369,211
5	Tarian Lengger Maut	222,062
6	Teka-teki Tika	173,017
7	Backstage	138,258
8	Kuyang The Movie	126,108
9	Losmen Bu Broto	120,413
10	Yuni	117,160
11	Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas	85,004
12	Kadet 1947	84,196
13	Paranoia	76,614
14	Pintu Surga Terakhir	43,078
15	Akhirat: A Love Story	41,524

Top 15 film domestik, 2022

#	Judul	Penonton
1	KKN Desa Penari	10,061,033
2	Pengabdi Setan 2: Communion	6,390,970
3	Miracle in Cell No 7	5,860,917
4	Ngeri-ngeri Sedap	2,886,121
5	Ivanna	2,793,775
6	Sayap-Sayap Patah	2,426,084
7	Mencuri Raden Saleh	2,350,741
8	Kukira Kau Rumah	2,220,180
9	The Doll 3	1,764,077
10	Qodrat	1,761,237
11	Jailangkung: Sandekala	1,546,295
12	Qorin	1,330,323
13	Kuntilanak 3	1,313,304
14	Argantara	1,101,359
15	Keramat 2: Caruban Larang	918,099

Sumber: Film Indonesia (per 2 Maret 2023)

Halaman ini sengaja dikosongkan